



Digitalization Through Optimizing Vehicle Ecosystem

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN SERTA SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

INFORMATION PRESENTED IN THE ANNUAL REPORT AND DISCLAIMER

Penyusunan Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, disebut juga "IPCC" atau "Perseroan", tahun 2024 menggunakan referensi dan standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana IPCC berdomisili dan mengembangkan kegiatan operasi dan bisnisnya. Parameter dan kriteria standar mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

The preparation of the 2024 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, hereinafter referred to as "IPCC" or "The Company", is based on applicable references and standards in Indonesia, where IPCC is domiciled and carries out its operational and business activities. The parameters and criteria for these standards refer to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 29/POJK.04/2016 on Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Penyampaian laporan tahunan ini juga mengelaborasi beberapa dokumen Perusahaan, baik itu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Laporan Keuangan teraudit, dan Tingkat Kesehatan Perusahaan. Penggunaan berbagai dokumen ini diharapkan memberikan landasan argumentasi yang kuat dalam menghadirkan informasi dan data yang valid.

This Annual Report also elaborates on several Company documents, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Long-Term Company Plan (RJPP), audited Financial Statements, and the Company Health Level. The use of these documents is expected to provide a solid argument for presenting valid information and data.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perseroan. IPCC tidak dapat menjamin bahwa berbagai dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

This Annual Report contains statements related to the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in compliance with applicable laws. These statements involve risks and uncertainties, and there may be differences from actual developments. Various forward-looking statements in this report are based on assumptions regarding current conditions and projections of future business environments. IPCC cannot guarantee that these validated documents will result in definitive outcomes.

Laporan Tahunan ini memuat kata "IPCC" atau "Perseroan" yang mengacu pada PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama atas pertimbangan kemudahan penyebutan. Untuk dapat meraih pembaca yang lebih beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi korporat yaitu www.indonesiacarterterminal.co.id. Selain itu, laporan ini juga memberikan penanda kinerja untuk mempermudah pembaca dan pengguna laporan.

This Annual Report uses the terms "IPCC" or "The Company" to refer to PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Additionally, the word "We" is also used occasionally for ease of reference. To reach a broader audience and in accordance with applicable regulations, this report is presented in two languages: Indonesian and English. The Annual Report can be viewed and downloaded from the official corporate website at www.indonesiacarterterminal.co.id. Furthermore, the report includes performance markers to make it easier for readers and users.



TEMA SAMPUL

COVER THEME

Digitalization Through Optimizing Vehicle Ecosystem



Tema ini mencerminkan peran strategis IPCC dalam mempercepat transformasi digital guna mengoptimalkan ekosistem kendaraan di seluruh rantai logistik. IPCC berfokus pada penerapan teknologi digital yang mendukung efisiensi operasional, peningkatan transparansi, serta integrasi layanan berbasis data untuk memastikan kelancaran pergerakan kendaraan dari hulu ke hilir. Melalui sistem PTOS-C yang semakin disempurnakan, IPCC mampu menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ekosistem digital yang lebih terstruktur, memungkinkan *monitoring real-time*, optimalisasi kapasitas terminal, serta peningkatan akurasi data logistik. Selain itu, IPCC terus memperluas layanan dengan mengakomodasi tren kendaraan listrik (EV) yang membutuhkan penyesuaian infrastruktur dan pola distribusi baru. Dengan pendekatan digitalisasi ini, IPCC tidak hanya meningkatkan daya saingnya dalam industri pelabuhan dan logistik, tetapi juga memperkuat ekosistem kendaraan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan di Indonesia.

This theme reflects IPCC's strategic role in accelerating digital transformation to optimize the vehicle ecosystem across the logistics chain. IPCC focuses on implementing digital technologies that support operational efficiency, improve transparency, and integrate data-driven services to ensure smooth vehicle movement from upstream to downstream. Through the increasingly enhanced PTOS-C system, IPCC can connect a variety of stakeholders within a more structured digital ecosystem, enabling real-time monitoring, terminal capacity optimization, and improved logistics data accuracy. In addition, IPCC continues to expand its services by accommodating the electric vehicle (EV) trend, which requires infrastructure adjustments and new distribution patterns. Through this digitalization approach, IPCC is not only strengthening its competitiveness in the port and logistics industry but also fortifies a more efficient, integrated, and sustainable vehicle ecosystem in Indonesia.



KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY

2023



Membangun Kemitraan dan Ekspansi Wilayah Bisnis

Enhancement & Expansion

IPCC berupaya merespon potensi dan tantangan yang muncul di sepanjang tahun 2023 dengan tujuan menciptakan operasional yang unggul, layanan yang prima, kinerja keuangan yang solid, dan nilai tambah bagi pemegang saham. Kerja sama dengan prinsipal yang terus terbangun di sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu capaian penting, hal ini menunjukkan kepercayaan pelanggan dan pengalaman pelanggan atas produk dan layanan yang diberikan IPCC. Di samping itu, ekspansi IPCC atas Terminal Satelit Balikpapan di tahun 2023 menjadi hal positif yang akan memberikan tambahan cakupan jaringan konektivitas terminal kendaraan yang dikelola Perusahaan.

Tema "Membangun Kemitraan dan Ekspansi Wilayah Bisnis" berupaya menekankan berbagai upaya yang dilakukan IPCC untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terutama dengan pembukuan laba dengan kenaikan yang cukup baik, hal ini tentu menjadi faktor fundamental bagi pemegang saham dalam menilai prospek IPCC ke depan.

IPCC seeks to respond to the potential and challenges that arise throughout 2023 with the aim of creating superior operations, excellent service, solid financial performance and added value for shareholders. Collaboration with principals that continues to be built throughout 2023 is one of the important achievements, this shows customer trust and customer experience with the products and services provided by IPCC. In addition, IPCC's expansion of the Balikpapan Satellite Terminal in 2023 is a positive thing that will provide additional coverage for the vehicle terminal connectivity network managed by the Company.

The theme "Enhancement & Expansion" seeks to emphasize the various efforts made by the IPCC to realize sustainable growth. Especially with recorded profits with a fairly good increase, this is certainly a fundamental factor for shareholders in assessing IPCC's future prospects.

2022



Komitmen untuk Menjaga Keunggulan Bisnis dan Operasional

Commitment to Maintain Business and Operational Excellence

Pada tahun 2022, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan" atau "IPCC") berhasil melanjutkan turnaround pertumbuhan kinerja yang positif, ditopang oleh perkembangan yang terus membaik pada industri otomotif, pertambangan dan aktivitas logistik. Pencapaian positif ini diyakini akan semakin memantapkan posisi Perseroan dalam merealisasikan visinya "menjadi Pengelola Ekosistem Terminal Kendaraan Berkelas Dunia". Untuk menjaga stabilitas bisnis, Perseroan telah berinvestasi pada berbagai aspek untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional pelayanan secara fisik serta memastikan tersedianya sistem digitalisasi dalam rangka mempercepat proses bisnis sehingga pemberian layanan kepada para mitra pun dapat berjalan efektif. Dengan menerapkan berbagai inisiatif strategis, Perseroan optimis dapat meraih pertumbuhan kinerja unggul yang berkelanjutan secara konsisten.

In 2022, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("the Company" or "IPCC") has succeeded in continuing its turnaround in positive performance growth, supported by developments that continue to improve in the automotive industry, mining and logistics activities. This positive achievement is believed to further strengthen the Company's position in realizing its vision of "becoming a World-Class Car Terminal Ecosystem Manager". To maintain business stability, the Company has invested in various aspects to guarantee the smooth operation of services in person, as well as ensuring the availability of a digitized system in order to accelerate business processes, to ensure that the provision of services to partners can run effectively. By implementing a variety of strategic initiative, the Company is optimistic that it will be able to consistently achieve superior performance growth.



2021



Memperkuat Digitalisasi untuk Mewujudkan Strategi Pengembangan Bisnis yang Terintegrasi

Strengthening Digitalization upon Realizing an Integrated Business Development Strategies

Sebagai salah satu operator terminal khusus kendaraan di Indonesia, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan atau IPCC") berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang dimiliki untuk mewujudkan hadirnya terminal kendaraan yang berdaya saing tinggi. Pengembangan atas strategi bisnis terus dikaji agar pelayanan yang disediakan Perseroan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Tahun 2021, Perseroan menegajawantahkan komitmen tersebut dengan memperkuat digitalisasi untuk mempercepat proses bisnis sehingga pemberian layanan kepada para mitra pun dapat berjalan efektif. Didukung oleh performa yang menjanjikan di tengah tantangan industri dan makroekonomi, serta sinergi grup yang terjalin bersama Pelindo Group, Perseroan optimis dapat meraih pertumbuhan yang berkelanjutan secara konsisten sehingga turut berkontribusi dalam mendorong tumbuhnya ekosistem maritim logistik yang terintegrasi dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

As one of Terminal Operators specialized in car in Indonesia, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company or IPCC") has committed to continuously improve its services and facilities to be a highly competitive car terminal. The development of business strategies continues to be reviewed that the services provided by the Company are able to meet the market needs. In 2021, the Company embodied the commitment through strengthening digitalization to accelerate business processes that the service provided delivered effectively to partners. Driven by promising performances in the midst of industry and macroeconomic challenges, as well as a good synergy of the Pelindo Group, the Company optimist to achieve a consistent sustainable growth that will contribute to encouraging the growth of an integrated maritime logistics ecosystem and have positive impacts on the Indonesian economy as a whole.





DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

3	Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Tahunan Serta Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab Information Presented In The Annual Report And Disclaimer	108	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
4	Tema Sampul Cover Theme	116	Profil Direksi Board of Directors Profile
6	Kesinambungan Tema Theme Continuity	124	Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers Profile
8	Daftar Isi Table Of Contents	134	Demografi Karyawan Employee Demographics
10	Mengembangkan Konektivitas Dalam Jaringan Kepelabuhanan Nasional Developing Connectivity In The National Port Network	138	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition Of Shareholders
11	Sekilas Tentang IPCC About IPCC	143	Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama Name Of Subsidiaries, Associates, Joint Venture Company
12	Pencapaian 2024 2024 Achievements	144	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure
14	Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2024 Best Achievement In Corporate Governance Implementation In 2024	145	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology Of Share Issuance and/or Listing
01	Performa 2024 2024 Performance	146	Kronologi Penerbitan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Issuance
18	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	146	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accounting Firm
23	Ikhtisar Operasi Dan Usaha Operational and Business Highlights	147	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Institutions and/or Supporting Professionals
25	Ikhtisar Organisasi Organization Highlights	148	Informasi Pada Website Perusahaan Information on The Company Website
26	Ikhtisar Saham Shares Highlights		
29	Penghargaan Dan Sertifikasi Awards and Certifications	04	Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function
33	Kilas Peristiwa 2024 2024 Event Highlights	154	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Capital Management
02	Laporan Manajemen Management Report	170	Teknologi Informasi Information Technology
38	Laporan Dewan Komisaris Board Of Commissioners' Report		
50	Laporan Direksi Board of Directors Report	05	Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis
70	Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Statement Of Board Of Commissioners On Accountability For The Annual Report Of Fiscal Year 2024 Of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	196	Tinjauan Perekonomian Dan Industri Economic And Industrial Overview
71	Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Statement Of Board Of Directors On Accountability For The Annual Report Of Fiscal Year 2024 Of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	197	Kebijakan Strategis Tahun 2024 Strategic Policies 2024
03	Profile Perusahaan Company Profile	198	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Overview By Business Segment
74	Informasi Umum Perusahaan General Information About The Company	215	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
77	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History Of The Company	219	Teknologi Technology
81	Jejak Langkah Milestones	220	Penelitian dan Pengembangan Research and Development
83	Identitas 3 Logo Perusahaan Company Identity and Logo	220	Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis
85	Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Values	221	Laporan Posisi Keuangan Statement Of Financial Position
92	Kegiatan Usaha Business Activities	222	Aset Assets
102	Wilayah Operasional Operational Area	223	Aset Lancar Current Assets
104	Struktur Organisasi Perusahaan Organizational Structure of the Company	224	Aset Tidak Lancar Non-Current Assets
106	Keanggotaan Pada Asosiasi Industri Membership In Industry Associations	225	Liabilitas Liabilities Assets
		227	Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities
		229	Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities
		230	Ekuitas Equity
		231	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
		238	Laporan Arus Kas Statement Of Cash Flows



243	Profitabilitas dan Kemampuan Perusahaan dalam Menghasilkan Keuntungan Profitability and Ability To Generate Profit	348	Komisaris Independen Independent Commissioner
244	Kemampuan Membayar Utang Ability To Pay Debt		Transparansi Informasi Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris
246	Rata-Rata Kolektibilitas Piutang Usaha atau Perputaran Piutang Usaha Average Trade Receivables Collectibility or Trade Receivables Turnover	350	Transparency of Information About Board of Directors And Board of Commissioners
248	Struktur Modal Perusahaan dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Capital Structure of The Company and Management Policy on Capital Structure	380	Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs
249	Investasi Barang Modal Capital Expenditures	410	Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Organs
250	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to The Accountant's Report Date	415	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
251	Pencapaian Target Tahun 2024 Target Achievement In 2024	421	Audit Internal Internal Audit
252	Tingkat Kesehatan Perusahaan Soundness Level Of The Company	432	Akuntan Publik Public Accountant
253	Key Performance Indicator (KPI)	435	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
256	Kebijakan Dividen Dan Pembagiannya Dividend Policy And The Distribution	445	Manajemen Risiko Risk Management
258	Kontribusi Kepada Negara Contribution To The Nation	453	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System
260	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Utang dan/atau Modal Material Information On Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, Debt And/Or Capital Restructuring	476	Perkara Hukum Yang Berdampak Material yang Dihadapi Oleh Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Legal Cases With Material Impact Faced By the Company, Subsidiaries, Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners
260	Informasi Tentang Tambahan Penanaman Modal Negara (PMN) dan Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain Information On Additional State Capital Investment (PMN) And National Strategic Projects Or Other Assignments	478	Transparansi Kondisi Keuangan Transparency of Financial Conditions
260	Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Information on The Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings	480	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data
262	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi Information On Material Transaction Containing Conflicts of Interest And/Or Transactions With Affiliated Parties/Related Parties	484	Kode Etik Code of Conduct
267	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	493	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen Dan/Atau Karyawan Policy On Long-Term Performance-Based Compensation to Management and/or Employees
267	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan Amendment Of Law and Regulations Affecting The Company	493	Informasi Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Information on Share Ownership of Members of Board of Directors and Board of Commissioners
267	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Amendment of Accounting Policies and Its Impact On The Company	494	Kebijakan Terkait Perencanaan Atas Suksesi Anggota Direksi dan Manajemen Kunci Policy on Succession Planning For Board of Directors and Key Management
269	Prospek Usaha Tahun 2025 Business Prospects For 2025	495	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System
270	Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2025 Company Strategic Plan and Performance Projection For 2025	501	Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services
272	Peta Jalan Usaha 2021-2025 Business Roadmap 2021-2025	506	Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi Anti-Corruption and Anti-Gratification Policy
06	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	511	Kebijakan Untuk Mencegah Terjadinya Insider Trading Policy To Prevent Insider Trading
276	Governance Outcome: Pencapaian Terbaik Penerapan Gcg 2024 Governance Outcome: Best Achievements Of Gcg Implementation In 2024	513	Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Implementation Of State Official Wealth Reporting (LHKPN)
277	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan Commitment to The Implementation of Sustainable Corporate Governance	514	Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik Donation To Political Activity
280	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan Sustainable Implementation of Corporate Governance	514	Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi Dan Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan Policy For Dismissal Of Board Of Directors And Board Of Commissioners If Engaged In Financial Crimes
292	Struktur Organ GCG Dan Mekanisme Hubungan antar Organ GCG Organ Structure And Inter-Organ Relationship Mechanism	515	Transparansi Praktik Bad Governance Transparency On Bad Governance Practices
297	Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders And General Meeting Of Shareholders	07	Laporan Keuangan Financial Statements
319	Direksi Board Of Directors	616	REFERENSI SILANG SEOJK NO. 16 /SEOJK.04/2021: BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK CROSS-REFERENCE NO. 16/SEOJK.04/2021: FORMAT AND COMPLETING THE ANNUAL REPORT OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES
333	Dewan Komisaris Board of Commissioners		

MENGEMBANGKAN KONEKTIVITAS DALAM JARINGAN KEPELABUHANAN NASIONAL

DEVELOPING CONNECTIVITY IN THE NATIONAL PORT NETWORK



IPCC telah menjadi bagian dari perkembangan Pelindo dalam mengembangkan konektivitas jaringan kepelabuhanan nasional, khususnya dalam pengelolaan terminal kendaraan.

IPCC has become part of Pelindo's development in enhancing the connectivity of the national port network, particularly in vehicle terminal management.



SEKILAS TENTANG IPCC

ABOUT IPCC



PENCAPAIAN 2024

2024 ACHIEVEMENTS



Pertumbuhan berkelanjutan menjadi komitmen IPCC untuk terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Sustainable growth is IPCC's commitment to continually providing added value for shareholders and all stakeholders.



Bongkar Muat Mobil
Car Loading and Unloading

855.594 unit

Meningkat 7,33% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 797.137 unit.
Increased by 7.33% compared to the previous year of 797,137 units.



Bongkar Muat Kendaraan Berat
Heavy Vehicle Loading and Unloading

8.540.377 m³

Peningkatan hingga 63,19% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.233.537 m³.
An increase of 63.19% compared to the previous year of 5,233,537 m³.



Bongkar Muat Sparepart
Sparepart loading and unloading

61.651 PKGS

Meningkat 8,41% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 56.866 PKGS.
Increased 8.41% compared to the previous year of 56,866 PKGS.



Bongkar Muat Motor
Motorcycle Loading and Unloading

333.138 unit

Tumbuh 11,19% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp190,85 miliar.
An increase of 5.59% compared to the previous year of 315,513 units.



Jumlah Pendapatan Operasi
Total Operating Revenue

Rp824,60 miliar | billion

Meningkat 12,16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp735,20 miliar.
Increased 12.16% compared to the previous year of Rp735.20 billion.



Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp212,22 miliar | billion

Tumbuh 11,19% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp190,85 miliar.
Grew 11.19% compared to the previous year of Rp190.85 billion.



Laba per Saham
Earnings per Share

Rp116,71 per saham

Tumbuh 11,19% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp104,96 per saham.
Grew 11.19% compared to the previous year at Rp104.96 per share.



Jumlah Aset
Total Assets

Rp1,85 triliun | trillion

Meningkat 3,49% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,79 triliun.
Increased by 3.49% compared to the previous year amounting to Rp1.79 trillion.





Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Rp573,51 miliar

Meningkat 1,43% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp565,45 miliar disebabkan penerapan PSAK 73 (*debt free company*).
Increased by 1.43% compared to the previous year of Rp565.45 billion due to the implementation of PSAK 73 (*debt free company*).



Jumlah Ekuitas Total Equity

Rp1,28 triliun | trillion

Peningkatan 4,45% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,22 triliun.
An increase of 4.45% compared to the previous year amounting to Rp1.22 trillion.



Saldo Kas dan Setara Kas Cash Balance and Cash Equivalents

Rp810,40 miliar | billion

Tumbuh 20,92% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp670,18 miliar.
Cash Balance and Cash Equivalents Grew 20.92% compared to the previous year amounting to Rp670.18 billion



Rasio Kas Cash Ratio

4,37 kali | times

Membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 46,24 kali.
Membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 46,24 kali.



Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity

16,62%

Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15,61%.
Increased compared to the previous year of 15.61%.



Imbal Hasil Aset Return on Assets

11,47%

Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,67%.
Improved compared to the previous year of 10.67%.



Rasio Liabilitas terhadap Aset Debt to Asset Ratio

30.99 kali | times

Membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 31,62 kali.
Improved compared to the previous year of 31.62 times.



Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio

44,90 kali | times

Membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 46,24 kali.
Improved compared to the previous year of 46.24 times.



PENCAPAIAN TERBAIK PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2024

BEST ACHIEVEMENT IN CORPORATE
GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2024



IPCC mencatatkan prestasi terbaik dalam penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan GRC. Hal ini dapat menjadi cerminan atas upaya kuat IPCC dalam mengimplementasikan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas (ITA) dalam aktivitas bisnis dan operasional sehari-hari.

IPCC recorded its best achievement in implementing corporate governance, risk management, and GRC compliance. This reflects IPCC's strong efforts to implement the principles of integrity, transparency, and accountability (ITA) in daily business and operational activities.

Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard
ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment

110,52 point

“Excellent”

**“Leadership in Corporate Governance”
(ASEAN Asset Class)**

Skor Risk Management
Index (RMI) 2024

3,09
Managed

Penghargaan | Award
ASEAN GRC AWARD 2024
RUNNER UP



Penyelenggara | Organizer:
ERMA (Enterprise Risk Management
Academy)

Skor GRC 2024

2,6
Managed





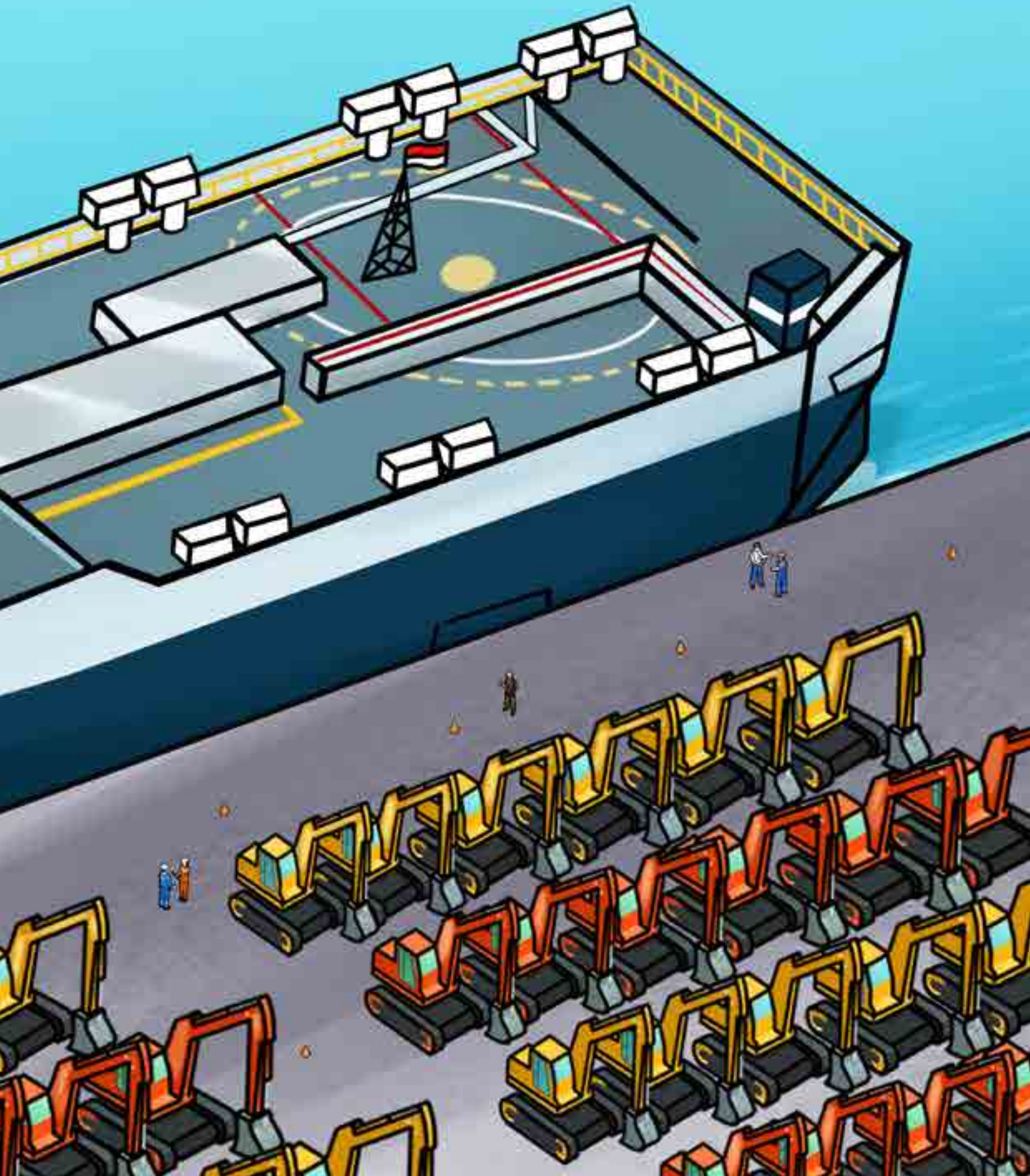
Performa 2024

2024 Performance

Keberhasilan IPCC dalam menjaga operasi yang unggul terlihat dari meningkatnya volume bongkar muat, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan yang terus menguat.

IPCC's success in maintaining excellent operations is evident from the increased loading and unloading volume, which ultimately has a positive impact on its continuously strengthening financial performance.





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

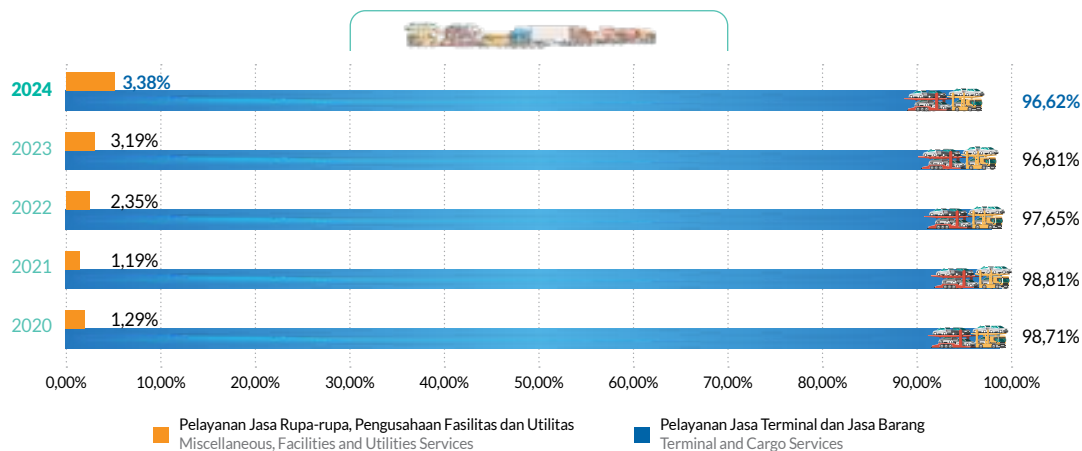
LABA (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In Millions of Rupiah, unless otherwise stated	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023- 2024 (%)	CAGR 2020- 2024 (%)
Pendapatan Operasi Operating Revenue							
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal and Cargo Services	796.750	711.763	709.507	510.701	351.937	11,94 ↑	22,66 ↑
Pelayanan Jasa Rupa-rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	27.846	23.442	17.066	6.136	4.595	18,79 ↑	56,90 ↑
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenue	824.596	735.205	726.573	516.837	356.532	12,16 ↑	23,32 ↑
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(477.079)	(408.728)	(379.727)	(318.590)	(280.822)	16,72 ↑	14,17 ↑
Laba Bruto Gross Profit	347.517	326.477	346.847	198.247	75.711	6,44 ↑	46,37 ↑
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(89.424)	(76.343)	(88.904)	(69.638)	(86.230)	17,13 ↑	0,91 ↑
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya Other Operating Income (Expenses)	(1.504)	(4.926)	(12.886)	(15.481)	(7.262)	(69,47) ↓	(32,54) ↓
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	256.589	245.208	245.057	113.128	(17.782)	4,64 ↑	N/a
Pendapatan (Beban) Keuangan Financial Income (Expenses)	13.257	(8.388)	(32.070)	(31.887)	(18.848)	(258,05) ↓	N/a
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit (Loss) Before Corporate Income Tax	269.846	236.820	212.987	81.241	(36.630)	13,95 ↑	N/a
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)	(57.630)	(45.966)	(51.262)	(21.185)	12.857	25,38 ↑	N/a
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	212.216	190.855	161.725	60.056	(23.773)	11,19 ↑	N/a
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Total Comprehensive Income	212.216	190.855	161.725	60.056	(23.773)	11,19 ↑	N/a
Laba per Saham (Rupiah penuh) Earnings per Share (full Rupiah)	116,71	104,96	88,94	33,03	(13,07)	11,19 ↑	N/a



Komposisi Pendapatan per Segmen

Composition of Revenue per Segment



Pendapatan

Revenue

(Rp-juta)
(Rp-million)

2020	356.532
2021	516.837
2022	726.573
2023	735.205
2024	824.596

Laba (Rugi) Usaha

Operating Profit (Loss)

(Rp-juta)
(Rp-million)

2020	(17.782)
2021	113.128
2022	245.057
2023	245.208
2024	256.589

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Profit (Loss) for the Year

(Rp-juta)
(Rp-million)

2020	(23.773)
2021	60.056
2022	161.725
2023	190.855
2024	212.216

Laba (Rugi) per Saham

Earnings per Share

(Rupiah penuh)
(full Rupiah)

2020	(13.07)
2021	33.03
2022	88.94
2023	104.96
2024	116.71

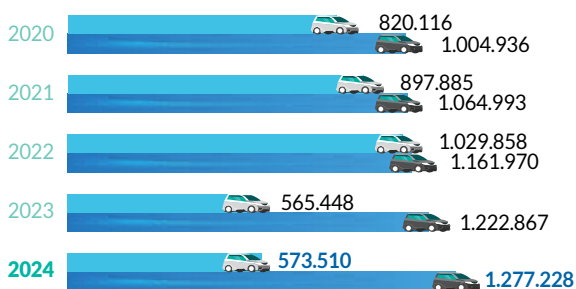
Posisi Keuangan Financial Position

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In Millions of Rupiah, unless otherwise stated	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Aset Assets							
Aset Lancar Current Assets							
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	810.397	670.182	1.019.761	768.869	519.656	20,92 ↑	11,75 ↑
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	91.038	88.940	76.216	58.076	80.305	2,36 ↑	3,19 ↑
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	901.435	759.122	1.095.977	826.945	599.961	18,75 ↑	10,71 ↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets							
Aset Tetap – Neto Fixed Assets - Net	348.651	359.356	362.665	368.232	355.032	(2,98) ↓	(0,45) ↓
Aset Hak Guna – Neto Right-of-Use Assets - Net	536.361	606.287	675.417	718.287	793.122	(11,53) ↓	(9,32) ↓
Aset Tidak lancar Lainnya Other Non-Current Assets	64.291	63.549	57.769	49.413	76.937	1,17 ↑	(4,39) ↓
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	949.303	1.029.192	1.095.851	1.135.932	1.225.091	(7,76) ↓	(6,18) ↓
Jumlah Aset Total Assets	1.850.738	1.788.314	2.191.828	1.962.878	1.825.053	3,49 ↑	0,35 ↑
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Liabilities							
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	185.272	205.968	634.871	171.289	134.866	(10,05) ↓	8,26 ↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	388.238	359.480	394.987	726.596	685.250	8,00 ↑	(13,24) ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	573.510	565.448	1.029.858	897.885	820.116	1,43 ↑	(8,55) ↓
Ekuitas Equity							
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.277.228	1.222.867	1.161.970	1.064.993	1.004.936	4,45 ↑	6,18 ↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.850.738	1.788.315	2.191.828	1.962.878	1.825.053	3,49 ↑	0,35 ↑

Jumlah Aset Total Assets

(Rp-juta)
(Rp-million)


Liabilitas dan Ekuitas Operating Profit (Loss)

(Rp-juta)
(Rp-million)

Liabilitas
Liability

Ekuitas
Equity


Arus Kas

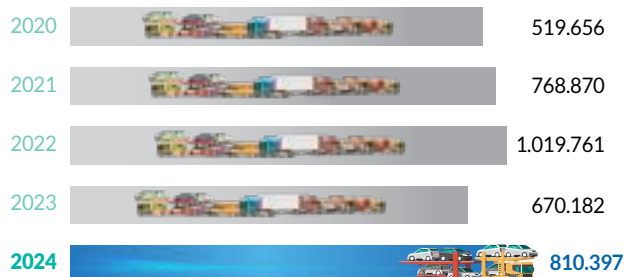
Cash Flows

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In Millions of Rupiah, unless otherwise stated	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow from (for) Operating Activities	380.190	249.113	343.943	305.237	159.011	52,62 ↑	24,35 ↑
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flow from (for) Investing Activities	(24.866)	(27.239)	(32.880)	(44.642)	(18.862)	(8,71) ↓	7,15 ↑
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow from (for) Financing Activities	(215.108)	(571.453)	(60.172)	(11.381)	(112.040)	(62,36) ↓	17,71 ↑
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	140.216	(349.579)	250.891	249.214	28.109	(140,11) ↓	49,45 ↑
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at Beginning of the Year	670.182	1.019.761	768.870	519.656	491.547	(34,28) ↓	8,06 ↑
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at End of the Year	810.398	670.182	1.019.761	768.870	519.656	20,92 ↑	11,75 ↑

Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun

Cash and Cash Equivalents at End of the Year

(Rp-juta)
(Rp-million)



Rasio-rasio Keuangan

Financial Ratios

Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024 (%)
Profitabilitas Profitability							
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	%	42,14	44,41	47,74	38,36	21,24	(2,26) ↓
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	%	31,12	33,35	33,73	21,89	(4,99)	(2,24) ↓
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	25,74	25,96	22,26	11,62	(6,67)	(0,22) ↓
Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity	%	16,62	15,61	13,92	5,80	(2,36)	1,01 ↑
Imbal Hasil Aset Return on Assets	%	11,47	10,67	7,38	3,06	(1,30)	0,79 ↑
Pertumbuhan Growth							
Pendapatan Operasi Operating Revenue	%	12,16	1,19	40,58	44,96	(31,86)	10,97 ↑
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	%	16,72	7,64	19,19	13,45	(8,10)	9,09 ↑



Rasio-rasio Keuangan

Financial Ratios

Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024 (%)	
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	%	17,13	(14,13)	27,67	161,85	(65,21)	31,26	↑
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	%	11,19	18,01	169,29	(352,62)	(117,57)	(6,82)	↓
Aset Assets	%	3,49	(18,41)	11,66	7,55	44,29	21,90	↑
Liabilitas Liabilities	%	1,43	(45,09)	14,70	9,48	328,04	46,52	↑
Ekuitas Equity	%	4,45	5,24	9,11	5,98	(6,37)	(0,79)	↓
Likuiditas Liquidity								
Rasio Kas Cash Ratio	kali times	4,37	3,25	1,61	4,49	3,85	1,12	↑
Rasio Cepat Quick Ratio	kali times	4,87	3,69	1,73	4,83	4,45	1,18	↑
Rasio Lancar Current Ratio	kali times	4,87	3,69	1,73	4,83	4,45	1,18	↑
Solvabilitas Solvency								
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset Debt to Asset Ratio	kali times	30,99	31,62	46,99	45,74	44,94	(0,63)	↓
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas Debt to Equity Ratio	kali times	44,90	46,24	88,63	84,31	81,61	(1,34)	↓
Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility								
Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility	kali times	11,66	11,59	12,38	8,82	4,75	0,07	↑
Rata-Rata Hari Kolektibilitas Piutang Average Days of Receivables Collectibility	hari days	31,32	31,48	29,49	41,38	76,77	(0,16)	↓



IKHTISAR OPERASI DAN USAHA

OPERATIONAL AND BUSINESS HIGHLIGHTS

Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023- 2024 (%)	CAGR 2020- 2024 (%)
Jasa Terminal Terminal Services								
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	unit	855.594	797.137	746.064	522.917	402.969	7,33 ↑	20,71 ↑
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/Buses)	unit	198.897	122.189	114.354	51.127	66.725	62,78 ↑	31,40 ↑
	m3	8.540.377	5.233.537	5.281.244	2.902.116	1.243.036	63,19 ↑	61,90 ↑
Suku Cadang Sparepart	PKGS	61.651	56.866	13.642	18.445	14.606	8,41 ↑	43,33 ↑
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading and Unloading	unit	333.138	315.513	306.695	78.932	24.098	5,59 ↑	92,82 ↑
Jasa Barang Cargo Services								
Impor Import								
Mobil Car	unit	80.272	70.167	69.706	47.010	33.231	14,40 ↑	24,67 ↑
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/Buses)	unit	7.917	9.965	13.056	10.023	3.578	(20,55) ↓	21,96 ↑
	m3	718.483	910.972	1.202.579	868.922	255.624	(21,13) ↓	29,48 ↑
Suku Cadang Sparepart	PKGS	5.315	7.071	9.494	10.343	5.520	(24,83) ↓	(0,94) ↓
	m3	54.635	51.984	42.232	42.645	21.806	5,10 ↑	25,81 ↑
Ekspor Export								
Mobil Car	unit	359.688	380.872	367.488	290.276	230.760	(5,56) ↓	11,74 ↑
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/Buses)	unit	2.838	2.725	3.137	5.440	6.278	4,15 ↑	(18,00) ↓
	m3	240.889	220.110	212.100	329.511	241.828	9,44 ↑	(0,10) ↓
Suku Cadang Sparepart	PKGS	1.791	2.096	3.723	6.435	4.009	(14,55) ↓	(18,24) ↓
	m3	28.849	21.313	33.647,22	37.706	26.626	35,36 ↑	2,02 ↑
Jasa Barang Berdasarkan Pelanggan Dalam Negeri Cargo Services Based on Domestic Trading								
Bongkar Unloading								
Mobil Car	unit	10.035	180.808	147.999	14.410	13.410	(94,45) ↓	(6,99) ↓
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/Buses)	unit	15.096	52.841	45.044	11.586	23.701	(71,43) ↓	(10,66) ↓
	m3	571.621	1.984.515	1.702.134	510.836	176.416	(71,20) ↓	34,17 ↑
Suku Cadang Sparepart	PKGS	1.010	46.610	418	224	216	(97,83) ↓	47,05 ↑
	m3	3.177	59.401	2.198	2.527	2.065	(94,65) ↓	11,37 ↑
Motor Motorcycle	unit	2.767	213.459	192.033	27.263	2.278	(98,70) ↓	4,98 ↑



Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023- 2024 (%)	CAGR 2020- 2024 (%)
Muat Loading								
Mobil Car	unit	129.811	165.290	160.871	171.221	125.568	(21,46) ↓	0,83 ↑
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/Buses)	unit	24.204	56.658	53.117	24.078	33.168	(57,28) ↓	(7,57) ↓
	m3	1.022.960	2.117.940	2.164.431	1.192.846	569.172	(51,70) ↓	15,79 ↑
Suku Cadang Sparepart	PKGS	306	1.089	398	1.443	4.861	(71,90) ↓	(49,91) ↓
	m3	6.985	12.890	14.856	22.869	12.304	(45,81) ↓	(13,20) ↓
Motor Motorcycle	unit	79.376	102.054	114.271	51.669	21.820	(22,22) ↓	38,10 ↑
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik Land, Building, Water, and Electricity Services								
Sewa Ruangan Kantor Office Rent Services	m3	257	254	269	236	236	1,18 ↑	2,15 ↑



IKHTISAR ORGANISASI

ORGANIZATION HIGHLIGHTS

Perihal Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Jumlah Karyawan Number of Employees						
Karyawan Tetap (Orang) Permanent Employees (People)	78	85	75	70	71	(8,24) ↓
Karyawan Kontrak (Orang) Contract Employees (People)	2	1	3	2	2	100,00 ↑
Karyawan Alihdaya (Orang) Outsourced Employees (People)	338	349	340	324	310	(3,15) ↓
Jumlah Total	418	435	418	396	383	(3,91) ↓
Penilaian Penerapan Sistem Pengendalian Internal (skor) Internal Control System Assessment (score)	85,80	88,82	88,82	84,27	N/A	
Penilaian Penerapan GCG GCG Assessment						
Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) (skor)* ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Assessment (score)*	110,52	107,26	93,21	83,55	79,69	

*) Perangkat dan metode evaluasi dan assessment atas penerapan GCG menggunakan basis ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

*) Evaluation and assessment tools and methods for GCG implementation use the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) basis.



IKHTISAR SAHAM

SHARES HIGHLIGHTS

Kode Saham:
IPCC
Stock Code:
IPCC

“Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan resmi memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.”
“On July 9, 2018, the Company officially traded its shares on the Indonesia Stock Exchange.”

Sekilas Kinerja Saham IPCC Periode 2020-2024

IPCC Stock Performance Overview for 2020-2024 Period

Perihal Description	2024	2023	2022	2021	2020
Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) Purchase Price (Rp/share)	715	570	515	530	685
Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) Highest Price (Per share)	765	865	675	900	695
Harga Terendah (Rp/lembar saham) Lowest Price (Rp/share)	600	530	470	472	226
Harga Penutupan (Rp/lembar saham) Closing Price (Rp/share)	705	715	570	515	530
Jumlah Saham Beredar (juta lembar saham) Number of Shares Outstanding (million shares)	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820
Bursa Saham Stock Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange				

Informasi Perdagangan Saham IPCC Periode 2020-2024

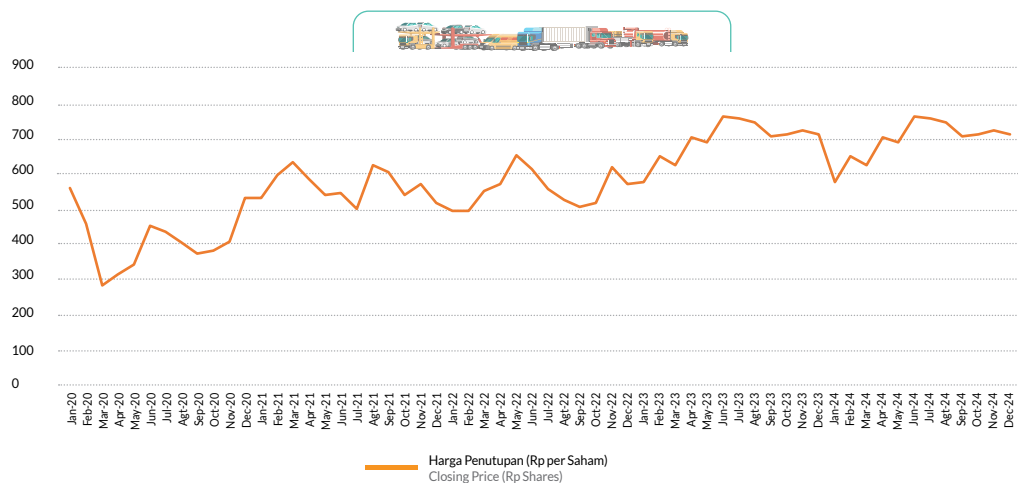
IPCC Stock Trading Information for 2020-2024 Period

Periode Period	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Number of Shares Outstanding (shares)	Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) Opening Price (Rp/share)	Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) Highest Price (Rp/share)	Harga Terendah (Rp/lembar saham) Lowest Price (Rp/share)	Harga Penutupan (Rp/lembar saham) Closing Price (Rp/share)	Volume Perdagangan (lembar saham) Trading Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp) Market Capitalization (Rp)
2024							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	715	730	680	690	72.421.200	1.276.506.143.640
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	690	720	600	670	121.957.900	1.232.864.907.960
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	680	705	650	685	120.370.500	1.232.864.907.960
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	685	765	655	705	138.188.500	1.291.053.222.200
2023							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	575	665	530	625	123.248.500	1.305.600.300.760
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	630	800	615	765	164.330.000	1.378.335.693.560
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	770	865	680	710	176.035.400	1.227.409.753.500
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	715	790	675	715	148.200.200	1.089.212.507.180



2022							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	515	555	478	550	127.294.600	914.647.564.460
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	540	675	500	615	261.713.900	1.063.755.119.700
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	615	620	496	505	134.095.200	989.201.342.080
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	505	660	492	570	226.572.600	1.034.660.962.580
2021							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	530	900	496	530	1.185.920.000	1.120.125.049.120
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	590	615	472	585	223.850.000	972.835.878.700
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	510	710	496	498	1.073.640.000	1.078.302.198.260
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	590	615	496	515	346.570.000	1.007.385.190.280
2020							
Triwulan I 1st Quarter	1.818.384.820	685	695	226	278	144.157.600	894.645.331.440
Triwulan II 2nd Quarter	1.818.384.820	276	510	258	450	437.950.000	640.071.456.640
Triwulan III 3rd Quarter	1.818.384.820	450	458	354	368	257.205.100	756.448.085.120
Triwulan IV 4th Quarter	1.818.384.820	368	670	364	530	8.277.700.000	783.723.857.420

Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham IPCC Januari 2020 s.d Desember 2024
 Closing Price Movement of IPCC Shares January 2020 to December 2024 Period



Informasi tentang Aksi Korporasi

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk melakukan *stock buy-back* paling lambat selama 12 bulan setelah persetujuan RUPS Tahun 2024 dengan alokasi dana maksimal sebesar Rp116.930.902.220,.

Aksi Korporasi *Stock Buy-back* Tahun 2024

Sejak persetujuan RUPS Tahun 2024 pada Bulan Juni sampai dengan Desember 2024, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk belum melaksanakan aksi *buy-back* dengan pertimbangan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemegang Saham Mayoritas PT Pelindo Multi Terminal.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Di tahun 2023 dan 2024, Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Perusahaan mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*).

Ikhtisar Efek Bersifat Utang dan Pendanaan Lainnya

Sampai dengan akhir tahun 2024 Perusahaan tidak menerbitkan efek lain dalam bentuk apapun selain yang telah dijelaskan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek, *corporate action*, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

Information on Corporate Action

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk performed a stock buy-back no later than 12 months after the approval of the 2024 GMS with a maximum fund allocation of Rp116,930,902,220.

Corporate Action *Stock Buy-back* in 2024

Since the approval of the 2024 GMS in June to December 2024, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk has not carried out a buy-back action considering the power and authority granted by the Major Shareholder, PT Pelindo Multi Terminal.

Information on Suspension and/or Delisting of Shares

In 2023 and 2024, the Company has never been subject to sanctions that could affect stock trading activities on the Stock Exchange where the Company lists and trades shares, either temporary suspension of stock trading (*suspension*) and/or cancellation of stock listings (*delisting*).

Overview of Debt Securities and Other Funding

Until the end of 2024, the Company has not issued any other securities in any form other than those described in the Chronology of Issuance and Listing of Shares above. Therefore, there is no information regarding the chronology of securities listing, corporate actions, changes in the number of securities, name of the exchange where other securities are listed, and the ranking of securities.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN TAHUN 2024 BERSKALA INTERNASIONAL

2024 INTERNATIONAL SCALE AWARDS

Runner Up 1

Deskripsi Penghargaan:

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Perseroan untuk mitigasi risiko sedini mungkin atas kemungkinan krisis yang akan dihadapi.

Pemberi Penghargaan:

The ASEAN Sustainability

Acara/Kegiatan:

ASEAN Risk Champion Award

Tanggal Diberikan:

10 Juli 2024


Award Description:

As a form of appreciation for the Company's performance in mitigating risks as early as possible for possible crises that will be faced.

Awarded by:

The ASEAN Sustainability

Event/Activity:

ASEAN Risk Champion Award

Awarding Date:

July 10, 2024

PENGHARGAAN TAHUN 2024 BERSKALA NASIONAL

2024 NATIONAL SCALE AWARDS

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Occupational Health and Safety Management System

Deskripsi Sertifikasi:

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:

9 Juni 2023

Masa Berlaku Hingga:

9 Juni 2026


Certification Description:

Occupational Safety and Health Management System

Certification Body:

Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

Certification Issuance Date:

June 9, 2023

Valid Until:

June 9, 2026

Top Leader on CSR Commitment

Deskripsi Penghargaan:

Sebagai bentuk apresiasi terhadap Direktur Utama atas rencana dan program CSR yang berkelanjutan Perseroan dan memberikan dampak bagi masyarakat dan Perseroan.

Pemberi Penghargaan:

TOP CSR

Acara/Kegiatan:

CSR Award

Tanggal Diberikan:

30 Juli 2024


Award Description:

As a form of appreciation to the President Director for the Company's sustainable CSR plans and programs and providing impacts to the community and the Company.

Awarded by:

TOP CSR

Event/Activity:

CSR Award

Awarding Date:

July 30, 2024

Bintang 3 Top CSR | Top 3 Star CSR
Deskripsi Penghargaan:

Sebagai bentuk apresiasi terhadap rencana dan program CSR yang berkelanjutan Perseroan dan memberikan dampak bagi masyarakat dan Perseroan.

Pemberi Penghargaan:

TOP CSR

Acara/Kegiatan:

CSR Award

Tanggal Diberikan:

30 Juli 2024


Award Description:

As a form of appreciation for the Company's sustainable CSR plans and programs and providing impacts to the community and the Company.

Awarded by:

TOP CSR

Event/Activity:

CSR Award

Awarding Date:

July 30, 2024

Terminal Terbaik dalam Pencapaian Standar Kinerja | Best Terminal in Achieving Performance Standards
Deskripsi Penghargaan:

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku usaha Pelabuhan, Terminal Operator dan para Stakeholder lainnya di Lingkungan Pelabuhan sesuai standar ISPS Code untuk menciptakan *zero defect, zero accident*.

Pemberi Penghargaan:

Kepala Satuan Otoritas Pelabuhan

Acara/Kegiatan:

KSOP Award

Tanggal Diberikan:

29 Oktober 2024


Award Description:

As a form of appreciation to Port business players, Terminal Operators and other Stakeholders in the Port Environment according to the ISPS Code standards to create zero defects, zero accidents.

Awarded by:

Head of Port Authority Unit

Event/Activity:

KSOP Award

Awarding Date:

October 29, 2024

Terminal Terbaik dalam Pelaporan dan Kepatuhan ISPS Code | Best Terminal in ISPS Code Reporting and Compliance
Deskripsi Penghargaan:

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku usaha Pelabuhan, Terminal Operator dan para Stakeholder lainnya di Lingkungan Pelabuhan sesuai standar ISPS Code untuk menciptakan *zero defect, zero accident*.

Pemberi Penghargaan:

Kepala Satuan Otoritas Pelabuhan

Acara/Kegiatan:

KSOP Award

Tanggal Diberikan:

29 Oktober 2024


Award Description:

As a form of appreciation to Port business players, Terminal Operators and other Stakeholders in the Port Environment according to the ISPS Code standards to create zero defects, zero accidents.

Awarded by:

Head of Port Authority Unit

Event/Activity:

KSOP Award

Awarding Date:

October 29, 2024

Menerapkan SNI untuk Keberlanjutan | Implementing SNI for Sustainability
Deskripsi Penghargaan:

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi kinerja Perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar nasional dan internasional.

Pemberi Penghargaan:

Badan Standardisasi Nasional

Acara/Kegiatan:

SNI Award

Tanggal Diberikan:

21 November 2024


Award Description:

The award is a form of appreciation for the Company's consistent performance in providing quality services according to national and international standards.

Awarded by:

National Standardization Agency

Event/Activity:

SNI Award

Awarding Date:

November 21, 2024



Gold Star, Small Cap | Gold Star, Small Cap

Deskripsi Penghargaan:

Sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap aktivitas bisnis dan investasi Perusahaan yang berkelanjutan baik dari aspek lingkungan, sosial maupun *governance*.

Pemberi Penghargaan:

Investor Trust

Acara/Kegiatan:

SNI Award

Tanggal Diberikan:

26 November 2024

**Award Description:**

As a form of the Company's commitment to sustainable business and investment activities in terms of environment, social and *governance*.

Awarded by:

Investor Trust

Event/Activity:

SNI Award

Awarding Date:

November 26, 2024

Emiten Kategori Pelabuhan | Port Category Issuer

Deskripsi Penghargaan:

Apresiasi atas kinerja Perseroan dalam memberikan pelayanan konsistensi yang unggul dan konsisten di logistik Indonesia.

Pemberi Penghargaan:

Bisnis Indonesia

Acara/Kegiatan:

Bisnis Indonesia Logistic Award

Tanggal Diberikan:

30 November

**Award Description:**

Appreciation for the Company's performance in providing excellent and consistent service in Indonesian logistics.

Awarded by:

Bisnis Indonesia

Event/Activity:

Bisnis Indonesia Logistic Award

Awarding Date:

November 30

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2024

VALID CERTIFICATIONS IN 2024

SNI ISO 37001:2016

Deskripsi Sertifikasi:

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:

Sucifindo

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:

7 Maret 2022

Masa Berlaku Hingga:

6 Maret 2025

**Certification Description:**

Anti-Bribery Management System

Certification Body:

Sucifindo

Certification Issuance Date:

March 7, 2022

Valid Until:

March 6, 2025

SNI ISO 9001:2015

Deskripsi Sertifikasi:

Sistem Manajemen Mutu

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:

Sucifindo

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:

7 Mei 2024

Masa Berlaku Hingga:

28 Desember 2026

**Certification Description:**

Sistem Manajemen Mutu

Certification Body:

Sucifindo

Certification Issuance Date:

7 Mei 2024

Valid Until:

28 Desember 2026

SNI ISO 14001:2015

Deskripsi Sertifikasi:
Sistem Manajemen Lingkungan

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
Sucifindo

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
7 Mei 2024

Masa Berlaku Hingga:
28 Desember 2026



Certification Description:
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Certification Body:
Sucifindo

Certification Issuance Date:
7 Mei 2024

Valid Until:
28 Desember 2026

SNI ISO 45001:2018

Deskripsi Sertifikasi:
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
7 Mei 2024

Masa Berlaku Hingga:
28 Desember 2026



Certification Description:
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Certification Body:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Certification Issuance Date:
7 Mei 2024

Valid Until:
28 Desember 2026



KILAS PERISTIWA 2024

2024 EVENT HIGHLIGHTS

1 Januari 2024 | January 1, 2024



Go Live SAP, yaitu integrasi layanan keuangan IPCC dengan sistem Pelindo Holding. Go Live SAP, which is the integration of IPCC financial services with Pelindo Holding system.

5 Februari 2024 | February 5, 2024



IPCC tangani ekspor perdana Mitsubishi XForce sebanyak 500 unit untuk tujuan Vietnam, dan kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KSOP dan Direktur Utama IPCC. IPCC handled the first export of Mitsubishi XForce as many as 500 units for Vietnam, and this activity was attended by the Head of KSOP and the President Director of IPCC.

1 dan 25 Maret 2024 | March 1 and 25, 2024



Perjanjian kerja sama antara PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tentang Layanan Terminal (Cargodoring) dan Layanan Pre Delivery Center (PDC). Cooperation agreement between PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia regarding Terminal Services (Cargodoring) and Pre Delivery Center (PDC) Services

2 April 2024 | April 2, 2024



Untuk menyemarakkan bulan Ramadhan, IPCC menyelenggarakan salah satu program TJSL dengan menyalurkan sebanyak 600 sembako kepada warga sekitar Perusahaan. IPCC juga menyelenggarakan Mudik Gratis dengan tujuan Jakarta-Solo dan Jakarta-Yogyakarta.

To enliven the month of Ramadan, IPCC held one of the CSR programs by distributing 600 basic necessities to residents around the Company. IPCC also held a Free Homecoming with the destinations Jakarta-Solo and Jakarta-Yogyakarta.

1 Mei 2024 | May 1, 2024



IPCC Mengimplementasikan Pola Bisnis Baru yaitu Single Billing untuk Layanan Stevedoring di Terminal Internasional Jakarta. IPCC Implements New Business Pattern of Single Billing for Stevedoring Services at Jakarta International Terminal

7 Mei 2024 | May 7, 2024



IPCC melakukan kunjungan ke Palembang dalam rangka memperkenalkan Perusahaan kepada para calon investor, dan kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama. IPCC visited Palembang in order to introduce the Company to potential investors, and this activity was attended by the President Director.



10 Juni 2024 | June 10, 2024



IPCC menyelenggarakan RUPST yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
IPCC held an AGMS attended by the Board of Commissioners and Board of Directors.

27 Juli 2024 | July 27, 2024



IPCC turut berpartisipasi dalam Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show untuk memperkenalkan bisnis Perseroan ke masyarakat, yang langsung dihadiri oleh Direktur Utama.
IPCC participated in the Gaikindo Indonesia International Auto Show to introduce the Company's business to the public, which was directly attended by the President Director.

1 Agustus 2024 | August 1, 2024



Go Live PTOS C Terminal Domestik yang dihadiri oleh jajaran Direksi.
Go Live PTOS C Domestic Terminal attended by the Board of Directors.

24 September 2024 | September 24, 2024



IPCC bekerjasama dengan IDX dan Stockbit mengajak seluruh insan IPCC untuk lebih memahami dunia investasi pasar modal, di mana kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi.
IPCC in collaboration with IDX and Stockbit invited all IPCC People to obtain better understanding about the world of capital market investment, where this activity was attended by the entire Board of Directors.

1 Oktober 2024 | October 1, 2024



Pengoperasian Terminal Satelit Banjarmasin.
Operational commencement of Banjarmasin Satellite Terminal.

10 Oktober 2024 | October 10, 2024



IPCC menerima kunjungan dari Waseda University of Japan yang langsung dihadiri oleh Senior Management IPCC.
IPCC received a visit from Waseda University of Japan which was directly attended by the IPCC Senior Management.



23 Oktober 2024 | October 23, 2024



Launching Program TJSL IPCC Gembira untuk warga Kalibaru.
 Launching of IPCC Gembira CSR Program for Kalibaru residents.

29 Oktober 2024 | October 29, 2024



IPCC berhasil mendapatkan dua penghargaan dalam ajang KSOP Award 2024.
 IPCC managed to get two awards in the KSOP Award 2024.

21 November 2024 | November 21, 2024



IPCC mendapatkan penghargaan dalam ajang SNI Award kategori Perunggu.
 IPCC received an award in the SNI Award Bronze category.

21 November 2024 | November 21, 2024



Jajaran Direksi menghadiri penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelanggan IPCC.
 Board of Directors attended the implementation of IPCC Customer Satisfaction Survey.

7 Desember 2024 | December 7, 2024



IPCC menjadi Tuan Rumah dalam impor Peralatan Inspeksi Anti Narkoba dari Pemerintah Tiongkok yang langsung dihadiri oleh Direktur Utama.
 IPCC became the Host for the import of Anti-Drug Inspection Equipment from the Chinese Government which was directly attended by the President Director.

31 Desember 2024 | December 31, 2024



Seremoni pelepasan kapal terakhir yang sandar di dermaga IPCC pada tahun 2024.
 Ceremonial release of the last ship to berth at the IPCC dock in 2024.

Laporan Manajemen Management Report

Melalui kolaborasi yang solid antara Direksi dan Dewan Komisaris, IPCC berhasil menjaga kinerja yang resilien di tengah dinamika pasar, memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang, serta menegaskan komitmen terhadap penerapan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas (ITA dalam setiap aspek pengelolaan usaha.

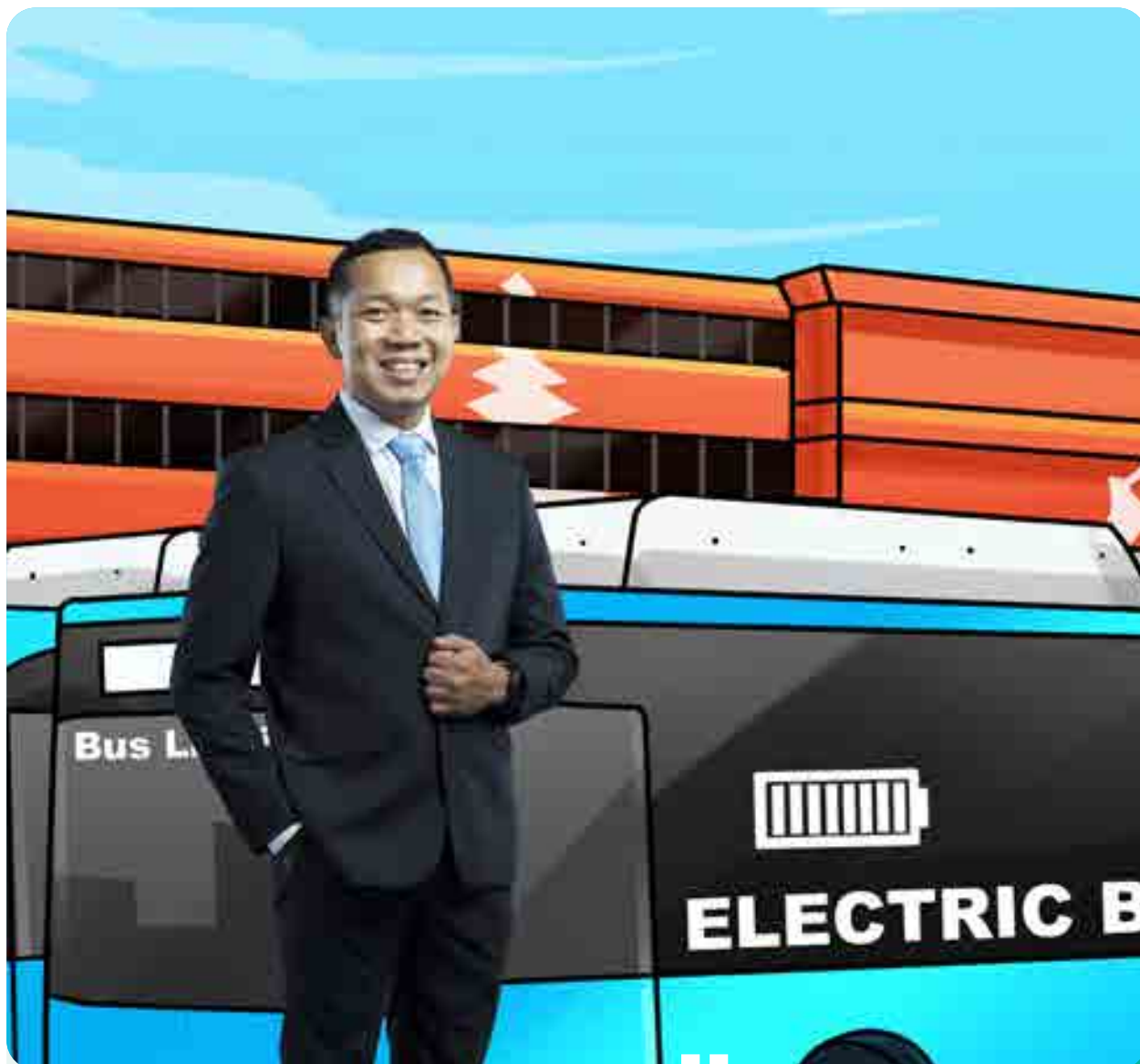
Managing the largest vehicle terminal in Indonesia, IPCC strives to build competitiveness based on operational excellence, digital innovation, and high-standard governance to strengthen its position in the national and regional markets.

02



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



DRAJAT SULISTYO

Komisaris Utama

President Commissioner

”

Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), termasuk kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. We are committed to maintain a balance between business growth and implementation of good corporate governance principles (Good Corporate Governance (GCG), including compliance with prevailing laws and regulations applicable laws and regulations.



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC" atau "Perseroan") mampu melalui tahun 2024 dengan kinerja yang solid dan pencapaian strategis, di tengah dinamika industri logistik dan tantangan global yang masih berlangsung.

Dalam menjalankan peran strategisnya, Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, tanggung jawab, serta penuh kehati-hatian demi memastikan keberlanjutan usaha dan perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), termasuk kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi IPCC dalam memperkuat kapabilitas digital, sejalan dengan transformasi layanan terminal kendaraan dan integrasi ekosistem logistik. Dewan Komisaris secara aktif mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), memastikan tindak lanjut atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan arahan Pemegang Saham, serta menekankan pentingnya efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan budaya perusahaan yang adaptif terhadap perubahan.

Dengan mengusung tema "*Digitalization Through Optimizing Vehicle Ecosystem*", Laporan Tahunan ini merekam perjalanan IPCC dalam menjawab kebutuhan masa kini sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Kami merasa terhormat sekaligus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas pencapaian di tahun 2024, dalam laporan tahunan ini disampaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan sepanjang tahun buku 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

KONDISI EKSTERNAL DAN TANTANGAN INDUSTRI

Tahun 2024 berlangsung dalam bayang-bayang perlambatan ekonomi global yang cukup terasa. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* IMF edisi Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan hanya mencapai 3,0%, dengan tekanan signifikan dari pengetatan kebijakan moneter, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi rantai pasok global. Ketidakpastian ini turut berdampak pada arus perdagangan internasional dan aktivitas logistik lintas negara.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude be upon God Almighty, since due to His blessings and grace, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC" or "The Company") was able to navigate 2024 with solid performance and the achievement of various strategic initiatives, amidst the dynamics of the logistics and automotive industries and ongoing global challenges.

In fulfilling its strategic role, Board of Commissioners continuously carries out its supervisory functions and provides advice to the Board of Directors with noble intentions, responsibility, and full caution to ensure the business continuity and the protection of the interests of all stakeholders. We are committed to maintaining a balance between business growth and the implementation of good corporate governance (GCG) principles, including compliance with applicable laws and regulations.

The year 2024 marks an important milestone for IPCC in strengthening digital capabilities, in line with the transformation of vehicle terminal services and the integration of logistics ecosystem. Board of Commissioners actively supervises the implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), ensures follow-up on the results of the General Meeting of Shareholders and Shareholder directives, and emphasizes the importance of effective internal control systems, risk management, and a corporate culture that is adaptive to change.

With the theme "*Digitalization Through Optimizing Vehicle Ecosystem*," this Annual Report captures IPCC's journey in addressing current needs while preparing for future challenges. We are honored and extend our highest appreciation to all parties for their achievements in 2024. This report reflects the execution of Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities over the Company's performance during the 2024 fiscal year, as a demonstration of our commitment to transparency and accountability.

EXTERNAL CONDITIONS AND INDUSTRY CHALLENGES

The year 2024 was taking place under the shadow of a noticeable global economic slowdown. According to the October 2024 edition of the IMF's *World Economic Outlook*, global economic growth was projected to reach only 3.0%, pressured by tightened monetary policies, geopolitical tensions, and the fragmentation of global supply chains. These uncertainties have also impacted international trade flows and cross-border logistics activities.



Di dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,05% (*year-on-year*), mencerminkan ketahanan konsumsi domestik dan peningkatan investasi menjelang Pemilu 2024. Namun demikian, sektor eksternal menghadapi tantangan dari penurunan ekspor dan fluktuasi harga komoditas.

Bagi industri logistik dan terminal kendaraan, tantangan global dan nasional ini turut memengaruhi kinerja operasional dan dinamika pasar. Industri otomotif, sebagai salah satu penyumbang arus kendaraan domestik dan ekspor-impor, mengalami pertumbuhan moderat, dengan peningkatan volume kendaraan elektrifikasi dan tekanan pada logistik konvensional. Hal ini mendorong perusahaan seperti IPCC untuk mengakselerasi digitalisasi layanan, efisiensi operasional, dan perluasan ekosistem melalui inovasi teknologi serta kolaborasi dengan pelaku industri.

Dalam konteks tersebut, transformasi digital yang diusung IPCC menjadi strategi adaptif yang relevan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang di tengah disrupsi rantai pasok global serta perubahan perilaku pengguna jasa logistik.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA DIREKSI ATAS PENGELOLAAN PERSEROAN, DAN DASAR PENILAIANNYA

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas pengelolaan Perseroan secara profesional dan akuntabel sepanjang tahun 2024. Penilaian ini turut didukung oleh hasil audit laporan keuangan tahun buku 2023 oleh Kantor Akuntan Publik independen, yang memberikan opini Wajar, dalam semua hal yang material, atas posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas Perseroan per 31 Desember 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini ini menjadi cerminan atas pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya.

Setiap tahun, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai tolok ukur pencapaian Direksi, baik secara individu maupun kolektif. Proses penetapan KPI dimulai dari penyusunan usulan indikator oleh Direksi yang mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta kebijakan strategis pemegang saham. Usulan tersebut kemudian dikaji oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan secara resmi melalui keputusan RUPS.

Sebagai perusahaan yang berada dalam ekosistem BUMN, KPI Direksi IPCC dirancang dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Oleh karena itu, penilaian kinerja dilakukan berdasarkan lima perspektif utama, yaitu:

1. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia,
2. Inovasi model bisnis,
3. Kepemimpinan teknologi,

Domestically, Indonesia's Central Statistics Agency (BPS) reported that Indonesia's economic growth stood at around 5.05% year-on-year, reflecting the resilience of domestic consumption and increased investment ahead of the 2024 elections. Nevertheless, the external sector faced challenges from declining exports and commodity price fluctuations.

For the logistics and vehicle terminal industry, these global and national challenges have also affected operational performance and market dynamics. The automotive industry, one of the main contributors to domestic and export-import vehicle flows, experienced moderate growth, marked by an increase in electrified vehicle volumes and pressure on conventional logistics systems. This situation has driven companies like IPCC to accelerate service digitalization, enhance operational efficiency, and expand their ecosystem through technological innovation and industry collaboration.

In this context, IPCC's digital transformation serves as a relevant adaptive strategy to improve competitiveness and ensure long-term sustainability amid global supply chain disruptions and changing behavior among logistics service users.

ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS ON BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN MANAGING THE COMPANY, AND THE BASIS OF ASSESSMENT

Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has carried out its duties in managing the Company professionally and accountably throughout 2024. This assessment is also supported by the audit results of 2023 financial statements by an independent Public Accounting Firm, which provided unqualified, in all material respects, on the Company's financial position, operating results, and cash flow as of December 31, 2023, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. This opinion is a reflection of transparent and trustworthy financial management.

Each year, the General Meeting of Shareholders (GMS) establishes Key Performance Indicators (KPIs) as a benchmark for assessing the performance of Board of Directors, both individually and collectively. KPI determination process begins with the Board of Directors proposing indicators based on the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Long-Term Plan (RJPP), and strategic shareholder policies. These proposals are then reviewed by Board of Commissioners and formally approved through a GMS resolution.

As a company within SOE ecosystem, KPIs for IPCC's Board of Directors are designed based on guidelines issued by the Ministry of SOEs. Accordingly, performance assessments are based on five main perspectives:

1. Economic and social value for Indonesia,
2. Business model innovation,
3. Technological leadership,



4. Peningkatan investasi, dan
5. Pengembangan talenta.

Selain aspek kinerja bisnis, penilaian juga mempertimbangkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, hasil *assessment* GCG tahunan (baik melalui *self-assessment* maupun oleh pihak independen), serta indikator tingkat kesehatan perusahaan. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan rutin atas implementasi RKAP melalui forum Rapat Gabungan dengan Direksi, guna memastikan ketercapaian target, efektivitas pengambilan keputusan, serta mitigasi risiko yang memadai.

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2024, Direksi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengelola Perseroan di tengah tantangan eksternal dan dinamika industri. Hal ini tercermin dari pencapaian KPI individu Direksi yang sangat baik:

No.	Nama Jabatan Direksi Name of Director Position	Hasil Kategorisasi Penilaian Assessment Categorization Results	Keterangan/ Justifikasi Description/Justification
1	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	Sangat Baik Very Good	• <i>Target Achievement</i> : Sangat Baik • Kapasitas Pemenuhan Kompetensi : Istimewa • <i>Learning Agility</i>: Istimewa • <i>Behavior/Perilaku</i>: Sangat Baik • Target Achievement: Very Good • Competency Fulfillment Capacity: Excellent • Learning Agility: Excellent • Behavior: Very Good
2	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Sangat Baik Very Good	• <i>Target Achievement</i> : Sangat Baik • kapasitas Pemenuhan Kompetensi : Istimewa • <i>Learning Agility</i>: Sangat Baik • <i>Behavior/Perilaku</i>: Sangat Baik • Target Achievement: Very Good • Competency Fulfillment Capacity: Excellent • Learning Agility: Very Good • Behavior: Very Good
3	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management	Sangat Baik Very Good	• <i>Target Achievement</i> : Sangat Baik • Kapasitas Pemenuhan Kompetensi : Sangat Baik • <i>Learning Agility</i>: Sangat Baik • <i>Behavior/Perilaku</i>: Istimewa • Target Achievement: Very Good • Competency Fulfillment Capacity: Very Good • Learning Agility: Very Good • Behavior: Excellent

Indikator kunci yang mencerminkan keberhasilan tersebut di antaranya adalah *Net Profit Margin*, penambahan pangsa pasar produktivitas bongkar muat serta tingkat implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

Capaian ini menegaskan bahwa Direksi tidak hanya menjalankan strategi jangka pendek dengan efektif, namun juga membangun fondasi transformasi jangka panjang melalui digitalisasi, ekspansi layanan, dan penguatan kapabilitas organisasi. Berbagai inisiatif strategis seperti digitalisasi proses operasional dan administratif, serta ekspansi terminal di luar wilayah IPCC, telah menunjukkan hasil yang konkret dan selaras dengan visi perusahaan.

Dewan Komisaris juga mencermati kemampuan adaptif Direksi dalam merespons kondisi makro ekonomi dan tekanan eksternal, seperti perlambatan perdagangan global dan disrupsi rantai pasok serta isu keselamatan pada cargo CBU pada awal tahun 2024. Di tengah ketidakpastian tersebut, Direksi tetap mampu

4. Investment enhancement, and
5. Talent development.

In addition to business performance, assessments also consider the quality of corporate governance implementation, the results of annual GCG assessments (whether through self-assessment or independent parties), as well as the Company's financial health indicators. Board of Commissioners also regularly supervises the implementation of RKAP through Joint Meetings with the Board of Directors to ensure target achievement, decision-making effectiveness, and adequate risk mitigation.

Board of Commissioners assesses that throughout 2024, the Board of Directors has demonstrated "Excellent" performance in managing the Company amid external challenges and industry dynamics. This is reflected in the excellent individual KPI achievements of the Board of Directors:

Key indicators of this success include a Net Profit Margin, a increase in market share, productivity in loading/unloading, and a corporate governance implementation.

These achievements affirm that the Board of Directors has not only effectively implemented short-term strategies but also laid the foundation for long-term transformation through digitalization, service expansion, and capability strengthening. Strategic initiatives such as the digitalization of operational and administrative processes, as well as terminal expansion beyond IPCC's territory, have delivered concrete results in alignment with the Company's vision.

Board of Commissioners also acknowledges the Board of Directors' adaptive ability in responding to macroeconomic conditions and external pressures, such as the global trade slowdown, supply chain disruptions, and safety issues in CBU cargo in early 2024. Amid these uncertainties, the Board of

menjaga kesinambungan bisnis, meningkatkan *value creation*, menyeimbangkan struktur keuangan, dan memperkuat daya saing layanan.

Seluruh pencapaian ini semakin menegaskan posisi IPCC sebagai pelaku kunci dalam ekosistem logistik kendaraan nasional dan bagian integral dari transformasi Pelindo Group. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepemimpinan Direksi yang visioner, kolaboratif, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KETERLIBATAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENYUSUNAN RKAP

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organ pengawas, Dewan Komisaris berperan aktif dalam memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang ditetapkan Direksi telah disusun secara *prudent* dan selaras dengan arah jangka panjang Perseroan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 dilakukan Direksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi makroekonomi dan mikroekonomi, dinamika industri logistik, serta aspirasi pemegang saham.

Sebagai bagian dari proses tata kelola yang baik, Dewan Komisaris melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rancangan RKAP yang diajukan Direksi. Evaluasi tersebut mencakup pengujian terhadap asumsi dasar, proyeksi kinerja, rencana investasi, serta kesiapan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program strategis. Hasil evaluasi disampaikan secara tertulis kepada Direksi, dilengkapi dengan saran dan catatan perbaikan yang diperlukan. Dalam beberapa kesempatan, pembahasan bersama dilakukan untuk menyelaraskan visi strategis dan memastikan kesiapan implementasi yang optimal.

Di tengah ketidakpastian global dan potensi risiko yang bersifat volatil, Dewan Komisaris secara konsisten mengingatkan Direksi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan. Penekanan diberikan pada pentingnya analisis risiko, skenario alternatif, serta penguatan sistem pengendalian internal agar IPCC tetap adaptif dan tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika usaha.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa strategi yang dijalankan Direksi telah sesuai dengan arah dan sasaran yang ditetapkan dalam RKAP. Fokus pada pengembangan usaha, digitalisasi layanan terminal, serta ekspansi strategis ke wilayah potensial (terminal kendaraan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin) telah dijalankan dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing Perseroan.

Pengawasan atas implementasi kebijakan dilakukan secara berkala melalui media Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi maupun laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi.

Directors has maintained business continuity, increased value creation, balanced the financial structure, and enhanced service competitiveness.

These accomplishments further solidify IPCC's position as a key player in the national vehicle logistics ecosystem and as an integral part of Pelindo Group's transformation. Board of Commissioners highly appreciates the visionary, collaborative leadership of Board of Directors, which is focused on long-term value creation for all stakeholders.

SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION AND INVOLVEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS IN FORMULATING RKAP

In carrying out its function as a supervisory organ, Board of Commissioners plays an active role in ensuring that the strategies and policies established by the Board of Directors have been prepared prudently and in line with the Company's long-term direction. The preparation of the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP) is carried out by the Board of Directors by considering various factors, including macroeconomic and microeconomic conditions, the dynamics of logistics industry, and the aspirations of shareholders.

As part of good governance process, Board of Commissioners conducted a thorough evaluation of the draft of RKAP proposed by the Board of Directors. The evaluation includes testing the basic assumptions, performance projections, investment plans, and the readiness of resources to support the implementation of strategic programs. The evaluation results are submitted in writing to the Board of Directors, accompanied by suggestions and notes on necessary improvements. On several occasions, joint discussions were held to align the strategic vision and ensure optimal implementation readiness.

In the midst of global uncertainty and potential volatile risks, Board of Commissioners consistently reminded the Board of Directors to apply the precautionary principle in planning. Emphasis is placed on the importance of risk analysis, alternative scenarios, and strengthening internal control systems so that IPCC remains adaptive and resilient in the face of various business dynamics.

Throughout 2024, Board of Commissioners assessed that the strategies implemented by the Board of Directors were in accordance with the direction and objectives set out in the RKAP. The focus on business development, digitalization of terminal services, and strategic expansion to potential areas (Trisakti Port vehicle terminal, Banjarmasin) have been well executed and contributed to improving the Company's competitiveness.

Supervision of policy implementation is carried out regularly through the Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors as well as periodic reports submitted by Board



Di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan sebanyak 12 kali. Selain itu, Dewan Komisaris juga terus memberikan masukan dan rekomendasi melalui organ pendukung di bawah Dewan Komisaris (komite), khususnya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, untuk memperkuat sistem manajemen risiko, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian internal.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2024, meliputi berbagai aspek penting, antara lain:

1. Implementasi Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Operasional
Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap implementasi sistem digital terintegrasi, termasuk PTOS-C, CARTOS, ERP SAP, RFID, *Automatic Gate System*, dan *dashboard* digitalisasi. Pengawasan difokuskan pada efektivitas penerapan sistem, integrasi antar *platform*, serta dukungan terhadap efisiensi dan transparansi operasional.
2. Realisasi RKAP dan Kinerja Keuangan
Sebagai tolok ukur utama kinerja tahunan, pencapaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) menjadi perhatian Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan terhadap kinerja keuangan, operasional, serta pemenuhan indikator KPI Direksi. Peningkatan kinerja yang tercermin dari pertumbuhan EBITDA, *Net Profit Margin*, serta optimalisasi belanja modal (*Capex*), menjadi bagian dari pengawasan kolegal.
3. Ekspansi Strategis dan Pengembangan Pasar
Dewan Komisaris juga memantau strategi ekspansi yang dilakukan Direksi, khususnya dalam pengembangan terminal kendaraan di luar wilayah IPCC dan peningkatan penetrasi pasar. Keberhasilan dalam menambah pangsa pasar secara signifikan menjadi indikasi penting atas keberhasilan strategi pertumbuhan anorganik Perseroan.
4. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko korporat, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian integral dari pengawasan Dewan. Capaian tingkat implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang tinggi serta perhatian terhadap tingkat maturitas manajemen risiko menjadi bukti komitmen terhadap integritas pengelolaan perseroan.
5. Aspek Keberlanjutan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dalam kerangka keberlanjutan jangka panjang, Dewan Komisaris memantau pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), penerapan HSSE, serta kebijakan pengembangan kompetensi dan talenta. Program-program ini dinilai strategis dalam membentuk budaya perusahaan yang resilien berkelanjutan dan berdaya saing.

Fokus pengawasan tersebut dijalankan secara terstruktur melalui rapat koordinasi dengan Direksi, pemantauan laporan berkala, serta pemberian masukan melalui Komite di bawah Dewan Komisaris. Seluruh proses pengawasan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

of Directors. Throughout 2024, Board of Commissioners held 12 Coordination Meetings. In addition, Board of Commissioners also continued to provide input and recommendations through supporting organs under Board of Commissioners (committees), particularly Audit Committee and Risk Monitoring Committee, to strengthen the risk management system, accountability and effectiveness of internal control.

The focus of the Board of Commissioners' supervision in 2024 includes various important aspects:

1. Implementation of Digital Transformation and Operational System Integration
Board of Commissioners pays special attention to the implementation of integrated digital systems, including PTOS-C, CARTOS, SAP ERP, RFID, *Automatic Gate System*, and digitalization dashboard. Supervision is focused on the effectiveness of system implementation, integration between platforms, and support for operational efficiency and transparency.
2. RKAP Realization and Financial Performance
As the main benchmark of annual performance, the achievement of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) is of concern to Board of Commissioners. The assessment was conducted on financial and operational performance, as well as the fulfillment of KPI indicators of Board of Directors. Performance improvement reflected in the growth of EBITDA, *Net Profit Margin*, as well as optimization of capital expenditure (*CapEx*), became part of collegial supervision.
3. Strategic Expansion and Market Development
Board of Commissioners also monitors the Board of Directors' expansion strategy, particularly in the development of vehicle terminals outside IPCC current working area and increasing market penetration. The success in significantly increasing market share is an important indication of the success of the Company's inorganic growth strategy.
4. Strengthening Governance and Risk Management
Oversight on the effectiveness of internal control system, corporate risk management, and the implementation of good corporate governance principles is an integral part of the Board's oversight. The achievement of a high level of implementation of good corporate governance and attention to the maturity level of risk management is an evidence of commitment to the integrity of the Company's management.
5. Sustainability and Human Capital Development
Within the framework of long-term sustainability, Board of Commissioners monitors the implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR) program, HSSE implementation, and competency and talent development policies. These programs are considered strategic in shaping a resilient, sustainable and competitive corporate culture.

The focus of supervision is carried out in a structured manner through coordination meetings with the Board of Directors, monitoring of periodic reports, and providing input through Committees under Board of Commissioners. The entire supervisory process is carried out with reference to prevailing



yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh OJK, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional, guna memastikan bahwa setiap strategi yang diimplementasikan membawa IPCC ke arah pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan bernilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dewan Komisaris memandang bahwa meskipun tantangan eksternal masih membayangi perekonomian nasional dan global, rencana kerja dan strategi yang disusun Direksi untuk tahun 2024 menunjukkan arah yang realistis dan adaptif terhadap dinamika industri. Didukung oleh kinerja positif Perseroan di tahun sebelumnya, IPCC memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bernilai jangka panjang.

Sebagai anak perusahaan tidak langsung dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), IPCC memperoleh keunggulan strategis dalam hal pengalaman, jaringan usaha, dan reputasi di industri kepelabuhanan nasional. Dengan kapabilitas operasional yang unggul, IPCC melayani hampir seluruh kegiatan ekspor-impor kendaraan di Indonesia, serta mencatat sekitar 26% distribusi kendaraan domestik secara nasional.

Dewan Komisaris juga mendukung penuh arah strategis yang dicanangkan Direksi untuk terus memperkuat kemitraan, mendorong ekspansi usaha ke pasar-pasar potensial, serta mengembangkan diversifikasi lini bisnis guna menjawab kebutuhan pelanggan yang kian beragam. Kolaborasi dalam ekosistem logistik Pelindo dan implementasi digitalisasi di seluruh rantai layanan akan menjadi kunci bagi IPCC untuk mempertahankan relevansi dan daya saingnya di masa mendatang.

PENGAWASAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang. Oleh karena itu, IPCC terus mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness* (kewajaran), dan *trusted* (dipercaya) (TARIFT), telah

laws and regulations, particularly Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Good Corporate Governance Guidelines for Issuers or Public Companies issued by OJK, and the Company's Articles of Association.

Board of Commissioners is committed to continue carrying out its supervisory function independently and professionally, to ensure that every strategy implemented leads IPCC towards healthy, sustainable and long-term growth for all stakeholders.

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS OUTLOOK

Board of Commissioners believes that although external challenges continue to affect the national and global economies, the work plan and strategies developed by the Board of Directors for 2024 reflect a realistic and adaptive direction in response to industry dynamics. Supported by the Company's positive performance in the previous year, IPCC has a solid foundation to sustain long-term and valuable growth.

As an indirect subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), IPCC holds strategic advantages in terms of experience, business network, and reputation in the national port industry. With its excellent operational capabilities, IPCC handles nearly all vehicle export-import activities in Indonesia and accounts for approximately 26% of the national domestic vehicle distribution.

Board of Commissioners fully supports the strategic direction established by the Board of Directors to continue strengthening partnerships, encouraging business expansion into potential markets, and diversifying lines of business to meet increasingly diverse customer needs. Collaboration within Pelindo logistics ecosystem and the implementation of digitalization across the entire service chain will be key for IPCC to maintain its relevance and competitiveness in the future.

SUPERVISION ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Board of Commissioners believes that the implementation of good corporate governance is the main foundation for business sustainability and long-term value creation. Therefore, IPCC continues to prioritize integrity, transparency, and accountability in every aspect of company management, and ensures compliance with all applicable laws and regulations.

The implementation of good corporate governance principles, which include transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and trusted (TARIFT), has become a



menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, IPCC juga mengadopsi Pilar Governansi Korporat yang mencakup perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan (ETAK) sebagai bagian dari nilai-nilai dasar perusahaan.

Dewan Komisaris bersama Direksi secara konsisten berupaya menanamkan nilai-nilai tata kelola dalam budaya organisasi. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris turut memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga menjunjung tinggi proses yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prosedur yang berlaku.

Pengawasan terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan melalui Komite di bawah Dewan Komisaris, seperti Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, yang secara aktif meninjau kesesuaian operasional Perseroan terhadap regulasi domestik maupun standar internasional. Dewan Komisaris mencatat bahwa IPCC telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam infrastruktur dan mekanisme tata kelola, yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PERANGKAT TATA KELOLA DAN KETERLIBATAN DALAM IMPLEMENTASINYA

Sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten mendorong Direksi agar seluruh proses pengurusan Perseroan senantiasa dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam berbagai kesempatan, Dewan Komisaris memberikan arahan strategis untuk memastikan bahwa penguatan sistem dan perangkat tata kelola perusahaan yang baik berjalan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi struktur, tetapi juga dari budaya dan perilaku organisasi.

Beberapa masukan utama yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2024 antara lain:

1. Senantiasa melakukan mitigasi risiko bilamana terjadi perubahan lingkungan bisnis dan secara transparan melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholder* dengan menggunakan kanal komunikasi resmi Perseroan.
3. Pelaksanaan pengendalian internal yang berjenjang perlu dipastikan berjalan dan termonitor dengan baik oleh manajemen, dengan konsep kendali berlapis (*three lines of defense*).
4. Menjadikan manajemen risiko menjadi budaya setiap Insan Perseroan dalam bekerja dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, serta selalu menganalisa dan memitigasi risiko yang mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

reference in strategic decision making. In addition, IPCC has also adopted the Corporate Governance Pillars which include ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability (ETAK) as part of the Company's core values.

Board of Commissioners together with the Board of Directors consistently strive to instill governance values in the organizational culture. In its implementation, Board of Commissioners also ensures that the decision-making process does not only focus on results, but also upholds processes that are in accordance with the principle of prudence and applicable procedures.

Supervision on the implementation of good corporate governance is carried out through Committees under Board of Commissioners, such as Audit Committee and Risk Monitoring Committee, which actively review the Company's operational compliance with domestic regulations and international standards. Board of Commissioners noted that IPCC has shown significant improvements in governance infrastructure and mechanisms, reflecting the Company's commitment to implementing good corporate governance principles comprehensively.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON GOVERNANCE INSTRUMENTS AND INVOLVEMENT IN IMPLEMENTATION

As part of its supervisory responsibilities, Board of Commissioners consistently encourages the Board of Directors to ensure that all management processes of the Company are always carried out in accordance with the principles of good corporate governance. On various occasions, Board of Commissioners has provided strategic direction to ensure that the strengthening of the good corporate governance system and tools is implemented comprehensively, not only structurally, but also in terms of organizational culture and behavior.

Some key inputs provided by Board of Commissioners to the Board of Directors throughout 2024 are:

1. Continuously mitigate risks in the event of changes in the business environment and report them transparently to Board of Commissioners and Shareholders, in accordance with applicable laws and regulations.
2. Respond to suggestions, expectations, issues, and complaints from stakeholders through the company's official communication channels.
3. Ensure that tiered internal control implementation is functioning and properly monitored by management, using a layered control concept (*three lines of defense*).
4. Make risk management a part of the corporate culture for every employee in performing their duties and making decisions on behalf of the Company, always analyzing and mitigating risks that significantly impact company performance.



5. Pemanfaatan dan implementasi sistem teknologi harus dapat diukur tingkat keberhasilan dan kemanfaatannya secara nyata. 6. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai aset Perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan 7. Menjalankan manajemen sumber daya manusia dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keharmonisan, termasuk dan tidak terbatas pada isu gender, sumber daya lokal, dan disabilitas. 8. Melakukan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 9. Memberikan layanan yang terbaik dan terdepan kepada Pelanggan. 10. Sebagai entitas yang baik, beretika dan bertanggungjawab terhadap keberadaannya di lingkungan sosial, maka IPCC senantiasa melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat dimana Perusahaan menjalankan aktivitasnya. 11. Menjunjung tinggi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta dalam melaksanakannya selalu memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 12. Mampu membuat dan menerapkan kebijakan hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan yang paling optimal.	5. Measure the success and real benefits of technology system utilization and implementation. 6. Optimize human capital as a vital asset to deliver added value to all stakeholders. 7. Manage human capital with fairness and harmony, including (but not limited to) gender, local resources, and disability inclusion. 8. Conduct effective and efficient procurement of goods and services in accordance with applicable laws and regulations. 9. Provide the best and leading service to customers. 10. As a good, responsible and ethical entity for its existence in the social environment, IPCC complies with all applicable laws and regulations in force, wherever the Company carries out its activities. 11. Uphold all agreements made with third parties and always ensure compliance with applicable regulations in their implementation. 12. Develop and implement policies that govern the relationship between the parent company and its subsidiaries to optimally achieve corporate objectives.

Melalui saran-saran tersebut, Dewan Komisaris berupaya memastikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga bagian dari identitas dan praktik keseharian IPCC dalam menciptakan nilai jangka panjang.

PENGAWASAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris memandang bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran fundamental dalam menjaga keandalan informasi keuangan, efisiensi operasional, serta perlindungan terhadap aset Perseroan. Sepanjang tahun 2024, pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan Komite Audit dan Audit Internal. Selain pemantauan langsung, kunjungan ke lokasi operasional juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman lebih komprehensif terhadap implementasi pengendalian internal di lapangan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal IPCC berada dalam kondisi yang memadai, baik dari segi struktur organisasi, prosedur operasional, maupun mekanisme kontrol yang diterapkan di seluruh unit kerja. IPCC juga terus melakukan perbaikan terhadap area yang direkomendasikan dalam audit internal maupun eksternal.

Through these recommendations, Board of Commissioners strives to ensure that good corporate governance is not only a formal obligation but also part of IPCC's identity and daily practice in creating long-term value.

SUPERVISION ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

Board of Commissioners views that the internal control system has a fundamental role in maintaining the reliability of financial information, operational efficiency, and protection of the Company's assets. Throughout 2024, supervision on the effectiveness of internal control system is carried out periodically through coordination with Audit Committee and Audit Internal. In addition to direct monitoring, visits to operational locations are also made to obtain a more comprehensive understanding of the implementation of internal control in the field.

Based on the results of these monitoring and evaluations, Board of Commissioners assesses that IPCC internal control system is in adequate condition, both in terms of organizational structure, operational procedures, and control mechanisms implemented in all work units. IPCC also continues to make improvements to areas recommended in internal and external audits.



Dewan Komisaris mendorong agar sistem pengendalian internal tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kepatuhan, tetapi juga dijadikan alat manajerial yang efektif untuk memastikan ketepatan proses bisnis, ketepatan pelaporan, serta kemampuan adaptasi terhadap risiko operasional yang berkembang seiring dengan transformasi digital.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bersama Komite Pemantau Risiko secara aktif melakukan evaluasi atas kebijakan, proses, dan mitigasi risiko yang diterapkan oleh Direksi sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko IPCC telah dikembangkan secara memadai dan proporsional dengan kompleksitas bisnis Perseroan. Profil risiko telah dipetakan dengan baik, mencakup risiko operasional, keuangan, kepatuhan, hingga risiko strategis dan digital. Proses mitigasi berjalan dengan dukungan sistematis, didukung oleh peran aktif unit-unit kerja terkait dan penggunaan teknologi yang relevan.

Kecukupan sistem manajemen risiko IPCC juga tercermin dari keterlibatan manajemen dalam melakukan pemutakhiran profil risiko, pembelajaran atas kejadian risiko sebelumnya, serta budaya kehati-hatian yang semakin tertanam dalam proses pengambilan keputusan. Dewan Komisaris mendorong agar pendekatan *risk-based thinking* semakin ditanamkan dalam setiap lini kegiatan, untuk memperkuat daya tahan perusahaan dalam menghadapi tantangan masa depan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dewan Komisaris memandang bahwa sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas perusahaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan. Pengelolaan WBS di lingkungan IPCC dilakukan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), dengan pengawasan dari Komite Audit.

Seluruh laporan yang diterima melalui kanal WBS dianalisis dan ditindaklanjuti secara akuntabel. Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara rutin melakukan reviu atas efektivitas sistem, termasuk pembahasan dengan UPG untuk memperkuat kapabilitas deteksi dan respons terhadap potensi pelanggaran. Hingga akhir tahun 2024, Tim UPG Perseroan tidak menerima adanya laporan pengaduan terkait dengan tindakan pelanggaran aturan dan/atau kode etik, tindakan gratifikasi atau pun korupsi.

Pada tahun 2024 Dewan Komisaris mendukung penguatan sistem WBS dengan mengintegrasikan layanan aduan dengan sistem dan saluran terintegrasi dengan Pelindo serta KPK sehingga menjadikan segala proses lebih transparan dimana terdapat

Board of Commissioners encourages the internal control system not only to be a means of fulfilling compliance, but also to be used as an effective managerial tool to ensure the accuracy of business processes, accuracy of reporting, and the ability to adapt to operational risks that develop along with the digital transformation.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

In carrying out its function, Board of Commissioners, together with the Risk Monitoring Committee, actively evaluated the policies, processes, and risk mitigation measures implemented by the Board of Directors throughout 2024.

Based on this evaluation, Board of Commissioners considers that IPCC's risk management system has been adequately and proportionally developed in line with the complexity of the Company's business. The risk profile has been well mapped, covering operational, financial, compliance, strategic, and digital risks. The mitigation process is systematically supported by the active roles of relevant work units and the use of appropriate technologies.

The adequacy of IPCC's risk management system is also reflected in management's involvement in updating risk profiles, learning from past risk events, and the growing culture of prudence in decision-making processes. Board of Commissioners encourages the continued embedding of a risk-based thinking approach in all lines of activity to strengthen the Company's resilience in facing future challenges.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Board of Commissioners views that the Whistleblowing System (WBS) is an important instrument in maintaining the integrity of the company and providing protection for the rights of stakeholders. WBS management in IPCC is carried out through the Gratification Control Unit (UPG), with supervision from the Audit Committee.

All reports received through the WBS channel are analyzed and followed up in an accountable manner. Board of Commissioners through the Audit Committee routinely reviews the system effectiveness, including discussions with the UPG to strengthen detection capabilities and responses to potential violations. Until the end of 2024, the Company's UPG Team has not received any reports of complaints related to violations of rules and/or codes of conduct, acts of gratification or corruption.

In 2024, Board of Commissioners supported the strengthening of the Whistleblowing System (WBS) by integrating the complaint service with a system and channels connected to Pelindo and KPK, thereby making all processes more transparent. One of the

keunggulan yaitu terjaminnya kerahasiaan pelapor, objektivitas penanganan, integrasi dengan sistem tata kelola yang lebih luas, termasuk kebijakan *Subsidiary Governance* yang mengatur hubungan antara induk dan anak perusahaan.

EVALUASI KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta tiga komite utama, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan komite nominasi dan remunerasi. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan Piagam Komite masing-masing. Evaluasi dilakukan setiap tahun terhadap kinerja, efektivitas rekomendasi, serta kontribusi masing-masing komite terhadap fungsi pengawasan Dewan. Seluruh komite dinilai memberikan masukan yang memadai dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis tata kelola dan mitigasi risiko.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun buku 2024, tidak terdapat perubahan dalam susunan maupun komposisi Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan"). Struktur Dewan Komisaris tetap terdiri dari tiga anggota, seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

Komposisi ini telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis organisasi serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan praktik tata kelola perusahaan terbuka. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas tinggi, kompetensi profesional, serta komitmen waktu dan perhatian penuh dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, independensi menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan senantiasa menjunjung prinsip kehati-hatian serta objektivitas dalam menjaga kepentingan terbaik Perseroan dan pemangku kepentingan.

Dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam di bidang kepelabuhanan, keuangan, audit, dan regulasi, Dewan Komisaris secara kolektif memberikan kontribusi strategis dalam memperkuat arah kebijakan perusahaan, memastikan pelaksanaan tata kelola yang akuntabel, serta mendukung pencapaian visi IPCC sebagai penyedia layanan terminal kendaraan yang unggul dalam konektivitas dan berkelas dunia.

Informasi lengkap mengenai susunan dan masa jabatan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

advantages is the guaranteed confidentiality of the whistleblower, objective handling, integration with broader governance systems, including the Subsidiary Governance policy which regulates the relationship between the parent company and its subsidiaries.

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

In exercising its supervisory duties and responsibilities, Board of Commissioners is assisted by Secretary of Board of Commissioners and three main committees, namely Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination, Remuneration and GCG Committee. Throughout 2024, Board of Commissioners assessed that all committees had carried out their duties well and in accordance with their respective Committee Charters. Evaluations are conducted annually on the performance, effectiveness of recommendations, and contribution of each committee to the Board's supervisory function. All committees are assessed as providing adequate input and supporting strategic decision-making based on governance and risk mitigation.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Throughout the 2024 fiscal year, there were no changes in the composition of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Company"). The structure of Board of Commissioners remains composed of three members, a President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners.

This composition has been prepared by considering the strategic needs of the organization as well as compliance with laws and regulations and public company governance practices. All members of Board of Commissioners have high integrity, professional competence, and a commitment of time and full attention in carrying out their supervisory duties and providing advice to the Board of Directors.

In carrying out the supervisory function, independence is the main principle upheld. Each member of Board of Commissioners has no conflict of interest in decision-making, and at all times upholds the principles of prudence and objectivity in protecting the best interests of the Company and stakeholders.

With diverse backgrounds and experiences in the fields of ports, finance, audit, and regulation, Board of Commissioners collectively provides strategic contributions in strengthening the direction of company policy, ensuring the implementation of accountable governance, and supporting the achievement of IPCC's vision as a world-class vehicle terminal service provider with excellence in connectivity.

Complete information regarding the composition and term of office of Board of Commissioners as of December 31, 2024 is presented in the following table:



Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2024
 Structure and Composition of Board of Directors As of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Drajat Sulistyio	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 27 Tanggal 13 April 2022 Deed of Minutes of Extraordinary GMS No. 27 Dated April 13, 2022	April 2022 - Penutupan RUPST 2025 April 2022 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1st
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Appointed as Independent Commissioner of IPCC based on Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 concerning the Statement of Meeting Resolutions of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.	Agustus 2020 - Penutupan RUPST 2025 August 2020 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1st
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021. Appointed as Independent Commissioner of IPCC based on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.	Juni 2021 - Penutupan RUPST 2025 June 2021 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1st

PENUTUP DAN APRESIASI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan IPCC atas dedikasi, kolaborasi, dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2024. Upaya yang konsisten dalam menjaga kinerja, meningkatkan layanan, serta menjalankan transformasi digital menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ke depan.

Kami juga menghaturkan terima kasih kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan, sehingga memungkinkan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dengan baik dan independen. Tak lupa, penghargaan kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan atas hubungan yang konstruktif dan kolaborasi sinergis sepanjang tahun berjalan.

Dewan Komisaris berupaya kuat menjalankan amanah ini secara profesional, dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, guna mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan secara berkelanjutan.

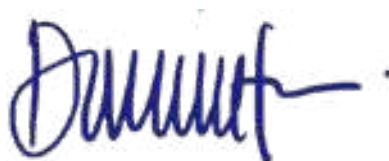
FINAL WORDS AND APPRECIATION

Board of Commissioners would like to express highest appreciation to the Board of Directors, management, and all employees of IPCC for their dedication, collaboration, and hard work throughout 2024. The consistent efforts in maintaining performance, improving services, and implementing digital transformation have become a crucial foundation for facing future challenges.

We would also like to extend gratitude to the Shareholders for the trust and support given, which has enabled Board of Commissioners to carry out its supervisory and advisory functions effectively and independently. Furthermore, we would like to express our appreciation to all stakeholders for constructive relationships and synergistic collaboration throughout 2024.

Board of Commissioners strives to fulfill this mandate professionally, upholding the principles of integrity, transparency, and accountability, in support of sustainable achievement of the Company's vision and mission.

Jakarta, 29 April 2025
 Atas nama Dewan Komisaris
 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 April 29, 2025
 On behalf of the Board of Commissioners
 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

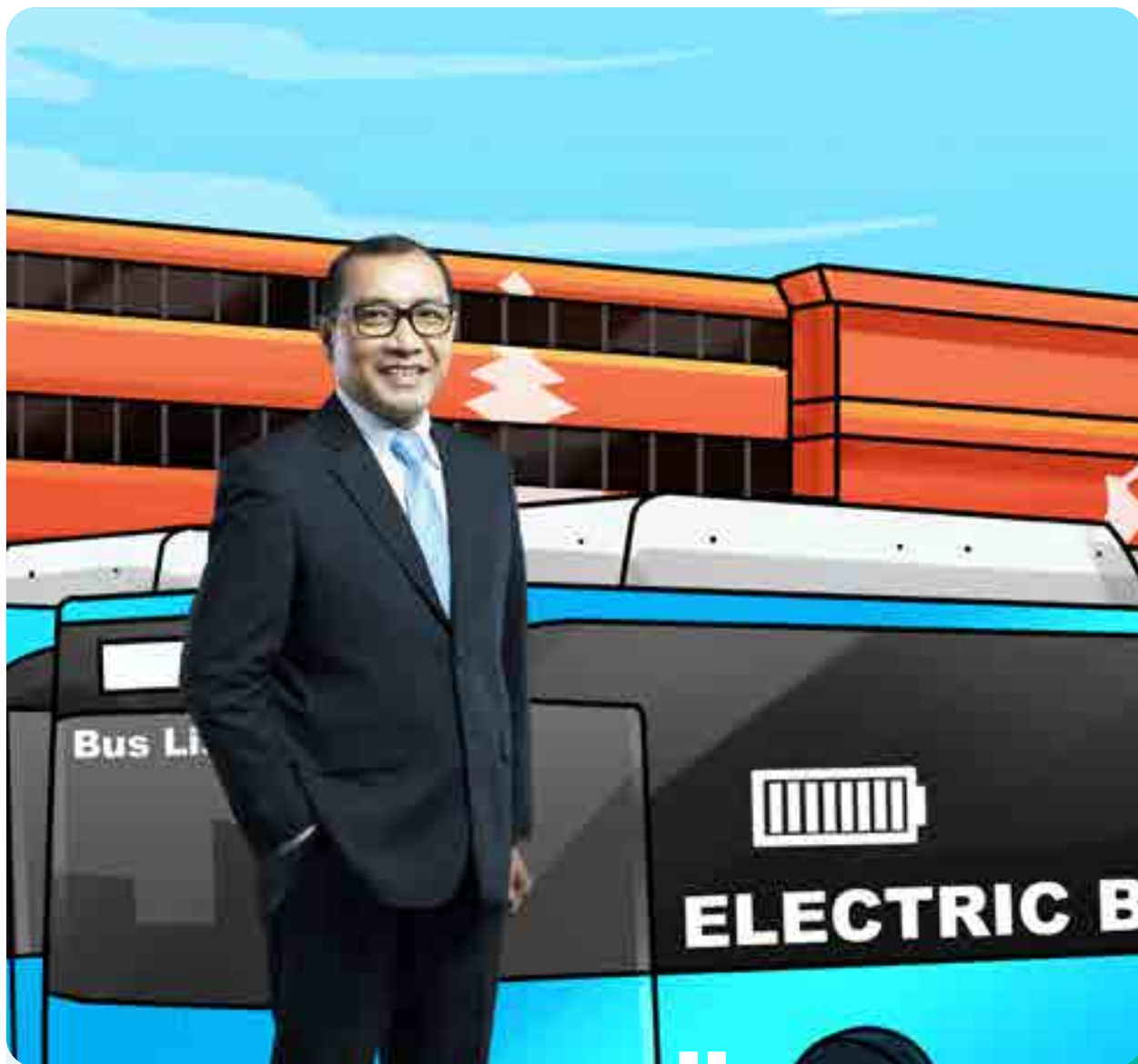


DRAJAT SULISTYO
 Komisaris Utama
 President Commissioner



LAPORAN DIREKSI

LAPORAN DIREKSI



SUGENG MULYADI

Direktur Utama

President Director

”

IPCC memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi kendaraan di tingkat domestik maupun ekspor-impor, berkat pengalaman panjang dalam penanganan kendaraan serta infrastruktur yang terus dikembangkan. IPCC has a strategic role in supporting the smooth vehicle distribution at the domestic and export-import levels, thanks to its long experience in vehicle handling and the infrastructure that continues to developed.



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut tahun 2024 dengan tekad kuat untuk melanjutkan langkah transformasi yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya, melalui strategi yang lebih terarah, terukur, dan terintegrasi. Percepatan digitalisasi menjadi pijakan utama dalam perjalanan IPCC menuju penguatan posisi sebagai penyedia layanan terminal kendaraan bertaraf internasional, sekaligus pelaku kunci dalam ekosistem logistik kendaraan nasional yang semakin kompleks dan dinamis.

Transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai adopsi teknologi, melainkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pembaruan proses, sistem, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Di tengah tuntutan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan, IPCC terus berupaya menjadikan digitalisasi sebagai motor penggerak perubahan menuju model bisnis yang lebih gesit, tangguh, dan berorientasi pada pelanggan.

IPCC memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi kendaraan di tingkat domestik maupun ekspor-impor, berkat pengalaman panjang dalam penanganan kendaraan serta infrastruktur yang terus dikembangkan. Didukung oleh sinergi dengan Pelindo Group, IPCC terus memperluas jangkauan layanan dan membangun konektivitas antarwilayah untuk menciptakan rantai pasok logistik kendaraan yang terintegrasi dan efisien.

Namun, tahun 2024 juga menjadi tahun yang menantang. Ketidakpastian global akibat perlambatan perdagangan internasional, fluktuasi harga energi, serta dinamika geopolitik, memberikan tekanan tersendiri terhadap sektor logistik dan otomotif. Di tingkat nasional, fluktuasi kurs rupiah dan tetap tingginya suku bunga acuan menjadi faktor yang memengaruhi iklim usaha. Sementara itu, industri otomotif menghadapi pergeseran tren menuju elektrifikasi dan peningkatan permintaan atas layanan logistik yang cepat dan akurat.

Dalam konteks tersebut, IPCC memandang transformasi digital bukan sebagai pilihan, melainkan keharusan. Keberhasilan menjawab tantangan dan memenuhi ekspektasi pelanggan ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan membangun sistem yang dapat menghubungkan seluruh komponen ekosistem kendaraan, mulai dari produsen, pelabuhan, logistik darat, hingga konsumen akhir, dalam satu rantai nilai yang saling terhubung dan berorientasi pada keunggulan layanan.

Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan Saya mewakili Direksi menyampaikan Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengelolaan Perseroan sepanjang tahun buku 2024, sekaligus sebagai sarana

Dear Shareholders and Stakeholders,

With gratitude and praise to Allah SWT, the Almighty God, we welcome the year 2024 with a strong determination to continue the transformation journey initiated in previous years, through strategies that are more focused, measurable, and integrated. Accelerated digitalization has become the main foundation of IPCC's journey toward strengthening its position as an internationally recognized vehicle terminal service provider, as well as a key player in an increasingly complex and dynamic national vehicle logistics ecosystem.

Digital transformation is not merely understood as technology adoption, but as a comprehensive approach that includes process renewal, system development, and the enhancement of human capital capabilities. Amid demands for efficiency, transparency, and faster services, IPCC continues to position digitalization as the driving force behind the shift toward a more agile, resilient, and customer-oriented business model.

IPCC plays a strategic role in supporting the smooth distribution of vehicles both domestically and in export-import activities, backed by extensive experience in vehicle handling and continuously developed infrastructure. Supported by synergy with Pelindo Group, IPCC continues to expand its service coverage and build interregional connectivity to create an integrated and efficient vehicle logistics supply chain.

However, 2024 has also proven to be a challenging year. Global uncertainties due to a slowdown in international trade, energy price fluctuations, and geopolitical dynamics have placed added pressure on the logistics and automotive sectors. Nationally, exchange rate fluctuations and persistently high benchmark interest rates have influenced the business climate. Meanwhile, the automotive industry is undergoing a shift toward electrification and increasing demand for fast and accurate logistics services.

In this context, IPCC views digital transformation not as an option, but a necessity. The ability to overcome challenges and meet customer expectations is determined by the ability to adapt, innovate, and build systems that connect all components of the vehicle ecosystem, from manufacturers, ports, and land logistics, to end consumers, into a single, interconnected value chain centered on service excellence.

On this valuable occasion, please allow me on behalf of the Board of Directors to present this Annual Report as a form of accountability for the management of the Company throughout the 2024 fiscal year, and as a strategic communication tool for



komunikasi strategis kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan, pencapaian kinerja, serta prospek usaha IPCC ke depan.

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Kondisi ekonomi global sepanjang 2024 masih dibayangi oleh perlambatan perdagangan internasional, fluktuasi harga energi, serta ketegangan geopolitik yang memicu ketidakpastian pasar. Situasi ini memberikan tekanan terhadap sektor otomotif dan logistik global, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, di tengah tantangan tersebut, industri otomotif nasional menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang stabil.

Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa penjualan mobil domestik sepanjang 2024 tercatat sebesar 1,01 juta unit. Meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, permintaan tetap relatif tinggi untuk kendaraan komersial dan kendaraan listrik. Segmen ekspor juga tetap menjadi penopang utama, dengan lebih dari 490.000 unit kendaraan diekspor ke berbagai negara tujuan, menandakan kepercayaan pasar global terhadap kualitas produksi otomotif nasional (Gaikindo, 2024). Pertumbuhan sektor ini turut didorong oleh pengembangan infrastruktur, stimulus industri otomotif, dan meningkatnya minat terhadap kendaraan elektrifikasi.

Perkembangan industri otomotif ini secara langsung berdampak positif terhadap aktivitas bongkar muat kendaraan di terminal kendaraan yang dikelola IPCC, baik dari sisi volume domestik maupun ekspor-impor. IPCC merespons peluang ini secara strategis dengan mengoptimalkan kapasitas layanan, memperluas jaringan operasional, serta mempercepat adopsi teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan.

Momentum pertumbuhan 2024 juga menjadi titik balik bagi IPCC dalam membuktikan bahwa strategi digitalisasi yang dijalankan bukan hanya transformasional, tetapi juga berorientasi hasil. Kolaborasi antar divisi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen terhadap layanan pelanggan bertaraf internasional menjadi katalis utama yang mendorong pencapaian kinerja usaha yang berkelanjutan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2024

Menghadapi dinamika perkembangan makro ekonomi, diikuti oleh industri otomotif dan logistik yang semakin kompleks, Direksi menetapkan strategi yang berfokus pada penguatan posisi IPCC sebagai pemimpin layanan bongkar muat kendaraan dengan daya saing global. Strategi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan volume, tetapi juga pada peningkatan nilai perusahaan secara menyeluruh melalui ekspansi terarah, digitalisasi proses, dan kolaborasi strategis lintas entitas.

shareholders and stakeholders regarding IPCC's policy direction, performance achievements, and business outlook going forward.

ECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

Throughout 2024, the global economy has remained to be overshadowed by the the slowdown in international trade, energy price fluctuations, and geopolitical tensions that continue to fuel market uncertainty. These situations have put pressure strain on the global automotive and logistics sectors, including in Southeast Asia. However, amid these challenges, the national automotive industry has demonstrated resilience and stable growth potential.

Data from the Association of Indonesia Automotive Industries (Gaikindo) shows that domestic car sales in 2024 reached 1.01 million units. Although slightly declined decline from the previous year, the demand remains relatively high for commercial vehicles and electric vehicles. The export segment also continues to become a key pillar, with over 490,000 vehicles exported to various international markets, reflecting global confidence in the quality of Indonesian automotive production (Gaikindo, 2024). Growth in this sector has also been driven by infrastructure development, automotive industry stimulus, and increasing interest in vehicle electrification.

This development in the automotive industry has had a direct positive impact on vehicle loading and unloading activities at vehicle terminals managed by IPCC, both in domestic and export-import volumes. IPCC has responded strategically to this opportunity by optimizing service capacity, expanding its operational network, and accelerating the adoption of digital technologies to improve service efficiency and speed.

The growth momentum in 2024 has also marked a turning point for IPCC in proving that its digitalization strategy is not only transformational but also results-driven. Cross-division collaboration, human capital competency enhancement, and a commitment to internationally benchmarked customer service have become the main catalysts driving sustainable business performance achievements.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES FOR 2024

In response to the evolving macroeconomic landscape and followed by the increasing complexity of automotive and logistics industries, Board of Directors has established a strategy focused on strengthening IPCC's position as a leading vehicle loading and unloading service provider with global competitiveness. This strategy is not only volume-oriented but also aims to enhance the Company's overall value through targeted expansion, process digitalization, and strategic cross-entity collaboration.



Salah satu langkah utama yang dilakukan IPCC pada tahun 2024 adalah pengambilalihan pengelolaan (*transfer operatorship*) terminal kendaraan di beberapa area kerja Pelindo. Terminal baru yang berhasil diintegrasikan mencakup lokasi di Banjarmasin, dengan total kapasitas tambahan mencapai 39.000 unit per tahun.

Langkah ini memperluas jangkauan layanan IPCC dan memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa terminal kendaraan terintegrasi di kawasan Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Sejalan dengan perluasan jangkauan layanan, Perseroan juga melaksanakan strategi integrasi dan standarisasi operasional melalui penerapan sistem kerja yang lebih terstruktur dan efisien. Fokus diarahkan pada digitalisasi dan sistemasi seluruh proses bisnis, yang diwujudkan melalui pengembangan platform operasional terintegrasi, serta pelaksanaan otomatisasi di berbagai titik layanan utama dimana implementasi sistem ini telah mencakup lima wilayah kerja.

Untuk mendukung efektivitas operasional, IPCC mengembangkan model layanan dan operasi yang terintegrasi dengan fungsi dan enabler yang terpusat. Hal ini mendorong peningkatan koordinasi antar unit, yang ditunjukkan oleh penggunaan sistem operasi yang sama diseluruh terminal IPCC.

Peningkatan kapasitas *car distribution management* (CDM) menjadi salah satu fokus utama, dengan perluasan jaringan dan penambahan armada untuk distribusi kargo. Penerapan sistem pelacakan digital pada distribusi kendaraan memungkinkan visibilitas penuh dan pelacakan kendaraan secara *real-time* dengan akurasi mencapai 100%. Transformasi digital terus dipacu sebagai inisiatif strategis IPCC yang tergambar sepanjang 2024 yaitu digitalisasi proses bisnis mencakup data *receiving-delivery* kargo dan penempatan kargo pada layanan PDC.

TRANSFORMASI DIGITAL SEBAGAI PILAR PERTUMBUHAN

Di tengah tuntutan efisiensi, kecepatan, dan keandalan layanan logistik kendaraan, digitalisasi menjadi faktor kunci yang dapat menguatkan daya saing serta memperluas peran IPCC dalam ekosistem logistik nasional maupun global. Salah satu tonggak penting transformasi digital IPCC adalah implementasi PTOS-C (Pelindo Terminal Operating System Car). Sistem ini mengelola seluruh aktivitas terminal secara *real time*—mulai dari pemesanan dan perencanaan layanan, pelaksanaan operasional, hingga pelaporan kinerja dan penerbitan tagihan. Di tahun 2024, PTOS-C telah digunakan di Terminal Domestik Jakarta dan Satelit Belawan, serta terhubung dengan sistem Bea Cukai (CEISA), untuk ekspor-impor platform IBS, dan sistem pelanggan otomotif untuk mempercepat alur *clearance* dan meningkatkan akurasi layanan.

Selagi PTOS-C memperkuat pondasi digital di sisi operasional utama, IPCC juga menjalankan sistem *Car Terminal Operating System* (CARTOS) yang berfungsi untuk memastikan kegiatan

One of IPCC's key actions in 2024 is the takeover of operatorship for vehicle terminals in several of Pelindo's operational areas. The new terminal that has been successfully integrated include locations in Banjarmasin, with a total additional capacity of 39,000 units per year.

This initiative expands IPCC's service reach and reinforces its position as an integrated vehicle terminal service provider across Eastern, Central and Western Indonesia. In line with the expansion of service coverage, the Company also implemented a strategy of integration and operational standardization through the implementation of a more structured and efficient work system. efficient working system. The focus is on the digitization and systemization of all business processes, which is realized through the development of an integrated platform, as well as the implementation of automation at various key service points where the implementation of this system has covered five working areas.

To support operational effectiveness, IPCC has developed an integrated service and operations model with centralized functions and enablers. This encourages increased coordination between units, as demonstrated by the use of the same operating system across all IPCC terminals.

Enhancing car distribution management (CDM) capacity is a key focus, involving network expansion and addition of fleet for cargo distribution. The implementation of a digital tracking system in vehicle distribution allows for full visibility and real-time vehicle tracking with an accuracy of 100%. Digital transformation continues to be driven as a strategic initiative of IPCC which is reflected throughout 2024, namely digitalization of business processes including receiving-delivery data cargo and cargo placement in PDC services.

DIGITAL TRANSFORMATION AS A PILLAR OF GROWTH

Amid demands for efficiency, speed, and reliability in vehicle logistics services, digitalization has become a key factor in strengthening competitiveness and expanding IPCC's role within both national and global logistics ecosystems. One of the key milestones in IPCC's digital transformation is the implementation of PTOS-C (Pelindo Terminal Operating System Car). This system manages all terminal activities in real time—from service booking and planning, to operational execution, performance reporting, and invoicing. In 2024, PTOS-C has been implemented at Jakarta Domestic Terminal and Belawan Satellite, and is integrated with the Customs system (CEISA), IBS platform, and automotive customer systems to streamline clearance flows and improve service accuracy.

While PTOS-C strengthens the digital foundation in core operations, IPCC also operates the Car Terminal Operating System (CARTOS), which ensures accurate recording of loading

bongkar muat tercatat dengan akurat melalui pemindaian *barcode* (VIN). CARTOS juga menjembatani aktivitas lapangan dengan sistem pelaporan dan keuangan, karena terintegrasi dengan *Billing* CARTOS, yaitu sistem yang menghasilkan dokumen tagihan secara otomatis dan langsung terhubung ke sistem ERP.

Penguatan sistem operasi juga tercermin dari penerapan *Automatic Gate System*, yang memungkinkan truk masuk dan keluar tanpa harus melewati proses manual. Sistem ini telah mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat aspek keamanan. Di sisi lain, *E-Ticket System*, *TPS Online*, dan *CARDOM* yang sudah disempurnakan dengan sistem *PTOS-C* melengkapi digitalisasi di terminal domestik dengan fitur-fitur pemrosesan data dan dokumen secara elektronik.

E-Ticket System yaitu tiket digital untuk pengguna jasa yang ingin mengakses layanan IPCC. Sistem ini terintegrasi dengan *gate* dan sistem kepabeanan untuk memastikan kelengkapan data sebelum kendaraan memasuki terminal. Sedangkan *TPS Online* yaitu sistem operasional IPCC yang terhubung dengan Bea Cukai secara daring, sehingga proses izin masuk/keluar barang di *TPS* (Tempat Penimbunan Sementara) dapat dilakukan secara elektronik dan terekam otomatis. Adapun *CARDOM* (*Car Terminal Operating System Domestik*) sebuah sistem yang didesain untuk terminal domestik. Sistem ini membantu pengelolaan data dan arus kendaraan dengan integrasi langsung ke sistem perencanaan dan pelaporan operasional. Sistem ini juga terhubung dengan sistem pembayaran (*IBS*) dan ERP keuangan.

Agar seluruh proses terpantau secara *real-time*, IPCC juga mengaplikasikan *Dashboard* Operasional dan Strategis, sebuah sistem yang dapat menyajikan data trafik dan persebaran kargo dalam bentuk visual interaktif. *Dashboard* ini tidak hanya membantu manajemen dalam pengambilan keputusan cepat sekaligus menciptakan transparansi data di seluruh rantai operasional.

Transformasi tidak berhenti di lini operasional. Di sisi manajemen dan dukungan layanan, IPCC mengimplementasikan *SAP ERP* (*Systems, Applications, and Products in Data Processing/Enterprise Resource Planning*), yaitu sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi *back-office*, termasuk keuangan, pengadaan, manajemen SDM, dan proyek (*PS*). Sistem ini memastikan seluruh transaksi administratif dilakukan secara terintegrasi dan efisien.

Sedangkan untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman dan stabil, IPCC menerapkan kerangka *Enterprise Architecture* dan standar keamanan *NIST*, serta membangun sistem *Identity and Access Management* (*IAM*), integrasi jaringan, dan pengamanan data yang kuat. Upaya ini turut didukung oleh investasi senilai Rp2,98 miliar pada 2024 untuk peningkatan infrastruktur, perangkat pendukung, dan sistem pengawasan.

Pada semester II 2024, IPCC meluncurkan *IT Master Plan 2025–2029* sebagai *roadmap* baru yang akan menjadi panduan utama

and unloading activities through *barcode* (VIN) scanning. CARTOS also bridges field activities with reporting and financial systems, being integrated with *CARTOS Billing*—a system that automatically generates billing documents and connects directly to the ERP system.

Operational system strengthening is also reflected in the implementation of the *Automatic Gate System*, which enables trucks to enter and exit without manual processes. This system has reduced waiting times, increased productivity, and enhanced security. Additionally, the *E-Ticket System*, *TPS Online*, and *CARDOM* which has been enhanced with *PTOS-C* system complete the domestic terminal's digitalization with features for electronic data and document processing.

The *E-Ticket System* is a digital ticketing platform for service users who want to access IPCC services. It is integrated with the *gate* and customs systems to ensure data completeness before vehicles enter the terminal. *TPS Online* is IPCC's operational system connected online with Customs, allowing electronic and automatically recorded entry/exit approvals for goods at Temporary Storage Facilities (*TPS*). *CARDOM* (*Car Terminal Operating System Domestic*) is a system designed for domestic terminals. This system supports vehicle data and traffic management with direct integration into planning and operational reporting systems, and is also connected with the payment system (*IBS*) and financial ERP.

To monitor all processes in *real-time*, IPCC also uses the Operational and Strategic *Dashboard*, a system that presents cargo traffic data and distribution in an interactive visual format. This dashboard not only aids management in making quick decisions but also fosters data transparency across the operational chain.

Transformation extends beyond operations. In management and service support, IPCC has implemented *SAP ERP* (*Systems, Applications, and Products in Data Processing/Enterprise Resource Planning*), a system that supports back-office functions including finance, procurement, HR management, and projects (*PS*). This system ensures all administrative transactions are conducted in an integrated and efficient manner.

To ensure all systems operate securely and reliably, IPCC has adopted an *Enterprise Architecture* framework and *NIST* security standards, and built robust *Identity and Access Management* (*IAM*), network integration, and data protection systems. These efforts are supported by an investment of Rp2.98 billion in 2024 for infrastructure upgrades, supporting equipment, and monitoring systems.

In the second half of 2024, IPCC launched the *IT Master Plan 2025–2029*, a new roadmap that will guide the Company's digital



transformasi sistem digital IPCC ke depan, menggantikan *master plan* sebelumnya. Fokus *roadmap* terbaru diarahkan pada *value chain integration* berbasis data tunggal yang andal (*single source of truth*).

TINJAUAN UMUM KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

Berbekal penguatan strategi dan sinergi serta inovasi digital sebagaimana disampaikan di atas, IPCC berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Sebagai bentuk penguatan keandalan kinerja keuangan, laporan keuangan IPCC tahun buku 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen dan memperoleh opini **Wajar Dalam Semua Hal Yang Material**. Opini ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan disusun secara andal sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan menjadi cerminan dari tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.

Salah satu pencapaian paling signifikan adalah peningkatan volume bongkar muat kendaraan secara konsisten di seluruh segmen layanan utama. Volume bongkar muat kendaraan roda empat tercatat sebesar 855.594 unit, tumbuh 7,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada kendaraan berat, yang melonjak hingga 63,19% menjadi 8.540.377 m³. Aktivitas bongkar muat motor juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,59%, dengan total volume mencapai 333.138 unit, sementara segmen suku cadang (*spare parts*) naik 8,41% menjadi 61.651 PKGS.

Capaian tersebut turut mendorong peningkatan pendapatan usaha sebesar 12,16% menjadi Rp824,60 miliar, dengan laba tahun berjalan mencapai Rp212,22 miliar, tumbuh 11,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Arus kas perusahaan semakin kuat dengan saldo kas dan setara kas sebesar Rp810,40 miliar, mencerminkan peningkatan kapasitas finansial untuk mendukung rencana ekspansi dan investasi digital ke depan.

Dari sisi non-keuangan, IPCC juga mencatat sejumlah pencapaian penting. Indeks kepuasan pelanggan menunjukkan tren positif, dengan peningkatan skor NPS (*Net Promoter Score*) yang mencapai 4,64 poin, meningkat dari tahun sebelumnya 4,63 (0,01 poin).

Waktu layanan bongkar muat kendaraan mengalami peningkatan yang signifikan dengan capaian kinerja untuk terminal internasional 250 unit per jam yang didukung oleh sistem monitoring berbasis digital dan integrasi operasional yang lebih responsif.

Keandalan layanan juga ditingkatkan melalui implementasi SLA (*Service Level Agreement*) berbasis sistem, dengan tingkat pemenuhan SLA mencapai 97%. Di sisi lain, intensitas pelatihan dan pengembangan SDM meningkat signifikan, dengan jam pelatihan sebanyak 3.177 meningkat dibandingkan tahun 2023 sejumlah 3.104 program pelatihan berbasis teknologi dan keselamatan kerja sepanjang tahun.

system transformation moving forward, replacing the previous master plan. The new roadmap focuses on value chain integration based on a reliable single source of truth.

GENERAL OVERVIEW OF COMPANY PERFORMANCE IN 2024

Armed with the strengthening of strategy and synergy as well as digital innovation as mentioned above, IPCC managed to record solid performance growth, both from an operational and financial perspective. As a form of strengthening the reliability of financial performance, IPCC financial statements for 2024 fiscal year has been audited by an independent Public Accounting Firm and obtained unqualified opinion, in all material respects. This opinion indicates that the financial statements is prepared reliably in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and is a reflection of transparent and accountable financial governance.

One of the most significant achievements was the consistent increase in vehicle loading and unloading volumes across all major service segments. The loading and unloading volume of four-wheeled vehicles was recorded at 855,594 units, growing 7.33% compared to the previous year. The most significant increase occurred in heavy vehicles, which jumped by 63.19% to 8,540,377 m³. Motorcycle loading and unloading activities also experienced growth of 5.59%, with total volume reaching 333,138 units, while the spare parts segment rose 8.41% to 61,651 PKGS.

These achievements helped boost operating revenue by 12.16% to Rp824.60 billion, with profit for the year reaching Rp212.22 billion, growing 11.19% compared to the previous year. The Company's cash flow was further strengthened with cash and cash equivalents of Rp810.40 billion, reflecting an increased financial capacity to support future expansion plans and digital investments.

On the non-financial front, IPCC also recorded a number of notable achievements. The customer satisfaction index showed a positive trend, with an increase in the NPS (*Net Promoter Score*) score which reached 4.64 points, an increase from the previous year which reached 4.63 (0.01).

Service time for loading and unloading vehicles has increased with a performance achievement for the international terminal of international terminal of 250 units per hour supported by a digital digital-based monitoring system and more responsive operational integration. responsive operational integration.

Service reliability was also improved through the implementation of system-based SLA (*Service Level Agreement*), with the SLA fulfillment rate reaching 97%. On the other hand, the intensity of training and human resource development increased significantly, with training hours of 3,177, an increase compared to 2023 with a total of 3,104 technology-based training programs and occupational safety throughout the year.

Pertumbuhan ini juga diperkuat oleh keberhasilan IPCC dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pelaku utama industri otomotif. Penghargaan dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) atas kontribusi IPCC melalui program *SAIL Strong*, serta kerja sama layanan logistik dan *Pre-Delivery Center* (PDC) bersama Hyundai Motor Indonesia, BMW, dan produsen global lainnya, menjadi bukti nyata atas kepercayaan pasar terhadap kualitas layanan IPCC.

Kinerja positif ini menjadi cerminan atas efektivitas strategi Perseroan dalam mengoptimalkan peran sebagai simpul distribusi kendaraan di Indonesia. IPCC terus menguatkan posisinya dalam ekosistem logistik kendaraan yang berkelanjutan.

PENGUATAN KAPABILITAS SDM DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Keberhasilan digitalisasi di IPCC tidak hanya ditentukan oleh sistem yang canggih, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelolanya secara adaptif dan profesional. Di tengah percepatan digitalisasi dan tuntutan layanan logistik yang semakin kompleks, SDM IPCC terus dikembangkan menjadi talenta yang unggul, tangguh, dan berwawasan global.

Sepanjang 2024, berbagai program peningkatan kapabilitas telah dijalankan untuk membangun kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri. IPCC mendorong karyawan untuk tidak hanya memahami sistem operasional, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, manajerial, dan pengambilan keputusan berbasis data. Program pelatihan internal dirancang selaras dengan transformasi proses bisnis, sementara pelatihan eksternal dilaksanakan melalui kemitraan strategis dengan institusi global dan pelaku industri otomotif internasional.

Kolaborasi pelatihan bersama mitra strategis, seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), telah menghasilkan program unggulan seperti *SAIL Strong* (*Strengthening Attitude, Improving Skill, and Elevating Knowledge for Driver Operator*). Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan keselamatan kerja, tetapi juga membentuk mentalitas kerja yang disiplin dan berorientasi hasil.

Selain peningkatan kompetensi teknis, IPCC juga mendorong pencapaian standar profesional melalui program sertifikasi berskala internasional. Karyawan dari berbagai level fungsional difasilitasi untuk mengikuti pelatihan bersertifikat di bidang logistik, IT, keselamatan kerja, serta manajemen risiko dan pelayanan pelanggan.

Seluruh upaya pengembangan ini dijalankan dalam kerangka budaya kerja yang berlandaskan pada *agility, service excellence, dan continuous improvement*. IPCC menanamkan semangat kerja kolaboratif dan adaptif, yang memungkinkan setiap individu untuk cepat merespons perubahan, memperbaiki proses secara berkelanjutan, dan memberikan pelayanan yang konsisten kepada mitra usaha maupun pengguna jasa.

This growth was also reinforced by IPCC's success in forging strategic partnerships with various key players in the automotive industry. The award from Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) for IPCC's contribution through the *SAIL Strong* program, as well as the cooperation of logistics services and *Pre-Delivery Center* (PDC) with Hyundai Motor Indonesia, BMW, and other global manufacturers, are clear evidence of market confidence in the quality of IPCC services.

This positive performance is a reflection of the effectiveness of the Company's strategy in optimizing its role as a vehicle distribution node in Indonesia. IPCC continues to strengthen its position in a sustainable vehicle logistics ecosystem.

STRENGTHENING HC CAPABILITIES AND CORPORATE CULTURE

The success of digitalization at IPCC is not only determined by a sophisticated system, but especially by the quality of human capital who are able to manage it adaptively and professionally. Amidst the acceleration of digitalization and the demands of increasingly complex logistics services, IPCC HC continues to be developed into superior, resilient, and globally-minded talents.

Throughout 2024, a variety of capability improvement programs have been carried out to build digital competencies that are in line with industry needs. IPCC encourages employees to not only understand operational systems, but also have analytical, managerial, and data-based decision-making capabilities. Internal training programs are designed in line with business process transformation, while external training is carried out through strategic partnerships with global institutions and international automotive industry players.

Training collaboration with strategic partners, such as Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), has resulted in superior programs such as *SAIL Strong* (*Strengthening Attitude, Improving Skill, and Elevating Knowledge for Driver Operators*). This program is not only focused on improving technical skills and work safety, but also on creating a disciplined and results-oriented work mentality.

In addition to improving technical competency, IPCC also encourages the achievement of professional standards through international certification programs. Employees from various functional levels are facilitated to take certified training in logistics, IT, occupational safety, as well as risk management and customer service.

All of these development efforts are carried out within the framework of a work culture based on *agility, service excellence, and continuous improvement*. IPCC instills a collaborative and adaptive work spirit, which allows each individual to respond quickly to change, improve processes continuously, and provide consistent service to business partners and service users.



PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan sepanjang tahun 2024. Perumusan strategi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam *Board Manual*, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan diturunkan secara operasional ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Seluruh proses tersebut dijalankan secara terstruktur dan kolaboratif, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan arah kebijakan strategis Pelindo sebagai entitas induk.

Dalam melaksanakan fungsi ini, Direksi tidak hanya menjalankan tugas normatif, tetapi juga aktif mendorong penyesuaian strategi agar tetap relevan terhadap tantangan dan peluang bisnis. Tahun 2024 menjadi momentum penting, di mana IPCC menavigasi fase akselerasi transformasi digital, integrasi proses, dan ekspansi layanan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan volume, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang melalui digitalisasi menyeluruh, peningkatan kapabilitas SDM, dan penguatan kemitraan strategis.

Proses perumusan strategi melibatkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisis tren industri logistik kendaraan, serta masukan dari pemangku kepentingan. Direksi menetapkan bahwa strategi 2024 difokuskan pada perluasan jangkauan layanan melalui pengambilalihan operatorship terminal kendaraan di sejumlah wilayah kerja Pelindo, pengembangan sistem PTOS-C dan CARTOS untuk integrasi layanan digital, serta penguatan sistem manajemen keuangan dan sumber daya melalui ERP SAP.

Direksi juga memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang ditetapkan selaras dengan Visi dan Misi IPCC, khususnya dalam upaya menghadirkan layanan terminal kendaraan yang modern, efisien, dan terhubung dengan ekosistem otomotif nasional maupun global. Komitmen terhadap keberlanjutan, tata kelola yang baik, serta prinsip *customer-centric* menjadi nilai dasar yang selalu diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan strategis.

Melalui peran aktif dalam perumusan strategi, Direksi tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga penggerak utama dalam memastikan seluruh elemen organisasi bergerak dalam harmoni, searah dengan tujuan jangka panjang Perseroan. Strategi yang tepat, dieksekusi secara konsisten, menjadi landasan utama dalam menjaga daya saing dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN FORMULATING CORPORATE STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

Board of Directors played a central role in formulating the Company's strategies and strategic policies throughout 2024. Strategy formulation was carried out in accordance with the provisions outlined in the Board Manual and the Company's Long-Term Plan (RJPP), and operationally translated into the Corporate Work Plan and Budget (RKAP). This entire process was conducted in a structured and collaborative manner, taking into account external environmental dynamics and the strategic direction of Pelindo as the parent entity.

In carrying out this function, Board of Directors did not only fulfill normative duties but also actively encouraged strategy adjustments to remain relevant in the face of business challenges and opportunities. The year 2024 marked an important momentum as IPCC navigated a phase of digital transformation acceleration, process integration, and service expansion. Accordingly, the strategies and policies developed were not solely growth-oriented in terms of volume but also focused on long-term value creation through comprehensive digitalization, enhancement of human capital capabilities, and the strengthening of strategic partnerships.

The strategy formulation process involved an evaluation of the previous year's performance, analysis of trends in the vehicle logistics industry, and input from stakeholders. Board of Directors determined that the 2024 strategy would focus on expanding service coverage through the acquisition of vehicle terminal operatorship in several Pelindo work regions, the development of PTOS-C and CARTOS systems for digital service integration, and the strengthening of financial and resource management systems through ERP SAP.

Board of Directors also ensured that every strategic policy aligned with IPCC's Vision and Mission, particularly in the efforts to deliver modern, efficient, and interconnected vehicle terminal services within both national and global automotive ecosystems. A commitment to sustainability, good governance, and customer-centric principles remained foundational values that are consistently integrated into strategic policy development.

Through its active role in strategy formulation, Board of Directors serves not only as a guide but also as the primary driver in ensuring that all organizational elements move in harmony and in line with the Company's long-term goals. A well-crafted strategy, executed consistently, becomes the cornerstone in maintaining competitiveness and creating sustainable business growth.



PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS DIJALANKAN

Sepanjang tahun 2024, Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan seluruh kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam RKAP dapat dieksekusi secara optimal. Tugas dan tanggung jawab ini dijalankan melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap sasaran kinerja yang ditetapkan, baik dari sisi operasional, keuangan, transformasi digital, hingga penguatan tata kelola.

Direksi secara konsisten mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja secara berkala. Pertemuan ini dilakukan melalui berbagai forum formal seperti Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Kerja Direktorat, serta rapat evaluasi lintas fungsi yang membahas capaian program, kendala pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. Proses evaluasi ini menjadi sarana penting untuk memonitor pelaksanaan program transformasi digital seperti pengembangan sistem PTOS-C, CARTOS, serta integrasi dengan sistem kepabeanan dan mitra otomotif.

Pengawasan juga dilakukan secara tematik terhadap proyek-proyek strategis, termasuk pengembangan terminal baru, peningkatan layanan pelanggan berbasis teknologi, serta pemutakhiran sistem ERP dan infrastruktur digital. Melalui *dashboard* pelaporan dan sistem *monitoring* internal, Direksi dapat memantau perkembangan *real-time* dan melakukan pengambilan keputusan berbasis data.

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan dinamika eksternal atau kendala operasional yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target, Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKAP, sesuai dengan perubahan konteks pasar, arah kebijakan Pelindo Group, maupun kebutuhan bisnis jangka pendek. Seluruh revisi dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, termasuk permintaan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum implementasi kebijakan baru dilakukan.

Melalui pendekatan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis data, Direksi memastikan bahwa pelaksanaan strategi di tahun 2024 berjalan secara konsisten dan tetap sejalan dengan visi jangka panjang IPCC sebagai penyedia layanan terminal kendaraan modern yang terintegrasi, efisien, dan berstandar internasional.

PROCESSES PERFORMED BY BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES ARE EXECUTED

Throughout 2024, Board of Directors performed its duties and responsibilities to ensure that all policies and programs that have been formulated in the RKAP can be executed optimally. These duties and responsibilities are carried out through a mechanism of continuous control and evaluation of each performance target set, both in terms of operations, finance, digital transformation, and strengthening governance.

Board of Directors consistently holds coordination meetings with all working units on a regular basis. These meetings are conducted through various formal forums such as Board of Directors Meetings, Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors, Directorate Work Meetings, and cross-functional evaluation meetings that discuss program achievements, implementation constraints, and follow-up plans. This evaluation process is an important means to monitor the implementation of digital transformation programs such as the development of PTOS-C, CARTOS, and integration with customs systems and automotive partners.

Oversight is also carried out thematically on strategic projects, including the development of new terminals, technology-based customer service improvements, and upgrades to ERP systems and digital infrastructure. Through the reporting dashboard and internal monitoring system, Board of Directors can monitor real-time progress and make data-driven decisions.

If there are external dynamics or operational constraints that significantly affect the achievement of targets, Board of Directors has the authority to make adjustments to the RKAP, in accordance with changes in market context, Pelindo Group's policy direction, and short-term business needs. All revisions are carried out while still prioritizing good governance principles, including requests for consideration and approval from Board of Commissioners before the implementation of new policies.

Through a collaborative, adaptive and data-driven approach, Board of Directors ensures that the implementation of strategies in 2024 runs consistently and remains in line with IPCC's long-term vision as an integrated, efficient and international standard modern vehicle terminal service provider.



PENCAPAIAN KINERJA 2024 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TARGET

Sepanjang tahun 2024, IPCC berhasil mempertahankan performa usaha yang stabil dan mencatat sejumlah pencapaian positif, meskipun dalam situasi pasar yang masih diwarnai fluktuasi global serta dinamika industri otomotif dan logistik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, realisasi kinerja menunjukkan hasil yang relatif baik, dengan beberapa indikator utama bahkan melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun.

Perseroan mencatatkan skor *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 104,90 dari target 100,00, yang menunjukkan capaian kinerja Direksi yang sangat baik. Tingkat kesehatan perusahaan juga tercatat berada pada skor 96,00 dan masuk kategori "Sehat (AAA)", yang mencerminkan kondisi keuangan dan operasional yang stabil, terkendali, dan berkelanjutan.

Dari sisi pendapatan usaha, IPCC berhasil membukukan pendapatan operasi sebesar Rp824,60 miliar, atau mencapai 104,62% dari target RKAP 2024 sebesar Rp788,18 miliar. Kinerja ini ditopang oleh strategi diversifikasi layanan, peningkatan *throughput* kendaraan, serta implementasi sistem digital yang meningkatkan efisiensi proses layanan dan akurasi *billing*.

Keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya juga berdampak positif terhadap perolehan laba. Laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp212,22 miliar, jauh melampaui target sebesar Rp171,08 miliar atau 124,05% dari target. Capaian ini mengindikasikan pengelolaan yang efektif, baik dari sisi pendapatan maupun pengendalian beban usaha.

Dari sisi arus barang perdagangan luar negeri, bongkar muat mobil terealisasi sebanyak 439.960 unit, atau 99,10% dari target. Meskipun sedikit di bawah target, volume ini menunjukkan konsistensi permintaan pasar ekspor-impor kendaraan yang masih terjaga. Sementara itu, *sparepart* dalam satuan paket (PKGS) mencapai 78,16%, mencerminkan adanya tantangan dalam distribusi suku cadang yang dipengaruhi oleh kondisi rantai pasok global.

Adapun realisasi untuk kendaraan berat dalam satuan unit mencapai 10.755 unit, atau 68,33% dari target. Kinerja di segmen ini cenderung tertekan akibat menurunnya aktivitas proyek infrastruktur dan industri alat berat pada semester pertama 2024. Meskipun begitu, jika dilihat dari satuan volume (m³), baik kendaraan berat maupun *sparepart* mengalami pertumbuhan, hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi jenis muatan dan metode pengangkutan yang digunakan oleh pelanggan.

Di sisi keuangan neraca, jumlah aset IPCC per akhir 2024 tercatat sebesar Rp1,85 triliun, atau 96,92% dari target. Demikian pula dengan ekuitas yang tercapai 99,09%, menunjukkan bahwa secara fundamental, struktur keuangan Perseroan tetap terjaga

2024 PERFORMANCE AND COMPARISON WITH TARGETS

Throughout 2024, IPCC managed to maintain a stable business performance and recorded a number of positive achievements, despite a market situation that was still characterized by global fluctuations and the dynamics of automotive and logistics industries. Based on the evaluation of the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP), performance realization showed relatively good results, with several key indicators even exceeding the targets set at the beginning of the year.

The Company recorded a Key Performance Indicator (KPI) score of 104.90 from a target of 100.00, indicating excellent performance by the Board of Directors. The company's health level was also recorded at 96.00 and was categorized as "Healthy (AAA)", reflecting stable, controlled, and sustainable financial and operational conditions.

In terms of operating revenue, IPCC managed to book operating revenue of Rp824.60 billion, or reached 104.62% of the 2024 RKAP target of Rp788.18 billion. This performance was supported by a strategy of service diversification, increased vehicle throughput, and the implementation of a digital system that improved service process efficiency and billing accuracy.

Success in improving operational efficiency and cost management also had a positive impact on profit. Profit for the year was recorded at Rp212.22 billion, far exceeding the target of Rp171.08 billion or 124.05% of the target. This achievement indicates effective management, both in terms of revenue and control of operating expenses.

In terms of foreign trade goods flow, the loading and unloading of cars was realized at 439,960 units, or 99.10% of the target. Although slightly below the target, this volume shows the consistency of demand in the vehicle import-export market that is still maintained. Meanwhile, spare parts in units of packages (PKGS) reached 78.16%, reflecting the challenges in spare parts distribution influenced by global supply chain conditions.

The realization for heavy vehicles in units reached 10,755 units, or 68.33% of the target. Performance in this segment tended to be depressed due to the decline in infrastructure project activities and heavy equipment industry in the first half of 2024. However, in terms of volume (m³), both heavy vehicles and spare parts experienced growth, indicating a shift in preference for the type of cargo and transportation method used by customers.

In terms of balance sheet, IPCC's total assets as of the end of 2024 were recorded at Rp1.85 trillion, or 96.92% of the target. Similarly, equity reached 99.09%, indicating that fundamentally, the Company's financial structure is well maintained, despite



dengan baik, walaupun terdapat perbedaan tipis dari rencana awal. Struktur permodalan juga tetap sehat, di mana seluruh kebutuhan pendanaan tahun 2024 dipenuhi melalui pembiayaan internal.

Untuk mendukung transformasi dan ekspansi digital, IPCC merealisasikan investasi barang modal senilai Rp32,85 miliar, yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur sistem informasi, instalasi CCTV, perangkat pendukung operasional, serta penambahan perangkat TOS di sejumlah terminal. Realisasi ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun fondasi digital yang kuat sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Secara umum, meskipun terdapat beberapa indikator operasional yang belum sepenuhnya mencapai target, keberhasilan IPCC dalam mencatatkan pencapaian pendapatan dan laba di atas rencana menunjukkan efektivitas strategi bisnis yang dijalankan. Ke depan, Direksi akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian strategis guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan usaha di tengah dinamika industri otomotif dan logistik global.

TANTANGAN, KENDALA, DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Perjalanan transformasi dan ekspansi IPCC di tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Seiring dengan komitmen untuk memperluas cakupan layanan dan meningkatkan standar digitalisasi, IPCC dihadapkan pada dinamika eksternal dan tantangan internal yang memerlukan respons strategis dan adaptif.

Dalam proses perluasan *operatorship* terminal kendaraan di beberapa wilayah kerja Pelindo, IPCC harus menjalani proses pendekatan dan negosiasi yang tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepentingan, kesiapan infrastruktur lokal, serta harmonisasi sistem antarunit menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut, IPCC secara aktif menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan seluruh pihak terkait, serta memberikan pemahaman menyeluruh mengenai manfaat jangka panjang dari integrasi layanan terminal. Pendekatan berbasis kolaborasi ini terbukti mampu membangun kesepahaman yang kuat, sehingga sejumlah inisiatif ekspansi dapat dijalankan dengan hasil yang positif.

Tantangan eksternal lainnya muncul dari meningkatnya intensitas persaingan, baik dari terminal kendaraan domestik maupun pemain baru yang mulai mengembangkan layanan serupa, termasuk untuk pasar internasional. Dalam menjawab tantangan ini, IPCC terus memperkuat keunggulan kompetitif melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan kemitraan strategis, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan nilai tambah yang berbeda bagi pelanggan.

the slight difference from the initial plan. The capital structure also remains healthy, where all funding needs in 2024 are met through internal financing.

To support digital transformation and expansion, IPCC realized investment in capital goods worth Rp32.85 billion, which focused on developing information system infrastructure, CCTV installation, operational support devices, and adding TOS devices at a number of terminals. This realization demonstrates the Company's commitment in building a strong digital foundation as part of its long-term strategy.

In general, although there are several operational indicators that have not fully achieved the target, IPCC's success in recording revenue and profit achievements above the plan shows the effectiveness of business strategies implemented. Going forward, Board of Directors will continue to conduct periodic evaluations and strategic adjustments to ensure the sustainability of business growth amidst the dynamics of global automotive and logistics industry.

CHALLENGES, OBSTACLES, AND EFFORTS TO RESOLVE THEM

IPCC transformation and expansion journey in 2024 is inseparable from various challenges that must be faced. Along with the commitment to expand service coverage and improve digitalization standards, IPCC is dealing with external dynamics and internal challenges that require strategic and adaptive responses.

In the process of expanding vehicle terminal operatorship in several Pelindo work areas, IPCC must undergo an approach and negotiation process that does not always run smoothly. Differences in interests, local infrastructure readiness, and harmonization of systems between units are challenges in themselves.

To overcome this, IPCC actively establishes open and constructive communication with all relevant parties, and provides a comprehensive understanding of the long-term benefits of terminal service integration. This collaboration-based approach has proven to be able to build strong understanding, so that a number of expansion initiatives can be carried out with positive results.

Other external challenges arise from the increasing intensity of competition, both from domestic vehicle terminals and new players who are starting to develop similar services, including for the international market. In responding to this challenge, IPCC continues to strengthen its competitive advantage by improving service quality, strengthening strategic partnerships, and utilizing digital technology to create different added value for customers.



Di sisi internal, adaptasi terhadap model bisnis baru dan percepatan digitalisasi juga menjadi tantangan yang perlu ditangani secara sistematis. Perubahan sistem kerja yang lebih terotomatisasi dan terintegrasi membutuhkan kesiapan SDM dari berbagai lapisan organisasi. Direksi menyadari bahwa tidak semua unit kerja bergerak dengan kecepatan yang sama dalam menghadapi perubahan, sehingga langkah penguatan kapabilitas menjadi prioritas.

Sebagai respons, IPCC secara konsisten menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan SDM yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Program ini mencakup pelatihan teknis, digitalisasi, layanan pelanggan, dan manajerial, serta mendorong pencapaian sertifikasi profesional untuk meningkatkan daya saing SDM di tingkat internasional. Seluruh karyawan diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan arah strategis Perseroan.

Dalam mengevaluasi dan menangani berbagai tantangan tersebut, Direksi tidak hanya mengandalkan laporan evaluasi kerja, tetapi juga melakukan pendekatan langsung melalui *management walkthrough* ke berbagai area operasional. Keterlibatan aktif Direksi di lapangan memberikan ruang untuk memahami secara komprehensif kendala yang dihadapi, serta mempercepat pengambilan keputusan yang tepat guna mencegah dan memitigasi risiko secara lebih dini.

Dengan semangat kolaborasi, pendekatan yang inklusif, dan penguatan budaya kerja yang adaptif, IPCC mampu menghadapi tantangan sepanjang 2024 sebagai bagian dari proses bertumbuh menjadi penyedia layanan terminal kendaraan yang modern, terpercaya, dan siap bersaing secara global.

PROSPEK USAHA DAN ARAH STRATEGIS PERSEROAN 2025

Memasuki tahun 2025, tantangan ekonomi global dan nasional diprediksi masih akan membayangi kinerja berbagai sektor industri, termasuk logistik dan otomotif. Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan dan ketidakpastian pasar global menyebabkan lembaga-lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan yang lebih moderat. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2025, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,3%, di bawah rata-rata historis jangka menengah sebesar 3,7%. Sementara itu, *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7%, meskipun lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Di tengah tantangan global tersebut, *outlook* perekonomian nasional justru menunjukkan arah yang lebih positif. Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh dalam kisaran 4,7%–5,5%, didorong oleh permintaan domestik yang solid, stabilitas inflasi, serta perbaikan kinerja ekspor dan industri manufaktur. BI juga menargetkan inflasi tahunan tetap terjaga dalam kisaran sasaran, yakni sekitar 2,51%, yang turut menopang iklim investasi dan konsumsi nasional.

On the internal side, adaptation to new business models and acceleration of digitalization are also challenges that need to be addressed systematically. Changes to a more automated and integrated work system require readiness of human capital from various levels of the organization. Board of Directors realizes that not all work units move at the same speed in facing changes, thereby actions to strengthen capabilities are a priority.

In response, IPCC consistently organizes comprehensive and sustainable HC training and development programs. This program includes technical, digitalization, customer service, and managerial training, as well as encouraging the achievement of professional certification to improve HC competitiveness at the international level. All employees are given the same opportunity to develop their competencies according to the needs of work unit and strategic direction of the Company.

In evaluating and addressing these challenges, Board of Directors does not only rely on work evaluation reports, but also takes a direct approach through management walkthroughs to various operational areas. The active involvement of Board of Directors in the field provides space to comprehensively understand the obstacles faced, as well as accelerate the right decision-making to prevent and mitigate risks earlier.

With a spirit of collaboration, an inclusive approach, and an adaptive work culture strengthening, IPCC is able to face challenges throughout 2024 as part of the process of growing into a modern, trusted, and globally competitive vehicle terminal service provider.

BUSINESS OUTLOOK AND STRATEGIC DIRECTION OF THE COMPANY FOR 2025

Entering 2025, global and national economic challenges are expected to continue impacting the performance of various industrial sectors, including logistics and automotive. Ongoing geopolitical tensions and global market uncertainty have led international institutions to forecast more moderate growth. According to the January 2025 edition of the *World Economic Outlook* (WEO), the International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth at 3.3%, below the historical mid-term average of 3.7%. Meanwhile, the World Bank projected global growth at 2.7%, although this is higher than the previous year's realization.

Amid these global challenges, Indonesia's economic outlook shows a more positive trend. Bank Indonesia (BI) forecasted national economic growth in the range of 4.7%–5.5%, driven by strong domestic demand, inflation stability, and improved export and manufacturing sector performance. BI also aims to maintain annual inflation within the target range of approximately 2.51%, supporting a favorable investment and consumption climate.

Optimisme atas kondisi domestik turut tercermin dari kinerja sektor otomotif pada awal tahun. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan bahwa ekspor kendaraan roda empat dalam bentuk *Completely Built-Up* (CBU) mencapai 33.891 unit pada Januari 2025. Capaian ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekspor otomotif telah kembali pada jalurnya, dan menjadi sinyal positif bagi prospek usaha terminal kendaraan.

Berdasarkan proyeksi yang telah disusun, IPCC menargetkan pertumbuhan throughput sebesar 5-10% pada tahun 2025. Hal ini diharapkan akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan operasi sebesar 2%-5%, serta laba bersih tahun berjalan sebesar 2%-5% dibandingkan realisasi tahun 2024. Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, IPCC merencanakan alokasi investasi sebesar 80%-85% dari anggaran tahun sebelumnya, yang akan difokuskan pada pengembangan terminal dan sistem digitalisasi. Seluruh kebutuhan pendanaan direncanakan dipenuhi melalui pendanaan internal. Sementara itu, kebijakan pembayaran dividen tahun 2025 (atas laba tahun buku 2024) ditetapkan sebesar 80%, mencerminkan kinerja solid dan komitmen terhadap pemegang saham.

Untuk mencapai target tersebut, IPCC telah menetapkan lima prioritas strategis:

1. Peningkatan kapasitas terminal melalui penambahan lahan, penataan ulang (relayout), dan pengembangan gedung parkir baru guna mengantisipasi pertumbuhan throughput di masa depan.
2. Ekspansi pasar dan layanan baru, dengan membuka peluang kerja sama langsung dengan pemilik barang untuk layanan *stevedoring*, *cargodoring*, serta penguatan layanan *Pre-Delivery Center* (PDC) dan transportasi darat. IPCC juga merencanakan perluasan jaringan terminal kendaraan ke wilayah operasional baru.
3. Optimalisasi sistem operasional digital, khususnya implementasi sistem PTOS-C di seluruh terminal kendaraan, termasuk Terminal Internasional. Integrasi sistem ini bertujuan menciptakan sinergi antar terminal dalam pertukaran data dan pelayanan yang terstandarisasi.
4. Program efisiensi berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pengendalian anggaran, tetapi juga pada peningkatan efisiensi proses bisnis. Targetnya adalah menciptakan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan peningkatan biaya operasional.
5. Peningkatan kualitas SDM, melalui program pengembangan berbasis kompetensi, digitalisasi pembelajaran, internalisasi budaya kerja, serta keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan (*work-life balance* dan *well-being*).

IPCC menyadari bahwa bisnis terminal kendaraan merupakan bagian dari rantai pasok industri otomotif yang saling terkoneksi. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika industri manufaktur, pertambangan, konstruksi, hingga pertanian. Selain

This domestic optimism is also reflected in the early-year performance of automotive sector. Data from the Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO) shows that exports of four-wheeled vehicles in Completely Built-Up (CBU) form reached 33,891 units in January 2025. This achievement signals that automotive export activity is back on track and is a positive sign for the vehicle terminal business outlook.

Based on the projections that have been made, IPCC targets a throughput growth of 5-10% by 2025. This is expected to have a direct impact on the increase in operating income by 2%-5%, as well as net profit for the year by 2%-5% compared to the realization in 2024. In order to support this achievement, IPCC plans an investment allocation of 80%-85% of the previous previous year's budget, which will be focused on the development of terminal development and digitalization system. All funding requirements are planned to be met through internal funding. Meanwhile Meanwhile, the dividend payout policy for 2025 (on profit for financial year profit for the financial year 2024) is set at 80%, reflecting solid performance and commitment to shareholders and commitment to shareholders.

To achieve these targets, IPCC has established five strategic priorities:

1. Increase terminal capacity through land expansion, relayouts, and the development of new parking buildings to anticipate future throughput growth.
2. Expand markets and new services by opening opportunities for direct cooperation with cargo owners for stevedoring, cargodoring services, as well as strengthening Pre-Delivery Center (PDC) and land transportation services. IPCC also plans to expand its vehicle terminal network to new operational areas.
3. Optimize digital operational systems, especially the implementation of PTOS-C system across all vehicle terminals, including the International Terminal. This system integration aims to create synergy among terminals through standardized data exchange and services.
4. Implement continuous efficiency programs, not only focusing on budget control but also improving business process efficiency. The goal is to generate revenue growth that outpaces the increase in operational expenses.
5. Improve human capital quality through competency-based development programs, digital learning, work culture internalization, and a balance between productivity and employee well-being (work-life balance and well-being).

IPCC is fully aware that the vehicle terminal business is part of an interconnected automotive industry supply chain. Therefore, the growth of this sector cannot stand alone but is significantly influenced by developments in the manufacturing, mining, construction, and agricultural industries. In addition



potensi ekspor-impor kendaraan, IPCC juga melihat peluang besar dari sektor kendaraan berat dan alat industri lainnya.

Seluruh arah strategis tahun 2025 juga merupakan bagian dari implementasi peta jalan perusahaan dalam kerangka Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021–2025, dengan visi untuk menjadi *Car Terminal Connectivity Champion*. Strategi ini ditopang oleh dua pilar utama, yaitu standarisasi operasional & peningkatan komersial, serta penguatan kemitraan, sinergi, dan konektivitas. Sepuluh *strategic enablers* juga menjadi fondasi untuk memastikan keterpaduan langkah transformasi, mulai dari pengembangan model bisnis, digitalisasi proses, *governance & risk management*, hingga implementasi *IT Master Plan*.

Dengan mengusung tema *Integrated Connectivity* untuk tahun 2025, IPCC menargetkan peningkatan kualitas dan cakupan layanan terminal yang lebih terhubung, lebih efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pasar secara proaktif. Fokus akan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan fasilitas terminal, pengoperasian terminal baru, kolaborasi dengan pelaku logistik, serta implementasi *dedicated car terminal* yang mendukung efisiensi rantai pasok dan peningkatan pangsa pasar.

Melalui strategi yang terfokus dan berorientasi jangka panjang, IPCC optimistis dapat melanjutkan tren pertumbuhan positif dan memperkuat posisinya sebagai pengelola terminal kendaraan kelas dunia di tengah dinamika industri logistik kendaraan yang terus berkembang.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN

Berbagai inisiatif penguatan tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan, mulai dari penyempurnaan kebijakan internal, penguatan peran Direksi dan Dewan Komisaris, hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis. Komunikasi yang konstruktif antara manajemen dan pemegang saham melalui forum seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terus mendorong praktik pengelolaan Perseroan yang lebih seimbang dan responsif terhadap dinamika usaha.

Pengawasan dan evaluasi internal atas jalannya operasional Perseroan didukung oleh dua komponen penting: sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Keduanya saling melengkapi sebagai mekanisme deteksi dini dan pengendalian atas potensi risiko usaha, serta memastikan bahwa proses bisnis yang dijalankan senantiasa sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, IPCC juga memperkuat sistem pelaporan dan tindak lanjut hasil audit internal guna meningkatkan efektivitas pengendalian.

to the potential in vehicle import-export, IPCC also sees great opportunities in heavy equipment and other industrial vehicle sectors.

The 2025 strategic direction is also part of the Company's roadmap under the Long-Term Corporate Plan (RJPP) 2021–2025, with the vision to become the *Car Terminal Connectivity Champion*. This strategy is supported by two main pillars: operational standardization & commercial enhancement, and the strengthening of partnerships, synergy, and connectivity. Ten strategic enablers also form the foundation for integrated transformation steps, including business model development, process digitalization, governance & risk management, and implementation of the *IT Master Plan*.

With the theme of *Integrated Connectivity* for 2025, IPCC is setting a goal to enhance the quality and scope of terminal services to be more interconnected, more efficient, and better aligned with market needs. The focus will be on expanding terminal capacity and facilities, operating new terminals, collaborating with logistics players, and implementing dedicated car terminals to support supply chain efficiency and market share growth.

Through a focused and long-term-oriented strategy, IPCC is optimistic about continuing its positive growth trend and strengthening its position as a world-class vehicle terminal operator amid the evolving automotive logistics industry.

PROGRESS ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITHIN THE COMPANY

Various initiatives to strengthen good corporate governance have been implemented, ranging from improvements to internal policies, strengthening the roles of Board of Directors and Board of Commissioners, to enhancing transparency and accountability in strategic decision-making. Constructive communication between management and shareholders through forums such as the General Meeting of Shareholders (GMS) continues to promote a more balanced and responsive approach to business management.

Internal oversight and evaluation of company operations are supported by two key components: internal control system and risk management. These elements complement each other as early detection and control mechanisms for business risks, ensuring that business processes align with applicable policies, procedures, and regulations. Throughout 2024, IPCC also strengthened its reporting system and follow-up on internal audit results to enhance control effectiveness.



Di sisi lain, implementasi manajemen risiko dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur, selaras dengan kebijakan dan arah strategis Pelindo Group. IPCC secara aktif memetakan potensi risiko dari seluruh aspek operasional maupun non-operasional, dan menyusun mitigasi yang relevan berdasarkan tingkat eksposur risiko. Atas upaya tersebut, IPCC mencatat skor *Risk Management Index* (RMI) sebesar 3,09 dan skor GRC (*Governance, Risk & Compliance*) sebesar 2,6, yang keduanya dikategorikan sebagai "Managed".

IPCC juga berhasil meraih penghargaan *Runner-Up ASEAN GRC Award 2024* dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA), yang menegaskan reputasi IPCC sebagai entitas yang unggul dalam tata kelola, pengelolaan risiko, dan kepatuhan.

Selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, IPCC terus meningkatkan penyampaian informasi kepada pemegang saham dan publik. Melalui fungsi Sekretaris Perusahaan dan dukungan kanal komunikasi yang diperkuat, IPCC menyampaikan laporan berkala yang relevan, termasuk Laporan Keuangan Teraudit yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah melalui audit independen oleh akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan persetujuan RUPS. Langkah ini menunjukkan komitmen IPCC terhadap transparansi keuangan dan akuntabilitas publik.

Dalam aspek integritas dan pencegahan pelanggaran, IPCC terus mengembangkan dan mensosialisasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*). Sistem ini dirancang untuk memberikan sarana pelaporan yang aman, terpercaya, dan terjaga kerahasiaannya bagi seluruh pihak yang mengetahui adanya pelanggaran etika, hukum, atau penyimpangan lainnya di lingkungan perusahaan. Tahun 2024, IPCC memperbarui kebijakan pengelolaan gratifikasi, pungutan liar, serta prosedur pelaporan WBS melalui Surat Keputusan Direksi. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada karyawan maupun secara digital melalui kanal resmi perusahaan, guna memastikan pemahaman yang merata dan mendorong budaya pelaporan yang sehat dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk evaluasi atas efektivitas penerapan GCG, IPCC secara berkala melakukan assessment, baik melalui *self-assessment* oleh tim internal maupun oleh pihak independen. Untuk tahun ukur 2024 yang dilaporkan pada 2025, IPCC menggunakan parameter *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dan berhasil meraih skor 110,52 poin dengan predikat "Excellent" serta klasifikasi "*Leadership in Corporate Governance* (ASEAN Asset Class)". Hasil ini menunjukkan bahwa praktik GCG IPCC telah mencapai standar tinggi di tingkat kawasan dan menjadi refleksi konkret atas nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan transparansi yang dijalankan perusahaan.

Sebagai bagian dari Pelindo Group dan perusahaan terbuka, IPCC memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menjadi panutan dalam penerapan tata kelola. Dengan terus memperkuat sistem pengawasan, memastikan keterbukaan informasi, dan menyempurnakan kebijakan internal secara berkelanjutan, IPCC berkomitmen untuk mengelola perusahaan secara transparan,

On the other hand, risk management is implemented through a systematic and structured approach, in line with the policies and strategic direction of Pelindo Group. IPCC actively maps potential risks across all operational and non-operational aspects and develops relevant mitigation measures based on the level of risk exposure. As a result of these efforts, IPCC recorded a Risk Management Index (RMI) score of 3.09 and a Governance, Risk & Compliance (GRC) score of 2.6, both categorized as "Managed."

IPCC also earned the Runner-Up award at the ASEAN GRC Award 2023 from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA), affirming its reputation as a leading entity in governance, risk management, and compliance.

Aligned with the principles of accountability and transparency, IPCC continues to improve information disclosure to shareholders and the public. Through the role of the Corporate Secretary and strengthened communication channels, IPCC delivers relevant periodic reports, including Audited Financial Statements prepared in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) and audited by public accountant appointed based on GMS approval. This demonstrates IPCC's commitment to financial transparency and public accountability.

In terms of integrity and violation prevention, IPCC continues to develop and socialize its Whistleblowing System (WBS). This system is designed to provide a safe, reliable, and confidential reporting channel for anyone aware of ethical, legal, or other misconduct within the Company. In 2024, IPCC updated its policies on managing gratification, illegal levies, and WBS reporting procedures through a Board of Directors Decree. Socialization was carried out both in person and digitally through official company channels to all employees, to ensure broad understanding and to encourage a healthy and responsible reporting culture.

As part of its evaluation on the effectiveness of GCG implementation, IPCC regularly conducts assessments, either through self-assessment by internal teams or by independent parties. For the 2024 measurement year reported in 2025, IPCC used the ASEAN Corporate Governance Scorecard parameters and achieved a score of 110.52 points with an "Excellent" rating and a classification of "Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class)." This result demonstrates that IPCC's GCG practices have reached a high regional standard and serve as a concrete reflection of the Company's values of integrity, professionalism, and transparency.

As part of Pelindo Group and a public company, IPCC holds both moral and strategic responsibility to serve as a role model in governance implementation. By continuously strengthening oversight systems, ensuring information transparency, and refining internal policies, IPCC is committed to managing the Company in a transparent, fair, and sustainable manner, in line



adil, dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI DAN ANTI-GRATIFIKASI

Kami, seluruh Insan IPCC menjunjung tinggi prinsip integritas dan transparansi. Kami memiliki komitmen kuat untuk membangun organisasi yang bersih, bebas dari praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan penyimpangan etika lainnya. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan anti-korupsi yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta adopsi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, yang mengatur tata kelola pencegahan praktik penyuapan secara sistematis dan berkelanjutan. Komitmen ini diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh insan IPCC, serta tingkat kepatuhan 100% dalam pelaporan LHKPN bagi pejabat yang diwajibkan, sebagai bentuk nyata integritas dan keterbukaan.

Sepanjang tahun 2024, IPCC juga terus berupaya memperkuat pelaksanaan pengendalian gratifikasi, baik melalui penyusunan pedoman internal, sosialisasi secara berkala, hingga peluncuran saluran *Whistleblowing System* (WBS) yang aman dan terverifikasi. Laporan gratifikasi juga dapat disampaikan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Gratifikasi *Online* (GOL). Kebijakan ini diperkuat dengan prosedur pelaporan yang rinci dan terstruktur, serta mekanisme penyaluran barang gratifikasi yang transparan dan akuntabel oleh Tim UPG IPCC.

Kegiatan sosialisasi terus diintensifkan untuk membangun budaya sadar hukum di seluruh level organisasi. Salah satu agenda penting tahun ini adalah penyelenggaraan kegiatan "IPCC Bersih" dan peluncuran saluran WBS Pelindo dengan tema "*Berani Lawan dan Laporkan Korupsi, untuk Indonesia Maju*", yang dihadiri oleh lebih dari 80 peserta dari internal maupun eksternal perusahaan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KPK dan Pelindo Group, dan menjadi bukti nyata upaya IPCC dalam memperkuat integritas kelembagaan.

Sebagai hasil dari pelaksanaan sistem pengendalian yang kuat dan penerapan kebijakan secara konsisten, tidak terdapat satu pun kasus hukum, pelanggaran etika, maupun insiden yang berdampak negatif terhadap reputasi, operasional, maupun citra IPCC sepanjang tahun 2024.

PENGUATAN PRAKTIK KEBERLANJUTAN BERBASIS ESG

IPCC berupaya kuat melakukan pengelolaan usaha yang selaras dengan praktik-praktik yang berkelanjutan, di antaranya, dengan mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam seluruh proses bisnis. Sepanjang tahun 2024, IPCC telah melakukan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi emisi karbon, serta memperkuat dampak sosial positif bagi karyawan, masyarakat, dan mitra usaha.

with the principles of good corporate governance principles of good corporate governance.

IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION AND ANTI-GRATIFICATION POLICIES

We, the entire IPCC personnel, uphold the principles of integrity and transparency. We are strongly committed to building a clean organization, free from corruption, bribery, gratification, and other unethical practices. This commitment is realized through the implementation of an anti-corruption policy aligned with Law No. 31 of 1999 and the adoption of the Anti-Bribery Management System (SMAP) ISO 37001:2016, which governs the systematic and continuous prevention of bribery practices. This commitment is reinforced by the signing of Integrity Pact by all IPCC personnel and 100% compliance in reporting the State Officials' Wealth Report (LHKPN) for the required officials, as a tangible form of integrity and transparency.

Throughout 2024, IPCC also continued to strengthen the implementation of gratification control, through the development of internal guidelines, regular dissemination, and the launch of a secure and verified Whistleblowing System (WBS) channel. Gratification reports can also be submitted directly to the Corruption Eradication Commission (KPK) via Online Gratification System (GOL). This policy is supported by detailed and structured reporting procedures and a transparent and accountable mechanism for handling gratification items by IPCC's Gratification Control Unit (UPG) Team.

Dissemination activities were intensified to build a culture of legal awareness at all organizational levels. One of this year's key agendas was "Clean IPCC" event and the launch of Pelindo WBS channel with the theme "Dare to Fight and Report Corruption, for an Advanced Indonesia," attended by more than 80 participants from both within and outside the Company. The event featured speakers from KPK and Pelindo Group, serving as concrete evidence of IPCC's efforts to strengthen institutional integrity.

As a result of strong control systems and consistent policy implementation, there were no legal cases, ethical violations, or incidents negatively affecting IPCC's reputation, operations, or image throughout 2024.

STRENGTHENING ESG-BASED SUSTAINABILITY PRACTICES

IPCC strives to manage its business in line with sustainable practices, including by integrating environmental, social, and governance (ESG) principles into all business processes. Throughout 2024, IPCC has undertaken a number of strategic initiatives to improve resource efficiency, reduce carbon emissions, and strengthen positive social impacts for employees, communities, and business partners.

Dalam aspek lingkungan, IPCC mencatat penurunan konsumsi kertas hingga 34,87%, serta pengurangan drastis penggunaan kertas 3-ply sebesar 96,53% dibandingkan tahun sebelumnya—sebagai hasil dari optimalisasi sistem digital dan dokumentasi tanpa kertas (*paperless*). Di sisi lain, konsumsi energi menunjukkan peningkatan moderat sebesar 8,58% menjadi 6.009 GJ, selaras dengan intensitas kegiatan operasional yang meningkat. Konsumsi listrik tercatat sebesar 1,31 juta kWh, naik 6,03%, sedangkan konsumsi bahan bakar naik 19,08%.

Sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas, total emisi karbon IPCC meningkat menjadi 1.220 ton CO₂e atau naik sebesar 6,83% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, IPCC juga mencatat penguatan aksi mitigasi melalui penanaman 2.305 pohon, meningkat signifikan 192,51%, sebagai bagian dari program keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan. Biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dialokasikan sebesar Rp5,9 miliar, sebagai bentuk komitmen nyata terhadap tanggung jawab ekologis perusahaan.

Dari sisi sosial, IPCC terus membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, aman, dan mendukung pengembangan kompetensi. Rata-rata jam pelatihan per orang meningkat menjadi 40,73 jam/tahun, didukung oleh investasi pelatihan sebesar Rp1,16 miliar, naik 17,22% dibandingkan tahun sebelumnya. IPCC juga mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi pada skor 4,64 dari 5, serta mencatat peningkatan kepuasan pemasok dan pegawai yang tetap stabil.

Dalam aspek hubungan sosial kemasyarakatan, IPCC menyalurkan dana sebesar Rp1,19 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional, meskipun nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan fokus yang lebih tajam pada efisiensi dan efektivitas dampak.

Melalui seluruh inisiatif keberlanjutan tersebut, IPCC berharap bahwa inisiatif strategis yang telah dilakukan dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem logistik kendaraan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Agenda keberlanjutan ini, termasuk inisiatif menuju dekarbonisasi dan efisiensi energi, akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang IPCC menuju perusahaan terminal kendaraan berkelas dunia yang tangguh dan beretika.

In terms of the environment, IPCC recorded a 34.87% decrease in paper consumption, as well as a drastic reduction in the use of 3-ply paper by 96.53% compared to the previous year—as a result of optimizing digital systems and paperless documentation. On the other hand, energy consumption showed a moderate increase of 8.58% to 6,009 GJ, in line with the increasing intensity of operational activities. Electricity consumption was recorded at 1.31 million kWh, up 6.03%, while fuel consumption increased by 19.08%.

As a consequence of increased activities, IPCC's total carbon emissions increased to 1,220 tons of CO₂e or an increase of 6.83% from the previous year. However, IPCC also noted the strengthening of mitigation actions through the planting of 2,305 trees, a significant increase of 192.51%, as part of the biodiversity and environmental conservation program. Environmental management and monitoring costs were also allocated at Rp5.9 billion, as a form of real commitment to the Company's ecological responsibility.

In terms of social, IPCC continues to build an inclusive, safe employment system that supports competency development. The average training hours per person increased to 40.73 hours/year, supported by training investment of Rp1.16 billion, an increase of 17.22% compared to the previous year. IPCC also maintained a high level of customer satisfaction at a score of 4.64 out of 5, and recorded a stable increase in supplier and employee satisfaction.

In terms of social community relations, IPCC has distributed funds of Rp1.19 billion to support various social, educational, and community empowerment activities around the operational area, although this value has decreased compared to the previous year. This was done with a sharper focus on efficiency and impact effectiveness.

Through all of these sustainability initiatives, IPCC hopes that the strategic initiatives that have been carried out can contribute to creating a vehicle logistics ecosystem that is environmentally and socially responsible. This sustainability agenda, including initiatives towards decarbonization and energy efficiency, will continue to be improved as part of IPCC's long-term strategy towards becoming a world-class, resilient and ethical vehicle terminal company.



PENILAIAN DIREKSI ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Pada tahun 2024, Direksi IPCC membentuk Komite Investasi yang berfungsi sebagai unit pendukung Direksi dalam proses evaluasi dan pengelolaan investasi. Pembentukan Komite ini dituangkan secara resmi melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24, yang menandai komitmen Perusahaan dalam menciptakan proses investasi yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berbasis analisis yang komprehensif.

Komite Investasi memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan evaluasi kelengkapan dokumen usulan investasi, menilai kesesuaian program investasi dengan arah strategis perusahaan, serta memastikan bahwa setiap usulan investasi mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Manajemen (RKM), dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komite juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi strategis guna mempercepat proses implementasi program investasi.

Struktur keanggotaan Komite Investasi terdiri dari pejabat senior lintas fungsi yang relevan, dengan Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko bertindak sebagai Ketua Komite. Keanggotaan yang bersifat multidisiplin ini mencerminkan pendekatan kolektif dan kolaboratif yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, validasi, dan penyempurnaan setiap rencana investasi strategis IPCC.

Direksi menilai bahwa meskipun Komite Investasi merupakan unit yang baru dibentuk, peranannya telah mulai menunjukkan kontribusi positif dalam menjaga kualitas proses perencanaan dan pengendalian investasi. Direksi memberikan apresiasi atas responsivitas, kedalaman evaluasi, serta semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh seluruh anggota Komite dalam pelaksanaan tugasnya. Ke depan, Direksi akan berupaya mendorong optimalisasi peran Komite Investasi dalam memastikan setiap keputusan investasi didasarkan pada prinsip kehati-hatian, penciptaan nilai jangka panjang, serta sinergi dengan prioritas strategis Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

In 2024, IPCC Board of Directors formed an Investment Committee that functions as a supporting unit for Board of Directors in the investment evaluation and management process. The establishment of this Committee was officially stated in the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24, which marks the Company's commitment to creating a more structured, accountable, and comprehensive analysis-based investment process.

The Investment Committee has the primary responsibility to evaluate the completeness of investment proposal documents, assess the suitability of investment programs with the Company's strategic direction, and ensure that each investment proposal refers to the Company's Long-Term Plan (RJPP), Management Work Plan (RKM), and applicable laws and regulations. The Committee also plays an active role in providing strategic input and recommendations to accelerate the implementation process of investment programs.

The membership structure of the Investment Committee consists of relevant cross-functional senior officials, with the Director of Finance, HC, and Risk Management acting as the Committee Chairman. This multidisciplinary membership reflects the collective and collaborative approach that underlies the analysis, validation, and refinement of each IPCC strategic investment plan.

Board of Directors assesses that although the Investment Committee is a newly formed unit, its role has begun to show positive contributions in maintaining the quality of investment planning and control process. Board of Directors appreciates the responsiveness, depth of evaluation, and collaborative spirit demonstrated by all Committee members in carrying out their duties. Going forward, Board of Directors will strive to encourage optimization of the Investment Committee's role in ensuring that every investment decision is based on the principle of prudence, long-term value creation, and synergy with the Company's strategic priorities.

PENJELASAN DIREKSI TERKAIT PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi IPCC. Seluruh anggota Direksi yang menjabat pada awal tahun tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan hingga akhir tahun buku, sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya.

BOARD OF DIRECTORS EXPLANATION REGARDING CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2024, there were no changes in the composition of IPCC's Board of Directors. All members of Board of Directors who served at the beginning of the year continues to carry out their duties and responsibilities until the end of the fiscal year, as determined by the previous General Meeting of Shareholders.

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2024

Board of Directors Composition As of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023	April 2023 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama April 2023 - Closing of GMS 2025, First Period
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023	April 2023 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama April 2023 - Closing of GMS 2025, First Period
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Akta Nomor 06 tanggal 5 September 2023 Deed Number 06 dated September 5, 2023	September 2023 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama September 2023 - Closing of GMS 2025, First Period

Stabilitas dalam struktur kepemimpinan ini memberikan kontribusi positif terhadap kesinambungan implementasi strategi perusahaan, penguatan tata kelola, serta pelaksanaan agenda transformasi dan digitalisasi yang telah direncanakan. Direksi meyakini bahwa konsistensi kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menciptakan kolaborasi lintas fungsi, memperkuat budaya organisasi, serta menjaga momentum pertumbuhan berkelanjutan.

Stability in leadership structure has contributed positively to the continued implementation of the Company's strategies, the strengthening of governance, and the execution of planned transformation and digitalization agendas. Board of Directors believes that leadership consistency is a key factor in fostering cross-functional collaboration, reinforcing organizational culture, and maintaining the momentum for sustainable growth.



PENUTUP

Sebelum Kami menutup Laporan ini, izinkan Kami menegaskan kembali tentang komitmen Kami dan seluruh Insan IPCC, untuk terus membawa IPCC tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik, integritas, serta profesionalisme dalam setiap langkah. Keberhasilan yang telah diraih sepanjang tahun tidak semata menjadi tujuan akhir, melainkan menjadi pijakan untuk melanjutkan transformasi menuju ekosistem logistik kendaraan yang tangguh, digital, dan berdaya saing global.

Kami meyakini bahwa keberlanjutan usaha hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang solid, kepemimpinan yang adaptif, serta kepercayaan yang terjaga dari para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kami akan berupaya keras untuk memperkuat fondasi tata kelola, pengelolaan risiko, serta strategi berbasis nilai jangka panjang yang memberikan manfaat luas tidak hanya bagi Kami, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.

Akhirnya, atas nama Direksi, Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha, pelanggan, dan terkhusus karyawan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kepercayaan yang tiada henti kepada Kami. Kami berharap, sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mewujudkan IPCC sebagai pengelola terminal kendaraan berkelas dunia yang berintegritas, inovatif, dan berkelanjutan.

CLOSING

Before we close this Report, please allow us to once again reaffirm our commitment, together with all IPCC personnel, to continue guiding IPCC to grow and develop sustainably by upholding the values of good corporate governance, integrity, and professionalism in every step we take. The achievements made throughout the year are not merely the final goal, but a stepping stone to continue the transformation toward a resilient, digital, and globally competitive vehicle logistics ecosystem.

We believe that business sustainability can only be achieved through solid collaboration, adaptive leadership, and maintained trust from shareholders and all stakeholders. Therefore, we will make every effort to strengthen our governance foundations, risk management, and long-term value-based strategies that bring broad benefits not only to us but also to society and the environment.

Finally, on behalf of the Board of Directors, we would like to express our deepest appreciation and gratitude to all shareholders, the Board of Commissioners, business partners, customers, especially our employees, and all stakeholders who have continuously provided their support, cooperation, and trust in us. We hope that the synergy that have been built can continue to be strengthened to realize IPCC as a world-class, integrated, innovative, and sustainable vehicle terminal operator.

Jakarta, 29 April 2025
 Atas Nama Direksi
 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 April 29, 2025
 On behalf of the Board of Directors
 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk



SUGENG MULYADI
 Direktur Utama
 President Director



PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

STATEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS ON ACCOUNTABILITY
FOR THE ANNUAL REPORT OF FISCAL YEAR 2024 OF
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun Buku 2024 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap, dan Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 April 2025

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk for 2024 Fiscal Year has been reviewed and published in its entirety, and We are solely accountable for the accuracy of the content of this Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 29, 2025

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Drajat Sulistyo
Komisaris Utama
President Commissioner

Abdur Rahim Hasan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

LM. Arya Bima Yudiantara
Komisaris Independen
Independent Commissioner



PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS ON ACCOUNTABILITY FOR THE ANNUAL REPORT OF FISCAL YEAR 2024 OF PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun Buku 2024 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap, dan Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 April 2025

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk for 2024 Fiscal Year has been reviewed and published in its entirety, and We are solely accountable for the accuracy of the contents of this Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 29, 2025

DIREKSI

Board of Directors



Sugeng Mulyadi

Direktur Utama,

merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

President Director,

concurrently Acting Director of Commercial and Business Development



Bagus Dwipoyono

Direktur Operasi dan Teknik

Director of Operations and Technical



Wing Megantoro

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko

Director of Finance, HC and Risk Management



Profil Perusahaan

Company Profile

Mengelola terminal kendaraan terbesar di Indonesia, IPCC berupaya kuat membangun daya saing berbasis keunggulan operasional, inovasi digital, dan tata kelola berstandar tinggi untuk memperkuat posisi di pasar nasional dan regional.

Managing the largest vehicle terminal in Indonesia, IPCC strives to build competitiveness based on operational excellence, digital innovation, and high-standard governance to strengthen its position in the national and regional markets.



03



INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY



	Nama Perusahaan Company Name	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Informasi Perubahan Nama pada Tahun Buku Information on Name Changes in Fiscal Year	Tidak terdapat perubahan nama pada tahun buku No name change in Fiscal Year
	Tanggal Pendirian dan Beroperasi Date of Establishment and Operation	5 November 2012 November 5, 2012
	Kegiatan Usaha Business Activities	Pengelolaan terminal kendaraan dan menjalankan usaha-usaha di bidang bongkar muat kendaraan, bus, truk, alat berat dan kargo high & heavy yang meliputi pelaksanaan <i>stevedoring</i>, <i>cargodoring</i>, <i>receiving</i> dan <i>delivery</i>, pelayanan penumpukan serta pelayanan logistik dan value added lainnya sebagai <i>one stop services</i>. Management of vehicle terminals and running businesses in the field of loading and unloading of vehicles, buses, trucks, heavy equipment and high & heavy cargo which includes carrying out <i>stevedoring</i>, <i>cargodoring</i>, <i>receiving</i> and <i>delivery</i>, stacking services and logistics services and other value added as one stop services.
	Badan Hukum Legal Entity	Perseroan Terbatas Limited Liability Company
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Nomor 10 tahun 2012 tanggal 5 November 2012, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan perubahan terakhir ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 14 April 2018 dan telah disahkan Keputusan Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618.AH.01.02 tanggal 17 April 2018. Deed of Establishment Number 10 of 2012 dated November 5, 2012, has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-58515.AH.01.01 Year 2012. The Company's Articles of Association have been amended with the last amendment stipulated based on Deed Number 48 dated April 14, 2018 and has been approved by the Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0008618.AH.01.02 dated April 17, 2018.
	Status Perusahaan Company Status	Status perusahaan berubah sejak 1 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: S-38/MBU/01/2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia 02 tanggal 09 Februari 2022, yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 00147753.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 01 Maret 2022. The Company's status has changed since October 1, 2021 in accordance with the Deed of Statement of Resolution of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Number: S-38/MBU/01/2022 concerning Changes in Capital Structure and Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia 02 dated February 9, 2022, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU- 00147753.AH.01.02.YEAR 2022 dated March 1, 2022.




Modal Dasar
 Authorized Capital

Rp500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus rupiah).
 Rp500,000,000,000, (five hundred billion Rupiah) divided into 5,000,000,000 (five billion) shares, each share with a nominal value of Rp100 (one hundred rupiah).


Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
 Issued and Fully Paid-up Capital

Rp1.818.384.820 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) lembar saham dengan nilai nominal Rp181.838.482.000 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 Rp1,818,384,820 (one billion eight hundred eighteen million three hundred eighty four thousand eight hundred twenty rupiah) shares with a nominal value of Rp181,838,482,000 (one hundred eighty one billion eight hundred thirty eight million four hundred eighty two thousand rupiah).


Komposisi Pemegang Saham
 Shareholder Composition

- PT Pelindo Multi Terminal (71,28%)
- PT Pelabuhan Investama (5,54%)
- PT Multi Terminal Indonesia (0,72%)
- Publik/ *Common Shareholder* (22,46%)
- PT Pelindo Multi Terminal (71.28%)
- PT Pelabuhan Investama (5.54%)
- PT Multi Terminal Indonesia (0.72%)
- Public/Common Shareholder (22.46%)


Jumlah Karyawan
 Number of Employees

78 orang (2024)
 78 employees (2024)


Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
 Listing Date on the Indonesia Stock Exchange

9 Juli 2018
 July 9, 2018


Kode Saham
 Stock Code

IPCC


Jaringan Kantor
 Office Network

- 1 Kantor Pusat
- 1 Kantor Branch Jakarta
- 5 Kantor Satelit
- 1 Manajemen Kerja Sama Operasi
- 1 Head Office
- 1 Office Branch Jakarta
- 5 Satellite Offices
- 1 Joint Operation Management



Akses Terhadap Perseroan Termasuk Kantor Cabang atau Perwakilan

Access to the Company Including Branch or Representative Offices

JARINGAN KANTOR OFFICE NETWORK	ALAMAT ADDRESS
Kantor Pusat Head Office	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Jalan Sindang Laut No.100, Cilincing, Jakarta Utara, 14110 Telp: +62 21 4393 2251
Situs Web Website	www.indonesiacarterminal.co.id
Kontak Perusahaan Contact	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Jalan Sindang Laut No.100, Cilincing, Jakarta Utara, 14110 Telp : +62 21 4393 2251 E-mail corsec@indonesiacarterminal.co.id info@indonesiacarterminal.co.id komersial@indonesiacarterminal.co.id Media Sosial / Social Media Twitter : @IPCC Terminal Kendaraan Facebook : IPCC Terminal Kendaraan Instagram : @IPCC Terminal Kendaraan Youtube: IPCC Terminal Kendaraan Tiktok: IPCC Terminal Kendaraan LinkedIn: IPCC Terminal Kendaraan
Whistleblowing System	e-mail: pelindobersih@whistleblowing.link Telp: +62 2782 2345 atau +62 811 933 2345)
KANTOR SATELIT SATELLITE OFFICE	ALAMAT ADDRESS
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Pontianak / Pontianak Port	Jalan Pak Kasih Nomor 11, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat, 78112
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Belawan Medan / Belawan Medan Port	Jalan Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20411
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Makassar / Makassar Port	Jalan Nusantara No.329 Melayu Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, 90164
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Balikpapan / Balikpapan Port	Jl. Yos Sudarso No.30 Balikpapan, Kalimantan Timur 76111
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Banjarmasin / Banjarmasin Port	Jalan Barito Hilir No. 6, Telaga Biru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70119.
KANTOR MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASI JOINT OPERATION MANAGEMENT OFFICE	ALAMAT ADDRESS
Kantor MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Office	Jalan Beta Kawasan Industri Maspion V, Sukomulyo, Manyar, Gresik, Jawa Timur



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (“Perseroan” atau “IPCC”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tahun 2012 tanggal 5 November 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012. Anggaran Dasar ini telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 14 April 2018 dan telah disahkan Keputusan Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618.AH.01.02 tanggal 17 April 2018.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (“Company” or “IPCC”) was established under Deed of Establishment Number 10 of 2012 dated November 5, 2012, and was legalized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-58515.AH.01.01 of 2012. The Articles of Association have been amended with the latest amendment based on Deed Number 48 dated April 14, 2018 and has been ratified by the Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0008618.AH.01.02 dated April 17, 2018.



Sebelum resmi berdiri sebagai sebuah Perseroan berbadan hukum, Perseroan adalah *Strategic Business Unit (SBU)* dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II bernama Tanjung Priok Car Terminal (TPT) yang pengelolaannya 100% berada di bawah Pelindo II.

TPT beroperasi secara khusus sejak 28 November 2007 untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor kendaraan serta kargo secara *Roll on-Roll off (Ro-Ro)* dan menyediakan layanan kegiatan bongkar muat di Terminal Kendaraan Tanjung Priok.

Seiring dengan berkembangnya lini usaha TPT yang dikelola oleh IPC dan tingginya *demand* di Pelabuhan terhadap terminal kendaraan, maka pada 5 November 2012, TPT resmi berdiri sebagai entitas bisnis dengan nama PT Indonesia Kendaraan Terminal yang secara khusus didirikan untuk menyediakan layanan terminal kendaraan yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan sejumlah Pelabuhan/ Terminal

Before officially establishing itself as a legal entity, the Company was a Strategic Business Unit (SBU) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II called Tanjung Priok Car Terminal (TPT), which is 100% managed by Pelindo II.

TPT has been operating specifically since November 28, 2007, to support the export and import of vehicles and cargo by Roll on-Roll off (Ro-Ro) and provide loading and unloading services at Tanjung Priok Vehicle Terminal.

Along with the development of TPT lines of business managed by IPC and the high demand for vehicle terminals at the port, on November 5, 2012, TPT was officially established as a business entity under the name of PT Indonesia Kendaraan Terminal, which was specifically established to provide vehicle terminal services operating at the Port of Tanjung Priok, Jakarta, and a number of other Roll on - Roll off (Ro-Ro) ports/terminals in Indonesia.



Roll on - Roll off (Ro-Ro) lainnya di Indonesia. Dengan fasilitas dan peralatan khusus yang dimiliki untuk melayani kargo berupa kendaraan dan barang secara Ro-Ro, maka Perseroan mendapatkan penetapan status sebagai terminal kendaraan (*car terminal*) oleh Departemen Perhubungan.

Secara menyeluruh, layanan terminal yang diberikan Perseroan meliputi *Terminal Handling* dan *Value Added Services*. Layanan *Terminal Handling* yang disediakan Perseroan termasuk *Stevedoring*, *Cargodoring*, *Receiving*, dan *Delivery*. Sedangkan layanan *Value Added Services*, meliputi *Car Processing Center*, dan *Equipment Processing Center*, *Road Freight Services*, dan *Port Stock*. Perseroan juga menyatakan komitmennya untuk mendukung program Pemerintah dalam meminimalkan pengangkutan barang melalui jalur darat.

Pada 9 Juli 2018, Perseroan memulai tonggak sejarah baru sebagai Perseroan terbuka setelah melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) atas sebesar 509.147.700 (lima ratus sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus) dengan nilai nominal Rp100/per lembar saham yang mewakili atau setara 28,0% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Adapun kode saham Perseroan di BEI adalah "IPCC".

Sebagai pionir terminal khusus kendaraan di Indonesia dengan citra dan reputasi positif, Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada seluruh pengguna jasa serta pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan rencana strategi jangka panjang, Perseroan akan terus melakukan pengembangan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Selain berfokus pada ekspansi wilayah usaha, Perseroan juga secara berkesinambungan memperkuat sinergi bersama Pelindo Group terutama dalam mengintegrasikan terminal-terminal di bawahnya. Selain itu, Perseroan juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan dan mendukung efisiensi proses bisnis.

Pada tahun 2021, Perseroan telah bekerja sama dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan *soft launching* penggunaan *Radio Frequency Identification (RFID)* pada unit yang dibawa oleh TMMIN, yaitu Toyota. Langkah ini menjadi bagian dari perjalanan digitalisasi layanan Perseroan di era digital 4.0. Penggunaan RFID bertujuan untuk mendukung terciptanya *car logistic ecosystem* yang nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi IPCC namun juga kepada para pelanggan.

Pada 1 Oktober 2021, merger Pelindo secara resmi telah terlaksana, dengan ditandatanganinya Akta Penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Layanan Jasa Pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melebur menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo yang menjadi *surviving entity*. Merger tersebut

With special facilities and equipment to serve cargo in the form of vehicles and goods by Ro-Ro, the Company obtained status as a vehicle terminal (*car terminal*) by the Ministry of Transportation.

Overall, the terminal services provided by the Company include Terminal Handling and Value Added Services. The Terminal Handling services provided by the Company include Stevedoring, Cargodoring, Receiving, and Delivery. Meanwhile, the Value Added Services include Car Processing Center, and Equipment Processing Center, Road Freight Services, and Port Stock. The Company has also stated its commitment to supporting the Government's program in minimizing the transportation of goods by land.

On July 9, 2018, the Company began a new milestone as a public company after conducting a corporate action in the form of an Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 509,147,700 (five hundred and nine million, one hundred and forty-seven thousand, seven hundred) shares with a nominal value of Rp100/per share representing or equivalent to 28.0% of the Company's issued and fully paid capital. The Company's stock code on the IDX is "IPCC".

As a pioneer of vehicle-specific terminals in Indonesia with a positive image and reputation, the Company is committed to continuously maintaining and improving the quality of its services to all service users and other stakeholders. In line with its long-term strategic plan, the Company will continue to develop its business in order to provide services that meet market needs.

In addition to focusing on business expansion, the Company also continuously strengthens synergy with Pelindo Group, especially in integrating its terminals. In addition, the Company also pays great attention to the development of digital technology with the aim of improving customer service and supporting business process efficiency.

In 2021, the Company has collaborated with PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) to soft launch the use of Radio Frequency Identification (RFID) on the unit brought by TMMIN, namely Toyota. This step is part of the digitalization journey of the Company's services in the digital 4.0 era. The use of RFID aims to support the creation of a car logistics ecosystem which is expected to provide added value not only for IPCC but also for customers.

On October 1, 2021, Pelindo merger was officially completed with the signing of the Deed of Merger of four State-Owned Enterprises (SOEs) in the Port Services sector, namely PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merged into PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo which became the surviving entity. The merger



dilakukan dalam rangka peningkatan *value creation* bagi BUMN Pelabuhan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhanan nasional.

Pada tahun 2022, guna mempertahankan eksistensinya, Perseroan yang merupakan bagian dari rantai pasok ekosistem (*ecosystem value chain*) industri otomotif mulai menjajaki peluang bisnis industri tersebut sebagai bagian dari ekspansi bisnis yang dilakukan. Perseroan meyakini bahwa peluang bisnis yang ada telah sejalan dengan semangat "*Beyond The Gate*" yang diusung Perseroan di tahun ini. *Merger* antara PT Pelabuhan Indonesia I hingga IV (Perseroan) diiringi dengan dilakukannya perubahan logo dan *branding* pada tanggal 30 Juni 2022.

Sebagai tindak lanjut dari *merger* Pelindo, pada tahun 2022, dibentuk struktur organisasi Perseroan dimana terdiri dari empat regional yang terdiri dari sejumlah cabang dan juga pembentukan entitas baru sebagai *Sub-Holding* yang membawahi sejumlah anak perusahaan dari eks-Pelindo I hingga Pelindo IV. IPCC berada pada klaster Non Peti Kemas dengan PT Pelindo Multi Terminal sebagai entitas baru *Sub-Holding*. Dengan demikian, yang menjadi pemegang saham mayoritas IPCC ialah *Sub-holding* PT Pelindo Multi Terminal setelah terjadinya pengalihan saham/inbreng dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemilik 71,3% saham IPCC kepada *Sub-holding* PT Pelindo Multi Terminal.

Perseroan kemudian melakukan sosialisasi serah terima operasi Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Belawan kepada PT Pelindo Multi Terminal untuk peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan yang lebih baik lagi. Serah terima untuk Belawan, Medan terhitung sejak 1 Januari 2022 dan Makassar terhitung sejak 1 Mei 2022.

PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") adalah anak Perseroan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mengelola entitas bisnis kepelabuhanan di bidang operasi terminal *multipurpose* di Indonesia, seperti curah cair, curah kering, kargo umum dan lain sebagainya.

Dalam pengembangan inovasi bisnis, Perseroan terus berekspansi untuk dapat memberikan layanan terintegrasi berupa *Cargo Distribution Management* yang salah satunya ialah layanan lapangan penumpukan kargo sebelum didistribusikan via darat. Adapun layanan tersebut ialah *Pre-Delivery Center* (PDC). Layanan ini telah berhasil direalisasikan oleh Perseroan dengan dukungan para sumber daya manusia yang telah memiliki standarisasi pelayanan berkelas dunia. Dukungan ini menjadi keharusan demi mewujudkan *excellent operation* di layanan yang disediakan oleh Perseroan. Masuknya Perseroan ke dalam layanan PDC merupakan bagian dari realisasi komitmen Perseroan untuk menyediakan layanan-layanan pada ekosistem rantai distribusi kargo otomotif.

Dengan melihat peluang tersebut maka tidak tertutup kemungkinan Perseroan akan dapat menjalin kerja sama dengan sejumlah pabrikan otomotif. Saat ini, Hyundai Motor Indonesia merupakan pelanggan perdana yang telah menggunakan layanan anyar dari Perseroan ini.

was carried out in the context of increasing value creation for state-owned port companies. The objective of this initiative is to improve the effectiveness and efficiency of national ports.

In 2022, in order to maintain its existence, the Company, which is part of the automotive industry's ecosystem value chain, began to explore business opportunities in the industry as part of its business expansion. The Company believes that the existing business opportunities are in line with the "*Beyond The Gate*" spirit that the Company is promoting this year. The merger between PT Pelabuhan Indonesia I to IV (the Company) was accompanied by a change of logo and branding on June 30, 2022.

As a follow-up to Pelindo merger, in 2022, an organizational structure was formed consisting of four regions comprising a number of branches and also the formation of a new entity as a Sub-Holding that oversees a number of subsidiaries from ex-Pelindo I to Pelindo IV. IPCC is in the Non-Container cluster with PT Pelindo Multi Terminal as the new sub-holding entity. Thus, the major shareholder of IPCC is the sub-holding PT Pelindo Multi Terminal after the transfer of shares/inbreng from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the owner of 71.3% of IPCC shares to the sub-holding PT Pelindo Multi Terminal.

Afterward, the Company socialized the handover of operations at Makassar Port and Belawan Port to PT Pelindo Multi Terminal to improve the quality of port services. The handover for Belawan, Medan is effective from January 1, 2022, and Makassar is effective from May 1, 2022.

PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that manages port business entities in the field of multipurpose terminal operations in Indonesia, such as liquid bulk, dry bulk, general cargo and so on.

In developing business innovation, the Company continues to expand to be able to provide integrated services in the form of Cargo Distribution Management, one of which is the cargo stacking field service before being distributed by land. The service is the Pre-Delivery Center (PDC), and has been successfully realized by the Company with the support of human capital with world-class service standardization. This support is a must in order to realize excellent operation in the services provided by the Company. The Company's entry into PDC services is part of the realization of the Company's commitment to provide services to the automotive cargo distribution chain ecosystem.

By looking at these opportunities, it is possible that the Company will be able to collaborate with a number of automotive manufacturers. Currently, Hyundai Motor Indonesia is the first customer to use this new service from the Company.

Pada tahun 2023, Perseroan mulai melakukan pengoperasian Terminal RORO dan Kendaraan Pelabuhan Semayang, Balikpapan dan Pembangunan Ruang *Integrated Planning & Control*. Untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan, Perseroan mulai mengimplementasikan *Single System* ERP-SAP, Sistem *Billing* Praya, dan mulai melakukan pembangunan *Portal Customer Care System* (CCS).

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah melakukan berbagai strategi bisnis diantaranya penerapan pola kerjasama *Single Billing* untuk pelayanan bongkar muat Terminal Internasional dan ekspansi bisnis pelayanan operasi terminal di Terminal RORO dan Kendaraan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin pada 30 September 2024 yang secara efektif mulai dioperasikan pada tanggal 7 Oktober 2024. IPCC juga telah mengimplementasikan PTOS-C di Terminal Domestik *Branch* Jakarta dan Terminal Satelit Belawan serta melakukan layanan nilai tambah PDC untuk kargo Subaru, BMW dan Toyota.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA EMITEN

Sejak awal Perseroan berdiri hingga laporan tahunan ini diterbitkan, IPCC mengalami satu kali perubahan badan hukum dan nama, sebagai berikut:

Tanggal Date	28 November 2007 November 28, 2007	5 November 2012 November 5, 2012	9 Juli 2018 July 9, 2018
Nama dan Nama Perubahan Name and New Name after the Change	Tanjung Priok Car Terminal (TPT)	PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)
Status Perusahaan dan Alasan Perubahannya Company Status and Reason for Change	Strategic Business Unit (SBU)	TPT resmi sebagai entitas bisnis mandiri dengan badan hukum Perseroan Terbatas TPT officially became an independent business entity with a legal entity of Limited Liability Company	IKT melakukan pencatatan saham di BEI, sehingga statusnya bertambah menjadi Perusahaan Terbuka IKT registered its shares on the IDX, so that its status increased to become a Public Company

In 2023, the Company began operating RORO Terminal and Semayang Port Vehicles, Balikpapan and the construction of an Integrated Planning & Control room. To improve customer service, the Company began implementing ERP-SAP Single System, Praya Billing System, and began building Customer Care System (CCS) Portal.

Throughout 2024, the Company has undertaken a number of business strategies including the implementation of Single Billing cooperation pattern for loading and unloading services at the International Terminal and the expansion of terminal operation service business at RORO and Vehicle Terminals at Trisakti Port, Banjarmasin on September 30, 2024, which was effectively start operating on October 7, 2024. IPCC has also implemented PTOS-C at Jakarta Branch Domestic Terminal and Belawan Satellite Terminal and provided PDC value-added services for Subaru, BMW and Toyota cargo.

INFORMATION ON ISSUER NAME CHANGES

From the beginning of the Company's establishment until the publication of this annual report, IPCC has undergone one change of legal entity and name, as follows



JEJAK LANGKAH MILESTONES

2007

Pembentukan Tanjung Priok Car Terminal (TPT) sebagai *Strategic Business Unit* dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Establishment of Tanjung Priok Car Terminal (TPT) as a Strategic Business Unit of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2012

Tanjung Priok Car Terminal (TPT) resmi berbadan hukum dengan status Perseroan Terbatas dan melakukan perubahan nama menjadi PT Indonesia Kendaraan Terminal. Tanjung Priok Car Terminal (TPT) officially became a legal entity with the status of a Limited Liability Company and changed its name to PT Indonesia Kendaraan Terminal.

2017

Peresmian pelayaran perdana rute Jakarta-Surabaya.
Inauguration of the inaugural voyage of Jakarta-Surabaya route.

2018

Resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan *ticker code*: IPCC.
Officially listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the stock code: IPCC.

2019

Penerapan simplifikasi Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk CBU.
Implementation of the simplification of Motor Vehicle Exports in the form of CBU.

2020

Implementasi *Auto Gate System* terintegrasi.
Implementation of an integrated Auto Gate System..

2021

- Perusahaan dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meluncurkan penggunaan *Radio Frequency Identification* (RFID).
- Pengembangan aplikasi *dashboard* operasional sebagai media penyampaian informasi secara *real-time* kepada manajemen untuk membantu pengambilan keputusan.
- Implementasi dan Integrasi aplikasi *Terminal Operating System* (TOS) dengan *Billing System* dan *E-Invoice* yang terintegrasi dengan aplikasi ERP Finance.
- Penyusunan IT *Master Plan* tahun 2020-2024 yang berfungsi sebagai acuan Rencana Kerja Manajemen Sistem Informasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Penambahan dan Pengembangan Perangkat Jaringan IT dan CCTV *Surveillance System* untuk kebutuhan Lapangan Eks-DKP guna mendukung kegiatan operasi di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Keamanan IT yang berfungsi untuk mengantisipasi terhadap tindakan *cyber attack*.
- Pekerjaan Perapihan dan Pemetaan Jalur Jaringan *Fiber Optic* di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Melakukan *Upgrade* Lisensi *Email Corporate* dari Microsoft Exchange menjadi Microsoft 365 yang menyediakan instalasi.
- Pengembangan dan integrasi dengan *platform* INSW untuk kegiatan impor di Terminal sebagai bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan *ease of doing business* di Indonesia.
- Implementasi CARDOM yaitu implementasi pada kegiatan operasional di terminal domestik, mulai dari *tally* sampai RBM.
- SKEP *Autogate* yaitu penerbitan Surat Keputusan penerapan *autogate* di terminal internasional oleh Bea Cukai.
- Penanganan *receiving and delivery* serta *Cargodoring* unit PT Suzuki Indomobil Motor.
- *Full cashless* TFS Internasional yaitu penerapan *full cashless* Terminal Facility Services (TFS) di terminal internasional.

2021

- The Company and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) launched the use of *Radio Frequency Identification* (RFID).
- Development of operational dashboard applications as a medium for delivering real-time information to management to assist decision making;
- Implementation and integration of *Terminal Operating System* (TOS) application with *Billing* and *E-Invoice* system that is integrated with ERP Finance application;
- Preparation of the 2020-2024 IT Master Plan which served as a reference for the Information System Management Work Plan at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Addition and Development of IT Network Equipment and CCTV *Surveillance System* for the needs of Ex-DKP Yard to support operations within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Procurement, Installation, Setup and Configuration of IT Security Devices which function to anticipate *cyber-attacks*;
- Work on Smoothing and Mapping *Fiber Optic* Network Paths at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Upgrading the Company Email License from Microsoft Exchange to Microsoft 365 which provides installation.
- Development and integration with the INSW platform for import activities at the Terminal as part of the government's program to improve ease of doing business in Indonesia;
- CARDOM implementation, namely the implementation of operational activities in domestic terminals, from *tally* to RBM;
- SKEP *Autogate*, namely the issuance of a Decree on the application of *autogate* at international terminals by Customs;
- Handling of *receiving and delivery* as well as *Cargodoring* unit of PT Suzuki Indomobil Motor;
- *Full cashless* TFS International, namely the implementation of *full cashless* Terminal Facility Services (TFS) in international terminals.



2022

- Kerja sama layanan *Vehicle Distribution Centre* (VDC) antara IPCC dan Glovis Indonesia Internasional guna menyajikan layanan terpadu.
- Pengoperasian terminal kendaraan di Pelabuhan Belawan, Medan, pengoperasian tersebut merupakan bagian proses pasca *merger*. Dimana pengelolaan operasi Pelabuhan Belawan, Medan secara bertahap akan diserahkan kepada *Subholding* Pelindo Multi Terminal (SPMT).
- Pengoperasian terminal kendaraan di Pelabuhan Makassar, pengoperasian tersebut merupakan tahap lanjutan transformasi bisnis pasca merger Pelindo. Dimana pengelolaan operasi Pelabuhan Makassar secara bertahap akan diserahkan kepada *Subholding* Pelindo Multi Terminal (SPMT).
- IPCC Resmikan Layanan *Customer Care Station* (CCS) di Tanjung Priok.
- Penanganan kargo Hyundai Genesis untuk perhelatan G20 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia.

2022

- Vehicle Distribution Center (VDC) services cooperation between IPCC and Glovis Indonesia Internasional to provide integrated services.
- Operation of the car terminal at Makassar Port, the operation is part of post-merger process. In which the management of Belawan, Medan Port operations will be gradually handed over to Pelindo Multi Terminal Subholding (SPMT).
- Operation of the car terminal at Makassar Port, These operations are the next stage of business transformation after Pelindo merger. In which the management of Makassar Port operations will be gradually handed over to Pelindo Multi Terminal Subholding (SPMT).
- IPCC Inaugurated the Customer Care Station (CSS) Service in Tanjung Priok.
- Handling of Hyundai Genesis cargo for the G20 event, which was held in Bali, Indonesia.

2023

- Pengoperasian terminal Semayang, Balikpapan pada Oktober 2023
- Implementasi *Single Sistem* ERP-SAP
- Pembangunan Ruang *Integrated Planning and Control*
- Implementasi Sistem *Billing* Praya
- Pembangunan Portal *Customer Care System* (CCS)

2023

- Operation of Semayang Terminal, Balikpapan in October 2023
- Implementation of Single ERP-SAP System
- Construction of Integrated Planning and Control
- Implementation of Praya Billing System
- Construction of Customer Care System (CCS) Portal

2024

- IPCC menangani ekspor perdana Mitsubishi X Force sebanyak 500 unit dengan tujuan negara Vietnam
- Peresmian *Automatic Gate* Terminal Domestik Branch Jakarta
- Go-Live Pengoperasian PTOS-C Terminal Domestik
- Implementasi *Single Billing* untuk pelayanan bongkar muat Terminal Internasional IPCC Branch Jakarta
- Pengoperasian Terminal RORO dan Kendaraan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin
- Melakukan layanan nilai tambah PDC untuk kargo Subaru, BMW dan Toyota.

2024

- IPCC handled the first export of Mitsubishi X Force of 500 units to Vietnam
- Inauguration of Automatic Gate Domestic Terminal Jakarta Branch
- Go-Live Operation of PTOS-C Domestic Terminal
- Implementation of Single Billing for loading and unloading services at IPCC International Terminal, Jakarta Branch
- Operation of RORO Terminal and Vehicles at Trisakti Port, Banjarmasin
- Implementing PDC value-added services for Subaru, BMW and Toyota cargo.



IDENTITAS DAN LOGO PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY AND LOGO

LOGO PERUSAHAAN

COMPANY LOGO

Logogram IPCC

IPCC Logogram



Logogram mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat, dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut-sebagai urat nadi perekonomian nasional - sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.

Inspired from the shape of a busy, crowded, and complex passage or route, which illustrates Pelindo as an integrated port and logistics service provider that is always active and has a major role in sea transportation – as the artery of the national economy – while supporting the realization of the Indonesia sea highway



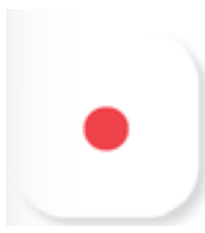
Mengambil huruf P yang menjadi inisial Pelindo sebagai *Holding* Perusahaan sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.

Taking the letter "P" as the initial of Pelindo, representing the Holding Company, while also forming the shape of a fish, which symbolizes the marine habitat, an essential part of Indonesia as a maritime nation. This also serves as a symbol of Pelindo's commitment to preserving Indonesia's natural wealth by continuously contributing to the sustainability of marine ecosystems in its operational areas.



Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme, dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.

The blue color represents Indonesia's seas, which are deeply connected to Pelindo. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism, and dedication. The color also reflects Pelindo's efforts, as part of an SOE, to consistently provide the best for all stakeholders.



Warna Merah melambangkan aksi, antusiasme, kecepatan, keberanian, dan bagian dari warna simbol negara Indonesia. Merepresentasikan Perusahaan yang kuat, berkomunikasi secara terbuka, serta mampu memberikan semangat persatuan dan energi antar perusahaan-perusahaan di Pelindo Group.

The red color symbolizes action, enthusiasm, speed, courage, and is also part of Indonesia's national colors. Represent a strong company that communicates openly and fosters unity and energy among the companies within Pelindo Group.



Identitas Perusahaan

Perseroan merupakan anak perusahaan PT Pelindo Multi Terminal yang merupakan salah satu anak Perseroan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sehingga seluruh identitas Perseroan merujuk kepada identitas PT Pelindo Multi Terminal terutama pada logogram. Logo Perseroan memiliki makna yaitu *friendly, spirit, energy, dan agility*.

Pada 30 Juni 2022, Perseroan melakukan perubahan logo dan *branding* setelah terjadinya penggabungan Pelindo I, II, III, IV. Perubahan logo dan *branding* yang dilakukan Perseroan merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC untuk menjadi Pengelola Ekosistem Terminal Kendaraan Berkelas Dunia.

Logo Perseroan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai merek jasa penyediaan lahan dan penumpukan untuk ekspor impor sejak tanggal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Pedoman Identitas Visual dan *Brand* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Company Identity

The Company is a subsidiary of PT Pelindo Multi Terminal, which is one of the subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Therefore, the Company's entire identity aligns with the identity of PT Pelindo Multi Terminal, particularly in its logogram. The Company's logo embodies the meanings of friendliness, spirit, energy, and agility.

On June 30, 2022, the Company underwent a logo and branding change following the merger of Pelindo I, II, III, and IV. This transformation was a crucial step in achieving the aspiration of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) to become a World-Class Vehicle Terminal Ecosystem Operator.

The Company's logo has been officially registered with the Directorate General of Intellectual Property as a service mark for land provision and storage for export-import activities since the date stated in the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal on June 30, 2022, regarding the Establishment of Visual Identity and Brand Guidelines for PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.



VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUES

VISI VISION

CAR TERMINAL CONNECTIVITY CHAMPION

Penjelasan Visi:

“Menjadi Pengelola”

Perseroan mampu menjadi perusahaan pengelola terminal kendaraan profesional dan dapat disejajarkan serta bersaing dengan penyedia layanan terminal kendaraan terbaik di dunia.

- *Image* perusahaan yang baik
- Fasilitas dan infrastruktur yang *modern*
- Sistem yang terintegrasi

“Terminal Kendaraan Berkelas Dunia”

IPCC mampu membangun kepemimpinan tingkat nasional dan regional, dengan ekspansi bisnis secara global dalam menjadi pengelola terminal kendaraan (*car terminal*) kelas dunia yang berkontribusi terhadap ekosistem. Pembangunan bisnis secara berkesinambungan dengan penguatan kerjasama dengan pemain ekosistem logistik maritim lainnya.

IPCC sebagai Perseroan kelas dunia memiliki kualitas utama:

- Memiliki kinerja dan citra perusahaan yang baik,
- Memiliki fasilitas infrastruktur yang modern dan sistem yang terintegrasi,
- Memiliki dampak positif bagi pemangku kepentingan.

Di samping itu, IPCC diharapkan tidak hanya mampu mengelola jasa operasional layanan kepelabuhanan yang unggul namun juga melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan usaha di sektor-sektor yang merupakan rantai pasok dan pendukung sektor kepelabuhanan, dalam rangka menciptakan jasa *end to end logistic* dan tumbuh secara anorganik serta mendorong tumbuhnya ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi sehingga memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Vision Explanation

“Becoming an Operator”

The Company aspires to be a professional vehicle terminal operator that is on par with and capable of competing with the world's best vehicle terminal service providers.

- A strong corporate image
- Modern facilities and infrastructure
- An integrated system

“A World-Class Car Terminal”

IPCC aims to establish national and regional leadership, expanding its business globally to become a world-class vehicle terminal operator that contributes to the ecosystem. This includes sustainable business development through strengthened collaboration with other players in the maritime logistics ecosystem.

As a world-class company, IPCC possesses the following key qualities:

- Strong performance and corporate image
- Modern infrastructure facilities and an integrated system
- Positive impact on stakeholders

Furthermore, IPCC is expected not only to manage excellent port service operations but also to develop business and manage operations in sectors related to the supply chain and port-supporting industries. This strategy aims to create end-to-end logistics services, achieve inorganic growth, and foster the development of an integrated vehicle terminal ecosystem, ultimately providing positive benefits for Indonesia.



MISI MISSION



SEBAGAI OPERATOR TERMINAL KENDARAAN YANG MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH DAN PANGSA PASAR

AS A CAR TERMINAL OPERATOR THAT CREATES
ADDED VALUE AND MARKET SHARE



Penjelasan Misi

“Nilai Tambah”

Peningkatan finansial dan operasional, sehingga akan terjadi peningkatan kinerja yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah atau *value added* pada setiap pelayanan di setiap terminal kendaraan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis IPCC

“Pelanggan dan Mitra”

Meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan menggunakan teknologi dan kapabilitas termutakhir dan memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.

“Pemegang Saham”

Memaksimalkan penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola melalui *best practice* GCG.

“Karyawan”

Memaksimalkan kepuasan pegawai dengan berfokus pada kapabilitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperkuat integritas dan inovasi.

Mission Explanation

“Added Value”

Financial and operational improvements will lead to enhanced performance, which in turn will provide added value to every service at each vehicle terminal in order to support the growth of IPCC's business.

“Customers and Partners”

Improving service and product quality by leveraging the latest technology and capabilities, while maximizing accessibility through product integration to ensure customer and partner satisfaction.

“Shareholders”

Maximizing value creation for shareholders through improved financial performance and optimizing governance management by implementing best practices in Good Corporate Governance (GCG).

“Employees”

Maximizing employee satisfaction by focusing on capability development and improving employee welfare through strengthened integrity and innovation.

Review Visi dan Misi oleh Direksi/Dewan Komisaris

Visi dan misi Perseroan telah disahkan melalui Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/1/7/1/SKPR/DIRUT/IKT-22 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Logo, Visi, Misi, Karakter, dan Nilai-Nilai Perseroan PT Indonesia Kendaraan Terminal. Visi dan misi Perseroan ditetapkan dan ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan. Hingga akhir tahun pelaporan, Manajemen Perseroan menetapkan bahwa Visi dan Misi Perseroan masih relevan dengan perkembangan Perseroan.

Review of Vision and Mission by Board of Directors/Board of Commissioners

The Company's vision and mission were officially ratified through the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No: HK.01/1/7/1/SKPR/DIRUT/IKT-22 date July 1, 2022, concerning the Establishment of Logo, Vision, Mission, Character, and Corporate Values of PT Indonesia Kendaraan Terminal. The vision and mission are periodically reviewed with the involvement of Board of Directors, Board of Commissioners, and other management teams to ensure their relevance to the Company's business environment. As of the end of the reporting year, the Company's management has confirmed that the vision and mission remain relevant to the Company's growth and development.



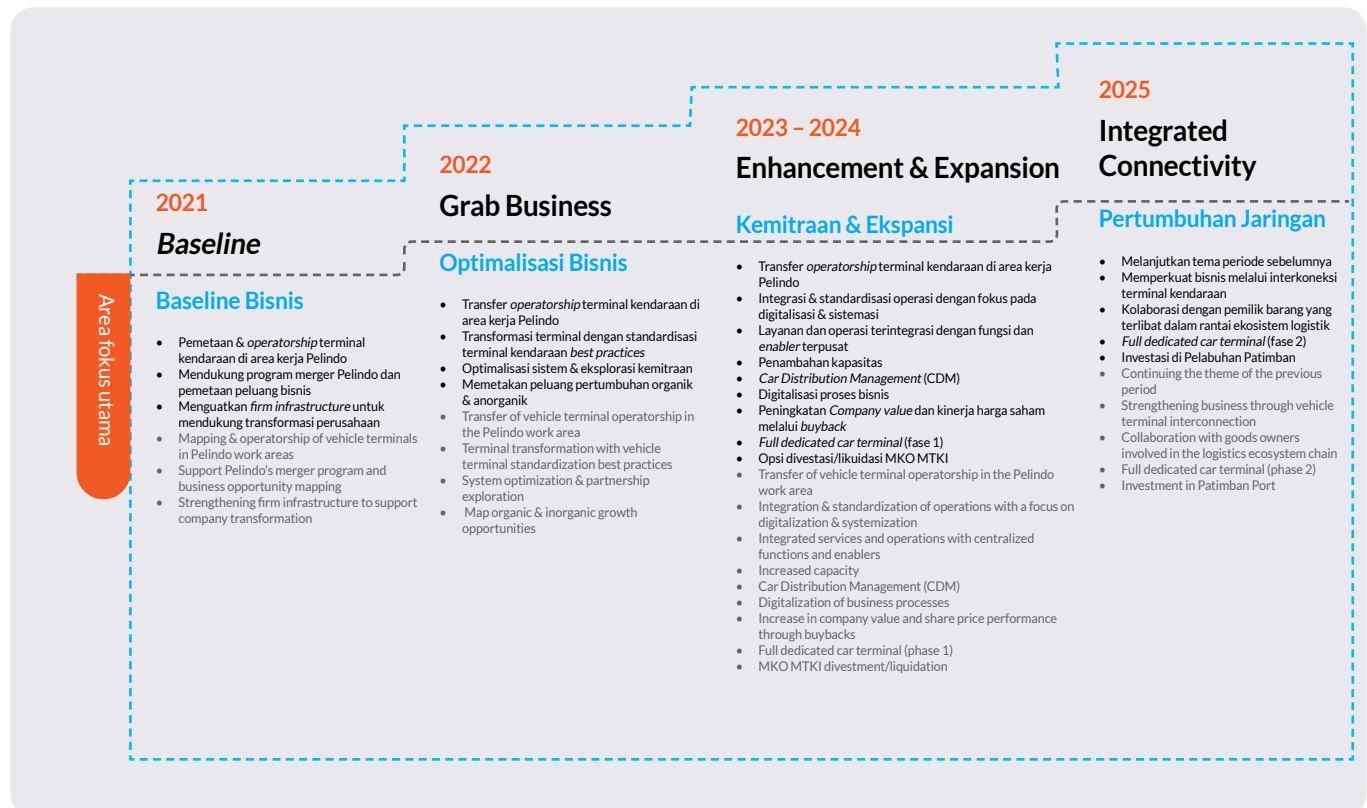
Strategi Pencapaian Visi dan Misi

Visi dan Misi Perseroan menjadi landasan Perseroan dalam menyusun rencana Perseroan baik dalam jangka panjang dalam yaitu Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), maupun jangka pendek, dalam hal ini Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP). Kemudian Perseroan menyusun strategi pencapaian Visi dan Misi setiap tahunnya yang dituangkan dalam RJPP 2021-2025.

Strategy for Achieving Vision and Mission

The Company's Vision and Mission serve as the foundation for developing both long-term plans, known as the Corporate Long-Term Plan (RJPP), and short-term plans, specifically the Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Each year, the Company formulates strategies to achieve its vision and mission, as outlined in the RJPP 2021-2025.

Strategi Pencapaian Visi dan Misi Strategy for Achieving Vision and Mission



Sejalan dengan RJPP, tahun 2024 merupakan tahun *Enhancement & Expansion* dengan tema strategis, yaitu "Kemitraan dan Ekspansi". Strategi kemitraan dan ekspansi sebagai tindak lanjut program 2022 dan 2023 dengan implementasi transfer *operatorship* terminal kendaraan di area kerja Pelindo. Integrasi dan standarisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi dan sistematisasi serta *Car Distribution Management* (CDM).

Adapun fokus strategi IPCC dalam menjalin kemitraan dan melakukan ekspansi, sebagai berikut:

1. Transfer *operatorship terminal* kendaraan di area kerja Pelindo
2. Integrasi & standarisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi & sistemasi
3. Layanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi dan *enabler* terpusat
4. Penambahan kapasitas *car distribution management* (CDM)
5. Digitalisasi proses bisnis
6. Peningkatan corporate value dan kinerja harga saham melalui buyback
7. *Full dedicated car terminal* (fase 1)

Pada 2024, Perseroan telah merealisasikan fokus strategi bisnis dalam meningkatkan nilai tambah dan pangsa pasar melalui Transfer *operatorship* terminal kendaraan di Terminal RORO dan Kendaraan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin pada 30 September 2024. Penerapan pola kerjasama *Single Billing* untuk pelayanan bongkar muat Terminal Internasional dan ekspansi bisnis pelayanan operasi terminal yang secara efektif mulai dioperasikan pada tanggal 7 Oktober 2024. IPCC juga telah mengimplementasikan PTOS-C di Terminal Domestik Branch Jakarta dan Terminal Satelit Belawan serta melakukan layanan nilai tambah PDC untuk kargo Subaru, BMW dan Toyota.

BUDAYA PERSEROAN

Budaya Perseroan bukan sekadar kumpulan nilai, namun merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi dan Misi Perseroan. Terkhusus bagi industri logistik dan terminal kendaraan yang terus berkembang, penerapan budaya kerja yang kuat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, serta membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

Sebagai bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui PT Pelindo Multi Terminal, Perseroan mengadopsi nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai pedoman utama dalam bekerja. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi standar perilaku karyawan, tetapi juga menjadi panduan dalam menghadapi tantangan industri yang dinamis serta memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan memenuhi standar profesionalisme dan integritas tinggi.

In line with the RJPP, 2024 is the year of Enhancement & Expansion with the strategic theme "Partnership and Expansion". The partnership and expansion strategy as a follow-up to the 2022 and 2023 program with the implementation of vehicle terminal operatorship transfers in Pelindo's operational area. Integration and standardization of operations, with a focus on digitalization and systemization as well as Car Distribution Management (CDM).

The focus of IPCC strategy in establishing partnerships and carrying out expansion is as follows:

1. Vehicle terminal operatorship transfers in Pelindo's operational area
2. Integration & standardization of operations, with a focus on digitalization & systemization
3. Integrated services and operations with centralized functions and enablers
4. Addition of car distribution management (CDM) capacity
5. Digitalization of business processes
6. Increasing corporate value and stock price performance through buybacks
7. Full dedicated car terminal (phase 1)

In 2024, the Company has realized its strategic business focus on increasing added value and market share through the transfer of terminal operatorship for vehicles at RORO and Vehicle Terminal of Trisakti Port, Banjarmasin, on September 30, 2024. This includes the implementation of a Single Billing cooperation model for loading and unloading services at the International Terminal and the expansion of terminal operation service business, which officially began operations on October 7, 2024. IPCC has also implemented PTOS-C at Domestic Terminal, Jakarta Branch, and Belawan Satellite Terminal, as well as provided value-added PDC services for Subaru, BMW, and Toyota cargo.

CORPORATE CULTURE

Corporate culture is not merely a collection of values, but it is the fundamental foundation for achieving the Company's Vision and Mission. Particularly in the logistics and vehicle terminal industry, which continues to evolve, a strong work culture is the key to improve performance, drive innovation, and build trust among customers and business partners.

As part of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) through PT Pelindo Multi Terminal, the Company adopts the AKHLAK values (Amanah - Trustworthy, Kompeten - Competent, Harmonis - Harmonious, Loyal - Loyal, Adaptif - Adaptive, and Kolaboratif - Collaborative) as the main guidelines for work ethics. These values serve not only as behavioral standards for employees but also as guiding principles in navigating dynamic industry challenges while ensuring that every service meets the highest standards of professionalism and integrity.



Budaya Perseroan yang kuat juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai AKHLAK, IPCC berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan daya saing, serta memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Selain itu, penerapan budaya Perseroan yang konsisten membantu memperkuat sinergi antara karyawan, manajemen, serta seluruh pemangku kepentingan, sehingga mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dengan budaya kerja yang kokoh, Perseroan optimis dapat menghadapi tantangan industri, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor logistik kendaraan di Indonesia.

A strong corporate culture also plays a crucial role in creating a productive and harmonious work environment. By upholding the AKHLAK values, IPCC is committed to adapting to technological advancements, enhancing competitiveness, and delivering the best services to customers. Additionally, consistent implementation of corporate culture strengthens synergy between employees, management, and all stakeholders, fostering sustainable business growth.

With a solid work culture, the Company is confident in overcoming industry challenges, increasing competitiveness, and making a significant contribution to the development of vehicle logistics sector in Indonesia.

Budaya Perseroan IPCC IPCC Corporate Culture

AKHLAK



AMANAH

Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika



KOMPETEN

Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik



HARMONIS

Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

TRUSTWORTHY

Trustworthy means holding firmly to the trust given, with the following expected behavior:

- Meeting promises and commitments
- Responsible for tasks, decisions and actions taken
- Adhere to moral and ethical values

COMPETENT

Competent means continuing to learn and develop capabilities, with the following expected behavior:

- Improve personal competence to answer ever-changing challenges
- Help others learn
- Complete tasks with the best quality

HARMONIOUS

Harmonious means caring for each other and respecting differences, with the following expected behavior:

- Respect everyone regardless of background
- Likes to help other people
- Building a conducive work environment





LOYAL

Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etik

LOYAL

Loyal means being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State, with the expected behavior as follows:

- Maintain the reputation of fellow employees, leaders, SOEs and the State
- Willing to sacrifices to achieve bigger goals
- Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics



ADAPTIF

Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

ADAPTIVE

Adaptive means continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing change, with the following expected behavior:

- Quickly adapt to get better
- Continuously make improvements following technological developments
- Act proactively



KOLABORATIF

Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

COLLABORATIVE

Collaborative means building synergistic cooperation with the following expected behavior:

- Provide opportunities for various parties to contribute
- Open to working together to produce added value
- Mobilize the utilization of various resources for common goals

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BUDAYA PERSEROAN

Sepanjang tahun 2024, Perseroan secara konsisten melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai inti "AKHLAK" di lingkungan kerja. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan kepada seluruh pegawai, tetapi juga menyasar pihak eksternal sebagai bentuk promosi budaya organisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi budaya dikoordinasikan oleh Divisi Budaya dan dirancang selaras dengan indikator kinerja utama (KPI) Perseroan terkait *Employee Well-Being*, yang mencakup empat aspek utama, yaitu: fisik, mental, sosial, dan finansial. Seluruh program dilaksanakan melalui kolaborasi lintas divisi guna menciptakan keterlibatan menyeluruh di berbagai lini organisasi.

Rincian kegiatan berdasarkan aspek *Employee Well-Being* adalah sebagai berikut:

SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION OF CORPORATE CULTURE

Throughout 2024, the Company consistently carried out socialization and internalization of corporate culture as part of an effort to strengthen the understanding and application of the core values of "AKHLAK" in the work environment. This activity is not only aimed at all employees, but also targets external parties as a form of promoting an inclusive and sustainable organizational culture.

Socialization and internalization activities of culture are coordinated by the Culture Division and are designed in line with the Company's key performance indicators (KPIs) related to Employee Well-Being, which cover four main aspects, namely: physical, mental, social, and financial. All programs are carried out through cross-divisional collaboration to create comprehensive involvement across various lines of the organization.

Details of activities based on Employee Well-Being aspects are as follows:



1. Aspek Fisik: a. Senam Pagi Sehat b. <i>Funwalk</i> HUT ke-12 IPCC c. Jalan Bersama & Jumat Bersih d. Jumat Bersih Mandiri (Program 5R) 2. Aspek Mental: a. Tausiyah Islam b. Buka Bersama Ramadhan 1445 H c. Halal Bihalal IPCC d. Program PRAQTIS (Belajar Al-Qur'an Sistematis) oleh Maziska IPCC e. Pemutaran Lagu Indonesia Raya di Lingkungan IPCC f. Bimbingan Mental (Bimtal) bagi Tim Operasional 3. Aspek Sosial: a. Berlabuh (<i>Sharing Session</i>) IPCC b. Donor Darah bersama PMI c. Pembagian Daging Kurban Idul Adha 2024 d. KOBAR (Kongkow Bareng) IPCC e. #HSETalk f. Ramah Tamah HUT ke-12 IPCC g. Santunan untuk Anak Yatim 4. Aspek Finansial: a. <i>Sharing Session</i>: Strategi Persiapan Masa Pensiun b. Analisis Fundamental bersama IDX dan Stockbit c. <i>Financial Clinic</i> bersama Mandiri Sekuritas d. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Perseroan berharap nilai-nilai budaya kerja dapat tertanam secara mendalam dan menjadi landasan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.	1. Physical Aspect: a. Healthy Morning Exercise b. Funwalk for IPCC's 12th Anniversary c. Joint Walk & Clean Friday d. Independent Clean Friday (5R Program) 2. Mental Aspect: a. Islamic Tausiyah b. Breaking Fast Together for Ramadhan 1445 H c. IPCC Halal Bihalal d. PRAQTIS Program (Systematic Al-Quran Learning) by Maziska IPCC e. Playing the Indonesian Raya Song in IPCC Environment f. Mental Guidance (Bimtal) for Operational Team 3. Social Aspect: a. IPCC Sharing Session b. Blood Donation with PMI c. Distribution of Qurban Meat for Eid al-Adha 2024 d. KOBAR (Kongkow Bareng) IPCC e. #HSETalk f. IPCC 12th Anniversary Gathering g. Donations for Orphans 4. Financial Aspect: a. Sharing Session: Retirement Preparation Strategy b. Fundamental Analysis with IDX and Stockbit c. Financial Clinic with Mandiri Sekuritas d. Through this series of activities, the Company hopes that the values of work culture can be deeply embedded and become the foundation for every action and decision-making at all levels of the organization.



KEGIATAN USAHA

BUSINESS ACTIVITIES



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Berdasarkan Pasal 3, ayat 2, Akta Anggaran Dasar PT Kendaraan Terminal Indonesia Tbk Nomor 45 tanggal 18 Juli 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-010146 tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha kegiatan pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan mengutamakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on Article 3, paragraph 2. Deed of Articles of Association of PT Kendaraan Terminal Indonesia Tbk Number 45 dated July 18, 2023, made before Ashoya Ratam, S.H.M.Kn., notary in the Administrative City of South Jakarta and has received Approval for Amendments to the Articles of Association from the Minister of Law and Rights Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-010146 concerning Notification of Amendments to the Articles of Association of PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk, the purposes and objectives of the Company are to carry out sea port service activities, which relate to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of facilities terminals, for example ports and docks, navigation, inspection of cargo in cargo and/or containers by prioritizing sources of ionizing radiation (radioactive substances and ionizing radiation generators), shipping and berthing activities, mooring services, pilotage and towing services.



KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang tertera pada Anggaran Dasar Perseroan tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan pada tahun 2024 antara lain adalah:

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT IN THE FISCAL YEAR

To achieve the purposes and objectives stated in the Company's Articles of Association, the business activities carried out by the Company in 2024 include:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pada Tahun 2024 Information on Implementation of Business Activities in 2024	
	Sudah Already	Belum Not Yet
Kegiatan Usaha Utama Core Business Activities		
Menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan /atau pelayanan usaha bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan <i>stevedoring</i> , <i>cargodoring</i> , serta <i>receiving/delivery</i> atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, termasuk namun tidak terbatas mendirikan/menjalankan anak perusahaan dan usaha lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha utama, Penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki IPCC untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait bidang usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yaitu sebagai berikut: Carrying out business activities of providing and/or loading and unloading business services to and from ships at the port which includes <i>stevedoring</i> , <i>cargodoring</i> , and <i>receiving/delivery</i> of vehicles, heavy equipment and spare parts, including but not limited to establishing/running subsidiaries and other businesses that has a direct or indirect relationship with the main business activities, Providing and developing port facilities and optimizing the use of resources owned by IPCC to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profits to increase the value of the Company as long as appropriate and does not conflict with the provisions of applicable laws and regulations, especially regarding the maritime port services business sector, namely as follows:	V	
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; Provision and/or services of dock for mooring;	V	
Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; Provision and/or services of fuel filling and clean water services;	V	
Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan Provision and/or services of boarding and disembarking facilities for passengers and/or vehicles	V	
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; Provision and/or services of dock for carrying out loading and unloading activities of goods and containers;		X
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; Providing and/or services of warehouse and goods storage, loading and unloading equipment and port equipment;	V	
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro; Provision and/or services of terminal for container, liquid bulk, dry bulk and ro-ro;	V	
Penyediaan dan/atau jasa bongkar muat barang; Provision and/or services of loading and unloading for goods;	V	
Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. Provision and/or services for distribution centre and goods consolidation.	V	
Kegiatan Usaha Penunjang/Pendukung Supporting Business Activities		
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company can carry out supporting business activities, namely the provision and/or service of ship towing services.		X



PRODUK DAN/ATAU JASA YANG DIHASILKAN

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan didukung oleh fasilitas-fasilitas bongkar muat kendaraan di terminal kendaraan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero), antara lain:

1. **Fasilitas Pokok**
 - a. Dermaga
 - b. Total Lahan 31 Ha terdiri dari lapangan dan 5 Ha penumpukan dari gedung parkir
 - c. *Gate In/Out: 2 Lines* (Internasional) dan 1 Line (Domestik)
 - d. *Car Carrier Loading/Unloading Area*
 - e. *Warehouse*
 - f. *Yard, Berth & Resource Planning System*
 - g. *Central Inspection Facility*
 - h. *Autogate System*
 - i. *Integrated Planning and Control*
2. **Fasilitas Penunjang**
 - a. Gedung kantor
 - b. Parkir Kendaraan Karyawan
 - c. Sistem Informasi Layanan Operasional Berbasis IT (CARTOS)
 - d. Sistem Informasi Layanan Operasional Berbasis IT (PTOS-C)
 - e. *Car Wash*
 - f. *Simulator Room*
3. **Peralatan**
 - a. Pokok: *Tug Master 2 Unit, Head Truck 4 Unit, Chasis 4 Unit, Taxi Car 8 Unit, forklift 3 unit, doly 2 unit, roll trailers 4 unit*
 - b. Penunjang: *Shuttle Service 3 Unit, Yard Sweeper 3 Unit, Fire Rescue 1 Unit, golf car 3 unit*

Adapun jasa dan layanan yang dihadirkan oleh Perseroan adalah:

1. Pelayanan Jasa Terminal
2. Pelayanan Jasa Barang
3. Pelayanan Rupa-rupa Usaha
4. Pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik.

Pelayanan Jasa Terminal

Pelayanan jasa terminal adalah pelayanan untuk kegiatan bongkar muat mobil, alat berat, truk/bus, motor dan *general cargo* yang sebagian besar merupakan part dari alat berat yang berstatus *Completely Knock Down* (CKD) maupun *Completely Build Unit* (CBU). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang meliputi wilayah dermaga domestik Perseroan, dermaga eks. Presiden, dermaga 107-109, MKO Gresik area Pelabuhan Pontianak, Belawan, Medan, Makassar, Balikpapan dan Banjarmasin.

Pelayanan jasa terminal meliputi:

1. **Stevedoring**
Stevedoring adalah pelayanan operasi pembongkaran atau pemuatan kargo dari kapal ke lapangan penumpukan/*last point of rest* sebaliknya baik di terminal Internasional maupun Domestik. Pelayanan *Stevedoring* ini dilakukan di dalam terminal dengan didukung oleh sistem yang terintegrasi.

PRODUCTS AND/OR SERVICES

In carrying out operational activities, the Company is supported by vehicle loading and unloading facilities, including:

1. **Main Facilities**
 - a. Berth
 - b. Total Land Area of 31 Ha consisting of a field and 5 Ha of parking building storage
 - c. *Gate In/Out: 2 Lines* (International) and 1 Line (Domestic)
 - d. *Car Carrier Loading/Unloading Area*
 - e. *Warehouse*
 - f. *Yard, Berth & Resource Planning System*
 - g. *Central Inspection Facility*
 - h. *Autogate System*
 - i. *Integrated Planning and Control*
2. **Supporting Facilities**
 - a. Office Building
 - b. Vehicle Parking for Employee
 - c. IT-Based Operational Service Information System (CARTOS)
 - d. IT-Based Operational Service Information System (PTOS-C)
 - e. *Car Wash*
 - f. *Simulator Room*
3. **Equipment**
 - a. Main: *Tug Master 2 Units, Head Truck 4 Units, Chasis 4 Units, Taxi Car 8 Units, forklift 3 units, dolly 2 units, roll trailers 4 units*
 - b. Supporting: *Shuttle Service 3 Units, Yard Sweeper 3 Units, Fire Rescue 1 Unit, golf car 3 units*

The services provided by the Company are:

1. Terminal Services
2. Cargo Services
3. Miscellaneous Services
4. Land, Building, Water, and Electricity Services.

Terminal Services

Terminal services are services for loading and unloading of cars, heavy equipment, trucks/buses, motorcycles and general cargo, most of which are parts of heavy equipment with Completely Knock Down (CKD) status or Completely Built Unit (CBU). These activities are carried out at the International Terminal and Domestic Terminal which includes the Company's domestic dock area, ex-President pier, port 107-109 Tanjung Priok, MKO Gresik, RORO Terminal Area and Car Terminal in Pontianak, Belawan, Medan, Makassar and Balikpapan and Banjarmasin Port areas.

Terminal services include:

1. **Stevedoring**
Stevedoring is an operational service for unloading or loading cargo from ships to the stacking yard/*last point of rest* or vice versa at both international and domestic terminals. *Stevedoring* services are carried out in the terminal and are supported by an integrated system.



2. *Cargodoring*

Cargodoring adalah pelayanan operasi pemindahan kargo dari *buffer area* ke area lapangan penumpukan/*last point of rest* atau sebaliknya dari *last point of rest* ke *buffer area* atau *load lane* (dibelakang *car carrier*) baik di terminal Internasional maupun Domestik. Pelayanan *cargodoring* ini dilakukan di dalam terminal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki tersertifikasi.

3. *Storage Area*

Storage area adalah suatu area yang digunakan sebagai tempat penumpukan didalam terminal sebelum cargo dimuat ke kapal atau setelah dibongkar dari kapal.

4. *Receiving*

Receiving merupakan kegiatan penerimaan unit secara sistem PTOS-C dengan *Auto Gate System*, verifikasi dokumen oleh pihak Bea Cukai, supervisi kegiatan penurunan kargo/unit di *stall car carrier* oleh *driver*, pemeriksaan kargo di *Central Inspection Facilities* oleh *LQ gate*, pemberian *marking* pada setiap kargo sesuai negara tujuan dan kapal yang mengangkutnya.

5. *Delivery*

Kegiatan pemindahan unit dari *last point of rest* ke *load line* dan pengecekan unitnya, supervisi proses pemuatan unit ke *car carrier* oleh *driver*, proses *thread in unit* ke sarana pengangkut di sistem PTOS-C, *print out* surat jalan dan *verified* kargo di sistem PTOS-C di saat *auto gate open* dan unit dinyatakan *left terminal*.

Pelayanan jasa *Receiving* dan *Delivery* IPCC memiliki keunggulan, antara lain:

- Kargo di terminal dapat dilacak secara online
- Informasi kargo dapat diterima dari awal
- Mengurangi biaya logistik
- Semua aktifitas di IPCC diasuransikan
- Terintegrasi dengan PTOS-C sehingga pengiriman informasi lebih cepat
- Mempercepat waktu untuk memutar balik sehingga meningkatkan jumlah ritase *car carrier* dan pengiriman
- IPCC membantu proses perizinan dengan Bea Cukai
- IPCC membantu mencari pengangkutan untuk membawa kargo dari dan ke terminal

Pelayanan Jasa Barang

Pelayanan jasa barang, adalah pelayanan jasa bongkar muat mobil, motor, alat berat, truk, bus, dan *general cargo*. Barang tersebut didistribusikan melalui dermaga umum baik untuk keperluan ekspor maupun impor di Terminal Internasional untuk perdagangan luar negeri serta kegiatan bongkar dan muat di Terminal Domestik pada perdagangan dalam negeri.

2. *Cargodoring*

Cargodoring is an operational service for moving cargo from *buffer area* to the *stacking field area/last point of rest* or vice versa from the *last point of rest* to the *buffer area* or *load lane* (behind the *car carrier*) at both international and domestic terminals. This *cargodoring* service is carried out in the terminal and is supported by certified Human Capital.

3. *Storage Area*

Storage Area is an area used as a *stacking area* within a terminal before cargo is loaded onto a ship or after being unloaded from a ship.

4. *Receiving*

Receiving is the activity of receiving units using the PTOS-C system with the *Auto Gate System*, document verification by Customs, supervision of cargo/unit unloading activities at the *car carrier stall* by the *driver*, inspection of cargo at the *Central Inspection Facilities* by *LQ gate*, marking of each cargo according to destination country and the ship carrying it.

5. *Delivery*

Activities of moving the unit from the *last point of rest* to the *load line* and checking the unit, supervising the process of loading the unit onto the *car carrier* by the *driver*, threading the unit to the means of transport using the PTOS-C system, printing out the waybill and verifying the cargo in the PTOS-C system at the *auto gate*. open and the unit is declared *left terminal*.

IPCC *Receiving* and *Delivery* services has several advantages:

- Cargo at the terminal can be tracked online
- Cargo information can be received from the start
- Reducing logistics costs
- All activities in IPCC are insured
- Integrated with PTOS-C system, hence information delivery is faster
- Speed up the time to turn around, thereby increasing the number of *car carrier* and delivery routes
- IPCC assists with the customs clearance process
- IPCC helps find transport to carry cargo to and from the terminal

Cargo Services

Cargo services are loading and unloading services for cars, motorcycles, heavy equipment, trucks, buses and general cargo. These cargo are distributed through public docks for both export and import purposes at the International Terminal for International Trade as well as loading and unloading activities at the Domestic Terminal for domestic trade.

Pelayanan Jasa Rupa-rupa Usaha

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, Perseroan juga memberikan Pelayanan rupa-rupa usaha atau *value added service* kepada produk yang ditangani oleh Perseroan. Terminal Kendaraan ini tidak hanya sekadar memuat dan menampung debit kendaraan, Perseroan juga menawarkan *finishing*, perbaikan dan layanan *retrofitting*, menginstal peralatan khusus individu atau perakitan akhir yang semuanya akan dikerjakan di Ruang VPC. Jasa tersebut dilaksanakan dalam rangka menyediakan *one stop service* di lingkungan pelabuhan. Berikut ini merupakan daftar atas jasa yang dilakukan Perseroan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan:

- Perbaikan minor (menghilangkan goresan kecil dengan pemolesan/pengecatan)
- *Fitting Aksesoris* (memasang aksesoris tambahan seperti kaca film, *mudguard*, talang air dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan-biasanya dilakukan untuk kargo impor)
- Pencucian (mencuci mobil menggunakan *automatic car wash*)
- Manajemen Suku Cadang (menyediakan gudang untuk penyimpanan suku cadang mobil)
- *Marking dan Labelling* (memasang label pada kargo yang bertuliskan nomor rangka, nomor mesin dan tujuan kargo)
- *Pre Delivery Inspection* (melakukan pengecekan interior dan eksterior kargo untuk mempertahankan kualitas sesuai dengan yang diinginkan *automaker*)
- *Port Stock* (menyediakan lapangan penumpukan *non-bounded* -kargo yang belum memiliki surat)
- PDC (*Pre Delivery Center*) merupakan layanan terintegrasi berupa *Car(go) Distribution Management* yang salah satunya ialah layanan lapangan penumpukan kargo sebelum didistribusikan lewat darat.

Pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik

Dalam rangka memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal, Perseroan melakukan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik berupa sewa ruangan kantor yang mencakup fasilitas air dan listrik.

Miscellaneous Services

To give the best service to customers, the Company also provides miscellaneous services or Value Added Services for products handled by the Company. This Car Terminal does not just load and accommodate vehicle discharges, the Company also offers finishing, repair and retrofitting services, installing individual special equipment or final assembly which will all be done in the VPC (Vehicle Processing Center). This service is carried out in order to provide one stop service in the port environment. The following is a list of services provided by the Company to meet various customer needs:

- Minor repairs (removing minor scratches by polishing/painting)
- Fitting Accessories (installing additional accessories such as window film, mudguards, water gutters and others according to needs - usually done for imported cargo)
- Washing (washing the car using an automatic car wash)
- Spare Parts Management (providing a warehouse for storing car spare parts)
- Marking and Labeling (putting a label on the cargo that says the frame number, engine number and destination of the cargo)
- Pre Delivery Inspection (checking the interior and exterior of the cargo to maintain the quality as desired by the automaker)
- Port Stock (provides a non-bounded storage yard - cargo that does not yet have documents)
- PDC (Pre Delivery Center) is an integrated service in the form of *Car(go) Distribution Management*, one of which is a field service for storing cargo before being distributed by land.

Land, Buildings, Water and Electricity Services

In order to optimally utilize the assets owned, the Company provides land, building, water and electricity management services in the form of office space rental which includes water and electricity facilities.



PASAR YANG DILAYANI

Perdagangan Luar Negeri

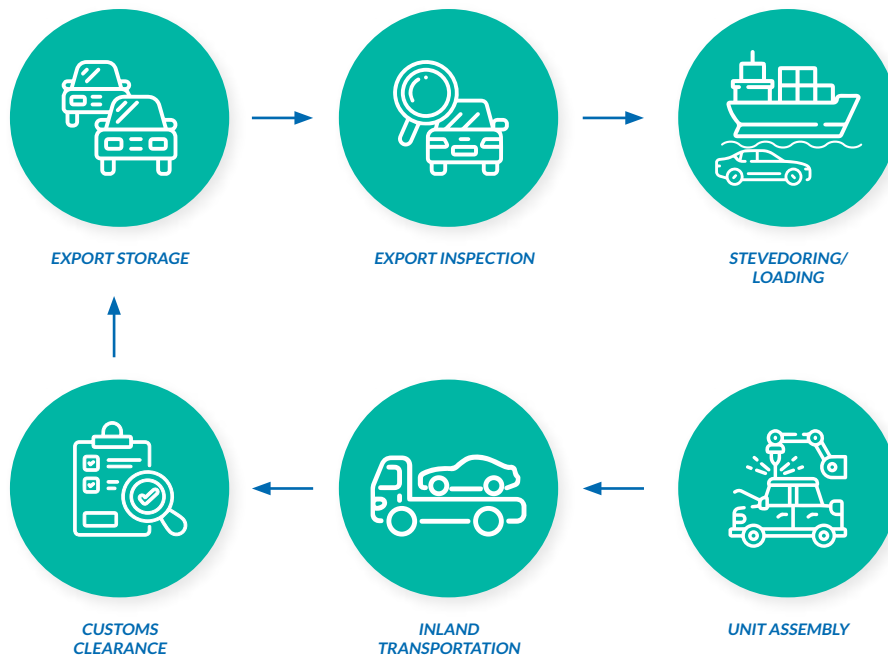
Ekspor

MARKETS SERVED

International Trade

Export

Alur Ekspor Export Flow



Penjelasan:

1. Proses pembuatan CBU (*Completely Build Up*) di perusahaan manufaktur.
2. Pengiriman CBU dari perusahaan manufaktur dengan menggunakan *car carrier* ke pelabuhan.
3. Proses pengurusan dokumen perizinan bea cukai barang dan administrasi oleh logistik kemudian dilakukan proses *Receiving/Delivery* oleh Perseroan, Kargo masuk ke Pelabuhan dengan *car carrier*, kemudian kargo dioperasikan oleh Tenaga Kerja Perusahaan / *Forwarder* dari *car carrier* menuju lapangan penumpukan.
4. Kargo yang akan dimuat ke kapal dilakukan *quality check*, kemudian kargo dipindahkan ke dermaga (*cargodoring*)
5. Proses pemuatan kargo ke kapal dilakukan oleh Tenaga Kerja Perseroan (*stevedoring*).

Explanation:

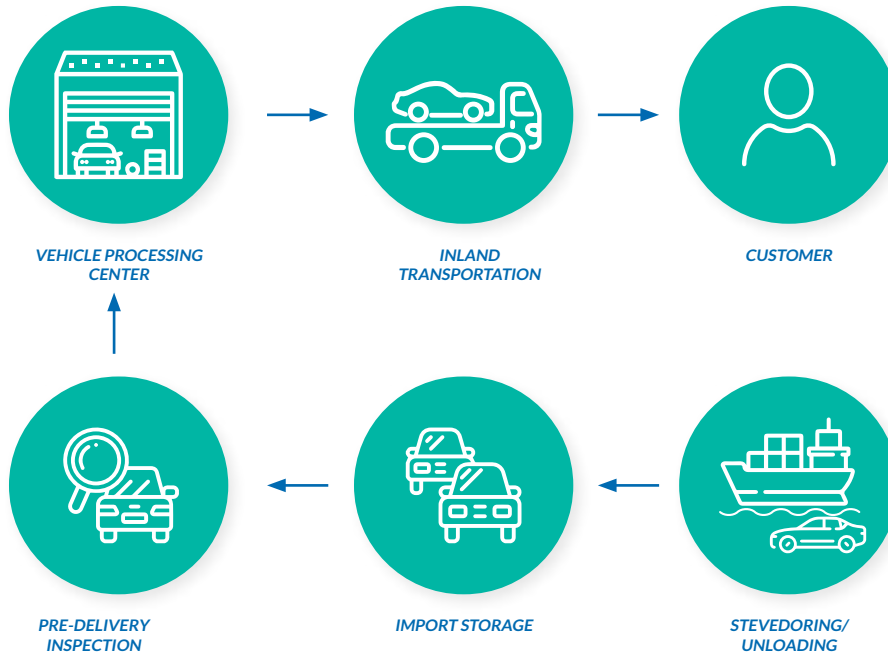
1. The process of making a CBU (*Completely Built Up*) in a manufacturing company.
2. Delivery of CBU from manufacturing companies using car carriers to the port.
3. The process of processing customs clearance documents for goods and administration by logistics is then carried out by the Receiving/Delivery process by the Company, the Cargo enters the Port by car carrier, then the cargo is operated by the Company's Workers/ Forwarders from the car carrier to the stacking yard.
4. The cargo will be loaded need to be quality checked and the cargo will be moved to the port (*cargodoring*).
5. The process of loading cargo onto the ship is carried out by Company workers (*stevedoring*).



Impor

Import

Alur Impor Import Flow



Penjelasan:

1. Proses bongkaran kargo dari Kapal oleh Tenaga Kerja Perusahaan ke dermaga (*Stevedoring*).
2. Kemudian kargo dipindahkan oleh Tenaga Kerja Perusahaan dari dermaga ke lapangan penumpukan (*cargodoring*) khusus kargo impor.
3. Selanjutnya dilakukan inspeksi atas kondisi kargo oleh Tenaga Kerja Perusahaan.
4. Setelah itu dilakukan proses pembersihan/pencucian kargo oleh Perseroan (fasilitas ini adalah fasilitas penunjang dari Perseroan, pelayanan ini dapat difasilitasi sesuai permintaan pelanggan).
5. Pengurusan dokumen perizinan bea cukai barang dan administrasi oleh perusahaan logistik, kemudian dilakukan *Receiving/Delivery* oleh Perusahaan.
6. Proses pemuatan kargo ke *Car Carrier* dilakukan oleh Pekerja Perseroan *Trucking/Forwarder* dan dikirim ke *cargo owner/receiver*.

Adapun barang yang dilayani Perseroan, yaitu mobil, alat berat, truk/bus, dan *sparepart* dan *motor*.

Explanation:

1. Process of unloading cargo from the ship by the Company's workers to the dock (*Stevedoring*).
2. Then the cargo is moved by the Company's workers from the dock to the cargo loading yard specifically for imported cargo.
3. Next, an inspection of the condition of the cargo is carried out by the Company's workforce.
4. After that, the cargo cleaning/washing process is carried out by the Company (this facility is a supporting facility from the Company, This service can be facilitated according to customer requests)
5. Processing of customs clearance documents for goods and administration by the logistics company, then *Receiving/Delivery* is carried out by the Company.
6. Process of loading cargo onto the *Car Carrier* is carried out by the Company's Workers/*Forwarders* and sent to the cargo owner/receiver.

The goods served by the Company are cars, heavy equipment, trucks/buses, spare parts, and motorcycles.



Perdagangan Dalam Negeri

Pelayanan yang diberikan pada Domestik memiliki standar pelayanan yang sama dengan Pelayanan Internasional baik dari segi operasional atau administrasi. Namun, pada Pelayanan Domestik tidak diperlukan dokumen perizinan bea cukai sehingga pelayanan domestik memiliki arus perpindahan barang yang lebih cepat.

Setelah tiba di Perseroan dengan muatan kendaraan, dilaksanakan inspeksi truk untuk dilaksanakan serah terima kargo dari pengemudi truk ke Perseroan dengan didampingi oleh perwakilan dari pelayaran. Setelah kapal tiba, perusahaan bongkar muat/*driver* melaksanakan pemuatan diatas kapal. Setelah sampai di atas kapal, pihak kapal melaksanakan kegiatan *lashing*.

Pihak pelayaran mengajukan jadwal kedatangan kapal dan kargonya kepada perencanaan Perseroan. Lalu, perencanaan Perseroan menetapkan lokasi penumpukan dan waktu alokasi tambat kapal. Setelah kapal tiba dipelabuhan dilaksanakan pelayanan pandu dan tunda menuju dermaga Perseroan. Setelah kapal merapat, dilaksanakan pengikatan tali kapal ke *border* dermaga dan *ramp door* siap untuk dibuka.

1. Melaksanakan kegiatan pengiriman dokumen perencanaan kapal dan kargo 48 jam sebelum kapal tiba.
2. Melaksanakan kegiatan rapat kapal dan kargo.
3. Penetapan alokasi waktu tambat kapal dan penumpukan

Domestic Trade

The services provided for Domestic have the same service standards as International Services both in terms of operations and administration. However, in Domestic Services, customs permit documents are not required so that domestic services have a faster flow of goods.

After arriving at the Company with the vehicle load, the truck is inspected to hand over the cargo from the truck driver to the Company accompanied by a representative from the shipping company. After the ship arrives, the loading and unloading company/*driver* carries out the loading on the ship. After arriving on the ship, the ship carries out lashing activities.

The shipping company submits the arrival schedule of the ship and its cargo to the Company's planning company. Then, the Company's planning determines the storage location and allocation time for the ship's mooring. After the ship arrives at the port, a guide and tug service is carried out to the Company's dock. After the ship docks, the ship's rope is tied to the dock border and the ramp door is ready to be opened.

1. Carry out activities for sending ship planning documents and cargo 48 hours before the ship arrives.
2. Carry out ship and cargo meeting activities.
3. Determining the allocation of ship mooring and stacking times

KEUNGGULAN JASA LAYANAN IPCC

ADVANTAGES OF IPCC SERVICES

Alur Ekspor



Dalam memberikan pelayanan jasa terminal dan jasa barang, Perseroan menyiapkan Tenaga Kerja yang profesional dan berpengalaman dibidangnya. Tenaga kerja yang disiapkan juga bersertifikasi dan memiliki produktivitas yang tinggi (250 unit/jam). untuk Terminal Internasional. Dalam menunjang aktivitas bongkar muat, Perseroan juga menyiapkan alat bantu penunjang dengan kualitas yang baik dan bersertifikat. Selain itu, Perseroan memiliki sistem berbasis IT yaitu *Pelindo Terminal Operating System-Car (PTOS-C)* sebagai aplikasi terintegrasi yang berguna untuk menyimpan data kargo secara akurat ke dalam *database* perusahaan, pelayanan *billing*, *tracking and tracing* kargo secara *real time*.

Dalam menjalankan kerja sama usaha dengan pelanggan, Perseroan membuat perjanjian yang berisikan kontrak dengan pelanggan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang kerja sama yang terjadi antara Perseroan dengan pelanggan. Perjanjian tersebut berisi tentang ruang lingkup pekerjaan, Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian, Hak dan Kewajiban, Tarif, Tata Cara Pembayaran, Asuransi dan hal-hal lainnya yang terkait tentang hubungan kerjasama antara Perseroan dan pelanggan. Adapun seandainya ada perubahan atau penambahan poin pada perjanjian, dapat dituangkan ke dalam *Addendum* perjanjian.

PENGENDALIAN KUALITAS LAYANAN

Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya. Pelayanan tersebut akan senantiasa dijaga dan dikembangkan kualitasnya demi meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Beberapa pengendalian kualitas layanan yang dilakukan Perseroan antara lain dengan memastikan bahwa jasa pelayanan yang diberikan oleh Perseroan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan terverifikasi oleh pelanggan.

Selain itu Perseroan juga menyediakan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan bongkar muat, sehingga apabila dalam suatu waktu terdapat arus barang yang tinggi, tidak terjadi penumpukan di lapangan ataupun di kapal. Kecepatan dalam membongkar muat barang juga dilakukan dengan standar kecepatan yang tinggi, yaitu 250 unit per jam. Guna menjamin pelayanan yang diberikan Perseroan sesuai dengan SLA/SLG, DBM Perencanaan dan Pengendalian pada IPCC Branch Jakarta mengarahkan, merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian, kegiatan pelayanan mencakup *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*, *stacking cargo* baik Terminal Domestik maupun Terminal Internasional. Sedangkan pada Terminal Satelit, fungsi pengawasan dilakukan oleh Koordinator Terminal Satelit yang bertugas mengkoordinasikan, mengelola, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelayanan operasional, laporan kinerja operasional dan monitoring pelayanan sesuai standar kinerja untuk mendukung tercapainya tujuan Perseroan serta aspirasi Pemegang Saham.

In providing terminal services and cargo services, the Company prepares workforce who are professional and experienced in their field. The workforce prepared is also certified and has high productivity (250 units/hour) for International Terminal. To support loading and unloading activities, the Company also prepares supporting tools of good quality and certification. Apart from that, the Company has an IT-based system, namely the *Pelindo Terminal Operating System-Car (PTOS-C)* as an integrated application that is useful for storing cargo data accurately into the company database, billing services, tracking and tracing cargo in real time.

In carrying out business cooperation with customers, the Company enters into an agreement containing a contract with the customer relating to the applicable provisions regarding the cooperation between the Company and the customer. The agreement contains the scope of work, period of implementation of the agreement, rights and obligations, tariffs, payment procedures, insurance and other matters related to the cooperative relationship between the Company and customers. If there are changes or additional points to the agreement, they can be included in the *Addendum* to the agreement.

SERVICE QUALITY CONTROL

The Company is committed to providing the best service to its customers. The quality of these services will always be maintained and developed in order to increase customer satisfaction. Some of the service quality controls carried out by the Company include ensuring that the services provided by the Company are carried out by competent Human Capital, with a certificate issued by the Manpower Service and verified by the customer.

Apart from that, the Company also provides sufficient Human Capital to carry out loading and unloading, so that if at any time there is a high flow of goods, there will be no build-up in the field or on the ship. Speed in loading and unloading goods is also carried out at a high speed standard, namely 250 units per hour. In order to ensure the services provided by the Company are in accordance with the SLA/SLG, the Planning and Control DBM at IPCC Jakarta Branch directs, formulates and coordinates the implementation, planning and control activities, service activities include *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*, *stacking cargo* both at Domestic and International Terminal. While at Satellite Terminal, the supervisory function is carried out by the Satellite Terminal Coordinator who is tasked with coordinating, managing, implementing and reporting operational service activities, operational performance reports and service monitoring according to performance standards to support the achievement of the Company's goals and the aspirations of Shareholders.



Disamping sumber daya manusia yang memadai, Perseroan juga terus melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan sehari-hari. Untuk pemeliharaan, umumnya dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, peralatan yang digunakan juga diuji kelayakannya secara berkala yang dilakukan oleh instansi pihak ketiga yang kompeten. Pengadaan atas peralatan tersebut juga dilakukan secara ketat, dengan memperhatikan kualitas dan keamanan dari peralatan tersebut.

Selain itu, sebagai upaya pengendalian kualitas layanan, Perseroan juga telah membangun jaring pengaman (*safety net*) untuk menahan debu atau partikel lainnya yang berpotensi menurunkan kualitas kendaraan di area lapangan penumpukan, sehingga kendaraan yang melalui pelabuhan Perseroan akan terjaga kualitasnya. Guna menunjang *monitoring* kegiatan operasional secara *real time*, telah dilengkapi dengan CCTV di seluruh area operasional dengan *monitoring* 24/7 yang dikontrol dari *Integrated Planning and Control Room*.

Besides adequate Human Capital, the Company also continues to supervise and maintain the equipment used for the Company's daily operational activities. Maintenance is generally carried out periodically by a third party. Apart from that, the equipment used is also periodically tested for suitability by competent third party agencies. Procurement of this equipment is also carried out strictly, paying attention to the quality and safety of the equipment.

In addition, as an effort to control the quality of service, the Company has also built a safety net to hold dust or other particles that have the potential to reduce the quality of vehicles in the stacking yard area, so that vehicles passing through the Company's port will maintain their quality. In order to support real-time monitoring of operational activities, it has been equipped with CCTV in all operational areas with 24/7 monitoring controlled from the Integrated Planning and Control Room.



WILAYAH OPERASIONAL

OPERATIONAL AREA

Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional Perseroan. Wilayah operasional IPCC hingga akhir tahun 2024 tercermin pada peta berikut ini:



Kantor Pusat: Head Office	
1	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
	Jalan Sindang Laut No. 100 Customer Care : +62 811933 9930 Telp. : +62 21 4393 2251 Web : www.indonesiacarterterminal.co.id Email : corsec@indonesiacarterterminal.co.id / komersial@indonesiacarterterminal.co.id
Kantor Manajemen Kerjasama Operasi: Joint Operation Management Office	
2	Kantor MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia MIKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Office
	Jalan Beta Kawasan Industri Maspion V Sukomulyo, Manyar Gresik - Jawa Timur Tel. : +62 21 4394 2251 Web : www.indonesiacarterterminal.co.id Email : corsec@indonesiacarterterminal.co.id

Kantor Satelit: Satellite Office	
3	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Pelabuhan Pontianak Pontianak Port
	Jalan Pak Kasih No. 11, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78112 Customer Care : (123) 456 - 7890 Tel. : +62 21 4393 2251 Web : www.indonesiacarterterminal.co.id Email : corsec@indonesiacarterterminal.co.id
Kantor Satelit: Satellite Office	
4	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Pelabuhan Belawan Belawan Port
	Jalan Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411 Tel. : +62 21 4394 2251 Web : www.indonesiacarterterminal.co.id Email : corsec@indonesiacarterterminal.co.id



Operational area is the area or region where operational activities are carried out or the scope of the company's operational activities. IPCC operational area until the end of 2024 is illustrated in the following map:



5	Kantor Satelit: Satellite Office
	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Pelabuhan Makassar Makassar Port Jalan Makassar Makassar, Sulawesi Selatan Tel. : +62 21 4394 2251 Web : www.indonesiacarterterminal.co.id Email : corsec@indonesiacarterterminal.co.id
6	Kantor Satelit: Satellite Office
	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Pelabuhan Semayang, Balikpapan Semayang Port, Balikpapan Jl. Yos Sudarso No.30 Balikpapan, Kalimantan Timur Tel. : +62 21 4394 2251 Web : www.indonesiacarterterminal.co.id Email : corsec@indonesiacarterterminal.co.id / info@indonesiacarterterminal.co.id

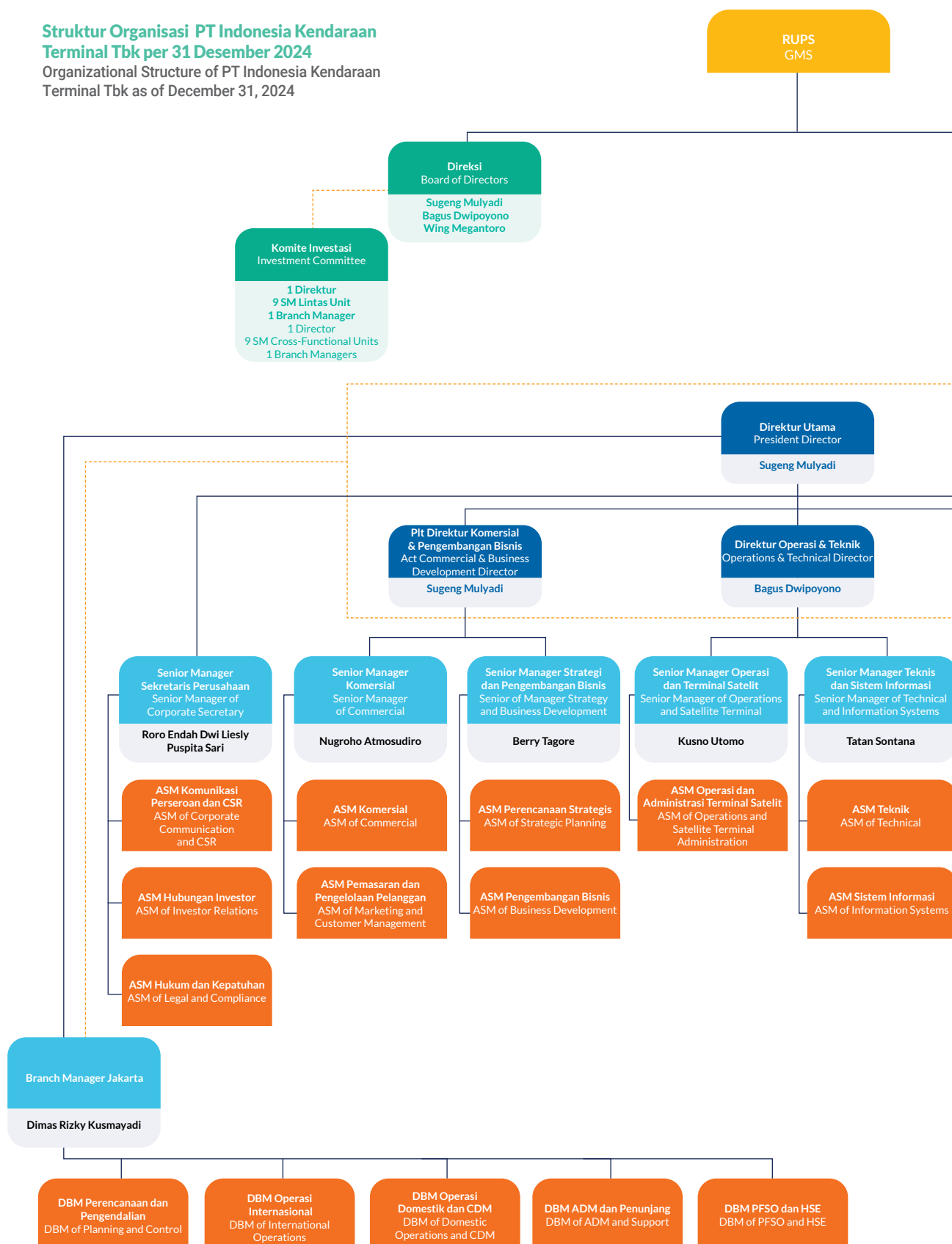
7	Kantor Satelit: Satellite Office
	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin Trisakti Port, Banjarmasin Jalan Barito Hilir No. 6, Telaga Biru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Tel. : +62 21 4394 2251 Web : www.indonesiacarterterminal.co.id Email : corsec@indonesiacarterterminal.co.id / info@indonesiacarterterminal.co.id
8	Kantor Branch Jakarta: Office Branch Jakarta
	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Jalan Sindang Laut No. 100 Customer Care : +62 811933 9930 Telp. : +62 21 4393 2251 Web : www.indonesiacarterterminal.co.id Email : corsec@indonesiacarterterminal.co.id / komersial@indonesiacarterterminal.co.id

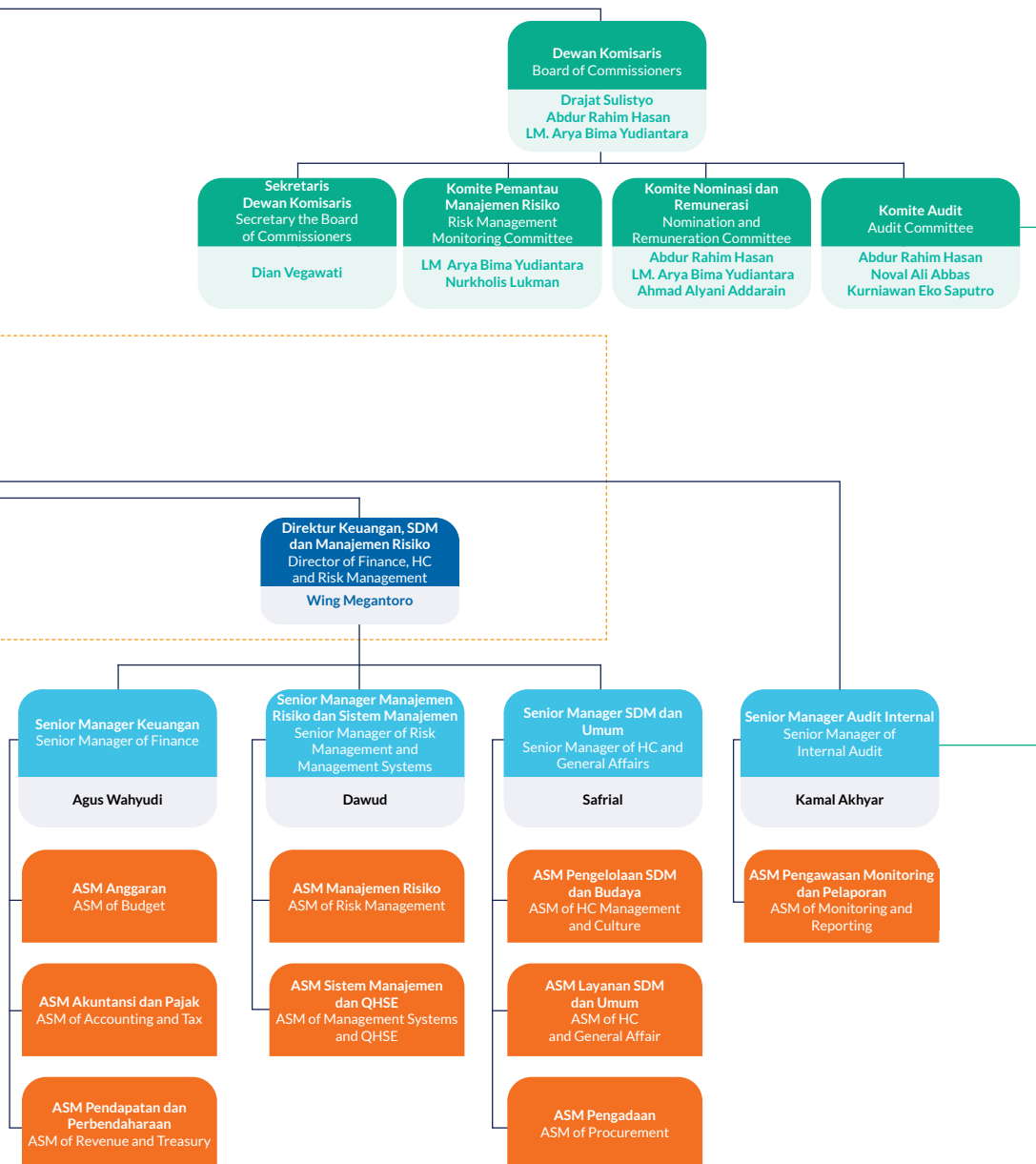


STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY

Struktur Organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk per 31 Desember 2024
Organizational Structure of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk as of December 31, 2024





--- Garis Konfirmasi dan Penyampaian Informasi
Confirmation and Information Delivery Line

— Garis Koordinasi dan Supervisi
Coordination and Supervision Line

— Garis Koordinasi antara Komite Audit sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris dengan Audit Internal sebagai Organ Direksi
Coordination Line between the Audit Committee as a Supporting Organ of the Board of Commissioners and Internal Audit as an Organ of the Board of Directors



KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI INDUSTRI

MEMBERSHIP IN INDUSTRY ASSOCIATIONS

Perseroan terus memperluas jaringan bisnis serta menjalin komunikasi yang lebih luas dengan berpartisipasi secara aktif sebagai anggota asosiasi dan organisasi serta diharapkan juga dapat meningkatkan kredibilitas Perseroan di industri sejenis. Keanggotaan dalam asosiasi dan organisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pelibatan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasional. Hingga tahun 2024, Perseroan telah tergabung dalam keanggotaan asosiasi industri, yakni sebagai berikut:

The Company continues to expand its business network and establish wider communication by actively participating as a member of associations and organizations and is also expected to increase the Company's credibility in similar industries. Membership in these associations and organizations is also part of the effort to involve stakeholders in resolving any problems faced in carrying out operational activities. Until 2024, the Company has joined the membership of the following industry associations:

Daftar Keanggotaan pada Asosiasi
Association Membership List

Nama Asosiasi Association Name	Status	Lingkup Asosiasi Association Scope
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia Association of Indonesia Port Business Entities	Anggota Aktif Active member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia DKI Jakarta Association of Indonesia Stevedoring and Unloading Companies DKI Jakarta	Anggota Aktif Active member	Nasional National
Asosiasi Emiten Indonesia Association of Indonesia Issuers	Anggota Aktif Active member	Nasional National





PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Drajat Sulistyo

Komisaris Utama

Periode Jabatan: 2022 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama

President Commissioner

Term of Office: 2022 - Closing of GMS 2025, First Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia

Usia 45 tahun per 31 Desember 2024

Kelahiran Purworejo 27 Oktober 1979

Personal Data

Indonesian Citizen

45 years old as of December 31, 2024

Born in Purworejo October 27, 1979

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Akta Berita Acara RUPSLB No. 27 Tanggal 13 April 2022.

Legal Basis for Appointment

Deed of Minutes of EGMS No. 27 April 13, 2022.

Riwayat Pendidikan

- Diploma Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (2002)
- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Jakarta (2012)
- Master in Logistic dari Kuhne Logistic University (2014)

Educational Background

- Diploma in Civil Engineering from Gadjah Mada University (2002)
- Bachelor of Civil Engineering from Jakarta University (2012)
- Master in Logistic from Kuhne Logistic University (2014)

Sertifikasi

BNSP SDM Level General Manager

Certification

BNSP SDM Level General Manager

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal (2022-2027)
- Regional Head 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023 – Sekarang)
- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021)
- General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Lampung (2020 – 2021).
- General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu (2016 – 2018)

Work Experience

- President Commissioner at PT Indonesia Kendaraan Terminal (2022-2027)
- Regional Head 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023 – Present)
- President Director at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021)
- General Manager t PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Lampung Branch (2020 – 2021).
- General Manager at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bengkulu Branch (2016 – 2018)

Rangkap Jabatan

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada

Concurrent Positions

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None

Di Lembaga/Perusahaan lain

Executive Directors Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

At Other Institutions/Companies

Executive Directors Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Affiliation

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Directors.

Kepemilikan Saham IPCC

Tidak ada

IPCC Share Ownership

None



Abdur Rahim Hasan

Komisaris Independen

Periode Jabatan: 2020 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama

Independent Commissioner

Term of Office: 2020 - Closing of GMS 2025, First Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 45 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Purbalingga 13 Januari 1979

Personal Data

Indonesian Citizen
45 years old as of December 31, 2024
Born in Purbalingga January 13, 1979

Domisili

Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

Domicile

North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Akta Notaris Nomor 48 tanggal 26 Agustus 2020

Legal Basis for Appointment

Notarial Deed Number 48 dated August 26, 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana Hukum Universitas Azzahra Jakarta (2012)

Educational History

Bachelor of Law, Azzahra University, Jakarta (2012)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Pekerjaan

- Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2025)
- Dewan Komisaris PT JPPI (2019-2020)
- Komisaris Utama PT JPPI (2018-2019)
- Dewan Komisaris PT Madina Mitra Teknik (2014-2019)
- Dewan Komisaris PT JPPI (2014-2018)
- Dewan Komisaris PT Raja Tiga Sila (2014-2015)
- Dewan Komisaris PT Srandil Steel (2012-2014)

Work Experience

- Board of Commissioners at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2025)
- Board of Commissioners at PT JPPI (2019-2020)
- President Commissioner at PT JPPI (2018-2019)
- Board of Commissioners at PT Madina Mitra Teknik (2014-2019)
- Board of Commissioners at PT JPPI (2014-2018)
- Board of Commissioners at PT Raja Tiga Sila (2014-2015)
- Board of Commissioners at PT Srandil Steel (2012-2014)

Rangkap Jabatan

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada

Concurrent Positions

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None

Di Lembaga/Perusahaan lain

Tidak ada

At other Institutions/Companies

None

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Affiliation

Has no affiliations with either members of Board of Commissioners or other Directors.

Kepemilikan Saham IPCC

Tidak ada

IPCC Share Ownership

None



LM. Arya Bima Yudiantara

Komisaris Independen

Periode Jabatan: 2021 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama

Independent Commissioner

Term of Office: 2021 - Closing of GMS 2025, First Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 57 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Surakarta 19 Agustus 1967

Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Hukum dari Universitas Atmajaya (1997)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Pekerjaan

- VP Marketing Project PT Gistec Prima (September 2014 – 2021)
- Manager Operasional PT Lumbung Mas (September 2009 – Juli 2014)
- Direktur PT Prada Yasa (September 2007 – Agustus 2009)
- HRD PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007)

Rangkap Jabatan

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada

Di Lembaga/Perusahaan lain

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC

Tidak ada

Personal Data

Indonesian Citizen
57 years old as of December 31, 2024
Born in Surakarta August 19, 1967

Domicile

West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Legal Basis for Appointment

Minutes of Extraordinary GMS of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.

Educational Background

Bachelor of Law from Atmajaya University (1997)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Work Experience

- VP Marketing Project at PT Gistec Prima (September 2014 – 2021)
- Operational Manager at PT Lumbung Mas (September 2009 – July 2014)
- Director at PT Prada Yasa (September 2007 – August 2009)
- HRD at PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007)

Concurrent Positions

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None

At other Institutions/Companies

None

Affiliation

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Directors.

IPCC Share Ownership

None

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Hingga akhir tahun pelaporan 2024, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan. Komposisi Dewa Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen, sebagaimana didetailkan pada tabel berikut:

Tabel Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Per 31 Desember 2024
Structure and Composition of Board of Commissioners As of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	April 2022 - Penutupan RUPST 2025 April 2022 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1 st	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 27 Tanggal 13 April 2022 Deed of Minutes of Extraordinary GMS No. 27 Dated April 13, 2022
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Agustus 2020 - Penutupan RUPST 2025 August 2020 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1 st	Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 concerning the Statement of Meeting Resolutions of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2021 - Penutupan RUPST 2025 June 2021 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1 st	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021. Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

Until the end of the 2024 reporting year, there were no changes in the composition and membership of the Company's Board of Commissioners. The composition of the Company's Board of Commissioners consists of 1 (one) President Commissioner, and 2 (two) members of Board of Commissioners who are also Independent Commissioners, as detailed in the following table:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS THAT OCCURRED AFTER THE END OF THE FISCAL YEAR

Until this Annual Report was published, there were no changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners.



Bagus Dwipoyono
Direktur Operasi dan Teknik
Operations and Technical Director

Sugeng Mulyadi
Direktur Utama
President Director

Wing Megantoro
Direktur Keuangan, SDM dan
Manajemen Risiko
Director of Finance, HC and
Risk Management

Abdur Rahim Hasan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Drajat Sulistyo
Komisaris Utama
President Commissioner

LM. Arya Bima Yudiantara
Komisaris Independen
Independent Commissioner



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE



Sugeng Mulyadi
Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
Periode Jabatan: 2023 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama
President Director and Acting Commercial and Business Development Director
Term of Office: 2023 - Closing of GMS 2025, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
 Usia 52 tahun per 31 Desember 2024
 Kelahiran Jombang, 5 April 1972

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

- Diangkat sebagai Direktur Utama merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan melalui Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023

Riwayat Pendidikan

- Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands (2013)
- Master of Finance from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2008)
- Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia (1996)

Sertifikasi

- *Certified Management Port Modern-UNCTAD*
- *Certified Risk Management Professional (CRMP)*
- *Certified Integrity Development Policy Expert*
- *Certified Risk Governance Professional (CRGP)*

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis (2023-2025)
- Direktur PT Pelindo Investama (2020 - 2023)
- Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018 - 2019)
- VP Keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 - 2018)

Rangkap Jabatan

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

Di Lembaga/Perusahaan lain

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC

491.200 Lembar saham (0,027%)

Personal Data

Indonesian citizen
 52 years old as of December 31, 2024
 Born in Jombang, April 5, 1972

Domicile

Jakarta, Indonesia

Legal Basis for Appointment

- Appointed as President Director concurrently holding the position of Acting Director of Commercial and Business Development of the Company through Deed Number 44 dated April 18, 2023.

Educational Background

- Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands (2013)
- Master of Finance from Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia (2008)
- Bachelor of Economic Management from Brawijaya University, Malang, Indonesia (1996)

Certifications

- Certified Magement Port Modern-UNCTAD
- Certified Risk Management Professional (CRMP)
- Certified Integrity Development Policy Expert
- Certified Risk Governance Professional (CRGP)

Work Experience

- President Director concurrently Acting Commercial and Business Development Director (2023-2025)
- Director at PT Pelindo Investama (2020 - 2023)
- Finance and Human Capital Director at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018 - 2019)
- VP of Finance at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 - 2018)

Concurrent Positions

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 Acting Commercial and Business Development Director

At other Institutions/Companies

None

Affiliation

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Directors.

IPCC Share Ownership

491,200 Shares (0.027%)



Bagus Dwipoyono
Direktur Operasi dan Teknik
Periode Jabatan: 2023 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama
Operations and Technical Director
Term of Office: 2023 - Closing of GMS 2025, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
 Usia 52 tahun per 31 Desember 2024
 Kelahiran Surabaya, 21 Desember 1972

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023

Riwayat Pendidikan

- Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2020)
- Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University, China (2011)
- Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta (2002)
- Bachelor Industrial Engineering from Universitas Pasundan, Bandung (1996)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Operasi dan Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 - saat ini)
- Direktur Utama PT Menara Maritim Indonesia (2018 - 2023)
- Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Terminal Petikemas Indonesia (2016-2018)
- Manajer Operasi Pendukung 1 PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2016)
- ASM Pengembangan dan Pengendalian I PT PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kantor Pusat (2012-2015)

Rangkap Jabatan

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 Tidak ada

Di Lembaga/Perusahaan lain

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC

316.500 Lembar saham (0,017%)

Personal Data

Indonesian citizen
 52 years old as of December 31, 2024
 Born in Surabaya, December 21, 1972

Domicile

Jakarta, Indonesia

Legal Basis for Appointment

Deed Number 44 dated April 18, 2023

Educational Background

- Engineering Profession Program from Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia (2020)
- Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University, China (2011)
- Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta (2002)
- Bachelor Industrial Engineering from Pasundan University, Bandung (1996)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Work Experience

- Operations and Technical Director at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 - present)
- President Director of PT Menara Maritim Indonesia (2018 - 2023)
- Commercial & Business Development Director of PT Terminal Petikemas Indonesia (2016-2018)
- Supporting Operations Manager 1 of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2016)
- ASM Development and Control I of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office (2012-2015)

Concurrent Positions

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 None

At other Institutions/Companies

None

Affiliation

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Directors.

IPCC Share Ownership

316,500 Shares (0.017%)



Wing Megantoro

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Periode Jabatan: 2023 - Penutupan RUPST 2025, Periode Pertama
Director of Finance, HC and Risk Management
Term of Office: 2023 - Closing of GMS 2025, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Semarang, 6 Juli 1972

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Akta Nomor 06 tanggal 5 September 2023

Riwayat Pendidikan

- Master of Business Administration from Kuhne Logistic University (2015)
- Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya (1997)

Sertifikasi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023 – saat ini)
- Regional Division Head Management Finance & Tax Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2021 - 2023
- SVP Manajemen Keuangan PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2019 – 2021
- SVP Pengendalian & Perencanaan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2018 – 2019
- VP Layanan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2016 – 2018

Rangkap Jabatan

Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Tidak ada

Di Lembaga/Perusahaan lain

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC

53.100 Lembar saham (0,003%)

Personal Data

Indonesian citizen
52 years old as of December 31, 2024
Born in Semarang, July 6, 1972

Domicile

Jakarta, Indonesia

Legal Basis for Appointment

Deed Number 06 dated September 5, 2023

Educational Background

- Master of Business Administration from Kuhne Logistic University (2015)
- Bachelor of Accountancy from Jayabaya University (1997)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Work Experience

- Director of Finance, HC and Risk Management at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023-present)
- Regional Division Head Management Finance & Tax Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2021 - 2023
- SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2019 – 2021
- SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2018 – 2019
- VP of Finance Services at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) 2016 – 2018

Concurrent Positions

At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
None

At other Institutions/Companies

None

Affiliation

Has no affiliation with either members of Board of Commissioners or other Directors.

IPCC Share Ownership

53,100 Shares (0.003%)

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Hingga akhir tahun pelaporan 2024, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Direksi Perseroan. Komposisi Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 2 (dua) orang Direktur, sebagaimana didetailkan pada tabel berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

Until the end of the 2024 reporting year, there were no changes in the composition and membership of the Company's Board of Directors. The composition of the Company's Board of Directors consists of 1 (one) President Director and 2 (two) Directors, as detailed in the following table:

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2024
Structure and Composition of Board of Directors As of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Acting Commercial and Business Development Director	April 2023 - Penutupan RUPST 2025 April 2023 - Closing of GMS 2025	1	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	April 2023 - Penutupan RUPST 2025 April 2023 - Closing of GMS 2025	1	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	September 2023 - Penutupan RUPST 2025 September 2023 - Closing of GMS 2025	1	Akta Nomor 06 tanggal 5 September 2023 Deed Number 06 dated September 5, 2023



Bagus Dwipoyono
Direktur Operasi dan Teknik
Operations and Technical Director

Wing Megantoro
Direktur Keuangan, SDM dan
Manajemen Risiko
Director of Finance, HC and
Risk Management

Abdur Rahim Hasan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Drajat Sulistyo
Komisaris Utama
President Commissioner

LM. Arya Bima Yudiantara
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sugeng Mulyadi
Direktur Utama
President Director



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICERS PROFILE

Direktorat Utama | Main Directorate

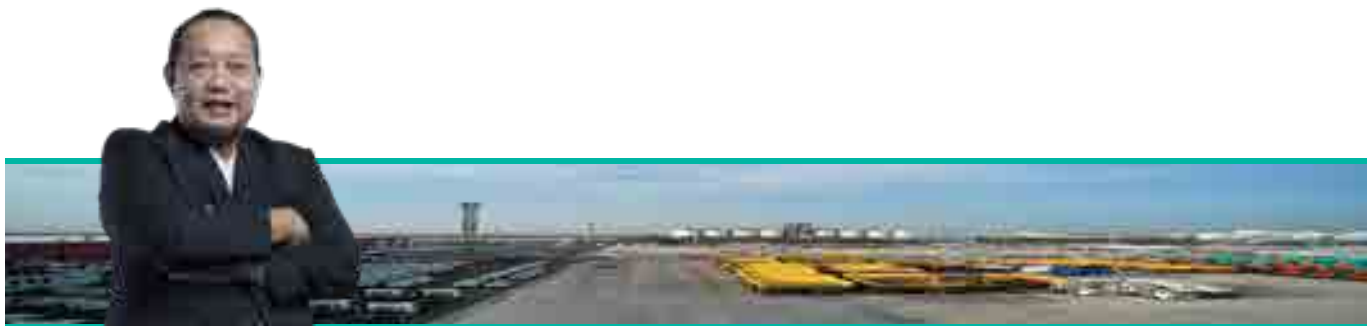


Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari

Senior Manager Sekretaris Perusahaan | Senior Manager of Corporate Secretary
Menjabat sejak 31 Januari 2024 | In Office since January 31, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia	Indonesia
Usia Age	:	44 tahun per 31 Desember 2024	44 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.	East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	:	1 September 2022	September 1, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	- S1, Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2004 - S2, Erasmus Universteit Rotterdam, 2014	- Bachelor degree in Management, Gadjah Mada University, 2004 - Master degree in Erasmus Universteit Rotterdam, 2014
Pengalaman Kerja Work Experience	:	- Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Jan 2024) - Department Head Pemasaran Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2022) - Deputy Vice President Hubungan Pelanggan Non Peti Kemas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021) - Deputy Vice President Pelayanan Pelanggan PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018-2019) - Asisten Manager Customer Service PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2018) - Asisten Manager Komersial & Pengembangan Bisnis Tanjung Priok (2014-2015)	- Senior Manager of Strategy and Business Development at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Jan 2024) - Head of Regional Marketing Department 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2022) - Deputy Vice President of Non-Container Customer Relations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021) - Deputy Vice President of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018-2019) - Assistant Manager of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2018) - Assistant Manager of Commercial & Business Development of Tanjung Priok (2014-2015)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 31 Januari 2024	Served as Senior Manager Corporate Secretary based on the Decree of Board of Directors No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 dated January 31, 2024
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	:	0 (No) Lembar saham	0 (Zero) Shares





Kamal Akhyar

Senior Manager Audit Internal | Senior Manager of Internal Audit
 Menjabat sejak 1 Januari 2023 | Served since January 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Usia Age	: 48 tahun per 31 Desember 2024	48 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia	North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	: 1 Januari 2023	January 1, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1, Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Sumatera Utara, 1998 • S2, Sains, Universitas Sumatera Utara, 2005 • S2, Manajemen Transportasi, Universitas Trisakti, 2010	• Bachelor of Economics majoring in Management, University of North Sumatra, 1998 • Master of Science, University of North Sumatra, 2005 • Master of Transportation Management, Trisakti University, 2010
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Pengendalian Internal Supporting SPI pada Subholding Pelindo Multi Terminal (2021-2022) • Deputy Senior Vice President SPI Pengawasan SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021) • Wakil Kepala Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2020) • Pengawas Bidang Khusus pada Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016-2019) • Sekretaris Project Manajemen Office (PMO) Alur Pelayaran PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014-2016) • Staf Bidang Project Manajemen Office (PMO) Pengelolaan Alur PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014)	• Vice President of Internal Control Supporting SPI at Pelindo Multi Terminal Subholding (2021-2022) • Deputy Senior Vice President SPI HR and General Supervision of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021) • Deputy Head of the Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2020) • Supervisor of Special Fields in the Internal Supervision Unit of the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016-2019) • Secretary of the Project Management Office (PMO) of the Shipping Channel of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014-2016) • Staff of Project Management Office (PMO) Alur Management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023	Board of Directors Decree No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 1, 2023
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	: 0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares





Dimas Rizky Kusmayadi

Branch Manager Jakarta | Branch Manager Jakarta
Menjabat sejak 11 Juni 2024 | In Office since June 11, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia	Indonesia
Usia Age	:	40 tahun per 31 Desember 2024	40 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia	DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	:	1 Desember 2023	December 1, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	- S1, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2006 - S2, Logistik dan Transportasi Internasional Shanghai Maritim University, 2012 - S2, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2017 - S3, Bisnis Administrasi dan Manajemen, Universitas Brawijaya, 2024	- Bachelor degree in Law, Diponegoro University, 2006 - Master degree in Logistics and International Transportation Shanghai Maritime University, 2012 - Master degree in Law, University of Indonesia, 2017 - Doctorate in Business Administration and Management, Brawijaya University, 2024
Pengalaman Kerja Work Experience	:	- Branch Manager Jakarta PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (2024 - saat ini) - Senior Manager Operasi PT Indonesia Kendaraan Terminal (2023 - 2024) - Senior Manager Komersial Regional 2 Tanjung Priok (2023 - 2023) - Deputy General Manager Komersial Regional 2 Tanjung Priok (2021 - 2023) - DGM Komersial Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Regional 2 Tanjung Priok (2019 - 2021) - DVP Perencanaan & Analisa Bisnis Inti Regional 2 Head Office (2016 - 2019)	- Branch Manager Jakarta of PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (2024 - present) - Senior Manager Operations of PT Indonesia Kendaraan Terminal (2023 - 2024) - Senior Manager Commercial Regional 2 Tanjung Priok (2023 - 2023) - Deputy General Manager Commercial Regional 2 Tanjung Priok (2021 - 2023) - DGM Commercial Tanjung Priok Port Branch Regional 2 Tanjung Priok (2019 - 2021) - DVP Planning & Core Business Analysis Regional 2 Head Office (2016 - 2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/28/11/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Desember 2023 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/28/11/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated December 1, 2023 concerning the Transfer of Duties/Positions of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	:	0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares





Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Directorate

Nugroho Atmosudiro

Senior Manager Komersial | Senior Manager of Commercial
Menjabat sejak 1 Oktober 2021 | In Office since October 1, 2021

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Usia Age	: 40 tahun per 31 Desember 2024	40 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: DKI Jakarta, Indonesia	DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	: 1 Desember 2023	December 1, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	- S1, Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2008 - S2, Transportasi dan Perkapalan, Netherlands Maritime University, 2014	- Bachelor degree in Economics, Diponegoro University, 2008 - Master degree in Transportation and Shipping, Netherlands Maritime University, 2014
Pengalaman Kerja Work Experience	- Deputy General Manager Komersial Cabang Pelabuhan Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) - Asisten Senior Manager Pengembangan Bisnis Pendukung PT IPC Terminal Petikemas (2018-2020) - Senior Manager Komersial, Asisten Manager Lini II dan VAS PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2018)	- Deputy General Manager Komersial Cabang Pelabuhan Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) - Asisten Senior Manager Pengembangan Bisnis Pendukung PT IPC Terminal Petikemas (2018-2020) - Senior Manager Komersial, Asisten Manager Lini II dan VAS PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/28/11/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Desember 2023 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/28/11/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated December 1, 2023 concerning the Transfer of Duties/Positions of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	: 0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares




Berry Tagore

Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis | Senior Manager of Strategy and Business Development
Menjabat sejak 31 Januari 2024 | In Office since January 31, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Usia Age	: 42 tahun per 31 Desember 2024	42 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Jakarta	Jakarta
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	: 31 Januari 2024	January 31, 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1, Ekonomi Manajemen Universitas Mercu Buana, 2007 S2, Logistik dan Kepemimpinan, Kuhne Logistics University, 2017	Bachelor Degree, Management Economics, Mercu Buana University, 2007 Master Degree, Logistics and Leadership, Kuhne Logistics University, 2017
Pengalaman Kerja Work Experience	• Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - saat ini) • Manager Pengusahaan Properti Kantor Pusat (2022 - 2024) • Manager Pengusahaan Properti Regional 2 (2021 - 2022) • ASSISTANT DGM PROPERTI CABANG PELABUHAN TANJUNG PRIOK Regional 2 (2021 - 2021)	• Senior Manager of Strategy and Business Development of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - present) • Head Office Property Business Manager (2022 - 2024) • Regional Property Business Manager 2 (2021 - 2022) • ASSISTANT DGM PROPERTY BRANCH OF TANJUNG PRIOK PORT Regional 2 (2021 - 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 31 Januari 2024	Board of Directors Decree No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 dated January 31, 2024
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	: 0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares





Direktorat Operasi dan Teknik Operations and Technical Directorate

Tatan Sontana

Senior Manager Teknik dan SI | Senior Manager of Technical and SI
 Menjabat sejak 1 Desember 2022 | In office since December 1, 2022

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Usia Age	: 53 tahun per 31 Desember 2024	53 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Bogor, Jawa Barat, Indonesia	Bogor, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	: 1 Desember 2022	December 1, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S1, Universitas Persada Indonesia YAI, 2001	Bachelor Degree, Persada Indonesia University YAI, 2001
Pengalaman Kerja Work Experience	- Project Manager Kantor Pusat (2020) - Senior Manager Sistem Informasi IPC Terminal Petikemas (2017) - Manager Sistem Informasi IPC Terminal Petikemas (2016) - Strategi Bisnis & Manajemen Informasi Kantor Pusat (2014 – 2015) - Head Office Project Manager (2020) - Senior Manager of Information System at IPC Terminal Petikemas (2017) - Manager of Information System at IPC Terminal Petikemas (2016) - Head Office Business Strategy & Information Management (2014 – 2015)	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/28/11/6/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 28 November 2022	Board of Directors Decree No. KP.10.02/28/11/6/RKTK/SDMA/PLND-22 dated November 28, 2022
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	: 0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares





Kusno Utomo

Senior Manager Operasi dan Terminal Satelit | Senior Manager of Operations and Satellite Terminals
Menjabat sejak 1 Oktober 2021 | In Office since October 1, 2021

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Usia Age	: 54 tahun per 31 Desember 2024	54 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	Bekasi, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	: 1 September 2016	September 1, 2016
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S1, Universitas Jember, 1995	Bachelor Degree, Jember University, 1995
Pengalaman Kerja Work Experience	• Senior Manager Terminal Satelit (2021) • VP Terminal Domestik PT Indonesia Kendaraan Terminal (2017)	• Senior Manager of Satellite Terminal (2021) • VP Domestic Terminal at PT Indonesia Kendaraan Terminal (2017)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UT MA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021	Board of Directors Decree No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UT MA/PLND-21 dated October 1, 2021
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	: 0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares



Direktorat Keuangan dan SDM Directorate of Finance and HC



Agus Wahyudi

Senior Manager Keuangan | Senior Manager of Finance
Menjabat sejak 1 Oktober 2021 | In Office since October 01, 2021

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Usia Age	: 50 tahun per 31 Desember 2024	50 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Bogor, Jawa Barat, Indonesia	Bogor, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	: 22 Desember 2020	December 22, 2020
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S1, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999	Bachelor of Accounting, Muhammadiyah University Yogyakarta, 1999
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Keuangan (2020) • DVP Pajak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018-2020) • DGM Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi (2017-2018)	• Vice President of Finance (2020) • DVP of Taxation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018-2020) • DGM of Finance and HC of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jambi Branch (2017-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021	Board of Directors Decree No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021.
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	: 0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares




Safrial

Senior Manager SDM dan Umum | Senior Manager of HC and General Affairs
Menjabat sejak 1 Januari 2023 | In Office since January 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia	Indonesia
Usia Age	:	54 tahun per 31 Desember 2024	54 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia	North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung d Perusahaan Joining the Company	:	1 Januari 2023	January 1, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	- S1 Teknik & Manajemen Industri, Universitas Sumatera Utara, 1998 - S2, Universitas Gadjah Mada, 2013	- Bachelor of Industrial Engineering & Management, University of North Sumatra, 1998 - Master of Science, University of Gadjah Mada, 2013
Pengalaman Kerja Work Experience	:	- Senior Vice President Kerjasama Usaha dan Pembinaan Perusahaan pada divisi Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan-Direktorat Strategi dan Komersial (2021-2022) - SVP Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2021) - Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2019) - Senior Manager Perencanaan & Pengembangan Usaha pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2013-2018)	- Senior Vice President of Business Cooperation and Corporate Development in the Business Cooperation and Subsidiary Development Division-Directorate of Strategy and Commercial (2021-2022) - SVP Procurement of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2021) - Senior Manager of Subsidiary Development of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2019) - Senior Manager of Business Planning & Development at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2013-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023	Board of Directors Decree No. KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated January 1, 2023
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	:	0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares





Dawud

Senior Manager Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen | Senior Manager of Risk Management and Management System
 Menjabat sejak 1 Agustus 2024 | In Office since August 1, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Usia Age	: 49 tahun per 31 Desember 2024	49 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Jakarta	Jakarta
Bergabung di Perusahaan Joining the Company	: 1 Agustus 2024	August 1, 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S1, Hukum Universitas Jakarta (2008)	Bachelor of Law, University of Jakarta (2008)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Plt. Senior Manager Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - saat ini) • Deputy Branch Manager PFSO dan HSE PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - 2024) • Asisten Senior Manager PFSO PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022 - 2024) • Asisten Senior Manager PFSO Regional 2 PT IKT (2021 - 2022)	• Acting Senior Manager of Risk Management and Management System PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - present) • Deputy Branch Manager of PFSO and HSE PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2024 - 2024) • Assistant Senior Manager of PFSO PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022 - 2024) • Assistant Senior Manager of PFSO Regional 2 PT IKT (2021 - 2022)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	: Surat Keputusan Direksi No.KP.10.05/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 1 Agustus 2024	Board of Directors Decree No.KP.10.05/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-24 dated August 1, 2024
Kepemilikan Saham IPCC IPCC Share Ownership	: 0 (Nol) Lembar saham	0 (Zero) Shares



DEMOGRAFI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Per 31 Desember 2024, jumlah pegawai Perseroan mencapai 418 orang pegawai, mengalami penurunan sebanyak 8,24% dari tahun sebelumnya berjumlah 435 orang pegawai. Penurunan tersebut dikarenakan terdapat pekerja yang mutasi, pensiun, meninggal dunia dan berhenti dan pada tahun 2024 tidak terdapat rekrutmen pekerja baru.

As of December 31, 2024, total employees of the Company reached 418 employees, a decrease of 8.24% from the previous year which amounted to 435 employees. The decrease was due to employees who were transferred, retired, died and resigned and in 2024 there was no recruitment of new employees.

Berikut data demografi karyawan IPCC per 31 Desember 2024 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya.

The following is IPCC employee demographic data as of December 31, 2024 and a comparison with the previous year.

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan (Orang)
Number and Composition of Employees by Employment Status (People)

Status Status	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Persentase Composition (%)	
Organik Organic	68	10	78	18,66%	74	11	85	19,54	(7)	(8,24%)	▼
Kontrak Contract	2	-	2	0,48%	1	-	1	0,23	1	100,00%	▲
Alih Daya Outsourcing	324	14	338	80,86%	331	18	349	80,23	(11)	(3,15%)	▼
Jumlah Total	394	24	418	100,00%	406	29	435	100,00	(17)	(3,91%)	▼

L=Laki-laki; P=Perempuan
L=Male; P=Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)
Number and Composition of Organic Employees by Education Level (People)

Pendidikan Education	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Persentase Composition (%)	
S3 - Doktor S3 - Doctorate	1	-	1	1	-	-	-	-	1	100,00%	▲
S2 - Pascasarjana 2 - Postgraduate	11	2	13	13	13	3	16	18,83	(3)	(18,75%)	▼
S1 - Sarjana S1 - Bachelor	29	8	37	37	30	7	37	43,53	-	-	-
Diploma	7	-	7	7	8	1	9	10,58	(2)	(22,22%)	▲
SLTA dan SLTP High School and Junior High School	20	-	20	20	23	-	23	27,06	(3)	(13,04%)	▲
Jumlah Total	68	10	78	78	74	11	85	100,00	(7)	(8,24%)	▲

L=Laki-laki; P=Perempuan
L=Male; P=Female



Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Usia (Orang)
 Number and Composition of Organic Employees by Age (People)

Rentang Usia Age Range	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Persentase Composition (%)
>55 tahun/ years	-	-	-	-	1	-	1	1,17	(1)	(100,00%) ▼
51-55 tahun/ years	13	1	14	17,95%	14	-	14	16,47	-	- ▼
47-50 tahun/ years	9	-	9	11,54%	10	-	10	11,76	(1)	(10,00%) ▼
37-46 tahun/ years	36	3	39	50,00%	39	4	43	50,58	(4)	(9,30%) ▼
26-36 tahun/ years	-	6	16	7,69%	10	7	17	20,00	(11)	(64,71%) ▼
<26 tahun/ years	10	-	10	12,82%	-	-	-	0,00	10	100,00 ▲
Jumlah Total	68	10	78	100,00%	74	11	85	100,00	(7)	(8,24%) ▼

L=Laki-laki; P=Perempuan
 L=Male; P=Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Golongan/Jabatan
 Number and Composition of Organic Employees by Rank/Position

Golongan	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Persentase Composition (%)
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
4	2	-	2	2,56%	2	-	2	2,35	-	- -
5	3	-	3	3,85%	3	-	3	3,53	-	- -
6	-	-	-	0,00%	2	-	2	2,35	(2)	(100,00%) ▼
7	5	1	6	7,69%	5	1	6	7,06	-	- -
8	3	-	3	3,85%	2	-	2	2,35	1	50,00% ▲
9	9	5	14	17,95%	12	7	19	22,36	(5)	(26,32%) ▼
10	10	2	12	15,38%	9	1	10	11,77	2	20,00% ▲
11	4	1	5	6,41%	4	1	5	5,88	-	- -
12	2	-	2	2,56%	4	-	4	4,70	(2)	(50,00%) ▼
13	4	1	5	6,41%	4	1	5	5,88	-	- -
14	13	-	13	16,67%	14	-	14	16,47	(1)	(7,14%) ▼
15	10	-	10	12,82%	10	-	10	11,77	-	- -
16	2	-	2	2,56%	2	-	2	2,35	-	- -
18	1	-	1	1,28%	1	-	1	1,18	-	- -
Jumlah Total	68	10	78	100,00%	74	11	85	100,00	(7)	(8,24%) ▼

L=Laki-laki; P=Perempuan
 L=Male; P=Female



Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Unit Kerja (Orang)

Number and Composition of Organic Employees by Work Unit (People)

Unit Kerja Work Unit	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Persentase Percentage (%)
Direksi Board of Directors	3	-	3	3,85	3	-	3	3,53	-	-
Audit Internal Internal Audit	4	-	4	5,13	3	2	5	5,88	(1)	(20,00) ▼
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	1	3	4	5,13	1	2	3	3,53	1	33,33 ▲
Branch Jakarta Jakarta Branch	23	-	23	29,49	23	-	23	27,06	-	-
MKO – MTKI MKO – MTKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisi Komersial Commercial Division	2	1	3	3,85	3	1	4	4,71	(1)	(25,00) ▼
Divisi Strategi & Pengembangan Bisnis Strategy & Business Development Division	2	1	3	3,85	1	2	3	3,53	-	-
Divisi Operasi dan Terminal Satelit Operations and Satellite Terminal Division	19	-	19	24,36	21	-	21	24,71	(2)	(9,52) ▼
Divisi Teknik & Sistem Informas Technical & Information Systems Division	6	-	6	7,69	7	-	7	8,24	(1)	(14,29) ▼
Divisi Keuangan Finance Division	3	2	5	6,41	3	3	6	7,06	(1)	(16,67) ▼
Divisi SDM dan Umum HC & General Affairs Division	4	1	5	6,41	6	-	6	7,06	(1)	(16,67) ▼
Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Risk Management and Management System	1	2	3	3,85	3	1	4	4,71	(1)	(25,00) ▼
Jumlah Total	68	10	78	100,00	74	11	85	100,00	(7)	(8,24) ▼

L=Laki-laki; P=Perempuan
L=Male; P=Female

Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Wilayah Kerja (Orang)

Number and Composition by Work Area (People)

Wilayah Kerja Work Area	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Persentase Percentage (%)
Kantor Pusat di Jakarta Head Office in Jakarta	53	10	63	80,77%	56	11	72	84,70	(9)	(12,50%) ▼



Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Wilayah Kerja (Orang)

Number and Composition by Work Area (People)

Wilayah Kerja Work Area	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Persentase Percentage (%)	
Kantor Manajemen Kerja Sama Operasi di Gresik Join Operation Management Office in Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Satelit di Makassar Satellite Office in Makassar	6	-	6	7,69%	7	-	7	8,24	(1)	(14,29%)	▼
Kantor Satelit di Pontianak Satellite Office in Pontianak	3	-	3	3,85%	3	-	3	3,53	-	-	-
Kantor Satelit di Medan Satellite Office in Medan	1	-	1	1,28%	2	-	2	2,35	(1)	(50,00%)	▼
Kantor Satelit Balikpapan Balikpapan Satellite Office	5	-	5	6,41%	6	-	6	-	(1)	(16,67%)	▼
Kantor Satelit Banjarmasin Banjarmasin Satellite Office	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	68	10	78	100,00%	74	11	85	100,00	(7)	(8,24%)	▼
L=Laki-laki; P=Perempuan L=Male; P=Female											

Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)

Number and Composition by Gender (People)

Jenis Kelamin Gender	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (person)	Persentase (%) Percentage (%)	
Laki-laki Male	68	87,18%	74	87,05	(6)	(8,11%)	▼
Perempuan Female	10	12,82%	11	12,95	(1)	(9,09%)	▼
Jumlah Total	78	100,00%	85	100,00	(7)	(8,24%)	▼



STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

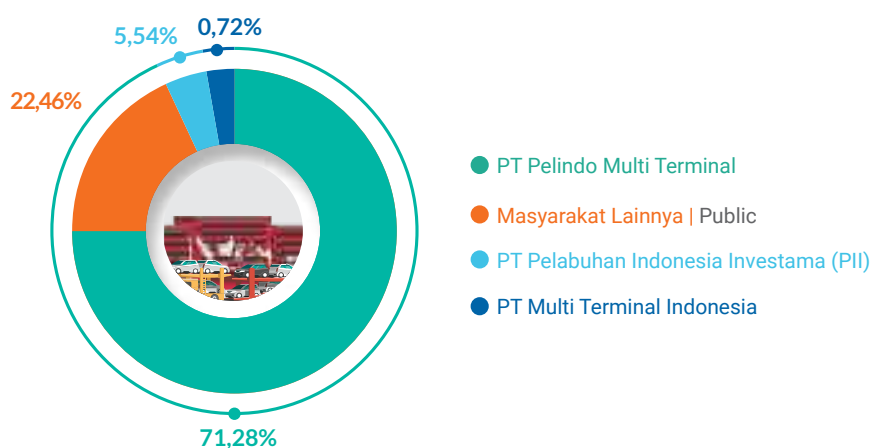
Kepemilikan Saham IPCC

IPCC Share Ownership

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024 January 1, 2024			31 Desember 2024 December 31, 2024		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-ribu) Issued and Fully Paid-up Capital (Rp-thousand)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-ribu) Issued and Fully Paid-up Capital (Rp-thousand)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Par Nominal Value = Rp100/share						
Kepemilikan saham 5% atau lebih Share ownership of 5% or more						
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	1.296.144.749	129.614.474.900	71,28%	1.296.144.749	129.614.474.900	71,28%
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	100.682.600	10.068.260.000	5,54%	100.682.600	10.068.260.000	0,72%
Kepemilikan di bawah 5% Ownership below 5%						
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	13.092.371	1.309.237.100	0,72%	13.092.371	1.309.237.100	5,54%
Publik (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) Public (each with ownership below 5%)	408.465.100	40.846.510.000	22,46%	408.465.100	40.846.510.000	22,46%
Jumlah Total	1.818.384.820	181.838.482.000	100%	1.818.384.820	181.838.482.000	100%

Komposisi Pemegang Saham IPCC Per 31 Desember 2024

IPCC Shareholders Composition as of December 31, 2024





INFORMASI PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG ATAS SAHAM IPCC OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA AWAL DAN AKHIR TAHUN BUKU

INFORMATION ON THE PERCENTAGE OF DIRECT OR INDIRECT OWNERSHIP OF IPCC SHARES BY BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS AT BEGINNING AND END OF THE FISCAL YEAR

Nama Name		Jabatan Position		1 Januari 2024 January 1, 2024				
				Kepemilikan Langsung Direct Ownership		Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership		
				Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	
Direksi Board of Directors								
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Acting Commercial and Business Development Director	354.000	0,02	-	-			
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	200.000	0,01	-	-			
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	-	-	-	-			
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
Drajat Sulistyio	Komisaris Utama President Director	-	-	-	-			
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-			
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-			

JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN PADA AWAL DAN AKHIR TAHUN BUKU

NUMBER OF SHAREHOLDERS AND PERCENTAGE OF OWNERSHIP AT BEGINNING AND END OF THE FISCAL YEAR

Status Pemilik Status of Shareholders	1 Januari 2024 January 1, 2024			31 Desember 2024		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Pemodal Nasional National Investors						
Ritel Domestik Domestic Retail						
Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	8.222	316.988.000	17,43	8363	331.687.500	18,24
Institusi Domestik Domestic Institutions						
Lembaga Indonesia Indonesian Institutions	33	1.450.058.020	79,74	10	1.438.013.00	79,08
Sub Total	8.255	1.767.046.020	97,18	8.393	1.769.700.50	97,32



	31 Desember 2024			
	Kepemilikan Langsung Direct Ownership		Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership	
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
	354.000	0,02	-	-
	200.000	0,01	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Status Pemilik Status of Shareholders	1 Januari 2024 January 1, 2024			31 Desember 2024		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Pemodal Asing Foreign Investors						
Ritel Asing Foreign Retail	8	279.900	0,02	10	86.800	0,005
Institusi/Badan Usaha Asing Foreign Institutions/Business Entities	21	51.058.900	2,81	24	48.597.500	2,67
Sub Total	29	51.338.800	2,82	34	48.684.300	2,68
Total	8.284	1.818.384.820	100	8.427	1.818.384.820	100,00

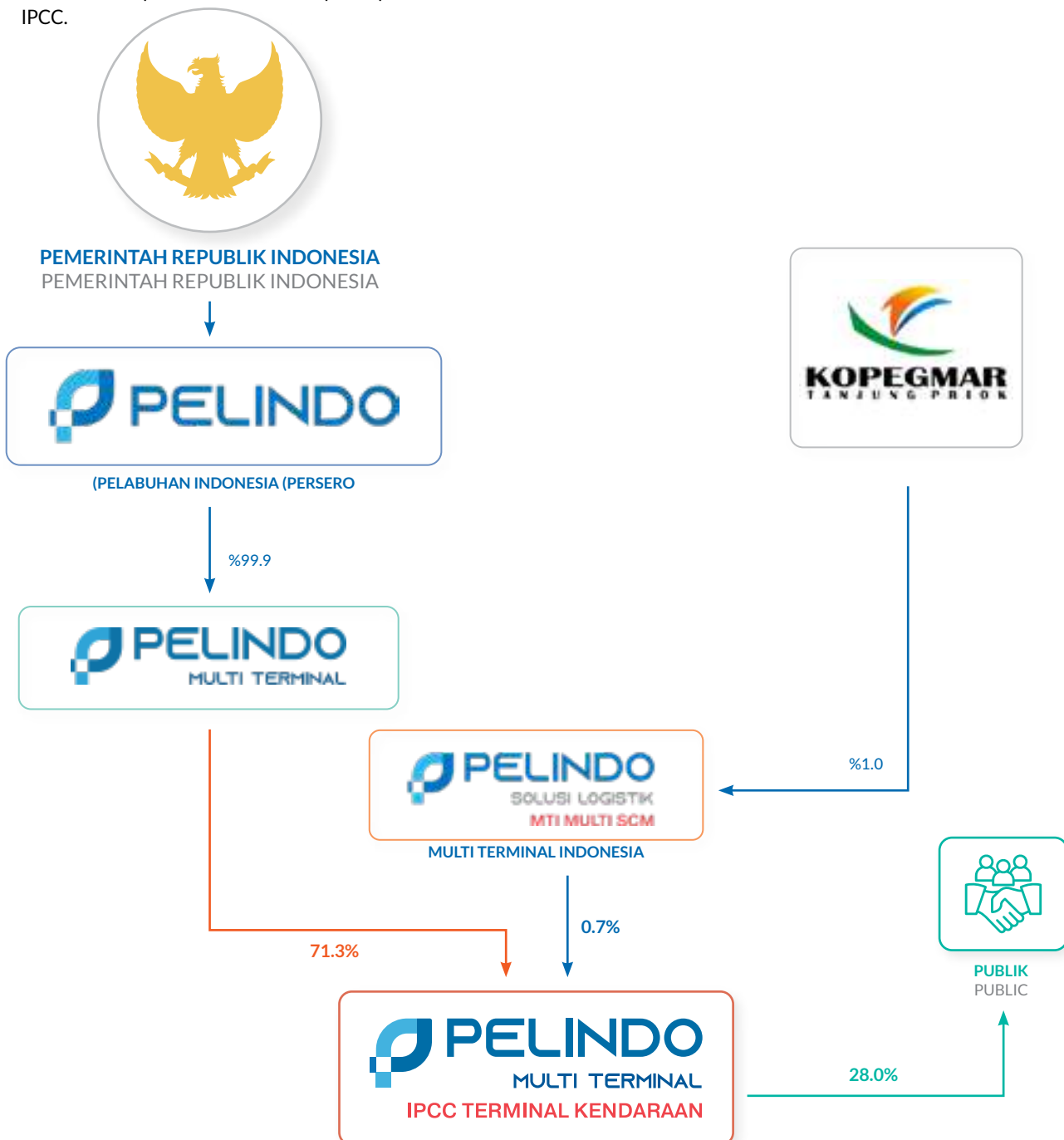


PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 71,28%. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) memiliki 99,99% saham SPMT dan menjadi pemegang saham utama SPMT. Sementara Pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham utama Pelindo dengan kepemilikan sebesar 100%. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik akhir dari IPCC.

MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, BOTH DIRECTLY AND INDIRECTLY, UP TO INDIVIDUAL OWNERS

PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") is the major shareholder of IPCC with ownership of 71.28%. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) owns 99.99% of SPMT shares and is the major shareholder of SPMT. Meanwhile, the Government of Indonesia is the major shareholder of Pelindo with ownership of 100%. Thus, the Government of the Republic of Indonesia is the final owner of IPCC.



NAMA ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

NAME OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURE COMPANY

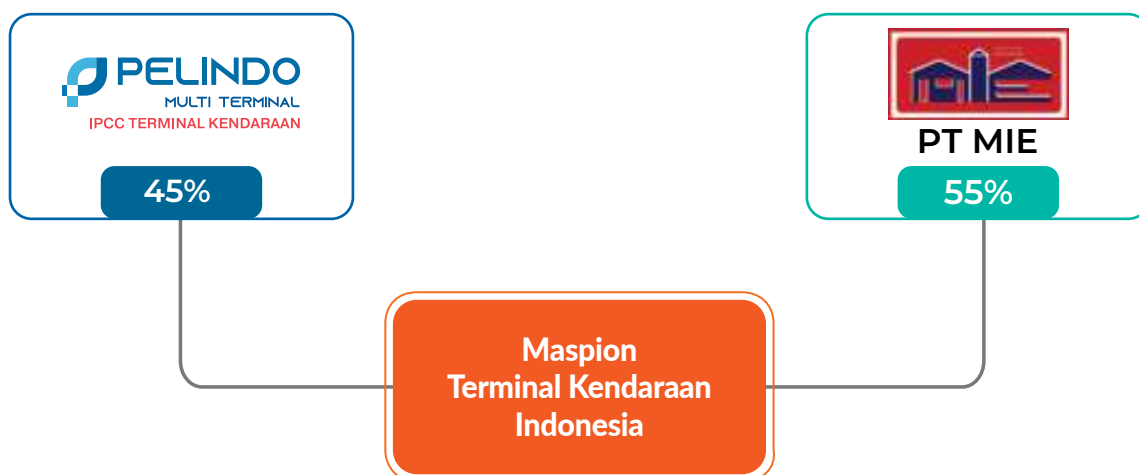
Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, perusahaan ventura bersama. Perseroan memiliki entitas operasi bersama, yaitu Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan kepemilikan sebesar 45,00%.

Until the end of 2024, the Company does not have any subsidiaries, associates, nor joint venture companies. The Company has a joint operation entity, namely Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operation Management with ownership of 45.00%.

Nama Perusahaan Company Name	Tempat Kedudukan Domicile	Kegiatan Usaha Business Activities	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Penyertaan Year of Participation	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Aset Asset		Status Operasi Status
						2024 (Rp-juta) (Rp- million)	2023 (Rp-juta) (Rp- million)	
Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI") Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operation Management ("MKO MTKI")	Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	Terminal Kendaraan Car Terminal	2015	2015	45%	3.234	3.213	Beroperasi Operating

Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Kendaraan Terminal Indonesia

Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operation Management



Pada 21 Agustus 2015, Perusahaan dan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") membentuk perusahaan *joint operation* bernama Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO Maspion") yang berkedudukan di Gresik. Porsi kepemilikan saham Perusahaan terhadap MKO Maspion adalah sebesar 45%.

On August 21, 2015, the Company and PT Maspion Industrial Estate ("MIE") formed a joint operation company called Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Joint Operation Management ("MKO Maspion") domiciled in Gresik. The Company's share ownership portion in MKO Maspion is 45%.

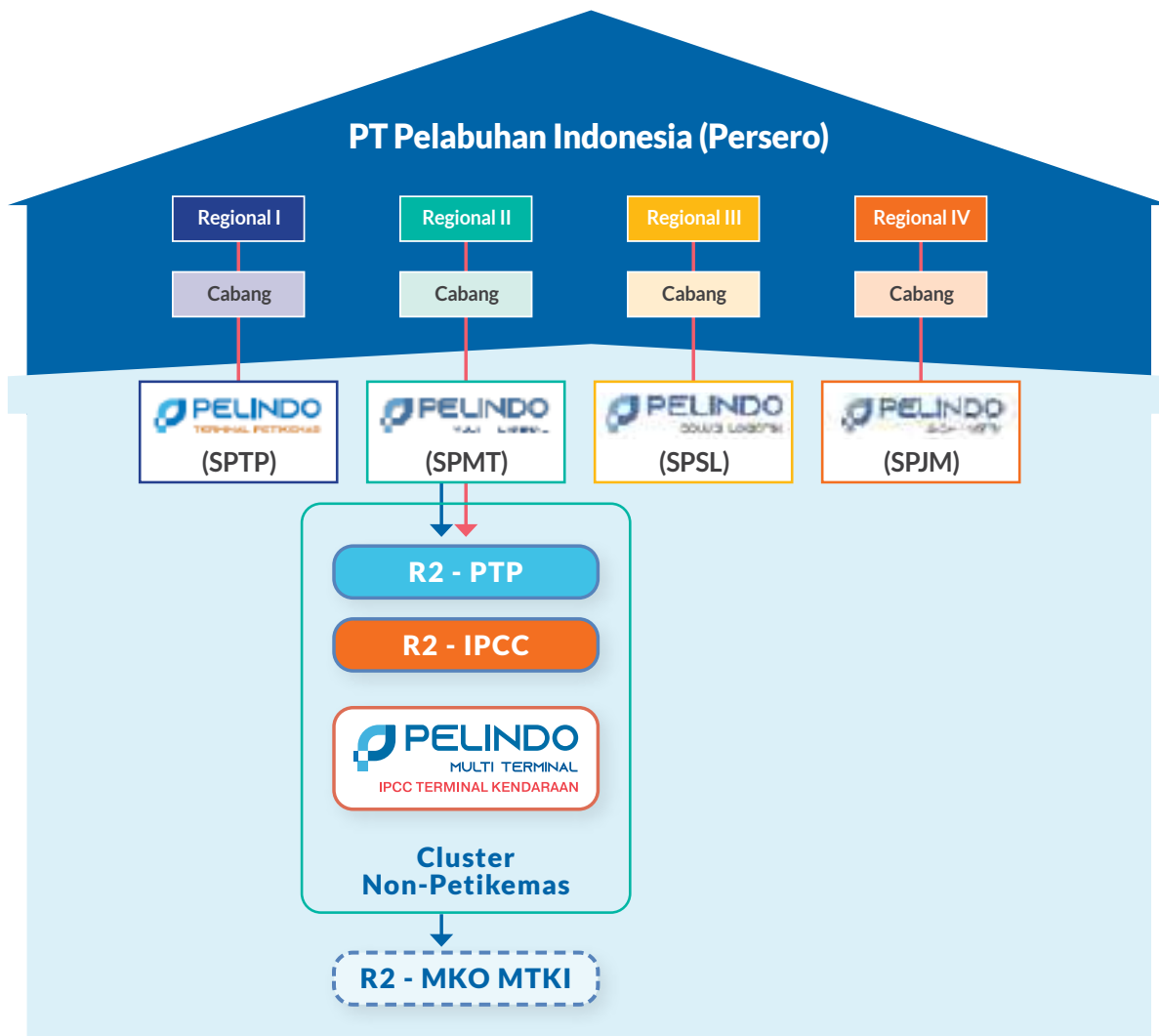
STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE

Perseroan adalah bagian dari Pelindo Group dimana pasca *merger* Pelindo, posisi Perseroan berada di bawah *Sub Holding* PT Pelindo Multi Terminal yang merupakan bagian dari kluster Non Peti Kemas. Berikut adalah bagan Struktur Grup Pelindo:

The Company is part of Pelindo Group where after Pelindo merger, the Company's position is under the Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal which is part of the Non-Container cluster. The following is a chart of Pelindo Group Structure:

Struktur Grup Pelindo
Pelindo Group Structure



KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND/OR LISTING

PENAWARAN SAHAM PERDANA

17 April 2018

Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Indonesia Kendaraan Terminal Tahun 2018 melalui Surat No. PR09/4117/IKT-18 tertanggal 17 April 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta.

Penyampaian tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan perubahan-perubahannya, antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

28 Juni 2018

Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas Penawaran Umum Perdana Saham.

9 Juli 2018

Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/"IPO") sebanyak 509.147.700 lembar saham biasa atas nama, atau sebesar 28% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100/lembar saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.640/lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS).

Melalui aksi korporasi ini, Perseroan berhasil memperoleh dana sebesar Rp835.002.228.000 (delapan ratus tiga puluh lima miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) yang seluruhnya telah digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan.

10 Juli 2018

Saham Perseroan secara resmi dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham "IPCC".

INITIAL PUBLIC OFFERING

April 17, 2018

The Company submitted a Registration Statement in connection with the 2018 Initial Public Offering of Indonesia Terminal Vehicle Shares through Letter No. PR09/4117/IPCC-18 dated April 17, 2018 to the Financial Services Authority ("OJK") in Jakarta.

This submission is in accordance with the requirements stipulated by Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 concerning Capital Markets, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64 of 1995, Supplement No. 3608 along with its implementing regulations ("UUPM") and amendments, including OJK Regulation no. 7/POJK.04/2017 concerning Registration Statement Documents for the Public Offering of Equity Securities, Debt Securities, and/or Sukuk and OJK Regulation no. 8/POJK.04/2017 concerning Form and Content of Prospectus and Abridged Prospectus for Public Offerings of Equity Securities.

June 28, 2018

The Company received an effective statement from OJK.

July 9, 2018

The Company conducted an Initial Public Offering (IPO) of 509,147,700 ordinary shares in its name, or 28% of the total issued and fully paid capital with a nominal value of Rp100/share, and offered it to the public at a price Offer Rp1,640/share, which must be paid in full when submitting the Share Purchase Order Form (FPPS).

The Company obtained funds amounting to Rp835,000,000,000 (eight hundred thirty-five billion Rupiah) from this Company action. All of these funds have been used as working capital for the Company.

July 10, 2018

The Company's shares were officially listed and started trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the stock code "IPCC".



KRONOLOGIS PENERBITAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan tidak menerbitkan efek lain dalam bentuk apapun selain yang telah dijelaskan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek, *corporate action*, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

Until December 31, 2024, the Company did not issue other securities in any form other than those described in the Share Issuance and Listing Chronology above. Therefore, there is no information regarding the chronology of securities listings, Company actions, changes in the number of securities, names of exchanges where other securities are listed, and securities ratings.

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Akuntan Publik Public Accountant	Moch Dadang Syachruna
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Purwantono, Sungkoro & Surja
Alamat Address	Gedung Indonesia Stock Exchange, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Jasa Audit Audit Services	Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Annual Historical Financial Information Audit Services
Jasa Lainnya Other Services	Audit Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) dan Key Performance Indicators (KPI) Performance Evaluation Report (LHEK) and Key Performance Indicators (KPI) Services
Periode Penugasan Assignment Period	Tahunan Annual
Biaya Jasa Audit (Rp) Audit Service Fee (Rp)	Rp 1.035.000.000
Biaya Jasa Non Audit (Rp) Non-Audit Service Fee (Rp)	Rp 190.000.000



LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

INSTITUTIONS AND/OR SUPPORTING PROFESSIONALS

BIRO ADMINISTRASI EFEK DAN INFORMASI PENCATATAN SAHAM

SHARE REGISTRAR AND SHARE REGISTRATION INFORMATION

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Electronic Data Interchange Indonesia
Alamat Address	10th Floor, Wisma SMR, Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.89, Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Fee Tahunan Pengelolaan Administrasi Saham Annual Fee Service for Stock Administration Management
Periode Penugasan Assignment Period	Tahunan Annual
Biaya (Rp) Fee (IDR)	38.500.000

KUSTODIAN

CUSTODIAN

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta, 12190, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pembayaran <i>Annual fee for security</i> IPCC Payment of annual fee for IPCC security
Periode Penugasan Assignment Period	Tahunan Annual
Biaya (Rp) Fee (IDR)	10.000.000

NOTARIS

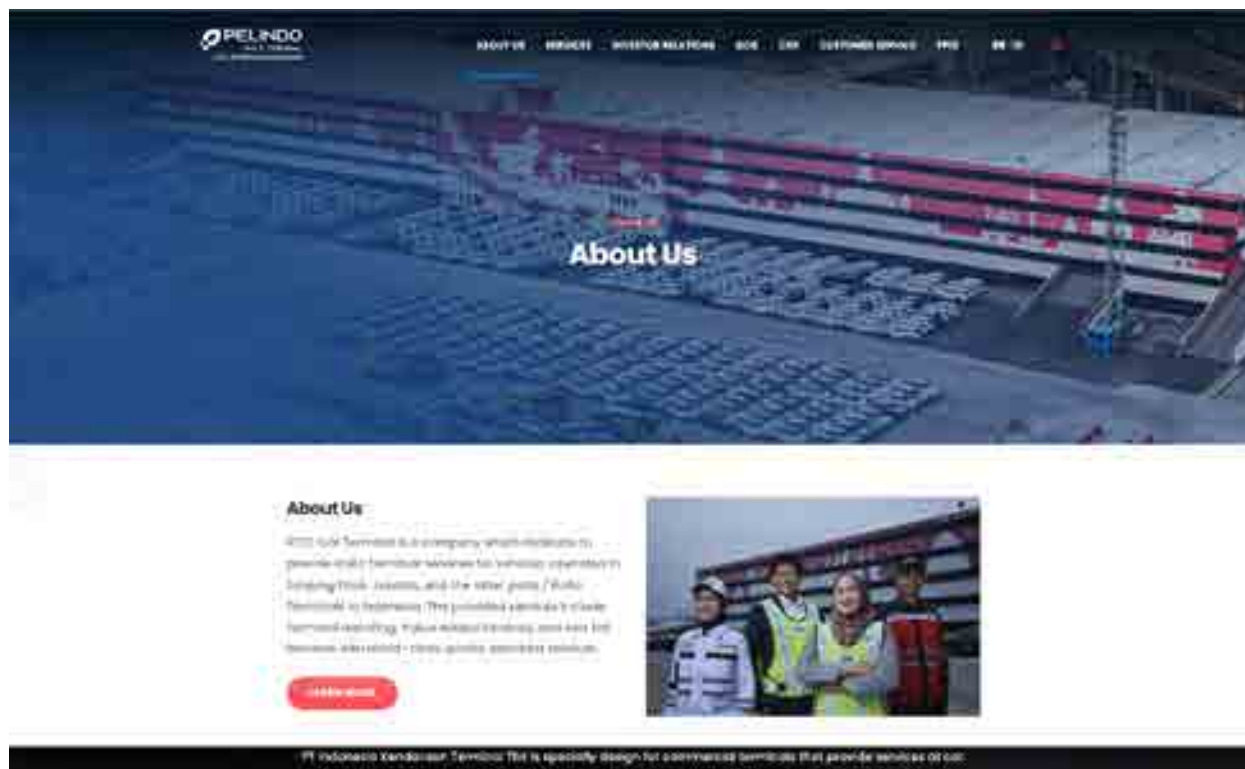
NOTARY

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	Notaris dan PPAT Ashoya Ratam S.H., M.Kn Notary and PPAT Ashoya Ratam S.H., M.Kn
Alamat Address	Jl. Suryo No. 54. Blok S Kebayoran Baru 12180
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Notaris RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Notary Services for Annual GMS for Fiscal Year 2023
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun 2024 Year 2024
Biaya (Rp) Fee (IDR)	Rp 25.000.000



INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE



Situs web Perseroan dengan alamat www.indonesiacarterminal.co.id berfungsi sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal untuk menyampaikan beragam informasi umum mengenai Perseroan. Seluruh informasi yang ditampilkan pada situs web Perseroan dikelola secara profesional dan transparan sesuai dengan Prinsip Keterbukaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) khususnya kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atas Perusahaan Publik.

Seluruh informasi yang dimuat pada situs web Perseroan disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan senantiasa memperbarui informasi secara berkala agar senantiasa menampilkan informasi yang terkini dan akurat bagi para pemangku kepentingan.

Situs web Perseroan menyajikan beragam informasi yang relevan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, antara lain, informasi laporan keuangan tahunan, laporan keuangan per triwulan dan laporan keuangan tengah tahunan, kinerja saham, presentasi dari manajemen untuk setiap triwulan atas kinerja Perseroan serta informasi dan kegiatan Perseroan lainnya. Berikut tabel pemenuhan informasi pada situs Perseroan sesuai dengan Pasal 6, POJK No. 8/POJK.4/2015, materi yang wajib disampaikan, antara lain:

The Company's website at www.indonesiacarterminal.co.id functions as a communication medium with external and internal parties to convey a variety of general information regarding the Company. The entire information displayed on the Company's website is managed professionally and transparently in accordance with the Principle of Transparency as mandated by Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market and to improve the implementation of good corporate governance, especially to shareholders, customers, the public, the government, and other stakeholders, and the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No: 8/POJK.04/2015 concerning Issuer Websites for Public Companies.

All information in the Company's website is accessible in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The Company continuously updates information periodically in order to always reveal the latest and accurate information for stakeholders.

The Company's website presents various relevant information as a form of information disclosure to the public, including, among others, annual financial statements information, quarterly financial statements and semi-annual financial statements, stock performance, management presentations for each quarter on the Company's performance and other information and activities of the Company. The following is a table of information fulfillment on the Company's website in accordance with Article 6, POJK No. 8/POJK.4/2015, the material that must be submitted, among others:



PENGUNGKAPAN KETERBUKAAN INFORMASI DI WEBSITE

INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITE

No	Informasi yang Wajib ditampilkan dalam Website Information that must be displayed on the Website	Keterangan Description
1	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu. Shareholder information up to individual ultimate owners.	✓
2	Kode Etik. Code of Conduct.	✓
3	Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date on which the summary of the minutes of the GMS is announced.	✓
4	Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). Separate annual Financial Statements (last 5 years).	✓
5	Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors	✓
6	Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Satuan Kerja Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit	✓

Website Perseroan terdiri dari 6 (enam) kanal dengan konten sebagai berikut:

- Tentang Kami**
Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Perseroan, Budaya Perseroan, Corporate Roadmap, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pencapaian, Anak Perusahaan, e-procurement dan Hasil Survei Kepuasan Pelanggan.
- Layanan**
Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Stevedoring, Cargodoring, Receiving and Delivery, Value Added Services, dan Standard Operating Procedure.
- Hubungan Investor**
Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Relasi Media, Informasi keuangan, Penerapan GCG, Pelanggan kami, Informasi Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- GCG**
Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Kode Etik, Whistleblowing System, Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Akuntan Publik, Manajemen Risiko, dan Anggaran Dasar.
- CSR**
Section ini menampilkan beragam informasi mengenai IPCC Peduli, Penghargaan CSR, Pendidikan dan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial, Lingkungan dan Segmen Lainnya.

The Company's website consists of 6 (six) channels with the following content:

- About Us**
This section displays various information regarding the Company, Company Culture, Company Roadmap, Company Social Responsibility, Achievements, Subsidiaries, e-procurement and Customer Satisfaction Survey Results.
- Service**
This section displays various information regarding Stevedoring, Cargodoring, Receiving and Delivery, Value Added Services, and Standard Operating Procedures.
- Investor Relations**
This section displays various information regarding Media Relations, Financial Information, GCG Implementation, our Customers, Share Information and General Meeting of Shareholders.
- GCG**
This section displays various information regarding the Company's Board of Commissioners and Directors Guidelines, Whistleblowing System, Code of Ethics, Implementation of State Administrators' Wealth Reports (LHKPN), Public Accountants, Risk Management, and Articles of Association.
- CSR**
This section displays various information regarding IPCC Care, CSR Awards, Education and Religion, Health and Social, Environment and Other Segments



6. Pelayanan Customer

Section ini menampilkan pelayanan konsumen, kritik & saran, pelanggan kami, form pengambilan gambar.

7. PPID

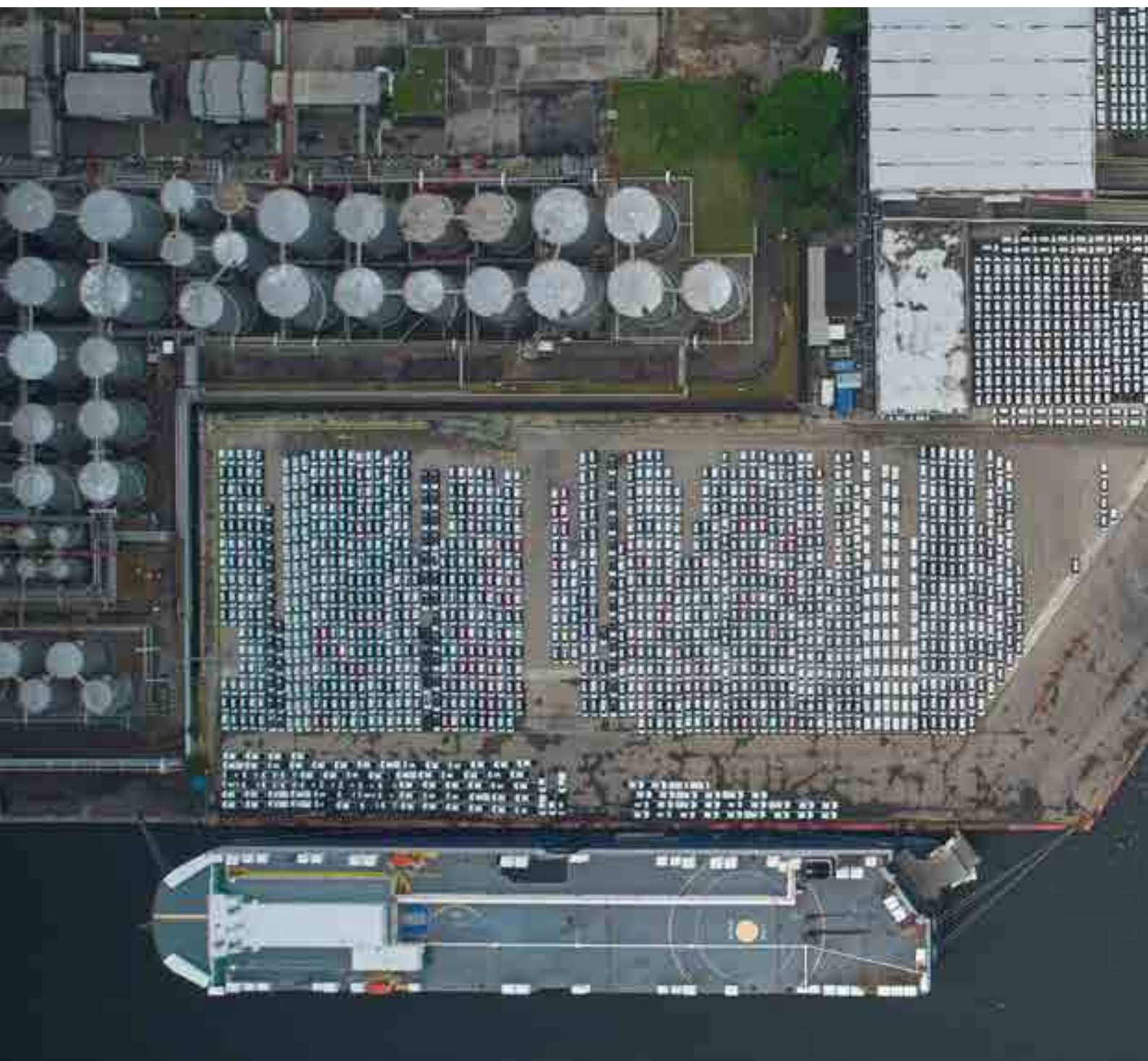
Section ini menampilkan layanan online yang ditujukan untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IDX:IPCC). Di mana pun berada, Anda dapat mengajukan permohonan Informasi Publik dengan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan.

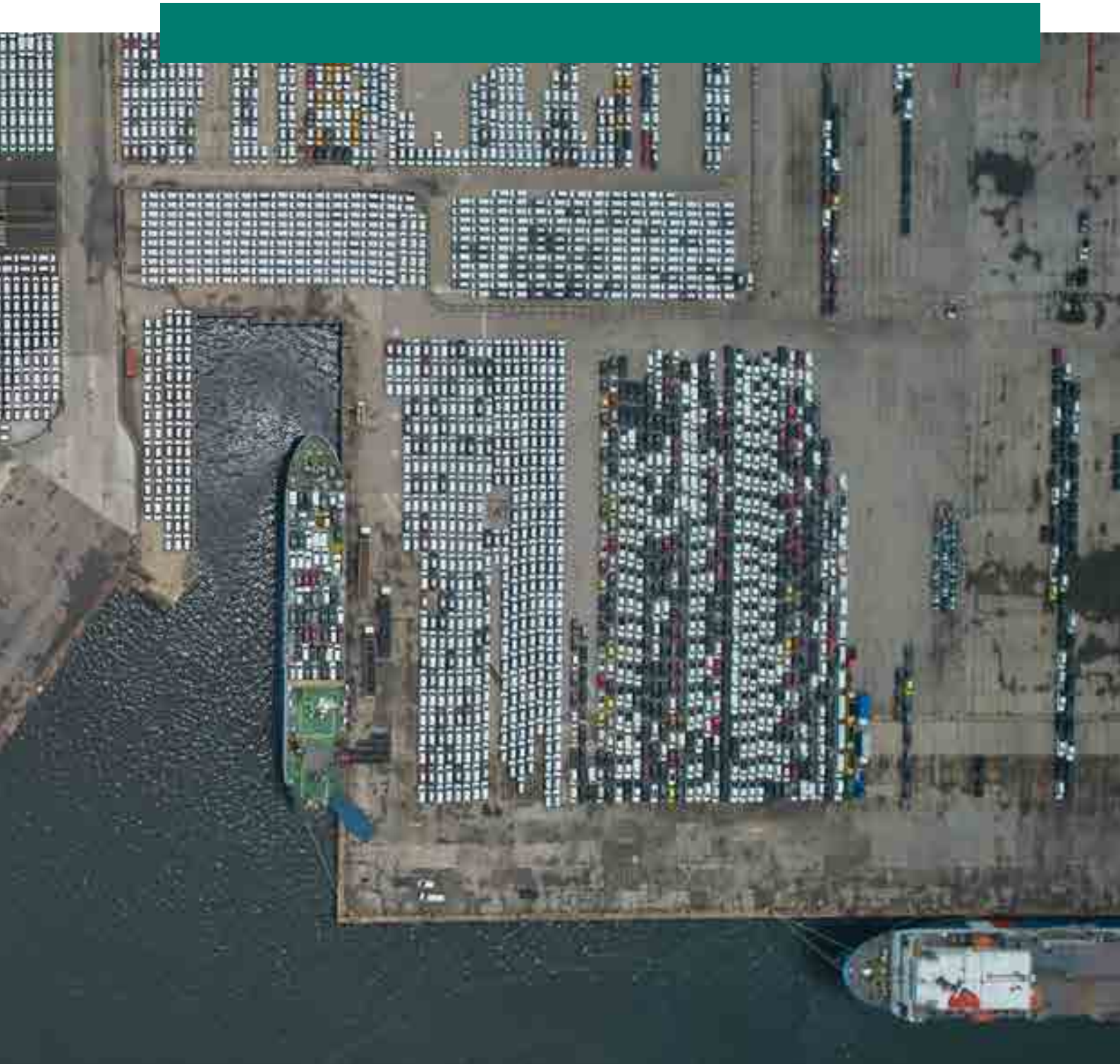
6. Customer Service

This section displays customer service, criticism and suggestions, our customers, image taking form.

7. PPID

This section displays online services aimed at facilitating public information applicants in submitting information and documentation requests to PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IDX:IPCC). Wherever you are, you can submit a Public Information request by filling out the available information request form.





Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function

IPCC berkomitmen membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul dan adaptif, sekaligus mempercepat transformasi digital melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan bisnis ke depan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

IPCC is committed to building a foundation of superior and adaptive human capital, while accelerating digital transformation by strengthening information technology infrastructure, as a strategic measure to face future business challenges and drive sustainable growth



04



PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT



IPCC melakukan berbagai strategi dalam menjalankan roda bisnisnya. Salah satunya adalah dengan terus meningkatkan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. SDM yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas merupakan komponen penting yang dapat mendukung Perseroan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Agar dapat selaras dengan visi dan misi, secara berkesinambungan IPCC melakukan pengelolaan SDM yang tepat, sehingga IPCC dapat mengembangkan talenta Insan IPCC yang berkualitas dan adaptif dalam menghadapi situasi dinamika persaingan di industri yang semakin berkembang.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN SDM

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi ekosistem industri otomotif di Indonesia, dimana PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk merupakan bagian di dalamnya. Dengan perkembangan teknologi, persaingan global, dan dinamika ekonomi nasional, diperlukan strategi pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk memastikan perusahaan tetap

IPCC carries out a variety of strategies running to drive its business forward. One of these strategies is continuously improving the quality of Human Capital (HC) management. Reliable, loyal, and competent human capital are essential components that support the Company in achieving Vision and Mission. To align with its vision and mission, IPCC consistently implements appropriate human capital management, enabling IPCC to develop high-quality and adaptive talents who can navigate the dynamic and evolving industry landscape.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICY FOR HC MANAGEMENT

2024 was a challenging year for the automotive industry ecosystem in Indonesia, of which PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk is a part. With the development of technology, global competition, and national economic dynamics, a sustainable HC development strategy is needed to ensure the Company remains competitive. The Company has prepared a sustainable



kompetitif. Perseroan menyusun rencana pengembangan SDM yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan bisnis.

1. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi :
 - a. Program pelatihan berbasis teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak manajemen terminal dan analitik data.
 - b. Pelatihan pengelolaan kendaraan listrik dan teknologi terkait (PM).
 - c. *Workshop* tentang *sustainability* dan *green logistics* (PM).
 - d. Peningkatan literasi digital untuk seluruh karyawan.
 - e. Optimalisasi penggunaan platform pembelajaran *online*.
2. Penguatan Budaya Perseroan:
 - a. Kampanye internal untuk mendorong kolaborasi dan inovasi.
 - b. Program penghargaan untuk ide-ide kreatif.
 - c. Kegiatan *team-building* untuk meningkatkan kebersamaan.
3. Pengembangan Kepemimpinan:
 - a. Program *coaching & mentoring* untuk pengembangan kepemimpinan.
 - b. Pelatihan kepemimpinan berbasis *agility*.
 - c. Pemberian tanggung jawab proyek untuk pengembangan kemampuan manajerial.
4. Manajemen Talenta:
 - a. Pemetaan *high* potensial *talent* untuk posisi strategis.
 - b. Penilaian kinerja berbasis KPI yang terintegrasi.
 - c. Program pengembangan SDM yang berkelanjutan.

HC development plan by considering the business environment conditions.

1. Training and Competency Development:
 - a. Technology-based training programs, such as the use of terminal management software and data analytics.
 - b. Training on electric vehicle management and related technologies (PM).
 - c. Workshop on sustainability and green logistics (PM).
 - d. Increasing digital literacy for all employees.
 - e. Optimizing the use of online learning platforms.
2. Strengthening Corporate Culture:
 - a. Internal campaigns to encourage collaboration and innovation.
 - b. Award programs for creative ideas.
 - c. Team-building activities to increase togetherness.
3. Leadership Development:
 - a. Coaching & mentoring programs for leadership development.
 - b. Agility-based leadership training.
 - c. Assignment of project responsibilities for the development of managerial capabilities.
4. Talent Management:
 - a. Mapping high potential talent for strategic positions.
 - b. Integrated KPI-based performance assessment.
 - c. Continuous HC development program.

VISI DAN MISI PENGELOLAAN SDM

Visi

Membangun Sumber Daya Manusia yang profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas guna mendukung pertumbuhan perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif.

Misi

- Peningkatan kompetensi SDM
- Manajemen SDM yang mandiri
- Transformasi organisasi dan manajemen SDM
- Peningkatan *talent management*
- Peningkatan produktivitas pekerja di atas rata rata industri

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Proses pengembangan organisasi bukan sekadar restrukturisasi, tetapi juga transformasi budaya dan pola pikir. Pengembangan organisasi adalah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas, fleksibilitas, dan daya saing perusahaan. Berikut adalah tahapan utama dalam pengembangan organisasi agar *agile*, adaptif, dan kompetitif.

HC MANAGEMENT VISION AND MISSION

Vision

Building Human Capital that are professional, adaptive, innovative, and have integrity to support the growth of the Company with competitive advantages..

Mission

- Increasing HC competency
- Independent HC management
- Organizational transformation and H management
- Improved talent management
- Increased worker productivity above the industry average

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

The process of organizational development is not just restructuring, but also a transformation of culture and mindset. Organizational development is a systematic process to increase the effectiveness, flexibility, and competitiveness of a company. The following are the main stages in organizational development to be agile, adaptive, and competitive.



Adapun proses ini meliputi:

1. Diagnosa Organisasi (*Organizational Diagnosis*)
2. Perencanaan Perubahan (*Planning for Change*)
3. Implementasi Perubahan (*Implementation & Execution*)
4. Evaluasi dan Penyesuaian (*Evaluation & Adjustment*)
5. *Institutionalization & Sustainability*

Direksi menetapkan struktur organisasi yang efisien dan efektif, yang dapat selalu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Perubahan struktur organisasi dapat dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Struktur organisasi perusahaan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang berorientasi proses, tegas dan tepat sasaran tapi fleksibel, serta mampu menghilangkan batasan dalam hubungan kerja.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM

Pengelolaan SDM di Perseroan dilaksanakan oleh Divisi SDM dan Umum yang dipimpin oleh Senior Manager SDM dan Umum. Secara struktural, Divisi SDM dan Umum bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko.

This process includes:

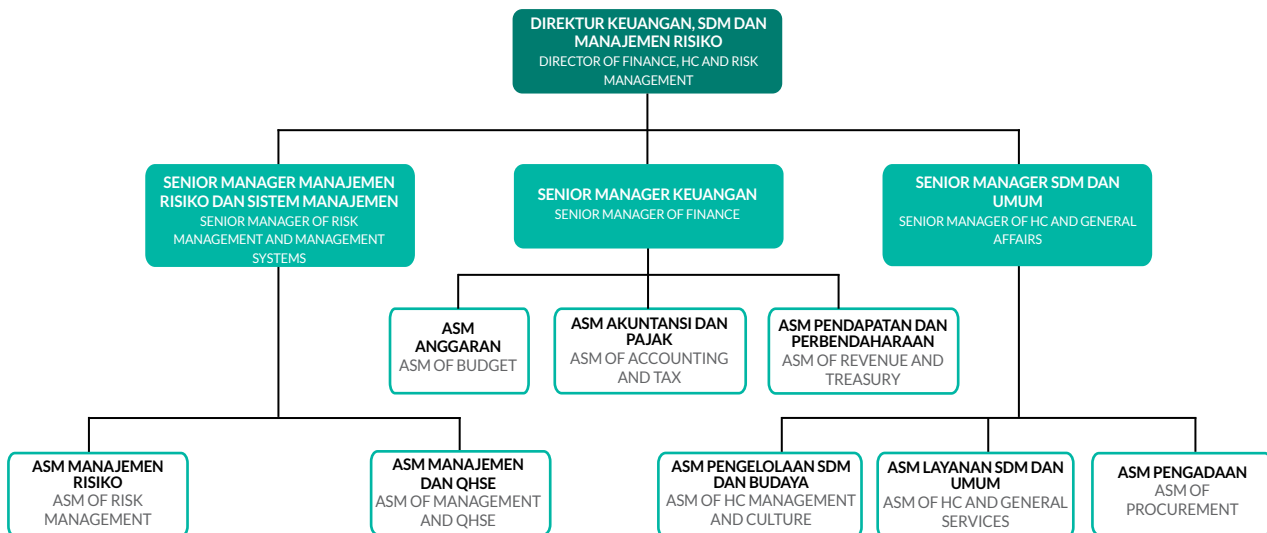
1. Organizational Diagnosis
2. Planning for Change
3. Implementation & Execution
4. Evaluation and Adjustment
5. Institutionalization & Sustainability

Board of Directors establishes an efficient and effective organizational structure that can be adjusted according to the Company's evolving conditions. Organizational structure changes may be made by the Board of Directors following the principles of good corporate governance. The Company's organizational structure is expected to create a process-oriented work environment that is firm, goal-oriented, yet flexible, and capable of eliminating barriers in work relationships.

HC MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Human Capital management in the Company is carried out by the HC and General Division led by the Senior Manager of HC and General Affairs. Structurally, the HC and General Affairs Division is directly responsible to the Director of Finance, HR and Risk Management.

Struktur Organisasi Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko IPCC
Organizational Structure of IPCC's Directorate of Finance, HC and Risk Management



Divisi SDM dan Umum dipimpin oleh Safrial sebagai Senior Manager Sumber Daya Manusia dan Umum, yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 3 Januari 2023 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Human Capital Division is led by Safrial as the Senior Manager of Human Capital and General Affairs, appointed through Board of Directors Decree No. KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated January 3, 2023, concerning the Transfer of Employee Assignment/Position within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).





Safrial

Senior Manager Sumber Daya Manusia dan Umum Senior Manager of Human Capital and General Affairs

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, 54 tahun, domisili di DKI Jakarta Indonesia. Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in DKI Jakarta.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Direksi No.KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 3 Januari 2023 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Board of Directors Decree No.KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated January 3, 2023 concerning the Transfer of Duties/Positions of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Riwayat Pendidikan Educational Background	- S1 Teknik & Manajemen Industri dari Universitas Sumatera Utara (1997) - S2 Marketing dari Universitas Gadjah Mada (2003) - Bachelor's Degree in Industrial Engineering & Management from Universitas Sumatera Utara (1997) - Master of Marketing from Universitas Gadjah Mada(2003)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	- SVP Pengadaan (2019-2021), dan SVP Kerja Sama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan pada Divisi Kerja Sama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan, Direktorat Strategi dan Komersial (2021-2022) - Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan (2018-2019) - Senior Manager Perencanaan & Pengembangan Usaha (2013-2018) - ASM Perencanaan Investasi (2006-2013) - Quality MR (2022-2006) - Staff Audit Mutu (1999-2002) - SVP Procurement (2019-2021), and SVP Business Cooperation and Subsidiary Development in the Business Cooperation and Subsidiary Development Division, Strategy and Commercial Directorate (2021-2022) - Senior Manager of Subsidiary Development (2018-2019) - Senior Manager Business Planning & Development (2013-2018) - ASM Investment Planning (2006-2013) - Quality MR (2022-2006) - Quality Audit Staff (199-2002)

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi SDM dan Umum

Tugas dan tanggung jawab Senior Manager SDM dan Umum adalah sebagai berikut:

- Planning, Budgeting dan Pengelolaan Anggaran**
Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan monitoring rencana kerja dan anggaran (RKA) unit kerja/branch/fungsi dan pengelolaan anggaran
- Pengelolaan Pekerja**
 - Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan penilaian kinerja pekerja, serta pembimbingan pekerja di unit kerja/fungsi termasuk pada perilaku indisipliner pekerja;
 - Mengarahkan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelatihan dan pengembang pekerja di unit kerja/fungsi;
 - Budaya Organisasi.
- Quality Management dan Prosedur (SOP)**
Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan sosialisasi dan memonitor pelaksanaan kebijakan dan prosedur di unit kerja/fungsi serta melakukan dan memonitor kegiatan *improvement* dan *transfer knowledge* di unit kerja/fungsi.
- Health, Safety & Environment (HSE)**
Mengarahkan, melakukan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan implementasi budaya dan program HSE di departemen.

Duties and Responsibilities of HC and General Affairs Division

The duties and responsibilities of Senior Manager of HC and General Affairs are as follows:

- Planning, Budgeting, and Budget Management**
Directing and coordinating budget preparation and monitoring the work plan and budget (RKA) for work units/branches/functions and budget management.
- Employee Management**
 - Directing and coordinating activities related to employee performance planning and evaluation, as well as employee guidance within work units/functions, including addressing employee disciplinary issues.
 - Directing and coordinating training and development needs for employees within work units/functions.
 - Organizational culture development.
- Quality Management and Procedures (SOPs)**
Directing and coordinating the preparation of socialization and monitoring the implementation of policies and procedures in work units/functions as well as overseeing and monitoring improvement and knowledge transfer activities in work units/functions.
- Health, Safety & Environment (HSE)**
Directing, implementing, monitoring, and evaluating HSE culture and programs in the department.



5. **Pengembangan Sistem *Information & Communication Technology***
Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengajuan usulan kebutuhan pengembangan layanan dan solusi ICT serta kegiatan *User Acceptance Test* (UAT).
6. **Rencana *Procurement***
Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan sesuai dengan kewenangan tertentu untuk kebutuhan unit kerja/fungsi.
7. **Pengelolaan Risiko**
Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi, mitigasi dan monitoring risiko di unit kerja/fungsi.
8. **GCG dan Tindak Lanjut Hasil Audit**
Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Assessment* GCG dan audit serta *monitoring* dan tindak lanjut hasil audit di unit kerja/fungsi.

5. **Development of Information & Communication Technology Systems**
Directing and coordinating the submission of proposals for the development of ICT services and solutions, as well as User Acceptance Testing (UAT) activities.
6. **Procurement Planning**
Directing and coordinating procurement activities within a specific scope of authority to meet the needs of work units/functions.
7. **Risk Management**
Directing and coordinating risk management, including risk identification, mitigation, and monitoring in work units/functions.
8. **GCG and Audit Follow-up**
Directing and coordinating the implementation of GCG assessments and audits, as well as monitoring and following up on audit results within work units/functions.

Program Kerja Divisi SDM dan Umum 2024

Program kerja Divisi SDM dan Umum tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program L&D terintegrasi;
2. Internalisasi Budaya;
3. Sentralisasi *Knowledge management* kepelabuhanan;
4. Sistemasi dan digitalisasi proses bisnis non petikemas;
5. Standarisasi operasional dan komersial Pelabuhan Non Petikemas;
6. Tata kelola organisasi.Tindak Lanjut *Human Capital (HC) Roadmap 2025-2029*;

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN SDM DAN UMUM 2024

Pengelolaan SDM dan Umum didasarkan pada kebutuhan organisasi Perseroan dengan senantiasa memperhatikan jumlah, kualitas, dan kualifikasi secara tepat dan memadai. Perseroan meyakini bahwa implementasi perencanaan SDM yang tepat dapat menghasilkan pegawai unggul yang bertalenta dan profesional. Hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis Perseroan dalam merealisasikan visi, misi, dan target tahunan, serta untuk mendukung keberlangsungan bisnis Perseroan di masa mendatang, sehingga Perseroan harus memastikan ketersediaan pekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Dalam menyusun perencanaan kebutuhan pekerja sesuai dengan RKAP yang telah dicanangkan di awal tahun, Perseroan melakukan koordinasi dengan Direktorat SDM PT Pelindo Multi Terminal. Hasil perencanaan SDM tersebut berupa daftar kebutuhan pekerja yang menjadi acuan pelaksanaan rekrutmen pekerja dan memudahkan proses penempatan pekerja menjadi lebih tepat.

2024 Work Program of HC and General Affairs Division

The 2024 work program for HC and General Affairs Division includes:

1. Organizing archives according to standardization and digitizing office administration technology.
2. Performance of goods and services procurement processes (SLA/SLG).
3. Improving employee competencies through training and certification.
4. Developing Innovation Governance and Innovation Awards.
5. Refreshment and Monitoring Change Catalyst Time.
6. Internalization of AKHLAK Core Values.

STRATEGIC PLAN FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND GENERAL AFFAIRS IN 2024

Human Capital and General Affairs is based on the Company's organizational needs by always paying attention to the quantity, quality, and qualifications appropriately and adequately. The Company believes that proper implementation of HC planning can produce superior, talented and professional employees. This is an inseparable part of the Company's business strategy in realizing its vision, mission, and annual targets, as well as to support the sustainability of the Company's business in the future. Therefore, the Company must ensure the availability of employees in accordance with business needs.

In preparing the planning of employee needs in accordance with the RKAP that was announced at the beginning of the year, the Company coordinated with the Directorate of Human Capital of PT Pelindo Multi Terminal. The results of HC planning are in the form of a list of manpower needs, which serve as a reference for implementing employee recruitment and facilitating a more appropriate process of employee placement.



Pengelolaan SDM dan Budaya dalam perencanaan strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Tata Kelola Inovasi dan Penghargaan Inovasi;
2. *Refreshment dan Monitoring Change Catalyst Time*;
3. Internalisasi *Core Values* AKHLAK;
4. Tindak Lanjut *Human Capital (HC) Roadmap 2025-2029*;
5. *Updating Critical Knowledge, Knowledge Toxonomy & Utilisasi Portaverse*;
6. Implementasi *Multi Terminal Academy*;
7. Program *Coaching dan Mentoring* Pekerja.

Target pengelolaan SDM dan budaya dalam rencana strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Migrasi *Single ERP SAP*;
2. Perubahan Struktur Organisasi;
3. Addendum Kontrak TAD sesuai dengan UMR Tahun 2024;
4. Pembuatan perencanaan sertifikasi tahun 2024 berdasarkan kebutuhan kompetensi;
5. Survey kebutuhan *training* eksisting;
6. Proses penyusunan program *refreshment operation* terkait *skill* teknis spesifik;
7. Proses pencarian vendor *training* sesuai kebutuhan;
8. Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi tahun 2024.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN SDM

Untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dalam organisasi, Perseroan menjalankan proses rekrutmen dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi serta keahlian calon karyawan dengan posisi yang akan diisi.

Kualitas tenaga kerja yang direkrut berperan penting dalam menentukan daya saing Perseroan. Oleh karena itu, proses seleksi dirancang agar dapat menghasilkan karyawan yang mampu memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perseroan berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kandidat untuk mengembangkan kariernya, tanpa membedakan gender, ras, suku, atau agama, serta berlandaskan pada kompetensi dan bidang keahlian masing-masing.

Program rekrutmen diselenggarakan secara menyeluruh dengan tahapan evaluasi yang ketat. Setiap kandidat akan melalui proses penilaian mendalam, mencakup pemeriksaan latar belakang, riwayat pendidikan dan pekerjaan, aktivitas di media sosial, serta kondisi kesehatan. Seleksi dilakukan secara cermat untuk memastikan kesesuaian antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan.

Perseroan menerapkan dua metode rekrutmen, yaitu jalur internal dan eksternal. Untuk jalur internal, rekrutmen dilakukan melalui mekanisme promosi serta mutasi karyawan yang telah bergabung dalam perseroan. Sedangkan metode jalur eksternal dilakukan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

HC and Culture Management strategic plan for 2025 are as follows:

1. Preparation of Innovation Governance and Innovation Awards;
2. Refreshment and Monitoring Change Catalyst Time;
3. Internalization of AKHLAK Core Values;
4. Follow-up of Human Capital (HC) Roadmap 2025-2029;
5. Updating Critical Knowledge, Knowledge Toxonomy & Portaverse Utilization;
6. Implementation of Multi Terminal Academy;
7. Employee Coaching and Mentoring Program

The targets for HC and culture management in the 2025 strategic plan are as follows:

1. Integrated Learning & Development (L&D) program;
2. Culture internalization;
3. Centralization of port knowledge management;
4. Systematization and digitization of non-container business processes;
5. Standardization of non-container port operations and commercial activities;
6. Organizational governance and follow-up on the Human Capital (HC) Roadmap 2025-2029.
7. The process of finding training vendors as needed;
8. Implementation of Training and Certification in 2024.

HC RECRUITMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

To ensure the availability of excellent and competent human capital in the organization, the Company conducts the recruitment process based on the principles of fairness and equality. The selection process considers the alignment between candidates' competencies and expertise with the positions to be filled.

The quality of recruited employees plays a crucial role in determining the Company's competitiveness. Therefore, the selection process is designed to produce employees who can provide added value and a competitive advantage for the Company. The Company is committed to providing equal opportunities for all candidates to develop their careers, regardless of gender, race, ethnicity, or religion, and solely based on their competencies and areas of expertise.

The recruitment program is conducted comprehensively with rigorous evaluation stages. Each candidate undergoes an in-depth assessment, including background checks, educational and work history reviews, social media activity screenings, and health condition evaluations. The selection process is carried out meticulously to ensure alignment between workforce requirements and candidates' competencies.

The Company applies two recruitment methods: internal and external. Internal recruitment is conducted through promotions and transfers of existing employees within the Company. Meanwhile, external recruitment method is carried out through a Fixed Term Employment Agreement (PKWT).

Proses rekrutmen dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan, di mana pada tahun 2024, Perseroan tidak melakukan rekrutmen dimana SDM yang tersedia telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menunjang kinerja Perseroan.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

IPCC sangat berkepentingan untuk menghadirkan pekerja dengan kualitas terbaik, sehingga bisa menjalankan tugas secara mumpuni. Untuk menopang kebutuhan tersebut Perseroan secara berkesinambungan melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi. Perseroan memberikan kesempatan yang sama pada setiap pekerja, mulai dari level *officer* hingga ke top level untuk dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan diri melalui program pendidikan, dan atau pelatihan dengan menganut beberapa prinsip sesuai Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017. Prinsip-prinsip yang berlaku di Perseroan adalah:

1. Terfokus berdasarkan strategi pengelolaan SDM;
2. Terencana sesuai hasil pemetaan, arah dan prioritas pengembangan;
3. Efektif dan efisien, pemilihan atau mengutamakan program pengembangan yang tepat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Direksi menetapkan proses-proses pembelajaran dan pengembangan karyawan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki tata nilai yang mampu mendukung dan menuntun proses pengambilan keputusan dalam operasi Perseroan serta mampu meningkatkan kinerja sumber daya manusia.

Perseroan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi di seluruh aspek operasional Perseroan secara terencana dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kompetensi ini diselenggarakan dengan menjunjung tinggi pemberian kesempatan yang setara sesuai dengan kode etik Perseroan.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan dengan realisasi biaya pelatihan yang ditanggung oleh Perseroan.

The recruitment process is carried out in a planned manner based on organizational needs, where in 2024, the Company did not conduct any recruitment since the existing human capital has been in accordance with their respective duties and functions to support the Company's performance.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

IPCC is highly committed to ensuring the presence of employees of the highest quality, capable of performing their duties effectively. To support this goal, the Company continuously organizes various education and training programs to develop employee competencies. The Company provides equal opportunities for all employees, from officer to top-level management, to enhance and develop their skills through education and training programs. These programs adhere to several principles outlined in Board of Directors Regulation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Number HK.56/4/5/IKT-17, dated June 15, 2017.

The principles applied within the Company include:

1. Focused on HC management strategies.
2. Planned based on mapping results, development directions, and priorities.
3. Effective and efficient, prioritizing the most appropriate development programs while considering budget availability.

Board of Directors establishes employee learning and development processes, with the aim of creating human capital with strong values and able to support and guide decision-making in company operations while enhancing overall human capital performance.

The Company organizes training and competency development across all operational aspects in a structured and continuous manner. These competency development efforts uphold the principle of equal opportunity, in alignment with the Company's code of ethics.

Throughout 2024, the Company has conducted training and development programs facilitated by both internal and external parties, in which the training costs are covered by the Company.

Level Jabatan Job Level	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pelatihan Training Material	Jumlah Peserta Number of Participants		
			L M	P F	Jumlah Amount
BOD	Workshop	Live Webinar - Selamat datang "Standarisasi Risk Maturity Index BUMN" Juknis (SK-8/DKU. MBU/12/2023) Live Webinar - Welcome to "SOE Risk Maturity Index Standardization" Technical Guidelines (SK-8/DKU. MBU/12/2023)	1	0	1
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi <i>Certified Risk Governance Professional</i> - CRGP Certification of <i>Certified Risk Governance Professional</i> - CRGP	1	0	1
	Workshop	Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 Internal Auditor Conference (KAI) 2024	1	0	1



Level Jabatan Job Level	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pelatihan Training Material	Jumlah Peserta Number of Participants		
			L M	P F	Jumlah Amount
Senior Manager	Workshop	Pelindo E-Talks Vol.7 : "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo E-Talks Vol.7: "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" with the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1	0	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Qualified Risk Governance Professional</i> <i>Professional Qualified Risk Governance Training and Certification</i>	2	0	2
	Workshop	Workshop BCM (<i>Business Continuity Management</i>) Tahun 2024 BCM (Business Continuity Management) Workshop 2024	2	0	2
	Pelatihan Training	Training <i>Quality Control Circle</i> (QCC) Quality Control Circle (QCC) Training	1	0	1
	Workshop	BSE <i>Business Essential - Innovation & Digital Disruption Stream</i>	1	0	1
	Sertifikasi Certification	<i>Chartered Accountants - Professional Level</i>	1	0	1
	Workshop	Temu Nasional X "Masyarakat ISPS Code Indonesia 2024" X National Meeting "ISPS Code Indonesia Society 2024"	1	0	1
	Pelatihan Training	Program <i>Training & Executive Development</i> 2024 - Pendampingan Persiapan <i>Assessment</i> di Lingkungan PT IKT Tbk Training & Executive Development Program 2024 - Assistance in Preparation of Assessment in PT IKT Tbk Environment	6	0	6
	Workshop	<i>Mastering The Art of Market-Friendly Investor Relations</i>	0	1	1
	Workshop	Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 Internal Auditor Conference (KAI) 2024	1	0	1
	Workshop	Pelindo E-Talks Vol.7 : "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo E-Talks Vol.7: "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" with the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	2	0	2
	Pelatihan Training	Pelatihan Awareness ISO 9001, 14001, 45001 dan 37001 ISO 9001, 14001, 45001 and 37001 Awareness Training	1	0	1
	Workshop	Workshop Evaluasi Jabatan Menggunakan Metodologi Korn Ferry Guide Chart Batch II Workshop on Job Evaluation Using Korn Ferry Guide Chart Methodology Batch II	1	0	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Qualified Risk Governance Professional</i> <i>Qualified Risk Governance Professional Training and Certification</i>	1	0	1
	Workshop	Workshop BCM (<i>Business Continuity Management</i>) Tahun 2024 BCM (Business Continuity Management) Workshop 2024	2	1	3
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi PFSO - ISPS Code PFSO Certification - ISPS Code	1	0	1
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 dan 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Internal Auditor Training ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 and 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	1	1	2
Asisten Senior Manager Assistant Senior Manager	Pelatihan Training	Training <i>Quality Control Circle</i> (QCC) Quality Control Circle (QCC) Training	1	0	1
	Sertifikasi Certification	<i>Certified Human Resources Manager</i> (CHRM)	1	0	1
	Workshop	Workshop Validasi Knowledge Taxonomy Knowledge Taxonomy Validation Workshop	1	0	1
	Workshop	<i>Supply Chain Day "The Future of Supply Chain: Challenges & Innovations"</i>	1	0	1
	Pelatihan Training	<i>Change Agent on Boarding</i> Batch 5 & 6	6	3	9
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) dan Pelatihan Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) Pension Fund General Management Training and Certification (MUDP) and Pension Fund Risk Management Training (MRDP)	2	0	2
	Pelatihan Training	Program <i>Training & Executive Development</i> 2024 - Pendampingan Persiapan <i>Assessment</i> di Lingkungan PT IKT Tbk Training & Executive Development Program 2024 - Assistance in Preparation of Assessments in PT IKT Tbk Environment	9	5	14
	Pelatihan Training	Pelatihan <i>Risk Assessment Techniques For Risk Agent</i> Risk Assessment Techniques Training for Risk Agent	3	5	8
	Pelatihan Training	Pelatihan <i>Knowledge Mapping and Knowledge Asset Implementation</i> 2024 IPCC Knowledge Mapping and Knowledge Asset Implementation Training 2024 IPCC	8	2	10
	Workshop	<i>Mastering The Art of Market-Friendly Investor Relations</i>	1	1	2



Level Jabatan Job Level	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pelatihan Training Material	Jumlah Peserta Number of Participants		
			L M	P F	Jumlah Amount
Staf	Workshop	Pelindo E-Talks Vol.7 : "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo E-Talks Vol.7: "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" with the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	4	5	9
	Pelatihan Training	Pelatihan Awareness ISO 9001, 14001, 45001 dan 37001 ISO 9001, 14001, 45001 and 37001 Awareness Training	5	7	12
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Pelatihan Sertifikasi (<i>Refreshment</i>) BNSP SDM Level Supervisor BNSP HR Supervisor Level Certification Training (<i>Refreshment</i>)	0	1	1
	Workshop	Workshop BCM (<i>Business Continuity Management</i>) Tahun 2024 BCM (<i>Business Continuity Management</i>) Workshop 2024	5	6	11
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi PFSO - ISPS Code PFSO - ISPS Code Certification	0	1	1
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 dan 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Internal Auditor Training ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 and 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	5	5	10
	Pelatihan Training	Training Quality Control Circle (QCC) Quality Control Circle (QCC) Trainin	4	2	6
	Pelatihan Training	Asistensi/Pelatihan Relawan Anti Narkotika Anti-Narcotics Volunteer Assistance/Training	0	1	1
	Workshop	Workshop Validasi Knowledge Taxonomy Knowledge Taxonomy Validation Workshop	7	7	14
	Pelatihan Training	Pelatihan Praktik Keinsinyuran, Komersialisasi dan Regulasi untuk Perencanaan Pelabuhan dan Terminal Engineering Practices, Commercialization and Regulation Training for Port and Terminal Planning	0	1	1
	Pelatihan Training	Supply Chain Day "The Future of Supply Chain: Challenges & Innovations"	0	1	1
	Pelatihan Training	Change Agent on Boarding Batch 5 & 6	4	0	4
	Pelatihan Training	Change Agent on Boarding Batch 13 dan 14	5	0	5
	Pelatihan Training	Program Training & Executive Development 2024 - Pendampingan Persiapan Assessment di Lingkungan PT IKT Tbk Training & Executive Development Program 2024 - Assessment Preparation Assistance in PT IKT Tbk	2	0	2
	Pelatihan Training	Pelatihan Risk Assessment Techniques For Risk Agent Risk Assessment Techniques For Risk Agent Training	3	1	4
	Pelatihan Training	Pelatihan Knowledge Mapping and Knowledge Asset Implementation 2024 IPCC Knowledge Mapping and Knowledge Asset Implementation Training 2024 IPCC	6	0	6
	Workshop	Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 Internal Auditor Conference (KAI) 2024	1	0	1
	Workshop	Pelindo E-Talks Vol.7 : "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo E-Talks Vol.7: "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" with the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	2	0	2
	Pelatihan Training	Pelatihan Awareness ISO 9001, 14001, 45001 dan 37001 ISO 9001, 14001, 45001 and 37001 Awareness Training	6	0	6
		Sertifikasi PFSO - ISPS Code PFSO - ISPS Code Certification	1	0	1
	Workshop	Workshop BCM (<i>Business Continuity Management</i>) Tahun 2024 BCM (<i>Business Continuity Management</i>) Workshop 2024	3	0	3
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 dan 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Internal Auditor Training ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 and 37001:2016 PT Indonesia Vehicle Terminal Tbk	5	0	5
	Pelatihan Training	Training Quality Control Circle (QCC) Quality Control Circle (QCC) Training	7	1	8
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi K3 Operator Car Handling dan Operator Alat Berat di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk OHS Certification for Car Handling Operators and Heavy Equipment Operators in PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	8	0	8
	Workshop	Workshop Validasi Knowledge Taxonomy Knowledge Taxonomy Validation Workshop	11	1	12



Level Jabatan Job Level	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pelatihan Training Material	Jumlah Peserta Number of Participants		
			L M	P F	Jumlah Amount
Workshop		Awareness ISO 9001, 14001, 45001 dan 37001, Satelit IPCC Awareness ISO 9001, 14001, 45001 and 37001, IPCC Satellite	14	0	14
Pelatihan Training		Training Effective Supervisory in Digital Era Training on Effective Supervisory in Digital Era	23	0	23

Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Cost

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference (Rp)	Persentase Percentage (%)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	1.156.584.152	986.876.042	169.708.110	17,20%

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIER

Pengembangan karier adalah proses perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman, dan jenjang karier karyawan agar mereka dapat mencapai potensi maksimalnya di dalam organisasi.

Kebijakan pengembangan karier yang baik tidak hanya memberikan kejelasan jenjang karier, tetapi juga meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan.

1. Tujuan Kebijakan Pengembangan Karier
 - Meningkatkan Kompetensi Karyawan → Agar karyawan selalu relevan dengan kebutuhan bisnis.
 - Membangun Loyalitas dan Motivasi → Memberikan kesempatan pertumbuhan akan meningkatkan keterlibatan karyawan.
 - Memastikan Kesiapan Suksesi (*Succession Planning*) → Mengisi posisi kunci dengan talenta internal.
 - Menyesuaikan Kebutuhan Bisnis dan Talenta → Agar organisasi lebih agile dan kompetitif.
2. Kebijakan Pengembangan Karier yang Efektif
Agar kebijakan pengembangan karier berjalan efektif, perlu diterapkan prinsip-prinsip berikut:
 - Kesempatan Karier yang Transparan → Perseroan harus memiliki sistem yang jelas tentang promosi, rotasi, dan pengembangan.
 - Kombinasi Pengalaman dan Pelatihan → Karier tidak hanya berkembang melalui pelatihan formal tetapi juga dari pengalaman kerja langsung.
 - Karyawan Sebagai Pemilik Kariernya → Perseroan memfasilitasi, tetapi karyawan juga harus proaktif dalam mengembangkan diri.
 - Fokus pada Kebutuhan Organisasi dan Individu → Menyesuaikan pengembangan karier dengan strategi bisnis.
 - Evaluasi dan Penyesuaian Berkala → Program pengembangan karier harus selalu dievaluasi agar tetap relevan.

CAREER DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

Career development is the process of planning and implementing programs to enhance employees' skills, experience, and career progression, enabling them to reach their maximum potential within the organization.

A well-structured career development policy not only provides clarity on career paths but also boosts employee motivation, productivity, and retention.

1. Objectives of Career Development Policy
 - Enhancing Employee Competency → Ensuring employees remain relevant to business needs.
 - Building Loyalty and Motivation → Providing growth opportunities to increase employee engagement.
 - Ensuring Succession Planning → Filling key positions with internal talent.
 - Aligning Business and Talent Needs → Making the organization more agile and competitive.
2. Effective Career Development Policy
To ensure the effectiveness of career development policies, the following principles must be applied:
 - Transparent Career Opportunities → The Company must have a clear system for promotions, rotations, and development.
 - Combination of Experience and Training → Career growth comes not only from formal training but also from hands-on work experience.
 - Employees as Owners of Their Careers → The Company facilitates development, but employees must proactively enhance their skills.
 - Focus on Both Organizational and Individual Needs → Aligning career development with business strategy.
 - Regular Evaluation and Adjustments → Career development programs should be continuously evaluated to remain relevant.

3. Strategi dan Pelaksanaan Pengembangan Karier

- a. *Career Path & Career Ladder* (Jenjang Karier yang Jelas)
Menetapkan jalur karier yang bisa ditempuh karyawan berdasarkan kompetensi dan pengalaman.
 - i) *Career Ladder* → Jenjang vertikal (misalnya dari Junior Staff > Senior Staff > Supervisor → Manager).
 - ii) *Career Lattice* → Perpindahan ke posisi lain yang setara untuk memperluas pengalaman sebelum promosi.
 - iii) *Succession Planning* → Menyiapkan talenta untuk menggantikan posisi strategis dalam organisasi.
- b. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan (*Learning & Development*)
Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar siap untuk jenjang karier berikutnya.
 - i) *On-the-Job Training* → Pembelajaran langsung di tempat kerja.
 - ii) *Training & Certification Program* → Pelatihan formal, seminar, atau sertifikasi profesional.
 - iii) *E-Learning & Self-Development* → Karyawan diberi akses ke kursus online.
 - iv) *Cross-Functional Training* → Pelatihan di berbagai departemen untuk meningkatkan fleksibilitas.
- c. Program *Coaching & Mentoring*
Membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karier dengan bimbingan langsung.
 - i) *Coaching* → Pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung atau profesional eksternal.
 - ii) *Mentoring* → Pendampingan oleh senior atau manajer yang lebih berpengalaman
 - iii) *Reverse Mentoring* → Senior belajar dari junior, terutama dalam bidang teknologi dan inovasi.
- d. *Job Rotation & Stretch Assignment*
Memberikan tantangan baru dengan perpindahan tugas atau tanggung jawab tambahan.
 - i) *Job Rotation* → Pemindahan ke unit kerja lain untuk memperkaya pengalaman.
 - ii) *Stretch Assignment* → Menugaskan proyek baru yang menantang untuk meningkatkan keterampilan.
 - iii) *Secondment Program* → Menugaskan karyawan di anak perusahaan atau proyek lintas fungsi.
- e. Sistem Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*)
 - i) Evaluasi kinerja secara berkala untuk menentukan kesiapan promosi atau pengembangan lebih lanjut.
 - ii) *360-Degree Feedback* → Evaluasi dari atasan, rekan kerja, bawahan
 - iii) *Individual Development Plan (IDP)* → Rencana pengembangan berbasis hasil evaluasi kinerja.
 - iv) *Performance Review Meeting* → Diskusi berkala antara karyawan dan manajer terkait progres karier.

3. Career Development Strategies and Implementation

- a. *Career Path & Career Ladder* (Clear Career Progression)
Establish career paths that employees can take based on competency and experience.
 - i) *Career Ladder* → Vertical progression (e.g., Junior Staff > Senior Staff > Supervisor > Manager).
 - ii) *Career Lattice* → Lateral moves to equivalent positions to broaden experience before promotion.
 - iii) *Succession Planning* → Preparing talent to take on strategic roles within the organization.
- b. Employee Learning & Development
Enhancing employees' skills and knowledge to prepare them for the next level in their careers.
 - i) *On-the-Job Training* → Learning directly in the workplace.
 - ii) *Training & Certification Programs* → Formal training, seminars, or professional certifications.
 - iii) *E-Learning & Self-Development* → Employees have access to online courses.
 - iv) *Cross-Functional Training* → Training in different departments to increase flexibility.
- c. Coaching & Mentoring Program
Helping employees plan and develop their careers with direct guidance.
 - i) *Coaching* → Guidance from direct supervisors or external professionals.
 - ii) *Mentoring* → Support from senior employees or managers with more experience.
 - iii) *Reverse Mentoring* → Senior employees learning from junior employees, especially in technology and innovation.
- d. *Job Rotation & Stretch Assignment*
Providing new challenges through task reassignment or additional responsibilities.
 - i) *Job Rotation* → Moving employees to different units to enrich their experience.
 - ii) *Stretch Assignment* → Assigning challenging new projects to enhance skills.
 - iii) *Secondment Program* → Assigning employees to subsidiaries or cross-functional projects.
- e. Performance Appraisal System
 - i) Regular performance evaluations to assess promotion readiness or further development.
 - ii) *360-Degree Feedback* → Evaluations from supervisors, peers, and subordinates.
 - iii) *Individual Development Plan (IDP)* → Development plan based on performance evaluations.
 - iv) *Performance Review Meetings* → Periodic discussions between employees and managers regarding career progress.



SISTEM MANAJEMEN KINERJA KARYAWAN

Sistem Manajemen Kinerja adalah proses strategis yang digunakan organisasi untuk menetapkan, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan bahwa strategi organisasi diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang dapat diukur dan dikelola dengan baik.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN PEMBERIAN MANFAAT BAGI KARYAWAN

Menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mengelola karyawan sebagai mitra penting bagi Perseroan, maka seluruh jajaran manajemen senantiasa mematuhi perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang mengatur tentang tenaga kerja terutama dalam hal ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) yang berlaku di wilayah masing-masing unit kerja Perseroan.

Perseroan juga menetapkan kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas bagi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas setiap karyawan, seperti:

- Gaji Merit;
- Tunjangan Perumahan;
- Tunjangan Transport;
- Tunjangan Jabatan;
- Insentif Performansi;
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus Tahunan;
- Pelayanan Kesehatan;
- *Employee Gathering*.

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Perseroan melakukan penilaian secara berkala kepada karyawan dalam rangka menggali potensi dan talenta karyawan yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan pengembangan dan pengisian kebutuhan organisasi Perseroan. Penilaian kinerja karyawan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. KPI membantu perusahaan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek seperti keuangan, operasional, SDM, dan inovasi.

EMPLOYEE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

Performance Management System is a strategic process that is used by an organization to determine, monitor, evaluate, and improve the performance of individuals, teams, and the company as a whole. The main purpose of this system is to ensure that the organization's strategy is translated into concrete actions that can be measured and managed well.

REMUNERATION AND BENEFITS POLICY FOR EMPLOYEES

Determining the right and balanced proportion between fixed remuneration components and performance-based components, as well as between direct and deferred remuneration. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of the corporation's long-term performance. Remuneration incentives are aligned with the company's risk policy.

As part of the Company's commitment to managing employees as key partners for the Company, all levels of management consistently comply with applicable laws and regulations governing labor, particularly regarding the Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K) applicable in each of the company's operational units.

The Company also determines welfare program compensation and facilities for employees to improve the welfare and productivity of each employee, such as:

- Merit Salary;
- Housing Allowance;
- Transport Allowance;
- Position Allowances;
- Performance Incentives;
- Holiday allowance;
- Annual bonus;
- Health Service;
- Employee Gatherings.

EMPLOYEE PERFORMANCE APPRAISAL

The Company conducts periodic employee's appraisal in order to explore employee potential and talent, with the results serving as a basis for determining employee development and filling of the Company's organizational needs. Employee performance is evaluated using Key Performance Indicators (KPI), which are metrics used to measure the performance of individuals, teams, or the organization in achieving specific goals. KPIs assist the Company in monitoring, evaluating, and improving performance across various aspects, including finance, operations, human capital, and innovation.



KEBIJAKAN REWARD DAN PUNISHMENT

Pemberlakuan *Reward* dan *Punishment* bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. *Reward* diberikan untuk memotivasi pekerja dalam mencapai target kinerja secara optimal sehingga mendukung pencapaian sasaran Perseroan.

Perseroan memberikan *reward*, baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan. Insentif performansi adalah salah satu bentuk *reward* yang diberikan Perseroan kepada pekerja berdasarkan hasil Penilaian Performansi Bulanan dan pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI) yang dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori dengan persentase kelas jabatan. Perseroan juga memberikan apresiasi bagi pekerja yang berkinerja istimewa berupa sertifikat dan paket ibadah umrah atau sejenisnya.

Sementara itu, *punishment* diterapkan Perseroan guna mencegah segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja sehingga hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas kerja dapat dihindari.

Perseroan memberikan *punishment* sesuai tingkat dan jenis sanksi yang berlaku, yang meliputi teguran, surat peringatan, dan sanksi lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Fasilitas dan kesejahteraan karyawan adalah serangkaian manfaat, kompensasi, dan lingkungan kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan kepuasan, kesehatan, dan produktivitas mereka. Program ini sangat penting untuk menjaga motivasi, meningkatkan retensi, serta menciptakan budaya kerja yang positif dan kompetitif.

Fasilitas dan kesejahteraan karyawan adalah elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan, produktivitas, serta retensi karyawan. Perseroan yang menyediakan fasilitas dan kesejahteraan yang baik akan memiliki tenaga kerja yang lebih loyal, termotivasi, dan berkinerja tinggi.

1. Jenis-Jenis Fasilitas Karyawan
 - a. Fasilitas Fisik di Tempat Kerja
 - b. Fasilitas Digital & Teknologi
 - c. Fasilitas Fleksibilitas Kerja yang diterapkan secara parsial dan momen tertentu
2. Program Kesejahteraan Karyawan (*Employee Well-being Program*)
 - a. Kesejahteraan Finansial
 - i) Program yang membantu stabilitas keuangan karyawan
 - ii) Gaji yang Kompetitif → Sesuai dengan standar industri dan jabatan
 - iii) Bonus dan Insentif Kinerja → Berdasarkan pencapaian target individu/tim

REWARD AND PUNISHMENT POLICY

The implementation of Reward and Punishment aims to improve the performance of each employee. Rewards are given to motivate employees to achieve optimal performance targets so as to support the achievement of the Company's targets.

The Company provides reward, both financial and non-financial, which is adjusted to the Company's capabilities. Performance incentives are a form of reward given by the Company to employees based on the results of the Monthly Performance Appraisal and achievement of Key Performance Indicator (KPI) targets which are grouped into 5 (five) categories with percentage of job class. The Company also provides appreciation for employees with exceptional performance in the form of certificates and Umrah packages or similar.

Meanwhile, punishment is applied by the Company to prevent all forms of violations committed by employees, hence the problems that can hinder or disrupt the smooth running of work activities can be avoided.

The Company provides punishment according to the level and type of sanctions applicable, which includes reprimands, warning letters and other sanctions adjusted to the level of violation.

EMPLOYEE FACILITIES AND WELFARE

Employee facilities and welfare are a series of benefits, compensation, and workplace environments provided by the Company to enhance employee satisfaction, health, and productivity. These programs is very important in maintaining motivation, increasing retention, and fostering a positive and competitive work culture.

Employee facilities and welfare are essential elements of human capital management aimed at improving employee satisfaction, productivity, and retention. Companies that offer excellent facilities and welfare programs tend to have a more loyal, motivated, and high-performing employees.

1. Types of Employee Facilities
 - a. Physical Workplace Facilities
 - b. Digital & Technology Facilities
 - c. Work Flexibility Facilities that are applied partially and on specific occasions
2. Employee Well-being Programs
 - a. Financial Well-being
 - i) Programs that support employees' financial stability
 - ii) Competitive Salary → In line with industry standards and job positions
 - iii) Bonuses and Performance Incentives → Based on individual/team achievements



- iv) Tunjangan Hari Raya (THR) → Khususnya di negara dengan kebijakan THR
- v) Program Dana Pensiun → Jaminan keuangan untuk karyawan setelah pensiun
- b. Kesejahteraan Kesehatan
 - i) Asuransi Kesehatan → Untuk karyawan dan keluarganya.
 - ii) *Medical Check-Up* Rutin → Pemeriksaan kesehatan berkala.
 - iii) Program Kesehatan (*Wellness Program*) → Yoga, gym, dan kampanye gaya hidup sehat.
- c. Kesejahteraan Pengembangan Karier
 - i) Pelatihan & Sertifikasi → Mendukung pengembangan kompetensi dan keterampilan.
 - ii) Beasiswa & Program Pendidikan → Bantuan untuk studi lanjutan atau kursus profesional.
 - iii) *Coaching & Mentoring* → Dukungan dari atasan atau mentor dalam pengembangan karier.
 - iv) Promosi & *Career Path* yang Jelas → Struktur jenjang karier yang transparan dan adil.

- iv) Religious Holiday Allowance (THR) → especially in countries with THR policies
- v) Pension Fund Programs → Financial security for employees after retirement
- b. Health & Wellness Well-being
 - i) Health Insurance → Coverage for employees and their families
 - ii) Regular Medical Check-Ups → Periodic health screenings
 - iii) Wellness Programs → Yoga, gym access, and healthy lifestyle campaigns
- c. Career Development Well-being
 - i) Training & Certification → Supporting skill and competency development
 - ii) Scholarships & Education Programs → Assistance for further studies or professional courses
 - iii) Coaching & Mentoring → Support from supervisors or mentors for career growth
 - iv) Promotion & Clear Career Path → A transparent and fair career progression structure

TURNOVER KARYAWAN

Sebagai upaya memperoleh SDM berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja agar semakin optimal, Perseroan menyelenggarakan proses rekrutmen sebagai tindak lanjut pemenuhan sumber daya di beberapa posisi serta adanya perputaran karyawan yang disebabkan masuknya masa pensiun, mengundurkan diri, maupun penambahan personel dalam rangka menciptakan komposisi pegawai yang proposional.

Hingga akhir 2024, terdapat pengurangan karyawan dengan uraian sebagai berikut:

Perihal About	2024 (orang) (people)	2023 (orang) (people)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage (%)
Jumlah Karyawan yang Masuk Number of New Employees	8	14	(6)	-42,86%

EMPLOYEE TURNOVER

In an effort to obtain high-quality Human Capital to support optimal performance achievement, the Company carries out a recruitment process as a follow-up to the fulfilment of resources in several positions as well as employee turnover due to retirement, resignation or additional personnel in order to create a proportional employee composition.

Until the end of 2024, there were reductions in employees with the following description:

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage (%)	Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage (%)	Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage (%)
Mengundurkan diri Resign	-	-	-	-	-	-
Pensiun Retire	2	8,70%	1	5,00%	1	100%
Meninggal Dunia Passed Away	1	4,35%	-	-	1	100%
Habis Masa Kontrak End of Contract	-	-	-	-	-	-
Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	1	4,35%	-	-	1	100%

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage (%)	Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage (%)	Jumlah (orang) Total (people)	Persentase Percentage (%)
Pindah ke Cabang/Unit Lain Transfer to Other Branch/Unit	11	47,83%	5	25,00%	6	120%
Pindah dari cabang/unit lain Transfer from Other Branch/Unit	8	34,78%	14	70,00%	(6)	-43%
Jumlah Total	23	100,00%	20	100,00%	3	15,00%

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan membangun hubungan industrial dengan menjamin keberadaan serikat pekerja (SP) di lingkungan kerja Perseroan sebagai bagian dari hak berserikat karyawan. Serikat pekerja di lingkungan Perseroan bernama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu dan telah dan telah tercatat pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 9998 /-1;831 tanggal 6 Oktober 2021.

Perseroan mendukung aktivitas Serikat Pekerja. Hubungan yang harmonis dan konstruktif yang saling menghormati tersebut dimanifestasikan dalam bentuk butir-butir kesepakatan dan aturan sebagaimana tercantum pada Nomor KP.08.03/10/11/2/ HBUP/UTMA/PLND-23 dan Nomor 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023, yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala serta ditandatangani oleh Manajemen dan Serikat Pekerja.

Perseroan mendayagunakan hubungan konstruktif dengan Serikat Pekerja dengan menyelenggarakan pertemuan berkala guna mensosialisasikan kebijakan dan program Manajemen serta untuk penyelesaian permasalahan hubungan industrial maupun penyelesaian keluhan karyawan.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENSIUN

Perseroan dalam menjalankan kebijakan terkait dengan kesejahteraan pasca kerja untuk sementara waktu memberlakukan kebijakan-kebijakan yang berlaku sebelumnya pada PT Pelindo I, II, III, IV sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021.

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDISIF

Perseroan dalam menciptakan hubungan kerja yang kondusif dengan menggunakan metode *coaching* dan *mentoring* yang efektif serta menyelenggarakan pertemuan secara berkala guna mensosialisasikan kebijakan dan program Manajemen untuk penyelesaian permasalahan di lingkungan IPCC.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Company builds industrial relations by guaranteeing the existence of Workers Union (SP) in the Company's work environment as part of employee association rights. The workers union within the Company is called Indonesia Port Workers Union (SPPI) and has been registered with the Department of Manpower and Transmigration based on Decree of the Minister of Manpower No. 2410/III/SP/X/2021 date October 06, 2021.

The Company supports the activities of its Workers Union. This harmonious and constructive relationship that respects each other is manifested in the form of points of agreement and rules as stated in Number KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 and Number 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023, which is reviewed and updated periodically and signed by Management and the Workers Union.

The Company utilizes constructive relationships with the Workers Union by holding regular meetings to socialize Management policies and programs as well as to resolve industrial relations problems and resolve employee complaints.

RETIREMENT POLICY AND PROGRAMS

The Company's policies related to post-employment welfare temporarily adheres to the previously established policies of PT Pelindo I, II, III, and IV in accordance with the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21, dated October 15, 2021.

ESTABLISHMENT OF A CONDUCTIVE WORK ENVIRONMENT

The Company creates a conducive work environment by using effective coaching and mentoring methods and holding regular meetings to socialize management policies and programs to resolve issues within IPCC environment.



SURVEI KETERIKATAN/ KEPUASAN PEGAWAI

Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan survei kepuasan pegawai untuk mengukur tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai terhadap Perseroan. Tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai merujuk pada sikap umum seorang pegawai terhadap pekerjaan dan Perseroan. Tingkat kepuasan dan keterikatan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan dan keterikatan pegawai menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap pekerjaannya.

Melalui survei ini, pekerja mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai kondisi atau faktor-faktor yang berhubungan dengan mereka. Survei kemudian digunakan Perseroan sebagai media komunikasi dari pekerja ke Manajemen Perseroan.

Namun demikian, pada tahun 2024, Perseroan tidak menyelenggarakan survei kepuasan dan keterikatan pegawai. Hal ini disebabkan oleh adanya fokus internal pada penguatan budaya kerja.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2025

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global tahun 2025, di mana kondisi geopolitik internasional mempengaruhi kinerja Perseroan, penyiapan SDM melalui peningkatan kompetensi teknik spesifik melalui berbagai program pilihan dengan menyesuaikan bidang usaha perusahaan serta melakukan sertifikasi keahlian bagi bidang-bidang bisnis yang memerlukan keahlian khusus dengan menggandeng lembaga keahlian yang kredibel.

Sebagai langkah aktif Perseroan di tahun 2025, telah disusun rencana guna memenuhi kinerja perusahaan baik disisi operasional maupun komersial seperti: pembuatan perencanaan sertifikasi tahun 2025 berdasarkan kebutuhan kompetensi, melakukan survey dan evaluasi kebutuhan pelatihan, *refreshment* tenaga operasional yang membutuhkan keahlian tertentu, verifikasi lembaga pelatihan yang kredibel serta *mapping* waktu pelaksanaan pelatihan dengan mengoptimalkan jam kerja.

EMPLOYEE ENGAGEMENT/ SATISFACTION SURVEY

In 2024, the Company conducted an employee satisfaction survey to measure the level of employee satisfaction and engagement with the Company. The level of employee satisfaction and engagement refer to an employee's general attitude toward their job and the Company. A high level of satisfaction and engagement reflects a positive attitude toward the job, whereas employee dissatisfaction and engagement indicate a counterproductive attitude toward their work.

Through this survey, employees had the opportunity to express their opinions regarding conditions or factors related to them. The survey is then used by the Company as a media communication from workers to the Company's Management.

However, in 2024, the Company did not conduct an employee satisfaction and engagement survey. This was due to an internal focus on strengthening the work culture.

HC DEVELOPMENT PLAN IN 2025

In facing the dynamics of the global economy in 2025, in which the international geo-political conditions can affect the Company's performance, it is necessary to prepare human capital through increasing specific technical competencies through various selected programs by adapting the Company's business fields as well as carrying out expertise certification for business fields that require special skills by collaborating with credible expertise institution.

As an active measure for the Company in 2025, an action plan has been prepared to meet the Company's performance both on in terms of operational and commercial, such as: preparing certification plan for 2025 based on competency needs, conducting surveys and evaluating training needs, refreshing operational employees who require certain skills, verifying training institutions which is credible as well as mapping the training implementation time by optimizing working hours.



TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

Sebagai perwujudan Visi dan Misi Perseroan maka teknologi informasi dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi kegiatan operasi terminal kendaraan pelabuhan yang berstandar internasional. Teknologi informasi Perseroan diarahkan untuk menjadi tulang punggung operasi terminal kendaraan pelabuhan yang terkoneksi dengan dunia internasional.

Karena itu, Direksi menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif serta menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala, master plan teknologi informasi yang berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mencapai tujuan Perseroan.

Sistem teknologi informasi di lingkup Perseroan juga didukung dengan SDM yang mumpuni dan unggul yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan sistem tersebut.

Adapun visi dan misi Perseroan dalam pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja dan perkembangan Perseroan adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

As an embodiment of the Company's Vision and Mission, information technology is developed with the aim of improving service quality and efficiency of international-standard vehicle terminal operations at the port. The Company's information technology is designed to serve as the backbone of port vehicle terminal operations that are connected to the international network.

Therefore, the Board of Directors has established effective information technology governance and regularly evaluates and updates the information technology master plan, which serves as a guideline for the utilization and development of information technology to achieve the Company's goals.

The Company's information technology system is also supported by highly competent and skilled human capital who play crucial role in monitoring and controlling the system.

The Company's vision and mission regarding the utilization of information technology systems to support its performance and growth are outlined as follows.

VISI TI

IT VISION

Tersedianya ekosistem layanan bisnis dan operasional Car Terminal kelas dunia dengan fondasi Teknologi Informasi yang terintegrasi, adaptif serta *agile* mengikuti perkembangan dan kebutuhan bisnis serta *trend* teknologi.
Availability of a world-class Car Terminal business and operational services ecosystem with an integrated, adaptive and agile Information Technology foundation following developments and business needs and technological trends.

MISI TI

IT MISSION

- Mendukung transformasi dan terwujudnya ekosistem Car Terminal dengan implementasi program digitalisasi system.
- Melakukan pengembangan dan penerapan integrasi layanan- layanan IT untuk ekosistem Car Terminal.
- Peningkatan dan pemenuhan Human Capital IT yang memiliki kompetensi untuk mengikuti perkembangan bisnis dan kebutuhan bisnis berbasis teknologi informasi.
- Supporting the transformation and realization of the Car Terminal ecosystem by implementing a system digitalization program.
- Develop and implement integrated IT services for the Car Terminal ecosystem.
- Increasing and fulfilling IT Human Capital which has the competence to keep up with business developments and information technology-based business needs.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk menciptakan nilai tambah, IPCC telah mengembangkan teknologi yang tepat guna mempercepat akselerasi bisnis melalui pendekatan serta kebijakan strategis di bidang teknologi informasi. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dirancang agar sejalan dengan strategi korporasi Pelindo, *Sub-Holding* SPMT, serta IPCC sebagai operator Terminal Kendaraan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi proses bisnis, sekaligus menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen.

INFORMATION TECHNOLOGY

POLICY AND GOVERNANCE

To create added value, IPCC has developed appropriate technology to accelerate business with strategic approaches and policies in information technology sector. The information technology development and implementation are designed to be in line with the corporate strategy of Pelindo, Sub-Holding SPMT, and IPCC as the operator of the Vehicle Terminal. This aims to improve the quality and efficiency of business processes, while providing information that supports management decision making.



Dalam implementasinya, pengembangan teknologi informasi di IPCC berpedoman pada Dokumen IT *Master Plan* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk untuk periode 2020–2024.

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sistem TI di lingkup Perseroan, dikelola oleh Divisi Teknik dan Sistem Informasi yang berada di bawah naungan Direktorat Operasi dan Teknik, yang bertanggung jawab terhadap segala proses pengelolaan dan pengembangan TI Perseroan.

In its implementation, the development of information technology at IPCC is guided by the IT Master Plan Document of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk for the period of 2020–2024.

UNIT IN CHARGE FOR INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

The IT system within the Company is managed by the Engineering and Information Systems Division under the auspices of the Directorate of Operations and Technical, which is responsible for the entire IT management and development processes in the Company.

Struktur Organisasi Pengelola Sistem Teknologi Informasi IPCC per 31 Desember 2024
 Organizational Structure of IPCC Information Technology System Management as of December 31, 2024



Peran tugas dan tanggung jawab Sub Divisi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis dan operasional sistem informasi yang meliputi program perencanaan dan penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi.
2. Pengembangan sistem dan implementasi solusi teknologi informasi meliputi pengelolaan proyek sistem informasi, pengembangan sistem, serta pengujian dan validasi sistem.
3. Dukungan layanan Sistem Informasi yang berkualitas dan layanan yang memadai kepada pengguna meliputi layanan monitoring operasional TI, dukungan keamanan sistem, dan layanan kontinuitas bisnis.

The roles and responsibilities of the Information Systems Sub Division are as follows:

1. Strategic and operational planning of information systems which includes planning programs and optimal use of information technology resources.
2. System development and implementation of information technology solutions including information system project management, system development, and system testing and validation.
3. Quality Information System service support and adequate services to users including IT operational monitoring services, system security support and business continuity services.

TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI IPCC

Teknologi informasi telah menjadi bagian penting di dalam kelancaran kegiatan bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Strategi pengembangan dan implementasi teknologi informasi harus selaras dan mendukung strategi korporasi Pelindo, Sub Holding SPMT dan IPCC sebagai operator untuk Terminal Kendaraan agar dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas dan efisiensi proses bisnis serta dapat

IPCC INFORMATION TECHNOLOGY TRANSFORMATION

Information technology has become an important part in ensuring the smooth operation of business activities of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk or IPCC. The strategy for developing and implementing information technology must be aligned with and support the corporate strategies of Pelindo, Sub-holding SPMT, and IPCC as the operator for the Vehicle Terminal in order to improve the quality and efficiency of business processes, as well

memberikan dukungan informasi kepada manajemen perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan.

as to provide informational support to company management in decision-making.

Berikut standarisasi program transformasi pada 5 (lima) elemen untuk transformasi holistik:

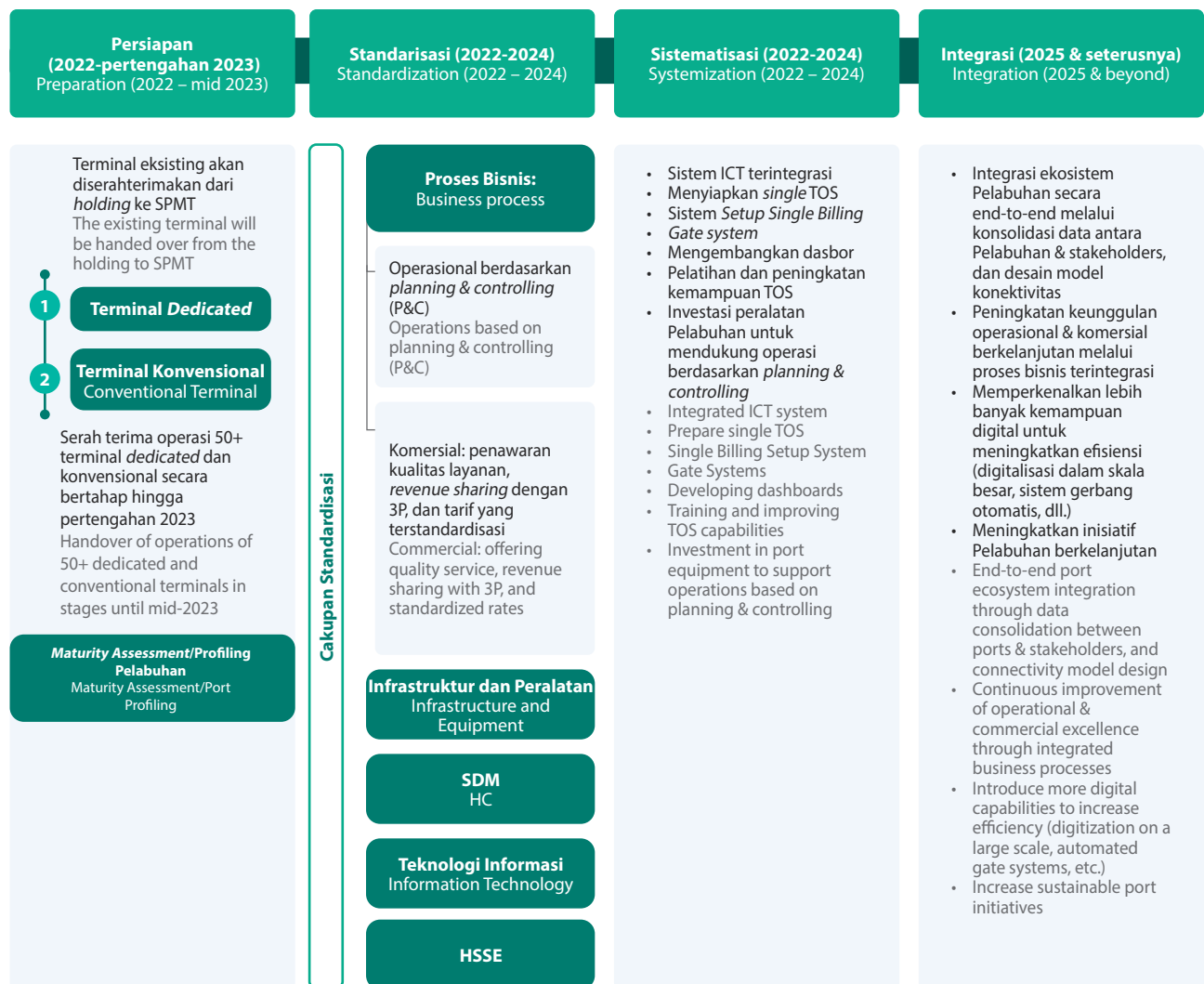
The following is the standardization of transformation program on 5 (five) elements for holistic transformation:

Proses Bisnis Business process	Infrastruktur & Peralatan Infrastructure & Equipment	Sumber Daya Resource	Teknologi Informasi Technology Information	HSSE HSSE
Standardisasi proses bisnis Standardization of business processes Berdasarkan P&C untuk meningkatkan kinerja operasional Standardisasi komersial Based on P&C to improve operational performance Commercial standardization	Standardisasi infrastruktur, sarana dan peralatan Standardization of infrastructure, facilities and equipment Untuk mengakomodasi atau pelanggan atau komoditas yang ditargetkan To accommodate or target customers or commodities	Mengembangkan skills dan kompetensi dalam organisasi untuk menyelaraskan dengan standar industri serta mendukung organisasi berbasis P&C Develop skills and competencies within the organization to align with industry standards and support P&C-based organizations	Standardisasi teknologi informasi untuk mendukung arus informasi & operasi Standardisation of information technology to support the flow of information & operations	Membangun budaya kesehatan dan keselamatan di terminal melalui standarisasi praktik keselamatan Building a culture of health and safety in the terminal through standardizing safety practices
Implementasi Planning & Control Implementation of Planning & Controlling di seluruh proses bisnis: 1. Flow bongkar-muat yang terstandar untuk kecepatan 2. Kinerja operasional 3. Yard preferred area 4. Deployment of equipment 5. Rostering dan deployment tenaga kerja 6. Control untuk memastikan target kinerja tercapai operasional Standardisasi komersial Across business processes: 1. Standardized loading and unloading flow for speed 2. Operational performance 3. Yard preferred area 4. Deployment of equipment 5. Rostering and deployment of workforce 6. Control to ensure performance targets are achieved	Infrastruktur Infrastructure Yang andal dengan desain dan tata letak yang dioptimalkan berdasarkan model operasi standar (misalnya kedalaman draf, ketersediaan penyimpanan) Reliable infrastructure with optimized design and layout based on standard operating models (e.g. draft depth, storage availability)	Pelatihan khusus/ bersertifikat dan essential skills Special/certified training and essential skills Pelatihan Advanced Knowledge Advanced Knowledge Traini	Sistem Sistem Untuk memfasilitasi kelancaran pertukaran informasi To facilitate the smooth exchange of information	Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protective Equipment (PPE) Terminal steril dengan sistem keamanan modern Sterile terminal with modern security system
Komersial: Commercial: Standardisasi penawaran kualitas layanan, tarif, Kerjasama dengan PBM luar Pelindo untuk single billing dan agreement fee/revenue sharing Standardisation of offerings service quality, tariffs, Cooperation with PBM outside Pelindo for single billing and agreement fee/revenue sharing agreement	Peralatan Pelabuhan Port Equipment Industri yang andal dengan produktivitas lebih tinggi dan O&M yang lebih rendah Reliable industrial port equipment with higher productivity and lower O&M	Pelatihan Kepemimpinan untuk Manajer & Supervisor Terminal Leadership Training for Terminal Managers & Supervisors Pelatihan dasar terminal non-kontainer Non-container terminal basic training Struktur organisasi berdasarkan P&C Organizational structure based on P&C	Persyaratan minimum Minimum requirements Standar teknologi (misalnya sensor, sistem operasi terminal) untuk mendukung operasi terminal Technology standards (e.g. sensors, terminal operating system) to support operation terminal	Rencana Tanggap Darurat Emergency Response Plan Induksi dan Pelatihan Keselamatan Induction and Safety Training



Tahapan Transformasi

Stages of Transformation



ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Roadmap pengembangan dan implementasi teknologi informasi mengacu terhadap Corporate Roadmap 2020-2024 dimana pada tahun 2024 IPCC memasuki fase “*Value Chain Integration*” dimana tahapan tersebut fokus kepada integrasi dan otomatisasi layanan digital untuk seluruh proses bisnis di Terminal Kendaraan berbasis *single truth of data*.

Dalam perjalanan Perseroan terlebih guna mendukung program strategis Pelindo pasca merger, dilakukan adjustmen dalam implementasi roadmap/masterplan IT guna menyesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan eksisting pada tahun 2024, dimana sebelumnya menggunakan IT master plan periode 2020-2024 kemudian pada semester II 2024 telah diluncurkan secara resmi IT masterplan periode 2025-2029 sebagai *Roadmap* IT kedepan.

Sebagai informasi berikut adalah *Roadmap* visi, misi, tema *Roadmap* dan sasaran IT Master Plan:

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

The roadmap for development and implementation of information technology refers to the Corporate Roadmap 2020 – 2024. In 2024, IPCC enters the “*Value Chain Integration*” phase, in which this stage focuses on integration and automation of digital services for all business processes at the Car Terminal based on a single truth of data.

In the Company's journey, especially to support Pelindo's strategic program after the merger, adjustments were made in the implementation of IT roadmap/masterplan to adjust to the organizational structure and existing needs in 2024, where previously using the IT masterplan for the period of 2020-2024. In the second semester of 2024, the IT masterplan for the period of 2025-2029 was officially launched as IT Roadmap going forward.

For information, the following is the Roadmap of vision, mission, and targets of the IT Master Plan:


2020
Business Stabilization

- Implementasi digital *surveillance system* guna meningkatkan *control* dan monitoring di Terminal
- Implementasi aplikasi sistem *cost accounting* (akuntansi biaya)
- Pembangunan dan implementasi *autogate system* pada terminal internasional yang terintegrasi dengan sistem pengguna jasa
- Pengembangan dan implementasi aplikasi *fixed asset*
- Pengembangan aplikasi *SIMPER & SIMKEU* khususnya terkait payroll pegawai.
- Pengembangan dan implementasi aplikasi *TPS Online* sebagai portal pelaporan terkait dokumen kepabeanan
- Implementation of a digital *surveillance system* to improve control and monitoring at the Terminal
- Implementation of *cost accounting system* applications (*cost accounting*)
- Development and implementation of an *autogate system* at international terminals that is integrated with service user systems
- Development and implementation of *fixed asset applications*
- Development of the *SIMPER & SIMKEU* application, especially regarding employee payroll
- Development and implementation of the *TPS Online* application as a reporting portal related to customs documents


2021
Synergy & Improvement

- Revitalisasi backbone infrastruktur IT (fiber optic & wireless access point) berbasis redundancy guna meningkatkan *availability* layanan
- Pemenuhan terhadap perangkat end-user (handheld, HT, Radio ng) guna menjamin kelancaran kegiatan operasional
- Implementasi aplikasi *TOS Domestik* yang berbasis *planning control* dan terintegrasi dengan sistem ERP
- Peningkatan aplikasi *TOS internasional* yang terintegrasi dengan Portal Agen Pemerintahan (NLE, CEISA dan INSW)
- Pengembangan dan implementasi aplikasi layanan keuangan (*e-invoice, autocollection & AR Netting*)
- Revitalization of IT infrastructure backbone (fiber optic & wireless access points) based on redundancy to increase service *availability*
- Fulfillment of end-user devices (handheld, HT, Radio rig) to ensure smooth operational activities
- Implementation of a *Domestic TOS* application based on *planning control* and integrated with the ERP system
- Improved international *TOS* applications that are integrated with the Government Agent Portal (NLE, CEISA and INSW)
- Development and implementation of financial service applications (*e-invoice, autocollection & AR Netting*)


2022
Growth Through Integration

- Re-engineering terminal operating system (*TOS*) untuk Terminal International berbasis trend teknologi terkini (*cloud-based computing*)
- Pengembangan dan implementasi yang berorientasi kepada customer experience (*Single Customer Portal & Customer Relationship Management System*)
- Peningkatan keamanan teknologi informasi terhadap kerentanan *Cyber-Attack*
- Pengembangan dan implementasi *Executive Information System Dashboard*
- Pengembangan teknologi *RFID* untuk optimalisasi kegiatan operasional di Terminal
- Re-engineering Terminal Operating System (*TOS*) for International Terminals based on the latest technology trends (*cloud-based computing*)
- Development and implementation oriented towards customer experience (*Single Customer Portal & Customer Relationship Management System*)
- Increasing information technology security against *Cyber-Attack* vulnerabilities
- Development and implementation of the *Executive Information System Dashboard*
- Development of *RFID* technology to optimize operational activities at the Terminal


2023
Value Chain Expansion

- Pengembangan aplikasi Terminal *Operating System Domestik* untuk seluruh wilayah satelit (cabang Perusahaan)
- Re-engineering *billing engine* kebutuhan terminal operating system
- Implementasi smart digital *surveillance system* untuk otomasi monitoring dan control kegiatan di Terminal
- Adopsi latest trend dan teknologi (*Cloud computing, IoT dan mobile devices*)
- Development of *Domestic Terminal Operating System* applications for all satellite areas (company branches)
- Re-engineering *billing engine* terminal operating system requirements
- Implementation of a smart digital *surveillance system* to automate monitoring and control of activities at the Terminal
- Adoption of the latest trends and technology (*Cloud computing, IoT and mobile devices*)


2024
Value Chain Integration

- Implementasi *single TOS* dan *single billing* layanan car terminal
- Integrasi dan otomasi layanan digital untuk seluruh proses bisnis di Car Terminal berbasis "single truth of data"
- Layanan teknologi informasi yang terintegrasi kepada seluruh stakeholders (car maker sampai dengan government agency)
- Implementation of *single TOS* and *single billing* for car terminal services
- Integration and automation of digital services for all business processes at the Car Terminal based on "single truth of data"
- Integrated information technology services to all stakeholders (car makers to government agencies)

ADJUSTMENT ROADMAP TI 2025-2029

Dalam perjalanan Perseroan terlebih guna mendukung program strategis Pelindo pasca merger, dilakukan *adjustment* dalam implementasi *roadmap/masterplan* IT guna menyesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan eksisting pada tahun 2024, dimana sebelumnya menggunakan IT *masterplan* periode 2020-2024 kemudian pada semester II 2024 telah diluncurkan secara resmi IT *masterplan* periode 2025-2029 sebagai *Roadmap* IT kedepan.

ADJUSTMENT OF IT ROADMAP 2025-2029

In the Company's journey, especially to support Pelindo's strategic program after the merger, adjustments were made in the implementation of IT *roadmap/masterplan* to adjust to the organizational structure and existing needs in 2024, where previously using the IT *masterplan* for the period 2020-2024, in the second semester of 2024, the IT *masterplan* for the period 2025-2029 was officially launched as the IT *Roadmap* going forward.

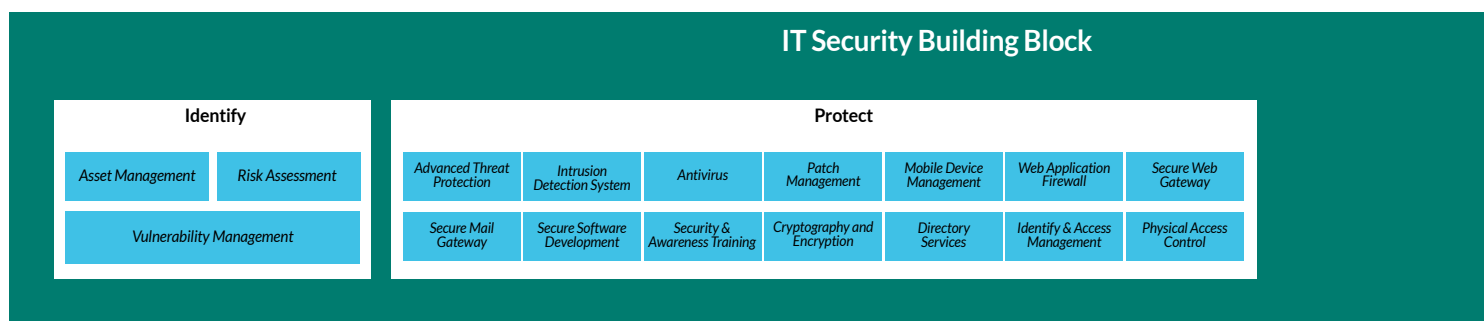
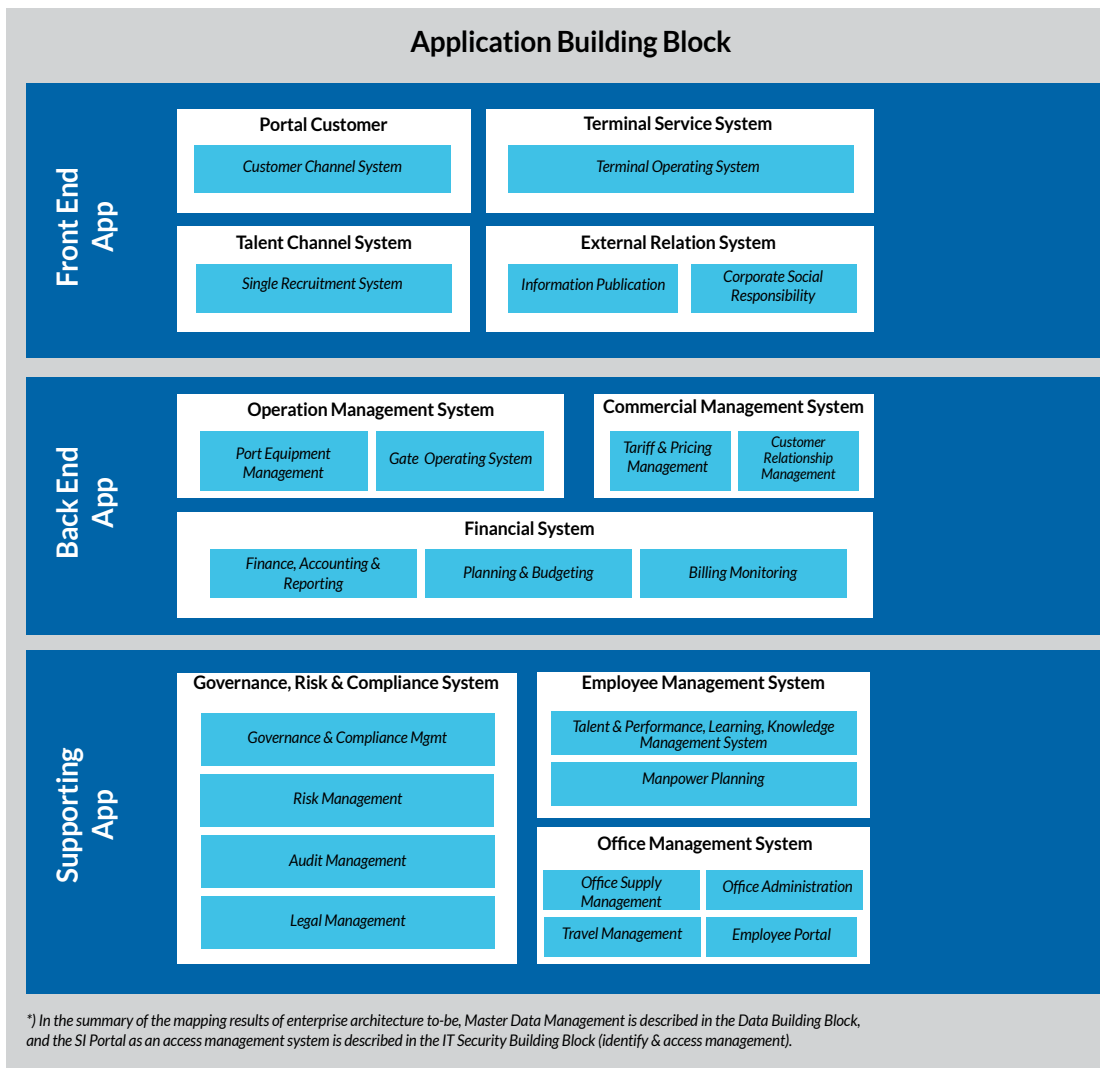
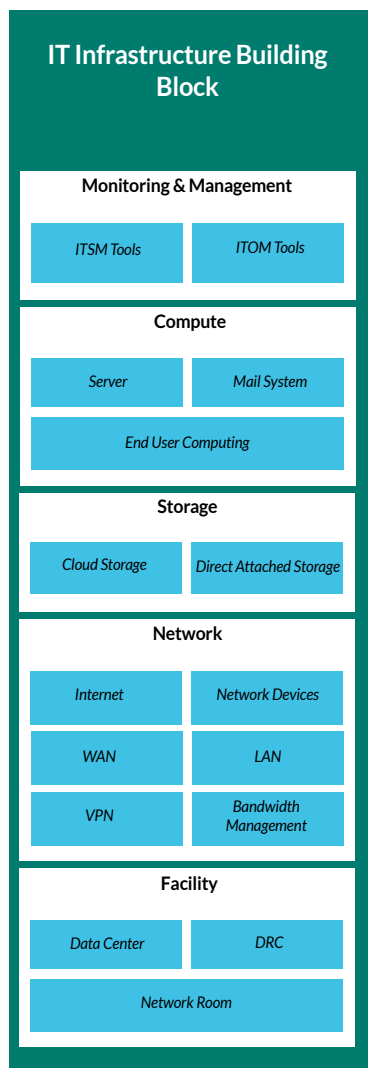


Sebagai informasi berikut adalah *Roadmap* visi, misi, tema *Roadmap* dan sasaran *IT Master Plan*:

For information, the following is the *Roadmap* vision, mission, *Roadmap* theme and targets of the *IT Master Plan*:

Adjustment Roadmap IT Master Plan 2024





ROADMAP TI IPCC 2025-2029

Seiring dengan berakhirnya masa *Roadmap* TI 2020–2024, IPCC telah menyusun *Roadmap* TI terbaru sebagai arah strategis pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan tantangan industri logistik kendaraan yang terus berkembang.

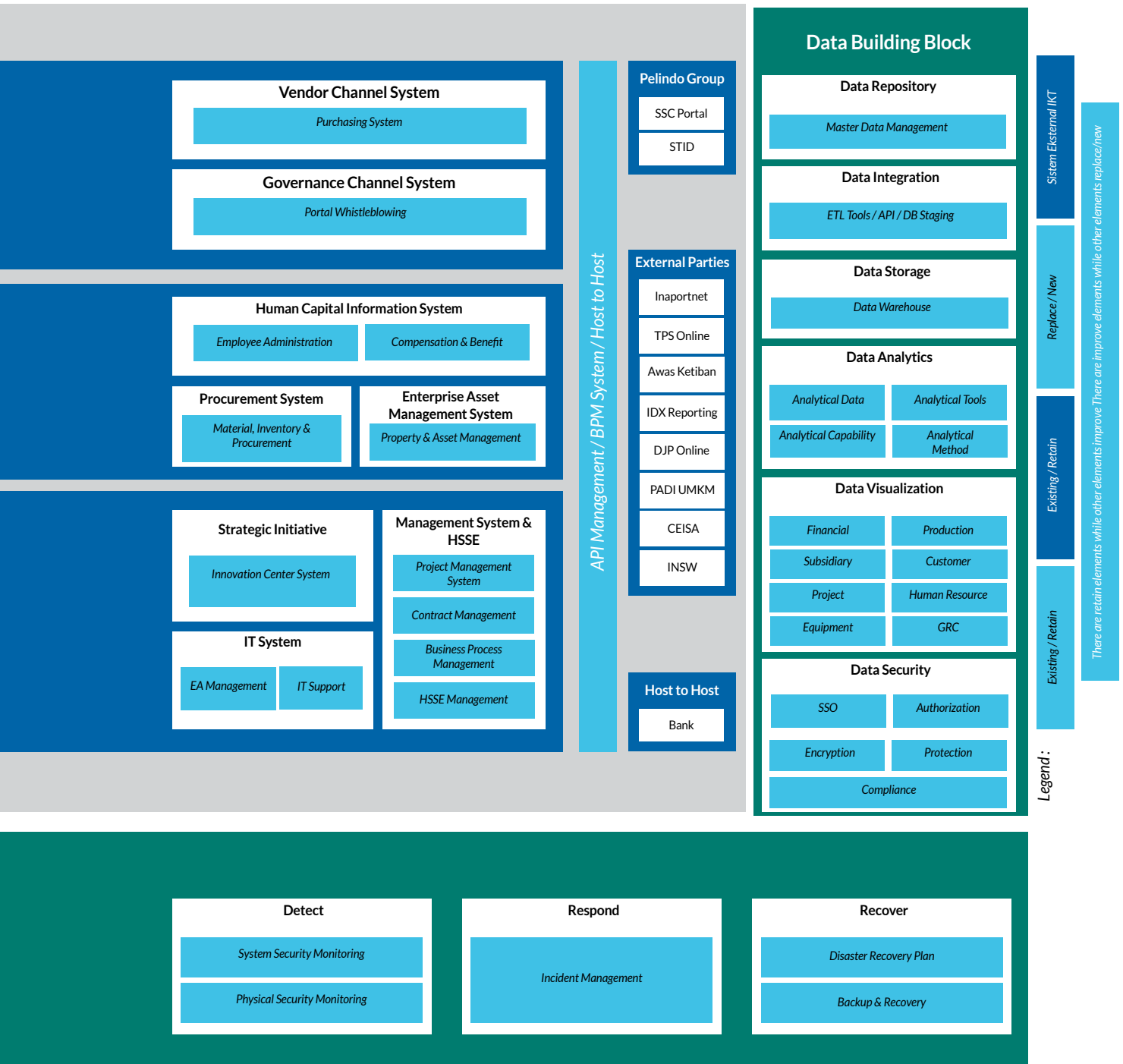
Roadmap TI terbaru dirancang untuk memperkuat digitalisasi layanan, integrasi sistem informasi, serta meningkatkan kapabilitas analitik dan keamanan siber. Penyusunan *roadmap*

IPCC IT ROADMAP 2025–2029

As the 2020–2024 IT Roadmap period ends, IPCC has prepared a new IT Roadmap as a strategic direction for information technology development, aligned with business needs and the evolving challenges of the vehicle logistics industry.

The new IT Roadmap is designed to strengthen service digitalization, information system integration, and enhance analytics and cybersecurity capabilities. The roadmap preparation also considers technological dynamics, increasingly





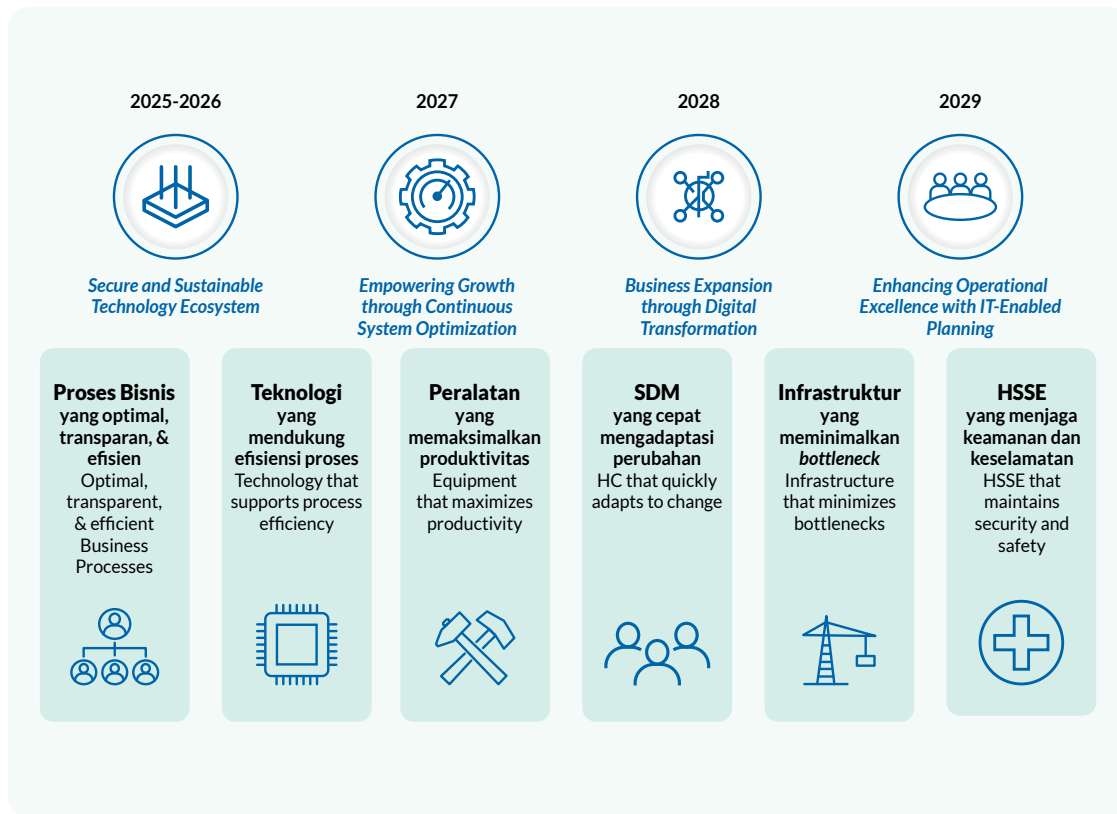
ini juga mempertimbangkan dinamika teknologi, kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks, serta aspirasi IPCC untuk menjadi terminal kendaraan berkelas dunia yang berbasis pada efisiensi dan inovasi teknologi.

Melalui implementasi *roadmap* baru ini, IPCC menegaskan komitmennya untuk menjadikan TI bukan hanya sebagai pendukung, melainkan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan efektivitas dan keunggulan kompetitif layanan bongkar muat kendaraan.

complex customer needs, and IPCC's aspiration to become a world-class vehicle terminal based on efficiency and technological innovation.

Through the implementation of this new roadmap, IPCC reaffirms its commitment to making IT not just a support function but a main driver in increasing the effectiveness and competitive advantage of vehicle loading and unloading services.





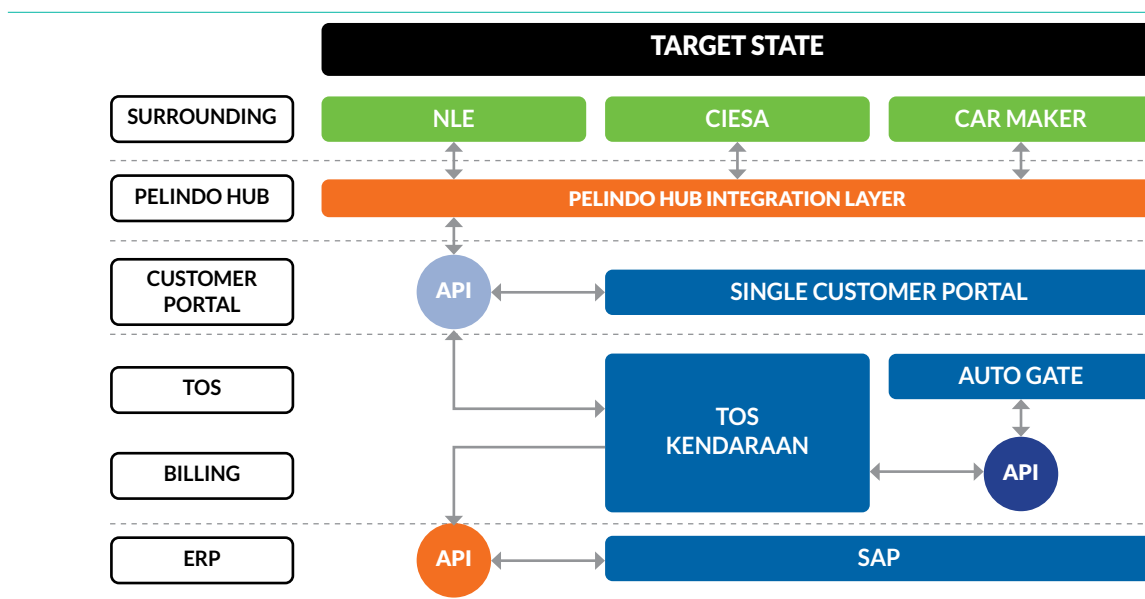
IMPLEMENTASI SISTEM PTOS-C

PTOS-C atau Pelindo *Terminal Operating System Car* merupakan sistem digunakan untuk operasi kegiatan di Terminal yang dilakukan secara *real-time*. Mulai dari kegiatan perencanaan, *booking*, realisasi kegiatan, kontrol dan pengawasan sampai dengan terbit laporan kinerja dan *billing*. Kargo atau *vehicle identification number* (VIN) dalam bentuk *barcode*. Sistem ini terintegrasi dengan sistem *Car Maker* guna mengotomasi proses *booking* dari *customer*, TPS Online Bea Cukai Ciesa guna mengotomasi proses *clearance document*, mengoptimalkan proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan di terminal. Selain itu, dengan pencatatan secara *real-time* pemilik kargo dapat mengetahui pergerakan kargo yang ada di dalam terminal dan dapat dikirimkan ke sistem milik pemilik barang dalam hal ini *car maker* melalui sistem yang digunakan oleh *customer* yaitu sistem IBS.

IMPLEMENTATION OF PTOS-C SYSTEM

PTOS-C or Pelindo *Terminal Operating System Car* is a system used for terminal operations carried out in real-time. It covers activities from planning, booking, activity realization, control, and supervision to the issuance of performance and billing reports. Cargo or Vehicle Identification Number (VIN) is presented in barcode form. This system is integrated with the *Car Maker* system to automate the booking process from customers, and with TPS Online Customs (Ciesa) system to automate the clearance document process, as well as to optimize planning, implementation, and monitoring activities at the terminal. Additionally, with real-time recording, cargo owners can track the movement of their cargo within the terminal and have it transmitted to the cargo owner's system, in this case the *car maker*, through the system used by the customer, which is the IBS system.





IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI IPCC

IPCC mengadopsi 3 (tiga) solusi teknologi informasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses, yaitu:

1. *Terminal Operation Management*;
2. *Terminal Enterprise Management*; dan
3. Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi.

Hingga periode pelaporan, IPCC terus melakukan pengembangan dan implementasi teknologi informasi, khususnya untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan terminal guna memberikan kemudahan bagi seluruh pelanggan IPCC.

Terminal Operation Management

Terminal Operation Management (TOM) merupakan *cluster* aplikasi yang berfungsi untuk mendukung layanan inti (*core business*) Perseroan. Aplikasi yang terdapat pada *cluster* ini berperan untuk meningkatkan kegiatan operasi melalui pencatatan transaksi terminal secara *real time*, integrasi pertukaran data dengan sistem aplikasi *government* (CEISA Beacukai) dan *car maker* untuk mempercepat kegiatan di Terminal. Adapun aplikasi-aplikasi pada *cluster* ini, antara lain:

Pelindo Terminal Operating Sistem Car (PTOS-C)

Pada tahun 2024, sistem PTOS-C telah diimplementasikan di Terminal Domestik Jakarta pada bulan Agustus 2024 dan sudah diimplementasikan di Terminal Satelit Belawan termasuk sistem *surrounding*-nya yaitu *Billing System IBS* dan integrasi dengan sistem SAP-SAP dan sistem pembayaran atau payment channel. Sistem PTOS-C akan terus dikembangkan untuk diimplementasikan di terminal-terminal lainnya di lingkungan Perseroan.

IMPLEMENTATION OF IPCC INFORMATION TECHNOLOGY

IPCC adopted 3 (three) information technology solutions aimed at increasing process effectiveness and efficiency, namely:

1. *Terminal Operation Management*;
2. *Terminal Enterprise Management*; And
3. Information Technology Infrastructure and Security.

Until the reporting period, IPCC continued to develop and implement information technology, especially to support the Company's business expansion which aims to integrate all terminal services to provide convenience for all IPCC customers.

Terminal Operation Management

Terminal Operation Management (TOM) is an application cluster that functions to support the Company's core services (*core business*). The applications in this cluster play a role in improving operational activities by recording terminal transactions in real time, integrating data exchange with government application system (CEISA Customs) and car makers to speed up activities at the Terminal. The applications in this cluster include:

Pelindo Terminal Operating System Car (PTOS-C)

In 2024, PTOS-C system has been implemented at Jakarta Domestic Terminal in August 2024 and has also been implemented at Belawan Satellite Terminal, including its surrounding systems such as *Billing System IBS*, integration with SAP-SAP system, and payment system or payment channels. PTOS-C system will continue to be developed for implementation at other terminals within the Company's environment.



PTOS-C atau Pelindo *Terminal Operating System Car* merupakan sistem digunakan untuk operasi kegiatan di Terminal yang dilakukan secara *real-time*. Mulai dari kegiatan perencanaan, booking, realisasi kegiatan, kontrol dan pengawasan sampai dengan terbit laporan kinerja dan *billing*. Cargo atau vehicle identification number (VIN) dalam bentuk *barcode*. Sistem ini terintegrasi dengan sistem *Car Maker* guna mengotomasi proses booking dari customer, TPS Online Bea Cukai Ciesa guna mengotomasi proses *clearance document*, mengoptimalkan proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan di terminal. Selain itu, dengan pencatatan secara *real-time* pemilik cargo dapat mengetahui pergerakan cargo yang ada di dalam terminal dan dapat dikirimkan ke sistem milik pemilik barang dalam hal ini *car maker* melalui sistem yang digunakan oleh customer yaitu sistem IBS.

Car Terminal Operating System (CARTOS)

CARTOS merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mencatat seluruh kegiatan operasional di Terminal secara *real-time*. Mulai dari proses *announcement cargo* sampai dengan cargo tersebut keluar terminal dicatatkan dengan menggunakan perangkat handheld dengan memindai informasi kargo atau vehicle identification number (VIN) dalam bentuk *barcode*.

Aplikasi ini mengelaborasi seluruh kegiatan terminal mulai dari kegiatan truck, terminal dan kapal menjadi rangkaian proses yang terintegrasi sehingga mengoptimalkan perencanaan, pengaturan dan pemantauan kegiatan di terminal. Aplikasi CARTOS juga telah terintegrasi dengan aplikasi milik beacukai (CEISA) dan aplikasi milik *car maker* guna mengotomasi proses *clearance document*. Selain itu, dengan pencatatan secara *real-time* pemilik kargo dapat mengetahui pergerakan kargo yang ada di dalam terminal dan dapat dikirimkan ke sistem milik pemilik barang dalam hal ini carmaker melalui integrasi aplikasi. Hasil akhir dari aplikasi ini adalah *reporting* kegiatan untuk setiap kapalnya (realisasi bongkar-muat) yang selanjutnya diintegrasikan dengan sistem *billing* untuk penerbitan *invoice*.

Secara umum, sistem aplikasi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Mengelola arus kargo kendaraan di terminal dengan rencana penempatan yang tepat sehingga diperoleh efisiensi proses bongkar muat;
2. Membuat jadwal rencana *loading/unloading* dan *yard optimizing* dengan mengacu kepada informasi yang dikirimkan oleh *shipping companies* yang memuat posisi kargo pada kapal yang akan berlabuh;
3. Mengolah informasi pengiriman kargo menuju terminal yang dikirimkan oleh *transportation companies*.

Billing CARTOS

Billing CARTOS adalah aplikasi *billing* berbasis web, Billing CARTOS berfungsi untuk membuat pranota dan Nota berdasarkan RBM (Realisasi Bongkar Muat) yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana data RBM tersebut dibuat secara otomatis berdasarkan sistem *Terminal Operating System* milik IPCC yaitu CARTOS.

PTOS-C or Pelindo *Terminal Operating System Car* is a system used for operational activities in the Terminal, which is carried out in real-time. Starting from planning activities, booking, activity realization, control and supervision to the issuance of performance reports and billing. Cargo or vehicle identification number (VIN) in the form of a barcode. This system is integrated with the *Car Maker* system to automate booking process from customers, TPS Online Customs Ciesa to automate the clearance document process, optimize the process of planning activities, implementation and monitoring of activities in the terminal. In addition, with real-time recording, cargo owners can find out the movement of cargo in the terminal and can be sent to the system owned by the owner of the goods, in this case the car maker, through the system used the customer, namely the IBS system.

Car Terminal Operating System (CARTOS)

CARTOS is an application that functions to record all operational activities in the Terminal in real-time. Starting from the cargo announcement process until the cargo leaves the terminal, it is recorded using a handheld device by scanning the cargo information or vehicle identification number (VIN) in the form of a barcode.

This application elaborates all terminal activities starting from truck, terminal and ship activities into a series of integrated processes so as to optimize planning, regulation and monitoring of activities at the terminal. CARTOS application has also been integrated with customs applications (CEISA) and car maker applications to automate the document clearance process. Apart from that, by real-time recording the cargo owner can find out the movement of cargo in the terminal and it can be sent to the goods owner's system, in this case the carmaker, through application integration. The final result of this application is activity reporting for each ship (loading and unloading realization) which is then integrated with the billing system for issuing invoices.

In general, this application system has three functions:

1. Manage the flow of vehicle cargo at the terminal with appropriate placement plans to obtain efficiency in the loading and unloading process;
2. Make a loading/unloading plan and yard optimization schedule by referring to the information sent by shipping companies which contains the position of cargo on the ship that will dock;
3. Process information on cargo delivery to the terminal sent by transportation companies.

Billing CARTOS

Billing CARTOS is a web-based billing application. Billing CARTOS functions to generate pre-invoice and invoice based on RBM (Loading and Unloading Realization) that has been previously created, where the RBM data is automatically generated by IPCC's Terminal Operating System, namely CARTOS.



Pranota dan nota akan dibuat secara otomatis pada *Billing CARTOS* Ketika *CARTOS* mengirimkan data RBM melalui *enterprise service bus* untuk dibuatkan pranota dan nota secara Otomatis, lalu akan dikirimkan ke dalam *Billing CARTOS* untuk divalidasi pranota dan nota yang telah dibuat oleh petugas. Selanjutnya nota ini akan dikirimkan ke aplikasi ERP Finance untuk dilakukan proses pencatatan oleh Divisi Keuangan.

Automatic Gate

1. Terminal Internasional

IPCC mengembangkan *automatic gate* di Terminal Internasional sebagai upaya untuk mempermudah kontrol akses masuk dan keluar angkutan tanpa bantuan operator *gate* yang terintegrasi dengan *Terminal Operating System (TOS)* Terminal Internasional IPCC. Fungsi *automatic gate* adalah melakukan verifikasi data perencanaan truk dan kargo apakah data sudah sesuai dengan perencanaan atau belum, serta melakukan pengecekan dokumen kepabeanan untuk setiap kargo yang diangkut oleh sarana pengangkut untuk memastikan bahwa setiap kargo yang akan masuk ke IPCC sudah memiliki dokumen kepabeanan. Selain itu, proses tersebut dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan, produktivitas semakin baik, pelayanan operasional menjadi efisien, serta mengurangi *fraud/kecurangan* dari operator.

2. Terminal Domestik

Sejak September 2022, IPCC resmi mengimplementasikan *automatic gate* di Terminal Domestik sebagai upaya untuk mempermudah kontrol akses masuk dan keluar angkutan tanpa bantuan operator *gate*. Fungsi *automatic gate* di terminal domestik untuk memverifikasi data perencanaan truk dan kargo. Selain itu, proses tersebut dapat meningkatkan keamanan, keselamatan dan peningkatan produktivitas, efisiensi proses pelayanan operasional, serta mengurangi *fraud/kecurangan* dari operator.

E-Ticket System

Sistem *E-ticket* merupakan layanan digital IPCC untuk permintaan pelayanan jasa di Terminal. Sistem ini akan memberikan elektronik tiket/*pass* kepada pengguna jasa yang ingin menggunakan layanan di Terminal Internasional IPCC. *E-Ticket* berisikan informasi mengenai sarana pengangkut, *list* kargo, dan dokumen kepabeanan.

E-Ticket akan divalidasi dan diverifikasi oleh *Terminal Operating System* melalui perantara *system auto gate* untuk memastikan kebenaran data yang dikirim. Pada *E-ticket* juga terdapat proses validasi data dokumen kepabeanan lewat integrasi ke sistem milik Bea Cukai (CEISA) secara online. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai atau tidak.

TPS Online

TPS Online adalah sistem pertukaran data elektronik antara tempat penimbunan sementara dengan Bea Cukai. Sistem ini diimplementasikan guna memenuhi dan mematuhi kewajiban memiliki aplikasi pengelolaan barang di tempat penimbunan

The pre-invoice and invoice are automatically generated in *Billing CARTOS* when *CARTOS* sends the RBM data via the enterprise service bus to be processed automatically. Then, it is sent to *Billing CARTOS* for validation of the pre-invoice and invoice by the assigned personnel. Subsequently, the invoice is sent to the ERP Finance application for recording by the Finance Division.

Automatic Gate

1. International Terminal

IPCC developed automatic gates at the International Terminal as an effort to make it easier to control entry and exit access for transport without the assistance of a gate operator which is integrated with IPCC International Terminal Terminal Operating System (TOS). The function of Automatic Gate is to verify truck and cargo planning data whether the data is in accordance with the planning or not, as well as checking customs documents for each cargo transported by the transport facility to ensure that each cargo that will enter IPCC already has customs documents. Apart from that, this process can improve security and safety, improve productivity, make operational services efficient, and reduce fraud from operators.

2. Domestic Terminal

In September 2022, IPCC officially implemented automatic gates at Domestic Terminals as an effort to make it easier to control access for incoming and outgoing transport without the assistance of gate operators. Automatic Gate function in domestic terminals to verify truck and cargo planning data. Apart from that, this process can improve security, safety and increase productivity, efficiency of operational service processes, and reduce fraud from operators.

E-Ticket System

E-ticket system is a PCC digital service for requesting services at the Terminal. This system will provide electronic tickets/*passes* to service users who wish to use services at IPCC International Terminal. E-Ticket contains information regarding means of transport, cargo list and customs documents.

E-Ticket will be validated and verified by the Terminal Operating System through an intermediary auto gate system to ensure the correctness of the data sent. In E-tickets there is also a customs document data validation process through integration with the Customs and Excise system (CEISA) online. This process aims to ensure that the documents are appropriate or not.

Online TPS

Online TPS is an electronic data exchange system between temporary storage places and Customs. This system was implemented to fulfill and comply with the obligation to have a goods management application in temporary storage areas, and

sementara, dan menyediakan media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan aplikasi kepabeanan Kantor Pabean.

Fungsi TPS Online adalah untuk melaporkan kegiatan di TPS dan menerima dokumen izin pemasukan dan pengeluaran barang secara Online. Penerapan sistem ini menjadikan IPCC sebagai terminal berbasis sistem informasi.

Car Terminal Operating System Domestic (CARDOM)

CARDOM adalah *Car Terminal Operating System Domestic* yang dirancang berdasarkan SOP yang ada pada Terminal Domestik IPCC yang berfungsi untuk menunjang dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dan proses penyajian data/informasi di *back-office* Perseroan. Dukungan teknologi informasi dalam proses bisnis tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk membantu Manajemen IPCC dalam mengelola dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional.

Secara umum sistem aplikasi ini memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Mengelola arus kargo kendaraan di terminal dengan rencana penempatan yang tepat sehingga diperoleh efisiensi proses bongkar muat;
2. Membuat jadwal rencana *loading/unloading* dan *yard optimizing* dengan mengacu kepada informasi yang dikirimkan oleh *shipping companies* yang memuat posisi kargo pada kapal yang akan berlabuh;
3. Mengolah informasi pengiriman kargo menuju terminal yang dikirimkan oleh *transportation companies*.

Billing CARDOM

Billing CARDOM merupakan aplikasi *billing* berbasis web, *Billing CARDOM* berfungsi untuk membuat pranota dan nota berdasarkan Realisasi Bongkar Muat (RBM) yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana data RBM tersebut dibuat secara otomatis berdasarkan *Terminal Operating System* milik IPCC yaitu TOS CARDOM. Pranota dan nota akan terbuat secara otomatis pada *Billing CARDOM* Ketika TOS CARDOM mengirimkan data RBM melalui enterprise service bus untuk dibuatkan pranota dan nota secara otomatis, lalu akan dikirimkan ke dalam *Billing CARDOM* untuk divalidasi pranota dan nota yang telah dibuat oleh petugas. Selanjutnya nota ini akan dikirimkan ke aplikasi ERP *Finance* untuk dilakukan proses pencatatan oleh Divisi Keuangan.

Aplikasi RFID

Sejak tahun 2021, Perseroan bersama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan *soft launching* penggunaan Aplikasi RFID (*Radio Frequency Identification*) pada unit yang dibawa oleh TMMIN, yaitu Toyota.

Penggunaan RFID ini merupakan bagian dari perjalanan digitalisasi Perseroan yang diawali dengan implementasi TOS Internasional, *billing engine*, dan ERP di tahun 2015, dilanjutkan dengan TOS Domestik di tahun 2018 dan berlanjut dengan pengembangan sistem CEISA, Auto NPE, dan *Autogate Management System Dashboard* di tahun 2021.

provide electronic data communication media that is connected to the Customs Office customs application.

The function of Online TPS is to report activities at the TPS and receive documents permitting the entry and release of goods online. The implementation of this system makes IPCC an information system-based terminal.

Car Terminal Operating System Domestic (CARDOM)

CARDOM is a Domestic Car Terminal Operating System which is developed based on the SOP in IPCC Domestic Terminal which functions to support and provide convenience for customers and the process of presenting data/information in the Company's back-office. Information technology support in business processes is also expected to be a means to assist IPCC Management in managing and minimizing risks that may arise in operational activities.

In general, this application system has three functions:

1. Manage the flow of vehicle cargo at the terminal with appropriate placement plans to obtain efficiency in the loading and unloading process;
2. Make a loading/unloading plan and yard optimization schedule by referring to the information sent by shipping companies which contains the position of cargo on the ship that will dock;
3. Process information on cargo delivery to the terminal sent by transportation companies.

Billing CARDOM

Billing CARDOM is a web-based billing application. Billing CARDOM functions to generate pre-invoice and invoice based on RBM (Loading and Unloading Realization) that has been previously created, where the RBM data is automatically generated by IPCC's Terminal Operating System, namely TOS CARDOM. The pre-invoice and invoice are automatically generated in Billing CARDOM when TOS CARDOM sends the RBM data via the enterprise service bus to be automatically processed. Then, the data is sent to Billing CARDOM for validation of the pre-invoice and invoice by the officer. Subsequently, the invoice is sent to the ERP Finance application for recording by the Finance Division

RFID Application

Since 2021, the Company together with PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) have carried out a soft launch of the use of RFID (Radio Frequency Identification) Application on units brought by TMMIN, namely Toyota.

The use of RFID is part of the Company's digitalization journey which began with the implementation of International TOS, Billing Engine and ERP in 2015, continued with Domestic TOS in 2018 and the development of CEISA, Auto NPE and Autogate Management System Dashboard systems in 2021.



Penggunaan RFID diharapkan dapat mendukung terciptanya *car logistic ecosystem* yang nanti dapat memberikan nilai tambah Perseroan, tapi juga kepada para pelanggan.

Dashboard

1. Dashboard Operasional

Dashboard Operasional merupakan aplikasi berbasis web untuk mendukung kegiatan operasional IPCC yang berfungsi sebagai *dashboard* atau *monitoring tools*, agar data hasil transaksi kegiatan operasional dapat ditampilkan sebagai informasi dalam bentuk sisi trafik produksi maupun kinerja.

Dashboard ini juga diharapkan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis

2. Dashboard Strategi dan Pengembangan Bisnis

Dashboard Strategi dan Pengembangan Bisnis merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai *dashboard* atau *monitoring tools*, untuk menyajikan data operasional dan keuangan secara dinamis dan interaktif agar data hasil pendapatan dan persebaran kargo yang pernah melakukan kegiatan di IPCC dapat ditampilkan sebagai informasi dalam bentuk grafik sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan komersial dan pengembangan bisnis sehingga perusahaan dapat cepat dan tepat bereaksi memenuhi kebutuhan pasar dan perkembangan industri.

Terminal Enterprise Management

Terminal Enterprise Management (TEM) merupakan *cluster* aplikasi yang berfungsi mendukung kegiatan *back-office* atau pendukung layanan inti (*core business*) Perseroan. Aplikasi ini terutama berfungsi sebagai *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk bidang keuangan dan SDM dengan tujuan menggantikan proses manual ke dalam bentuk digital ataupun mengotomasi proses agar lebih efektif dan efisien. Adapun aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam *cluster* ini antara lain:

Enterprise Resource Planning (ERP) SAP

Enterprise Resource Planning (ERP) meliputi modul FI, CO, HCM, PS, PR/PO merupakan sebuah sistem yang dibangun dan diimplementasikan dengan tujuan mengoptimalkan kegiatan transaksi dan manajemen keuangan serta pengelolaan sumber daya manusia. Sistem ini dapat meningkatkan akurasi informasi keuangan untuk seluruh transaksi di perusahaan. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem ini antara lain *General Ledger*, *Account Payable & Receivable*, *asset management*, *collection management*, *employee management*, dan *revenue management*. Sistem ERP juga dapat mempermudah proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis perusahaan, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih sederhana dan responsif.

Financial Accounting (FI) adalah modul akuntansi keuangan dalam sistem SAP (*System, Applications, and Products in Data Processing*). Berikut beberapa fungsi utama dari FI SAP:

1. **Pengelolaan Akun:** FI SAP memungkinkan pengelolaan akun keuangan, termasuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan akun.

The use of RFID is expected to support the creation of a car logistics ecosystem which will later provide added value to the Company, but also to customers.

Dashboard

1. Operational Dashboard

The Operational Dashboard is a web-based application designed to support IPCC's operational activities. It functions as a dashboard or monitoring tool, allowing data from operational transaction activities to be presented as information in the form of production traffic or performance metrics.

This dashboard is also expected to assist management in making business decisions.

2. Strategy and Business Development Dashboard

The Strategy and Business Development Dashboard is a web-based application that functions as a dashboard or monitoring tool to present operational and financial data in a dynamic and interactive manner. This allows revenue results and the distribution of cargo that has carried out activities at IPCC to be displayed as information in the form of graphs. This information can then be used to support commercial decision-making and business development, enabling the company to respond quickly and accurately to market demands and industry developments.

Enterprise Management Terminal

Enterprise Management Terminal is an application cluster that functions to support back-office activities or support the Company's core services. This application primarily functions as *Enterprise Resource Planning* (ERP) for the financial and human capital sectors with the aim of replacing manual processes into digital form or automating processes to make them more effective and efficient. The deepest applications in this cluster include:

Enterprise Resource Planning (ERP) SAP

Enterprise Resource Planning (ERP) includes FI, CO, HCM, PS, PR/PO modules, is a system that was built and implemented with the aim of optimizing transaction activities and financial management as well as human capital management. This system can increase the accuracy of financial information for all transactions in the company. The functions contained in this system include *General Ledger*, *Accounts Payable & Receivable*, *asset management*, *collection management*, *employee management*, and *revenue management*. The ERP system can also simplify the process of controlling and monitoring business processes, so that business processes can run more simply and responsively.

Financial Accounting (FI) is a financial accounting module in the SAP system (*System, Applications, and Products in Data Processing*). The main functions of SAP FI include:

1. **Account Management:** SAP FI allows the management of financial accounts, including creation, modification, and deletion of accounts.

2. **Pengelolaan Transaksi:** FI SAP memungkinkan pengelolaan transaksi keuangan, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan transaksi.
3. **Pengelolaan Neraca:** FI SAP memungkinkan pengelolaan neraca keuangan, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan neraca.
4. **Pengelolaan Laporan Keuangan:** FI SAP memungkinkan pengelolaan laporan keuangan, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan laporan.

Human Capital Management (HCM) adalah modul pengelolaan sumber daya manusia dalam sistem SAP. Berikut beberapa fungsi utama dari HCM SAP:

1. **Pengelolaan Data Karyawan:** HCM SAP memungkinkan pengelolaan data karyawan, termasuk informasi pribadi, riwayat kerja, dan keterampilan.
2. **Pengelolaan Proses Rekrutmen:** HCM SAP memungkinkan pengelolaan proses rekrutmen, termasuk pembuatan lowongan kerja, pengelolaan aplikasi, dan seleksi kandidat.
3. **Pengelolaan Proses Penggajian:** HCM SAP memungkinkan pengelolaan proses penggajian, termasuk perhitungan gaji, pajak, dan tunjangan.
4. **Pengelolaan Proses Pelatihan dan Pengembangan:** HCM SAP memungkinkan pengelolaan proses pelatihan dan pengembangan, termasuk pembuatan rencana pelatihan, pengelolaan kursus, dan evaluasi kinerja.

PR (Purchase Requisition) dan **PO (Purchase Order)** adalah dua modul yang terkait dalam sistem SAP, yang digunakan untuk mengelola proses pembelian barang dan jasa. Berikut beberapa fungsi utama dari PR/PO SAP:

1. **Membuat Permintaan Pembelian:** PR memungkinkan pengguna untuk membuat permintaan pembelian barang atau jasa.
2. **Mengelola Data Pembelian:** PR memungkinkan pengguna untuk mengelola data pembelian, termasuk informasi tentang barang atau jasa yang dibeli.
3. **Mengirimkan Permintaan Pembelian:** PR memungkinkan pengguna untuk mengirimkan permintaan pembelian ke departemen pembelian.

Sementara fungsi utama PO, yaitu:

1. **Membuat Pesanan Pembelian:** PO memungkinkan pengguna untuk membuat pesanan pembelian barang atau jasa.
2. **Mengelola Data Pesanan Pembelian:** PO memungkinkan pengguna untuk mengelola data pesanan pembelian, termasuk informasi tentang barang atau jasa yang dibeli.
3. **Mengirimkan Pesanan Pembelian:** PO memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesanan pembelian ke *supplier*.

CO (Controlling) adalah modul dalam sistem SAP yang digunakan untuk mengelola biaya dan anggaran keuangan. Berikut beberapa fungsi utama dari CO SAP:

1. **Mengelola Biaya:** CO SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya yang terkait dengan produksi, penjualan, dan operasional lainnya.

2. **Transaction Management:** SAP FI allows the management of financial transactions, including creation, modification, and deletion of transactions.
3. **Balance Sheet Management:** SAP FI allows the management of financial balance sheets, including creation, modification, and deletion of balance sheets.
4. **Financial Report Management:** SAP FI allows the management of financial reports, including the creation, modification, and deletion of financial reports.

Human Capital Management (HCM) is a human capital management module within the SAP system. The main functions of SAP HCM include:

1. **Employee Data Management:** SAP HCM allows the management of employee data, including personal information, work history, and skills.
2. **Recruitment Process Management:** SAP HCM allows the management of recruitment process, including job vacancy creation, application management, and candidate selection.
3. **Payroll Process Management:** SAP HCM allows payroll process management, including salary calculation, taxes, and benefits.
4. **Training and Development Process Management:** SAP HCM allows training and development processes management, including training plan creation, course management, and performance evaluations.

Purchase Requisition (PR) and **Purchase Order (PO)** are two related modules in the SAP system, which are used to manage the process of purchasing goods and services. Key Functions of SAP PR/PO are as follows:

1. **Creating Purchase Requisition:** PR allows users to create purchase request for goods or services.
2. **Managing Purchase Data:** PR allows users to manage purchase data, including information about the goods or services purchased.
3. **Submitting Purchase Requisition:** PR allows users to send a purchase request to the purchasing department.

While Key Functions of PO (Purchase Order) are:

1. **Creating Purchase Orders:** PO allows users to create purchase orders for goods or services.
2. **Managing Purchase Order Data:** PO allows users to oversee purchase order data, including information about goods or services purchased.
3. **Sending Purchase Orders:** PO allows users to send purchase orders to suppliers.

CO (Controlling) is a module in the SAP system used for managing financial costs and budgets. The main functions of SAP CO include:

1. **Cost Management:** SAP CO allows companies to manage costs related to production, sales, and other operations.



2. Mengelola Anggaran: CO SAP memungkinkan perusahaan untuk membuat dan mengelola anggaran keuangan yang terkait dengan biaya dan pendapatan.
3. Mengelola Kinerja: CO SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola kinerja keuangan dan operasional, termasuk pengukuran kinerja dan analisis data.
4. Mengelola Risiko: CO SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko keuangan dan operasional, termasuk identifikasi risiko dan pengembangan strategi mitigasi.

PS (*Project System*) adalah modul dalam sistem SAP yang digunakan untuk mengelola proyek-proyek dalam sebuah perusahaan. Berikut beberapa fungsi utama dari PS SAP:

1. Mengelola Proyek: PS SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola proyek-proyek dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.
2. Mengelola Sumber Daya: PS SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang terkait dengan proyek, termasuk sumber daya manusia, material, dan peralatan.
3. Mengelola Biaya: PS SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya yang terkait dengan proyek, termasuk biaya material, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead*.
4. Mengelola Jadwal: PS SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola jadwal proyek, termasuk perencanaan jadwal, pemantauan jadwal, dan pengaturan jadwal.

Pelindo E-Office (PEO)

1. PEO merupakan aplikasi yang mentransformasikan seluruh proses korespondensi yang bersifat kedinasan, dari yang awalnya berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. Korespondensi yang bersifat kedinasan ini mencakup Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Undangan, Memo dan Disposisi. Dengan *E-Office*, proses mulai pembuatan draft, persetujuan berjenjang, penomoran hingga distribusi dilakukan secara elektronik.
2. P Travel merupakan aplikasi yang mentransformasikan seluruh proses layanan kegiatan perjalanan dinas mencakup proses usulan perjalanan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dinas.
3. P Cico merupakan aplikasi yang mentransformasikan seluruh proses layanan kegiatan presensi kehadiran pegawai secara self service dengan menggunakan *Geo Location* dan *Geo Fencing*.
4. P Eats merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat pembayaran makan dan minum secara elektronik.
5. P Eproc merupakan aplikasi yang mentransformasikan seluruh proses layanan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimulai dari pemilihan penyedia sampai terbit kontrak.
6. Portaverse merupakan platform yang mentransformasikan seluruh proses layanan kegiatan learning system, KPI, *Knowledge Management* dan informasi tentang Perseroan.

2. Budget Management: SAP CO allows companies to create and manage financial budgets related to costs and revenues.
3. Performance Management: CO SAP allows companies to manage financial and operational performance, including performance measurement and data analysis.
4. Risk Management: CO SAP allows companies to manage financial and operational risks, including risk identification and development of mitigation strategies.

PS (*Project System*) is a module in the SAP system used for managing corporate projects. The main functions of SAP PS include:

1. Project Management: SAP PS allows companies to manage projects from the start to finish, including project planning, execution, and monitoring.
2. Resource Management: SAP PS allows companies to manage project-related resources, including human capital, materials, and equipment.
3. Cost Management: SAP PS allows companies to manage project-related costs, including material costs, labor costs, and overhead costs.
4. Schedule Management: SAP PS allows companies to manage project schedules, including planning, tracking, and setting.

Pelindo E-Office (PEO)

1. PEO is an application that transforms the entire process of official correspondence, from being paper-based to electronic. This official correspondence includes Incoming Letters, Outgoing Letters, Official Notes, Invitations, Memos and Dispositions. With *E-Office*, the process from drafting, tiered approval, numbering to distribution is done electronically.
2. P Travel is an application that transforms the entire process of official travel service activities including the process of travel proposals, implementation, and official accountability.
3. P Cico is an application that transforms the entire process of employee attendance service activities in a self-service manner using *Geo Location* and *Geo Fencing*.
4. P Eats is an application used as a means of electronic payment for food and drinks.
5. P Eproc is an application that transforms the entire process of procurement of goods and services electronically starting from selecting providers to issuing contracts.
6. Portaverse is a platform that transforms the entire process of learning system service activities, KPI, *Knowledge Management* and information about the Company.

E-Invoice

E-Invoice adalah aplikasi yang mendukung pengiriman nota dan lampiran pendukung nota dalam bentuk digital guna meningkatkan kecepatan proses penagihan dan sebagai jembatan antara aplikasi *billing* dan ERP dimana aplikasi tersebut juga digunakan untuk mengirimkan *invoice* kepada pengguna jasa dalam bentuk elektronik.

Portal Customer Care Station (CCS)

Portal CCS adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana *Customer Portal*. Portal CCS memiliki fungsi yang dapat mengakomodir kebutuhan pelanggan, mulai dari pendaftaran pelanggan, pelaporan keluhan pelanggan, hingga *booking* layanan kegiatan di IPCC. Portal CCS dapat diakses secara *online* menggunakan *mobile phone* atau komputer sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan yang ada IPCC.

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Enterprise Architecture adalah *blueprint* yang bersifat konseptual dan mendefinisikan struktur dan operasi sebuah organisasi pada suatu waktu. Tujuan dari sebuah *Enterprise Architecture* adalah untuk menentukan bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya saat ini dan di masa datang dengan cara yang paling efektif. Kebutuhan akan *Enterprise Architecture* didorong oleh perkembangan teknologi dan integrasi serta kolaborasi yang main meningkat, dan juga perubahan yang semakin cepat dan kebutuhan untuk mengelola risiko.

Terdapat 4 (empat) domain di dalam *enterprise architecture*, antara lain:

Arsitektur bisnis Business architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan kapabilitas bisnis
- Memberikan pandangan terhadap seluruh segmen bisnis, fungsi-fungsi utama, dan ringkasan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing fungsi
- Blueprint concept that describes business capabilities
- Provides a view of all business segments, main functions, and a summary of activities carried out by each function

Arsitektur Aplikasi Application Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan *platform* aplikasi IT
- Memberikan pandangan terhadap kelompok aplikasi yang terdapat di dalam organisasi, selaras dengan *blueprint* bisnis beserta informasi
- Concept blueprint that describes the IT application platform
- Provides a view of the application groups within the organization, in line with the business blueprint and information

Arsitektur Infrastruktur Infrastructure Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan infrastruktur dan perangkat keras TI
- Memberikan pandangan terhadap *platform* infrastruktur yang mendukung aplikasi digunakan dalam organisasi
- Concept blueprint that describes IT infrastructure and hardware
- Provides insight into the infrastructure platforms that support applications used within the organization

Arsitektur Data Data Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan alur data dan informasi
- Memberikan pandangan terhadap objek informasi utama yang tersirkulasi dalam organisasi
- Blueprint concept that describes the flow of data and information
- Provides a view of the main information objects circulating within the organization

E-Invoice

E-Invoice is an application that supports sending notes and attachments supporting notes in digital form to increase the speed of the billing process and as a bridge between billing applications and ERP where the application is also used to send invoices to service users in electronic form.

Customer Care Station (CCS) Portal

CCS Portal is a web-based application that is used as a Customer Portal facility. The CCS portal has functions that can accommodate customer needs, starting from customer registration, reporting customer complaints, to booking activity services at the IPCC. The CCS portal can be accessed online using a mobile phone or computer, making it easier for customers to access IPCC services.

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE AND SECURITY

Enterprise Architecture is a blueprint that is conceptual and defines the structure and operations of an organization at a time. The goal of an Enterprise Architecture is to determine how an organization can achieve its current and future goals in the most effective way. The need for Enterprise Architecture is driven by technological developments and increasing integration and collaboration, as well as increasingly rapid change and the need to manage risk.

There are 4 (four) domains in enterprise architecture, including:



Enterprise Architecture juga mendeskripsikan peta kebutuhan bisnis dan dukungan teknologi informasi terhadap bisnis untuk domain aplikasi, infrastruktur, dan data. Dengan adanya *Enterprise Architecture* juga dapat menggambarkan gap antara kebutuhan bisnis dan dukungan teknologi informasi guna memudahkan perencanaan pengembangan teknologi informasi.

Berikut ini merupakan gambaran *high-level Enterprise Architecture* IPCC:

Enterprise Architecture also describes a map of business needs and information technology support for the business for application, infrastructure and data domains. The Enterprise Architecture can also illustrate the gap between business needs and information technology support to facilitate information technology development planning.

The following is an overview of IPCC high level Enterprise Architecture:



Keterangan gambar:

IT Infrastructure Building Block memberikan gambaran representatif dari hasil pemetaan infrastruktur teknologi eksisting yang digunakan di IPCC;

Application Building Block memberikan gambaran representatif dari hasil pemetaan aplikasi eksisting yang oleh user di IPCC;

Data Building Block memberikan gambaran representatif dari hasil pemetaan aliran data yang digunakan di IPCC;

IT Security Building Block memberikan gambaran representatif dari hasil pemetaan keamanan teknologi yang digunakan di IPCC.

IT Infrastructure Building Block provides a representative picture of the results of mapping the existing technology infrastructure used at IPCC;

Application Building Block provides a representative picture of the results of the mapping of existing applications used by users at IPCC;

Data Building Block provides a representative picture of the results of data flow mapping used at IPCC;

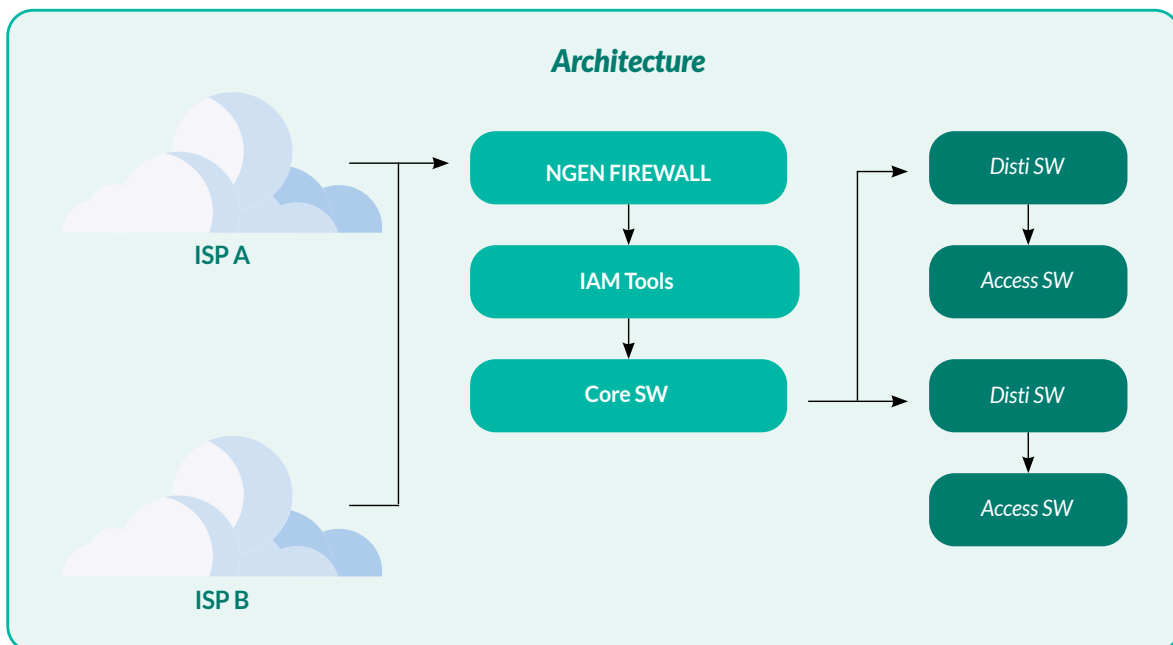
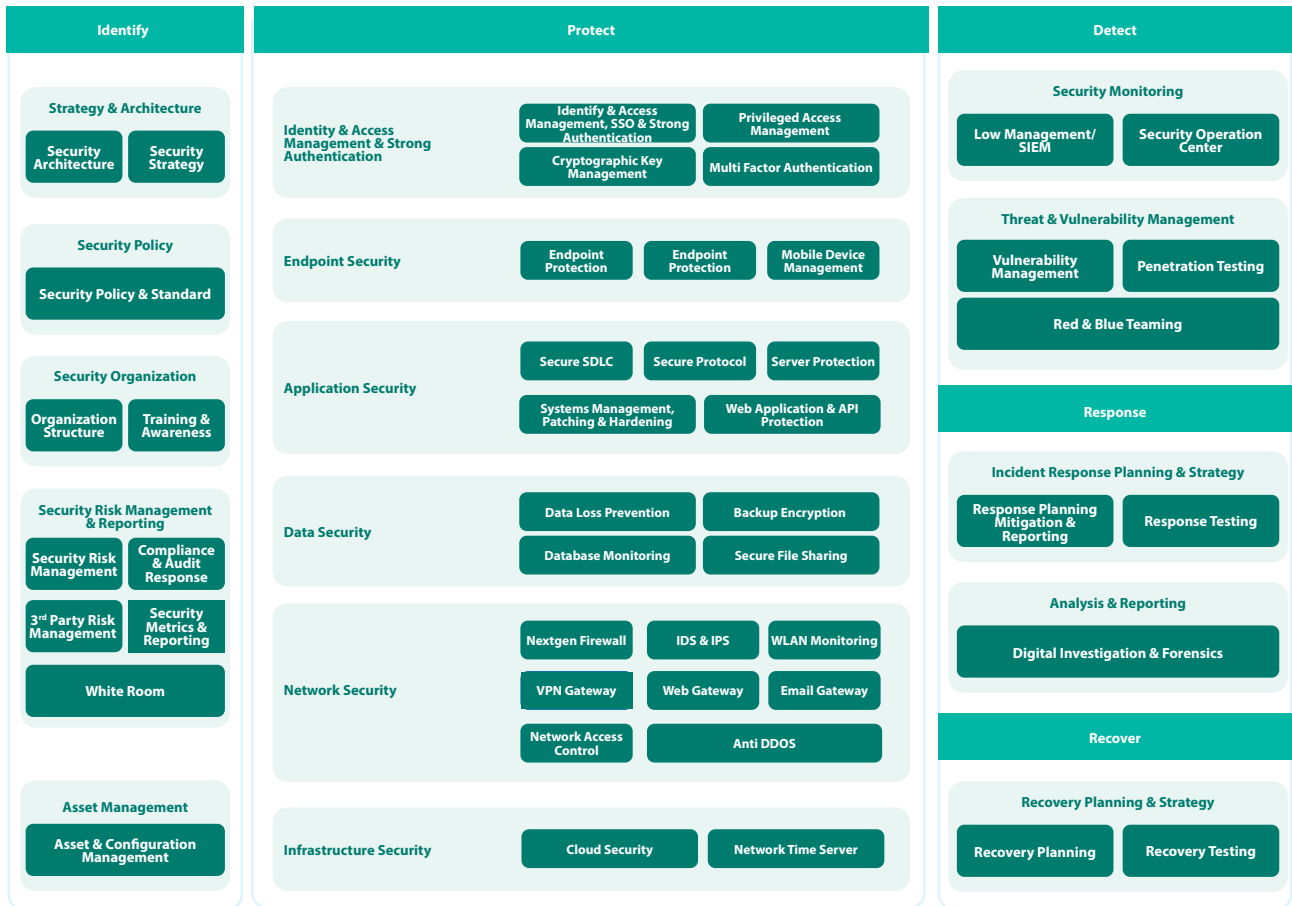
IT Security Building Block provides a representative picture of the results of technology security mapping used at IPCC.

Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi

Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi menggunakan *Framework NIST (National Institute of Standards and Technology)*.

Information Technology Infrastructure and Security

Information Technology Infrastructure and Security uses the *NIST (National Institute of Standards and Technology) Framework*.



ISP A / ISP B

Internet Service Provider (ISP) adalah perusahaan yang menyediakan layanan akses internet kepada pelanggan. Berikut beberapa fungsi utama dari ISP:

1. Menghubungkan Pelanggan ke Internet: ISP menyediakan akses internet kepada pelanggan melalui berbagai teknologi seperti DSL, kabel, *fiber optik*, atau *wireless*.
2. Menyediakan Alamat IP: ISP menyediakan alamat IP (*Internet Protocol*) kepada pelanggan untuk mengakses internet.
3. Mengatur Lalu Lintas Data: ISP mengatur lalu lintas data antara pelanggan dan internet untuk memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima secara akurat dan efisien.
4. Menyediakan Layanan Email: ISP menyediakan layanan email kepada pelanggan untuk mengirim dan menerima email.
5. Menyediakan Layanan DNS: ISP menyediakan layanan DNS (*Domain Name System*) untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

NGEN *Firewall* adalah sebuah perangkat keamanan jaringan yang dirancang untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman keamanan. Berikut beberapa fungsi utama dari NGEN *Firewall*:

1. Pengamanan Jaringan: NGEN *Firewall* berfungsi sebagai pengaman jaringan dengan memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan.
2. Pemblokiran Akses Tidak Sah: *Firewall* dapat memblokir akses tidak sah ke jaringan, termasuk serangan dari luar dan dalam jaringan.
3. Pengamanan Aplikasi: NGEN *Firewall* dapat mengidentifikasi dan memblokir aplikasi yang tidak sah atau berbahaya.
4. Pengamanan Konten: *Firewall* dapat memblokir konten yang tidak sah atau berbahaya, seperti *malware*, virus, dan *phishing*.
5. Pengamanan Jaringan Wi-Fi: NGEN *Firewall* dapat mengamankan jaringan Wi-Fi dengan memantau dan mengontrol akses ke jaringan.

Identity and Access Management (IAM)

IAM *tools* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola identitas dan akses pengguna dalam sebuah organisasi. IAM *tools* membantu organisasi untuk mengatur siapa yang dapat mengakses sumber daya, aplikasi, dan data, serta memastikan bahwa akses tersebut sesuai dengan kebijakan keamanan organisasi. Fungsi Utama IAM *Tools*, yaitu:

1. Autentikasi: IAM *tools* memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi dengan menggunakan kredensial seperti *username* dan *password*, atau metode autentikasi lainnya seperti biometrik atau token.
2. Otorisasi: IAM *tools* memungkinkan organisasi untuk mengatur akses pengguna ke sumber daya, aplikasi, dan data berdasarkan peran, departemen, atau kebijakan keamanan lainnya.
3. Manajemen Identitas: IAM *tools* memungkinkan organisasi untuk mengelola identitas pengguna, termasuk penciptaan, perubahan, dan penghapusan akun pengguna.
4. Audit dan Pelaporan: IAM *tools* memungkinkan organisasi untuk melakukan audit dan pelaporan terhadap aktivitas pengguna, sehingga memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengoptimalkan kebijakan keamanan mereka.

ISP A / ISP B

An Internet Service Provider (ISP) is a company that provides internet access services to customers. The key functions of an ISP include:

1. Connecting Customers to the Internet: ISPs provide internet access to customers through various technologies such as DSL, cable, fiber optic, or wireless.
2. Providing IP Addresses: ISPs assign Internet Protocol (IP) addresses to customers for internet access.
3. Managing Data Traffic: ISPs regulate data traffic between customers and the internet to ensure accurate and efficient data transmission.
4. Providing Email Services: ISPs offer email services to customers for sending and receiving emails.
5. Providing DNS Services: ISPs supply Domain Name System (DNS) services, which translate domain names into IP addresses.

NGEN Firewall is a network security device designed to protect networks from various security threats. The key functions of NGEN Firewall include:

1. Network Security: NGEN Firewall acts as a network security barrier by monitoring and controlling incoming and outgoing data traffic.
2. Unauthorized Access Blocking: The firewall prevents unauthorized access to the network, including external and internal threats.
3. Application Security: NGEN Firewall can identify and block unauthorized or malicious applications.
4. Content Security: The firewall blocks harmful or unauthorized content, such as malware, viruses, and phishing attempts.
5. Wi-Fi Network Protection: NGEN Firewall secures Wi-Fi networks by monitoring and controlling access to the network.

Identity and Access Management (IAM)

IAM tools are software used to manage user identities and access within an organization. IAM tools help organizations control who can access resources, applications, and data while ensuring compliance with the organization's security policies.

Key Functions of IAM Tools include:

1. Authentication: IAM tools allows users to authenticate using credentials such as usernames and passwords or advanced methods like biometrics or tokens.
2. Authorization: IAM tools enable organizations to regulate user access to resources, applications, and data based on roles, departments, or other security policies.
3. Identity Management: IAM tools enables organizations to manage user identities including the creation, modification, and deletion of user accounts.
4. Audit and Reporting: IAM tools enable organizations to audit and reports on user activities, allowing organizations to monitor and optimize security policies.

Core SW adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara beberapa switch lainnya dalam sebuah jaringan. Berikut beberapa fungsi utama dari core switch:

1. Menghubungkan Switch Lainnya: Core switch menghubungkan beberapa switch lainnya dalam sebuah jaringan, sehingga memungkinkan komunikasi antara perangkat yang terhubung ke switch tersebut.
2. Mengatur Lalu Lintas Data: Core switch mengatur lalu lintas data antara switch lainnya, sehingga memungkinkan data untuk dikirimkan dengan efisien dan efektif.
3. Meningkatkan Kecepatan Jaringan: Core switch dapat meningkatkan kecepatan jaringan dengan mengurangi latency dan meningkatkan throughput.
4. Mengatur Akses ke Jaringan: Core switch dapat mengatur akses ke jaringan, sehingga memungkinkan hanya perangkat yang berhak untuk mengakses jaringan.

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah melakukan investasi untuk pengembangan teknologi informasi yang berfokus pada pekerjaan instalasi CCTV surveillance system dan perangkat pendukung dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp2.982.464.000.

REALISASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI 2024

Laporan pelaksanaan program kerja Sistem Informasi di PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Kerja Manajemen yang mendukung program Digitalisasi Administrasi Kantor (Non Operasional).
 - a. Implementasi sistem ERP-SAP serta pendampingan user implementasi SAP telah selesai dilaksanakan;
 - b. Implementasi sistem P-EPROC, P-CICO, P-EATS dan Portaverse telah selesai dilaksanakan dan digunakan;
 - c. Implementasi Sistem E-Materai pada tagihan Nota di Lingkungan PT. Indonesia Kendaraan Terminal telah dilaksanakan mulai bulan Juni 2024;
 - d. Implementasi dan stabilisasi Sistem Customer Portal (CCS) untuk modul pendaftaran customer, keluhan pelanggan, simulasi tarif, tracking cargo dan monitoring nota;
 - e. Implementasi roll out Sistem Billing – Praya di Cabang Jakarta Domestik dan Internasional dan area Satelit Belawan, Makassar, Pontianak, Balikpapan dan Banjarmasin telah selesai dilaksanakan dan digunakan.
2. Program Kerja Manajemen yang mendukung program Transformasi, Standarisasi dan Digitalisasi Terminal dan proses Bisnis Operasional:
 - a. Pengembangan sistem PTOS-C Jakarta Domestik dan Internasional meliputi modul Booking, Planning, Operation, Controlling, Reporting untuk cabang Jakarta terminal Domestik telah selesai diimplementasikan dan di terminal Internasional telah memasuki tahap uji coba dan vessel trail.

Core SW is a network device that serves as the central connection between several other switches in a network. Key Functions of a Core Switch include:

1. Connecting Other Switches: The core switch connects several other switches in a network, allowing communication between devices connected to the switch.
2. Managing Data Traffic: the core switch manages data traffic between other switches allowing data to be sent efficiently and effectively.
3. Increasing Network Speed: the core switch can increase network speed by reducing latency and increases throughput.
4. Controlling Network Access: the core switch can manage access to the network, ensuring that only authorized devices to access the network.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

Throughout 2024, the Company has invested in the development of information technology focused on the installation of CCTV surveillance systems and supporting devices by realizing a budget of Rp2,982,464,000.

REALIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY PROGRAM IN 2024

Report on the Implementation of Information System Work Program at PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk until the 4th quarter of 2024 is as follows:

1. Management Work Program Supporting Office Administration Digitalization (Non-Operational)
 - a. Implementation of ERP-SAP system and user assistance for SAP implementation has been completed.
 - b. Implementation of P-EPROC, P-CICO, P-EATS, and Portaverse systems has been completed and is in use.
 - c. Implementation of E-Stamp Duty System for Invoice Notes within PT. Indonesia Kendaraan Terminal has been carried out since June 2024.
 - d. Implementation and stabilization of Customer Portal System (CCS) for customer registration, customer complaints, tariff simulation, cargo tracking, and invoice monitoring.
 - e. Rollout implementation of the Billing System – Praya at Jakarta Domestic and International branches and Satellite areas in Belawan, Makassar, Pontianak, Balikpapan, and Banjarmasin has been completed and used.
2. Management Work Program Supporting Transformation, Standardization, and Digitalization of Terminal and Operational Business Processes:
 - a. Development of PTOS-C system for Jakarta Domestic and International covering modules for Booking, Planning, Operation, Controlling, and Reporting for Jakarta Domestic Terminal branch has been completed and has entered trial and vessel trial phase at International Terminal.



- b. Pengembangan sistem PTOS-C di Terminal Satelit meliputi modul *Booking, Planning, Operation, Controlling, Reporting* untuk terminal Satelit Belawan telah selesai diimplementasikan digunakan serta di terminal satelit Makassar saat ini telah memasuki tahap *go-live* dan stabilisasi.
 - c. Implementasi *roll out* Sistem *Billing* Praya di Cabang Jakarta Domestik dan Internasional dan area Satelit Belawan, Makassar, Pontianak, Balikpapan dan Banjarmasin telah selesai dilaksanakan dan digunakan;
 - d. Pengembangan IBS Terminal Domestik dan Internasional Cabang Jakarta meliputi modul *Order Manajemen, Tarif, Billing dan Payment* di Cabang Jakarta terminal Domestik telah diimplementasikan dan terminal Internasional dalam proses uji coba dan *vessel trial* persiapan *go-live*;
 - e. Pengembangan sistem PTOSC dan sistem IBS Terminal Satelit Belawan dan Makassar meliputi modul *Booking, Planning, Operation, Controlling, Reporting* untuk pada saat ini telah selesai diimplementasikan di Satelit Belawan dan Satelit Makassar;
 - f. Pengembangan Integrasi sistem *Car Maker* dan *Custom Modul Bea Cukai (AMS)* di Terminal Internasional Jakarta yang meliputi modul *Operation, Controlling, dan Reporting* pada saat ini telah memasuki tahap testing dan ujicoba.
3. Program Kerja Manajemen Peningkatan Kapasitas Terminal Kendaraan bidang Teknologi Informasi:
 - a. Pengembangan infrastruktur perangkat IT dan modul aplikasi pendukung kegiatan operasional di beberapa terminal Satelit dan Area Lini 2 telah diimplementasikan di PDC PT. Airin, Satelit Balikpapan dan Satelit Banjarmasin;
 - b. Penambahan dan pemasangan perangkat pendukung PTOSC Cabang Jakarta yaitu kamera CCTV, Akses *Point, Handheld* dan *Handy Talkie* di Area Domestik dan Internasional Cabang Jakarta dalam mendukung program RKM Transformasi Standarisasi & Digitalisasi saat ini sudah dilaksanakan di Terminal Domestik dan Terminal Internasional.
 - c. Program investasi pekerjaan Instalasi CCTV *Surveillance System* dan Perangkat Pendukung telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2024.
 - d. Penambahan dan pemasangan perangkat pendukung PTOSC di terminal Satelit Belawan dan Makassar yaitu kamera CCTV, Akses *Point, Handheld* dan *Handy Talkie* di Area Domestik dan Internasional Cabang Jakarta dalam mendukung program RKM Transformasi Standarisasi & Digitalisasi saat ini telah dilaksanakan di bulan Oktober di Satelit Belawan dan pada bulan Desember di Satelit Makassar.
- b. Development of PTOS-C system at Satellite Terminals, covering *Booking, Planning, Operation, Controlling, and Reporting* modules for Belawan Satellite Terminal has been completed and is in the *go-live* and stabilization phase for Makassar Satellite Terminal.
 - c. Rollout implementation of *Billing System* – Praya at Jakarta Domestic and International branches and Satellite areas in Belawan, Makassar, Pontianak, Balikpapan, and Banjarmasin has been completed and used.
 - d. Development of IBS for Jakarta Domestic and International Terminals, covering *Order Management, Tariff, Billing, and Payment* modules at Jakarta Domestic Terminal branch has been implemented and International Terminal is in the trial and vessel trial process in preparation for *go-live*.
 - e. Development of PTOSC system and IBS system Terminal Satellite for Belawan and Makassar, covering *Booking, Planning, Operation, Controlling, and Reporting* modules which have been implemented at Belawan and Makassar Satellite Terminals.
 - f. Development of integration system between *Car Maker* and *Custom Module (AMS)* at Jakarta International Terminal, covering *Operation, Controlling, and Reporting* modules, which is currently in the testing and trial phase.
3. Management Work Program for Enhancing Vehicle Terminal Capacity in Information Technology
 - a. Development of IT device infrastructure and supporting application modules for operational activities at several Satellite Terminals and Line-2 Areas has been implemented at PDC PT. Airin, Balikpapan Satellite Terminal, and Banjarmasin Satellite Terminal.
 - b. Addition and installation of PTOSC supporting devices at Jakarta branch, namely CCTV cameras, access points, handheld devices, and handy talkies in Domestic and International areas, to support the Transformation, Standardization, & Digitalization program which has been implemented in Domestic and International Terminals.
 - c. Investment in CCTV *Surveillance System* installation and supporting devices has been completed in December 2024.
 - d. Addition and installation of PTOSC supporting devices at Belawan and Makassar Satellite Terminals, namely CCTV cameras, access points, handheld devices, and handy talkies in Domestic and International areas of Jakarta Branch in support of RKM Transformation Standardization & Digitalization program has been implemented in October for Belawan Satellite Terminal and in December for Makassar Satellite Terminal.

4. Program Kerja Manajemen IT <i>Governance & Enterprise Architecture</i> a. Penyusunan IT <i>Master Plan</i> PT. IKT tahun 2025 sd 2029 telah selesai dilaksanakan yang merupakan tahap lanjutan dari IT <i>Master Plan</i> tahun 2020 sd 2024; b. Penyusunan Perdir Pedoman Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Informasi yang merupakan revisi dan pemutakhiran perdir tahun 2021. c. Penyusunan Sistem Operasi dan Prosedur baru yaitu : i) Prosedur Manajemen Problem & Insiden ii) Prosedur Pembangunan dan Perubahan SI iii) Prosedur pemeliharaan SI iv) Prosedur pengendalian hak akses data dan informasi 5. Program Kerja Manajemen Pemeliharaan Teknologi Informasi a. Pelaksanaan pekerjaan perawatan perangkat komputer dan perangkat jaringan di lingkungan PT. Indonesia Kendaraan Terminal; b. Pelaksanaan pekerjaan perawatan perangkat sistem <i>Automatic Gate System</i> Internasional dan Domestik di PT.IKT Cabang Jakarta; c. Pelaksanaan pekerjaan <i>Managed Service</i> Layanan <i>Surrounding Terminal Operating System</i> (TOS) dan <i>Virtual Private Server</i> PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; d. Pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan <i>Billing</i> Sistem di PT. Indonesia Kendaraan Terminal; e. Pelaksanaan pekerjaan Layanan Internet & <i>Backup link</i> 100 Mbps Pusat dan Jakarta PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; f. Pelaksanaan pekerjaan Layanan Internet & <i>Backup link</i> 35 Mbps Satelit Makassar dan Belawan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; g. Pelaksanaan pekerjaan Layanan Jaringan VPN IP dan Metro Link CIESA Bea Cukai di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; h. Pelaksanaan pekerjaan Sewa Layanan <i>Settlement Bank</i> tarif TFS <i>Car Carrier & Towing</i> Sistem <i>Autogate</i> PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; i. Pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Lisensi <i>Email Corporate</i> dan Ms. Office 365 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; j. Pelaksanaan perpanjangan Lisensi sistem Pentana untuk Auditor SPI PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; k. Pelaksanaan perpanjangan Lisensi <i>Bandwidth Management</i> Sangfor PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; l. Pelaksanaan pekerjaan <i>Change Request</i> penambahan modul web <i>Cartos Tools</i> pada aplikasi <i>CCS Portal</i>.	4. Management Work Program for IT Governance & Enterprise Architecture a. Preparation of IT Master Plan of PT. IKT for 2025-2029 has been completed which is a continuation of the 2020-2024 IT Master Plan. b. Preparation of the Board of Directors Regulation for Information System Policy and Governance Guidelines, which is a revision and update of Board of Directors Regulation in 2021. c. Preparation of new Operating Systems and Procedures, namely: i) Problem & Incident Management Procedure ii) Information System Development and Change Procedure iii) Information System Maintenance Procedure iv) Data and Information Access Control Procedure 5. Management Work Program for Information Technology Maintenance a. Maintenance of computer devices and network equipment within PT. Indonesia Kendaraan Terminal. b. Maintenance of Automatic Gate System equipment for International and Domestic terminals at PT. IKT Jakarta branches. c. Maintenance of Managed Service for Terminal Operating System (TOS) and Virtual Private Server services of PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. d. Provision of Billing System services at PT. Indonesia Kendaraan Terminal. e. Internet Service & Backup Link (100 Mbps) for the Head Office and Jakarta branch of PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. f. Internet Service & Backup Link (35 Mbps) for Makassar and Belawan Satellite Terminals of PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. g. VPN IP and Metro Link CIESA Customs network services at PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. h. Leasing of Settlement Bank Service for TFS Car Carrier & Towing System Autogate at PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. i. Renewal of Corporate Email and Microsoft Office 365 licenses at PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. j. Renewal of Pentana system license for SPI auditors at PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. k. Renewal of Sangfor Bandwidth Management license at PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. l. Implementation of Change Request for the addition of web Cartos Tools module in CCS Portal application.



FOKUS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2025

1. Revitalisasi Infrastruktur Perangkat Teknologi Informasi
 - Peremajaan jaringan perangkat dengan masa utilisasi diatas 5 tahun dan renovasi ruang server.
 - Peningkatan keamanan jaringan Terminal Satelit *Networking Capacity & Capability Improvement* (ITMP Inisiatif : *IT Infrastruktur Enhancement*)
2. Enhancement sistem PTOSC
 - Penyiapan data warehouse untuk *system Dashboard*
 - (ITMP Inisiatif: *Application & Data Enhancement*)
3. Sistem Identifikasi Personil di Terminal
 - Meningkatkan fungsi kontrol personil yang keluar masuk terminal internasional
 - Memenuhi standar keamanan terminal dan ruang server (ITMP Inisiatif : *IT Security Enhancement*)
4. Review Implementasi ITMP
 - Penyesuaian dan Revisi SOP dan Perdir Baru
 - *Awareness Cyber Attack* dan keamanan data pribadi (ITMP Inisiatif : *IT Governance Enhancement*)

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOCUS IN 2025

1. Revitalization of IT Infrastructure
 - Renewal of network devices with a utilization period of more than five years and server room renovation.
 - Improving network security of Satellite Terminals *Networking Capacity & Capability Improvement*. (ITMP Initiative: *IT Infrastructure Enhancement*)
2. PTOSC System Enhancement
 - Preparation of a data warehouse for Dashboard system.
 - (ITMP Initiative: *Application & Data Enhancement*)
3. Personnel Identification System at Terminals
 - Strengthening personnel control for those entering and exiting the international terminal.
 - Ensuring compliance with terminal and server room security standards. (ITMP Initiative: *IT Security Enhancement*)
4. ITMP Implementation Review
 - Adjustment and revision of new SOPs and Board of Directors Regulations (Perdir).
 - Awareness about cyberattacks and personal data security. (ITMP Initiative: *IT Governance Enhancement*)

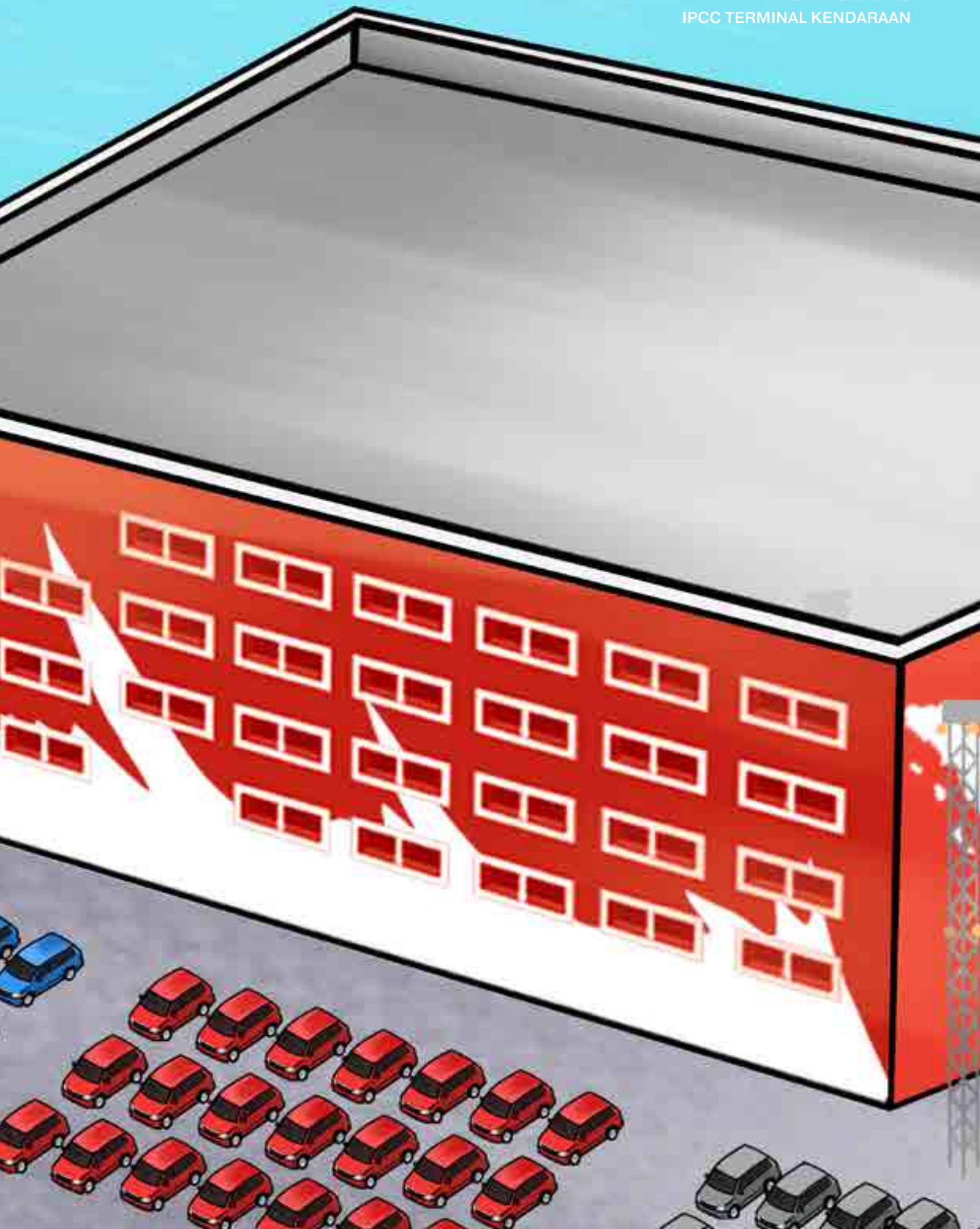


Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Peningkatan kinerja operasi tak lepas dari inovasi dan perbaikan layanan yang terus dilakukan. Hal ini kemudian berimbas positif pada kinerja keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan akan layanan IPCC.

The improvement in operational performance is inseparable from the ongoing innovations and service enhancements. This has positively affected financial performance and stakeholders' trust in IPCC's services.



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRIAL OVERVIEW

Perekonomian global pada tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi laju pertumbuhannya. Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* (IMF), proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,2%, sedikit menurun dibandingkan dengan 3,3% pada tahun 2023. Meskipun inflasi global menunjukkan tren penurunan, IMF memperingatkan bahwa tarif impor yang diusulkan oleh Amerika Serikat dapat menambah ketidakpastian ekonomi dan berpotensi memperlambat pertumbuhan.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan yang positif meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% secara tahunan (*year-on-year/yoy*), sedikit menurun dibandingkan dengan 5,05% pada tahun 2023. Seluruh lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif, dengan sektor jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 9,80%. Namun, Indonesia menghadapi potensi dampak dari kebijakan tarif impor yang diusulkan oleh Amerika Serikat, yang dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 hingga 0,5 poin persentase.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan, termasuk deregulasi, pemotongan pajak, dan pelonggaran kebijakan impor untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan luar negeri negara mitra dagang utama. Upaya ini diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga daya saing Indonesia di kancah global.

The global economy in 2024 faced various challenges that affect its growth rate. Based on data from the International Monetary Fund (IMF), the global economic growth projection for 2024 is estimated at 3.2%, slightly lower than 3.3% in 2023. Although global inflation showed a downward trend, the IMF warns that the import tariffs proposed by the United States could add to economic uncertainty and potentially slow growth.

On the other hand, Indonesia's economy in 2024 is recorded a positive growth, although slightly slower than the previous year. Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), Indonesia's economy grew by 5.03% year-on-year (yoy), slightly decreased from 5.05% in 2023. All business sectors experienced a positive growth, with the other services sector experiencing the highest increase at 9.80%. However, Indonesia also dealt with potential impacts from the import tariff policies proposed by the United States, which could reduce Indonesia's economic growth rate by 0.3 to 0.5 percentage points.

In facing the dynamics of the global and domestic economy, the Indonesian government continues its efforts to maintain economic stability through various policies, including deregulation, tax cuts, and easing import regulations to reduce the negative impact of foreign policies from key trading partners. These efforts are expected to support the national economic growth targets and maintain Indonesia's competitiveness on the global stage.



KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2024

STRATEGIC POLICIES 2024



Adapun fokus strategi IPCC dalam menjalin kemitraan dan melakukan ekspansi, sebagai berikut:

1. Transfer *operatorship* terminal kendaraan di area kerja Pelindo;
2. Integrasi dan standarisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi dan sistemasi;
3. Layanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi dan *enabler* terpusat;
4. Penambahan kapasitas *car distribution management* (CDM);
5. Digitalisasi proses bisnis;
6. Peningkatan *corporate value* dan kinerja harga saham melalui *buyback*; dan
7. *Full dedicated car terminal* (fase 1).

The focus of IPCC's strategy in establishing partnerships and conducting expansion is as follows:

1. Transfer operatorship of vehicle terminals in Pelindo's work area;
2. Integration and standardization of operations, with a focus on digitalization and systematization;
3. Integrated services and operations with centralized functions and enablers;
4. Addition of car distribution management (CDM) capacity;
5. Digitalization of business processes;
6. Increasing corporate value and stock price performance through buybacks; and
7. Full dedicated car terminal (phase 1).



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

SEGMENT USAHA

Laporan Keuangan Perseroan telah menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi, di mana Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam beberapa segmen yang menyediakan jasa pelayanan terminal, jasa pelayanan barang, jasa rupa-rupa dan pengusahaan fasilitas dan utilitas.

Segmen Usaha IPCC

OPERATING SEGMENT

The Company's Financial Statement has implemented PSAK 5 regarding Operating Segments, which the Company operates and manages business in several segments providing terminal services, cargo services, miscellaneous services as well as facilities and utilities services.

IPCC Business Segment

Segmen Usaha IPCC

IPCC Business Segment

Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal and Cargo Services	Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	Non Segmen Non-Segment

Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perseroan, berikut disampaikan pendapatan serta nilai aset Perseroan yang dikontribusikan oleh masing-masing segmen.

In order to provide an initial overview of the business scale of each segment and its contribution to the Company, the following is the Company's revenue and asset value contributed by each segment.

Jumlah dan Kontribusi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Operasi IPCC

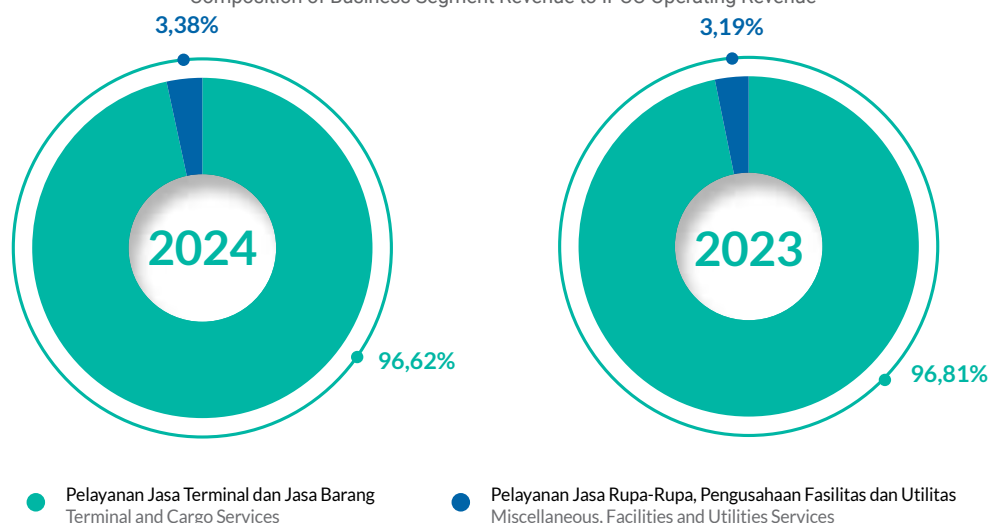
Amount and Contribution of Business Segment Revenue to IPCC Operating Revenue

Segmen Usaha Business Segment	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal and Cargo Services	796.750	96,62	711.763	96,81	84.987	11,94	↑
Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	27.846	3,38	23.442	3,19	4.403	18,78	↑
Non Segmen Non-Segment	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenue	824.596	100,00	735.205	100,00	89.391	12,16	↑



Komposisi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Operasi IPCC

Composition of Business Segment Revenue to IPCC Operating Revenue



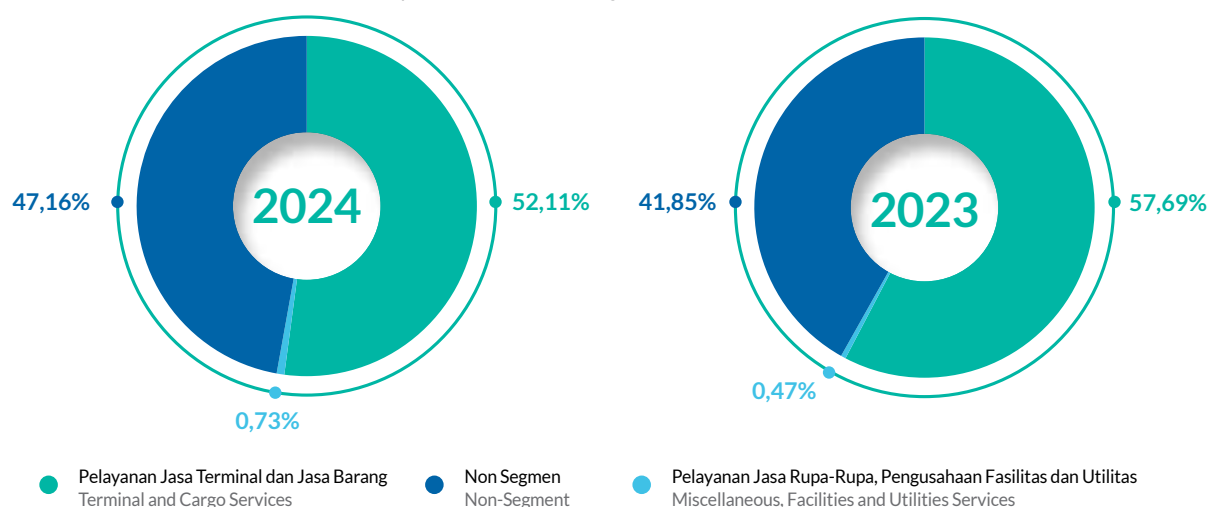
Jumlah dan Kontribusi Aset Segmen Usaha Terhadap Aset IPCC

Amount and Contribution of Business Segment Assets to IPCC Assets

Segmen Usaha Business Segment	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal and Cargo Services	964.472	52,11	1.031.623	57,69	(67.152)	(6,51)	↓
Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	13.486	0,73	8.322	0,47	5.164	62,05	↑
Non Segmen Non-Segment	872.781	47,16	748.369	41,85	124.412	16,62	↑
Jumlah Aset Operasi Total Operational Assets	1.850.739	100,00	1.788.315	100,00	62.424	3,49	↑

Komposisi Aset Segmen Usaha Terhadap Aset IPCC

Composition of Business Segment Assets to IPCC Assets



Dari tabel dan bagan di atas, dapat dilihat bahwa segmen Pelayanan Utilitas Jasa Terminal dan Jasa Barang menjadi segmen yang menopang bisnis inti Perseroan. Berikut disampaikan rincian kegiatan operasi dan profitabilitas dari masing-masing segmen usaha.

Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang

Pelayanan Jasa Terminal

IPCC menyediakan pelayanan jasa terminal untuk kegiatan bongkar muat mobil, alat berat, truk/bus, motor dan general cargo yang sebagian besar merupakan part dari alat berat yang berstatus *Completely Knock Down* (CKD). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang meliputi wilayah dermaga domestik Perseroan, dermaga eks. Presiden, dermaga 107-109, area Pelabuhan Pontianak, Balikpapan, Medan dan Makassar. Realisasi pelayanan jasa terminal dalam dua tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut:

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Pontianak 2023-2024

Realization of Terminal Service Segment at Pontianak Satellite Terminal 2023-2024

Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	27.420	25.819	1.601	6,20	↑
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	28.638	27.203	1.435	5,28	↑
	m3	1.178.986	1.073.078	105.908	9,87	↑
General Cargo General Cargo	PKGS	48.174	47.085	1.089	2,31	↑
	m3	48.174	47.085	1.089	2,31	↑
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading and Unloading	Unit	110.052	99.966	10.086	10,09	↑

Di sepanjang tahun 2024, Perseroan melaksanakan pelayanan terminal kendaraan Pontianak berupa bongkar muat mobil sebanyak 27.420 unit, meningkat 6,20% atau setara dengan 1.601 unit dibandingkan tahun 2023 sebanyak 25.819 unit. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan permintaan dari sektor konsumen rumah tangga, *dealer* otomotif serta kebutuhan armada transportasi penumpang dan sewa (rental).

Pada realisasi pelayanan terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truk, Bus) tahun 2024 sebanyak 28.638 unit, meningkat 5,28% atau setara dengan 1.435 unit dibandingkan tahun 2023 sebanyak 27.203 unit. Kenaikan ini disebabkan lonjakan aktivitas dari sektor logistik, proyek infrastruktur, pengadaan alat transportasi dan konstruksi oleh perusahaan Pemerintah dan Swasta.

The tables and charts above showed that the Utility Services, Terminal Services, and Cargo Services segments are the segments that support the Company's core business. The following is a breakdown of the operational activities and profitability of each business segment.

Terminal Services and CARGO Services

Terminal Services

IPCC provides terminal services for loading/unloading of cars, heavy equipment, trucks/buses, motorcycle and general cargo, most of which are parts of heavy equipment with Completely Knock Down (CKD) status. These activities are carried out at the International Terminal and Domestic Terminal which includes the Company's domestic dock area, ex. President's Pier, pier 107-109, Pontianak, Balikpapan, Medan and Makassar Port areas. The realization of terminal services in the last three years is shown in the following table:

Throughout 2024, the Company carried out Pontianak vehicle terminal services in the form of loading and unloading cars for 27,420 units, an increase of 6.20% or equivalent to 1,601 units compared to 2023 of 25,819 units. This was due to the growth in demand from household consumer sector, automotive dealers and the need for passenger transportation and rental fleets.

In the realization of terminal services for Heavy Vehicles (Heavy Equipment, Trucks, Buses) in 2024, there were 28,638 units, an increase of 5.28% or equivalent to 1,435 units compared to 2023 of 27,203 units. This increase was due to the surge in activity from the logistics sector, infrastructure projects, procurement of transportation equipment and construction by government and private companies.



Sementara itu, realisasi pelayanan terminal bongkar muat motor khususnya pada Terminal Domestik sebanyak 110.052 unit, meningkat 10,09% atau setara dengan 10.086 unit dibandingkan tahun 2023 sebanyak 99.966 unit motor. Kenaikan ini disebabkan permintaan dari segmen perorangan terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, serta meningkatnya kebutuhan armada untuk layanan ojek *online* dan pengiriman barang skala kecil.

Meanwhile, the realization of terminal services for loading and unloading motorcycles, especially at the Domestic Terminal, was 110,052 units, an increase of 10.09% or equivalent to 10,086 units compared to 2023 of 99,966 motorbikes. This increase was due to the demand from individual segments, especially the lower middle class, as well as the increasing need for fleets for online motorcycle taxi services and small-scale goods delivery.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Makassar 2023-2024

Realization of Terminal Services Segment at Makassar Satellite Terminal 2023-2024

Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil <i>Car Loading and Unloading</i>	Unit	93.298	86.853	6.445	7,42	↑
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) <i>Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)</i>	Unit	35.324	24.796	10.528	42,46	↑
General Cargo <i>General Cargo</i>	m3	1.437.889	862.002	575.887	66,81	↑
	PKGS	-	-	-	-	-
Bongkar Muat Motor <i>Motorcycle Loading and Unloading</i>	m3	-	-	-	-	-
	Unit	118.284	117.186	1.098	0,94	↑

Terminal Kendaraan Makassar mulai dioperasikan oleh pada bulan Mei tahun 2022, di mana pelayanan jasa terminal untuk bongkar muat mobil meningkat 43,74% di tahun 2023 menjadi sebanyak 86.853 unit. Sementara itu, di sepanjang tahun 2024 Perseroan melakukan pelayanan jasa terminal untuk bongkar muat mobil sebanyak 93.298 unit, meningkat 7,42% atau setara dengan 6.445 unit dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan kelas menengah dan daya beli masyarakat di Makassar dan sekitarnya. Kemudian perluasan kawasan permukiman, meningkatnya mobilitas individu serta kemudahan akses pembiayaan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Di sisi lain, peran *dealer* otomotif yang aktif dalam promosi dan pembukaan cabang baru turut memperluas akses pasar, serta menjadikan mobil pribadi sebagai salah satu kebutuhan utama transportasi di kawasan ini. Sehingga membuat Terminal Kendaraan Makassar menjadi simpul utama distribusi mobil penumpang menuju kawasan timur Indonesia.

Makassar Vehicle Terminal began operating in May 2022, where terminal services for loading and unloading cars increased by 43.74% in 2023 to 86,853 units. Meanwhile, throughout 2024 the Company provided terminal services for loading and unloading cars of 93,298 units, an increase of 7.42% or equivalent to 6,445 units compared to 2023. This increase occurred along with the growth of the middle class and purchasing power of the people in Makassar and its surroundings. Then the expansion of residential areas, increasing individual mobility and easy access to financing are the main factors that encourage people to have private vehicles. On the other hand, the role of automotive dealers who are active in promotions and opening new branches also expands market access, and makes private cars one of the main transportation needs in this area. Thus making Makassar Vehicle Terminal became the main node for the distribution of passenger cars to eastern Indonesia.

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truck, Bus) di sepanjang tahun 2024 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 35.324 unit, meningkat 42,46% atau setara dengan 10.528 unit dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 24.796 unit. Pertumbuhan tajam ini terutama berasal dari sektor proyek infrastruktur, logistik, dan konstruksi yang berkembang pesat di kawasan timur. Berbagai proyek pembangunan jalan, pelabuhan, dan kawasan industri memerlukan alat berat dan kendaraan logistik dalam jumlah besar. Peran strategis Terminal Kendaraan Makassar sebagai hub distribusi kendaraan ke Indonesia timur menjadi semakin penting.

The realization of terminal services for Heavy Vehicles (Heavy Equipment, Trucks, Buses) throughout 2024 has seen loading and unloading of 35,324 units, an increase of 42.46% or equivalent to 10,528 units compared to the previous year of 24,796 units. This sharp growth is mainly derived from the rapidly growing infrastructure, logistics, and construction projects in the eastern region. Various road, port, and industrial area development projects require large amounts of heavy equipment and logistics vehicles. The strategic role of Makassar Vehicle Terminal as a hub for vehicle distribution to eastern Indonesia is becoming increasingly important.

Sementara itu, realisasi pelayanan jasa terminal untuk motor sepanjang tahun 2024 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 118.284 unit, meningkat 0,94% atau setara dengan 1.098 unit dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 117.186 unit. Pertumbuhan ini sebagian didorong oleh sektor informal, seperti kurir pengantaran, dan layanan ojek *online*, serta pembelian oleh masyarakat di daerah pinggiran kota yang belum sepenuhnya terjangkau transportasi umum. Meskipun pertumbuhannya melambat, motor tetap menjadi moda transportasi utama di wilayah urban dan semi-urban.

Meanwhile for the realization of terminal service for motorcycles, throughout 2024 loading and unloading has been carried out for 118,284 units, an increase of 0.94% or equivalent to 1,098 units compared to the previous year of 117,186 units. This growth is partly driven by the informal sector, such as delivery couriers and online motorcycle taxi services, as well as purchases by people in suburban areas that are not yet fully accessible by public transportation. Although the growth has slowed, motorcycles remain the main mode of transportation in urban and semi-urban areas.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Belawan 2023-2024

Realization of Terminal Service Segments at Belawan Satellite Terminal 2023-2024

Perihal <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil <i>Car Loading and Unloading</i>	Unit	53.787	64.210	(10.423)	(16,23)	↓
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) <i>Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)</i>	Unit	2.119	2.696	(577)	(21,40)	↓
	m3	97.116	123.479	(26.363)	(21,35)	↓
General Cargo <i>General Cargo</i>	PKGS	-	-	-	-	-
	m3	-	-	-	-	-
Bongkar Muat Motor <i>Motorcycle Loading and Unloading</i>	Unit	470	351	119	33,90	↑

Terminal Kendaraan Belawan mulai dioperasikan pada bulan Januari tahun 2022. Pada tahun 2024, Perseroan melakukan pelayanan jasa terminal berupa bongkar muat mobil sebanyak 53.787 unit, turun 16,23% atau setara dengan 10.423 unit dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 64.210 unit. Penurunan ini terutama disebabkan adanya perpindahan pola transportasi dari sebelumnya menggunakan kapal laut beralih ke moda transportasi darat menggunakan *car carrier*. Faktor lain yang menyebabkan penurunan tersebut karena kenaikan suku bunga yang dipicu oleh inflasi global serta ketidakpastian ekonomi.

Belawan Vehicle Terminal began operating in January 2022. In 2024, the Company provided terminal services in the form of loading and unloading of 53,787 cars, a decrease of 16.23% or equivalent to 10,423 units compared to the previous year of 64,210 units. This decline was mainly due to the shift in transportation patterns from previously using ships to land transportation using car carriers. Other factors that caused the decline were the increase in interest rates triggered by global inflation and economic uncertainty.

Sejak Pemerintah Indonesia melakukan program untuk mendorong pembangunan infrastruktur, salah satunya tol yang menyambungkan Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Perseroan membukukan realisasi pelayanan jasa terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truk, Bus) tahun 2024 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 2.119 unit, turun 21,40% atau setara dengan 577 unit dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 2.696 unit. Penurunan ini disebabkan penurunan aktivitas proyek infrastruktur dan tambang di wilayah Sumatra dan harga komoditas tambang serta sektor perkebunan mengalami pelemahan.

Since the Indonesian Government executed a program to encourage infrastructure development, one of which is the toll road connecting Belawan-Medan-Tanjung Morawa, the Company recorded the realization of terminal services for Heavy Vehicles (Heavy Equipment, Trucks, Buses), where in 2024, loading and unloading has been carried out for 2,119 units, a decrease of 21.40% or equivalent to 577 units compared to the previous year of 2,696 units. This decline was due to a decline in infrastructure and mining project activities in Sumatra region and the weakening of mining commodity prices and plantation sector.



Realisasi pelayanan jasa terminal untuk motor sepanjang tahun 2024 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 470 unit, meningkat 33,90% atau setara dengan 119 unit dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 351 unit. Kenaikan ini disebabkan daya beli masyarakat menurun yang dipicu oleh inflasi meningkat sehingga kebutuhan pokok lebih di prioritaskan. Naiknya suku bunga dan belum pulih sepenuhnya dari tekanan ekonomi pasca pandemi.

The realization of terminal services for motorcycles throughout 2024 has seen loading and unloading of 470 units, an increase of 33.90% or equivalent to 119 units compared to the previous year of 351 units. This increase was due to the declining purchasing power of the community triggered by increasing inflation so that basic needs are prioritized. Rising interest rates and not yet fully recovered from the economic pressures after the pandemic.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Balikpapan 2023-2024

Realization of Terminal Service Segment at Balikpapan Satellite Terminal 2023-2024

Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	72.637	-	72.637	-
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	74.221	-	74.221	-
	m3	2.648.456	-	2.648.456	-
General Cargo	PKGS	-	-	-	-
General Cargo	m3	121.318	-	-	-
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading and Unloading	Unit	20.981	-	20.981	-

Terminal Kendaraan Balikpapan mulai dioperasikan pada bulan Oktober tahun 2023. Pada tahun 2024, Perseroan melakukan pelayanan jasa terminal berupa bongkar muat mobil sebanyak 17.037 unit, dan bongkar muat sebanyak 18.616 unit.

Balikpapan Vehicle Terminal started to operate in October 2023. In 2024, the Company provided terminal services in the form of loading and unloading 17,037 cars and loading and unloading 18,616 units.

Pelayanan Jasa Barang

IPCC melakukan pelayanan jasa barang, antara lain mobil, motor, alat berat, truck, bus, dan general cargo. Barang tersebut didistribusikan melalui dermaga umum baik untuk keperluan ekspor maupun impor di Terminal Internasional untuk perdagangan luar negeri serta kegiatan bongkar dan muat di Terminal Domestik pada perdagangan dalam negeri. Realisasi pelayanan jasa barang berdasarkan perdagangan dalam dua tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Cargo Services

IPCC provides cargo services, including cars, motorcycles, heavy equipment, trucks, buses, and general cargo. The cargo is distributed through public docks for both export and import purposes at the International Terminal for foreign trade and loading and unloading activities at the Domestic Terminal for domestic trade. The realization of cargo services by trading in the last two years as shown in the following table:



Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Barang Berdasarkan Perdagangan Luar Negeri 2023-2024

Realization of Cargo Services Segment by Foreign Trading 2023-2024

Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)	
Impor Import						
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	80.272	70.167	10.105	14,40	↑
Alat Berat/Truk/Bus Heavy Equipment/Truck/Bus	Unit	7.917	9.965	(2.048)	(20,55)	↓
	m3	718.483	910.972	(192.489)	(21,13)	↓
General Cargo General Cargo	PKGS	5.315	7.071	(1.756)	(24,83)	↓
	m3	54.635	51.984	2.651	5,10	↑
Ekspor Export						
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	359.688	380.872	(21.184)	(5,56)	↓
Alat Berat/Truk/Bus Heavy Equipment/Truck/Bus	Unit	2.838	2.725	113	4,15	↑
	m3	240.889	220.110	20.779	9,44	↑
General Cargo General Cargo	PKGS	1.791	2.096	(305)	(14,55)	↓
	m3	28.849	21.313	7.536	35,36	↑

Realisasi arus impor alat berat, truck dan bus tahun 2024 secara jumlah unit mengalami penurunan 20,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan faktor tahun politik, turunnya harga komoditas, serta menurunnya aktivitas konstruksi di Tanah Air.

The realization of the flow of imports of heavy equipment, trucks and buses in 2024, in terms of the number of units decreased by 20.55% compared to the previous year. This was caused by the factors such as political year, falling commodity prices, and declining construction activity in the country.

Begitu juga dengan arus ekspor alat berat, truck dan bus tahun 2024 yang mengalami kenaikan 4,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan di tingkat global khususnya negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara yang mengalami peningkatan di sisi infrastruktur pertambangan dan agrikultural.

Likewise, the flow of exports of heavy equipment, trucks and buses in 2024 increased by 4.15% compared to the previous year. This was due to increasing demand at the global level, especially in African, Middle Eastern and Southeast Asian countries which are experiencing improvements in mining and agricultural infrastructure.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Barang Berdasarkan Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2023-2024

Realization of Cargo Services Segment by Domestic Trading 2023-2024

	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)	
Bongkar Unloading						
Mobil Car	Unit	10.035	180.808	(170.773)	(94,45)	↓
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	15.096	52.841	(37.745)	(71,43)	↓
	m3	571.621	1.984.515	(1.412.894)	(71,20)	↓
General Cargo General Cargo	PKGS	1.010	46.610	(45.600)	(97,83)	↓
	m3	3.177	59.401	(56.224)	(94,65)	↓
Motor Motorcycle	Unit	2.767	213.459	(210.692)	(98,70)	↓



Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Barang Berdasarkan Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2023-2024

Realization of Cargo Services Segment by Domestic Trading 2023-2024

	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)	
Muat Loading						
Mobil Car	Unit	129.811	165.290	(35.479)	(21,46)	↓
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	24.204	56.658	(32.454)	(57,28)	↓
	m3	1.022.960	2.117.940	(1.094.980)	(51,70)	↓
General Cargo General Cargo	PKGS	306	1.089	(783)	(71,90)	↓
	m3	6.985	12.890	(5.905)	(45,81)	↓
Motor Motorcycle	Unit	79.376	102.054	(22.678)	(22,22)	↓

Secara umum realisasi bongkar muat segmen CBU, kendaraan berat, general cargo dan motor di tahun 2024 rata-rata menunjukkan penurunan yang terutama disebabkan faktor tahun politik, turunnya harga komoditas, dan pengetatan aturan kepemilikan kendaraan bermotor, serta daya beli konsumen yang menurun.

In general, the realization of loading and unloading of CBU, heavy vehicles, general cargo and motorcycle segment in 2024 showed a decline, mainly due to the factor of political year, falling commodity prices, and tightening of motor vehicle ownership regulations, as well as declining consumer purchasing power.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang

Profitability and Financial Performance of Terminal Services and Cargo Services Segment

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The profitability and financial performance of Terminal Services and Cargo Services segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Financial Performance of Terminal Services and Cargo Services Segment	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenue	796.750	711.763	84.987	11,94	↑
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(474.311)	(406.004)	(68.306)	16,82	↑
Laba bruto Gross profit	322.439	305.759	16.681	5,46	↑
Posisi Keuangan Financial Position					
Aset segmen Segment assets	964.472	1.031.623	(67.152)	(6,51)	↓
Liabilitas segmen Segment liabilities	513.372	485.393	27.980	5,76	↑
Informasi Lainnya Other Information					



Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Financial Performance of Terminal Services and Cargo Services Segment	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pengeluaran modal <i>Capital expenditures</i>	16.662	27.344	(10.682)	(39,07)	↓
Penyusutan dan amortisasi segmen <i>Segment depreciation and amortization</i>	106.912	105.173	1.739	1,65	↑
Rasio-rasio Profitabilitas <i>Profitability Ratios</i>					
Margin Laba Bruto (%) <i>Gross Profit Margin (%)</i>	40,47	42,96	(2,49)		↓
Margin Laba Usaha (%) <i>Operating Profit Margin (%)</i>	40,47	42,96	(2,49)		↓
Imbal Hasil Aset (%) <i>Return on Assets (%)</i>	33,43	29,64	3,79		↑

Pada tahun 2024, total aset segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang tercatat sebesar Rp964,47 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,51% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.031,62 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh optimalisasi aset tetap serta upaya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, liabilitas segmen mengalami peningkatan sebesar 5,76%, dari Rp485,39 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp513,37 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan aktivitas operasional serta komitmen jangka pendek yang lebih tinggi untuk mendukung ekspansi dan peningkatan layanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan aset, segmen tetap mampu menjaga struktur keuangannya secara stabil dengan pengelolaan liabilitas yang terkendali. Strategi penguatan neraca terus menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di tengah tantangan dinamika industri kepelabuhanan.

Pada tahun 2024, pengeluaran modal (*capital expenditure*) segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang tercatat sebesar Rp16,66 miliar, mengalami penurunan signifikan sebesar 39,07% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27,34 miliar. Penurunan ini mencerminkan strategi perusahaan yang lebih selektif dalam alokasi belanja modal, dengan fokus pada proyek-proyek prioritas yang memberikan nilai tambah optimal dan efisiensi operasional.

Sebaliknya, beban penyusutan dan amortisasi menunjukkan peningkatan tipis sebesar 1,65%, dari Rp105,17 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp106,91 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan penambahan aset tetap dari periode sebelumnya yang mulai mengalami penyusutan penuh selama tahun berjalan.

In 2024, the total assets of Terminal Services and Cargo Services segment amounted to Rp964.47 billion, a decrease of 6.51% compared to the previous year of Rp1,031.62 billion. This decrease was mainly due to the optimization of fixed assets as well as efficiency efforts in the management of resources carried out on an ongoing basis.

Meanwhile, segment liabilities increased by 5.76%, from Rp485.39 billion in 2023 to Rp513.37 billion in 2024. This increase reflects increased operational activities as well as higher short-term commitments to support expansion and service improvements.

This condition shows that despite the decline in assets, the segment is still able to maintain a stable financial structure with manageable liabilities. Balance sheet strengthening strategy continues to be the main focus in supporting sustainable business growth amidst the challenges of port industry dynamics.

In 2024, the capital expenditure of Terminal Services and Cargo Services segment was recorded at Rp16.66 billion, a significant decrease of 39.07% compared to the previous year of Rp27.34 billion. This decrease reflects the Company's strategy to be more selective in capital expenditure allocation, focusing on priority projects that provide optimal added value and operational efficiency.

In contrast, depreciation and amortization expenses showed a slight increase of 1.65%, from Rp105.17 billion in 2023 to Rp106.91 billion in 2024. This increase is in line with the addition of fixed assets from the previous period which began to undergo full depreciation during the current year.



Meskipun belanja modal turun, perusahaan tetap menjaga kesinambungan operasional dengan memaksimalkan utilisasi aset yang ada dan memastikan pemeliharaan yang memadai. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga efisiensi biaya sekaligus mempertahankan kinerja layanan yang andal bagi para pengguna jasa.

Tahun 2024 menjadi periode yang penuh tantangan bagi segmen Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang, terutama dalam menjaga margin keuntungan di tengah dinamika biaya operasional. Margin laba bruto dan margin laba usaha tercatat sebesar 40,47%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 42,96%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan, terutama pada komponen biaya operasional yang terdampak oleh fluktuasi harga dan kebutuhan layanan yang semakin kompleks. Kemampuan perusahaan dalam mengelola aset juga tercermin dari imbal hasil atas aset (ROA) yang mencapai 33,42% pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan efisiensi Perseroan dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola.

Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Pelayanan Rupa-rupa Usaha

Perseroan juga melakukan pelayanan rupa-rupa usaha yang diperoleh dari Mitra yang melakukan sewa ruangan serta kelengkapannya di kantor IPCC. Pada tahun 2024, Perseroan membukukan pendapatan Pelayanan Jasa Rupa-Rupa sebesar Rp27,29 miliar, meningkat hingga 198,49% atau setara dengan Rp18,15 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,14 miliar. Peningkatan terjadi terkait perubahan skema kontrak sewa lahan menjadi jasa operasi, yang sebelumnya dicatat di Pendapatan Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas menjadi pelayanan rupa-rupa usaha dan peningkatan karena mulai beroperasinya satelit Balikpapan per oktober 2024.

Sementara itu, Pendapatan Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas yang meliputi sewa tempat dan ruangan di kantor IPCC bagi para mitra dibukukan sebesar Rp550 juta per 31 Desember 2024, mengalami penurunan hingga 96,15% atau setara dengan Rp13,75 miliar dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp14,30 miliar. Penurunan ini terjadi terkait perubahan skema kontrak sewa lahan menjadi jasa operasi.

Rincian Pendapatan Pelayanan Rupa-Rupa dalam dua tahun terakhir sebagai berikut.

Despite the decrease in capital expenditure, the Company continues to maintain operational sustainability by maximizing the utilization of existing assets and ensuring adequate maintenance. This approach is expected to maintain cost efficiency while maintaining reliable service performance for service users.

The year 2024 was a challenging period for the Terminal Services and Goods Services segments, especially in maintaining profit margins amidst the dynamics of operational expenses. Gross profit margin and operating profit margin were recorded at 40.47%, a slight decrease compared to the previous year which stood at 42.96%. This decline was largely due to an increase in cost of revenue, particularly in the operational expense component which was impacted by price fluctuations and increasingly complex service requirements. The Company's ability to manage its assets is also reflected in its return on assets (ROA) which reached 33.42% in 2024. This figure reflects the Company's efficiency in generating profit from assets under management.

Miscellaneous Services, Facilities and Utilities Services

Miscellaneous Services

The Company also provides miscellaneous services obtained from Partners renting space and equipment at IPCC office. In 2024, the Company recorded Miscellaneous Service revenue of Rp27.29 billion, an increase of 198.49% or Rp18.15 billion compared to the previous year of Rp9.14 billion. The increase occurred due to the change in land lease contract scheme to operating services, which was previously recorded in Facilities and Utilities Revenue to miscellaneous services and an increase due to the commencement of Balikpapan satellite operations per October 2024.

Meanwhile, Facilities and Utilities Services Revenue which includes renting space and rooms at IPCC office for partners was recorded at Rp550 million as of December 31, 2024, decreased by 96.15% or Rp13.75 billion compared to the previous year in the same period of Rp14.30 billion. This decline occurred in relation to changes in the land lease contract scheme to operational services.

The details of Miscellaneous Services Revenue in the last two years are as follows.



Realisasi Segmen Pelayanan Rupa-Rupa Usaha 2023-2024

Realization of Miscellaneous Services Segment 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Pelayanan Jasa Rupa-Rupa <i>Miscellaneous Services Revenue</i>	27.296	9.145	18.151	198,49	↑
Pendapatan Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas (sewa ruangan kantor) <i>Facilities and Utilities Services Revenue (office space rental)</i>	550	14.298	(13.748)	(96,15)	↓

Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Dalam rangka memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal, Perseroan melakukan jasa pengusahaan fasilitas dan utilitas berupa sewa ruangan kantor yang mencakup fasilitas air dan listrik. Rincian jasa pengusahaan fasilitas dan utilitas dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Facilities and Utilities Services

In order to optimally utilize the assets owned, the Company provides facilities and utilities services in the form of office space rentals that include water and electricity facilities. The details of facilities and utilities services in the last three years are as follows:

Realisasi segmen Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas 2023-2024

Realization of Facilities and Utilities Services Segment 2023-2024

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)	
Sewa Ruang Kantor (m2) <i>Office Space Rental (m2)</i>	257	182	75	41,21	↑

Realisasi ruangan kantor yang disewakan selama tahun 2024 adalah seluas sebanyak 257 m2, lebih luas dibandingkan tahun 2023 seluas 182 m2. Ruang kantor tersebut disewakan kepada 12 mitra Perseroan dengan luas masing-masing ruangan berukuran variatif dari ukuran 12 m2 sampai 24 m2.

The realization of office space rented during 2024 was 257 m2, larger/smaller than in 2023 which was 182 m2. The office space w measuring 24 m2, and in the form of land lease to 1 (one) partner with an area of 14 m2.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of Miscellaneous, Facilities and Utilities Services Segment

The profitability and financial performance of Miscellaneous, Facilities and Utilities Services segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Financial Performance of Miscellaneous, Facilities and Utilities Services Segment	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenue	27.846	23.442	4.403	18,78	↑
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(2.768)	(2.723)	(44)	1,63	↑



Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Financial Performance of Miscellaneous, Facilities and Utilities Services Segment	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Laba bruto Gross profit	25.078	20.719	4.359	21,04	↑
Posisi Keuangan Financial Position					
Aset segmen Segment assets	13.486	8.322	5.164	62,05	↑
Informasi Lainnya Other Information					
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	295	295	-	-	-
Rasio-rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	90,06	88,38	1,68		↑
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	90,06	88,38	1,68		↑
Imbal Hasil Aset (%) Return on Assets (%)	185,95	248,96	(63,01)		↓

Selama tahun 2024, segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan dalam hal aset. Total aset segmen ini tercatat sebesar Rp13,486 miliar, meningkat 62,05% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp8,322 miliar. Kenaikan ini mencerminkan adanya penambahan kapasitas dan pengembangan layanan pendukung yang diupayakan untuk memperkuat peran segmen ini sebagai penunjang kegiatan operasional utama perusahaan.

Selama tahun 2024, fokus pengelolaan segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas terlihat dari stabilnya nilai penyusutan dan amortisasi, yang tercatat sebesar Rp295 juta, sama seperti tahun sebelumnya. Konsistensi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penambahan aset tetap yang signifikan selama periode berjalan, dan kegiatan operasional sebagian besar masih bertumpu pada aset yang telah ada.

Meski tidak ada belanja modal baru di tahun ini, segmen ini tetap berperan penting dalam mendukung ekosistem layanan perusahaan. Upaya peningkatan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset yang ada menjadi prioritas, sembari mempersiapkan fondasi untuk pengembangan di tahun-tahun mendatang.

Kinerja profitabilitas segmen ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif sepanjang tahun 2024. Margin laba bruto meningkat menjadi 90,06%, naik dari 88,36% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya langsung, di tengah pertumbuhan pendapatan operasional yang cukup signifikan.

During 2024, the Miscellaneous Services, Facilities and Utilities segment recorded significant growth in terms of assets. The total assets of this segment were recorded at Rp13.486 billion, an increase of 62.05% compared to Rp8.322 billion in 2023. This increase reflects the additional capacity and development of supporting services that are sought to strengthen the role of this segment as a support for the Company's main operational activities.

During 2024, the focus on managing the Miscellaneous Services, Facilities and Utilities segment was evident from the stable depreciation and amortization value, which was recorded at Rp295 million, the same as the previous year. This consistency shows that there were no significant additions to fixed assets during the period, and operational activities are still largely based on existing assets.

Although there was no new capital expenditure this year, this segment still plays an important role in supporting the Company's service ecosystem. Efforts to improve efficiency and optimize the utilization of existing assets are prioritized, while preparing the foundation for development in the coming years.

The segment's profitability performance showed a very positive development throughout the year. Gross profit margin increased to 90.06%, up from 88.36% in the previous year. This improvement reflected efficiency in direct cost management, amid significant growth in operating revenues.

Tidak hanya itu, margin laba usaha juga mencatat kenaikan menjadi 90,06%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan yang dihasilkan berhasil dikonversi menjadi laba usaha, dengan beban operasional yang relatif minim

Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa mencatat tingkat pengembalian aset yang sangat tinggi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, ROA tercatat sebesar 248,97%, mencerminkan tingkat efisiensi yang luar biasa dalam pemanfaatan aset segmen. Sementara itu, pada tahun 2024, ROA mengalami normalisasi menjadi 185,94%, seiring dengan peningkatan nilai aset sebesar 62,05% yang digunakan untuk mendukung ekspansi dan pengembangan layanan.

Penurunan persentase ROA ini bukan merupakan indikasi penurunan kinerja, melainkan cerminan dari strategi investasi jangka panjang yang ditempuh perusahaan. Dengan peningkatan aset yang terukur dan pertumbuhan laba yang tetap solid, perusahaan meyakini bahwa segmen ini akan terus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan nilai dan profitabilitas jangka panjang.

Not only that, the operating profit margin also recorded an increase to 90.06%, indicating that most of the revenue generated was successfully converted into operating profit, with relatively minimal operating expenses.

The Miscellaneous Services segment recorded a very high return on assets in the last two years. In 2023, the ROA was recorded at 248.97%, reflecting a remarkable level of efficiency in the utilization of segment assets. Meanwhile, in 2024, ROA normalized to 185.94%, in line with the 62.05% increase in asset value used to support service expansion and development.

This decline in ROA percentage is not an indication of a decline in performance, but rather a reflection of the long-term investment strategy pursued by the company. With a measurable increase in assets and solid profit growth, the Company believes that this segment will continue to be one of the main drivers of value growth and profitability in the long term.

Non Segmen

Non-Segment

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Non Segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The profitability and financial performance of Non-Segment segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan Non Segmen Financial Performance of Non-Segment segment	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(89.424)	(76.343)	(13.081)	17,13	↑
Pendapatan operasi lainnya Other operating revenues	12.746	3.781	8.965	237,14	↑
Beban operasi lainnya Other operating expenses	(14.250)	(8.706)	(5.543)	63,67	↑
Laba usaha Operating profit	(90.928)	(81.268)	(9.660)	11,89	↑
Pendapatan keuangan Financial income	45.051	38.037	7.014	18,44	↑
Beban keuangan Financial expenses	(31.794)	(46.424)	14.631	(31,52)	↓
Rugi sebelum pajak penghasilan badan Loss before corporate income tax	(77.671)	(89.655)	11.984	(13,37)	↓
Posisi Keuangan Financial Position					
Aset segmen Segment assets	872.781	748.369	124.412	16,62	↑
Liabilitas segmen Segment liabilities	60.138	80.055	(19.917)	(24,88)	↓
Informasi Lainnya Other Information					
Pengeluaran modal Capital expenditures	-	-	-	-	-



Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Non Segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The profitability and financial performance of Non-Segment segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan Non Segmen Financial Performance of Non-Segment segment	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	3,486	3,337	149	4,46	↑
Rasio-rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Imbal Hasil Aset (%) Return on Assets (%)	(8,90)	(11,98)	3,08		↓

Pada tahun 2024, kontribusi Non Segmen masih memainkan peran strategis dalam menopang operasional dan struktur Perseroan secara keseluruhan. Meski tidak secara langsung terkait dengan aktivitas utama usaha, pos-pos dalam kategori ini menunjukkan dinamika yang signifikan.

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan operasional non segmen tercatat sebesar Rp45.051 juta, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp37.051 juta. Kenaikan ini disumbang oleh peningkatan pendapatan keuangan, yang naik Rp8.000 juta atau sekitar 21,59%, mencerminkan hasil pengelolaan keuangan yang lebih optimal.

Namun demikian, segmen ini juga mengalami beban keuangan yang melonjak tajam menjadi Rp46.994 juta, naik Rp20.901 juta dibandingkan 2023. Kenaikan ini berdampak langsung pada turunnya laba sebelum pajak, yang tercatat negatif Rp77.671 juta, dibandingkan negatif Rp59.177 juta pada tahun sebelumnya.

Posisi Keuangan

Di sisi neraca, aset non segmen mengalami kenaikan cukup signifikan, dari Rp748.359 juta menjadi Rp872.781 juta, atau meningkat Rp124.422 juta (16,62%). Ini menunjukkan adanya peningkatan investasi atau penempatan dana di luar aktivitas inti operasional.

Sementara itu, liabilitas non segmen mengalami penurunan sebesar Rp19.977 juta (24,88%), menjadi Rp60.138 juta, mencerminkan strategi pelunasan kewajiban atau efisiensi pendanaan yang dilakukan selama tahun berjalan.

Informasi Lainnya

Total penyusutan dan amortisasi dalam kategori non segmen meningkat tipis menjadi Rp3.486 juta dari sebelumnya Rp3.337 juta, atau naik 4,46%. Angka ini masih dalam batas wajar dan menunjukkan stabilitas aset jangka panjang di luar unit bisnis inti.

Rasio-Rasio Profitabilitas

Tidak tersedia margin laba maupun imbal hasil atas aset (ROA) pada segmen ini karena memang sifatnya tidak langsung menghasilkan pendapatan operasional atau laba bersih seperti unit usaha utama. Namun, keberadaan segmen ini tetap krusial dalam mendukung fondasi dan keberlanjutan usaha perusahaan secara keseluruhan.

In 2024, Non-Segment contributions still play a strategic role in supporting the Company's overall operations and structure. Although not directly related to the main business activities, items in this category showed significant dynamics.

Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Non-segment operating revenues were recorded at Rp45,051 million, an increase from the previous year of Rp37,051 million. This increase was contributed by an increase in finance income, which rose by Rp8,000 million or approximately 21.59%, reflecting the results of more optimal financial management.

However, this segment also experienced financial expenses that jumped sharply to Rp46,994 million, up by Rp20,901 million compared to 2023. This increase had a direct impact on the decline in profit before tax, which was recorded at negative Rp77,671 million, compared to negative Rp59,177 million in the previous year.

Financial Position

In terms of balance sheet, non-segment assets increased significantly, from Rp748,359 million to Rp872,781 million, or an increase of Rp124,422 million (16.62%). This indicates an increase in investment or placement of funds outside core operational activities.

Meanwhile, non-segment liabilities decreased by Rp19,977 million (24.88%), to Rp60,138 million, reflecting the strategy of paying off liabilities or funding efficiency carried out during the year.

Other Information

Total depreciation and amortization in the non-segment category increased slightly to Rp3,486 million from Rp3,337 million, or 4.46%. This figure is still within reasonable limits and indicates the stability of long-term assets outside the core business units.

Profitability Ratios

No profit margin or return on assets (ROA) is available for this segment as it does not directly generate operating income or net profit like the main business unit. However, the existence of this segment remains crucial in supporting the foundation and sustainability of the Company's overall business.



SEGMENT GEOGRAFIS

Di samping segmen usaha, Laporan Keuangan Perseroan juga menyajikan informasi terkait segmen geografis yang menggambarkan persebaran kegiatan operasi dan usaha IPCC.

GEOGRAPHIC SEGMENT

In addition to operating segments, the Company's Financial Statements also presents information related to geographic segment, which describes the distribution of IPCC's operations and business activities.

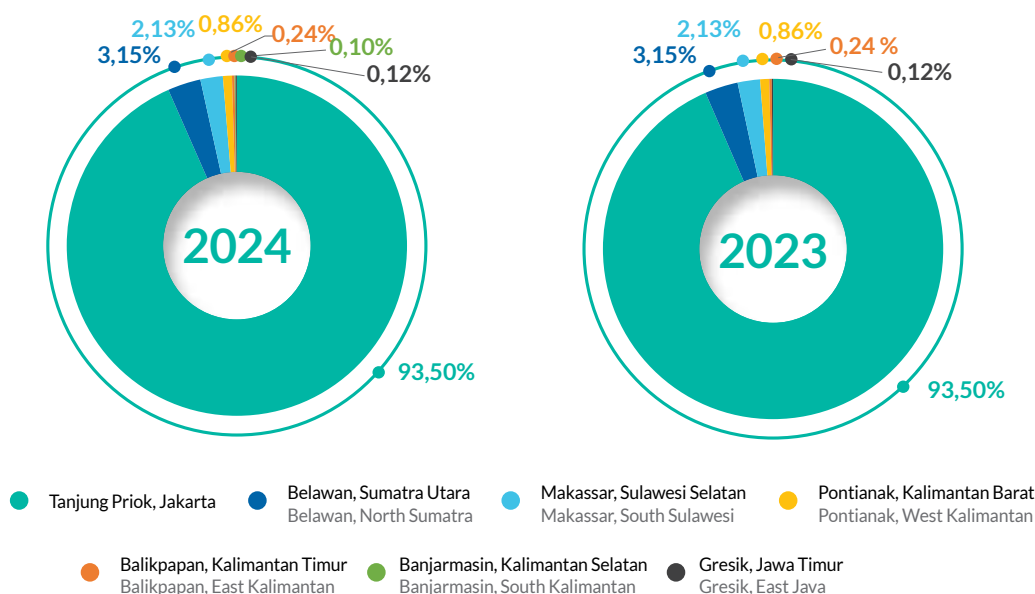
Jumlah dan Kontribusi Pendapatan Segmen Geografis Terhadap Pendapatan Operasi IPCC

Amount and Contribution of Geographic Segment Revenue to IPCC Operating Revenue

Segmen Geografis Geographic Segment	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Tanjung Priok, Jakarta	757.776	91,90	687.409	93,50	70.367	10,24	↑
Belawan, Sumatra Utara Belawan, North Sumatra	19.636	2,38	23.183	3,15	(3.547)	(15,30)	↓
Makassar, Sulawesi Selatan Makassar, South Sulawesi	18.407	2,23	15.668	2,13	2.739	17,48	↑
Pontianak, Kalimantan Barat Pontianak, West Kalimantan	15.618	1,89	6.316	0,86	9.302	147,26	↑
Balikpapan, Kalimantan Timur Balikpapan, East Kalimantan	11.823	1,43	1.761	0,24	10.063	571,44	↑
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Banjarmasin, South Kalimantan	864	0,10	-	-	864	-	-
Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	472	0,06	868	0,12	(396)	(45,66)	↓
Jumlah Pendapatan Total Operating Revenue Operasi	824.596	100,00	735.205	100,00	89.391	12,16	↑

Komposisi Pendapatan Segmen Geografis Terhadap Pendapatan Operasi IPCC

Composition of Geographic Segment Revenue to IPCC Operating Revenue



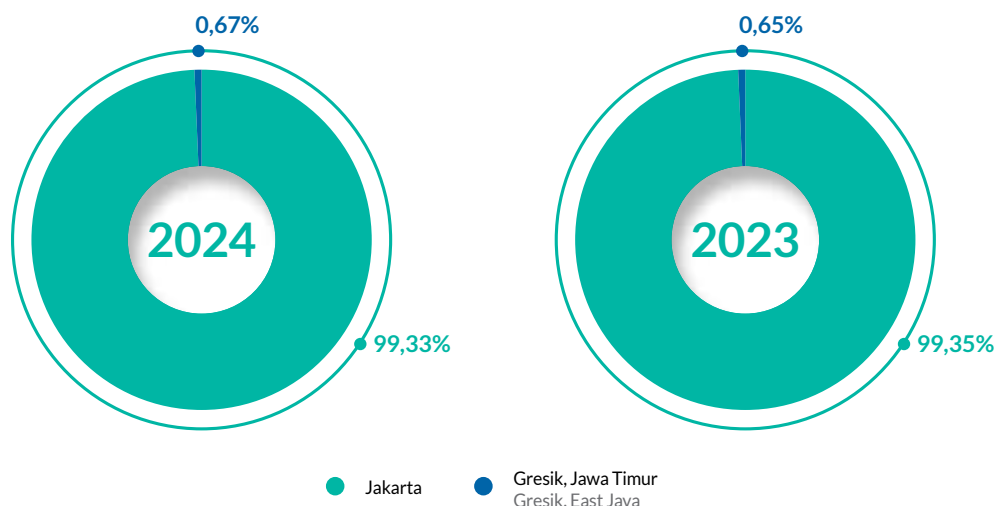
Jumlah dan Kontribusi Aset Tidak Lancar Segmen Geografis Terhadap Aset Tidak Lancar IPCC

Amount and Contribution of Geographic Segment Non-Current Assets to IPCC Non-Current Assets

Segmen Geografis Geographic Segment	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Jakarta	942.960	99,33	1.022.459	99,35	(79.499)	(7,78)	↓
Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	6.343	0,67	6.733	0,65	(390)	(5,80)	↓
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	949.303	100,00	1.029.192	100,00	(79.890)	(7,76)	↓

Komposisi Aset Tidak Lancar Segmen Geografis Terhadap Aset Tidak Lancar IPCC

Composition of Geographic Segment Non-Current Assets to IPCC Non-Current Assets



Pada tahun 2024, Perseroan mencatat total pendapatan operasi sebesar Rp824.596 juta, meningkat signifikan sebesar Rp89.391 juta atau 12,16% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp735.205 juta. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan aktivitas operasional serta optimalisasi jaringan logistik di berbagai wilayah.

Kontribusi terbesar berasal dari wilayah Tanjung Priok, Jakarta, yang menyumbang 91,90% dari total pendapatan dengan nilai Rp757.776 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp70.367 juta atau 10,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah lain yang juga menunjukkan peningkatan signifikan antara lain:

1. Pontianak, Kalimantan Barat naik sebesar Rp9.302 juta (147,26%);
2. Balikpapan, Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan tertinggi secara persentase, yakni Rp10.063 juta (571,44%); dan
3. Makassar, Sulawesi Selatan juga meningkat sebesar Rp2.739 juta (17,46%).

In 2024, the Company recorded total operating revenues of Rp824,596 million, a significant increase of Rp89,391 million or 12.16% compared to 2023 which amounted to Rp735,205 million. This increase reflects the recovery of operational activities as well as the optimization of logistics networks in various regions.

The largest contribution came from Tanjung Priok, Jakarta, which accounted for 91.90% of total revenue with a value of Rp757,776 million, an increase of Rp70,367 million or 10.24% compared to the previous year. Other regions that also showed a significant increase include:

1. Pontianak, West Kalimantan increased by Rp9,302 million (147.26%);
2. Balikpapan, East Kalimantan recorded the highest growth in percentage terms, at Rp10,063 million (571.44%); and
3. Makassar, South Sulawesi also increased by Rp2,739 million (17.46%).

Menariknya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sebelumnya belum berkontribusi, mulai menunjukkan aktivitas operasional dengan kontribusi Rp864 juta di tahun 2024. Namun demikian, beberapa wilayah mengalami penurunan pendapatan, seperti:

1. Belawan, Sumatra Utara turun sebesar Rp3.547 juta (-15,30%); dan
2. Gresik, Jawa Timur turun sebesar Rp396 juta (-45,86%).

Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan ini mencerminkan keberhasilan ekspansi operasional dan penguatan pelayanan di wilayah kunci, meskipun masih terdapat tantangan di beberapa area.

Sementara itu, total aset tidak lancar Perseroan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp949.303 juta, menurun sebesar Rp79.890 juta atau 7,76% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.029.192 juta. Wilayah Jakarta menjadi kontributor utama terhadap nilai aset tidak lancar, meskipun mengalami penurunan dari Rp1.022.459 juta di tahun 2023 menjadi Rp942.960 juta di tahun 2024. Penurunan sebesar Rp79.495 juta ini setara dengan 7,78%, sejalan dengan langkah efisiensi dan optimalisasi aset tetap. Seiring dengan penurunan di wilayah Jakarta, wilayah Gresik juga mengalami penurunan aset sebesar Rp390 juta atau 5,80%, dari Rp6.733 juta menjadi Rp6.343 juta. Penurunan ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan aset yang lebih selektif dan berorientasi pada efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika industri

Interestingly, Banjarmasin, South Kalimantan, which had not previously contributed, began to show operational activity with a contribution of IDR864 million in 2024. However, some regions experienced a decline in revenue, such as:

1. Belawan, North Sumatra decreased by Rp3,547 million (-15.30%); and
2. Gresik, East Java decreased by Rp396 million (-45.86%).

Overall, this revenue growth reflects the success of operational expansion and service strengthening in key regions, although there are still challenges in some areas.

Meanwhile, the Company's total non-current assets in 2024 were recorded at Rp949,303 million, a decrease of Rp79,890 million or 7.76% compared to 2023 of Rp1,029,192 million. Jakarta region was the main contributor to the value of non-current assets, although it decreased from Rp1,022,459 million in 2023 to Rp942,960 million in 2024. This decrease of Rp79,495 million is equivalent to 7.78%, in line with efficiency measures and optimization of fixed assets. Along with the decline in Jakarta region, Gresik region also experienced a decrease in assets of Rp390 million or 5.80%, from Rp6,733 million to Rp6,343 million. This decrease is part of an asset management strategy that is more selective and oriented towards the efficient use of resources in facing economic challenges and industry dynamics.



ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

SEGMENTASI, TARGET DAN POSITIONING

Perseroan didirikan sebagai terminal kendaraan komersial yang secara konsisten melayani kebutuhan *customer* untuk penanganan kegiatan bongkar muat, penumpukan, dan *receiving/delivery* kargo kapal Ro-Ro dan *Pure Car Carrier* berupa CBU/mobil, motor, truk/bus, alat berat, *sparepart*, dan kargo lainnya baik untuk layanan Internasional maupun Domestik.

Perseroan menargetkan pelanggan tidak hanya skala nasional namun juga skala internasional, karena telah memiliki jasa pelayanan berbasis digital yang terstandarisasi, baik untuk Domestik maupun Internasional. Diantaranya *car maker*, *shipping line*, *user* dari *makers*, dan lain-lain.

Sejalan dengan segmentasi dan target pelanggan yang dipilih, Perseroan memposisikan diri sebagai pilihan utama dan khusus untuk pelayanan bongkar muat kendaraan di Indonesia yang terstandarisasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan kepastian dan kualitas dalam melaksanakan pelayanan kargo kendaraan.

PANGSAR PASAR

Dalam mewujudkan visi sebagai Operator Terminal Kendaraan Berkelas Dunia, IPCC terus berupaya meningkatkan jumlah pangsa pasar yang dimiliki. Upaya tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan program pengembangan bisnis berjangka pendek, menengah, dan panjang yang telah disusun. Berikut gambaran pangsa pasar IPCC untuk pangsa pasar CBU, Motor, Bus/Truck, dan Alat Berat selama tahun 2024.

SEGMENTATION, TARGETING AND POSITIONING

The company was established as a commercial vehicle terminal that consistently serves customer needs in handling loading and unloading activities, storage, and receiving/delivery of Ro-Ro and Pure Car Carrier cargo, including CBU/cars, motorcycles, trucks/buses, heavy equipment, spare parts, and other cargo for both international and domestic services.

The company targets customers not only on a national scale but also internationally, as it has standardized digital-based service offerings for both domestic and international markets. These include car manufacturers, shipping lines, makers' users, and others.

Aligned with its chosen market segmentation and target customers, the company positions itself as the leading and specialized choice for standardized vehicle cargo handling services in Indonesia, meeting customer needs while ensuring reliability and quality in delivering vehicle cargo services.

MARKET SHARE

In the pursuit of realizing the vision to become a World Class Vehicle Terminal Operator, IPCC continues to strive to increase its market share. These efforts are realized by executing short, medium and long term business development programs that have been prepared. The following is an overview of IPCC market share for CBU, Motorcycle, Bus/Truck and Heavy Equipment in 2024.



Informasi Pangsa Pasar Internasional
 Information on International Market Share

Brand	Throughput CBU Januari - Desember CBU Throughput January - December	Persentase Percentage
Toyota	180.963	41%
Mitsubishi	93.957	21%
Hyundai	64.188	15%
Suzuki	31.492	7%
Honda	19.868	5%
BYD	16.799	4%
Isuzu	8.174	2%
Mazda	4.968	1%
Vinfast	3.444	1%
Others	16.107	4%
Total (unit)	439.960	100%

Brand	Throughput Bus/Truck Januari - Desember Buses/Trucks Throughput January - December	Persentase Percentage
Volvo	917	21%
Hino	849	19%
Scania	421	10%
Mercedes	368	8%
FAW	302	7%
Sino	271	6%
Renault	252	6%
Iveco	185	4%
Komatsu	165	4%
Others	686	16%
Total (unit)	4.416	100%

Brand	Throughput Heavy Equipment Januari - Desember Heavy Equipment Throughput January - December	Persentase Percentage
Caterpillar	1.514	26%
Kobelco	1.465	25%
Hitachi	911	16%
Sumitomo	593	10%
Link	274	5%
Zoomlion	221	4%
Doosan	178	3%
Liebherr	58	1%
Shantui	51	1%
Others	534	9%
Total (unit)	5.799	100%

Pangsa Pasar Kargo Kendaraan Internasional
 International Vehicle Cargo Market Share


Terminal	Total (unit)
IPCC	439.960
Others	128.884
Total Kargo Total Cargo	568.844

Terminal	Total (unit)
IPCC	359.688
Others	112.506
Total Ekspor Total Export	472.194

Terminal	Total (unit)
IPCC	80.272
Others	16.378
Total Impor Total Import	96.650

Untuk pasar internasional (ekspor–impor), IPCC menguasai 77% pangsa pasar dari total kargo kendaraan di Indonesia, menjadikannya sebagai terminal kendaraan terbesar dan utama di tanah air. Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dan efisiensi biaya logistik, IPCC terus memperluas kemitraan dengan berbagai perusahaan otomotif. Pada tahun 2024, IPCC telah menangani layanan *cargodoring* dan penumpukan secara langsung dengan beberapa produsen kendaraan terkemuka, termasuk PT Honda Prospect Motor (Honda), PT Tjahja Sakti Motor dan PT Tjahja Surya Motor Indonesia (BMW), PT Laksamana Samudera Indonesia (Vinfast), serta PT GPI Logistik (AION & Maxus). Dengan inisiatif ini, IPCC memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri terminal kendaraan di Indonesia dan kawasan regional.

For the international market (export-import), IPCC controls 77% of the total vehicle cargo market share in Indonesia, making it the largest and leading vehicle terminal in the country. As a form of commitment to providing the best service and efficient logistics costs, IPCC continues to expand partnerships with various automotive companies. In 2024, IPCC has handled *cargodoring* and stacking services directly with several leading vehicle manufacturers, including PT Honda Prospect Motor (Honda), PT Tjahja Sakti Motor and PT Tjahja Surya Motor Indonesia (BMW), PT Laksamana Samudera Indonesia (Vinfast), and PT GPI Logistik (AION & Maxus). With this initiative, IPCC strengthens its position as a major player in the vehicle terminal industry in Indonesia and regional area.

Strategi Pemasaran

Perseroan terus menyempurnakan strategi pemasaran sejalan dengan program dalam Rencana Kerja Manajemen dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan. Beberapa strategi pemasaran sebagai fokus Perseroan pada tahun 2024 diantaranya adalah:

Marketing Strategy

The Company continues to refine its marketing strategy in line with the programs in the Management Work Plan and the Company's Work Plan and Budget which are prepared according to the development of customer needs. Some of the marketing strategies as the Company's focus in 2024 are:

Tanggal Date	Kegiatan Pemasaran Marketing Activity	Maksud dan Tujuan Purpose and Objective
01 Januari 2024 January 01, 2024	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan Penanganan Bongkar Muat dengan Hyundai Glovis Co. Ltd. <i>Signing of the Handling and Unloading Service Agreement with Hyundai Glovis Co. Ltd.</i>	Memberikan layanan bongkar muat untuk kargo kendaraan Hyundai. <i>Providing loading and unloading services for Hyundai vehicle cargo.</i>
01 Januari 2024 January 01, 2024	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan dan Penumpukan Kargo di Terminal Internasional dengan PT Glovis Indonesia Logistics. <i>Signing of the Cargo Handling and Stacking Agreement at International Terminal with PT Glovis Indonesia Logistics.</i>	Memberikan layanan <i>cargodoring</i> , <i>receiving/delivery</i> , dan penumpukan kargo. <i>Providing cargodoring, receiving/delivery, and cargo stacking services.</i>
01 Mei 2024 May 01, 2024	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan dan Penanganan Kargo di Terminal Internasional dengan PT Bandar Krida Jasindo. <i>Signing of the Cargo Handling and Service Agreement at International Terminal with PT Bandar Krida Jasindo.</i>	Memberikan dasar dalam pelaksanaan kerja sama pelayanan dan penanganan kargo di Terminal Internasional. <i>Providing a basis for implementing cooperation in cargo services and handling at the International Terminal.</i>
01 Mei 2024 May 01, 2024	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan dan Penanganan Kargo di Terminal Domestik dengan PT Bandar Krida Jasindo. <i>Signing of the Cargo Handling and Service Agreement at Domestic Terminal with PT Bandar Krida Jasindo.</i>	Memberikan dasar dalam pelaksanaan kerja sama pelayanan dan penanganan kargo di Terminal Domestik. <i>Providing a basis for implementing cooperation in cargo services and handling at the Domestic Terminal.</i>
01 Mei 2024 May 01, 2024	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan dan Penanganan Kargo di Terminal Internasional dengan PT Anugerah Permata Samudera. <i>Signing of the Cargo Handling and Service Agreement at International Terminal with PT Anugerah Permata Samudera.</i>	Memberikan dasar dalam pelaksanaan kerja sama pelayanan dan penanganan kargo di Terminal Internasional. <i>Providing a basis for implementing cooperation in cargo services and handling at the International Terminal.</i>
19 Juni 2024 June 19, 2024	Penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Honda Prospect Motor. <i>Signing of the Port Service Agreement with PT Honda Prospect Motor.</i>	Memberikan layanan <i>cargodoring</i> , penumpukan, <i>delivery</i> dan pelaporan. <i>Providing cargodoring, stacking, delivery and reporting services.</i>



Tanggal Date	Kegiatan Pemasaran Marketing Activity	Maksud dan Tujuan Purpose and Objective
01 September 2024 September 01, 2024	Penandatanganan Perjanjian Layanan Operasi CBU dengan PT Glovis Indonesia International. <i>Signing of the CBU Operation Service Agreement with PT Glovis Indonesia International.</i>	Memberikan layanan <i>receiving/delivery, inspection, cargodoring, penumpukan, washing, minor repair</i> dan pemeliharaan rutin unit CBU Hyundai. <i>Providing receiving/delivery, inspection, cargodoring, stacking, washing, minor repair and routine maintenance services for Hyundai CBU units.</i>
20 November 2024 November 20, 2024	Survei Kepuasan Pelanggan. <i>Customer Satisfaction Survey.</i>	Mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan IPCC, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, serta memperoleh umpan balik untuk menyusun strategi perbaikan dan inovasi layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. <i>Measuring the level of customer satisfaction with IPCC services, identifying aspects that need to be improved, and obtaining feedback to develop service improvement and innovation strategies to better suit customer needs and expectations.</i>

Sebagai bagian dari strategi pemasaran, IPCC melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan 2024 pada 20 November 2024 sebagai upaya untuk mengukur dan meningkatkan kualitas layanan, yang menghasilkan skor 4,64 dari skala 5 (termasuk dalam kategori “Sangat Baik”). Hasil ini mencerminkan tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan IPCC. Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan, IPCC berkomitmen melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, termasuk peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi infrastruktur terminal, serta pengembangan layanan berbasis digital. Dengan pendekatan berbasis *feedback* pelanggan, IPCC tidak hanya menargetkan kepuasan jangka pendek tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan para pelanggannya. Survei ini menjadi landasan bagi IPCC dalam mengidentifikasi area perbaikan dan mengembangkan strategi layanan yang lebih baik, sehingga dapat terus memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan di masa depan.

As part of its marketing strategy, IPCC conducted the 2024 Customer Satisfaction Survey on November 20, 2024, in an effort to measure and improve service quality, which resulted in a score of 4.64 out of 5 (included in “Very Good” category). This result reflects the high level of customer satisfaction with IPCC services. To continue to maintain and improve service standards, IPCC is committed to making various improvements and innovations, including increasing operational efficiency, optimizing terminal infrastructure, and developing digital-based services. With a customer feedback-based approach, IPCC is not only targeting short-term satisfaction but also building sustainable long-term relationships with its customers. This survey serves as a basis for IPCC to identify areas of improvement and develop better service strategies, in order to be able to continue meeting and exceeding customer expectations in the future.



TEKNOLOGI TECHNOLOGY

Pengembangan Terminal Operating System Terminal Kendaraan IKT Development of IKT Vehicle Terminal Operating System

PTOSC Modules			
ADMINISTRATION & SET UP	PLANNING & CONTROL	REALISASI & OPERASI REALIZATION & OPERATION	KOMERSIAL & BILLING COMMERCIAL & BILLING
☐ Vessel Schedule ☐ Dashboard Data Transaction ☐ Maintenance Permohonan Application Maintenance ☐ Maintenance Data Master Master Data Maintenance ☐ Maintenance Data Set Up & Config Maintenance of Data Set Up & Config ☐ Monitoring Terminal Terminal Monitoring ☐ Monitoring FoD & FoG FoD & FoG Monitoring ☐ Pencetakan Dokumen Document Printing	☐ Dashboard Data Transaction ☐ Manpower Planning ☐ Yard Planning Allocation ☐ Storage Plan ☐ Monitoring & Controlling ☐ Pencetakan Daily Dokumen Daily Document Printing	☐ Dashboard Data Transaction ☐ Gate Operation ☐ Inspection Confirmation (LQ1) ☐ Yard Confirmation ☐ Wharf Confirmation ☐ Report Activity Activity Report ☐ Rekap Realisasi & Approve Recap of Realization & Approve ☐ Marking (LQ2)	☐ Dashboard ☐ Master Tarif & Kesepakatan Master Tariff & Agreement ☐ Verifikasi Billing (Billing) Billing Approval ☐ Approval Billing (Billing) Billing Approval ☐ Monitoring & Report ☐ Master Customer & User IBS (INCO & MDM)

PTOS-C atau Pelindo Terminal *Operating System Car* merupakan sistem digunakan untuk operasi kegiatan di Terminal yang dilakukan secara *real-time*. Mulai dari kegiatan perencanaan, *booking*, realisasi kegiatan, kontrol dan pengawasan sampai dengan terbit laporan kinerja dan *billing*. *Cargo* atau *vehicle identification number* (VIN) dalam bentuk *barcode*. Sistem ini terintegrasi dengan sistem *Car Maker* guna mengotomasi proses *booking* dari *customer*, TPS Online Bea Cukai Ciesra guna mengotomasi proses *clearance document*, mengoptimalkan proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan di terminal. Selain itu, dengan pencatatan secara *real-time* pemilik *cargo* dapat mengetahui pergerakan *cargo* yang ada di dalam terminal dan dapat dikirimkan ke sistem milik pemilik barang dalam hal ini *car maker* melalui sistem yang digunakan oleh *customer*, yaitu sistem IBS.

PTOS-C or Pelindo Terminal *Operating System Car* is a system used for operational activities in the Terminal which is carried out in *real-time*. Starting from planning activities, booking, activity realization, control and supervision to the issuance of performance reports and billing. Cargo or vehicle identification number (VIN) in the form of a barcode. This system is integrated with the Car Maker system to automate the booking process from customers, TPS Online Customs Ciesra to automate the clearance document process, optimize the planning process, implementation and monitoring of activities in the terminal. In addition, with *real-time* recording, cargo owners can find out the movement of cargo in the terminal and can be sent to the system owned by the owner of goods, in this case the car maker, through the system used by the customer, namely IBS system.



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RESEARCH AND DEVELOPMENT

KAJIAN POLA DISTRIBUSI CARGO RORO KENDARAAN DAN PENUMPANG SERTA POTENSI PENGEMBANGAN BISNIS IPCC DI WILAYAH INDONESIA TIMUR

Dalam rangka persiapan peninjauan potensi ekspansi di wilayah Pelindo Regional 3 dan 4, pada tahun 2023, IPCC melaksanakan kajian terkait potensi pengembangan bisnis dan distribusi kargo kendaraan dan RORO di wilayah Indonesia bagian Timur. Kajian ini akan menjadi dasar strategi IPCC dalam melakukan ekspansi wilayah dan layanan di wilayah tersebut, termasuk penentuan tahap awal prioritas wilayah yang paling potensial bagi IPCC untuk mengembangkan bisnisnya. Selain dari kajian ini, IPCC juga tetap mempertimbangkan arahan dari Pelindo dalam melakukan peninjauan bisnis untuk melanjutkan ekspansi di tahun 2024.

Dalam rangka penguatan nilai tambah layanan jasa terminal berbasis RORO di wilayah Indonesia Timur, IPCC memiliki potensi untuk meningkatkan fasilitasnya pada layanan RORO dan Penumpang, konsolidasi *cargo* RORO, termasuk penyediaan layanan pendukung konektivitas dari sumber *cargo* menuju ke terminal maupun sebaliknya. IPCC memiliki kekuatan jejaring terminal (satelit) dalam Pelindo *Group* menjadi salah satu nilai plus sebagai penyedia jasa. Pengembangan fasilitas layanan terminal dari lini terminal dan layanan pendukung distribusi *cargo* RORO dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama mitra-mitra bisnis, termasuk pemilik *cargo* dan pelayaran.

Di sepanjang tahun 2024, IPCC masih mengkaji potensi pengembangan bisnis dan distribusi kargo kendaraan dan RORO di wilayah Indonesia Timur. Selain dari kajian ini, IPCC juga masih tetap mempertimbangkan arahan dari Pelindo dalam melakukan ekspansi bisnisnya.

STUDY OF RORO VEHICLE AND PASSENGER CARGO DISTRIBUTION PATTERNS AND POTENTIAL FOR IPCC BUSINESS DEVELOPMENT IN THE EASTERN INDONESIA REGION

In the preparation for exploring expansion potential in Pelindo Regional 3 and 4 areas, in 2023, IPCC carried out a study regarding the potential for business development and distribution of vehicle cargo and RORO in the Eastern part of Indonesia. This study will be the basis for IPCC's strategy in expanding its territory and services in the region, including determining the initial priority stages of areas with the most potential for IPCC to develop its business. Apart from this study, IPCC also continues to consider directions from Pelindo in conducting business assessments to continue expansion in 2024.

To strengthen the added value of RORO-based terminal services in the Eastern Indonesia region, IPCC has the potential to improve its facilities for RORO and Passenger services, consolidate RORO cargo, including providing connectivity support services from the cargo source to the terminal and vice versa. IPCC has the strength of terminal (satellite) network within Pelindo Group, which is a plus for providing services. Development of terminal service facilities from terminal lines and RORO cargo distribution support services can be carried out in collaboration with business partners, including cargo and shipping owners.

Throughout 2024, IPCC is still reviewing the potential for business development and distribution of vehicle and RORO cargo in the Eastern Indonesia region. In addition to this review, IPCC is also still considering Pelindo's direction in expanding its business.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dan telah mendapatkan opini laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

The financial statements of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk have been audited by Public Accounting Firm (PAF) Purwantono, Sungkoro & Surja and have obtained unqualified opinion, the financial position of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.



LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan aset dan permodalan IPCC. Di tahun 2024, saldo aset Perseroan mencapai Rp1,85 triliun. Sedangkan struktur permodalan Perseroan terdiri dari liabilitas sebesar 30,99% dan ekuitas sebesar 69,01%.

The Financial Position provides a glimpse of the strength of IPCC's assets and capitalization. In 2024, the Company's asset balance reached Rp1.85 trillion While the Company's capitalization structure consists of liabilities of 30.99% and equity of 69.01%

Posisi Keuangan Financial Position	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	901.436	759.122	142.314	18,75	↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	949.303	1.029.192	(79.890)	(7,76)	↓
Jumlah Aset Total Assets	1.890.739	1.788.315	62.424	3,49	↑
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	185.272	205.968	(20.696)	(10,05)	↓
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	388.238	359.480	28.758	8,00	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	573.510	565.448	8.062	1,43	↑
Ekuitas Equity					
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.277.228	1.222.867	54.362	4,45	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.850.739	1.788.315	62.424	3,49	↑



ASET

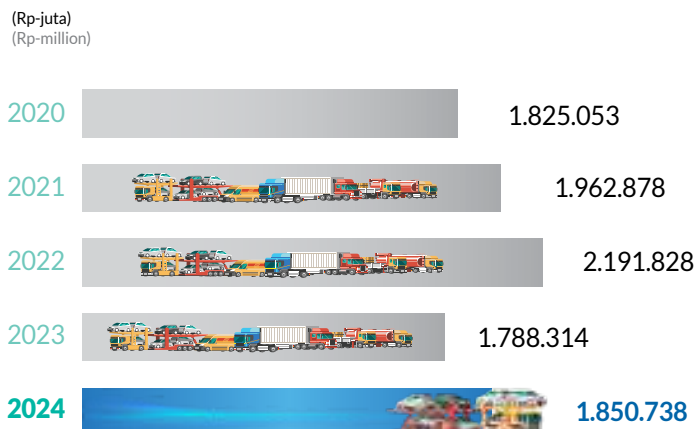
ASSETS

Jumlah aset Perseroan tahun 2024 mencapai Rp1,85 triliun, meningkat 3,49% dibandingkan jumlah aset tahun 2023 sebesar Rp1,79 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* 2020-2024, aset Perseroan mengalami pertumbuhan 0,35%

In 2024, total assets of the Company reached Rp1.85 trillion, increasing by 3.49% compared to the total assets in 2023 of Rp1.79 trillion. At the Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2020-2024, the Company's assets experienced a growth of 0.35%

Jumlah Aset 2020-2024

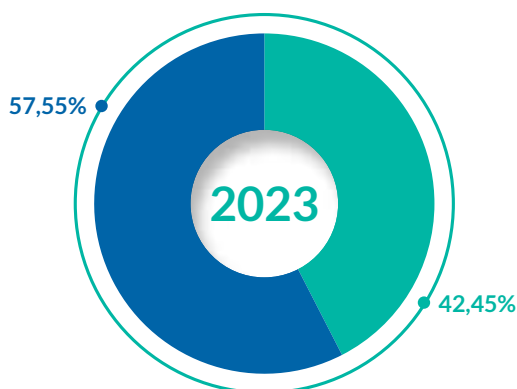
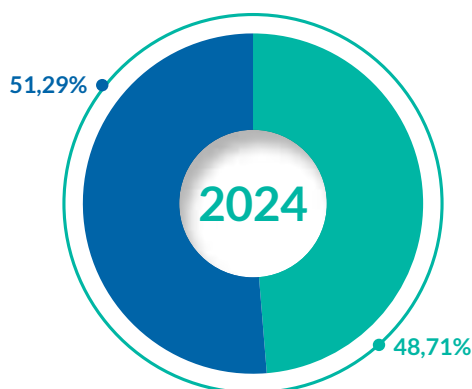
Total Assets in 2020-2024



Aset Tahun 2023-2024

Assets in 2023-2024

	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Aset Lancar Current Assets	901.436	48,71	759.122	42,45	142.314	18,75	↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	949.303	51,29	1.029.192	57,55	(79.890)	(7,76)	↓
Jumlah Aset Total Assets	1.850.739	100,00	1.788.315	100,00	62.424	3,49	↑



● Aset Lancar
Current Assets

● Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets



Perseroan membukukan nilai aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp1,85 triliun, meningkat 3,49% atau setara dengan Rp62,42 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,79 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan signifikan pada akun Kas dan Setara Kas, serta penurunan pada beberapa akun aset lancar lainnya yang mencerminkan efisiensi pengelolaan modal kerja.

The Company booked an asset value as of December 31, 2024 of Rp1.85 trillion, an increase of 3.49% or equivalent to Rp62.42 billion compared to 2023 of Rp1.79 trillion. This increase was due to a significant increase in the Cash and Cash Equivalents account, as well as a decrease in several other current asset accounts reflecting the efficiency of working capital management.

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Aset Lancar Tahun 2023-2024
Current Assets in 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	810.397	670.182	140.216	20,92	↑
Piutang Usaha - Neto Trade Receivables - Net	80.209	61.624	18.585	30,16	↑
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	1.675	1.350	325	24,05	↑
Aset Kontrak Contract Assets	9.154	9.572	(418)	(4,37)	↓
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	-	16.393	(16.393)	-	-
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	901.435	759.121	142.314	18,75	↑

Pada akhir Desember 2024, jumlah aset lancar Perseroan sebesar Rp901,44 miliar, meningkat 18,75% atau setara dengan Rp142,31 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp759,12 miliar. Hal ini disebabkan peningkatan signifikan pada kas dan setara kas sebesar Rp140,22 miliar, mencerminkan arus kas masuk yang kuat serta pengelolaan kas yang efektif.

At the end of December 2024, the Company's current assets amounted to Rp901.44 billion, an increase of 18.75% or Rp142.31 billion compared to 2023 of Rp759.12 billion. This was due to a significant increase in cash and cash equivalents of Rp140.22 billion, reflecting strong cash inflows and effective cash management.

Piutang usaha juga mengalami peningkatan seiring pertumbuhan penjualan, namun tetap dalam batas yang terkendali. Penurunan pada beban dibayar dimuka dan nihilnya saldo pajak dibayar dimuka menunjukkan efisiensi pembayaran dan realisasi beban secara tepat waktu.

Trade receivables also increased in line with sales growth, but remained within manageable limits. The decrease in prepaid expenses and zero balance of prepaid taxes indicate the efficiency of timely payment and realization of expenses.

Secara keseluruhan, peningkatan aset lancar mencerminkan likuiditas yang lebih kuat dan manajemen modal kerja yang semakin optimal.

Overall, the increase in current assets reflects stronger liquidity and optimized working capital management.

ASET TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSETS

Aset Tidak Lancar Tahun 2023-2024

Non-Current Assets in 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	348.651	359.356	(10.705)	(2,98)	↓
Aset Tak Berwujud - Neto Intangible Assets - Net	3.224	4.631	(1.407)	(30,38)	↓
Aset Hak Guna - Neto Right-of-Use Assets - Net	536.361	606.287	(69.926)	(11,53)	↓
Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets - Net	57.911	55.763	2.149	3,85	↑
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	3.155	3.155	-	-	
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	949.302	1.029.192	(79.890)	(7,76)	↓

Per 31 Desember 2024, jumlah aset tidak lancar dibukukan sebesar Rp949,30 miliar, turun 7,76% atau setara dengan Rp79,89 miliar dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp1,03 triliun. Hal ini terjadi disebabkan adanya penyesuaian nilai atas aset tetap dan aset hak-guna, yang merupakan dampak dari penyusutan dan amortisasi secara rutin, serta penerapan prinsip PSAK 73 terkait sewa.

Aset tetap - neto sebesar Rp10,70 miliar, mengalami penurunan seiring depresiasi normal atas aset yang digunakan dalam kegiatan operasional. Sementara itu, penurunan signifikan sebesar Rp69,93 miliar pada aset hak-guna mencerminkan amortisasi aset sewa sesuai dengan standar akuntansi sewa berbasis hak-guna (PSAK 73), yang menekankan pengakuan kewajiban dan aset atas kontrak sewa secara menyeluruh.

Akun lainnya seperti aset pajak tangguhan dan aset tidak lancar lainnya relatif stabil. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan pengelolaan aset jangka panjang yang efisien dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan yang berlaku.

As of December 31, 2024, the amount of non-current assets was recorded at Rp949.30 billion, a decrease of 7.76% or Rp79.89 billion compared to the previous year in the same period of Rp1.03 trillion. This was due to adjustments in the value of property and equipment and right-of-use assets as a result of routine depreciation and amortization, as well as the application of PSAK 73 principles related to leases.

Fixed assets - net amounted to Rp10.70 billion, a decrease in line with normal depreciation of assets used in operational activities. Meanwhile, a significant decrease of Rp69.93 billion in right-to-use assets reflected the amortization of lease assets in accordance with the right-to-use lease accounting standard (PSAK 73), which emphasizes the recognition of liabilities and assets for lease contracts as a whole.

Other accounts such as deferred tax assets and other non-current assets remained relatively stable. Overall, these changes reflect efficient management of long-term assets and compliance with applicable financial reporting standards.



LIABILITAS

LIABILITIES ASSETS

Jumlah liabilitas Perseroan tahun 2024 mencapai Rp573,51 miliar, mengalami kenaikan 1,43% dibandingkan liabilitas tahun 2023 sebesar Rp565,45 miliar.

In 2024, total liabilities of the Company reached Rp573.51 billion, an increase of 1.43% compared to liabilities in 2023 of Rp565.45 billion.

Jumlah Liabilitas 2020-2024

Total Liabilities in 2020-2024

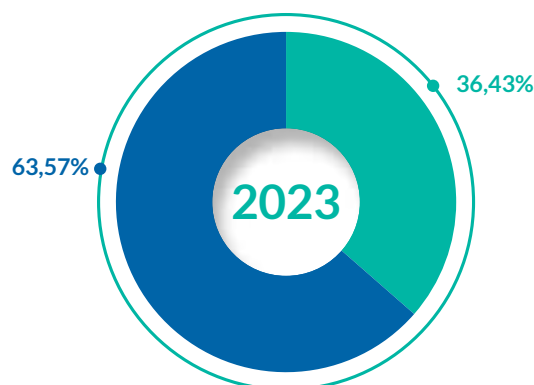
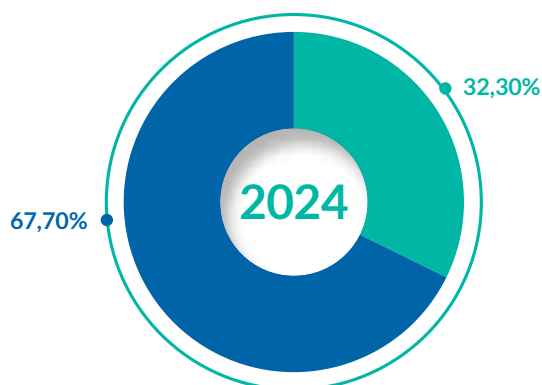
(Rp-juta)
(Rp-million)



Liabilitas 2023-2024

Liabilities in 2023-2024

	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	185.272	32,30	205.968	36,43	(20.696)	(10,05)	↓
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	388.238	67,70	359.480	63,57	28.758	8,00	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	573.510	100,00	565.448	100,00	8.062	1,43	↑



● Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

● Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities



Jumlah liabilitas Perseroan di akhir Desember 2024 sebesar Rp573,51 miliar, meningkat 1,43% atau setara dengan Rp8,06 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp565,45 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya liabilitas jangka panjang, khususnya dari akun liabilitas sewa, yang mengalami kenaikan dari Rp359,48 miliar menjadi Rp388,24 miliar. Kenaikan ini juga mencerminkan dampak berkelanjutan dari penerapan standar akuntansi PSAK 73, di mana kewajiban sewa diakui lebih menyeluruh dalam laporan keuangan.

Sementara itu, liabilitas jangka pendek justru menurun signifikan dari Rp205,97 miliar menjadi Rp185,27 miliar. Hal ini didorong oleh penyelesaian utang lain-lain dan liabilitas jangka pendek lainnya, serta penurunan bagian lancar atas liabilitas sewa.

Dari sisi struktur, proporsi liabilitas juga mengalami perubahan. Pada tahun 2023, liabilitas jangka pendek mencakup 36,43% dari total liabilitas, sedangkan pada tahun 2024 proporsinya turun menjadi 32,30%. Sebaliknya, liabilitas jangka panjang meningkat dari 63,57% menjadi 67,70%. Hal ini menunjukkan pergeseran strategi pendanaan Perseroan ke arah jangka panjang, yang berkontribusi pada penguatan struktur modal dan manajemen risiko likuiditas yang lebih baik.

Perubahan struktur ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam penyelesaian kewajiban jangka pendek, tetapi juga strategi proaktif manajemen dalam menjaga kesinambungan operasional dan fleksibilitas keuangan jangka panjang.

The Company's total liabilities at the end of December 2024 amounted to Rp573.51 billion, an increase of 1.43% or equivalent to Rp8.06 billion compared to 2023 of Rp565.45 billion. This increase was mainly due to the increase in non-current liabilities, particularly from the lease liability account, which increased from Rp359.48 billion to Rp388.24 billion. This increase also reflects the ongoing impact of the implementation of accounting standard PSAK 73, where lease liabilities are recognized more thoroughly in the financial statements.

Meanwhile, current liabilities decreased significantly from Rp205.97 billion to Rp185.27 billion. This was driven by the settlement of other payables and other current liabilities, as well as a decrease in the current portion of lease liabilities.

In terms of structure, the proportion of liabilities has also changed. In 2023, current liabilities accounted for 36.43% of total liabilities, while in 2024 the proportion dropped to 32.30%. In contrast, non-current liabilities increased from 63.57% to 67.70%. This shows a shift in the Company's funding strategy towards the long term, which contributes to a strengthened capital structure and better liquidity risk management.

This change in structure not only reflects efficiency in settling current liabilities, but also management's proactive strategy in maintaining operational continuity and long-term financial flexibility.



LIABILITAS JANGKA PENDEK

CURRENT LIABILITIES

Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2023-2024

Current Liabilities in 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Utang Usaha Trade Payables	47.304	45.873	1.430	3,12	↑
Utang Lain-lain Other Payables	5.488	13.692	(8.204)	(59,92)	↓
Beban Akrua Accrued Expenses	65.691	42.363	23.328	55,07	↑
Utang Pajak Taxes Payable	20.338	14.748	5.590	37,90	↑
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	6.033	47.165	(41.132)	(87,21)	↓
Bagian Lancar atas Liabilitas Sewa Current Portion of Lease Liabilities	40.419	42.127	(1.709)	(4,06)	↓
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	185.273	205.968	(20.696)	(10,05)	↓

Per 31 Desember 2024, jumlah liabilitas jangka pendek dibukukan sebesar Rp185,27 miliar, turun 10,05% atau setara dengan Rp20,69 miliar dibandingkan tahun 2023 di periode yang sama sebesar Rp205,97 miliar. Penurunan ini turut berdampak pada proporsi liabilitas jangka pendek terhadap total liabilitas, yang menurun dari 36,43% di tahun 2023 menjadi 32,30% di tahun 2024, sebagaimana tergambarkan dalam grafik distribusi liabilitas.

Secara rinci, penurunan terutama bersumber dari:

1. Liabilitas jangka pendek lainnya, yang berkurang signifikan sebesar Rp41,13 miliar atau 87,21%, seiring dengan berakhirnya kewajiban temporer yang tidak bersifat berulang.
2. Utang lain-lain juga menunjukkan penurunan sebesar Rp8,20 miliar atau (59,92%), mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi non-operasional.
3. Bagian lancar atas liabilitas sewa menurun sebesar Rp1,71 miliar atau (4,06%) sebagai akibat dari pembayaran kewajiban sewa sesuai jadwal dan penerapan prinsip PSAK 73 secara konsisten.

As of December 31, 2024, total current liabilities was recorded at Rp185.27 billion, a decrease of 10.05% Rp20.69 billion compared to 2023 in the same period of Rp205.97 billion. This decline also has an impact on the proportion of current liabilities to total liabilities, which decreased from 36.43% in 2023 to 32.30% in 2024, as depicted in the liability distribution graph.

In detail, the decrease mainly came from:

1. Other current liabilities, which decreased significantly by Rp41.13 billion or 87.21%, along with the expiration of non-recurring temporary liabilities.
2. Other payables also showed a decrease of Rp8.20 billion (59.92%), reflecting efficiency in managing non-operational transactions.
3. The current portion of lease liabilities decreased by Rp1.71 billion (4.06%) as a result of the payment of lease obligations on schedule and consistent application of PSAK 73 principles.



Di sisi lain, beberapa komponen mengalami kenaikan:

1. Beban akrual meningkat sebesar Rp23,33 miliar atau (55,07%), terutama terkait dengan pencadangan biaya operasional yang meningkat seiring ekspansi dan pertumbuhan aktivitas usaha.
2. Utang pajak mengalami kenaikan sebesar Rp5,59 miliar (37,90%) sebagai cerminan dari meningkatnya laba kena pajak.
3. Utang usaha juga naik moderat sebesar Rp1,43 miliar atau (3,12%), sejalan dengan intensitas pengadaan barang dan jasa yang lebih tinggi.

ANALISIS DAMPAK TERHADAP KINERJA PERSEROAN

Penurunan liabilitas jangka pendek ini merupakan refleksi dari strategi manajemen yang semakin fokus pada efisiensi keuangan dan stabilitas likuiditas. Jika diibaratkan, Perseroan saat ini seperti seseorang yang mulai membereskan utang jangka pendeknya untuk bisa bernapas lebih lega dan berpikir lebih jauh ke depan. Dengan lebih sedikit beban jangka pendek, Perseroan memiliki ruang gerak lebih luas untuk menjalankan strategi bisnis jangka panjang secara berkelanjutan.

Naiknya beberapa pos seperti beban akrual dan utang pajak juga bukan sinyal negatif justru ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha semakin aktif, pendapatan bertumbuh, dan kewajiban pajak yang muncul adalah hasil dari kinerja yang membaik. Artinya, beban ini muncul karena Perseroan sedang berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi.

Dengan struktur liabilitas yang makin sehat, Perseroan berada pada posisi yang lebih kokoh untuk menghadapi dinamika bisnis dan siap mengambil peluang pertumbuhan di masa mendatang.

On the other hand, some components increased:

1. Accrued expenses increased by Rp23.33 billion (55.07%), mainly related to provision for operating expenses that increased in line with the expansion and growth of business activities.
2. Tax payable increased by Rp5.59 billion (37.90%) reflecting the increase in taxable profit.
3. Trade payables also rose moderately by Rp1.43 billion (3.12%), in line with the higher intensity of procurement of goods and services.

ANALYSIS OF THE IMPACT ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

The decrease in current liabilities is a reflection of management's strategy to focus more on financial efficiency and liquidity stability. If likened, the Company is now like someone who has started clearing their short-term debts to be able to breathe easier and think further ahead. With fewer short-term expenses, the Company has more room to execute its long-term business strategy in a sustainable manner.

The increase in several items such as accruals and tax payables is also not a negative signal it shows that business activities are getting more active, revenues are growing, and tax liabilities that arise are the result of improved performance. That is, these expenses arise because the Company is running at a higher speed.

With a healthier liability structure, the Company is in a stronger position to deal with business dynamics and is ready to take on future growth opportunities.



LIABILITAS JANGKA PANJANG

NON-CURRENT LIABILITIES

Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2023-2024

Non-Current Liabilities in 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	388.238	359.480	28.758	8,00	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	388.238	359.480	28.758	8,00	↑

Liabilitas jangka panjang tahun 2024 tercatat sebesar Rp388,24 miliar, meningkat 8,00% atau setara dengan Rp28,76 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp359,48 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan liabilitas sewa, sejalan dengan kewajiban jangka panjang yang tercatat berdasarkan PSAK 73: Sewa.

Selanjutnya, seiring diberlakukannya amendemen PSAK 73 per 1 Januari 2025 dan penerapan ISAK 115 yang menggantikan ISAK 30, Perseroan telah mengambil langkah awal dalam menyelaraskan perlakuan akuntansi atas transaksi jual dan sewa-balik. ISAK 115 mengatur bahwa keuntungan dari transaksi semacam ini hanya dapat diakui sebatas hak atas aset yang benar-benar dialihkan kepada pihak pembeli, serta mewajibkan pengukuran ulang liabilitas sewa secara lebih konservatif.

Penyesuaian ini mendorong pengakuan yang lebih transparan dan akurat atas komitmen jangka panjang Perseroan, khususnya terkait aset yang digunakan dalam operasional sehari-hari.

DAMPAK STRATEGIS BAGI PERSEROAN

Peningkatan liabilitas jangka panjang akibat implementasi PSAK 73 dan ISAK 115 bukan merupakan beban tambahan secara kas, melainkan mencerminkan pencatatan yang lebih realistis atas struktur pembiayaan jangka panjang. Ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap kewajiban kontraktual Perseroan.

Dari sisi strategis, kebijakan ini memperkuat disiplin pengelolaan aset dan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan melalui pelaporan keuangan yang lebih kredibel dan sesuai standar terkini. Perseroan menyambut perubahan ini sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Total non-current liabilities in 2024 was recorded at Rp388.24 billion, an increase of 8.00% or Rp28.76 billion compared to 2023 of Rp359.48 billion. The increase was mainly from an increase in lease liabilities, in line with the non-current liabilities recorded under PSAK 73: Leases.

Furthermore, with the enactment of the amendments to PSAK 73 as of January 1, 2025 and the adoption of ISAK 115 which replaces ISAK 30, the Company has taken the first step in harmonizing the accounting treatment of sale and leaseback transactions. ISAK 115 stipulates that gains from such transactions can only be recognized to the extent that the rights to the assets are actually transferred to the buyer, and requires a more conservative remeasurement of lease liabilities.

These adjustments encourage more transparent and accurate recognition of the Company's long-term commitments, particularly in relation to assets used in day-to-day operations.

STRATEGIC IMPACT FOR THE COMPANY

The increase in non-current liabilities due to the implementation of PSAK 73 and ISAK 115 is not an additional cash expense, but reflects a more realistic recording of the long-term financing structure. This provides a more comprehensive picture of the Company's contractual obligations.

From a strategic perspective, this policy strengthens the discipline of asset and financial management, and enhances stakeholder confidence through more credible financial reporting in accordance with the latest standards. The Company welcomes this change as part of its commitment to good governance and long-term business sustainability.



EKUITAS

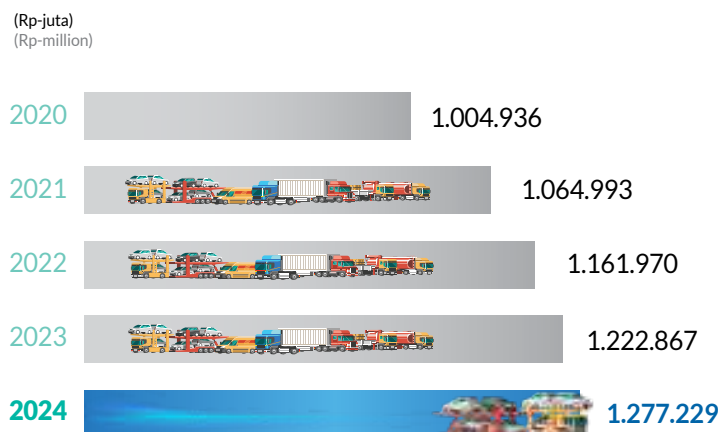
EQUITY

Jumlah ekuitas Perusahaan tahun 2024 mencapai Rp1,28 triliun, mengalami kenaikan 4,45% dibandingkan jumlah ekuitas tahun 2023 sebesar Rp1,22 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2020-2024*, ekuitas Perusahaan mengalami pertumbuhan 6,18%.

In 2024, total equity of the Company reached Rp1.28 trillion, an increase of 4.45% compared to total equity in 2023 of Rp1.22 trillion. At the Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2020-2024, the Company's equity experienced a growth of 6.18%.

Jumlah Ekuitas 2020-2024

Total Equity in 2020-2024



Ekuitas 2023-2024

Equity in 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Modal Saham Share Capital	931.299	931.299	-	-	
Saldo Laba Retained Earnings	345.930	291.568	54.362	18,64	↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.277.229	1.222.867	54.362	4,45	↑

Ekuitas Perseroan pada akhir Desember 2024 sebesar Rp1,28 triliun, meningkat 4,45% atau setara dengan Rp54,36 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,22 triliun. Kenaikan ini sepenuhnya bersumber dari pertumbuhan saldo laba, yang naik sebesar Rp54,36 miliar atau 18,64% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan saldo laba ini merupakan hasil dari kinerja operasional yang solid sepanjang tahun 2024, tercermin dari laba tahun berjalan sebesar Rp212,22 miliar, yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa strategi bisnis dan efisiensi operasional yang diterapkan telah berdampak positif terhadap profitabilitas Perseroan.

The Company's equity at the end of December 2024 amounted to Rp1.28 trillion, an increase of 4.45% or Rp54.36 billion compared to 2023 of Rp1.22 trillion. This increase was entirely due to the growth of retained earnings, which increased by Rp54.36 billion or 18.64% compared to the previous year.

This increase in retained earnings was the result of solid operational performance throughout 2024, reflected in the profit of the year of Rp212.22 billion, which increased compared to the previous year. This growth shows that the business strategy and operational efficiency carried out have had a positive impact on the Company's profitability.



DAMPAK STRATEGIS BAGI PERSEROAN

Bagi Perseroan, peningkatan ekuitas tidak hanya memperkuat struktur permodalan, tetapi juga meningkatkan daya tahan finansial dan fleksibilitas untuk mendanai ekspansi atau investasi di masa mendatang. Ekuitas yang solid menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga kepercayaan investor dan memastikan keberlanjutan jangka panjang perusahaan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

STRATEGIC IMPACT FOR THE COMPANY

For the Company, increasing equity not only strengthens the capital structure, but also increases financial resilience and flexibility to fund future expansion or investment. Solid equity is a strong foundation in maintaining investor confidence and ensuring the Company's long-term sustainability amidst the dynamics of the ever-evolving industry.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tahun 2024 menjadi cerminan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Perseroan. Peningkatan kinerja operasional dan efisiensi biaya mendorong pertumbuhan laba yang solid, sekaligus memperkuat posisi keuangan dan menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Year of 2024 serves as a reflection of sustainable growth for the Company. Improvements in operational performance and cost efficiency drive solid profit growth, while also strengthening the financial position and creating added value for shareholders.

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Operasi Operating Revenue	824.596	735.205	89.391	12,16	↑
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(477.079)	(408.728)	(68.351)	16,72	↑
Laba Bruto Gross Profit	347.517	326.477	21.040	6,44	↑
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(89.424)	(76.343)	(13.081)	17,13	↑
Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya Other Operating Income (Expenses)	(1.504)	(4.925)	3.422	(69,47)	↓
Laba Usaha Operating Profit	256.589	245.209	11.380	4,64	↑
Pendapatan (Beban) Keuangan Financial Income (Expenses)	13.257	(8.387)	21.645	(258,06)	↓
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	269.846	236.822	33.024	13,94	↑

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)	(57.630)	(45.966)	(11.665)	25,38	↑
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	212.216	190.856	21.360	11,19	↑
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	212.216	190.856	21.360	11,19	↑
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earnings per Share (Full Amount)	116,71	104,96	12	11,19	↑

PENDAPATAN OPERASI

Perseroan berhasil membukukan pendapatan operasi tahun 2024 sebesar Rp824,60 miliar, meningkat 12,16% atau setara dengan Rp89,39 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp735,20 miliar. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola pertumbuhan volume layanan serta mengoptimalkan peluang bisnis di tengah tren pemulihan ekonomi dan industri otomotif nasional.

Peningkatan pendapatan terutama didorong oleh:

1. **Pertumbuhan Volume Ekspor-Impor Kendaraan**
Seiring dengan pulihnya aktivitas manufaktur dan distribusi otomotif global, volume pergerakan kendaraan melalui terminal internasional meningkat signifikan. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan layanan seperti *cargodoring*, *stevedoring*, dan pengelolaan lapangan di Car Terminal.
2. **Permintaan Pasar Domestik yang Meningkat**
Kenaikan konsumsi domestik serta peluncuran produk baru dari beberapa produsen otomotif turut mendorong mobilitas distribusi kendaraan di pasar dalam negeri, berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dari terminal domestik.
3. **Optimalisasi Layanan dan Pemanfaatan Aset**
Perseroan berhasil meningkatkan produktivitas aset operasional melalui pemanfaatan dermaga dan lapangan secara lebih efisien, serta implementasi sistem manajemen operasional yang lebih terintegrasi. Hal ini mendorong peningkatan frekuensi dan nilai transaksi layanan.
4. **Diversifikasi Sumber Pendapatan Pendukung**
Pendapatan dari kerja sama pelabuhan, jasa penempatan manajemen, serta pendapatan lain-lain menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan mendukung keberlanjutan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Peningkatan pendapatan operasi berkontribusi positif terhadap:

1. Pertumbuhan laba bruto, yang naik sebesar 6,44% menjadi Rp347,52 miliar.
2. Peningkatan laba usaha, meskipun dihadapkan pada tekanan beban operasional yang juga meningkat.

OPERATING REVENUE

The Company successfully recorded operating revenue of Rp824.60 billion in 2024, an increase of 12.16% or equivalent to Rp89.39 billion compared to Rp735.20 billion in 2023. This increase reflects the Company's success in managing service volume growth and optimizing business opportunities amid the recovery trends in the national economy and automotive industry.

The increase in revenue was mainly driven by:

1. **Growth in Vehicle Export-Import Volume**
With the recovery of global automotive manufacturing and distribution activities, the volume of vehicle movements through international terminals rose significantly. This had a direct impact on the growth of services such as *cargodoring*, *stevedoring*, and yard management at the Car Terminal.
2. **Increased Domestic Market Demand**
Higher domestic consumption and the launch of new products by several automotive manufacturers boosted the distribution mobility of vehicles in the domestic market, contributing to revenue growth from domestic terminals.
3. **Service Optimization and Asset Utilization**
The Company successfully enhanced operational asset productivity by utilizing docks and yards more efficiently and implementing a more integrated operational management system. This led to an increase in service transaction frequency and value.
4. **Diversification of Supporting Revenue Sources**
Revenue from port cooperation, management placement services, and other incomes showed stable growth, supporting the sustainability of overall financial performance.

The increase in operating revenue contributed positively to:

1. Growth in gross profit, which rose by 6.44% to Rp347.52 billion.
2. Increase in operating profit, despite facing rising operational cost pressures.



3. Penguatan struktur keuangan, khususnya melalui peningkatan arus kas dari aktivitas operasional.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan di tahun berjalan memperkuat posisi Perseroan dalam menjaga daya saing di industri logistik dan pelabuhan kendaraan. Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat integrasi layanan serta menjajaki peluang pengembangan baru guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Beban Pokok Pendapatan

Seiring dengan meningkatnya pendapatan operasi yang menyebabkan kenaikan pada kerja sama mitra usaha, maka beban pokok pendapatan tahun 2024 turut mengalami kenaikan 16,72% sehingga dibukukan menjadi sebesar Rp477,08 miliar dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp408,73 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan aktivitas operasional dan peningkatan volume layanan di seluruh segmen utama Perseroan.

1. Analisis Perubahan dan Penyebabnya
Peningkatan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh:
 - a. Peningkatan Volume Layanan Operasional
Bertambahnya frekuensi kegiatan bongkar muat, pengelolaan lapangan, serta layanan dermaga, baik di terminal domestik maupun internasional, mendorong kebutuhan sumber daya dan biaya operasional yang lebih tinggi.
 - b. Penyesuaian Biaya Operasional
Beberapa komponen biaya mengalami penyesuaian, antara lain biaya tenaga kerja operasional, pemeliharaan aset, serta logistik dan transportasi pendukung. Hal ini mencerminkan upaya menjaga kualitas layanan di tengah peningkatan aktivitas bisnis.
 - c. Inflasi dan Kenaikan Tarif Pihak Ketiga
Terjadinya kenaikan harga bahan bakar dan tarif jasa dari mitra kerja eksternal turut memberikan tekanan terhadap struktur biaya, terutama pada operasional lapangan dan transportasi barang.
2. Dampak Terhadap Kinerja Perseroan
Meskipun beban pokok pendapatan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan, Perseroan tetap berhasil menjaga margin laba bruto positif, yakni sebesar Rp347,52 miliar atau meningkat 6,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional masih dapat dijaga secara optimal.

Ke depan, Perseroan akan terus melakukan upaya pengendalian biaya melalui:

- a. Penerapan teknologi dan digitalisasi operasional.
- b. Optimalisasi sumber daya.
- c. Evaluasi berkala atas kontrak dan tarif pihak ketiga.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga profitabilitas serta meningkatkan daya saing jangka panjang Perseroan di tengah tantangan biaya yang semakin dinamis.

3. Strengthening of the financial structure, particularly through increased cash flow from operating activities.

Overall, the revenue growth during the year strengthened the Company's position in maintaining competitiveness in the logistics and vehicle port industries. Moving forward, the Company will continue to strengthen service integration and explore new development opportunities to ensure sustainable growth.

Cost of Revenue

As operating revenue increased, leading to higher collaboration with business partners, the cost of revenue in 2024 also rose by 16.72%, recorded at Rp477.08 billion compared to Rp408.73 billion in 2023. This increase aligns with the growth in operational activities and service volume across all of the Company's main segments.

1. Analysis of Changes and Causes
The increase in cost of revenue was mainly caused by:
 - a. Increase in Operational Service Volume
The rising frequency of loading and unloading activities, yard management, and dock services, both at domestic and international terminals, drove higher demand for resources and operational costs.
 - b. Adjustment of Operational Costs
Several cost components were adjusted, including costs for operational labor, asset maintenance, as well as logistics and supporting transportation. This reflects efforts to maintain service quality amid rising business activities.
 - c. Inflation and Third-Party Rate Increases
Increases in fuel prices and service rates from external partners added pressure on the cost structure, particularly in yard operations and goods transportation.
2. Impact on Company Performance
Despite the cost of revenue rising higher than revenue growth, the Company successfully maintained a positive gross profit margin, reaching Rp347.52 billion or an increase of 6.44% compared to the previous year. This demonstrates that operational efficiency was still maintained optimally.

Looking ahead, the Company will continue the efforts to control costs through:

- a. Implementation of technology and operational digitalization.
- b. Optimization of resource utilization.
- c. Periodic evaluation of third-party contracts and rates.

These measures are expected to maintain profitability and strengthen the Company's long-term competitiveness amid increasingly dynamic cost challenges.



Beban Umum dan Administrasi

Di tahun 2024, Perseroan membukukan beban umum dan administrasi sebesar Rp89,42 miliar, meningkat 17,13% atau setara dengan Rp13,08 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp76,34 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan ekspansi kegiatan usaha dan penguatan kapasitas organisasi dalam mendukung pertumbuhan operasional.

1. Analisis Perubahan dan Penyebabnya

Kenaikan beban umum dan administrasi utamanya disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- a. Penyesuaian Biaya Pegawai dan Pengembangan SDM
Seiring dengan meningkatnya skala usaha, terdapat kenaikan beban terkait remunerasi, tunjangan, serta program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan untuk mendukung transformasi operasional dan digitalisasi layanan.
- b. Kebutuhan Dukungan Operasional yang Lebih Besar
Aktivitas usaha yang semakin kompleks menuntut penguatan fungsi-fungsi pendukung, seperti teknologi informasi, layanan legal dan keuangan, serta biaya operasional kantor pusat dan cabang.
- c. Peningkatan Aktivitas Korporasi dan Kepatuhan Regulasi
Biaya yang terkait dengan aktivitas audit, konsultasi, dan pelaporan yang lebih intensif sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan juga berkontribusi terhadap peningkatan beban administrasi.

2. Dampak Terhadap Kinerja Perseroan

Walaupun terjadi peningkatan beban, Perseroan tetap mampu mempertahankan laba usaha positif sebesar Rp256,59 miliar, naik 4,64% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kenaikan beban umum dan administrasi masih berada dalam batas wajar dan sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan.

Ke depan, Perseroan akan terus melakukan evaluasi berkala atas struktur biaya, serta menerapkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran operasional tanpa mengurangi kualitas layanan dan dukungan terhadap kinerja bisnis.

Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya

Di tahun 2024, Perseroan mencatat beban operasi lainnya sebesar Rp1,50 miliar, turun 69,47% atau setara dengan Rp3,42 miliar dibandingkan tahun 2023 di mana Perseroan membukukan beban operasi lainnya sebesar Rp4,92 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan beban sebesar 69,47%, yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan laba usaha Perseroan.

General and Administrative Expenses

In 2024, the Company recorded general and administrative expenses of Rp89.42 billion, an increase of 17.13% or Rp13.08 billion compared to the previous year's Rp76.34 billion. This increase aligns with the expansion of business activities and the strengthening of organizational capacity to support operational growth.

1. Analysis of Changes and Causes

The increase in general and administrative expenses was mainly caused by the following factors:

- a. Adjustment of Employee Costs and HR Development
As the business scale grew, there was an increase in expenses related to remuneration, allowances, as well as training and employee competency development programs to support operational transformation and service digitalization.
- b. Greater Need for Operational Support
The increasingly complex business activities required the strengthening of supporting functions, such as information technology, legal and financial services, as well as operational costs of head offices and branches.
- c. Increase in Corporate Activities and Regulatory Compliance
Costs related to audit, consulting, and more intensive reporting activities as part of strengthening corporate governance also contributed to the increase in administrative expenses.

2. Impact on the Company's Performance

Despite the increase in expenses, the Company was still able to maintain a positive operating profit of Rp256.59 billion, up 4.64% from the previous year. This indicates that the increase in general and administrative expenses remains within reasonable limits and is aligned with the sustainable growth strategy.

Going forward, the Company will continue to conduct periodic evaluations of the cost structure and apply principles of efficiency and accountability in managing operational budgets without reducing the quality of services and support for business performance.

Other Operating Income (Expenses)

Other operating income and/or expenses are derived from
In 2024, the Company recorded other operating expenses of Rp1.50 billion, a decrease of 69.47% or equivalent to Rp3.42 billion compared to 2023 when the Company recorded other operating expenses of Rp4.92 billion. This decrease was due to a 69.47% reduction in expenses, which positively contributed to the Company's operating profit growth.



1. Analisis Perubahan dan Penyebabnya
 Penurunan beban ini terutama disebabkan oleh:
 - a. Efisiensi dalam Pengelolaan Aset dan Kegiatan Non-Inti: Perseroan melakukan perbaikan terhadap proses operasional non-inti dan pengelolaan aset yang tidak terkait langsung dengan aktivitas utama, sehingga mampu menekan potensi kerugian atau beban yang timbul dari transaksi lain-lain.
 - b. Minimnya Kerugian Selisih Kurs dan Biaya Non-Rutin: Pada tahun berjalan, dampak dari fluktuasi nilai tukar serta biaya non-rutin atau insidental tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
 - c. Kebijakan Pencadangan yang Lebih Terkendali: Tidak terdapat pencadangan signifikan terhadap aset atau piutang dalam tahun berjalan yang berdampak pada pos beban lainnya.
2. Dampak Terhadap Kinerja
 Penurunan beban operasi lainnya memberikan ruang perbaikan terhadap profitabilitas Perseroan, tercermin dari kenaikan laba usaha sebesar 4,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengendalikan potensi biaya di luar kegiatan operasional utama.

Perseroan akan terus menjaga efisiensi dalam aktivitas pendukung dan meminimalkan beban yang tidak berdampak langsung pada kegiatan inti, sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan biaya yang disiplin dan berorientasi pada hasil.

Pendapatan (Beban) Keuangan

Di tahun 2024, Perseroan mencatat pendapatan keuangan sebesar Rp13,26 miliar, meningkat 258,06% atau setara dengan Rp21,64 miliar dibandingkan tahun 2023 di mana Perseroan membukukan beban keuangan sebesar Rp4,92 miliar. Perubahan ini merepresentasikan perbaikan signifikan sebesar Rp21,65 miliar, atau meningkat 258,06%, dan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan laba sebelum pajak.

1. Analisis Perubahan dan Penyebabnya
 Perubahan yang signifikan ini terutama disebabkan oleh:
 - a. Peningkatan Pendapatan Bunga dari Penempatan Dana: Selama tahun berjalan, Perseroan mengelola kas dan setara kas secara lebih optimal, termasuk melalui penempatan dana jangka pendek yang memberikan imbal hasil lebih tinggi seiring dengan tren suku bunga pasar yang meningkat.
 - b. Menurunnya Beban Bunga Pinjaman: Beban bunga menurun sebagai akibat dari pelunasan sebagian kewajiban keuangan atau restrukturisasi utang yang lebih efisien, sehingga menurunkan tekanan dari sisi biaya pendanaan.
 - c. Manajemen Likuiditas yang Lebih Baik: Adanya peningkatan arus kas dari aktivitas operasi memungkinkan Perseroan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan berbunga, sekaligus memperkuat posisi kas bersih.

1. Analysis of Changes and Causes
 The decrease in expenses was mainly due to:
 - a. Efficiency in Asset Management and Non-Core Activities: The Company improved its processes related to non-core operations and asset management that are not directly linked to main activities, thus reducing potential losses or expenses arising from miscellaneous transactions.
 - b. Lower Exchange Rate Losses and Non-Routine Costs: During the year, the impact of exchange rate fluctuations and non-routine or incidental costs was recorded lower compared to the previous year.
 - c. More Controlled Provisioning Policies: There were no significant provisions related to assets or receivables during the year that impacted other expense items.
2. Impact on Performance
 The decrease in other operating expenses provided room for improved profitability for the Company, reflected by a 4.64% increase in operating profit compared to the previous year. This shows management's effectiveness in controlling potential costs outside the main operational activities.

The Company will continue to maintain efficiency in supporting activities and minimize expenses that do not directly impact core activities, as part of its commitment to disciplined and result-oriented cost management.

Financial Income (Expenses)

In 2024, the Company recorded financial income of Rp13.26 billion, an increase of 258.06% or equivalent to Rp21.64 billion compared to 2023, when the Company recorded financial expenses of Rp4.92 billion. This change represents a significant improvement of Rp21.65 billion, or 258.06%, and became one of the supporting factors for the growth in profit before tax.

1. Analysis of Changes and Causes
 This significant change was mainly driven by:
 - a. Increase in Interest Income from Fund Placements: During the year, the Company managed cash and cash equivalents more optimally, including through short-term fund placements that provided higher returns in line with rising market interest rates.
 - b. Decrease in Interest Expenses on Loans: Interest expenses decreased due to partial repayment of financial obligations or more efficient debt restructuring, reducing pressure from financing costs.
 - c. Better Liquidity Management: Improved cash flow from operating activities allowed the Company to reduce its reliance on interest-bearing financing sources while strengthening its net cash position.



2. Dampak Terhadap Kinerja Perseroan

Pendapatan keuangan bersih ini memberikan dampak langsung terhadap kenaikan laba sebelum pajak sebesar 13,95% atau senilai Rp269,85 miliar di tahun 2024. Hal ini memperkuat struktur keuangan Perseroan dan memberikan fleksibilitas lebih dalam perencanaan investasi serta pengelolaan modal kerja.

Ke depan, Perseroan akan terus menjaga pengelolaan keuangan yang *prudent* dengan fokus pada efisiensi pembiayaan dan optimalisasi aset lancar guna mempertahankan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan

Di tahun 2024, Perseroan mencatat beban pajak penghasilan badan sebesar Rp57,63 miliar, meningkat 25,38% atau setara dengan Rp11,66 miliar dibandingkan tahun 2023 di mana Perseroan membukukan beban pajak penghasilan badan sebesar Rp45,97 miliar. Kenaikan ini selaras dengan peningkatan laba sebelum pajak yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun berjalan.

1. Analisis Perubahan dan Penyebabnya

Peningkatan beban pajak terutama disebabkan oleh:

- Pertumbuhan Laba Sebelum Pajak**
Seiring dengan peningkatan kinerja operasional dan keuangan, laba sebelum pajak meningkat sebesar 13,95% menjadi Rp269,85 miliar. Kenaikan laba ini secara langsung berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus dibayarkan sesuai tarif pajak yang berlaku.
- Minimnya Koreksi Fiskal dan Kompensasi Rugi Fiskal**
Tidak terdapat manfaat pajak signifikan dari koreksi fiskal atau pemanfaatan kompensasi rugi tahun sebelumnya yang dapat menurunkan beban pajak di tahun berjalan.
- Kepatuhan terhadap Peraturan Pajak yang Berlaku**
Perseroan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengakuan dan pelaporan pajak kini maupun pajak tangguhan, yang mencerminkan tata kelola yang sehat dan akuntabel.

2. Dampak Terhadap Kinerja Perseroan

Walaupun beban pajak meningkat, Perseroan tetap mampu mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp212,22 miliar, tumbuh 11,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak tetap proporsional terhadap pertumbuhan profitabilitas dan tidak menghambat pencapaian target kinerja keuangan secara keseluruhan.

Ke depan, Perseroan akan terus memastikan kepatuhan pajak yang baik serta melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang cermat untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan usaha.

2. Impact on the Company's Performance

This net financial income had a direct impact on the 13.95% increase in profit before tax, amounting to Rp269.85 billion in 2024. This strengthened the Company's financial structure and provided greater flexibility in investment planning and working capital management.

Looking ahead, the Company will continue to maintain prudent financial management by focusing on financing efficiency and optimization of current assets to sustain healthy and sustainable financial performance.

Corporate Income Tax Benefit (Expense)

In 2024, the Company recorded corporate income tax expenses of Rp57.63 billion, an increase of 25.38% or equivalent to Rp11.66 billion compared to 2023, when the Company recorded corporate income tax expenses of Rp45.97 billion. This increase was in line with the rise in profit before tax earned by the Company throughout the year.

1. Analysis of Changes and Causes

The increase in tax expenses was mainly driven by:

- Growth in Profit Before Tax**
Along with improved operational and financial performance, profit before tax rose by 13.95% to Rp269.85 billion. This profit growth directly impacted the increase in taxes payable according to the applicable tax rates.
- Minimal Fiscal Corrections and Loss Compensation**
There were no significant tax benefits from fiscal corrections or the utilization of prior-year tax loss compensations that could reduce tax expenses in the current year.
- Compliance with Applicable Tax Regulations**
The Company fulfilled its tax obligations in accordance with prevailing regulations, including the recognition and reporting of current and deferred taxes, reflecting sound and accountable governance.

2. Impact on the Company's Performance

Despite the increase in tax expenses, the Company successfully recorded a net profit of Rp212.22 billion, growing by 11.19% compared to the previous year. This indicates that the tax burden remained proportional to profitability growth and did not hinder the achievement of overall financial performance targets.

Going forward, the Company will continue to ensure good tax compliance and perform careful tax planning to support operational efficiency and business sustainability.



Laba Tahun Berjalan

Dengan kinerja pendapatan operasi dan beban-beban sebagaimana telah disampaikan di atas, Perseroan berhasil mencatat perolehan laba bersih di akhir tahun 2024 sebesar Rp212,22 miliar, meningkat 11,19% atau setara dengan Rp21,36 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp190,85 miliar. Kinerja positif ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan pendapatan dan mengelola biaya secara efisien di tengah dinamika pasar dan operasional.

1. Faktor Pendukung Pertumbuhan Laba
Peningkatan laba tahun berjalan didorong oleh kombinasi dari beberapa faktor strategis, antara lain:
 - a. Kinerja Operasional yang Solid
Pertumbuhan pendapatan sebesar 12,16% berhasil melampaui kenaikan beban pokok pendapatan, sehingga menghasilkan laba bruto yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
 - b. Efisiensi Beban Operasi Lainnya dan Keuangan
Penurunan signifikan pada beban operasi lainnya dan peralihan beban keuangan menjadi pendapatan keuangan bersih turut memperkuat posisi laba usaha dan laba sebelum pajak.
 - c. Pengelolaan Pajak yang Proporsional
Kenaikan beban pajak tetap berada dalam proporsi wajar terhadap peningkatan laba, menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan efisien.
2. Dampak Terhadap Perseroan
Pertumbuhan laba tahun berjalan memberikan dampak positif terhadap:
 - a. Peningkatan nilai bagi pemegang saham, tercermin dari kenaikan laba per saham dasar menjadi Rp116,71 per lembar (nilai penuh).
 - b. Memperkuat posisi modal dan struktur permodalan Perseroan untuk ekspansi atau investasi strategis di masa mendatang.
 - c. Menunjukkan resiliensi dan daya saing Perseroan, khususnya dalam sektor layanan pelabuhan kendaraan yang terus berkembang.

Ke depan, Perseroan akan terus melanjutkan strategi pertumbuhan yang terukur, memperkuat efisiensi biaya, serta menjaga tata kelola yang baik guna menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Profit for the Year

With the operating revenue and expense performance described above, the Company successfully recorded a net profit of Rp212.22 billion at the end of 2024, an increase of 11.19% or Rp21.36 billion compared to the previous year's Rp190.85 billion. This positive performance reflects the Company's success in maintaining revenue growth continuity and efficiently managing costs amid market and operational dynamics.

1. Factors Supporting Profit Growth
The increase in profit for the year was driven by a combination of several strategic factors, including:
 - a. Solid Operational Performance
Revenue growth of 12.16% outpaced the increase in cost of goods sold, resulting in a higher gross profit compared to the previous year.
 - b. Efficiency in Other Operating and Financial Expenses
A significant decrease in other operating expenses and a shift from financial expenses to net financial income strengthened the operating and pre-tax profit positions.
 - c. Proportional Tax Management
The increase in tax expenses remained within a reasonable proportion to profit growth, demonstrating careful and efficient fiscal management.
2. Impact on the Company
The growth in profit for the year had a positive impact on:
 - a. Increasing shareholder value, reflected in a rise in basic earnings per share to Rp116.71 per share (full amount)
 - b. Strengthening the Company's capital position and funding structure for future expansion or strategic investments.
 - c. Demonstrating the Company's resilience and competitiveness, particularly in the growing automotive port services sector.

Looking ahead, the Company will continue to pursue measured growth strategies, strengthen cost efficiency, and maintain good governance to create long-term value for all stakeholders.



LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOWS

"Arus kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perusahaan dalam suatu periode tertentu."

"Cash Flow provides an overview of the Company's income and expenses in a certain period."

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2020-2024

Development of Cash and Cash Equivalents at End of the Year 2020-2024

(Rp-juta)
(Rp-million)



Kas dan setara kas akhir periode 2024 menunjukkan kenaikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Cash and cash equivalents at the end of 2024 period showed an increase/decrease as shown in the table below.

Arus Kas 2023-2024

Cash Flows in 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities	380.190	249.113	131.077	52,62	↑
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities	(24.866)	(27.239)	2.374	(8,71)	↓
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities	(215.108)	(571.453)	356.344	(62,36)	↓
Kenaikan/(Penurunan) neto kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	140.216	(349.579)	489.795	(140,11)	↓
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	670.182	1.019.761	(349.579)	(34,28)	↓
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	810.397	670.182	140.216	20,92	↑

Posisi kas dan setara kas Perseroan di akhir tahun 2024 dibukukan sebesar Rp810,40 miliar, meningkat 20,92% atau setara dengan Rp140,22 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp670,18 miliar.

The Company's cash and cash equivalents position at the end of 2024 was recorded at Rp810.40 billion, an increase of 20.92% or Rp140.22 billion compared to 2023's figure of Rp670.18 billion.



1. Analisis Perubahan dan Penyebabnya
Kenaikan ini terutama didorong oleh:
 - a. Kinerja Operasional yang Solid
Peningkatan signifikan pada arus kas dari aktivitas operasi, yang mencapai Rp380,19 miliar atau tumbuh 52,62% dari tahun sebelumnya, menjadi kontributor utama terhadap kenaikan kas. Hal ini mencerminkan efektivitas Perseroan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran operasional secara efisien.
 - b. Pengendalian Arus Kas Investasi dan Pendanaan
Pengeluaran untuk aktivitas investasi tercatat lebih terkendali, sementara arus kas keluar dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan tajam sebesar 62,36%, antara lain akibat berkurangnya kewajiban pembayaran pinjaman dan distribusi dividen yang lebih selektif. Hal ini turut menjaga ketersediaan kas bersih sepanjang tahun berjalan.
 - c. Strategi Pengelolaan Likuiditas yang *Prudent*
Perseroan menerapkan pendekatan yang konservatif dalam pengelolaan dana dan permodalan, termasuk optimalisasi pengembalian dari penempatan kas jangka pendek, serta efisiensi dalam penggunaan kas untuk belanja modal dan pembiayaan.
2. Dampak terhadap Kinerja Perseroan
Peningkatan posisi kas memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ketahanan dan fleksibilitas keuangan Perseroan, antara lain:
 - a. Memperkuat struktur likuiditas jangka pendek, yang sangat krusial dalam menjaga kontinuitas operasional dan menghadapi dinamika pasar.
 - b. Meningkatkan kemampuan untuk membiayai ekspansi dan investasi strategis, baik untuk peningkatan kapasitas layanan maupun pengembangan infrastruktur digital.
 - c. Menurunkan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, yang pada akhirnya dapat menjaga beban keuangan tetap terkendali dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang.

Dengan posisi kas yang kuat, Perseroan memiliki landasan yang solid untuk melanjutkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Pada akhir tahun 2024, Perusahaan mencatatkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp380,19 miliar, meningkat 52,62% atau setara dengan Rp131,08 miliar dibandingkan tahun 2023 di mana Perusahaan mencatatkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp249,11 miliar.

1. Analisis Perubahan dan Penyebabnya
Kenaikan arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh:

1. Analysis of Changes and Causes
This increase is primarily driven by:
 - a. Solid Operational Performance
A significant increase in cash flow from operating activities, reaching Rp380.19 billion or growing by 52.62% from the previous year, was the main contributor to the increase in cash. This reflects the Company's effectiveness in managing revenue and operational expenditures efficiently.
 - b. Control of Investment and Financing Cash Flow
Expenditures for investment activities were more controlled, while cash outflows from financing activities decreased sharply by 62.36%, partly due to reduced loan repayment obligations and more selective dividend distribution. This also helped maintain net cash availability throughout the year.
 - c. Prudent Liquidity Management Strategy
The Company applied a conservative approach in managing funds and capital, including optimizing returns from short-term cash placements, as well as efficiency in cash usage for capital expenditures and financing.
2. Impact on Company Performance
The increase in cash position has a significant positive impact on the company's financial resilience and flexibility, including:
 - a. Strengthening the short-term liquidity structure, which is crucial in maintaining operational continuity and dealing with market dynamics.
 - b. Enhancing the ability to finance expansion and strategic investments, both for service capacity improvements and digital infrastructure development.
 - c. Reducing reliance on external financing, which ultimately helps control financial burdens and improve long-term profitability.

With a strong cash position, the Company has a solid foundation to continue its sustainable growth strategy and create added value for all stakeholders.

Net Cash from Operating Activities

At the end of 2024, the Company recorded a net cash inflow from operating activities of Rp380.19 billion, an increase of 52.62% or Rp131.08 billion compared to 2023, when the Company recorded a net cash inflow from operating activities of Rp249.11 billion.

1. Analysis of Changes and Their Causes
The increase in cash flow from operating activities is primarily due to:

- a. **Peningkatan Laba Operasional**
Perseroan mencatat pertumbuhan laba usaha yang stabil seiring dengan peningkatan pendapatan operasi dan efisiensi pada beban lainnya. Hal ini memberikan kontribusi langsung terhadap kenaikan arus kas operasional karena lebih banyak pendapatan yang dapat dikonversi menjadi kas.
 - b. **Penerimaan Piutang Usaha yang Lebih Cepat**
Peningkatan efektivitas dalam manajemen piutang dagang dan percepatan penagihan kepada pelanggan berhasil memperpendek siklus kas dan meningkatkan kas masuk dari aktivitas usaha utama.
 - c. **Pengelolaan Modal Kerja yang Lebih Efisien**
Pengendalian terhadap persediaan dan kewajiban lancar dijalankan secara lebih terukur, sehingga mengoptimalkan arus kas tanpa mengganggu kelangsungan operasional.
 - d. **Kontribusi Positif dari Pendapatan Keuangan**
Beralihnya posisi beban keuangan menjadi pendapatan keuangan bersih juga memperkuat kinerja arus kas operasional, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan dana dan struktur permodalan.
2. **Dampak terhadap Kinerja Perseroan**
Arus kas operasi yang kuat menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan bisnis. Kinerja ini memberikan dampak positif terhadap:
- a. Kemampuan pendanaan internal untuk mendukung kegiatan investasi dan ekspansi usaha tanpa harus bergantung pada pinjaman eksternal.
 - b. Stabilitas keuangan jangka pendek, meningkatkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban operasional dan keuangan secara tepat waktu.
 - c. Penguatan fleksibilitas strategis untuk menghadapi dinamika pasar maupun mengeksplorasi peluang pertumbuhan di masa mendatang.

Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi juga mencerminkan keandalan model bisnis Perseroan dalam menghasilkan kas yang konsisten dari kegiatan inti, serta kematangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan secara berkelanjutan.

Kas Neto dari Aktivitas Investasi

Perseroan membukukan penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi di tahun 2024 sebesar Rp24,87 miliar, turun 8,71% atau setara dengan Rp2,37 miliar dibandingkan tahun 2023 di mana Perseroan mencatatkan penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp27,24 miliar.

1. **Analisis Perubahan dan Penyebabnya**
Penurunan penggunaan kas untuk investasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:
 - a. **Pengendalian Belanja Modal yang Lebih Selektif**
Perseroan menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dalam realisasi belanja modal (*capital expenditure*), dengan fokus pada investasi strategis yang berdampak langsung terhadap efisiensi dan pertumbuhan jangka panjang. Ini mencakup penundaan atau penyesuaian beberapa proyek non-prioritas guna menjaga kesehatan kas.

- a. **Increase in Operating Profit**
The Company recorded stable growth in operating profit along with an increase in operating revenue and efficiency in other expenses. This directly contributed to the rise in operational cash flow as more revenue was converted into cash.
 - b. **Faster Accounts Receivable Collection**
Improved effectiveness in managing trade receivables and accelerating collections from customers successfully shortened the cash cycle and increased cash inflows from core business activities.
 - c. **More Efficient Working Capital Management**
Control over inventories and current liabilities was executed in a more measured way, optimizing cash flow without disrupting operational continuity.
 - d. **Positive Contribution from Financial Income**
The shift from financial expenses to net financial income also strengthened operating cash flow performance, reflecting efficiency in fund management and capital structure.
2. **Impact on Company Performance**
Strong operating cash flow serves as the main foundation for business sustainability. This performance has a positive impact on:
- a. Internal funding capability to support investment activities and business expansion without relying on external loans.
 - b. Short-term financial stability, improving the Company's ability to meet operational and financial obligations on time.
 - c. Strengthening strategic flexibility to navigate market dynamics and explore future growth opportunities.

The increase in cash flow from operating activities also reflects the reliability of the Company's business model in generating consistent cash from core activities, as well as maturity in managing financial resources sustainably

Net Cash from Investing Activities

The Company recorded a net cash outflow for investing activities in 2024 of Rp24.87 billion, decreased by 8.71% or Rp2.37 billion compared to 2023, in which the Company recorded a net cash outflow for investing activities of Rp27.24 billion.

1. **Analysis of Changes and Causes**
The decrease in cash used for investment is due to several key factors, including:
 - a. **More Selective Capital Expenditure Control**
The Company adopted a more cautious approach in capital expenditure realization, focusing on strategic investments that directly impact efficiency and long-term growth. This includes delaying or adjusting some non-priority projects to maintain cash health.



- b. **Optimalisasi Aset yang Sudah Ada**
Alih-alih melakukan ekspansi besar-besaran, Perseroan memaksimalkan produktivitas dari aset dan infrastruktur yang telah dimiliki. Pendekatan ini berhasil menekan kebutuhan investasi tambahan tanpa mengorbankan kualitas operasional.
 - c. **Efisiensi pada Investasi Portofolio dan Instrumen Keuangan**
Tidak adanya investasi baru yang signifikan dalam instrumen keuangan atau aset tidak lancar lainnya turut berkontribusi terhadap penurunan kebutuhan kas pada aktivitas ini.
2. **Dampak terhadap Kinerja Perseroan**
Kebijakan pengendalian investasi yang cermat ini membawa dampak positif terhadap stabilitas keuangan Perseroan, antara lain:
 - a. Menjaga likuiditas tetap kuat, sehingga memungkinkan Perseroan mengalokasikan sumber daya secara optimal pada area dengan imbal hasil tinggi.
 - b. Mengurangi risiko eksposur terhadap proyek yang belum memiliki kepastian pengembalian, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
 - c. Memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons peluang investasi strategis di masa depan dengan kondisi kas yang lebih sehat.

Dengan tetap menjaga tingkat investasi yang relevan dan terukur, Perseroan menunjukkan komitmen pada pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat disiplin finansial dalam pengelolaan aset dan modal.

Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan

Sepanjang tahun 2024, Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp215,11 miliar, turun 62,36% atau setara dengan Rp356,34 miliar dibandingkan tahun 2023 di mana Perseroan mencatat penggunaan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp571,45 miliar.

1. **Analisis Perubahan dan Penyebabnya**
Penurunan ini terutama disebabkan oleh:
 - a. **Berkurangnya Pembayaran Kewajiban Pinjaman**
Pada tahun 2024, Perseroan telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban pembiayaan jangka pendek dan menengah yang jatuh tempo, sehingga kebutuhan arus kas untuk pelunasan pinjaman menurun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
 - b. **Kebijakan Dividen yang Lebih Selektif**
Perseroan menerapkan pendekatan distribusi dividen yang lebih terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan ekspansi internal dan penguatan posisi kas. Hal ini turut menurunkan total kas keluar dari aktivitas pendanaan.

- b. **Optimization of Existing Assets**
Rather than undertaking large-scale expansion, the Company maximized the productivity of its existing assets and infrastructure. This approach successfully reduced the need for additional investment without sacrificing operational quality.
- c. **Efficiency in Portfolio Investments and Financial Instruments**
The absence of significant new investments in financial instruments or other non-current assets also contributed to the decrease in cash requirements for this activity.

2. **Impact on Company Performance**
This careful investment control policy has a positive impact on the Company's financial stability, including:
 - a. Maintaining strong liquidity, allowing the company to allocate resources optimally to high-return areas.
 - b. Reducing exposure risk to projects with uncertain returns, especially amid fluctuating economic conditions.
 - c. Allowing greater flexibility to respond to future strategic investment opportunities with healthier cash conditions.

By maintaining a relevant and measured level of investment, the Company demonstrates its commitment to sustainable growth while strengthening financial discipline in asset and capital management.

Net Cash from Financing Activities

Throughout 2024, the Company's net cash used in financing activities was recorded at Rp215.11 billion, a decrease of 62.36% or Rp356.34 billion compared to 2023, when the Company recorded a net cash use in financing activities of Rp571.45 billion.

1. **Analysis of Changes and Causes**
This decrease is primarily due to:
 - a. **Reduced Loan Repayment Obligations**
In 2024, the Company settled most of its short-term and medium-term financing obligations, resulting in a significant decrease in cash requirements for loan repayments compared to the previous year.
 - b. **More Selective Dividend Policy**
The Company implemented a more measured dividend distribution approach, considering the need for internal expansion and strengthening its cash position. This also reduced total cash outflows from financing activities.





- c. Tidak Adanya Aktivitas Pendanaan Baru yang Signifikan
Selama tahun berjalan, Perseroan tidak melakukan penerbitan instrumen utang maupun peningkatan modal yang signifikan, sejalan dengan kondisi kas yang sehat dan arus kas operasi yang kuat.
- 2. Dampak terhadap Kinerja Perseroan
Penurunan penggunaan kas dari aktivitas pendanaan berdampak positif terhadap struktur keuangan dan fleksibilitas jangka panjang Perseroan, antara lain:
 - a. Memperkuat posisi *leverage*, dengan rasio utang yang lebih sehat dan risiko keuangan yang lebih rendah;
 - b. Menurunkan beban bunga dan beban keuangan secara keseluruhan, yang tercermin pada perbaikan laba sebelum pajak;
 - c. Memberikan ruang strategis untuk pendanaan berbasis internal, mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Langkah ini mencerminkan kehati-hatian dan efektivitas manajemen dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, likuiditas, dan kesinambungan finansial jangka panjang.

- c. No Significant New Financing Activities
During the year, the Company did not issue debt instruments or raise capital significantly, in line with its healthy cash position and strong operating cash flow.
- 2. Impact on Company Performance
The reduction in cash used from financing activities has a positive impact on the Company's financial structure and long-term flexibility, including:
 - a. Strengthening the leverage position, with a healthier debt ratio and lower financial risk;
 - b. Reducing interest expenses and overall financial costs, which is reflected in improved pre-tax profits;
 - c. Providing strategic room for internally-based financing, reducing reliance on external financing sources amid financial market uncertainties.

This step reflects the prudence and effectiveness of management in maintaining a balance between growth, liquidity, and long-term financial sustainability.



PROFITABILITAS DAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN DALAM MENGHASILKAN KEUNTUNGAN

PROFITABILITY AND ABILITY TO GENERATE PROFIT

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang tercermin pada tabel di bawah ini.

The Company's ability to generate profit is measured using profitability ratios, which are reflected in the table below.

Rasio Profitabilitas 2023-2024
Profitability Ratios in 2023-2024

	Satuan Unit	2024	2023	Selisih Difference	
Margin Laba Bruto <i>Gross Profit Margin</i>	%	42,14	44,41	(2,26)	↓
Margin Laba Usaha <i>Operating Profit Margin</i>	%	31,12	33,35	(2,24)	↓
Margin Laba Bersih <i>Net Profit Margin</i>	%	25,74	25,96	(0,22)	↓
Imbal Hasil Ekuitas <i>Return on Equity</i>	%	16,62	15,61	1,01	↑
Imbal Hasil Aset <i>Return on Assets</i>	%	11,47	10,67	0,79	↑

Sepanjang tahun 2024, perusahaan mencatat kinerja keuangan yang tetap solid di tengah dinamika operasional dan investasi yang dilakukan. Meskipun terjadi penurunan pada beberapa margin profitabilitas, indikator efisiensi dan pengembalian tetap menunjukkan tren positif secara keseluruhan.

Throughout 2024, the Company recorded solid financial performance amid the dynamics of its operations and investments. Although there was a decrease in some profitability margins, efficiency and return indicators still showed an overall positive trend.

Margin laba bruto tercatat sebesar 42,14%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 44,41%. Penurunan sebesar 2,26 poin persentase ini utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Selaras dengan hal tersebut, margin laba usaha juga mengalami koreksi sebesar 2,24 poin persentase, menjadi 31,12%.

The gross profit margin was recorded at 42.14%, slightly down from 44.41% in the previous year. This decrease of 2.26 percentage points was primarily due to the increase in cost of revenues outpacing revenue growth. In line with this, the operating profit margin also experienced a correction of 2.24 percentage points, reaching 31.12%.

Margin laba bersih relatif stabil dengan penurunan yang sangat minim, dari 25,96% pada 2023 menjadi 25,74% pada 2024. Hal ini mencerminkan ketahanan profitabilitas bersih perusahaan di tengah penyesuaian biaya dan strategi efisiensi yang dijalankan.

The net profit margin remained relatively stable, with a minimal decrease from 25.96% in 2023 to 25.74% in 2024. This reflects the resilience of the Company's net profitability amid cost adjustments and efficiency strategies implemented.

Dari sisi pengembalian, imbal hasil atas ekuitas (ROE) meningkat menjadi 16,62%, naik 1,01 poin persentase dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Sementara itu, imbal hasil atas aset (ROA) juga menunjukkan tren positif, naik dari 10,67% menjadi 11,47%, mencerminkan efisiensi yang semakin baik dalam pengelolaan aset secara keseluruhan.

In terms of returns, the return on equity (ROE) increased to 16.62%, up by 1.01 percentage points from the previous year. This increase indicates the Company's improved effectiveness in generating profits for shareholders. Meanwhile, the return on assets (ROA) also showed a positive trend, rising from 10.67% to 11.47%, reflecting better efficiency in overall asset management.

Kinerja ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, dengan strategi yang tepat dalam menjaga efisiensi, mendorong profitabilitas, dan mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham.

This performance demonstrates that the Company remains on a path of healthy and sustainable growth, with the right strategies in place to maintain efficiency, drive profitability, and optimize value for shareholders.



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

ABILITY TO PAY DEBT

Utang jangka panjang dan jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan telah menerapkan kebijakan pengelolaan utang dan melakukan *monitoring* ketat melalui pengukuran indikator kemampuan membayar utang sebagai berikut:

RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran terhadap likuiditas Perusahaan dapat dilihat dari hasil perhitungan *Cash Ratio*, *Quick Ratio*, dan *Current Ratio*. Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut menandakan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

The current and non-current liabilities are obligations that must be paid off by the Company. Therefore, the Company has implemented a debt management policy and carried out strict monitoring by measuring debt repayment indicators as follows:

LIQUIDITY RATIO

Liquidity ratio is a ratio used to measure the Company's ability to settle its short-term obligations. Measurement of the Company's liquidity can be seen from the results of the calculation of Cash Ratio, Quick Ratio, and Current Ratio. Higher value of these ratios indicates that the Company has the ability to meet its obligations that will fall due.

Likuiditas 2023-2024
Liquidity 2023-2024

	Satuan Unit	2024	2023	Selisih Difference	
Rasio Kas Cash Ratio	Kali Times	4,37	3,25	1,12	↑
Rasio Cepat Quick Ratio	Kali Times	4,87	3,69	1,18	↑
Rasio Lancar Current Ratio	Kali Times	4,87	3,69	1,18	↑

1. Rasio Kas

Rasio Kas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban yang sudah jatuh tempo dari kas yang dimiliki. Di sepanjang tahun 2024 terjadi kenaikan 1,12 kali pada posisi Rasio Kas Perseroan, dari sebesar 3,25 kali di akhir tahun 2023 menjadi sebesar 4,37 kali di akhir tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan penguatan kas internal Perusahaan dalam menghadapi kewajiban yang telah jatuh tempo. Kenaikan ini didorong oleh arus kas masuk yang lebih besar dari aktivitas operasional, terutama dari peningkatan pendapatan usaha dan efisiensi biaya, yang berkontribusi terhadap saldo kas akhir tahun.

2. Rasio Cepat

Rasio Cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva-aktiva yang paling likuid. Pada tahun 2024, nilai Rasio Cepat Perusahaan sebesar 4,87 kali, meningkat 1,18 kali dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,69 kali. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar likuid Perusahaan (seperti kas, setara kas, dan piutang usaha) memiliki proporsi yang cukup tinggi terhadap kewajiban jangka pendek. Peningkatan ini menjadi indikator penting atas kestabilan operasional dan efektivitas manajemen modal kerja dalam menjaga likuiditas jangka pendek.

1. Cash Ratio

The Cash Ratio is used to measure the Company's ability to pay off maturing liabilities from its cash. Throughout 2024, there was an increase/decrease of 1.12 times in the Company's Cash Ratio position, from 3.25 times at the end of 2023 to 4.37 times at the end of 2024. This increase indicates the strengthening of the Company's internal cash in facing maturing obligations. This increase was driven by greater cash inflows from operational activities, especially from increased operating revenues and cost efficiency, which contributed to the year-end cash balance.

2. Quick Ratio

The Quick Ratio is a ratio used to measure the Company's ability to pay its short-term debts with its most liquid assets. In 2024, the Company's Quick Ratio value was 4.87 times, increasing 1.18 times compared to 2023 of 3.69 times. This shows that the Company's liquid current assets (such as cash, cash equivalents, and trade receivables) have a fairly high proportion of current liabilities. This increase is an important indicator of operational stability and the effectiveness of working capital management in maintaining short-term liquidity.



3. Rasio Lancar

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mengandalkan Aset Lancar yang dimiliki dapat diukur dari indikator Rasio Lancar. Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan nilai Rasio Lancar sebesar 4,87 kali, meningkat 1,18 kali dibandingkan tahun 2023 pada periode yang sama sebesar 3,69 kali. Kinerja Rasio Lancar yang juga meningkat ini semakin mempertegas kemampuan Perseroan dalam mengelola kewajiban jangka pendek dengan sumber daya aset lancar yang tersedia. Hal ini mencerminkan kondisi keuangan yang sehat serta strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang *prudent*.

3. Current Ratio

The Company's ability to meet short-term liabilities by relying on its Current Assets can be measured from the Current Ratio indicator. As of December 31, 2024, the Company recorded a Current Ratio value of 4.87 times, increasing 1.18 times compared to 2023 in the same period of 3.69 times. The increasing Current Ratio performance further emphasizes the Company's ability to manage current liabilities with available current asset resources. This reflects a healthy financial condition and a prudent asset and liability management strategy.

RASIO SOLVABILITAS

Kemampuan Perseroan dalam membayar seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek, dapat diukur dengan rasio solvabilitas, yang terdiri dari rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset atau *Debt to Total Assets Ratio* (DAR) dan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER).

SOLVENCY RATIO

The Company's ability to pay all its liabilities, both long-term and short-term, can be measured by the solvency ratio, which at least consists of the Debt to Total Assets Ratio (DAR) and the Debt to Equity Ratio (DER).

Solvabilitas 2023-2024

Solvency 2023-2024

	Satuan Unit	2024	2023	Selisih Difference	
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset <i>Debt to Assets Ratio</i>	%	30,99	31,62	(0,63)	↓
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas <i>Debt to Equity Ratio</i>	%	44,90	46,24	(1,34)	↓

4. Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset, atau *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan dalam menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Pada 2024, nilai DAR dibukukan sebesar 30,99%, di mana nilai ini lebih rendah 0,63% dibandingkan nilai DAR tahun 2023 sebesar 31,62%. Peningkatan aset yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan liabilitas, mencerminkan pengelolaan struktur modal yang lebih sehat dan konservatif.

4. Debt to Asset Ratio (DAR)

This ratio is used to measure the portion of assets used to guarantee all liabilities or debts. In 2024, the DAR value was recorded at 30.99%, where this value is 0.63% lower compared to the DAR value in 2023 of 31.62%. Higher asset growth compared to liability growth reflects healthier and more conservative capital structure management.

5. Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai perhitungan DER Perseroan tahun 2024 diperoleh sebesar 44,90%, di mana nilai ini lebih rendah 1,34% dibandingkan nilai DER tahun 2023 sebesar 46,24%. Hal ini terjadi dikarenakan peningkatan pada ekuitas seiring dengan kenaikan laba ditahan dan minimnya penambahan liabilitas baru selama tahun berjalan.

5. Debt to Equity Ratio (DER)

This ratio is used to measure the portion of capital used as collateral for all liabilities or debts. The Company's DER calculation value in 2024 was obtained at 44.90%, where this value is 1.34% lower compared to the DER value in 2023 of 46.24%. This occurred due to an increase in equity along with an increase in retained earnings and minimal increase in new liabilities during the year.



RATA-RATA KOLEKTIBILITAS PIUTANG USAHA ATAU PERPUTARAN PIUTANG USAHA

AVERAGE TRADE RECEIVABLES COLLECTIBILITY OR TRADE RECEIVABLES TURNOVER

Tingkat kolektibilitas piutang usaha (*trade receivables turnover*) digunakan untuk menilai kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang dari para pelanggan. Rasio ini dipakai untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau bahkan berapa kali dana yang tertanam dalam piutang.

Adapun nilai rata-rata Perputaran Piutang Usaha (*Average Collection Period*) Perseroan tahun 2024 adalah selama 31,32 hari, lebih lama 0,16 hari dibandingkan tahun 2023 yang selama 31,48 hari. Hal ini terutama disebabkan adanya penambahan customer baru dan penerapan *single billing* pada tahun 2024 sehingga meningkatkan nilai pendapatan disertai piutang.

The collectibility level of trade receivables (*trade receivables turnover*) is used to assess the Company's ability to collect receivables from customers. This ratio is used to measure how long it takes to collect receivables during one period or even how many times the funds are embedded in receivables.

The average value of the Company's Trade Receivables Turnover (*Average Collection Period*) in 2024 was 31.32 days, 0.16 days longer than 2023 for 31.48 days. This was mainly due to the addition of new customers and the implementation of *single billing* in 2024, thereby increasing the value of revenue accompanied by receivables.

Kolektibilitas Piutang 2023-2024
Receivables Collectibility in 2023-2024

Perihal Description	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage (%)	
Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility	Kali Times	11,62	11,59	0,03	0,26	↑
Rata-Rata Hari Kolektibilitas Piutang Average Days of Receivables Collectibility	Hari Days	31,39	31,48	(0,09)	(0,29)	↓

Umur piutang usaha Perseroan dan upaya Perseroan dalam pengelolaan piutang usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The age of the Company's trade receivables and the Company's efforts in managing trade receivables can be seen in the table below.

Umur Piutang Usaha 2023-2024
Umur Piutang Usaha 2023-2024

Umur Piutang Usaha Receivables Age	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Belum Jatuh Tempo Not Yet Due	6.089	5,27	1.567	1,62	4.522	288,57	↑
Telah Jatuh Tempo Overdue							
1 - 30 hari 1 - 30 days	54.416	47,10	38.628	39,96	15.788	40,87	↑
31 - 60 hari 31 - 60 days	11.001	9,52	10.928	11,30	73	0,67	↑
61 - 90 hari 61 - 90 days	5.764	4,99	4.679	4,84	1.085	23,19	↑



Umur Piutang Usaha 2023-2024

Umur Piutang Usaha 2023-2024

Umur Piutang Usaha Receivables Age	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
91 - 180 hari 91 - 180 days	4.499	3,89	6.687	6,92	(2.188)	(32,71)	↓
Lebih dari 180 hari More than 180 days	33.759	29,22	34.183	35,36	(424)	(1,24)	↓
Sub Jumlah Sub Total	115.528	100,00	96.672	100,00	18.856	19,51	↑
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for Impairment	(35.320)		(35.048)		(272)	0,78	↑
Jumlah Piutang Usaha - Bersih Total Trade Receivables - Net	80.208		61.624		18.584	30,16	↑

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. Tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan di tahun 2024.

Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses from uncollectible receivables. There are no trade receivables used as collateral in 2024.



STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE OF THE COMPANY AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

TUJUAN PENGELOLAAN PERMODALAN

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perseroan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki utang berbasis bunga. Seluruh pendanaan untuk operasi dan pengembangan usaha didapatkan dari ekuitas atau permodalan sendiri.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur modal berpengaruh terhadap pengembangan bisnis terutama dalam sumber dan penggunaan dana. Hal ini mendorong Manajemen Perseroan untuk senantiasa meninjau komposisi struktur modal agar mencapai kondisi yang optimal. Perseroan lebih memilih Ekuitas untuk membiayai Aset. Meskipun demikian, penggunaan Utang di Perusahaan juga mengalami peningkatan sehingga dipandang mampu meminimalkan (*Weighted Average Cost of Capital/WACC*) karena biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity*). Penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Akan tetapi, peningkatan utang berdampak terhadap biaya beban bunga yang meningkat sehingga mengurangi nilai Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penggunaan utang dan modal senantiasa dikelola oleh Perseroan sehingga diperoleh kondisi yang optimum. Perusahaan juga senantiasa melakukan *monitoring* terhadap rasio likuiditas karena semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan optimal.

CAPITAL MANAGEMENT OBJECTIVES

The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of sound capital ratios to support the business and maximize shareholders returns.

The Company manages capital to maintain its business continuity in order to maximize shareholder wealth and benefits to other parties with an interest in the Company and tries to maintain a balance between borrowing rate and equity position to maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

CAPITAL STRUCTURE OF THE COMPANY

Until the end of 2024, the Company has no interest-based debt. All funding for operations and business development is obtained from equity or own capital.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital structure affects business development, especially in the source and use of funds. This encourages the Management to continually review the composition of capital structure in order to achieve optimal conditions. The Company prefers Equity to finance Assets. However, the use of debt in the Company has also increased, hence it is seen as being able to minimize the Weighted Average Cost of Capital (WACC) because the cost of debt is cheaper than the cost of its own equity. Using debt will also reduce taxable costs, which resulted in tax saving. However, increasing debt has an impact on increasing interest costs, thereby reducing the overall value of the Company. Therefore, the use of debt and capital is always managed by the Company so that optimum conditions are obtained. The Company also continuously monitors the liquidity ratio because the higher the liquidity ratio, the more optimal the capital structure will be.



INVESTASI BARANG MODAL

CAPITAL EXPENDITURES

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak mencatatkan adanya perikatan material untuk investasi barang modal.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2024 jumlah penambahan investasi barang modal tercatat sebesar Rp32,85 miliar, mengalami penurunan 21,04% atau setara dengan Rp8,75 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp40,35 miliar. Penurunan ini terjadi karena tertundanya rencana penambahan kapasitas lapangan penumpukan melalui pembangunan gedung parkir yang masih dalam proses perizinan ke instansi terkait. Berikut ini adalah rincian investasi barang modal selama dua tahun terakhir, yaitu:

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

Throughout 2024, the Company did not record any material commitments for capital expenditure.

REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURE

In 2024, the amount of additional capital expenditure was recorded at Rp32.85 billion, a decrease of 21.04% or equivalent to Rp8.75 billion compared to 2023 of Rp40.35 billion. This decrease occurred due to the delay in the plan to increase the capacity of stacking yard through the construction of a parking building which is still in the process of obtaining permits from relevant agencies. The following are details of capital expenditure over the past two years:

Penambahan Investasi Barang Modal dalam bentuk Aset Tetap Tahun 2023-2024

Additional Capital Expenditure in the form of Fixed Assets in 2023-2024

Jenis Aset Tetap Type of Fixed Assets	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Equipment	4.400	1.283	3.117	242	↑
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Installation					
Investasi Investment	3.012	50	2.962	5.924	↑
Pemeliharaan Maintenance	1.400	1.250	150	12,00	↑
Jumlah Amount	4.412	1.300	3.112	239,38	↑
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Buildings					
Investasi Investment	8.012	15.275	(7.263)	(47,55)	↓
Pemeliharaan Maintenance	4.572	3.924	648	16,51	↑
Jumlah Amount	12.584	19.199	(6.615)	(34,45)	↓
Jalan dan Bangunan Roads and Buildings					
Investasi Investment	32.85	12.828	(12.828)	-	
Pemeliharaan Maintenance	2.307	2.279	28	1,23	
Jumlah Amount	2.307	15.107	(12.800)	(84,73)	↓



Penambahan Investasi Barang Modal dalam bentuk Aset Tetap Tahun 2023-2024

Additional Capital Expenditure in the form of Fixed Assets in 2023-2024

Jenis Aset Tetap Type of Fixed Assets	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Emplasemen Emplacement					
Investasi Investment	7.165	187	6.978	3.731,55	↑
Pemeliharaan Maintenance	1.482	4.025	(2.543)	(63,18)	↓
Jumlah Amount	8.647	4.212	4.435	105,29	↑
Non-Fisik Non-Physical	500	500	-	-	-
Jumlah Penambahan Total Additions	32.850	40.351	(8.751)	(21,04)	↓

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini 2024.

There were no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report until the signing of this annual report on 2024.



PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2024

TARGET ACHIEVEMENT IN 2024

Perihal	Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2024	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2024 Against 2024 Target (%)
	1	2	(1:2)
Arus Barang Perdagangan Luar Negeri Flow of Foreign Trade			
Bongkar Muat Mobil (Unit) Car Loading/Unloading (Unit)	439.960	443.947	99,10 ↓
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/Buses)			
Dalam unit In unit	10.755	15.740	68,33 ↓
Dalam m3 In m3	959.372	1.389.656	69,04 ↓
Sparepart			
Dalam PKGS In PKGS	7.106	9.092	78,16 ↓
Dalam m3 In m3	83.484	76.309	109,40 ↑
Pendapatan Operasi (Rp-juta) Operating Revenue (Rp-million)	824.596	788.175	104,62 ↑
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp-juta) Net Profit for the Year (Rp-million)	212.216	171.078	124,05 ↑
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	1.850.738	1.909.545	96,92 ↓
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	1.277.228	1.289.015	99,09 ↓
Pengelolaan Struktur Modal Capital Structure Management	Dipenuhi melalui pendanaan sendiri Fulfilled through self-funding		
Realisasi Investasi Barang Modal (Rp-juta) Realization of Capital Expenditure (Rp-million)	32.850	18.190	180,59 ↑



TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

SOUNDNESS LEVEL OF THE COMPANY

Realisasi tingkat kesehatan Perusahaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The realization of the Company's health level for 2024 is as follows:

Indikator Indicator		Bobot	Realisasi Realization	Skor Score
A. Aspek keuangan Financial aspects				
1.	Imbalan kepada pemegang saham (ROE) Return on Shareholders (ROE)	15,57	19,93%	15,57
2.	Imbalan investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	10,57	19,90%	10,57
3.	Rasio kas (cash rasio) Cash Ratio	3,57	437,41%	3,57
4.	Rasio lancar (current rasio) Current Ratio	4,57	486,55%	3,57
5.	Collection periods (hari) days	4,57	35,50	4,57
6.	Perputaran persediaan (inventory turnover) Inventory Turnover	n/a	0,00%	n/a
7.	Perputaran total aset (total asset turnover) Total Asset Turnover	4,57	47,82%	2,57
8.	Rasio modal sendiri terhadap total asset Equity to total assets ratio	6,58	57,55%	5,57
Jumlah aspek keuangan Total financial aspects		50,00		46,00
B. Aspek operasional Operational aspects				
1.	Unit Ship Hour (USH)	20,00	20,00	20,00
2.	Utilisasi Lapangan (YOR) Field Utilization (YOR)	15,00	15,00	15,00
Jumlah aspek operasional Total operational aspects		35,00		35,00
C. Aspek administrasi Administrative aspects				
1.	Laporan perhitungan tahunan Annual calculation report	5,00	25-Mar-25	5,00
2.	Rancangan RKAP RKAP draft	5,00	14-Aug-23	5,00
3.	Laporan periodik Periodic report	5,00	<= 0 hari day	5,00
Jumlah aspek administrasi Total administrative aspects		15,00		15,00
Jumlah A + B + C Total A + B + C		100,00		96,00
KATEGORI CATEGORY				Sehat Healthy (AAA)

Keterangan:

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki akun dan saldo persediaan untuk dijual sehingga penilaian atas perhitungan perputaran persediaan (inventory turnover) tersebut tidak dapat diaplikasikan. Bobot atas kriteria tersebut dialokasikan secara merata ke kriteria pada aspek keuangan lainnya.

Description:

As of December 31, 2024, the Company does not have any accounts and inventory balances for sale so that the assessment of the calculation of inventory turnover cannot be applied. The weight of the criteria is allocated evenly to the criteria in other financial aspects.



KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Kontrak Manajemen tahun 2024 yang memuat KPI Perusahaan tahun 2024 yang disusun berdasarkan Salinan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Pengelompokan item KPI berdasarkan 5 (lima) perspektif agenda prioritas Kementerian BUMN dengan perhitungan pencapaian masing-masing indikator maksimum 110%. Pada tahun 2024, Perusahaan mencapai skor KPI sebesar 104,90 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00.

Berikut disampaikan realisasi *Key Performance Indicators* Perusahaan untuk tahun 2024.

Management Contract for 2024 containing the Company's KPI for 2024 which is prepared based on a Copy of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Grouping of KPI items based on 5 (five) perspectives of the Ministry of SOEs' priority agenda with a calculation of the achievement of each indicator of a maximum of 110%. In 2024, the Company achieved a KPI score of 104.90 from the target set at 100.00.

The following is the realization of the Company's Key Performance Indicators for 2024.

No.	Indikator KPI KPI Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2024 Target 2024	Realisasi 2024 Realization 2024	Pencapaian Achievement (%)	SKOR SCORE
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia							
Finansial Financial							
1	EBITDA	Rp	4	352.726.230.187	368.785.861.653	104,55%	4,18
2	Pendapatan Revenue	Rp	4	788.174.988.423	824.595.835.752	104,62%	4,18
3	Average Collection Periode	Hari Days	5	33,56	31,39	106,45%	5,32
4	BOPO	%	5	69,12	68,70	100,61%	5,03
5	Net Profit Margin	%	4	21,71	25,74	118,57%	4,40
6	Penambahan Market Share Market Share Addition	Jumlah Number	4	1,00	5,00	500,00%	4,40
Operasional Operational							
7	Produktivitas Bongkar Muat (U/S/H) Loading and Unloading Productivity (U/S/H)	U/S/H	5	140,00	178,39	142,71%	5,50
8	Utilisasi Lapangan (YOR) Field Utilization (YOR)	%	5	65,00	45,39	130,17%	5,50
9	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	3	3,00	2,10	70,00%	2,10
Sosial Social							
10	Implementasi GCG GCG Implementation	%	4	100,00	140,00	140,00%	4,40
11	Implementasi Program TJSL CSR Program Implementation	%	5	100,00	104,17	104,17%	5,21
Sub Total			48				50,23
B. Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation							
12	Anorganik Growth pada Bisnis Pendukung Inorganic Growth in Supporting Business	%	5	50,00	100,00	200,00%	5,50
13	Ekspansi Bisnis Terminal di Luar Wilayah IKT Terminal Business Expansion Outside IKT Region	%	5	50,00	100,00	200,00%	5,50



No.	Indikator KPI KPI Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2024 Target 2024	Realisasi 2024 Realization 2024	Pencapaian Achievement (%)	SKOR SCORE
14	Indeks Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index</i>	Skala Likert	5	4,58	4,64	101,31%	5,07
	Sub Total <i>Sub Total</i>		15				16,07
C. Kepemimpinan Teknologi <i>Technology Leadership</i>							
15	Digitalisasi Aktivitas Operasional <i>Digitalization of Operational Activities</i>	%	4	100,00	100,00	100,00%	4,00
16	Digitalisasi Teknologi Administrasi Kantor <i>Digitalization of Office Administration Technology</i>	%	4	100,00	100,00	100,00%	4,00
17	Implementasi HSSE <i>HSSE Implementation</i>	%	5	100,00	100,00	100,00%	5,00
	Sub Total <i>Sub Total</i>		13				13,00
D. Peningkatan Investasi <i>Investment Increase</i>							
18	Penyerapan Investasi (Capex) : Penyerapan Program <i>Investment Absorption (Capex): Program Absorption</i>	%	4	80,00	100,00	125,00%	4,40
19	Penyerapan Investasi (Capex) : Penyerapan Fisik <i>Investment Absorption (Capex): Physical Absorption</i>	%	3	80,00	86,77	108,46%	3,25
	Sub Total <i>Sub Total</i>		7				7,65
E. Pengembangan Talenta <i>Talent Development</i>							
20	Produktivitas Pegawai <i>Employee Productivity</i>	Juta Rupiah/ Orang	5	2.765,38	3.441,24	124,44%	5,50
21	High Potential dan Promotable Talen <i>High Potential and Promotable Talent</i>	%	3	5,00	10,00	200,00%	3,30
22	Jumlah Implementasi Ide Inovasi <i>Number of Innovation Idea Implementations</i>	Jumlah	4	1,00	1,00	100,00%	4,00
23	Peningkatan Kompetensi Pegawai <i>Employee Competency Improvement</i>	%	5	97,00	100,00	103,09%	5,15
	Sub Total <i>Sub Total</i>		17				17,95
Total Total			100			104,90	Total

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Jumlah skor pencapaian KPI untuk nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia adalah 50,23 dari target bobot 48,00. Pencapaian ini di atas target KPI sebesar 2,23 poin. Adapun KPI pada perspektif ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub perspektif, yaitu:
 - a. Finansial, terdiri dari: EBITDA, Pendapatan, *Average Collection Period*, BOPO, *Net Profit Margin*, dan Penambahan *Market Share*.

Based on the table above, it can be stated:

1. Economic and Social Value for Indonesia
The total score of KPI achievement for economic and social value for Indonesia is 50.23 from a target weight of 48.00. This achievement is above the KPI target of 2.23 points. The KPI in this perspective is divided into 3 (three) sub-perspectives, namely:
 - a. Financial, consisting of: EBITDA, Revenue, *Average Collection Period*, BOPO, *Net Profit Margin*, and *Market Share Addition*.



b. Operasional, terdiri dari: Produktivitas Bongkar Muat (U/S/H), Utilisasi Lapangan (YOR), dan Tingkat Maturitas Risiko. c. Sosial, terdiri dari: Implementasi GCG dan Implementasi Program TJSL. 2. Inovasi Model Bisnis Jumlah skor pencapaian KPI untuk inovasi model bisnis adalah 16,07 dari nilai bobot 15,00. Pencapaian ini diatas target KPI sebesar 1,07. 3. Kepemimpinan Teknologi Jumlah skor pencapaian KPI untuk kepemimpinan teknologi adalah 13,00 dari nilai bobot 13,00. Pencapaian ini sama dengan target KPI 2024. 4. Peningkatan Investasi Jumlah skor pencapaian KPI untuk peningkatan investasi adalah 7,65 dari nilai bobot 7,00. Pencapaian ini diatas target KPI sebesar 0,65. 5. Pengembangan Talenta Jumlah skor pencapaian KPI untuk pengembangan talenta adalah 17,95 dari nilai bobot 17,00. Pencapaian ini di atas target KPI sebesar 0,95.	b. Operational, consisting of: Loading and Unloading Productivity (U/S/H), Field Utilization (YOR), and Risk Maturity Level. c. Social, consisting of: GCG Implementation and CSR Program Implementation. 2. Business Model Innovation The total score of KPI achievement for business model innovation is 16.07 from a weight value of 15.00. This achievement is above the KPI target of 1.07. 3. Technology Leadership The total score of KPI achievement for technology leadership is 13.00 from a weighted value of 13.00. This achievement is the same as the 2024 KPI target. 4. Investment Increase The total score of KPI achievement for investment increase is 7.65 from a weighted value of 7.00. This achievement is above the KPI target of 0.65. 5. Talent Development The total score of KPI achievement for talent development is 17.95 from a weighted value of 17.00. This achievement is above the KPI target of 0.95.



KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

DIVIDEND POLICY AND THE DISTRIBUTION

KEBIJAKAN DASAR TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan dividen yang diterapkan di Perusahaan mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pembagian dividen disetujui dan ditetapkan oleh pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah dividen yang dibagikan senantiasa memperhatikan sejumlah aspek, di antaranya tingkat kesehatan keuangan, kecukupan modal, dan kebutuhan pendanaan untuk ekspansi bisnis. Manajemen Perseroan mengajukan usulan laba bersih setelah pajak untuk dividen kepada Pemegang Saham yang akan disetujui dalam RUPS.

Dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2018, disebutkan bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dengan nilai sekurang-kurangnya 30,0% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2019 berdasarkan laba bersih tahun buku 2018, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Pembagian Dividen yang Dilakukan di Tahun 2024 dan Kronologis Pembagian Dividen

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada 10 Juni 2024, pemegang saham memutuskan menetapkan penggunaan Laba Bersih/Laba Tahun Berjalan IPCC tahun buku 2023 sebesar Rp190.854.844.653,00 sebagai berikut:

1. sebesar 1,05% atau Rp2.000.000.000,00 akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar 80% atau Rp152.683.875.722,00 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham, di mana sebesar Rp39.236.506.498,00 telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp113.447.369.224,00 atau total dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp83,97.
3. Sisanya sebesar 18,95% atau sebesar Rp36.170.968.931,00 akan digunakan sebagai laba ditahan.

BASIC POLICY ON DIVIDEND DISTRIBUTION

The dividend policy implemented in the Company refers to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in which the distribution of dividends is approved and determined by shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). The amount of dividends distributed always consider a number of aspects, including the level of financial health, capital adequacy and funding needs for business expansion. Company Management submits a proposal for net profit after tax for dividends to Shareholders which will be approved at the GMS.

In the Company's Initial Public Offering prospectus published on July 2, 2018, it is stated that after this Initial Public Offering, the Board of Directors plans to distribute cash dividends to shareholders with a value of at least 30.0% of the net profit for the relevant financial year, starting from 2019 based on net profit for the 2018 fiscal year, taking into account the decisions of shareholders at the GMS. If the GMS approves the distribution of dividends, then the dividends will be distributed to all shareholders registered on the date of the list of shareholders entitled to dividends, considering the income tax and withholding taxes in accordance with applicable regulations, if any. The Board of Directors can make changes to the dividend policy at any time, subject to approval from shareholders through the GMS.

Dividend Distribution in 2024 and Chronology of Dividend Distribution

Based on the resolution of 2023 Annual GMS held on June 10, 2024, the shareholders decided to determine the use of IPCC's Net Profit/Profit for the Year of 2023 fiscal year amounting to Rp190,854,844,653.00 as follows:

1. 1.05% or Rp2,000,000,000.00 will be allocated as Mandatory Reserves to fulfill Article 70 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. 80% or Rp152,683,875,722.00 is distributed as dividends to shareholders according to the percentage of share ownership of each shareholder, where Rp39,236,506,498.00 has been distributed as interim dividends so that the remainder is a final dividend to be distributed amounting to Rp113,447,369,224.00 or a total dividend per share of Rp83.97.
3. The remaining 18.95% or Rp36,170,968,931.00 will be used as retained earnings.



Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tersebut, Perseroan telah membayarkan dividen untuk hasil usaha tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp152.638.875.722,00 yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Dividen Interim dan Dividen Final.

Following up on the results of the GMS resolution, the Company has paid dividends from 2023 operating results in the amount of Rp152,638,875,722.00 which is divided into 2 (two), namely Interim Dividend and Final Dividend..

Kronologis pembagian dan pembayaran Dividen tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut,

The chronology of the distribution and payment of Dividends for 2020 to 2024 is as follows,

Pembagian Dividen Tahun 2020-2024
 Dividend Distribution for 2020-2024

Tahun Dividen Dividend Year	Tahun Pembagian Distribution Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta) Cash Dividend Distributed (Rp-million)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/share)	Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Distribution Ratio (%)
2024	2024	25 November 2024 (interim) November 25, 2024 (interim)	25 November 2024 November 25, 2024	44.407	24,42	30,00
2023	2024	10 Juni 2024 June 10, 2024	8, 10, dan 11 Juli 2024 July 8, 10, and 11, 2024	113.447	62,39	80,00
	2023	14 Desember 2023 (interim) December 14, 2023 (interim)	10 Januari dan 1 Maret 2024 January 10 and March 1, 2024	39.459	21,70	27,80
2022	2023	27 Juni 2023 June 27, 2023	26 dan 27 Juli 2023 July 26 and 27, 2023	90.499	49,77	70,00
	2022	16 Desember 2022 (interim) December 16, 2022 (interim)	13 Januari, 31 Maret, dan 31 Juli 2023 January 13, March 31, and July 31, 2023	22.708	12,49	50,00
2021		30 Juni 2022 June 30, 2022	3, 29, dan 30 Agustus 2022 August 3, 29, and 30, 2022	42.039	23,12	70,00
2020	2021	14 Juni 2021 June 14, 2021	IPCC tidak membagikan dividen sesuai hasil keputusan RUPS IPCC did not distribute dividends according to the GMS resolution			
2019	2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	7 September 2020 September 7, 2020	38.076	20,94	28,00
	2019	19 Desember 2019 (interim) December 19, 2019 (interim)	10 Januari 2020 January 10, 2020	63.397	34,86	70,00



KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

CONTRIBUTION TO THE NATION

PEMBAYARAN PAJAK KEPADA NEGARA

Sebagai wajib pajak dan pemotong pajak, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Wajib Pajak, Perusahaan melakukan pembayaran PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu. Komitmen ini sekaligus menjadi bentuk konkret Perseroan dalam berkontribusi bagi pendapatan negara.

Sebagai wajib pajak dan pemotong pajak, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Wajib Pajak, Perusahaan melakukan pembayaran PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu. Komitmen ini sekaligus menjadi bentuk konkret Perusahaan dalam berkontribusi bagi pendapatan negara.

Hingga akhir 2024, kontribusi Perseroan kepada negara melalui setoran pajak sebesar Rp100,69 miliar, mengalami penurunan 18,89% atau setara Rp23,45 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp124,15 miliar.

Berikut ini adalah setoran pajak yang sudah dibayarkan Perseroan kepada negara dalam kurun tiga tahun terakhir, yaitu:

TAX PAYMENTS TO THE NATION

As a taxpayer and tax withholder, the Company is committed to carrying out all its tax obligations with full responsibility. As a Taxpayer, the Company pays Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (PBB) in a timely manner. This commitment is also a concrete form of the Company's contribution to the nation's revenues.

As a taxpayer and tax withholder, the Company is committed to carrying out all its tax obligations with full responsibility. As a Taxpayer, the Company pays Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (PBB) in a timely manner. This commitment is also a concrete form of the Company's contribution to the nation's revenues.

Until the end of 2024, the Company's contribution to the Nation through tax payments amounted to Rp100.69 million, experienced an decrease of 18.89% or equivalent to Rp23.45 million compared to the previous year of Rp124.15 billion.

The following are the tax payments that the Company has paid to the nation in the last three years:

Setoran Pajak 2023-2024
Tax Payments in 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Pajak Penghasilan Income Tax					
PPh 21 Income Tax 21	16.377	11.814	4.563	38,62	↑
PPh 23 Income Tax 23	3.966	3.210	756	23,55	↑
PPh 25 Income Tax 25	36.213	38.827	(2.614)	(6,73)	↓
PPh 4 (2) Income Tax 4 (2)	1.235	48.853	(47.618)	(97,47)	↓
PPh 26 (2) Income Tax 26	771	-	771	-	-
Jumlah Setoran Pajak Penghasilan Amount of Income Tax Payments	58.562	102.704	(44.142)	(42,98)	↓



Setoran Pajak 2023-2024

Tax Payments in 2023-2024

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value Added Tax (VAT)	34.463	14.262	20.201	141,64	↑
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land and Building Tax (PBB)	7.671	7.183	488	6,79	↑
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payments	100.696	124.149	(23.453)	(18,89)	↓

Sementara sebagai pemotong pajak, Perseroan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak yang meliputi PPh Pasal 4 ayat 2; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

Meanwhile, as a tax withholder, the Company actively participates in making deductions for every taxable object, which includes Income Tax Article 4 paragraph 2; Income Tax Article 21 on income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

PEMBAYARAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Perseroan memiliki setoran kepada negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembayaran konsesi atas pemanfaatan lahan terminal di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Berikut nilai PNBP yang disetorkan Perusahaan dalam dua tahun terakhir.

PAYMENT OF NON-TAX NATION REVENUE

The Company has a deposit to the nation in the form of Non-Tax Nation Revenue (PNBP) through concession payments for the use of terminal land in Cilincing area, North Jakarta. The following is the value of PNBP paid by the Company in the last two years.

Jenis PNBP Type of PNBP	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
PNBP Konsesi PNBP Concession	17.156	25.507	(8.351)	(32,74)	↓



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, RESTRUKTURSiasi UTANG DAN/ATAU MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, DEBT AND/OR CAPITAL RESTRUCTURING

Di sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi utang dan/atau modal yang dilakukan Perseroan.

Throughout 2024, there was no material information on investment, expansion, divestment, acquisition, debt, and/or capital restructuring undertaken by the Company.

INFORMASI TENTANG TAMBAHAN PENANAMAN MODAL NEGARA (PMN) DAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN

INFORMATION ON ADDITIONAL STATE CAPITAL INVESTMENT (PMN) AND NATIONAL STRATEGIC PROJECTS OR OTHER ASSIGNMENTS

Hingga akhir tahun 2024 IPCC tidak mendapatkan tambahan Penanaman Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Indonesia. IPCC juga tidak memiliki proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun penugasan lainnya.

Until the end of 2024, IPCC did not receive additional State Capital Investment (PMN) from the Indonesian Government. The IPCC also does not have a project with the status of National Strategic Project (PSN) or other assignments.

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMATION ON THE REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERINGS

IPCC telah menyampaikan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2024. Berikut disampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Januari 2024.

IPCC has submitted the realization of the Use of Proceeds from the Public Offering in the Annual GMS held on June 10, 2024. The following is the realization of the use of proceeds from the public offering as of January 31, 2024.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk s.d. 31 Januari 2024 (dalam IDR (Rp))
Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk until January 31, 2024 (in IDR (Rp))

No	Jenis Penawaran Umum Type of Public Offering	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum *) Realization Value of Public Offering Proceeds *)			Rencana Penggunaan Dana Planned Use of Funds		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Public Offering Proceeds	Biaya Penawaran Umum Public Offering Costs	Hasil Bersih Net Proceeds	CAPEX CAPEX	Sewa Lahan Dibayar Dimuka 5 Tahun Land Rent Paid in Advance for 5 Years	Modal Kerja Working Capital
1.	Penawaran Umum Saham Perdana Type of Public Offering	9 Juli 2018	835,002,228,000	34,627,174,064	800,375,053,936	400,187,526,968	200,093,763,484	200,093,763,484
Jumlah Total			835,002,228,000	34,627,174,064	800,375,053,936	400,187,526,968	200,093,763,484	200,093,763,484





		Realisasi Penggunaan Dana Realisasi Penggunaan Dana				Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Funds from Public Offering Proceeds
	Total Total	CAPEX CAPEX	Sewa Lahan Dibayar Dimuka 5 Tahun Land Rent Paid in Advance for 5 Years	Modal Kerja Working Capital	Total Total	
	800,37 5,053,936	428,953,082,600	361,421,971,336	10,000,000,000	800,375,053,936	-
	800,37 5,053,936	428,953,082,600	361,421,971,336	10,000,000,000	800,375,053,936	-



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang terkait, yaitu CALK No. 24.

PERNYATAAN DIREKSI ATAS TRANSAKSI AFILIASI TAHUN 2024

Direksi berpendapat bahwa seluruh transaksi material dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan Perseroan selama tahun 2024 sudah dilaksanakan pada nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT DALAM MENGAWASI JALANNYA PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI

Sebagai organ pengawas, Dewan Komisaris dan Komite Audit bersikap objektif dan independen dalam mengawal usulan maupun realisasi transaksi material antara Perseroan dengan pihak terafiliasi. Pengawasan ini mencakup aktivitas audit internal maupun audit eksternal untuk menjamin bahwa semua transaksi tersebut tidak mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan salah satu pihak, serta sudah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah dan standar akuntansi yang berlaku.

REASON FOR TRANSACTION

In normal business activities, the Company carries out transactions with affiliated parties, which are executed at the same price and terms agreed by both parties.

EXPLANATION OF TRANSACTION FAIRNESS

All transactions with affiliated parties are in accordance with the policies and conditions agreed by both parties, so that the Company considers that all transactions are still within reasonable limits in accordance with PSAK No.7 (Revised 2010) concerning Disclosures of Related Parties. All transactions with related parties are carried out with normal terms, price levels and conditions as those carried out with third parties and have been disclosed in the related Notes to Financial Statements (CALK), namely CALK No. 27.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON AFFILIATED TRANSACTIONS IN 2024

The Board of Directors considers that all material transactions with affiliated parties carried out by the Company during 2024 have been carried out at fair value (*arm's length*) in accordance with the same terms and conditions as if similar transactions were carried out with unaffiliated parties.

THE ROLE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND AUDIT COMMITTEE IN SUPERVISING THE AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURES

As supervisory body, the Board of Commissioners and Audit Committee act objectively and independently in overseeing proposals and realization of material transactions between the Company and affiliated parties. This supervision includes internal audit activities and external audits to ensure that all transactions do not contain conflicts of interest that benefit either party, and have been carried out transparently and can be accounted for in accordance with applicable accounting rules and standards.



NAMA PIHAK BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

NAME OF TRANSACTION PARTY AND NATURE OF AFFILIATED RELATIONSHIP

Pengungkapan Pihak Berelasi Related Party Disclosure

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Pelabuhan Indonesia	Entitas induk PT Pelindo Multi Terminal Parent entity, PT Pelindo Multi Terminal	Imbalan kerja, konsesi, sewa, dan kerjasama mitra usaha Employee benefits, concession, rent, and business partnership
PT Pelindo Multi Terminal	Entitas induk Parent entity	Dividen, kerjasama mitra usaha Dividends, business Partnership
PT Menara Maritim Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Layanan sewa ruang kantor Office rent services
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Layanan teknologi informasi Information technology services
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Penyedia listrik Electricity provider
PT Electronic Data Interchange	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Layanan sistem informasi Information systems services
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Pendidikan dan pelatihan Education and training
PT Pelabuhan Indonesia Investama	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Dividen, kepemilikan saham Dividends
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Pemeliharaan alat Equipment maintenance
PT IPC Terminal Petikemas	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Kerjasama mitra usaha Business Partnership
PT Pelindo Daya Sejahtera	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Penyedia Tenaga Alih Daya Outsourcing
PT Lamong Energi Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Penyedia listrik Electricity Provider
PT Pelabuhan Tanjung Priok	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Kerjasama mitra usaha Business Partnership
PT Multi Terminal Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entity under common control of Pelindo	Dividen, kerjasama mitra usaha Dividends, Business Partnership
PT Berkah Industri Mesin Angkat	Entitas sepengendalian Pelindo	Kerjasama mitra usaha
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control of Government of the Republic of Indonesia	Transaksi keuangan Financial transaction
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control of Government of the Republic of Indonesia	Transaksi keuangan Financial transaction
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control of Government of the Republic of Indonesia	Transaksi keuangan Financial transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control of Government of the Republic of Indonesia	Transaksi keuangan Financial transaction
PT BNI Life Insurance	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control of Government of the Republic of Indonesia	Asuransi tenaga kerja Employee insurance
PT Mandiri Sekuritas	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia	Perantara perdagangan efek
PT Rumah Sakit Pelabuhan	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control of Government of the Republic of Indonesia	Layanan kesehatan Health services



Pengungkapan Pihak Berelasi

Related Party Disclosure

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Directorate General of Customs and Excise	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control of Government of the Republic of Indonesia	Lain-lain Others
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control of Government of the Republic of Indonesia	Sewa Rent
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entity under common control Government of the Republic of Indonesia	Kerjasama mitra usaha Business partner collaboration

REALISASI SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Realisasi saldo dan transaksi Pihak-Pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut.

REALIZATION OF RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS

The realization of balances and transactions of Related Parties on the Company's financial performance can be presented as follows.

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset

Related Party Balances in Assets

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2024 (%)	2023 (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas dan Kas Di Bank Cash and Cash in Bank	35.385	35.083	1,91	1,97	302	0,86	↑
Deposito Berjangka Time Deposits	775.000	635.000	41,87	35,51	140.000	22,05	↑
Piutang usaha Trade Receivables	288	50	0,01	0,00	238	478,59	↑
Pendapatan masih akan diterima Accrued Income	4.590	2.069	0,25	0,12	2.521	121,83	↑
Aset tidak lancar lainnya Other Non-Current Assets	3.155	3.155	0,18	0,18	-	-	-
Jumlah Aset kepada Pihak-Pihak Berelasi Total Assets to Related Parties	818.419	675.357	44,22	37,78	143.062	21,18	↑
Jumlah Aset Total Assets	1.850.738	1.788.314			62.424	3,49	↑



Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas
Related Party Balances in Liabilities

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Liabilitas Percentage of Total Liabilities		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2024 (%)	2023 (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Utang Usaha Trade Payables	40.616	40.148	7,07	7,10	468	1,16	↑
Utang Lain-lain Other Payables	4.038	1.804	0,70	0,32	2.234	123,85	↑
Uang Titipan Deposit Money	1.305	1.183	0,23	0,21	122	10,30	↑
Utang dividen Dividends Payable	-	30.595	-	5,41	(30.595)	-	
Jumlah Liabilitas kepada Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities to Related Parties	45.959	73.730	8,00	13,04	(27.772)	(37,67)	↓
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	573.510	565.448			8.062	1,43	↑

Saldo Pihak Berelasi dalam Pendapatan
Related Party Balances in Revenues

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Pendapatan Percentage of Total Revenues		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2024 (%)	2023 (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Revenues	13.059	2.253	1,59	0,31	10.806	479,57	↑
Jumlah Pendapatan kepada Pihak-Pihak Berelasi Total Revenues to Related Parties	13.059	2.253	1,59	0,31	10.806	479,57	↑
Jumlah Pendapatan <i>Total Revenues</i>	824.596	735.205			89.391	12,16	↑

Saldo Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan
Related Party Balances in Cost of Revenues

	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Beban Pokok Pendapatan Percentage of Total Cost of Revenues		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2024 (%)	2023 (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	122.201	135.782	25,61	33,20	(13.581)	(10,00)	↓
Jumlah Beban Pokok Pendapatan kepada Pihak- Pihak Berelasi Total Cost of Revenues to Related Parties	122.201	135.782	25,61	33,20	(13.581)	(10,00)	↓
Jumlah Beban Pokok Pendapatan <i>Total Cost of Revenues</i>	477.079	408.728			68.351	16,72	↑

Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Pemenuhan peraturan dan ketentuan mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi dipastikan telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”. Uraian lengkap akan hal ini juga telah disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 pada catatan 24, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023.

Seluruh pengungkapan informasi di atas juga telah dilaporkan kepada regulator sebagai bentuk pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2021 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan telah memenuhi *armslength principal*. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit bertugas melakukan kajian dan memantau seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan untuk memastikan seluruh *armslength principal* terpenuhi dengan baik. Tidak terdapat transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham minoritas.

Company Policy Regarding Review Mechanisms for Transactions Mechanisms for reviewing transactions with related parties is done through an audit process carried out by both internal auditors and external auditors. In an effort to ensure the level of fairness of transactions and conformity with generally accepted accounting standards in Indonesia, the affiliated transaction reports above have been audited by the Auditor. This mechanism is contained in PSAK 7 (revised 2014) concerning “Related Party Disclosures”.

COMPLIANCE WITH RELATED RULES AND REGULATIONS

Compliance with the rules and regulations regarding transactions with related parties is ensured to comply with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely PSAK 7 (revised 2014) concerning “Related Party Disclosures”. A complete description of this matter has also been presented in the Company’s Annual Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024 in note 24, which is an integral part of the 2024 Annual Report and Sustainability Report.

All disclosures of the information above have also been reported to the regulator as a form of compliance with POJK No. 42/POJK.04/2021 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

The Company’s Board of Commissioners and Board of Directors have ensured that all transactions conducted have met the *armslength principal*. The Board of Commissioners together with the Audit Committee are tasked with reviewing and monitoring all affiliated transactions conducted by the Company to ensure that all *armslength principal* are met properly. There are no affiliated transactions conducted by the Company that require the approval of minor shareholders.



INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Di sepanjang tahun 2024 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

Throughout 2024 there were no financial information containing extraordinary and rare events.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

AMENDMENT OF LAW AND REGULATIONS AFFECTING THE COMPANY

Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perseroan hingga akhir tahun 2024.

There were no changes to laws and regulations that affect the Company until the end of 2024.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

AMENDMENT OF ACCOUNTING POLICIES AND ITS IMPACT ON THE COMPANY

Perseroan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

The Company applies for the first time all new and/or revised standards that are effective for periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that affect the Company's financial statements:

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendment to PSAK 201: Long-Term Liabilities with Covenants

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan
Explanation of Changes in Accounting Policies Enacted

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- Hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan;
- Hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan;
- Klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas; dan
- Hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

These amendments specify the requirements for classifying a liability as current or non-current and clarify:

- What constitutes a right to defer settlement;
- The right to defer settlement must exist at the end of the reporting period;
- The classification is not affected by the likelihood that the entity will exercise its right to defer the liability; and
- Only if the derivative embedded in the convertible liability is an equity instrument, the terms and conditions of the convertible liability will not affect its classification.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

In addition, requirements have been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is conditional on future compliance with the terms and conditions within twelve months.



Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
Amendment to PSAK 201: Long-Term Liabilities with Covenants

Dampak Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Perusahaan	:	Amandemen ini tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.
Dampak Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Perusahaan	:	This amendment does not have any impact on the Company's financial statements.

Amandemen PSAK 116: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik
Amendment to PSAK 116: Lease Liabilities in Sale, Purchase and Leaseback

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	Amandemen PSAK 116 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.
Explanation of Changes in Accounting Policies Enacted	:	The amendments to PSAK 116 Leases establish the requirements that seller-lessees use in measuring lease obligations arising in sale-purchase and leaseback transactions, to ensure that seller-lessees do not recognize the amount of any gain or loss related to the right of use retained.
Dampak Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Perusahaan	:	Amandemen ini tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perseroan.
Quantitative and Qualitative Impact on the Company	:	This amendment does not have any impact on the Company's financial statements.

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107: Pengaturan Pembiayaan Pemasok
Amendments to PSAK 207 and PSAK 107: Supplier Financing Arrangements

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan	:	Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.
Explanation of Changes in Accounting Policies Enacted	:	The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier financing arrangements and require additional disclosures about such supplier financing arrangements. The disclosure requirements in these amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the impact of supplier financing arrangements on an entity's liabilities, cash flows, and exposure to liquidity risk.
Dampak Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Perusahaan	:	Amandemen ini tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perseroan.
Quantitative and Qualitative Impact on the Company	:	This amendment does not have any impact on the Company's financial statements.



PROSPEK USAHA TAHUN 2025

BUSINESS PROSPECTS FOR 2025

Tahun 2025 masih akan menjadi tahun yang menantang bagi perekonomian global dan nasional. Dampak peperangan dan geopolitik masih akan terus mempengaruhi pergerakan ekonomi pada tahun 2025. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) periode Januari 2025, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global hanya akan sebesar 3,3% di bawah rata-rata jangka menengah historis sebesar 3,7%. Sedangkan *World Bank* memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,7 %, lebih tinggi dari kinerja perekonomian global 2024. Berbeda dengan proyeksi IMF, Bank Indonesia (BI) justru optimis dalam memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh cukup kuat di 2025 dengan laju pertumbuhan berada pada kisaran 4,7%-5,5% (yoy). Fundamental ekonomi yang tetap solid pada 2025 didasarkan pada kinerja perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan perbaikan. BI juga memprediksi inflasi tahunan Indonesia akan lebih tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51%.

Sejalan dengan proyeksi positif terhadap perkembangan ekonomi domestik ke depan, mengawali tahun 2025 industri otomotif Indonesia juga sudah menorehkan catatan positif. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kinerja ekspor kendaraan bermotor roda empat CBU unit untuk bulan Januari 2025 tercatat sebanyak 33.891 unit. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekspor otomotif di awal 2025 khususnya dalam bentuk CBU sudah berjalan dengan sangat baik.

The year 2025 will continue to be a challenging year for both the global and national economies. The impact of wars and geopolitical tensions will still influence economic movements in 2025. According to the World Economic Outlook (WEO) report from January 2025, the IMF predicted that global economic growth will only reach 3.3%, below the historical medium-term average of 3.7%. Meanwhile, the World Bank forecasted global economic growth at 2.7%, which is higher than the global economic performance in 2024. Unlike the IMF's projection, Bank Indonesia (BI) is more optimistic, predicting that Indonesia's economy will grow at a strong rate in 2025, with a projected growth range of 4.7%–5.5% year-on-year (YoY). The solid economic fundamentals in 2025 are based on the continuous improvement of Indonesia's economic performance. BI also predicted that Indonesia's annual inflation will remain well-controlled within the target range of 2.51%.

In line with the positive outlook for the domestic economy, Indonesia's automotive industry has also started 2025 on a strong note. Based on the data from the Association of Indonesian Automotive Manufacturers (Gaikindo), exports of completely built-up (CBU) four-wheeled vehicles in January 2025 reached 33,891 units. This indicates that automotive exports at the beginning of 2025, particularly in the CBU segment, are already performing very well.



RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

COMPANY STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTION FOR 2025

Proyeksi Tahun 2025 terhadap Realisasi Tahun 2024 2025 Projection against 2024 Realization

Perihal Description	Proyeksi 2025 Terhadap Realisasi 2024 2025 Projection against 2024 Realization
Pertumbuhan <i>throughput</i> Throughput Growth	5% s.d 10% 5% to 10%
Pendapatan Operasi Operating Revenue	2% s.d 5% 2% to 5%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	2% s.d 5% 2% to 5%
Investasi Investment	80% s.d 85% 80% to 85%
Pengelolaan Struktur Modal Capital Structure Management	Dipenuhi melalui pendanaan sendiri Fulfilled through self-funding
Pembayaran Dividen di Tahun 2025 (untuk Hasil Usaha tahun 2024) Dividend Payment in 2025 (for 2024 Operating Results)	80%

IPCC masih melihat beberapa peluang bisnis pada tahun 2025 dan optimis dapat melanjutkan tren pertumbuhan. Sebagai bagian dari rantai pasok industri khususnya dalam aktivitas produksi dan distribusi kendaraan, bisnis terminal kendaraan tidak bisa berdiri sendiri karena saling berkaitan dengan perkembangan berbagai industri di sekitarnya. Dengan pencapaian kinerja ekspor dan impor yang gemilang dari sektor otomotif, IPCC percaya kegiatan usaha akan terus menguat di tahun 2025. Beberapa merk kendaraan listrik dari Tiongkok akan melanjutkan tren positifnya dalam mengimpor beberapa kendaraannya ke Indonesia. Dari sisi ekspor, IPCC meyakini kendaraan produksi dalam negeri masih diminati di negara tujuan. Namun, pertumbuhan dari ekspor dan impor mungkin tidak signifikan dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya mengandalkan otomotif, IPCC juga memiliki peluang bisnis yang cukup besar dari pengiriman kendaraan berat yang biasanya digunakan oleh industri pertambangan, konstruksi, pertanian dan lainnya.

Untuk mencapai target tahun 2025, IPCC akan melakukan peningkatan pada 5 (lima) poin penting, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas terminal. Untuk menyambut kenaikan *throughput* di masa depan IPCC akan mengupayakan menambah kapasitas terminal kendaraan baik dengan penambahan lahan, *relayout* atau membangun gedung parkir baru.
2. Menambah pelanggan dan market baru. Beberapa langkah komersial akan dilakukan IPCC untuk dapat melayani layanan *stevedoring* dan *cargodoring* secara langsung kepada *cargo owner*. Selain itu, IPCC akan meningkatkan layanan *Pre-Delivery Center* (PDC) dan masuk ke layanan transportasi darat. Melanjutkan dari program tahun lalu, IPCC pada tahun ini akan mengupayakan untuk ekspansi layanan terminal kendaraan di area lain.

IPCC still sees several business opportunities in 2025 and is optimistic about continuing its growth trend. As part of the industrial supply chain, particularly in vehicle production and distribution activities, the vehicle terminal business cannot operate independently, as it is closely connected to the development of various industries around it. With the strong export and import performance of the automotive sector, IPCC believes that business activities will continue to strengthen in 2025. Several Chinese electric vehicle brands will continue their positive trend of importing vehicles into Indonesia. On the export side, IPCC believes that domestically produced vehicles will remain in demand in destination countries. However, the growth of exports and imports may not be as significant as the previous year. Beyond the automotive sector, IPCC also has significant business opportunities from the shipment of heavy vehicles, which are commonly used in the mining, construction, and agricultural industries, among others.

To achieve its 2025 targets, IPCC will focus on 5 (five) key improvements:

1. Increase terminal capacity. To accommodate future *throughput* increases, IPCC will seek to increase vehicle terminal capacity through land acquisition, *relayout*, or the construction of new parking buildings.
2. Adding new customers and markets. IPCC will take several commercial steps to be able to provide *stevedoring* and *cargodoring* services directly to *cargo owners*. In addition, IPCC will improve its *Pre-Delivery Center* (PDC) services and enter the land transportation services. Continuing from last year's program, IPCC will strive to expand its vehicle terminal services to other areas this year.



3. IPCC akan melanjutkan peningkatan layanan terminalnya melalui implementasi sistem operasi yang lebih optimal, yaitu PTOS-C. Sistem ini nantinya akan diimplementasikan di seluruh wilayah terminal kendaraan yang dikelola, termasuk di Terminal Internasional. Dengan sistem ini, pertukaran data dan integrasi layanan antar terminal kendaraan yang dikelola dapat diwujudkan.
 4. Untuk dapat menghasilkan laba bersih yang lebih optimal, pada tahun ini IPCC akan melakukan memperketat program efisiensi biaya. Tidak hanya dari aspek anggaran yang diperketat, tetapi dari aspek proses bisnis juga akan diperbaiki agar dapat berjalan lebih efisien. Tahun ini, IPCC menargetkan peningkatan pendapatan dapat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan biaya.
 5. Fokus terakhir adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa rencana telah disusun seperti Pengembangan SDM Berbasis *Skill, Knowledge*, dan *Attitude*, Pengembangan Keterampilan Berbasis Teknologi dan Pembelajaran Digital, Pengembangan Kompetensi Berbasis Proyek dan Kolaborasi, Pengembangan Sikap Melalui Budaya Perusahaan dan Promosi *Work-Life Balanced* dan *Well-being*.
3. IPCC will continue to improve its terminal services through the implementation of a more optimal operating system, namely PTOS-C. This system will later be implemented in all managed vehicle terminal areas, including the International Terminal. With this system, data exchange and service integration between managed vehicle terminals can be realized.
 4. In order to generate more optimal net profit, this year IPCC will tighten the cost efficiency program. Not only will the budget aspect be tightened, but the business process aspect will also be improved so that it can run more efficiently. This year, IPCC is targeting higher revenue growth compared to cost increases.
 5. The final focus is on improving the quality of human capital. Several plans have been drawn up such as Skill, Knowledge, and Attitude-Based Human Capital Development, Technology-Based Skills Development and Digital Learning, Project-Based Competency Development and Collaboration, Attitude Development Through Corporate Culture and Promotion of Work-Life Balance and Well-being.

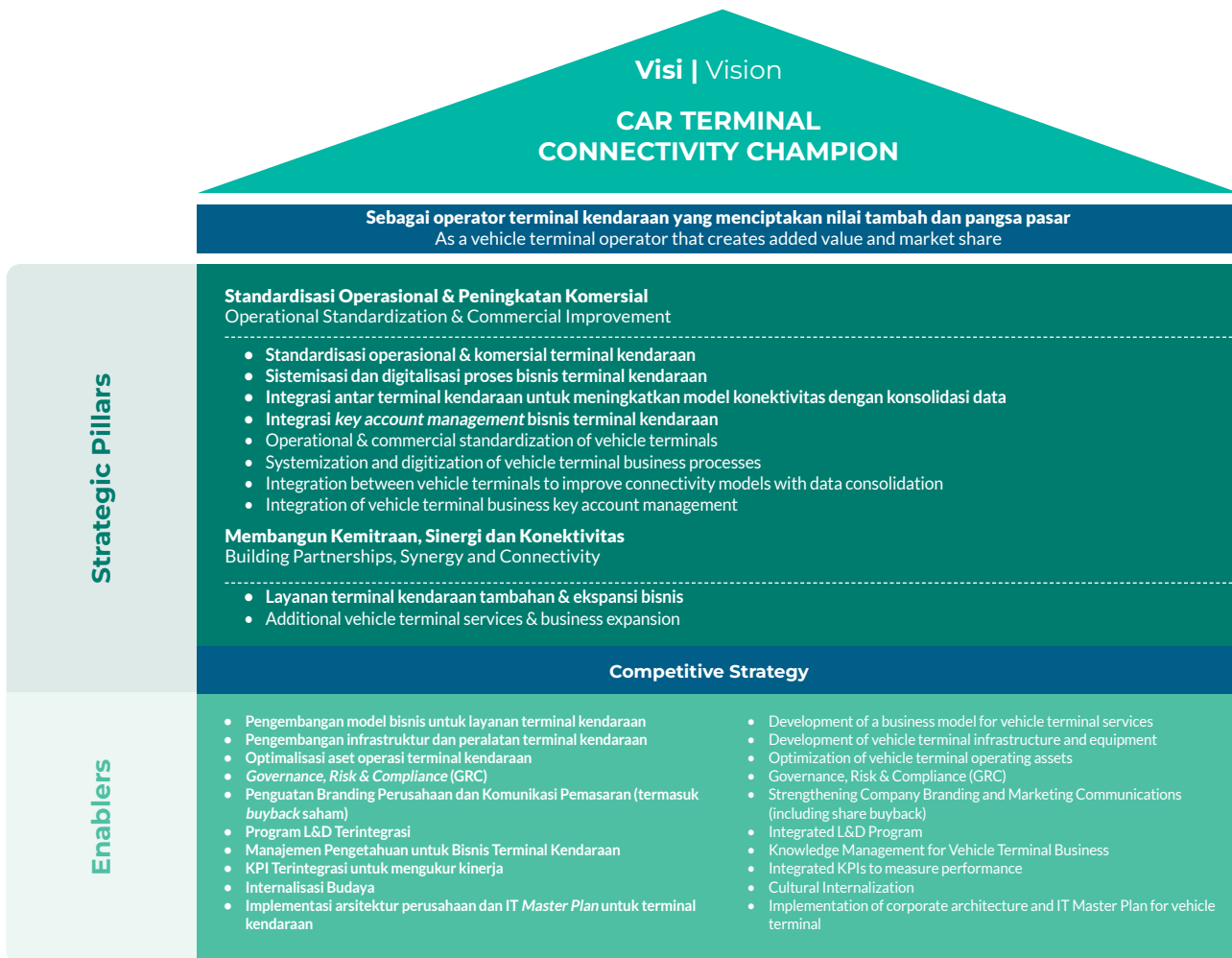


PETA JALAN USAHA 2021-2025

BUSINESS ROADMAP 2021-2025

Sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang Pengelola Terminal Kendaraan, IPCC menyadari peran strategisnya sebagai pintu utama ekspor dan impor kendaraan di Indonesia yang dikelola melalui layanan Terminal Kendaraan. Spesifikasi dan spesialisasi kegiatan usaha IPCC telah menciptakan peluang untuk menjadikan IPCC sebagai pengelola Terminal Kendaraan berkelas dunia. Hal ini sejalan dengan Visi IPCC di 2025, yaitu menjadi *Car Terminal Connectivity Champion*. Untuk mendukung pencapaian visi 2025 tersebut, IPCC memiliki pilar sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang IPCC periode 2021-2025, antara lain sebagai berikut:

As one of the companies in Indonesia engaged in Vehicle Terminal Management, IPCC realizes its strategic role as the main gateway for vehicle exports and imports in Indonesia, which are managed through the Vehicle Terminal services. The specifications and specialization of IPCC's business activities have created opportunities to make IPCC a world-class Vehicle Terminal manager. This is in line with IPCC's Vision in 2025, which is to become the Car Terminal Connectivity Champion. To support the achievement of its 2025 vision, IPCC has pillars as stated in IPCC Long-Term Plan for 2021-2025 period, as follows:



Pada Rumah Strategi RJPP periode 2021-2025, misi Perseroan adalah Sebagai operator terminal kendaraan yang menciptakan nilai tambah dan pangsa pasar. Dalam Rumah Strategi tersebut terdapat 2 (dua) *strategic pillars* yaitu:

1. Standardisasi Operasional & Peningkatan Komersial; dan
2. Membangun Kemitraan, Sinergi dan Konektivitas.

Sedangkan pencapaian strategi tersebut dapat tercapai dengan adanya 10 (sepuluh) *enablers*, yaitu:

1. Pengembangan model bisnis untuk layanan terminal kendaraan;
2. Pengembangan infrastruktur dan peralatan terminal kendaraan;
3. Optimalisasi aset operasi terminal kendaraan;
4. *Governance, Risk & Compliance* (GRC);
5. Penguatan Branding Perusahaan dan Komunikasi Pemasaran (termasuk *buyback* saham);
6. Program L&D Terintegrasi;
7. Manajemen Pengetahuan untuk Bisnis Terminal Kendaraan;
8. KPI Terintegrasi untuk mengukur kinerja;
9. Internalisasi Budaya; dan
10. Implementasi arsitektur perusahaan dan IT *Master Plan* untuk terminal kendaraan.

Tema tahun 2025 IPCC adalah *Integrated Connectivity* di mana pada tahun ini IPCC diharapkan mampu mulai merangkai layanan distribusi kendaraan di dalam ekosistem logistik. Namun, seiring dengan dinamika pasar, IPCC juga menargetkan dapat meningkatkan layanan dan kapasitas terminal kendaraan yang dikelola. Beberapa yang menjadi area fokus utama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas terminal kendaraan untuk menampung proyeksi pertumbuhan *throughput* di masa depan dan untuk menyediakan fasilitas layanan tambahan bagi pemilik barang.
2. Pengoperasian terminal kendaraan di area kerja Pelindo dan integrasi antar terminal kendaraan yang dikelola.
3. Kolaborasi dengan pemilik barang dan pelaku logistik yang terlibat dalam ekosistem logistik kendaraan dalam menciptakan layanan di luar terminal kendaraan yang unggul.
4. Implementasi *dedicated car* terminal dan peningkatan kualitas layanan terminal kendaraan.
5. Peningkatan *market share* layanan terminal kendaraan.

In the 2021-2025 RJPP Strategy House, the Company's mission is As a vehicle terminal operator that creates added value and market share. In the Strategy House, there are 2 (two) *strategic pillars*:

1. Operational Standardization & Commercial Improvement; and
2. Building Partnerships, Synergies, and Connectivity.

Meanwhile, the achievement of this strategy can be realized with the presence of 10 (ten) *enablers*:

1. Development of a business model for vehicle terminal services;
2. Development of vehicle terminal infrastructure and equipment;
3. Optimization of vehicle terminal operating assets;
4. Governance, Risk & Compliance (GRC);
5. Strengthening of Corporate Branding and Marketing Communications (including share buybacks);
6. Integrated L&D Program;
7. Knowledge Management for Vehicle Terminal Business;
8. Integrated KPIs to measure performance;
9. Cultural Internalization; and
10. Implementation of enterprise architecture and IT Master Plan for vehicle terminals.

The theme for 2025 IPCC is *Integrated Connectivity*, in which this year IPCC is expected to be able to start arranging vehicle distribution services within the logistics ecosystem. However, in line with market dynamics, IPCC also aims to improve the services and capacity of the managed vehicle terminals. Some of the main focus areas in 2025 are:

1. Increasing vehicle terminal capacity and facilities to accommodate projected throughput growth in the future and to provide additional service facilities for cargo owners.
2. Operation of vehicle terminals in Pelindo operational areas and integration between managed vehicle terminals.
3. Collaboration with cargo owners and logistics players involved in the vehicle logistics ecosystem in creating excellent services beyond vehicle terminals
4. Implementation of dedicated car terminals and improvement of vehicle terminal service quality.
5. Increasing the market share of vehicle terminal services.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

IPCC menempatkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas (ITA) sebagai fondasi utama dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan. Diperkuat oleh pengawasan berlapis, manajemen risiko yang terintegrasi, serta budaya kepatuhan yang konsisten, IPCC berupaya keras membangun kepercayaan seraya menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

IPCC places the principles of integrity, transparency, and accountability (ITA) as the main foundation in every business process and decision-making. Strengthened by multi-layered supervision, integrated risk management, and a consistent compliance culture, IPCC seeks to build trust and creating sustainable value for all stakeholders.

06





GOVERNANCE OUTCOME: PENCAPAIAN TERBAIK PENERAPAN GCG 2024

GOVERNANCE OUTCOME: BEST ACHIEVEMENTS OF GCG IMPLEMENTATION IN 2024



Skor Assessment GCG
GCG Assessment Score

110,52 point

"Excellent"

"Leadership in corporate governance" (ASEAN Asset Class)



Skor Risk Management Index (RMI)
Risk Management Index (RMI) Score 2024

3,09

Managed



Skor GRC 2024
GRC Score 2024

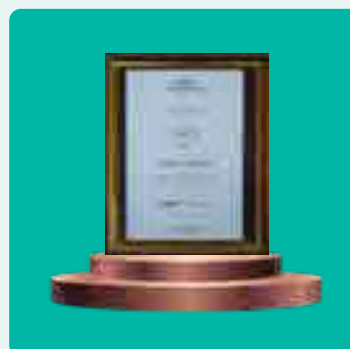
2,6

Managed



Penghargaan
Award

**ASEAN GRC AWARD
2024 RUNNER UP**



Penyelenggara:
Organizer:

**ERMA (Enterprise Risk
Management Academy)**



KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE



Sebagai Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) (GCG) menjadi salah satu indikator penting bagi Pemegang Saham untuk menilai kinerja Perseroan dan meyakini bahwa Perseroan telah dikelola dengan baik dan tepat serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham.

IPCC berkomitmen secara penuh untuk menjadikan GCG sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan di Perusahaan. IPCC meyakini bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan Perseroan dan akan memberikan kontribusi dan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham, Pegawai dan pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif dan guna memastikan bahwa GCG diterapkan secara konsisten di seluruh unit organisasi, IPCC telah mengadopsi standar terbaik yang berlaku di Internasional, yakni *ASEAN Corporate*

As a publicly listed company on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the implementation of good corporate governance (GCG) is one of the key indicators for shareholders to assess the Company's performance and to be assured that the Company is being managed properly and responsibly, with the ability to protect the interests of its shareholders.

IPCC is fully committed to making GCG the foundation of every decision-making process within the company. IPCC believes that the implementation of GCG enhances the efficiency, effectiveness, and sustainability of the Company, and will contribute to creating sustainable added value for shareholders, employees, and other stakeholders both in the short and long term.

As part of its commitment to a comprehensive GCG implementation and to ensure that GCG is applied consistently across all organizational units, IPCC has adopted international best practice standards, namely the *ASEAN Corporate*

Governance Scorecard, serta IPCC juga mengadopsi standar yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). Sebagai bagian dari entitas tidak langsung dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero), melalui PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") IPCC berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Penting Badan Usaha Milik Negara.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Dalam kegiatan operasional IPCC, GCG tidak hanya merupakan kewajiban atau keharusan melainkan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, IPCC berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Adapun tujuan penerapan GCG di IPCC, antara lain:

1. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
2. Meningkatkan *stakeholders'* value dengan memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders*. Pemenuhan nilai kepentingan seluruh *stakeholders* {Pelanggan, Pekerja, Pemegang Saham, dan Masyarakat} dilakukan dengan membuat kebijakan yang meminimalkan biaya dan limbah sambil meningkatkan kualitas jasa, meningkatkan keterampilan dan kepuasan Pekerjaannya dan berkontribusi terhadap pengembangan dan kesejahteraan Masyarakat;
3. Meningkatkan daya saing Perseroan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

LANDASAN PENERAPAN GCG

Dalam melaksanakan penerapan GCG, Perseroan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);

Governance Scorecard. Additionally, IPCC has adopted standards developed by the National Committee on Governance Policy (KNKG) through the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI). As part of an indirect entity under a state-owned enterprise (SOE), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), through PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), IPCC also adheres to the Regulation of the Minister of SOEs PER-2/MBU/03/2023 concerning guidelines for governance and significant corporate activities of state-owned enterprises.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

In IPCC's operational activities, GCG is not only an obligation or necessity but a need. Therefore, IPCC is committed to implementing GCG principles consistently and sustainably. The objectives of GCG implementation at IPCC include:

1. Improve the Company's management in a professional, transparent, efficient manner, and encouraging the empowerment of functions and independence of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors;
2. Increase stakeholders' value by paying attention to the interests of all Stakeholders. Fulfillment of the interests of all stakeholders {Customers, Workers, Shareholders, and the Community} is carried out by making policies that minimize costs and waste while improving service quality, improving the skills and satisfaction of its Workers and contributing to the development and welfare of the Community;
3. Improving the Company's competitiveness nationally and internationally, thereby increasing market confidence that can encourage investment flows and sustainable national economic growth.

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

In implementing GCG practices, the Company refers to several laws and regulations in force in Indonesia, namely:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT);
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE);
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Determination of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN), as amended by Minister of BUMN Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
4. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
5. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines;
6. Indonesian GCG Guidelines developed by the National Governance Policy Committee (KNKG);



7. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); dan
8. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

PENDEKATAN PENERAPAN GCG

Tata kelola perusahaan yang baik diterapkan di IPCC dengan pendekatan-pendekatan berikut ini:

1. IPCC sebagai institusi/emiten dalam memenuhi peraturan-peraturan sebagai wujud etika bisnis. Pendekatan ini menempatkan IPCC sebagai institusi/emiten dalam memenuhi peraturan-peraturan sebagai wujud etika bisnis. Penerapan ini mencakup 2 aspek, yaitu:
 - a. Aspek legal normatif adalah aspek penerapan GCG yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*), hal ini merupakan unsur *enforcement* dari tata kelola perusahaan.
 - b. Aspek *corporate behavior* adalah semua kegiatan perusahaan yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran perusahaan. Pendekatan ini juga memandang bagaimana IPCC berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.
2. IPCC dalam melakukan penerapan dan internalisasi prinsip-prinsip GCG sebagai etika dan perilaku mendasar yang melekat pada setiap karyawan dan diterjemahkan dalam bentuk *code of conduct*.

Pendekatan ini menilai bagaimana perilaku karyawan IPCC sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku di masyarakat dan bagaimana perilaku karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

7. Corporate Governance principles developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); and
8. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

GCG IMPLEMENTATION APPROACH

Good corporate governance is implemented at IPCC with the following approaches:

1. IPCC, as an institution/issuer, complies with regulations as a form of business ethics. This approach positions IPCC as an institution/issuer committed to fulfilling regulatory requirements as an embodiment of ethical business conduct. The implementation covers two aspects:
 - a. The legal-normative aspect refers to the implementation of GCG aimed at ensuring compliance with applicable laws and regulations (*compliance*), which serves as the enforcement element of corporate governance.
 - b. The corporate behavior aspect includes all company activities necessary to achieve its goals and objectives. This approach also considers how IPCC engages with its stakeholders.
2. IPCC implements and internalizes GCG principles as fundamental ethics and behaviors inherent in every employee, which are translated into a code of conduct.

This approach evaluates how the behavior of IPCC employees aligns with ethical norms accepted in society and how they carry out their daily duties and responsibilities.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Approach



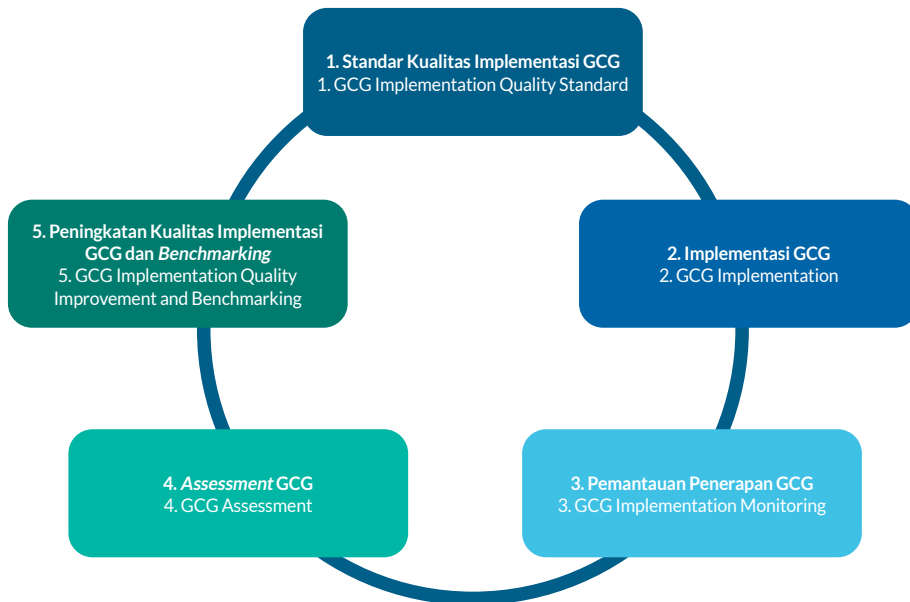
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dilakukan IPCC secara terus menerus, agar mampu mendorong pertumbuhan Perseroan yang sehat, kuat, dan dapat menciptakan nilai tambah Perseroan bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun upaya tersebut, tercermin dalam bagan siklus peningkatan kualitas penerapan GCG di IPCC berikut ini:

The efforts to improve the quality of GCG implementation are continuously carried out by IPCC in order to support healthy and strong company growth and to create added value for all stakeholders. These efforts are reflected in the following diagram of GCG Implementation Quality Improvement Cycle at IPCC:

Siklus Peningkatan Kualitas Penerapan GCG IPCC
IPCC GCG Implementation Quality Improvement Cycle



Dari bagan di atas dapat dijelaskan siklus peningkatan kualitas penerapan GCG IPCC meliputi:

1. Penetapan standar kualitas penerapan GCG;
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG;
3. Pemantauan atau pengawasan penerapan GCG;
4. Pengukuran/penilaian penerapan GCG;
5. Peningkatan kualitas penerapan GCG dan *Benchmarking*.

From the chart above, it can be explained that IPCC GCG implementation quality improvement cycle includes:

1. Determination of quality standards for GCG implementation;
2. Implementation of GCG principles;
3. Monitoring or supervision of GCG implementation;
4. Measurement/assessment of GCG implementation;
5. Improvement of GCG implementation quality and benchmarking.



PENETAPAN STANDAR KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IPCC mengadopsi standar terbaik yang berlaku di Indonesia maupun global dengan harapan dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG di IPCC. Standar-standar tersebut, yaitu:

1. Peraturan perundang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan; dan
5. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);
6. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*;
7. Penerapan GCG dengan melihat indeks terkait tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
8. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikembangkan oleh KNKG tahun 2021.

Dari acuan-acuan tersebut kemudian ditetapkan Pedoman GCG IPCC, Kode Etik, serta kebijakan-dan pedoman lainnya terkait penerapan GCG di IPCC.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI IPCC

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC"), IPCC menerapkan prinsip-prinsip GCG yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan, yang pada tahun ini penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar ASEAN Scorecard.

Penerapan Prinsip TARIFT

Sesuai arahan dari Pemegang Saham pengendali, prinsip-prinsip GCG yang diterapkan IPCC terdiri dari 6 (enam) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness* atau kewajaran, dan tepercaya disingkat TARIFT.

ESTABLISHMENT OF QUALITY STANDARDS FOR CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

IPCC adopts the best standards applicable in Indonesia and globally with the hope of improving the quality of GCG implementation at IPCC. These standards are:

1. Laws and regulations of the Republic of Indonesia, especially regarding Limited Liability Companies;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
4. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Implementing Corporate Governance;
5. Corporate Governance Principles for State Owned Companies developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
7. GCG Implementation by looking at indices related to corporate governance or the Corporate Governance Perception Index (CGPI).
8. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance developed by KNKG in 2021.

From these references, IPCC Code of GCG, Code of Conduct, and other policies and guidelines related to the implementation of GCG at IPCC are then established.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES AT IPCC

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC") implements GCG principles based on Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Governance, in which this year, good corporate governance implementation is based on the ASEAN Scorecard standard.

TARIFT Principles Implementation

In accordance with the Controlling Shareholder's direction, GCG principles implemented by IPCC consist of 6 (six) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and trusted, abbreviated as TARIFT.

Prinsip-prinsip GCG di IPCC

GCG Principles at IPCC



Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di IPCC sebagai berikut:

The implementation of GCG principles at IPCC is as follows:

Komitmen Commitment	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency Perseroan menjamin keterbukaan informasi secara jelas dan akurat bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai transparansi informasi perusahaan. The Company guarantees the disclosure of clear and accurate information for Shareholders and Stakeholders, while still paying attention to applicable statutory provisions regarding transparency of Company information.	1. Pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan. Semua informasi tersebut dapat diakses pada situs web Perusahaan: www.indonesiacarterterminal.co.id. 2. Menyampaikan pelaporan secara berkala kepada regulator yang mana hal ini merupakan bagian dari kepatuhan Perusahaan dalam hal transparansi informasi IPCC sebagai perusahaan terbuka. Informasi tersebut dapat diakses pada situs web Bursa Efek Indonesia. 3. Mengadakan <i>Public Expose</i> Tahunan yang pada tahun ini telah dilakukan pada tanggal 4 November 2024. 4. Transparansi informasi yang dilakukan IPCC selalu memperhatikan kebijakan perlindungan terhadap informasi rahasia mengenai Perusahaan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Disclosure of material and relevant information regarding performance, financial condition and other information in a clear, adequate, accurate, comparable and timely manner and easily accessible to Stakeholders. All this information can be accessed on the Company's website: www.indonesiacarterterminal.co.id. 2. Submit regular reports to regulators, which is part of the Company's compliance with IPCC information transparency as a public Company. This information can be accessed on the Indonesian Stock Exchange website. 3. Holding an Annual Public Expose which this year was held on April 28, 2022. 4. Information transparency carried out by IPCC always pays attention to the policy of protecting confidential information regarding the Company, Customers and Work Partners in accordance with applicable laws and regulations.
Akuntabilitas Accountability Perseroan menetapkan pembagian fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing organ sehingga pengelolaan bisnis IPCC senantiasa dapat berjalan efektif dan efisien. The Company determines a clear division of functions, structures, systems and responsibilities for each organ so that IPCC business management can always run effectively and efficiently.	1. Masing-masing organ utama maupun organ pendukung IPCC menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam <i>Board Manual</i> ataupun piagam yang telah disahkan; 2. Seluruh insan IPCC bekerja sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi Perseroan; 3. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 1. Each main organ and supporting organs of IPCC carry out different duties and responsibilities as stated in the Board Manual or ratified charter; 2. All IPCC Personnel work in accordance with their competencies, abilities and expertise so that they can provide their best contribution to the Company; 3. Board of Commissioners and Board of Directors are accountable for their performance to Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS).
Tanggung Jawab Responsibility	



Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di IPCC sebagai berikut:

The implementation of GCG principles at IPCC is as follows:

Komitmen Commitment	Implementasi Implementation
Pelaksanaan aktivitas operasional bisnis IPCC senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. The implementation of IPCC's business operational activities always complies with applicable laws and regulations.	1. IPCC menjamin kesesuaian antara implementasi aktivitas bisnis sehari-hari dengan prinsip-prinsip korporasi sehat dan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Perseroan selalu update mengikuti perkembangan regulasi terkini khususnya yang relevan dengan bisnis perusahaan dan regulasi pasar modal; 3. Perseroan mengikutsertakan karyawan di dalam kegiatan sosialisasi peraturan ataupun regulasi yang diselenggarakan oleh regulator; 4. Perseroan menjalankan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) secara berkesinambungan setiap tahunnya. 1. IPCC guarantees conformity between the implementation of daily business activities with healthy corporate principles and applicable regulatory provisions; 2. The Company is always updated following the latest regulatory developments, especially those relevant to the Company's business and capital market regulations; 3. The Company involves employees in the socialization of rules and regulations organized by the regulator; 4. The Company carries out Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities on an ongoing basis annually.
Independensi Independence Pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara profesional dan mandiri serta bebas dari benturan kepentingan ataupun intervensi dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The management of the Company's business activities is carried out professionally and independently and free from conflicts of interest or intervention from parties that are not in accordance with applicable laws and regulations.	1. Dalam rangka menjamin independensi, IPCC memiliki Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan 2. Melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pendukung GCG agar implementasi GCG di IPCC dapat sejalan dengan <i>best practice</i>. 1. In order to ensure independence, IPCC has an Audit Committee, Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee to assist in carrying out the Board of Commissioners duties; and 2. Make improvements to GCG supporting policies so that GCG implementation at IPCC can be in line with best practice.
Kewajaran Fairness Perseroan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Company upholds the principles of justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.	1. IPCC menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan; 2. IPCC berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara adil tanpa membedakan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak terkait. 1. IPCC guarantees fair and equal treatment in fulfilling the rights of Stakeholders; 2. IPCC is committed to treating all employees fairly without discriminating against ethnicity, religion, origin, gender or other unrelated matters.
Tepercaya (Trusted) Trusted Perseroan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan. The Company has full trust and support from all Stakeholders.	Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan sehingga Perseroan mendapatkan kepercayaan yang tercermin dari pengelolaan Perseroan berdasarkan sistem yang menjamin kualitas dan mutu yang berstandar internasional, diantaranya adalah ISO 9001: 2015 yang merupakan standar Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2015 yang merupakan standar Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan juga berdasarkan ISO 45001: 2018, serta ISO 37001: 2016 yang merupakan standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SAMP). The Company is committed to meeting the expectations of Shareholders and all stakeholders so that the Company gains trust reflected in the Company's management based on a system that guarantees quality and standards of international standards, including ISO 9001: 2015 the Quality Management System standard, ISO 14001: 2015 the Environmental Management System standard, Occupational Safety and Health Management System based on Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems and also based on ISO 45001: 2018, and ISO 37001: 2016 the Anti-Bribery Management System (SAMP) standard.



PEMANTAUAN PENERAPAN GCG

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dijalankan secara konsisten dan komprehensif yang disertai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi IPCC melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: HK.56/1/5/IKT-21 tentang Struktur Organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menugaskan Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab penerapan GCG di lingkup IPCC, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memonitor penerapan etika kerja dan bisnis serta tata kelola perusahaan yang baik GCG di IPCC.

Pengukuran/Penilaian Penerapan GCG

Perseroan secara berkala melakukan pengukuran/penilaian/evaluasi terhadap penerapan GCG untuk mengetahui sejauh mana efektivitas GCG diterapkan di lingkungan Perseroan. Penilaian dilakukan setiap tahun oleh pihak internal (*self assesment*) yang didampingi oleh pihak independen. *Self assesment* GCG yang digunakan oleh Perseroan untuk tahun buku 2024 menggunakan parameter yang berlaku baik secara nasional maupun internasional, dalam hal ini menggunakan parameter standar ASEAN *Scorecard*.

Tujuan Pengukuran/Penilaian

1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perseroan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan di IPCC, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG;
2. Menilai kesenjangan (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di IPCC, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah tersebut;
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di IPCC sejalan dengan *best practices*;
4. Memantau konsistensi penerapan GCG di IPCC dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan IPCC.

MONITORING OF GCG IMPLEMENTATION

To ensure that GCG principles are implemented consistently and comprehensively, accompanied by compliance with applicable laws and regulations, IPCC Board of Directors through the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Number: HK.56/1/5/IKT-21 concerning the Organizational Structure of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk has assigned the Corporate Secretary as unit in charge of implementing GCG within the scope of IPCC, responsible for implementing and monitoring the implementation of work and business ethics and good corporate governance GCG at IPCC.

GCG Monitoring Mechanism at IPCC

The Company periodically measures/assesses/evaluates the implementation of GCG to determine the extent to which GCG is effectively implemented within the Company. The assessment is carried out annually by an internal party (*self-assessment*) assisted by an independent party. The Company's GCG self- for 2024 fiscal year used parameters that apply both nationally and internationally, in this case using the ASEAN *Scorecard* standard parameters.

Objectives of Measurement/Assessment

1. Examine and assess the implementation of GCG in the Company through the elaboration of GCG implementation conditions and with real conditions applied at IPCC, through the provision of scores/values on GCG implementation and quality categories of GCG implementation;
2. Assess the gap between GCG criteria and GCG implementation at IPCC, and propose recommendations for improvement to reduce the gap;
3. Provide recommendations for improvements to the gaps found in the implementation of GCG at IPCC in line with best practices;
4. Monitor the consistency of GCG implementation at IPCC and obtain input for the improvement and development of GCG policies within IPCC.

Skor Assessment IPCC 2024

IPCC Assessment Score for 2024

ACGS	
110,52 point	
"Excellent"	
"Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)"	

Assessment Penerapan GCG berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard

GCG Assessment based on ASEAN Corporate Governance Scorecard

Jenis Penilaian Type of Assessment	: Assessment/Penilaian Independen/Self Assessment Assessment/Independent Assessment/Self-Assessment
Pendamping Penilaian Appraiser	: SAP Consulting



Assessment Penerapan GCG berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard

GCG Assessment based on ASEAN Corporate Governance Scorecard

Tahun Ukur Measurement Year	:	2025
Periode Penerapan Implementation Period	:	1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 January 1, 2024 to December 31, 2024
Tempat Pengukuran Venue	:	Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Head Office
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	1 Januari 2025-26 Maret 2025 January 1, 2025 to March 26, 2025

Adapun batasan penilaian adalah dengan mengevaluasi kinerja Perseroan dalam menerapkan praktik-praktik Tata Kelola yang Baik yang diungkapkan kepada publik tahun 2024, dengan fokus kepada:

1. Hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap pemegang saham;
2. Keberlanjutan dan ketangguhan terkait dengan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG);
3. Pengungkapan dan transparansi; serta
4. Pertanggungjawaban Dewan (Direksi dan Dewan Komisaris).

Metodologi penilaian dilakukan terhadap kecukupan informasi publik pada 5 (lima) prinsip utama dalam ACGS, yaitu:

1. Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*) – Menilai perlindungan dan pemenuhan hak serta mengevaluasi sejauh mana perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham.
2. Keberlanjutan dan Ketangguhan (*Sustainability and Resilience*) – Merupakan elemen penting yang mencerminkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan jangka panjang serta dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (*ESG – Environmental, Social, and Governance*).
3. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*) – Menganalisis tingkat keterbukaan informasi perusahaan kepada publik.
4. Tanggung Jawab Dewan (*Responsibility of the Board*) – Menilai efektivitas dan peran Direksi dalam mengelola Perseroan, dan Dewan Komisaris dalam mengawasi manajemen Perseroan.
5. Bonus dan *Penalty* – Menilai sistem kompensasi dan insentif bagi manajemen untuk mendorong praktik tata kelola yang baik, dan juga menghindari praktik-praktik yang tidak diperkenankan dari aspek tata kelola perusahaan.

Berdasarkan hasil penilaian, Perseroan telah mencapai pencapaian yang luar biasa (*excellent*) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang secara umum dapat kami sampaikan bahwa:

1. Perseroan berhasil melakukan hak-hak dan perlindungan yang sama terhadap pemegang saham, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan suara dan hak-hak lainnya.
2. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah diterapkan secara adil dan setara terhadap semua pemegang saham, tanpa memihak kepada pihak tertentu.

The assessment limit is to evaluate the Company's performance in implementing Good Governance practices that are disclosed to the public in 2024, with a focus on:

1. Equal rights and treatment for shareholders;
2. Sustainability and resilience related to Environmental, Social and Governance (ESG);
3. Disclosure and transparency; and
4. Board Responsibility (Board of Directors and Board of Commissioners).

The assessment methodology is carried out on the adequacy of public information on 5 (five) main principles in ACGS, namely:

1. Rights and Equitable Treatment of Shareholders - Assessing the protection and fulfillment of rights and evaluating the extent of fair treatment of all shareholders.
2. Sustainability and Resilience - An important element that reflects the company's readiness to face long-term challenges and their impacts on the environment, society, and governance (ESG - Environmental, Social, and Governance).
3. Disclosure and Transparency - Analyzing the level of openness of company information to the public.
4. Responsibility of the Board - Assessing the effectiveness and role of Board of Directors in managing the Company, and Board of Commissioners in overseeing the management of the Company.
5. Bonus and Penalty – Assess the compensation and incentive system for management to encourage good governance practices, and also avoid practices that are not permitted from a corporate governance perspective.

Based on the assessment results, the Company has achieved an excellent achievement in implementing corporate governance, which in general we can conclude that:

1. The Company has succeeded in exercising the same rights and protection for shareholders, including the right to obtain accurate and timely information, as well as the right to participate in the General Meeting of Shareholders and cast votes and other rights.
2. Corporate governance principles have been applied fairly and equally to all shareholders, without favoring any particular party.



- Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Mengakui adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari operasional bisnis Perseroan. Melalui kebijakan dan program-program khusus, secara aktif berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan, mendukung inisiatif sosial, dan memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
- Perseroan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap peran pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan memastikan terciptanya nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.
- Perseroan memenuhi standar tinggi dalam hal pengungkapan dan transparansi. Informasi terkait dengan kinerja keuangan, risiko, dan kebijakan tata kelola perusahaan tersedia dengan jelas dan mudah diakses oleh publik.
- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dengan baik dalam menjalankan fungsinya. Proses pengambilan keputusan, struktur organisasi, dan pemantauan kinerja manajemen diintegrasikan secara efektif.
- The Company has a strong commitment to making positive changes in society and the surrounding environment. Recognizing social and environmental responsibility as an integral part of the Company's business operations. Through specific policies and programs, actively seeks to minimize environmental impacts, support social initiatives, and ensure good corporate governance practices.
- The Company shows a good understanding of the roles of stakeholders, including employees, customers and society. Active collaboration with stakeholders ensures the creation of long-term value for all parties involved.
- The Company meets high standards in terms of disclosure and transparency. Information related to financial performance, risks and corporate governance policies is clearly available and easily accessible to the public.
- Board of Directors and Board of Commissioners are properly responsible for carrying out their functions. The decision-making process, organizational structure, and management performance monitoring are integrated effectively.

SKOR PENILAIAN

Pencapaian hasil *self assesment* GCG IPCC berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Level I	Number of Question	Weightage	Not Applicable	Number of Comply	Score (%)
A: Rights and Equitable Treatment of Shareholder	30	20%	2	23	16,43
B: Sustainability and Resilience2215%	22	15%	0	20	13,64
C: Disclosure and transparency	34	25%	0	33	24,26
D: Responsibility of the Board6340	63	40%	1	53	34,19
Subtotal	149	100%	3	129	88,52
Level 2					
Bonus					24,00
Penalty					(2,00)
Sub Total					22,00
TOTAL LEVEL 1 + LEVEL 2	193				110,52

Skor akhir *self assesment* ASEAN CG Scorecard (Level 1 dan Level 2) adalah 110,26 point, dengan predikat "Excellent", artinya "Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)" dengan tingkat pencapaian 79,65%.

Jika dibandingkan dengan skor tahun 2023 sebesar 107,26 dengan tingkat pencapaian 76,61%, maka terdapat peningkatan skor sebesar 3,04%. Pencapaian tersebut merupakan nilai yang sangat luar biasa, Perseroan berhasil menerapkan prinsip, struktur, dan mekanisme penerapan tata kelola Perusahaan dengan baik dan berkesinambungan.

ASSESSMENT SCORE

Achievement of IPCC's GCG assessment results based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2024 is as follows:

The final score of the ASEAN CG Scorecard self-assessment (Level 1 and Level 2) is 110.26 points, with "Excellent" predicate, meaning "Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)" with an achievement level of 79.65%.

When compared to the 2023 score of 107.26 with an achievement level of 76.61%, there is a 3.04% increase in the score. This achievement is an extraordinary value, the Company has succeeded in implementing the principles, structures, and mechanisms for implementing corporate governance well and sustainably.



Perkembangan Skor Assessment ACGS IPCC

Development of IPCC ACGS Assessment Scores



REKOMENDASI/AREA OF IMPROVEMENT

Rekomendasi Secara Umum

1. *Website* sebagai salah satu sarana publikasi yang murah, mudah, cepat, tepat dan efisien dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan penggunaannya semaksimal mungkin.
2. Tetap dilakukan pemantauan berkala terhadap *Website* Perseroan dimana setiap folder harus bersesuaian dengan materi, dan dipastikan materi tersebut merupakan informasi publik yang valid/terkini.
3. Seluruh informasi dan materi yang diunggah di *Website* agar dalam 2 bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
4. Melengkapi kebijakan internal, dan pengungkapan pada Laporan Tahunan terhadap beberapa hal yang masih belum *comply*.
5. Pelaksanaan RUPS dan Penyusunan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan agar memperhatikan POJK terkait dan standar yang dikeluarkan Panitia *Annual Report Award*, serta penerapan praktik praktik GCG termasuk parameter ASEAN CG Scorecard sehingga lebih komprehensif.
6. Memanfaatkan hasil penilaian independen ini sebagai upaya untuk mempertahankan parameter ASEAN CG Scorecard yang sudah *comply*, dan memperhatikan rekomendasi yang masih harus diperbaiki.

Rekomendasi untuk Part A: Rights of Shareholders

Dari *self assesment* yang dilakukan terhadap part A (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*), KIM Consult merekomendasikan:

1. Pembayaran dividen final melebihi dari 30 hari setelah Keputusan RUPST (RUPST tanggal 10 Juni 2024 sedangkan pembayaran dividen final 12 Juli 2024). Disarankan dalam menyusun jadwal dividen, selain mengacu kepada POJK 15/POJK.04/2020 dan Ketentuan Bursa Efek Indonesia Kep-00077/BEI/09-2021, juga memperhatikan parameter ACGS.
2. Risalah keputusan RUPS dipublikasikan melalui *Website* pada hari yang sama dengan pelaksanaan RUPS, sedangkan penyampaian informasi ke Bursa dilakukan dua hari kerja berikutnya setelah RUPS. Sebaiknya penyampaian risalah keputusan RUPS ke Bursa juga pada saat yang bersamaan dengan pengumuman di *Website*, atau selambatnya pada hari kerja berikutnya setelah RUPS.

RECOMMENDATIONS/AREAS OF IMPROVEMENT

General Recommendations

1. Websites as a means of publication that are cheap, easy, fast, precise and efficient can be utilized and optimized for use as much as possible.
2. Regular monitoring of the Company's Website continues to be carried out, where each folder must correspond to the material, and it is ensured that the material is valid/up-to-date public information.
3. All information and materials uploaded on the Website must be in 2 languages (Indonesian and English).
4. Completing internal policies and disclosures in the Annual Report regarding several matters that are still not in compliance.
5. Holding of the GMS and preparation of the Annual Report including the Sustainability Report to pay attention to the relevant POJK and standards issued by the Annual Report Award Committee, as well as the implementation of GCG practices including the ASEAN CG Scorecard parameters so that it is more comprehensive.
6. Utilize the results of this independent assessment as an effort to maintain ASEAN CG Scorecard parameters that are in compliance, and pay attention to recommendations that still need to be improved.

Recommendations for Part A: Rights of Shareholders

From the self-assessment carried out on part A (Rights and Equitable Treatment of Shareholders), KIM Consult recommends:

1. Payment of final dividends more than 30 days after the AGMS Resolution (AGMS on June 10, 2024 while payment of final dividends on July 12, 2024). It is recommended that in preparing the dividend schedule, in addition to referring to POJK 15/POJK.04/2020 and the Provisions of the Indonesia Stock Exchange Kep-00077/BEI/09-2021, also pay attention to the ACGS parameters.
2. Minutes of AGMS resolutions are published via the Website on the same day as the AGMS, while the submission of information to the Exchange is carried out two working days after the AGMS. It is better to submit the minutes of AGMS resolutions to the Exchange at the same time as the announcement on the Website, or no later than the next working day after the AGMS.

3. Profil Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS sebaiknya dipublikasikan sebelum dilakukan penunjukan oleh RUPS.
4. Dalam Laporan Tahunan telah mengungkapkan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris (tidak memiliki saham yang mencapai 5%), dan dibagian lain terdapat pengungkapan kepemilikan Direksi kurang dari 5% namun tidak terdapat pengungkapan mengenai kewajiban laporan oleh yang bersangkutan kepada regulator paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
5. Dalam Laporan Tahunan telah mengungkapkan Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Mengawasi Jalannya Prosedur Transaksi afiliasi. Namun perlu menambahkan adanya kebijakan yang mewajibkan Komite yang terdiri dari Komisaris Independen untuk melakukan review Transaksi Pihak Terkait yang material dan menentukan bahwa transaksi tersebut merupakan tindakan terbaik bagi kepentingan Perseroan dan pemegang saham.
6. Sebaiknya diadakan program dan dibuat kebijakan mengenai pinjaman yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan perlakuan yang wajar (*arm's length*).

Rekomendasi untuk Part B: Sustainability and Resilience

Dari *self assesment* yang dilakukan terhadap part B (*Sustainability and Resilience*), KIM Consult merekomendasikan:

1. Sebaiknya dalam Laporan Tahunan ada pengungkapan mengenai perlindungan terhadap hak-hak kreditur.
2. Sebaiknya diadakan program dan dibuat kebijakan pemberian penghargaan/kompensasi atas pencapaian bisnis jangka Panjang yang berkelanjutan (bukan hanya tahunan) misalnya target pencapaian ESG dan lain-lain.

Rekomendasi untuk Part C: Disclosure and Transparency

Dari *self assesment* yang dilakukan terhadap part C (*Disclosure and Transparency*), KIM Consult merekomendasikan:

1. Disarankan dalam Laporan Tahunan ditambahkan pengungkapan mengenai ada/tidak adanya kepemilikan saham oleh Senior Management (pejabat 1 tingkat dibawah Direksi);
2. Selain mengungkapkan struktur remunerasi (gaji, tunjangan, benefi lainnya) untuk Direksi dan Direktur Utama (CEO). Namun kedepan sebaiknya ditambahkan juga pengungkapan ada atau tidak adanya kebijakan atau pelaksanaan pemberian insentif jangka pendek maupun jangka panjang bagi Direksi dan Direktur Utama.

Rekomendasi untuk Part D: Responsibilities of The Board

Dari *self assesment* yang dilakukan terhadap part D (*Responsibilities of the Board*), KIM Consult merekomendasikan:

1. Dalam Anggaran Dasar atau *Board Manual* ditambahkan pasal atau ayat mengenai masa jabatan Komisaris Independen 2 periode.
2. Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen harus memiliki sertifikasi keahlian atau pengalaman akuntansi.

3. The profile of Public Accountant/Public Accounting Firm to be appointed by the AGMS should be published before the appointment is made by the AGMS.
4. The Annual Report has disclosed the share ownership of Board of Directors and Board of Commissioners (does not have shares reaching 5%), and in another section there is a disclosure of Board of Directors' ownership of less than 5% but there is no disclosure regarding the obligation of the person concerned to report to the regulator no later than 3 (three) working days.
5. The Annual Report has disclosed the Role of Board of Commissioners and Audit Committee in Supervising the Affiliate Transaction Procedure. However, it is necessary to add a policy that requires the Committee consisting of Independent Commissioners to review material Related Party Transactions and determine that the transaction is the best action for the interests of the company and shareholders.
6. A program and policy should be created regarding loans given to Board of Directors and Board of Commissioners with fair treatment (*arm's length*).

Recommendations for Part B: Sustainability and Resilience

From the self-assessment carried out on part B (*Sustainability and Resilience*), KIM Consult recommends:

1. It is better if the Annual Report contains disclosures regarding the protection of creditor rights.
2. It is better to hold a program and create a policy for awarding/compensation for sustainable long-term business achievements (not just annually) such as ESG achievement targets and others.

Recommendations for Part C: Disclosure and Transparency

From the self-assessment carried out on part C (*Disclosure and Transparency*), KIM Consult recommends:

1. It is recommended that the Annual Report add disclosure regarding the presence/absence of share ownership by Senior Management (officials 1 level below the Board of Directors);
2. In addition to disclosing the remuneration structure (salary, allowances, other benefits) for Board of Directors and President Director (CEO). However, in the future, disclosure should also be added regarding the existence or absence of policies or implementation of short-term or long-term incentives for Board of Directors and President Director.

Recommendations For Part D: Responsibilities of the Board

From the self-assessment carried out on part D (*Responsibilities of the Board*), KIM Consult recommends:

1. It is recommended that the Articles of Association or Board Manual add a paragraph regarding the term of office of an Independent Commissioner of 2 terms.
2. The Audit Committee consisting of Independent Commissioners must have certification of accounting expertise or experience.



3. Upayakan tingkat kehadiran masing-masing Direksi dalam Rapat Direksi minimal 75%.
4. Ketentuan Kuorum Rapat Direksi maupun Dewan Komisaris sebaiknya $\frac{3}{4}$ dari jumlah Direksi/Dewan Komisaris, dan dalam Laporan Tahunan juga sebaiknya dilengkapi pengungkapan Kuorum Rapat Direksi maupun Dewan Komisaris pada setiap rapat masing-masing.
5. Dalam Pasal 17.6. Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa bahan-bahan acara Rapat Direksi tersedia 5 (lima) hari kalender, sedangkan Pasal 20.6. bahan-bahan acara Rapat Dewan Komisaris tersedia 5 (lima) hari. Sebaiknya bahan-bahan mata acara Rapat tersebut tersedia dan disampaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat.
6. Sebaiknya memiliki standar yang terukur (memiliki parameter) untuk menentukan insentif berbasis kinerja bagi Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan kepentingan jangka panjang Perseroan, termasuk misalnya:
 - a. *Claw back provision*, kebijakan yang memungkinkan Perseroan menarik kembali atau membatalkan bonus atau insentif yang telah diberikan.
 - b. *Deferred Bonuses*, kebijakan pemberian bonus yang ditangguhkan untuk memastikan kinerja jangka panjang tercapai.
7. Dalam hal Komisaris Utama non-Independen, maka sebaiknya dari 2 (dua) Komisaris Independen, salah satunya ditunjuk sebagai *Leader/Senior* Komisaris Independen.
8. Dalam Laporan Tahunan telah mengungkapkan "Kebijakan Suksesi Direksi" namun sebaiknya ada pengungkapan juga secara spesifik mengenai kebijakan suksesi Direktur Utama/CEO.
9. Dalam Laporan Tahunan menungkapkan penilaian terhadap Direksi baik secara kolektif maupun kolegial, oleh Dewan Komisaris berdasarkan target pencapaian KPI yang sudah disepakati bersama di awal tahun. Namun kedepan sebaiknya ditambahkan juga pengungkapan penilaian khusus terhadap CEO (Direktur Utama).
3. Strive for the attendance level of each Director at the Directors' Meeting to be at least 75%.
4. The meeting quorum requirement should be $\frac{3}{4}$ (75%), and the Annual Report should also include disclosure of the Board of Directors and Board of Commissioners' meeting quorum in each meeting.
5. Article 17.6. The Company's Articles of Association stipulates that the materials for Board of Directors' Meeting are available for 5 (five) calendar days, while Article 20.6. the materials for Board of Commissioners' Meeting are available for 5 (five) days. The materials for Meeting's agenda should be available and submitted no later than 5 (five) working days before the meeting.
6. It is advisable to have measurable standards (parameters) to determine performance-based incentives for Board of Directors and Executive Officers with the Company's long-term interests, including for example:
 - a. *Claw back provision*, a policy that allows the company to withdraw or cancel bonuses or incentives that have been given.
 - b. *Deferred Bonuses*, a policy of providing bonuses that are deferred to ensure long-term performance is achieved.
7. In the event that the President Commissioner is non-Independent, it is advisable that one of the 2 Independent Commissioners be appointed as *Leader/Senior* Independent Commissioner.
8. The Annual Report has disclosed the "Board of Directors Succession Policy" but there should also be a specific disclosure regarding the President Director/CEO succession policy.
9. The Annual Report discloses the assessment of Board of Directors both collectively and collegially, by Board of Commissioners based on KPI achievement targets that have been agreed upon at the beginning of the year. However, in the future, it should also include a specific disclosure of the CEO (President Director).

Rekomendasi Level 2, Bonus and Penalty

1. Bonus
Untuk mendapatkan skor bonus tambahan, selain dari yang telah dilakukan juga disarankan:
 - a. Pemanggilan RUPS disertai dengan perincian agenda dan penjelasan masing-masing agenda dilakukan 28 hari sebelum RUPS.
 - b. Laporan Keberlanjutan sebaiknya divalidasi oleh Pihak Eksternal Independen.
 - c. Dibuat program insentif atau kompensasi yang didasarkan kepada kinerja Perusahaan jangka panjang yang berkelanjutan (misalnya pencapaian target ESG, atau emisi karbon).
 - d. Disarankan *Whistleblowing System* ditangani oleh Pihak Eksternal yang Independen.
 - e. Disarankan publikasi Laporan Keuangan Tahunan dipublikasikan paling lambat akhir Februari (60 hari setelah tutup buku).
 - f. Disarankan diangkat minimal 1 (satu) atau lebih Komisaris Independen Perempuan.

Level 2 Recommendations, Bonus and Penalty

1. Bonus
To get additional bonus scores, in addition to what has been done, it is also recommended:
 - a. The summons for the GMS accompanied by detailed agendas and explanations for each agenda item shall be made 28 days before the GMS.
 - b. Sustainability Report should be validated by Independent External Parties.
 - c. Create incentive or compensation programs that are based on the Company's long-term, sustainable performance (e.g. achievement of ESG targets, or carbon emissions).
 - d. It is recommended that the Whistleblowing System be handled by an Independent External Party.
 - e. It is recommended that the Annual Financial Report be published no later than the end of February (60 days after closing the books).
 - f. It is recommended that 1 (one) or more female independent commissioners be appointed.

- g. Disarankan proses penjurangan kandidat Direksi/ Komisaris dilakukan oleh lembaga eksternal yang independen (*headhunter*).

Penalty

Disarankan agar Perseroan sekurang-kurangnya tetap menghindari beberapa parameter aspek penalty sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Penilaian, termasuk usahakan menghindari Komisaris memperoleh bonus/tantiem dari Perseroan.

INISIATIF STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG

Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG melalui perbaikan dan pengembangan dengan mengacu pada standar terbaik nasional maupun global tentang penerapan GCG. Adapun upaya tersebut, antara lain:

1. Penerapan GCG di Perseroan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
2. *Self Assessment* GCG yang dilaksanakan setiap tahun dengan didampingi oleh konsultan *independen*;
3. Penerapan ISO 37001:2016 yang merupakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
4. Optimalisasi penerapan *Whistleblowing System*.

SOSIALISASI GCG DAN MEMBANGUN AWARENESS

1. Dilaksanakannya penandatanganan pakta integritas serta komitmen anti penyuapan antara IPCC dengan seluruh mitra dan *customer* Perseroan pada tanggal 4 Desember 2024 Pada Acara IPCC Bersih dan Peluncuran WBS Pelindo Dengan Tema "Berani Lawan dan Laporkan Korupsi, Untuk Indonesia Maju".
2. Sosialisasi dan penyegaran penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan IPCC dilakukan melalui platform daring yang tersedia di <https://pgood.pelindo.co.id/>. Website ini berfungsi sebagai sarana bagi seluruh insan di lingkungan Pelindo Group, termasuk IPCC, untuk mempelajari, memahami, serta mengevaluasi tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
3. Penandatanganan pakta integritas secara elektronik melalui sistem *pgood* dalam website <https://pgood.pelindo.co.id/>

- g. It is recommended that the selection process for Directors/Commissioners candidates be carried out by an independent external institution (*head hunter*).

Penalty

It is recommended that the Company at least avoid several penalty aspect parameters as disclosed in the Assessment Results Report, including trying to avoid Commissioners receiving bonuses/tantiems from the Company.

STRATEGIC INITIATIVES TO IMPROVE THE QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION

The Company strives to improve the quality of GCG implementation through improvements and developments by referring to the best national and global standards on GCG implementation. These efforts include:

1. Implementation of GCG in the Company in a sustainable and continuous manner;
2. GCG Self-Assessment, which is carried out annually accompanied by an independent consultant;
3. Implementation of ISO 37001:2016 as an Anti-Bribery Management System;
4. Optimizing the implementation of Whistleblowing System.

GCG SOCIALIZATION AND BUILDING AWARENESS

1. The signing of integrity pact and anti-bribery commitment between IPCC and all partners and customers of the Company on December 4, 2024 at Clean IPCC Event and the Launch of Pelindo WBS with the Theme "Dare to Fight and Report Corruption, for Advanced Indonesia".
2. Socialization and refreshment of the application of Good Corporate Governance (GCG) principles within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and IPCC is carried out through an online platform available at <https://pgood.pelindo.co.id/>. This website serves as a means for all people within the Pelindo Group, including the IPCC, to learn, understand, and evaluate the level of understanding of the principles of good corporate governance.
3. Electronic signing of an integrity pact through the *pgood* system on the website <https://pgood.pelindo.co.id/>



4. Perseroan telah menetapkan kebijakan larangan gratifikasi pada tahun 2024 dengan hasil pemantauan gratifikasi, pungli, dan WBS hingga Desember 2024 hasilnya nihil, sebagaimana surat edaran sebagai berikut:
 - a. SURAT EDARAN Nomor: SK.01.01/26/3/1/HUKM/DIRUT/IKT-24TENTANGLARANGAN PERMINTAAN, PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN SUAP SERTA GRATIFIKASI PADA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H / 2024 M DI LINGKUNGAN PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK tanggal 26 Maret 2024;
 - b. SURAT EDARAN Nomor: SK.01.01/7/12/1/TKPT/WDUT/PLND-24TENTANGLARANGAN PERMINTAAN, PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN SUAP SERTA GRATIFIKASI PADA PERAYAAN HARI NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025 DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) tanggal 7 Desember 2024.
4. The Company has established a policy of prohibiting gratification in 2024 with the results of monitoring gratification, extortion, and WBS until December 2024 the results were zero, as per the following circular:
 - a. CIRCULAR LETTER Number: SK.01.01/26/3/1/HUKM/DIRUT/IKT-24CONCERNING THE PROHIBITION OF REQUESTING, SENDING AND RECEIVING BRIBERY AND GRATIFICATION IN CELEBRATION OF EID AL-FITR 1445 H/2024 M IN PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK ENVIRONMENT dated March 26, 2024;
 - b. CIRCULAR LETTER Number: SK.01.01/7/12/1/TKPT/WDUT/PLND-24 CONCERNING THE PROHIBITION OF REQUESTING, SENDING AND RECEIVING BRIBERY AND GRATIFICATION IN CELEBRATION OF CHRISTMAS 2024 AND NEW YEAR 2025 IN PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) ENVIRONMENT dated December 7, 2024.



STRUKTUR ORGAN GCG DAN MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN

GCG ORGAN STRUCTURE AND INTER-ORGAN RELATIONSHIP MECHANISM

STRUKTUR GCG

Perseroan didirikan dan diatur sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), di mana disebutkan bahwa struktur tata kelola Perseroan terdiri atas tiga organ utama yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kolaborasi antar organ Perseroan yang optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan lain.

Masing-masing organ Perseroan menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sehingga mampu menentukan arah dan kualitas dari kinerja Perseroan. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung seperti Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan Direksi dibantu oleh organ pendukung seperti Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

Untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perseroan terutama dari aspek keuangan, Perseroan melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan Perseroan. Audit eksternal ini dilakukan oleh Akuntan Publik dengan pemilihan melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Hasil audit eksternal diharapkan mampu mencerminkan kinerja usaha secara obyektif sebagai faktor paling fundamental.

GCG STRUCTURE

The Company was established and regulated in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), where it is stated that the Company's governance structure consists of three main organs, namely General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors. Optimal collaboration between Company organs in carrying out their duties, functions and responsibilities for the benefit of the Company is carried out in accordance with the provisions of Laws, Articles of Association and other provisions.

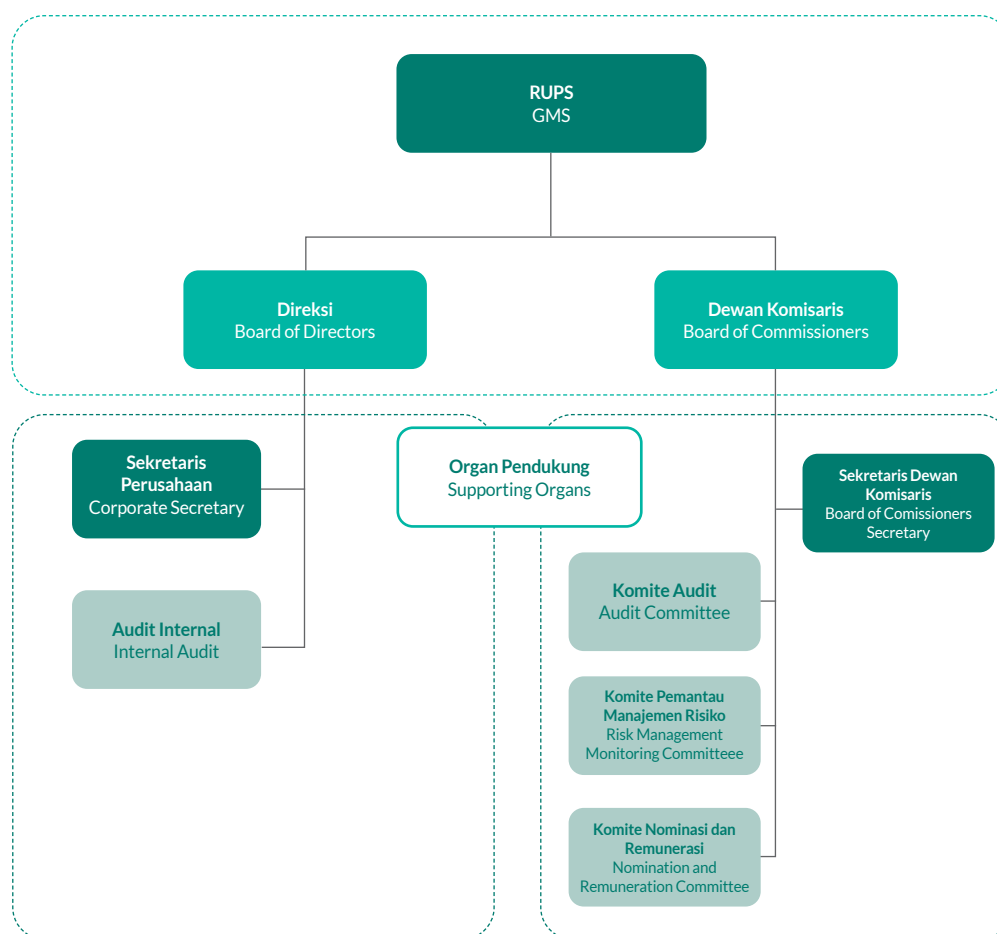
Each of the Company's organs carries out its duties, functions and responsibilities so that it is able to determine the direction and quality of the Company's performance. In carrying out its functions, Board of Commissioners is assisted by supporting organs such as Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, Board of Directors is assisted by supporting organs such as Corporate Secretary and Internal Audit.

To fulfill compliance with applicable laws and regulations as well as fulfill the principles of transparency and accountability in Company management, especially from the financial aspect, the Company carries out an external audit of the Company's financial reports. This external audit is carried out by Public Accountants by selection through the applicable organizational mechanisms. The results of external audits are expected to objectively reflect business performance as the most fundamental factor.



Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan IPCC

IPCC Corporate Governance Organ Structure



Organ Utama Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Main Organs

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menduduki posisi tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak dapat didelegasikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan-perundangan yang berlaku. RUPS berfungsi sebagai wadah formal bagi Pemegang Saham dalam mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan IPCC baik untuk kepentingan jangka pendek ataupun jangka panjang. General Meeting of Shareholders (GMS) occupies the highest position in the corporate governance structure and has authority that cannot be delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners, in accordance with the provisions of Articles of Association and applicable laws. The GMS functions as a formal forum for Shareholders to make strategic decisions regarding the management of IPCC for both short and long term interests.	Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam menentukan arah tujuan pencapaian kinerja IPCC. Segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar IPCC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja yang tertuang dalam Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Board of Commissioners carries out a supervisory function regarding the implementation of the Company's management carried out by Board of Directors. Apart from that, Board of Commissioners is also tasked with providing direction and advice to Board of Directors in determining the direction of achieving IPCC performance goals. All implementation of duties and responsibilities of Board of Commissioners refers to IPCC Articles of Association and applicable laws and regulations. In carrying out its duties and responsibilities, Board of Commissioners has a Work Code of Conduct which is contained in the Board Manual of Board of Commissioners.	Direksi memiliki fungsi utama dalam pengelolaan bisnis IPCC terutama dalam mencapai target-target tahunan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Pelaksanaan tugas Direksi mengacu pada Anggaran Dasar IPCC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Tata Tertib Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Board of Directors has the main function in managing IPCC business, especially in achieving the annual targets that have been set and improving the Company's performance. The implementation of Board of Directors duties refers to IPCC Articles of Association and applicable laws and regulations and is guided by the Working Relations Code between Board of Commissioners and Board of Directors.

Organ Pendukung Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Supporting Organs

Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs		Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Organs			
Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Committees	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary		Audit Internal Internal Audit	
		Fungsi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Function	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	Fungsi Audit Internal Internal Audit Function	Fungsi Manajemen Risiko Risk Management Function
Organ pendukung yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, yaitu terdiri dari: - Komite Audit; - Komite Nominasi dan Remunerasi; - Komite Pemantau Manajemen Risiko Supporting organs established to assist the implementation of Board of Commissioners' supervisory function, consisting of: - Audit Committee; - Nomination and Remuneration Committee; - Risk Management Monitoring Committee	Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta dibantu oleh seorang staf karyawan Sekretariat Dewan Komisaris. Secretary of Board of Commissioners is appointed and directly responsible to Board of Commissioners, and assisted by a staff employee of Board of Commissioners Secretariat.	Organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan keterbukaan informasi Perseroan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam mengelola dan menjaga komunikasi antara pihak internal dengan pihak eksternal termasuk Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan. A supporting organ of Board of Directors that is responsible for the implementation of the Company's information disclosure. In addition, Corporate Secretary also plays a role in managing and maintaining communication between internal parties and external parties including Shareholders and Stakeholders.	Secara fungsional unit kerja yang membawahi wewenang dan tanggung jawab atas kepatuhan dan pengendalian kinerja berada di bawah pengawasan langsung Direksi dan bertugas untuk memastikan bahwa IPCC telah memenuhi aspek-aspek kepatuhan (<i>compliance</i>) yang dipersyaratkan regulasi untuk mencapai kinerja terbaik Perseroan. Functionally, the work unit that oversees the authority and responsibility for compliance and performance control is under the direct supervision of Board of Directors and is tasked with ensuring that IPCC has fulfilled the aspects of compliance required by regulations to achieve the Company best performance.	Dalam struktur organisasi, unit kerja ini berada di bawah pengawasan langsung Direksi. Divisi Audit Internal bertugas untuk memberikan masukan yang independen dan objektif terkait pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan. In the organizational structure, this work unit is under the direct supervision of Board of Directors. Internal Audit Unit is tasked with providing independent and objective input related to internal control and corporate governance processes.	Satuan kerja manajemen risiko berfungsi melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang ada, sehingga risiko-risiko tersebut dapat teratasi dan terkendali. The risk management unit functions to manage existing risks, so that these risks can be resolved and controlled.

Soft-Structure GCG GCG Soft-Structure

Perseroan terdiri dari perangkat kebijakan dan pedoman internal yang lengkap. Kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat kesadaran seluruh insan Perseroan dan menjadi pedoman dalam perilaku yang berbudaya.

Kebijakan GCG Perseroan disusun dengan memperhatikan peraturan atau regulasi yang berlaku, visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, serta merujuk pada *best practice* lainnya. Hingga akhir 2024, Perseroan telah memberlakukan *Soft Structure* GCG, antara lain:

The Company consists of a complete set of internal policies and guidelines. This policy is needed to strengthen the awareness of all Company personnel and serve as a guideline for cultural behavior.

The Company's GCG policy is prepared by considering applicable rules or regulations, the Company's vision, mission and values, as well as referring to other best practices. Until the end of 2024, the Company has prepared several Governance Soft Structures, including:



Soft-Struktur/Kebijakan IPCC IPCC Soft-Structure/Policies	Pemberlakuan Enforcement
Anggaran Dasar Articles of Association	Akta No. 45 tanggal 27 Juni 2023 Deed No. 45 dated June 27, 2023
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/7/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/7/IKT-22 dated December 19, 2022
Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors (<i>Board Manual</i>)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/6/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/6/IKT-22 dated 19 December 2022 concerning Work Procedures for Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors (<i>Board Manual</i>)
Pedoman Manajemen Risiko Risk Management Guidelines	Peraturan Direksi No: HK.01/16/11/1/AMR/DIRUT/IKT-23 tanggal 16 November 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No: HK.01/16/11/1/AMR/DIRUT/IKT-23 dated November 16, 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) Guidelines for Gratification Management, Reporting of Illegal Levies and Implementation of Whistle Blowing System (WBS)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/2/2/IKT-21 tentang Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) Dewan Komisaris, Direksi serta Pekerja di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/2/2/IKT-21 concerning Management of Whistle Blowing System (WBS) of Board of Commissioners, Board of Directors and Workers within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pedoman Kode Etik Bisnis Code of Conduct	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/4/IKT-2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pedoman Kode Etik dan Bisnis Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/4/IKT-2022 dated December 12, 2022 concerning Code of Conduct
Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Guidelines for Wealth Reporting for Board of Commissioners and Board of Directors	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/5/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/5/IKT-22 dated December 19, 2022 concerning Guidelines for Wealth Reporting for Board of Commissioners and Directors
Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs (SER)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/3/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/3/IKT-22 dated December 19, 2022 concerning Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs
Kebijakan Pelaporan atas Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Reporting Policy on Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Directors	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/2/IKT-23 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pelaporan atas Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.56/3/2/IKT-23 dated February 13, 2023 concerning Reporting on Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Directors
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Disahkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 3 November 2020 Ratified and signed by Board of Directors and Board of Commissioners on November 3, 2020
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Dimutakhirkan pada 1 Oktober 2022 Updated on October 1, 2022

Seluruh kebijakan dan pedoman-pedoman di atas disosialisasikan secara berkala kepada seluruh karyawan dan apabila diperlukan dapat diperbaharui agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi dan disesuaikan dengan dinamika usaha yang terjadi.

All of the above policies and guidelines are regularly socialized to all employees and, if necessary, can be updated to remain relevant to the organization's needs and adapted to current business dynamics.

MEKANISME GCG

Mekanisme GCG adalah cara, prosedur, aturan untuk menghasilkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan berbagai keuntungan bagi Perseroan. Didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur GCG, Perseroan yakin dapat menghasilkan *outcome* penerapan GCG yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan. Pada praktiknya, penerapan GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya *soft structure* yang jelas dalam proses mekanisme. Proses dan mekanisme penerapan GCG melekat pada struktur GCG sebagaimana yang terlihat dari Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan.

GCG MECHANISM

GCG mechanism refers to the methods, procedures, and rules used to establish good corporate governance, which in turn can provide various benefits to the Company. Supported by adequate GCG structure and infrastructure, the Company is confident in its ability to produce outcomes from GCG implementation that align with stakeholder expectations. In practice, implementing GCG cannot rely solely on the governance structure pillar, a clear soft structure is also required in the process and mechanisms. The processes and mechanisms of GCG implementation are embedded within GCG structure, as reflected in the Corporate Governance Organizational Structure.



Secara garis besar, berikut ini adalah gambaran alur atau mekanisme GCG yang diterapkan di Perseroan, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
Sebagai perusahaan terbuka, penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termaktub pada Pedoman Tata Tertib Kerja atau *Board Manual*. Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan bahwa segala keputusan yang ditetapkan dalam RUPS sudah ditindaklanjuti dengan baik. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi selanjutnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite-komite atau Perangkat di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi
Komite-komite dan perangkat lain di bawah Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya untuk mendukung pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan.
4. Pelaksanaan Kegiatan Usaha IPCC
Seluruh aktivitas usaha IPCC dilakukan sesuai dengan pedoman internal yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yang mengacu pada pencapaian visi dan misi IPCC.
5. Dokumentasi Proses
Seluruh proses kegiatan IPCC didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi Hasil
Selanjutnya, IPCC melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian berhasil diraih dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

In general, the following is an overview of the GCG flow or mechanism implemented in the Company, namely:

1. General Meeting of Shareholders
As a public Company, the Company's GMS is held in accordance with the time and procedures stipulated in POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies.
2. Implementation of the Functions, Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors
Board of Commissioners and Board of Directors carry out their functions, duties and responsibilities in accordance with applicable regulations and Law Regulations as stated in the Work Code Guidelines or Board Manual. Board of Commissioners and Board of Directors also ensure that all decisions made at the GMS have been followed up properly. The next performance assessment of Board of Commissioners and Board of Directors is carried out in accordance with the established rules.
3. Implementation of the Functions, Duties and Responsibilities of Committees or Organs under Board of Commissioners and Board of Directors
Committees and other organs under Board of Commissioners and Board of Directors carry out their functions, duties and responsibilities to support the achievement of Board of Commissioners and Board of Directors performance and the implementation of corporate governance.
4. Implementation of IPCC Business Activities
All IPCC business activities are carried out in accordance with internal guidelines based on GCG principles, which refer to achieving IPCC vision and mission.
5. Process Documentation
The entire process of IPCC activities is well documented as an evidence that the implementation of activities has been carried out in accordance with applicable laws and regulations.
6. Results Evaluation
Furthermore, IPCC evaluates the performance and achievements achieved with the aim of improvement and improvement in the future.



PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PEMEGANG SAHAM DAN INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI, HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang Saham IPCC terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya yang merupakan pendiri Perusahaan. Dalam komposisi kepemilikan saham di lingkungan Perusahaan, struktur kepemilikan saham PT Pelindo Multi Terminal kepemilikan saham sebesar 71,28%, PT Pelabuhan Indonesia Investama kepemilikan saham sebesar 5,54%, dan Masyarakat kepemilikan saham sebesar 23,18%³. Rincian lebih lanjut mengenai informasi dan struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali dibahas secara mendalam dalam bagian "Komposisi Pemegang Saham" pada Bab Profil Perusahaan.

Hak Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk selalu melindungi hak-hak Pemegang Saham, sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Hak Pemegang Saham Perusahaan antara lain:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan, secara tepat waktu dan teratur;
6. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS

1. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemegang Saham melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi;
2. Tindakan-tindakan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS yang nilai transaksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

SHAREHOLDERS AND INFORMATION ON MAJOR/ CONTROLLING SHAREHOLDERS, TO ULTIMATE OWNER ENTITIES

Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Company's shares. Shareholders do not intervene in the functions, duties and authorities of Board of Commissioners and Board of Directors. IPCC Shareholders consist of the Major/Controlling Shareholders and other Shareholders who are the Company's founders. In the composition of shareholding within the Company, the shareholding structure of PT Pelindo Multi Terminal shareholding amounted to 71.28%, PT Pelabuhan Indonesia Investama shareholding amounted to 5.54%, and Public shareholding amounted to 23.18%³. Further details regarding the information and structure of Major and Controlling Shareholders are discussed in depth in the "Shareholder Composition" section of the Company Profile Chapter.

Shareholders Rights

The Company is committed to always protecting the rights of Shareholders, as stipulated in the Articles of Association and Corporate Governance Policies. The rights of the Company's Shareholders include:

1. The right to request the holding of GMS;
2. The right to request information about the GMS agenda;
3. The right to submit proposals to be discussed in the GMS agenda;
4. The right to attend and vote in the GMS;
5. The right to obtain information about the Company, in a timely and regular manner;
6. The right to receive a portion of the Company's profits in favor of Shareholders in the form of dividends and other profit sharing.

Shareholders Authority through the GMS

1. Based on the prevailing laws and regulations, Shareholders through the GMS hold all powers that are not delegated to Board of Commissioners or Board of Directors;
2. The following actions require GMS approval where the transaction value is more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not:
 - a. Transferring the Company's assets; or
 - b. Pledging the Company's assets as collateral for debt.



3. Perbuatan-perbuatan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
 - b. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perseroan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham;
 - c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalisf*);
 - g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOwT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS;
 - h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
 - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham;
 - j. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan;
 - k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud yang belum ditetapkan dalam RKAP;
 - m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagi Perseroan;
 - n. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
 - o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - p. Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - q. Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perseroan.
3. The following actions require GMS approval after obtaining a written response from Board of Commissioners:
 - a. Pledging fixed assets for medium/long term credit;
 - b. Making capital investments and reducing the percentage of capital investments in other companies that must be approved by the Shareholders;
 - c. Establishing subsidiaries and/or joint ventures;
 - d. Relinquishing equity participation in subsidiaries and/or joint ventures;
 - e. Conducting merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
 - f. Binding the Company as guarantor (*borg* or *avalisf*);
 - g. To enter into cooperation with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (JO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation with a value or period exceeding the stipulation of the GMS;
 - h. Not collecting bad debts that have been written off;
 - i. To release and write off the Company's fixed assets except for movable fixed assets with an economic life commonly applicable in the industry in general of up to 5 (five) years which must be approved by the Shareholders;
 - j. Determining the Company's organizational blue print;
 - k. Determining and changing the Company's logo;
 - l. Performing other actions and actions as referred provisions that have not been stipulated in the RKAP;
 - m. Establish foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company that have an impact on the Company;
 - n. Expense the Company's costs which are fixed and routine for the activities of foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company;
 - o. Proposing representatives of the Company to become candidates for members of Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that make significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the General Meeting of Shareholders;
 - p. Making long-term investments and financing;
 - q. Issuing bonds and other debt securities by the Company.



Kewajiban dan Akuntabilitas Pemegang Saham

1. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
3. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengelolaan Perusahaan.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Perseroan memberikan hak yang setara kepada seluruh pemegang saham, tanpa membedakan jumlah, jenis dan kelas saham yang dimiliki, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal ini juga wajib memenuhi hak setiap pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Perseroan menyediakan akses informasi kepada Pemegang Saham sehingga Pemegang Saham mendapatkan hak dan dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun akses informasi yang disediakan, antara lain *website* Perseroan, *website* IDX, media sosial Perseroan, dan *email* Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS")

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganti/substitusi oleh siapa pun sesuai ketentuan perundangan. Selain itu, RUPS menjadi wadah bagi para Pemegang Saham untuk turut serta membangun Perusahaan dengan keputusan-keputusan dan arahan yang diberikan dalam RUPS.

RUPS yang diselenggarakan IPCC terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. IPCC menyelenggarakan RUPS berdasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyelenggaraan RUPS, dan Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan ketentuan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Shareholders Obligations and Accountability

1. Shareholders do not interfere in the Company's operational activities which are the responsibility of Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations;
2. Good Corporate Governance is implemented by Shareholders in accordance with their authority and responsibilities;
3. Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of Good Corporate Governance principles in the Company's management process.

Equal Treatment for Shareholders

The Company shall grant equal rights to all shareholders, without distinction as to the number, type and class of shares held, except as provided in the Company's Articles of Association. In this case, Board of Commissioners and Board of Directors are also obliged to fulfill the rights of each shareholder in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Access to Information for Shareholders

The Company provides access to information to Shareholders so that Shareholders obtain rights and can carry out their responsibilities and obligations in accordance with applicable regulations. The information provided includes the Company's website, IDX website, the Company's social media, and the Company's email.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS")

General Meeting of Shareholders or GMS is the highest authority and cannot be replaced/substituted by anyone according to the provisions of the law. In addition, the GMS is a forum for Shareholders to participate in building the Company with the resolutions and directions given in the GMS.

The GMS held by IPCC consists of Annual GMS and Extraordinary GMS. IPCC holds GMS based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulations (POJK) concerning the holding of GMS, and the Company's Articles of Association and in accordance with the provisions of ASEAN Corporate Governance Scorecard.



PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, IPCC menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali RUPS Tahunan. Hasil Keputusan RUPS tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan pada situs web IPCC (<https://indonesiacarterminal.co.id/>) dan situs web BEI (www.idx.co.id).

RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023, 10 JUNI 2024

RUPS Tahunan diselenggarakan pada 10 Juni 2024, pukul 14.00 WIB-16.00 WIB, di Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310.

Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.

GMS HOLDING IN 2024

Throughout 2024, IPCC held 1 (one) Annual GMS. The GMS resolutions have been reported to the OJK and announced on IPCC website (<https://indonesiacarterminal.co.id/>) and the BEI website (www.idx.co.id).

ANNUAL GMS FOR 2023 FISCAL YEAR, JUNE 10, 2024

The Annual GMS was held on June 10, 2024, from 2:00 to 4:00 p.m in the Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.

The meeting was held physically and electronically with reference to the provisions of Article 11 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Article 3 of Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically using the KSEI Electronic General Meeting System Application ("eASY.KSEI Application") provided by KSEI.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan, 10 Juni 2024

Stages of Annual GMS, June 10, 2024

No	Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Pelaksanaan Implementation
1	Pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS Notification of meeting agenda to OJK no later than 5 (five) working days before the GMS announcement	24 April 2024 April 24, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") melalui Sistem Pelaporan Elektronik ("SPE") dengan surat Perseroan nomor SK.03/24/4/1/SKPR/SKPR/IKT-24 The Company has submitted a Notification to Financial Services Authority ("OJK") and Indonesia Stock Exchange ("IDX") through Electronic Reporting System ("SPE") with Company letter number SK.03/24/4/1/SKPR/SKPR/IKT-24
2	Pengumuman RUPS: 1. Dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum Pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan Pemanggilan RUPS. 2. Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web IPCC, situs web BEI, dan situs web KSEI. 3. Laporan Pengumuman RUPS disampaikan ke OJK dan BEI pada hari dan tanggal yang sama (<i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> via SPE OJK & IDXNet). GMS Announcement: 1. Made 14 (fourteen) days before the GMS Summon, not including the date of the GMS Announcement and Summon. 2. Published in Indonesian and English on IPCC website, IDX website, and KSEI website. 3. The GMS Announcement Report is submitted to the OJK and IDX on the same day and date (<i>hardcopy</i> and <i>e-reporting</i> via OJK SPE & IDXNet).	2 Mei 2024 May 2, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan. The Company has delivered the Annual GMS Announcement to Shareholders through publication on the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") website, the Indonesia Stock Exchange ("IDX") website and the Company's website.
3	Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS dilaksanakan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. The Register of Shareholders Recording Date entitled to attend the GMS is made 1 (one) working day before the GMS summons.	16 Mei 2024 May 16, 2024	Satu hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS One working day before the GMS summons



Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan, 10 Juni 2024

Stages of Annual GMS, June 10, 2024

No	Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Pelaksanaan Implementation
4	Pemanggilan dan Informasi penjelasan mata acara RUPS: - Dilakukan 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPST, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan pelaksanaan RUPST. - Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web KSEI. - Bukti laporan Pemanggilan RUPST disampaikan ke OJK dan BEI pada hari dan tanggal yang sama (<i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> via SPE OJK & IDXNet). Summoning and Explanatory Information on the AGMS agenda: - Carried out 28 (twenty-eight) days before the AGMS, not including the summons date and the AGMS. - Published in Indonesian and English on the Company's website, the IDX website, and the KSEI website. - Proof of the AGMS summons report submitted to the OJK and IDX on the same day and date (<i>hardcopy</i> and <i>e-reporting</i> via OJK SPE & IDXNet). - Proof of the AGMS Summons report submitted to the OJK and IDX on the same day and date (<i>hardcopy</i> and <i>e-reporting</i> via OJK SPE & IDXNet).	17 Mei 2024 May 17, 2024	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham, melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perusahaan. The Company submits the Annual GMS Summon to Shareholders through the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) website, the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and the Company website.
5	Pelaksanaan RUPS Tahunan Annual GMS Holding	10 Juni 2024 June 10, 2024	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
6	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan: Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Annual GMS Summary Minutes: The GMS minutes must be submitted to the OJK no later than 30 (thirty) days after the GMS is held.	12 Juni 2024 June 12, 2024	Ringkasan Risalah RUPS dilaporkan kepada OJK 2 (dua) hari kerja setelah RUPS Summary of the GMS Minutes is reported to the OJK 2 (two) working days after the GMS
7	Akta Risalah RUPS Tahunan Deed of Annual GMS Minutes	9 Juli 2024 July 9, 2024	Akta Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS dilaksanakan Deed of the GMS Minutes is submitted to the OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS is held

Proses Penyelenggaraan RUPS Tahunan, 10 Juni 2024

Annual GMS Holding Process, June 10, 2024

Hari, Tanggal dan Waktu Day, Date and Time	Senin, 10 Juni 2024, Pukul 14.25 WIB-15.53 WIB Monday, June 10, 2024, 14.25 WIB-15.53 WIB
Lokasi Location	Museum Maritim Indonesia Lantai 2 Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 Indonesian Maritime Museum 2nd Floor Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310
Kuorum Quorum	1.430.152.252 saham atau merupakan 78,64959% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham. 1,430,152,252 shares or 78.64959% of the total shares issued by the Company, which is 1,818,384,820 shares.
Pimpinan RUPS Tahunan Annual GMS Chairman	Drajat Sulistyo selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor DK/30/05/01/IPCC-24 tertanggal 30 Mei 2024. Drajat Sulistyo as the President Commissioner of the Company based on the Decree of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk concerning the Determination of Chairman of Annual General Meeting of Shareholders Number DK/30/05/01/IPCC-24 dated May 30, 2024.



Kehadiran Pemegang Saham Shareholder Attendance	- PT Pelindo Multi Terminal selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Yoni Setiawan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal selaku kuasa dari Ary Henryanto, Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024 Nomor HM.03.03/31/5/2/PAPS/DIRU/PLMT-24; - PT Pelabuhan Indonesia Investama selaku pemegang/pemilik 100.682.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Ikhwanoe, Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama; - PT Multi Terminal Indonesia selaku pemegang/pemilik 13.092.371 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Yuli Wahyu Wibowo, SM Keuangan PT Multi Terminal Indonesia, selaku kuasa dari Vandi Tiosaputra, Plt. Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2024 Nomor SK.03/5/6/2/SSPH/DUTM/MTI-24; - Masyarakat sejumlah 20.232.532 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan. - PT Pelindo Multi Terminal as the holder/owner of 1,296,144,749 shares of the total shares that have been placed and fully paid into the Company; in this case represented by Yoni Setiawan, Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Multi Terminal as the attorney of Ary Henryanto, President Director of PT Pelindo Multi Terminal based on the Special Power of Attorney dated May 31, 2024 Number \PLMT-24; - PT Pelabuhan Indonesia Investama as the holder/owner of 100,682,600 shares of the total shares that have been placed and fully paid into the Company; in this case represented by Ikhwanoe, Director of PT Pelabuhan Indonesia Investama; - PT Multi Terminal Indonesia as the holder/owner of 13,092,371 shares of the total number of shares that have been placed and fully paid into the Company; in this case represented by Yuli Wahyu Wibowo, SM Finance PT Multi Terminal Indonesia, as the attorney of Vandi Tiosaputra, Acting President Director of PT Multi Terminal Indonesia based on Power of Attorney dated June 5, 2024 Number SK.03/5/6/2/SSPH/DUTM/MTI-24; - The public amounting to 20,232,532 shares of the total number of shares that have been placed and fully paid into the Company.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners	Komisaris Utama : Drajat Sulistyio Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan Komisaris Independen : LM. Arya Bima Yudiantara President Commissioner: Drajat Sulistyio Independent Commissioner: Abdur Rahim Hasan Independent Commissioner: LM. Arya Bima Yudiantara
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis: Sugeng Mulyadi Direktur Operasi dan Teknik: Bagus Dwipoyono Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: Wing Megantoro President Director and Director of Commercial and Business Development: Sugeng Mulyadi Director of Operations and Technical: Bagus Dwipoyono Director of Finance and Human Capital: Wing Megantoro
Kehadiran Komite Audit Attendance of Audit Committee	Ketua : Abdur Rahim Hasan Anggota Independen : Noval Ali Abbas Anggota Independen : Kurniawan Eko Saputro Chairman : Abdur Rahim Hasan Independent Member : Noval Ali Abbas Independent Member : Kurniawan Eko Saputro
Kehadiran Komite Pemantau Manajemen Risiko Attendance of Risk Management Monitoring Committee	Ketua : LM. Arya Bima Yudiantara Anggota : Nurkholis Lukman Chairman : LM. Arya Bima Yudiantara Member : Nurkholis Lukman
Komite Nominasi dan Remunerasi Attendance of Nomination and Remuneration Committee	Ketua : Abdur Rahim Hasan Anggota : LM. Arya Bima Yudiantara Anggota : Ahmad Alyani Addarain Chairman : Abdur Rahim Hasan Member : LM. Arya Bima Yudiantara Member : Ahmad Alyani Addarain
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Vote Counter	- Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, selaku Notaris Publik dan - PT Electronic Data Interchange selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST. - Notary Ashoya Ratam SH, MKn, as Public Notary and - PT Electronic Data Interchange as Share Registrar to perform calculations and/or validate and vote at the GMS.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Decision-Making Mechanism in Meetings

Based on Article 14 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, decisions at Meetings are taken by deliberation to reach consensus, however, taking into account Article 28 of POJK 15/2020, Shareholders may include their voting choices in granting power of attorney electronically through eASY.KSEI, thus decision-making at Meetings is carried out by voting.



Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Dalam RUPST 10 Juni 2024, Perusahaan menunjuk pihak-pihak independen yakni (i) Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, selaku Notaris Publik dan (ii) PT Electronic Data Interchange selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST.

Rincian Keputusan RUPS Tahunan dan Tindak Lanjutnya

Keputusan RUPS Tahunan telah dimuat dalam Akta No.26 yang dibuat oleh dan di hadapan Ashoya Ratam SH, MKn Notaris di Jakarta. Adapun rincian hasil keputusan RUPS dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan, sebagai berikut:

In the event that Shareholders who are present and have valid voting rights choose to abstain (not vote) at the Meeting, then such Shareholders are deemed to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes.

Independent Vote Counter

In the AGMS on June 10, 2024, the Company appointed independent parties, namely (i) Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, as a Public Notary and (ii) PT Electronic Data Interchange as a Securities Administration Bureau to perform calculations and/or validate and vote in the AGMS.

Details of Annual GMS Resolutions and Follow-Up

The Annual GMS resolutions have been stated in Deed No.26 made by and before Ashoya Ratam SH, MKn Notary in Jakarta. The details of GMS resolutions and their follow-up by the Company's Management are as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda		Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for 2023 Fiscal Year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam rapat. There were 2 (two) shareholders who asked questions at the meeting			
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting			
	Setuju Agree	Abstain		Tidak Setuju Disagree
	1.429.086.852 = 99,926%	944.800 = 0,066%		120.600 = 0,008%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023. - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.			
	Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
	- Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2023 Fiscal Year. - Ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as stated in its report Number: 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 dated 26 March 2024 with the opinion "Fair in all material respects, the Company's financial position on December 31, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.			
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	With the approval of the Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the ratification of the Company's Financial Statements, the Meeting granted full release and discharge of responsibility (<i>Acquit et de charge</i>) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their actions management and supervision in 2023 fiscal year as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023.			
	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta			
	Status			
	Telah dilaksanakan Has been realized			

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda		Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023; Determination of Use of the Company's Net Profit for 2023 Fiscal Year;		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan There were no Shareholders who asked questions			
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting			
	Setuju Agree	Abstain		Tidak Setuju Disagree
	1.429.089.152 = 99,926	944.800 = 0,066%		118.300 = 0,008%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp190.854.844.653,00 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 1,05% atau Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. b. Sebesar 80% atau Rp152.683.875.722,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham, dimana sebesar Rp39.236.506.498,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp113.447.369.224,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) atau total dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh rupiah). c. Sisanya sebesar 18,95% atau sebesar Rp36.170.968.931,00 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur leblh lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. - Approve the determination of the use of the Company's net profit for 2023 fiscal year amounting to Rp190,854,844,653.00 (one hundred ninety billion eight hundred fifty four million eight hundred forty four thousand six hundred and fifty three rupiah) as follows: a. 1.05% or Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah) will be allocated as Mandatory Reserves to fulfill Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. b. 80% or Rp152,683,875,722.00 (one hundred fifty two billion six hundred eighty three million eight hundred seventy five thousand seven hundred twenty two rupiah) is distributed as dividends to shareholders according to the percentage of share ownership of each shareholder, where Rp39,236,506,498.00 (thirty nine billion two hundred thirty six million five hundred six thousand four hundred ninety eight rupiah) has been distributed as interim dividends so that the remainder is in the form of final dividends to be distributed amounting to Rp113,447,369,224.00 (one hundred thirteen billion four hundred forty seven million three hundred sixty nine thousand two hundred twenty four rupiah) or total dividends per share amounting to Rp83.97 (eighty three point ninety seven rupiah). c. The remaining 18.95% or Rp36,170,968,931.00 (thirty-six billion one hundred seventy million nine hundred sixty-eight thousand nine hundred thirty-one rupiah) will be used as the Company's Retained Earnings. - Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of the distribution of cash dividends in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including rounding up for dividend payments per share.			
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.			
Status	Telah dilaksanakan Has been realized			

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda		Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024; Appointment of the Company's Public Accounting Firm for 2024 Fiscal Year;		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan There were no shareholders who asked questions			
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting			
	Setuju Agree	Abstain		Tidak Setuju Disagree
	1.429.089.152 = 99,926%	944.800 = 0,066%		118.300 = 0,008%



Keputusan Rapat Meeting Resolutions	- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2024. - Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada, Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut termasuk untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis pemegang saham mayoritas. - Appoint Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) to perform audit services on the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2024 and other periods in the 2024 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company, if deemed necessary including Performance Audit, KPI Audit and Compliance Audit for the 2024 Fiscal Year. - Grant the delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees, additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm including to determine a Replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) for any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, including determining the audit service fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm, with prior written approval from the major shareholder.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	Telah dilaksanakan Has been realized

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Determination of salary/honorarium and other allowances and bonuses for members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan No Shareholders raised questions						
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting <table><tr><td>Setuju Agree</td><td>Abstain</td><td>Tidak Setuju Disagree</td></tr><tr><td>1.429.058.052 = 99,924%</td><td>946.400 = 0,066%</td><td>147.800 = 0,010%</td></tr></table>	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree	1.429.058.052 = 99,924%	946.400 = 0,066%	147.800 = 0,010%
Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree					
1.429.058.052 = 99,924%	946.400 = 0,066%	147.800 = 0,010%					

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. - Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024. - Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas." - Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of bonuses for members of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for 2023 fiscal year after consultation with the Major Shareholders. - Granting authority to the Major Shareholders to determine the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for the year 2024. - Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Company's Board of Directors for the year 2024 after consultation with the Major Shareholders."
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	Telah dilaksanakan Has been realized

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan. Changes in the Nomenclature of Positions of the Company's Board of Directors		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan No Shareholders raised questions		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.429.062.652 = 99,924%	944.800 = 0,066%	144.800 = 0,010%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Menetapkan Direktur Keuangan & SDM menjadi Direktur Keuangan, SDM, & Manajemen Resiko." Appointing the Director of Finance & HC to become the Director of Finance, HC, & Risk Management."		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta		
Status	Telah dilaksanakan Has been realized		

Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda	Persetujuan Pembelian Kembali (Buyback) Saham Perseroan Approval of the Company's Share Buyback		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam rapat. There were 2 (two) shareholders who raised questions in the meeting.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.429.195.152 = 99,933%	944.800 = 0,066%	12.300 = 0,001%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	- Menyetujui Pembelian Kembali (Buyback) Saham Perseroan dengan Dana maksimal sebesar Rp16.930.902.220,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh rupiah). - Memberikan wewenang dan kuasa, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, yang dalam pelaksanaannya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan PT Pelindo Multi Teminal selaku Pemegang Saham Mayoritas, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan (Buyback) dan menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. - Approve the Company's Share Buyback with a maximum Fund of Rp16,930,902,220.00 (one hundred sixteen billion nine hundred thirty million nine hundred two thousand two hundred twenty rupiah). - Grant authority and power, with the right of substitution to the Company's Board of Directors, which in its implementation will consult in advance with PT Pelindo Multi Terminal as the Major Shareholder, to carry out all necessary actions in connection with the implementation of this Meeting resolution, including but not limited to determining the terms of implementation and other provisions for the Company's share buyback and stating a separate decision with a separate deed before a Notary, with due regard to the applicable provisions and laws.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta		
Status	Belum dilaksanakan Has not been implemented		

Mata Acara Rapat Ketujuh Seventh Meeting Agenda	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan. Report on the Use of Proceeds from the Company's Public Offering of Shares.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan No Shareholders raised questions
Pengambilan Keputusan Decision-making	Mata Acara Ketujuh sifatnya sebagai laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan. The Seventh Agenda is a report so that no decision is taken.



Mata Acara Rapat Ketujuh
 Seventh Meeting Agenda

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan.
 Report on the Use of Proceeds from the Company's Public Offering of Shares.

 Laporan
 Report

Dana hasil Penawaran Umum Perdana telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan ke SPE OJK sesuai dengan Surat Nomor: KU.02.04/29/5/1/SKPR/SKPR/IKT-24 tanggal 29 Mei 2024, telah dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Dari total perolehan dana IPO sebesar Rp835.002.228.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebanyak Rp34.627.174.064,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) telah digunakan untuk biaya penawaran umum saham Perseroan sehingga diperoleh dana bersih hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dan telah digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp428.953.082.600,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) telah dialokasikan untuk Belanja Modal/*Capital Expenditure*.
- Sebesar Rp361.421.971.336,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar Dimuka untuk Termin I dan sebagian Termin II.
- Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) telah digunakan untuk Modal Kerja (*Working Capital*).

Terdapat selisih Dana *Net Proceed* IPO yang tertera dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 10 Tanggal 19 Juni 2019 dan Laporan koreksi audit Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (ERNST & YOUNG)-("EY") Tahun 2018 terdapat perbedaan net Proceed yang diilustrasikan sebagai berikut:

- Dana *Net Proceed* Koreksi Audit EY Tahun 2018 sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
- Dana *Net Proceed* Akuntan nomor 10 Tahun 2019 sebesar Rp799.500.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
Sehingga terdapat selisih sebesar Rp875.053.936,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Dengan demikian ditegaskan bahwa Dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Saham (IPO) - *Net Proceed* sesuai dengan Koreksi Audit EY Tahun 2018 sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) telah seluruhnya digunakan oleh Perseroan sebagaimana telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

The funds from the Initial Public Offering have been used entirely by the Company in accordance with applicable provisions and have been reported to OJK SPE in accordance with Letter Number: KU.02.04/29/5/1/SKPR/SKPR/IKT-24 dated May 29, 2024, have been used by the Company with the following details:

From the total IPO funds obtained of Rp835,002,228,000.00 (eight hundred thirty-five billion two million two hundred twenty-eight thousand rupiah), as much as Rp34,627,174,064.00 (thirty-four billion six hundred twenty-seven million one hundred seventy-four thousand sixty-four rupiah) has been used for the Company's public offering costs so that the net funds obtained from the Company's Initial Public Offering (IPO) amounted to Rp800,375,053,936.00 (eight hundred billion three hundred seventy-five million fifty-three thousand nine hundred thirty-six rupiah), and has been used as follows:

- An amount of Rp428,953,082,600.00 (four hundred twenty-eight billion nine hundred fifty-three million eighty-two thousand six hundred rupiah) has been allocated for Capital Expenditure.
- An amount of Rp361,421,971,336.00 (three hundred sixty-one billion four hundred twenty-one million nine hundred seventy-one thousand three hundred thirty-six rupiah) has been used for Land Rent Paid in Advance for Term I and part of Term II.
- An amount of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) has been used for Working Capital.

There is a difference in the Net Proceed Fund of IPO stated in the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number 1 O Dated June 19, 2019 and the Audit Correction Report of Public Accounting Firm (KAP) PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (ERNST & YOUNG)-("EY") in 2018 there is a difference in the net Proceed illustrated as follows:

- Net Proceed Fund of Audit Correction EY in 2018 amounting to Rp800,375,053,936.00 (eight hundred billion three hundred seventy five million fifty three thousand nine hundred thirty six rupiah)
- Net Proceed Fund of Accountant number 10 in 2019 amounting to Rp799,500,000,000.00 (seven hundred ninety nine billion five hundred million rupiah).
There is a difference of Rp875,053,936.00 (eight hundred seventy five million fifty three thousand nine hundred thirty six rupiah).

Thus it is confirmed that the Funds obtained from the Public Offering of Shares (IPO) - Net Proceed in accordance with the Audit Correction EY 2018 amounting to Rp800,375,053,936.00 (eight hundred billion three hundred seventy five million fifty three thousand nine hundred thirty six rupiah) have been entirely used by the Company as reported to the Financial Services Authority.

 Tindak Lanjut Keputusan Rapat
 Meeting Resolutions Follow-up

Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta

Status

Telah dilaksanakan
Has been realized

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, IPCC menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa. Hasil Keputusan ketiga RUPS tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan pada situs web IPCC (<https://indonesiacarterminal.co.id/>) dan situs web BEI (HYPERLINK "<http://www.idx.co.id>" www.idx.co.id).

RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022, 27 JUNI 2023

RUPS Tahunan diselenggarakan pada 27 Juni 2023, pukul 14.28 WIB-15.22 WIB, di Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310.

Proses Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

GMS IN 2023

Throughout 2023, IPCC held 4 (four) GMS consisting of 1 (one) Annual GMS and 3 (three) Extraordinary GMS. The resolutions of these three GMS have been reported to OJK and announced on the website of IPCC (<https://indonesiacarterminal.co.id/>) and IDX website (www.idx.co.id).

ANNUAL GMS FOR FISCAL YEAR 2022, JUNE 27, 2023

The Annual GMS was held on June 27, 2023, at 14.28 WIB-15.22 WIB, in the Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.

Process of Holding the Annual GMS for Fiscal Year 2022

Tanggal dan Waktu Date and Time	27 Juni 2023, pukul 14.28 WIB-15.22 WIB June 27, 2023, at 2.28PM - 3.22PM
Lokasi Location	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Kuorum Quorum	Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.334.582.541 saham atau merupakan 73,39% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, karenanya kuorum Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders who were present physically or electronically through KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") totaling 1,334,582,541 shares or 73.39% of the total shares issued by the Company amounted to 1,818,384,820 shares; taking into account the List of Shareholders as of May 31, 2023 until 16.00 WIB, therefore the quorum of the Meeting in accordance with Article 14 paragraph (2) point 1 letter a of the Company's Articles of Association, has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make valid and binding decisions.
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of Annual GMS	Rapat dipimpin oleh ABDUR RAHIM HASAN selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk nomor DK/31/06/02/IPCC-23 tertanggal 31 Mei 2023. The meeting was chaired by ABDUR RAHIM HASAN as the Company's Independent Commissioner based on the Decree of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk concerning the Determination of Chairman of Annual General Meeting of Shareholders for 2022 Fiscal Year and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk number DK/31/06/02/IPCC-23 dated May 31, 2023.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners	• Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan • Komisaris Independen : LM Arya Bima Yudiantara • Independent Commissioner: Abdur Rahim Hasan • Independent Commissioner: LM Arya Bima Yudiantara
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	• Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Sugeng Mulyadi • Direktur Operasi dan Teknik : Bagus Dwipoyono • Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: Sumarno • President Director concurrently Director of Commercial and Business Development: Sugeng Mulyadi • Director of Operations and Technical: Bagus Dwipoyono • Director of Finance and Human Capital: Sumarno
Pihak Independen Independent Parties	Notaris : Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Biro Administrasi Efek : PT EDI Indonesia Kantor Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) Notary : Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Share Registrar : PT EDI Indonesia Public Accounting Firm : Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)



Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Tindak Lanjutnya

2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution and Follow-up

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda		Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for the 2022 Fiscal Year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	1 (satu) pertanyaan. 1 (one) question.			
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting			
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree	
	1.333.826.541 = 99,94%	695.100 = 0,052%	60.900 = 0,005%	
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanton0, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagaimana diuraikan dalam laporannya Nomor: 00419/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 .			
	1. Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2022. 2. Ratify the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwanton0, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as described in its report Number: 00419/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 dated March 27, 2023 with the opinion "Fair in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2022, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, is in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. 3. With the approval of the Annual Report, including the Supervisory Duties Report of Board of Commissioners and ratification of the Company's Financial Report, the Meeting granted full release and release of responsibility (<i>Acquit et de charge</i>) to the Company's Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions in the 2022 Fiscal Year throughout the actions This is reflected in the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2022.			
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tahun 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.			
Tahun Realisasi Realization Year	2023			
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda		Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 Determination of the Use of the Company's Net Profit/Loss for 2022 Fiscal Year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada None			
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting			
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree	
	1.333.826.541 = 99,94%	695.100 = 0,052%	60.900 = 0,005%	



Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 Determination of the Use of the Company's Net Profit/Loss for 2022 Fiscal Year
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	- Menetapkan penggunaan Laba Bersih/Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp161.724.766.795,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai berikut: - sebesar Rp113.207.336.756,- (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah) atau ekuivalen sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) akan digunakan sebagai dividen dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham dimana sebanyak Rp22.707.904.362,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan berjumlah Rp90.499.432.395,00 (sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setara dividen per lembar saham sebesar Rp49,77 (empat puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah). - sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) atau ekuivalen sebesar 1,24% (satu koma dua empat persen) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. - sebesar Rp46.517.430.038,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga puluh delapan Rupiah) atau ekuivalen sebesar 28,76% (dua puluh delapan koma tujuh enam persen) akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. - Determine the use of the Company's Net Profit/Profit for 2022 Fiscal Year amounting to Rp161,724,766,795.00 (one hundred and sixty one billion seven hundred twenty four million seven hundred and six thousand seven hundred and ninety five rupiah) as follows: - Amounting to Rp113,207,336,756,- (one hundred thirteen billion two hundred seven million three hundred thirty six thousand seven hundred and fifty six Rupiah) or the equivalent of 70.00% (seventy point zero zero percent) will be used as dividends and will be paid to shareholders in accordance with the share ownership percentage of each shareholder which a total of Rp22,707,904,362.00 (twenty two billion seven hundred seven million nine hundred four thousand three hundred and sixty two rupiah) has been distributed as interim dividends so that the remainder in the form of final dividends to be distributed amounting to Rp90,499.432,395.00 (ninety billion four hundred ninety-nine million four hundred thirty-two million three hundred and ninety-five rupiah) or the equivalent of dividends per share of Rp49.77 (forty nine point seventy seven rupiah). - Amounting to Rp2,000,000,000.00 (two billion Rupiah) or the equivalent of 1.24% (one point two four percent) will be used as Mandatory Reserves to fulfill Article 70 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. - Amounting to Rp46,517,430,038.00 (forty six billion five hundred seventeen million four hundred thirty thousand thirty eight Rupiah) or the equivalent of 28.76% (twenty eight point seven six percent) will be used as Retained Earnings Company. - Grant authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including rounding up for dividend payments per share.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tahun 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Tahun Realisasi Realization Year	2023



Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 Appointment of a Public Accountant to Audit the Company's Annual Financial Report for 2023 Fiscal Year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada None		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.333.816.541 = 99,943 %	695.100 = 0,052 %	70.900 = 0,0053 %
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2023. - Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut termasuk untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. - Appoint the Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) Public Accounting Firm (KAP) to provide audit services for the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2023 and other periods in 2023 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company, if deemed necessary including Performance Audit, KPI Audit and Compliance Audit for 2023 Fiscal Year. - Granting delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm including to determine a replacement Public Accounting Firm in the case of the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (Ernst & Young) for whatever reason was unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, including determining fees for audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tahun 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.		
Tahun Realisasi Realization Year	2023		

RUPS LUAR BIASA 18 APRIL 2023 EXTRAORDINARY GMS APRIL 18, 2023

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, 18 April 2023 Process of Holding Extraordinary GMS, April 18, 2023

Tanggal dan Waktu Date and Time	18 April 2023, pukul 14.25 WIB-15.06 WIB 18 April 2023, pukul 14.25 WIB-15.06 WIB
Lokasi Location	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Kuorum Quorum	Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.417.321.345 saham atau merupakan 77,94% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders who were present physically or electronically through KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") totaling 1,417,321,345 shares or 77.94% of the total shares issued by the Company amounted to 1,818,384,820 shares; taking into account the Shareholder List as of March 24, 2023 until 16.00 WIB. Thus, the attendance quorum for the Meeting Agenda in accordance with Article 14 paragraph 2 point 1 letter a of the Company's Articles of Association, the quorum to hold this Meeting has been fulfilled and the Meeting held today is valid and has the right to make binding decisions.



Tanggal dan Waktu Date and Time	18 April 2023, pukul 14.25 WIB-15.06 WIB 18 April 2023, pukul 14.25 WIB-15.06 WIB
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of Annual GMS	Drajat Sulistyو selaku Komisaris Utama IPCC berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor DK/10/04/01/IPCC-23 tertanggal 10 April 2023. Drajat Sulistyو as the President Commissioner of IPCC based on the Decree of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk concerning the Determination of Leadership of Extraordinary General Meeting of Shareholders number DK/10/04/01/IPCC-23 dated April 10, 2023.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners	- Komisaris Utama : Drajat Sulistyو - Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan - President Commissioner : Drajat Sulistyو - Independent Commissioner : Abdur Rahim Hasan
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	- Direktur Operasi dan Teknik : Andi Hamdani - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: Sumarno - Director of Operations and Technical : Andi Hamdani - Director of Finance and Human Capital: Sumarno
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Party Vote Counter	PT EDI Indonesia

Keputusan RUPS Luar Biasa 18 April 2023 dan Tindak Lanjutnya April 18 Extraordinary GMS Resolution and the Follow-up

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan Changes in the Composition of Company Management		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan No Shareholders asked questions		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.411.092.045 = 99,56 %	1.244.700 = 0,09 %	4.984.600 = 0,35 %
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	• Menerima pengunduran diri Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya, yang sebelumnya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 Juni 2021, sebagaimana dimuat dalam akta nomor 27 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memegang jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (<i>acquitt et de charge</i>), sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana. • Memberhentikan Bapak Andi Hamdani sebagai Direktur Operasi dan Teknik terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang sebelumnya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 Juni 2021, sebagaimana dimuat dalam akta nomor 27 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memegang jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (<i>acquitt et de charge</i>), sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana. • Menyetujui untuk mengangkat: a. Bapak SUGENG MULYADI sebagai Direktur Utama; dan b. Bapak BAGUS DWIPOYONO sebagai Direktur Operasi dan Teknik,		
	Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Direksi terdahulu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.		

Dengan adanya pengunduran diri, pemberhentian dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : DRAJAT SULISTYO
- Komisaris Independen : ABDUR RAHIM HASAN
- Komisaris Independen : LM. ARYA BIMA YUDIANTARA

DIREKSI

- Direktur Utama : SUGENG MULYADI
- Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Lowong
- Direktur Operasi dan Teknik : BAGUS DWIPOYONO
- Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: SUMARNO



Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan Changes in the Composition of Company Management		
	- Pengisian jabatan kosong sementara Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan akan ditentukan dalam Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan Mata Acara Rapat dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. - Accept the resignation of Rio Theodore Natalianto Lasse as President Director concurrently Director of Commercial and Business Development of the Company as of the date of his resignation, who was previously appointed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 14, 2021, as contained in deed number 27 dated June 14, 2021 made in the presence of Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta with gratitude for all contributions of energy and thoughts while serving, and providing payment and release of responsibility for all actions and/or deeds carried out while carrying out duties and authority of the position (acquit et de charge), as long as the action is ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the relevant Fiscal Year and does not constitute an unlawful act and/or criminal act. - Dismissed Andi Hamdani as Director of Operations and Technical as of the closing of the Meeting, who was previously appointed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 14, 2021, as contained in deed number 27 dated June 14, 2021 made before Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, with gratitude for all contributions of energy and thoughts while serving, and granting repayment and release of responsibility for all actions and/or deeds carried out while carrying out the duties and authority of his position (acquit et de charge), as long as the action is ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year concerned and does not constitute an unlawful act and/or criminal act. - Agree to appoint - SUGENG MULYADI as President Director; and - BAGUS DWIPOYONO as Director of Operations and Technical Starting from the closing of the Meeting with the term of office continuing the remaining term of office of the previous Directors until the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. With the resignation, dismissal and appointment, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors becomes as follows: BOARD OF COMMISSIONERS i) President Commissioner : DRAJAT SULISTYO ii) Independent Commissioner : ABDUR RAHIM HASAN iii) Independent Commissioner : LM. ARYA BIMA YUDIANTARA DIREKSI i) President Director : SUGENG MULYADI ii) Director of Commercial and Business Development : Vacancy iii) Director of Operations and Technical : BAGUS DWIPOYONO iv) Director of Finance and Human Capital: SUMARNO - Filling the temporary vacant position of Director of Commercial and Business Development of the Company will be determined at the Board of Directors Meeting with approval from the Board of Commissioners. - Grant power of attorney with substitution rights to the Company's Directors, either individually or jointly, to declare in a separate notarial deed the decisions on the Meeting Agenda and notify changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Meeting Resolution Statement No. 45 dated July 18, 2023 made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta.		
Status	Telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0117443 tanggal 9 Mei 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088933.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 It has been notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.09-0117443 dated May 9, 2023 and has been registered in the Company Register No. AHU-0088933.AH.01.11.Year 2023 dated May 9, 2023		
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan Determination of Guidelines for Procurement of Company Goods and Services		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan. No Shareholders asked questions.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.411.091.945 = 99.56 %	1.224.800 = 0.09 %	4.984.600 = 0.35 %

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan Determination of Guidelines for Procurement of Company Goods and Services
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Menyetujui pengukuhan (ratifikasi) Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 tanggal 18 November 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal, berikut perubahan dan/atau penambahannya dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan di kemudian hari, dan untuk selanjutnya terhadap pembaharuannya melimpahkan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Mayoritas. Approved the confirmation (ratification) of PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation Number HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 dated November 18, 2022 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Pelindo Multi Terminal, including changes and/or additions thereto while still paying attention to the interests of the Company in the future, and for further renewal, delegating the authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners after consulting with the Majority Shareholders.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Meeting Resolution Statement No. 45 dated July 18, 2023 made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta.
Tahun Realisasi Realization Year	2023

RUPS LUAR BIASA 27 JUNI 2023 EXTRAORDINARY GMS JUNE 27, 2023

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 27 Juni 2023 Process of Holding Extraordinary GMS June 27, 2023

Tanggal dan Waktu Date and Time	27 Juni 2023, pukul 15.30 WIB-15.50 WIB June 27, 2023, 15.30 WIB-15.50 WIB
Lokasi Location	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Kuorum Quorum	Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.334.582.541 saham atau merupakan 73,39% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, karenanya kuorum Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders who were present physically or electronically through KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") totaling 1,334,582,541 shares or 73.39% of the total shares issued by the Company amounted to 1,818,384,820 shares; taking into account the List of Shareholders as of May 31, 2023 until 16.00 WIB, therefore the quorum of the Meeting in accordance with Article 14 paragraph (2) point 1 letter a of the Company's Articles of Association, has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make valid and binding decisions.
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of Annual GMS	Rapat dipimpin oleh Abdur Rahim Hasan selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk nomor DK/31/06/02/IPCC-23 tertanggal 31 Mei 2023. The meeting was chaired by Abdur Rahim Hasan as the Company's Independent Commissioner based on the Decree of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk concerning the Determination of Chairperson of Annual General Meeting of Shareholders for 2022 Fiscal Year and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk number DK/31/06/02/IPCC-23 dated May 31, 2023
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners	- Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan - Komisaris Independen : LM Arya Bima Yudiantara - Independent Commissioner : Abdur Rahim Hasan - Independent Commissioner : LM Arya Bima Yudiantara
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	- Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Sugeng Mulyadi - Direktur Operasi dan Teknik : Bagus Dwipoyono - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: Sumarno - President Director concurrently Director of Commercial and Business Development: Sugeng Mulyadi - Director of Operations and Technical: Bagus Dwipoyono - Director of Finance and Human Capital: Sumarno
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Party Vote Counter	Notaris : Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Biro Administrasi Efek : PT EDI Indonesia Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) Notary : Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Share Registrar : PT EDI Indonesia Public Accounting Firm (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG)



Keputusan RUPS Luar Biasa 27 Juni 2023 dan Tindak Lanjutnya

The Extraordinary General Meeting of Shareholders June 27, 2023 Resolution and Follow-up

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda		Perubahan Anggaran Dasar Amendment to the Articles of Association		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh Pemegang Saham. There are no questions and/or opinions provided by Shareholders.			
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting			
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree	
	1.317.133.741 = 99,405 %	688.100 = 0,052 %	7.194.300 = 0,543 %	
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu: -Pasal 11 ayat 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; -Pasal 16 ayat 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; -Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.			
	4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.			
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	1. Approved changes to the Company's Articles of Association, namely: - Article 11 paragraph 9 concerning General Meeting of Shareholders; - Article 16 paragraph 14 concerning Duties and Authorities of Board of Directors;. - Article 21 paragraph 9 concerning Work Plans, Fiscal Year and Annual Report.			
	2. Grant power and authority to the Company's Directors with rights substitute to carry out all necessary actions relating to decisions on the Meeting agenda, including drafting and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submit them to authorized agency to obtain notification receipt changes to the Company's Articles of Association, doing everything that is deemed necessary and useful for these purposes with no one anything that is excluded, including for making additions and/or changes to the Company's Articles of Association if is required by the competent authority.			
Tahun Realisasi Realization Year	2023			
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda		Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Determination of Tantiem for 2022 Fiscal Year and Remuneration for Members of Board of Commissioners and Board of Directors		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh Pemegang Saham. There are no questions and/or opinions provided by Shareholders.			
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting			
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree	
	1.324.144.441 = 99,934 %	690.000 = 0,052 %	181.700 = 0,014 %	
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.			
	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.			
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.			
	1. Grant authority and power to the Majority Shareholders to determine remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for in 2023.			
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors for 2023 after consultation with the Majority Shareholders.			
	3. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of tantiem for members of the Company's Directors and the Board Commissioner of the Company for 2022 Fiscal Year after consultation with Majority Shareholder.			



Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Determination of Tantiem for 2022 Fiscal Year and Remuneration for Members of Board of Commissioners and Board of Directors
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tahun 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.
Tahun Realisasi Realization Year	2023

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Laporan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perdana Report on the Use of Initial Public Offering Proceeds		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh Pemegang Saham. There are no questions and/or opinions provided by Shareholders.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	-	-	-
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Direksi Perseroan melaporkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, telah dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Dari total perolehan dana IPO sebesar Rp835.002.228.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebanyak Rp34.627.174.064 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam puluh empat Rupiah) telah digunakan untuk biaya penawaran umum saham Perseroan sehingga diperoleh dana bersih hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dan telah digunakan sebagai berikut: a. Sebesar Rp407.742.392.222,00 (empat ratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) telah dialokasikan untuk Belanja Modal/<i>Capital Expenditure</i> (CAPEX). b. Sebesar Rp320.590.260.568,00 (tiga ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar Di muka 5 Tahun. c. Sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh mi liar rupiah) telah digunakan untuk Modal Kerja (<i>Working Capital</i>). Dengan demikian sisa dana hasil penawaran umum perdana sampai dengan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp62.042.401.146,00 (enam puluh dua miliar empat puluh dua juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh enam rupiah). The Company's Directors report that the Company has used the proceeds from the Initial Public Offering up to the Fiscal Year ending 31 December 2022 with the following details: 1. Of the total proceeds from the IPO of Rp. 835,002,228,000.00 (eight hundred thirty-five billion two million two hundred and twenty-eight thousand rupiah) it was Rp34,627.174,064 (thirty-four billion six hundred twenty-seven million one hundred seventy-four thousand and sixty-four Rupiah) has been used for the costs of the Company's public offering of shares so that the successful proceeds obtained from the Company's Initial Public Offering (IPO) of Rp. 800,375,053,936.00 (eight hundred billion three hundred and seven twenty-five million fifty-three thousand nine hundred thirty-six rupiah), and has been used as follows: a. An amount of Rp407,742,392,222.00 (four hundred seven billion seven hundred forty two million three hundred ninety two thousand two hundred twenty two rupiah) has been allocated for Capital Expenditure (CAPEX). b. An amount of Rp320,590,260,568.00 (three hundred twenty billion five hundred ninety million two hundred sixty thousand five hundred and sixty eight rupiah) has been used for 5 year prepaid land rent. c. Rp10,000,000,000.00 (ten million rupiah) has been used for Working Capital. Thus, the remaining funds from the initial public offering until the Fiscal Year ending December 31, 2022 are Rp62,042,401,146.00 (sixty-two billion forty-two million four hundred one thousand one hundred and forty-six rupiah). Thus, the remaining funds from the initial public offering up to the fiscal year ending December 31, 2022 amounted to Rp62,042,401,146.00 (sixty-two billion forty-two million four hundred one thousand one hundred forty-six rupiah).		
	Tindak Lanjut Keputusan Rapat Meeting Resolutions Follow-up	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tahun 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.	
Tahun Realisasi Realization Year	2023		



RUPS LUAR BIASA 5 SEPTEMBER 2023 EXTRAORDINARY GMS SEPTEMBER 5, 2023

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 5 September 2023 Process of Holding Extraordinary GMS September 5, 2023

Tanggal dan Waktu Date and Time	5 September 2023, pukul 14.27 WIB-14.54 WIB September 5, 2023, at 2.27PM - 2.54PM	
Lokasi Location	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.	
Kuorum Kuorum	Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.419.585.652 saham atau merupakan 78,068% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders who were present physically or electronically through KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") totaling 1,419,585,652 shares or 78.068% of the total shares issued by the Company amounted to 1,818,384,820 shares; taking into account the Shareholder List as of August 11, 2023 until 16.00 WIB. Thus, the attendance quorum for the Meeting Agenda in accordance with Article 14 paragraph (2) number 1 letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15/2020, the quorum to hold this Meeting has been fulfilled and the Meeting held today is valid and has the right to make binding decisions.	
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of Annual GMS	Rapat dipimpin oleh Drajat Sulistyono selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor DK/01/09/01/IPCC-23 tertanggal 1 September 2023. The meeting was chaired by Drajat Sulistyono as the Company's President Commissioner based on the Decree of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk concerning the Determination of Chairman of Extraordinary General Meeting of Shareholders number DK/01/09/01/IPCC-23 dated September 1, 2023.	
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners	• Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan • Komisaris Independen : LM Arya Bima Yudiantara	
Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors	• Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Sugeng Mulyadi • Direktur Operasi dan Teknik : Bagus Dwipoyono • Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: Sumarno • President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development: Sugeng Mulyadi • Director of Operations and Technical: Bagus Dwipoyono • Director of Finance and Human Capital: Sumarno	
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Party Vote Counter	Notaris	: Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023 No. 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
	Biro Administrasi Efek Kantor Akuntan Publik	: PT Edi Indonesia : Purwantono, Sungkoro & Surja
	Notaries	: Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., based on the Decree of Regional Supervisory Board of South Jakarta Administrative City dated July 12, 2023 No. 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, as a substitute for Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City
	Share Registrar Public Accounting Firm	: PT Edi Indonesia : Purwantono, Sungkoro & Surja

Keputusan RUPS Luar Biasa 5 September 2023 dan Tindak Lanjutnya Resolution of the Extraordinary GMS of September 5, 2023 and its Follow-Up

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Company's Management Composition.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh pemegang saham. There were no questions and/or opinions given by shareholders

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Company's Management Composition.		
Pengambilan Keputusan Decision-Making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.410.398.252 = 99,353%	15.700 = 0,001%	9.171.700 = 0,646%
Keputusan Rapat Meeting Resolution	- Menerima pengunduran diri Bapak Sumarno sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (<i>acquit et de charge</i>), sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana; - Menyetujui untuk mengangkat Bapak Wing Megantoro sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Direksi yang digantikan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; - Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Drajat Sulisty - Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan - Komisaris Independen : LM. Arya Bima Yudiantara DIREKSI - Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Sugeng Mulyadi - Direktur Operasi dan Teknik : Bagus Dwipoyono - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Wing Megantoro		
	- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan keputusan Mata Acara satu-satunya dari Rapat dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. - Accepting the resignation of Sumarno as Director of Finance and Human Capital effective from the date of his resignation, with gratitude for all contributions of energy and thoughts during his tenure, and providing a release and discharge of responsibility for all actions and/or deeds carried out during the performance of his duties and authority (<i>acquit et de charge</i>), as long as such actions are ratified in the Annual General Meeting of Shareholders for the relevant fiscal year and do not constitute an unlawful act and/or criminal offense; - Approving the appointment of Wing Megantoro as Director of Finance and Human Resources, effective from the closing of the Meeting with a term of office continuing the remaining term of office of the replaced Directors until the closing of Annual General Meeting of Shareholders in 2025 without prejudice to the right of General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time; - With this resignation and appointment, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows: BOARD OF COMMISSIONERS - President Commissioner: Drajat Sulisty - Independent Commissioner: Abdur Rahim Hasan - Independent Commissioner: LM. Arya Bima Yudiantara BOARD OF DIRECTORS - President Director concurrently Director of Commercial and Business Development: Sugeng Mulyadi - Director of Operations and Technical: Bagus Dwipoyono - Director of Finance and Human Capital: Wing Megantoro - Granting power of attorney with substitution rights to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, to state the resolution of the sole Agenda of the Meeting in a separate notarial deed and to notify the changes in the composition of the Company's Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolution	Telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 5 September 2023 yang dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023 No. 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Has made a Deed of Statement of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 07 dated September 5, 2023 made before Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., based on the Decree of Regional Supervisory Board of Notaries of South Jakarta Administrative City dated July 12, 2023 No. 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, as a substitute for Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City		
Tahun Realisasi Year of Realization	2023		



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan salah satu organ utama dalam tata kelola perusahaan yang baik yang memiliki fungsi utama untuk mengelola perseroan, bertanggung jawab penuh baik secara individual maupun kolektif atas jalannya pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga berperan sebagai wakil Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Seluruh anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikad baik demi tercapainya kepentingan terbaik Perseroan.

Keberadaan dan fungsi organ Direksi di IPCC telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.
4. Anggaran Dasar IPCC.
5. Pedoman *Good Corporate Governance* IPCC.
6. Pedoman Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi IPCC.

PROSEDUR PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan Direksi di lingkungan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM, yang dimulai dengan penentuan sumber bakal calon, penjangkaran, penilaian serta usulan pengangkatan. Sebagai pertimbangan untuk mengangkat Anggota Direksi Perseroan memiliki kriteria dan persyaratan serta diwajibkan lulus dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh fungsi *Talent Pool* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham. Calon Anggota Direksi Perseroan yang telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Prosedur terkait pemberhentian direksi IPCC diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

Board of Directors is one of the main organs in good corporate governance whose main function is managing the Company, taking full responsibility both individually and collectively for the management of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives. Board of Directors also acts as a representative of the Company both in and out of court in accordance with the Articles of Association. All members of Board of Directors are obliged to carry out their duties and responsibilities in good faith for the best interests of the Company.

The existence and function of Board of Directors organs in IPCC are in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) concerning Boards of Commissioners of Issuers or Public Companies.

LEGAL BASIS

1. Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 Article 108.
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
3. Financial Services Authority Regulation No. 75/POJK.04/2017 concerning Responsibility of Board of Directors for Financial Reports.
4. IPCC Articles of Association.
5. IPCC Good Corporate Governance Guidelines.
6. Guidelines for Working Relations of IPCC Board of Commissioners and Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT PROCEDURE

The appointment of Board of Directors within the Company is carried out with reference to the Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital, which begins with determining the source of prospective candidates, recruitment, assessment and proposed appointments. As a consideration for appointing a member of Board of Directors, the Company has criteria and requirements and is required to pass the Fit and Proper Test by the Talent Pool function organized by the Shareholders. Prospective members of the Company's Board of Directors who have met the general requirements, including having expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior and high dedication to advancing and developing the Company and applicable regulations.

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS

Procedures related to the dismissal of IPCC Board of Directors are regulated in the Minister of State-Owned Enterprises



03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengundurkan diri.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Direksi IPCC telah memiliki pedoman kerja atau *board manual* yang disahkan pada 14 November 2018 dan senantiasa ditelaah secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan dan tantangan bisnis terkini Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Direksi disusun selaras dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, serta peraturan dan perundang-undangan lainnya. Pedoman Kerja Direksi mengatur, antara lain, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, tata tertib rapat, dan hal lainnya terkait fungsi Direksi sebagai organ utama Perseroan.

Secara garis besar, Pedoman Kerja Direksi berisi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Kebijakan mengenai Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
2. Kebijakan mengenai Direksi berdasarkan Anggaran Dasar.
3. Tugas dan Wewenang Direksi.
4. Rapat Direksi.
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.
6. Independensi Direksi.
7. Etika Jabatan Anggota Direksi.
8. Susunan Direksi.
9. Fungsi Pendukung Direksi.

Dengan adanya Pedoman Kerja Direksi, pelaksanaan tugas Direksi diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan efektif sehingga dapat menghadirkan pengelolaan perseroan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagai salah satu alat penilaian kinerja Direksi.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan

Regulation Number 03/03/2023 and POJK 33/POJK.04/2014 and also the Company's Articles of Association.

The position of member of Board of Directors ends if:

1. Passed away.
2. Term of office ends.
3. Dismissed by decision.
4. No longer meets the requirements as a member of Board of Directors based on the provisions of Articles of Association and applicable laws and regulations.
5. Resignation.

BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINES

IPCC Board of Directors has a work guideline or board manual that was ratified on November 14, 2018, and is regularly reviewed to ensure its relevance to the latest developments and business challenges of the Company as well as applicable laws and regulations.

The Board Manual is prepared in accordance with the provisions stipulated in POJK 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as other laws and regulations. The Board Manual regulates, among other things, term of office, duties and responsibilities, meeting rules of procedure, and other matters related to the function of Board of Directors as the main organ of the Company.

Broadly speaking, the Board Manual contains the following points:

1. Policy regarding Board of Directors based on the Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange Regulations.
2. Policy regarding Board of Directors based on Articles of Association.
3. Board of Directors Duties and Authorities.
4. Board of Directors Meetings.
5. Introduction and Capability Improvement Program.
6. Independence of Board of Directors.
7. Ethics of Board of Directors Members.
8. Composition of Board of Directors.
9. Supporting Functions of Board of Directors.

With the existence of the Board Manual, the execution of Board of Directors' duties is expected to be more focused and effective, thereby enabling the management of the Company to operate in accordance with GCG principles, serving as one of the tools for evaluating the performance of Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE

The term of office for members of the Company's Board of Directors is five (5) years, commencing from the date determined by the GMS that appointed them and ending at the close of the



ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

KRITERIA DAN PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Dalam proses nominasi anggota Direksi, Perseroan wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan dan kepentingan terbaik Perseroan. Informasi pemenuhan kriteria masing-masing anggota Direksi diuraikan sebagai berikut:

fifth Annual GMS following their appointment. However, this does not limit the right of GMS to dismiss any member of Board of Directors at any time before the end of their term. A member of Board of Directors whose term has ended may be reappointed for one (1) subsequent term based on a GMS resolution.

CRITERIA AND REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

In the process of nominating members of Board of Directors, the Company is obliged to ensure that all members of Board of Directors have the competencies and expertise required to achieve the goals and best interests of the Company. Information on the fulfillment of criteria for each member of Board of Directors is described as follows:

	Kriteria/Persyaratan Criteria/Requirements	Sugeng Mulyadi	Bagus Dwipoyono	Wing Megantoro
1	Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik Have good character, morals and integrity	✓	✓	✓
2	Cakap melakukan perbuatan hukum Capable of carrying out legal actions	✓	✓	✓
3	Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: Within 5 (five) years before appointment and during term of office:	✓	✓	✓
a	Tidak pernah dinyatakan pailit Never declared bankrupt	✓	✓	✓
b	Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau Never been a member of Board of Directors or Board of Commissioners being found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or	✓	✓	✓
c	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan Never been convicted of committing a criminal offense that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector	✓	✓	✓
d	Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: Never been a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners while serving:	✓	✓	✓
i	Tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan Never held an Annual GMS	✓	✓	✓
ii	Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris kepada RUPS. Accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners have ever been not accepted by the GMS or has never provided accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS.	✓	✓	✓
iii	Tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Never cause a Company that obtains a permit, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the Financial Services Authority.	✓	✓	✓
4	Memiliki komitmen untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Have a commitment to understand and comply with statutory regulations.	✓	✓	✓
5	Memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik Have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company	✓	✓	✓
6	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen. Have no affiliation with the Controller of listed Company concerned for at least 6 (six) months prior to appointment as Independent Director.	✓	✓	✓

	Kriteria/Persyaratan Criteria/Requirements	Sugeng Mulyadi	Bagus Dwipoyono	Wing Megantoro
7	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan. Have no affiliation with other Board of Commissioners or Board of Directors of the Prospective Company	✓	✓	✓
8	Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain Not working concurrently as a Director in other companies	✓	✓	✓
9	Tidak menjadi Orang Dalam Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Not be a Person in an Institution or Capital Market Supporting Professional whose services are used by the Prospective Listed Company for 6 (six) months prior to appointment as Director	✓	✓	✓

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2024

Ketentuan mengenai komposisi dan keanggotaan Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

- Jumlah Direksi disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan;
- Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan diangkat seorang Wakil Direktur Utama;
- Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi berdasarkan struktur organisasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS maka pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
- Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham.

Per 31 Desember 2024, jumlah dan komposisi Direksi Perseroan berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama yang merangkap Direktur Operasi dan Teknik, Direktur Operasi dan Teknik, dan Direktur Keuangan dan SDM.

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF BOARD OF DIRECTORS N 2024

Provisions regarding the composition and membership of the Company's Board of Directors, as follows:

- The number of Board of Directors is adjusted to the needs, level of complexity and strategic plans of the Company;
- In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) member of Board of Directors, one of whom is appointed as President Director, and if necessary a Deputy President Director is appointed;
- The composition and distribution of duties and authority of Board of Directors based on the Company's organizational structure is determined by the GMS. If the division of duties of Board of Directors is not determined by the GMS, the distribution of duties and authority among members of Board of Directors is determined based on the Board of Directors Decree;
- Members of Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS) and the GMS Resolutions must be approved by the Shareholders.

As of December 31, 2024, the number and composition of the Company's Board of Directors amounted to 3 (three) persons, consisting of 1 (one) President Director who is also Director of Operations and Technical, Director of Operations and Technical, and Director of Finance and HC.

Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2024
Structure and Composition of Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Director of Commercial and Business Development	Akta nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023	April 2023 - Penutupan RUPST 2025 April 2023 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1st
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Akta nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023	April 2023 - Penutupan RUPST 2025 April 2023 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1st



Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2024

Structure and Composition of Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Akta nomor 6 tanggal 5 September 2023 Deed Number 6 dated September 5, 2023	September 2023 - Penutupan RUPST 2025 September 2023 - Closing of GMS 2025	Ke-1 1st

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Profiles of all Board of Directors can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi yaitu menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berwenang untuk:

1. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada orang atau beberapa orang anggota Direksi;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan;
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan;
4. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; dan
5. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan.

Di samping mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, Direksi juga memiliki kewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perseroan;

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND AUTHORITIES

The duties and responsibilities of Board of Directors that have been regulated in the Board of Commissioners and Board of Directors Work Relationship Guidelines are to carry out all actions relating to the Company Management for the Company's interests, in accordance with the Company's purposes and objectives. Board of Directors is responsible for representing the Company both in and out of Court on all matters and events with restrictions.

In the performance of its duties and responsibilities, Board of Directors is authorized to:

1. Arrange the handover of the Board of Directors' authority to represent the Company in and out of court to one or more members of Board of Directors;
2. Arrange the provisions regarding the Company's personnel;
3. Appoint and dismiss the Company's employees;
4. Appoint and dismiss the Corporate Secretary; and
5. Take all other actions and deeds regarding the management and ownership of the Company's assets.

In addition to carrying out the duties and responsibilities that have been determined, Board of Directors also has the obligation to:

1. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes, objectives and business activities;
2. Prepare in a timely manner the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, and any amendments thereto and submit them to Board of Commissioners for approval from Board of Commissioners;
3. Provide an explanation to the Board of Commissioners regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
4. Create a Shareholder List, Special List and Minutes of Directors' Meetings;
5. Prepare an Annual Report as a form of accountability for Company management, as well as Company financial documents as intended in the Law on Company Documents;



6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk di audit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahun ini;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan;
11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
14. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
15. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan;
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Masing-masing DIREKSI

Pembagian tugas masing-masing Direksi dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perseroan pada masa mendatang secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi sejalan dengan Surat Keputusan No. HK.56/1/5/IKT-21 tentang Uraian Jabatan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, sebagai berikut:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH DIRECTOR

The division of duties of each Director is carried out to ensure the implementation and continuity of achieving the Company's targets in the future in a more systematic, efficient and effective manner. The scope of duties and responsibilities of each Director is in line with Decree No.HK.56/1/5/IKT-21. The division of duties and responsibilities of each Director is as follows:



Sugeng Mulyadi

Direktur Utama Merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Director of Commercial and Business Development

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Memutuskan dan menetapkan arah dan kebijakan pengelolaan Perseroan secara menyeluruh.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis Perseroan sesuai dengan keputusan dari pemegang saham melalui Dewan Komisaris.
- Merumuskan, merencanakan dan menetapkan rencana strategis perusahaan dalam menciptakan pendapatan dan pengelolaan keuangan Perseroan.
- Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak eksternal.
- Berperan sebagai Koordinator Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Merumuskan, merencanakan, mengendalikan, dan mengoordinasikan strategi implementasi program kerja manajemen bidang Operasi, Teknik, dan Sistem Informasi serta Terminal Satelit.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis Perseroan, sesuai arah dan strategi Perseroan.
- Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak eksternal Perseroan dalam bidang Operasi, Teknik dan Sistem Informasi serta Terminal Satelit.

Duties and Responsibilities:

- Decide and determine the overall management direction and policies of the Company.
- Responsible for the leadership and management of the Company's business in accordance with the decisions of shareholders through the Board of Commissioners.
- Formulate, plan and determine the Company's strategic plan in creating revenue and managing the Company's finances.
- Act as the Company's representative in dealing with external parties.
- Act as Coordinator of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Formulate, plan, control and coordinate implementation strategies for management work programs in the fields of Operations, Engineering and Information Systems and Satellite Terminals.
- Responsible for leadership and management of the Company's business, in accordance with the Company's direction and strategy.
- Act as the Company's representative in dealing with external parties of the Company in the fields of Operations, Engineering and Information Systems and Satellite Terminals.

Bagus Dwipoyono

Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical

Tugas dan Tanggung Jawab

- Merumuskan, merencanakan, dan mengendalikan arah dan kebijakan pengelolaan Perusahaan dalam bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis perusahaan dalam bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Mengelola dan mengimplementasikan rencana strategis Perusahaan dalam bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal.
- Merumuskan, merencanakan, mengendalikan, dan mengoordinasikan strategi implementasi program kerja manajemen bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis sesuai arah dan strategi Perusahaan.
- Mengelola dan mengimplementasikan rencana strategis Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.
- Bertindak sebagai perwakilan Perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal Perusahaan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.

Duties and Responsibilities:

- Formulate, plan, and control the direction and management policies of the Company in the fields of Finance and Human Capital.
- Responsible for leadership and business management of the Company in the fields of Finance and Human Capital.
- Manage and implement the Company's strategic plans in the fields of Finance and Human Capital.
- Act as a Company representative in dealing with external parties.
- Formulate, plan, control, and coordinate the implementation strategy of the management work program in the fields of Commercial, Strategy, and Business Development.
- Responsible for leadership and management of the Company's business in the fields of Commercial, Strategy, and Business Development in accordance with the Company's direction and strategy.
- Manage and implement the Company's strategic plans in the fields of Commerce, Strategy, and Business Development.
- Act as a Company representative in relations with external parties of the Company in the fields of Commerce, Strategy, and Business Development.



Wing Megantoro
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko
 Director of Finance, HC and Risk Management

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Merumuskan, merencanakan, dan mengendalikan arah dan kebijakan pengelolaan Perseroan dalam bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis Perseroan dalam bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko.
- Mengelola dan mengimplementasikan rencana strategis Perseroan dalam bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko.
- Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal.
- Merumuskan, merencanakan, mengendalikan, dan mengoordinasikan strategi implementasi program kerja manajemen bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis sesuai arah dan strategi Perseroan.
- Mengelola dan mengimplementasikan rencana strategis Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.
- Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak eksternal Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.

Duties and Responsibilities:

- Formulate, plan, and control the direction and management policies of the Company in the fields of Finance, HC and Risk Management.
- Responsible for leadership and management of the Company's business in the fields of Finance, HC and Risk Management.
- Manage and implement the Company's strategic plans in the fields of Finance, HC and Risk Management.
- Act as a Company representative in relations with external parties.
- Formulating, planning, controlling, and coordinating the implementation strategy of the management work program in the Commercial, Strategy, and Business Development fields.
- Responsible for the leadership and management of the Company's business in the Commercial, Strategy, and Business Development fields in accordance with the Company's direction and strategy.
- Managing and implementing the Company's strategic plan in the field of Commercial, Strategy, and Business Development.
- Act as the Company's representative in dealing with the Company's external parties in the fields of Commercial, Strategy, and Business Development.

INDEPENDENSI DIREKSI

Perseroan menjamin bahwa seluruh anggota Direksi melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak-pihak lain. Direksi juga senantiasa menghindari setiap aktivitas atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

The Company guarantees that all members of Board of Directors carry out their functions and duties professionally and independently, and do not have conflicts of interest with other parties. Board of Directors also avoids any activities or actions that are contrary to statutory regulations and could affect their independence in carrying out their duties and responsibilities as management of the Company.



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Dalam hal terjadi transaksi atau aktivitas yang mengandung benturan kepentingan, maka setiap anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka Direksi harus mengutamakan kepentingan Perseroan dan menghindari kerugian atau berkurangnya keuntungan Perseroan.

PROGRAM ORIENTASI/PENGENALAN BAGI DIREKSI BARU TAHUN 2024

Perseroan memiliki kebijakan dan program orientasi atau pengenalan bagi anggota Direksi yang baru bergabung. Pelaksanaan program ini dimaksudkan agar semua anggota Direksi dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung kemajuan Perseroan.

Topik-topik utama yang dibahas pada program orientasi Direksi, antara lain mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan;
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Di sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melaksanakan program orientasi atau pengenalan perusahaan kepada Direksi, dikarenakan tidak terdapat anggota Direksi baru.

PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Perseroan memiliki kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Direksi yang mengacu pada Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan Direksi memiliki kompetensi yang relevan dan mutakhir sehingga mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direksi secara optimal dalam mencapai tujuan strategis Perseroan.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST OF BOARD OF DIRECTORS

In the event of a transaction or activity involving a conflict of interest, each member of Board of Directors is prohibited from taking any action that could harm the Company or reduce its profits, and is required to disclose the conflict of interest in any decision made. If a decision must still be taken, Board of Directors must prioritize the interests of the Company and avoid any loss or reduction in the Company's profits.

ORIENTATION/INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS IN 2024

The Company has a policy and orientation or introduction program for newly appointed members of Board of Directors. The implementation of this program is intended to ensure that all Directors gain a better understanding of their duties and responsibilities in supporting the Company's advancement.

The main topics discussed in the Board of Directors' orientation program include:

1. Implementation of Good Corporate Governance principles in the Company;
2. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other things that are not permitted;
3. An overview of the Company relating to objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, long-term business plans, risks, internal control and other strategic issues;
4. Information relating to delegated authority, internal and external audits, and internal control policies and the Audit Committee.

Throughout 2024, the Company did not hold an orientation or introduction program for Board of Directors, because there were no new members of Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS' COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2024

Policy

The Company has a policy on training and competency development for Board of Directors, which refers to the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017, regarding the Guidelines for Human Capital Development. This policy aims to ensure that Board of Directors possesses relevant and up-to-date competencies to support the optimal execution of their functions, duties, and responsibilities in achieving the Company's strategic objectives.



Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan manajerial dan teknis, seminar, forum strategis, serta benchmarking, yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi serta tantangan bisnis yang dihadapi. Melalui kebijakan ini, Perseroan mendorong pembelajaran berkelanjutan guna memperkuat kualitas kepemimpinan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi yang Diikuti Direksi 2024

Selama tahun 2024, Direksi telah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut.

Competency development is carried out through various activities such as managerial and technical training, seminars, strategic forums, and benchmarking, tailored to the individual and organizational needs as well as business challenges faced. Through this policy, the Company promotes continuous learning to enhance leadership quality and good corporate governance

Training and/or Competency Development Attended by Board of Directors in 2024

During 2024, Board of Directors has participated in the following training and competency development.

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2024
Training and Competency Development for Directors in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Sugeng Mulyadi Direktur Utama President Director	Workshop	Live Webinar - Selamat datang "Standarisasi Risk Maturity Index BUMN" Juknis (SK-8/DKU. MBU/12/2023) Live Webinar - Welcome "Standardization of SOE Risk Maturity Index" Technical Guidelines (SK-8/DKU. MBU/12/2023)	12 Januari 2024 January 12, 2024	RAP Learning Centre
Sugeng Mulyadi Direktur Utama President Director	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Certified Risk Governance Professional – CRGP Certified Risk Governance Professional - CRGP Certification	13-14 Maret 2024 March 13-14, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Risk Management Professional Certification Institute
Wing Megantoro Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Workshop	Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 Internal Auditor Conference (KAI) 2024	10 - 11 Juli 2024 July 10-11, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Sugeng Mulyadi Direktur Utama President Director	Workshop	Pelindo E-Talks Vol.7 : "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	24 Juli 2024 July 24, 2024	PT Pelindo (Persero)
Bagus Dwipoyono Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical		Pelindo E-Talks Vol.7: "Building Resilience Amid Uncertainty: The Power of AKHLAK" with President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)		
Wing Megantoro Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional Qualified Risk Governance Professional Training and Certification	23 - 25 September 2024 September 23-25, 2024	PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia
Bagus Dwipoyono Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical				
Wing Megantoro Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management				



Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2024
 Training and Competency Development for Directors in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Bagus Dwipoyono Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Workshop	Workshop BCM (Business Continuity Management) Tahun 2024	30 September - 1 Oktober 2024	Fajar Atrifani (Individual Expert)
Wing Megantoro Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management		BCM (Business Continuity Management) Workshop 2024	September 30 – October 1, 2024	
Bagus Dwipoyono Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Pelatihan Training	Training Quality Control Circle (QCC)	30 Oktober 2024 October 30, 2024	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Sugeng Mulyadi Direktur Utama President Director	Pelatihan Training	BSE Business Essential - Innovation & Digital Disruption Stream	Oktober – November October – November	PT Pelindo (Persero)
Wing Megantoro Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Sertifikasi Certification	Chartered Accountants - Profesional Level	3-5,10-12,17-19,24-26 Oktober 2024 October 3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 2024	PT Pelindo (Persero)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2024

Pada tahun pelaporan 2024, Direksi Perseroan telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS' DUTIES FOR 2024

In the 2024 reporting year, the Company's Board of Directors have carried out all their duties and responsibilities properly in accordance with those mandated in the Company's Articles of Association, with the following description:

No	Uraian Tugas Job Description	Status Realisasi Realization Status
Terkait dengan RUPS Related to the GMS		
1	Wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan. <i>Obliged to organize and keep documents related to the GMS in accordance with statutory provisions.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya. <i>Sign the Annual Report, and in the event that a member of Board of Directors does not sign the Annual Report, the reason must be stated.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
3	Menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan. <i>Sign the Quarterly Management Report and Annual Management Report.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
4	Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa. <i>Summon and organize the Annual GMS and/or Extraordinary GMS.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
5	Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham. <i>Provide GMS materials to the Shareholders.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
6	Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS. <i>Provide accountability and all information regarding the condition and course of the Company in the form of a report on the Company's activities, including Financial Statements, both in the form of an Annual Report and in the form of other periodic reports according to the manner and time specified to the GMS.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
7	Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar. <i>Request for GMS approval if there will be an amendment to the Articles of Association.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
8	Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham. <i>Provide Minutes of the GMS if requested by the Shareholders.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized



No	Uraian Tugas Job Description	Status Realisasi Realization Status
Terkait dengan Strategi dan Rencana Perusahaan Related to Company Strategy and Plans		
1	Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. <i>Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the puposes, objectives, and business activities.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS. <i>Prepare RJPP and RKAP including other plans related to the implementation of the Company's business and activities to be submitted to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain approval at the GMS.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
3	Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perseroan. <i>Implement business plans effectively in managing the Company.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
Terkait dengan Penyusunan RJPP Related to the Preparation of RJPP		
1	Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat: • Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya; • Posisi Perseroan saat ini; • Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP. <i>Prepare the RJPP which at least contains: • Evaluation of the implementation of previous RJPP; • The Company's current position; • Assumptions used in preparing the RJPP. </i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang. <i>Determination of Vision, Mission, Targets, Strategies, Policies, and Long-Term Plan Work Programs.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
3	Bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani RJPP yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham. <i>Together with Board of Commissioners, sign the agreed RJPP and submit it to Shareholders.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
4	Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perseroan dikarenakan terdapat perubahan material yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku. <i>In the event of changes in the Company's internal and external factors due to material changes beyond the control of Board of Directors, Board of Directors will conduct a study on the possibility of revising the applicable RJPP.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
5	Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS. <i>In the event that a revision of the RJPP is required, Board of Directors must submit the revised RJPP to Board of Commissioners in order to obtain a response and approval to be submitted to the GMS.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
Terkait dengan Penyusunan RKAP Related to the Preparation of RKAP		
1	Kinerja Perseroan tahun berjalan. <i>The Company's performance for the current year.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Rencana kerja Perseroan. <i>The Company's work plan.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
3	Anggaran Perseroan. <i>The Company's budget.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
4	Proyeksi keuangan Perseroan. <i>The Company's financial projections.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
5	Proyek keuangan anak perusahaan. <i>The subsidiaries' financial projections.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
6	Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. <i>Other matters requiring a GMS decision.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
7	Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. <i>Board of Directors submits the RKAP to Board of Commissioners for a response before being submitted to the GMS for approval.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
Terkait dengan Laporan Tahunan Related to the Annual Report		
1	Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud. <i>Prepare the Company's Annual Report and together with Board of Commissioners sign the Company's Annual Report.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham. <i>Submit the Annual Report to Shareholders.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko Related to Risk Management		
Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut: <i>Develop a risk management system and implement it consistently, with the following stages:</i>		



No	Uraian Tugas Job Description	Status Realisasi Realization Status
1	Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi. <i>Risk Identification, which is the process of identifying the types of risks that are relevant and potentially occurring.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi. <i>Risk Measurement, which is the process of measuring the magnitude of impact and probability for each identified risk.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
3	Evaluasi Risiko, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perseroan. <i>Risk Evaluation, which is the process of reviewing the adequacy of overall risk management activities carried out within the Company.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
4	Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial. <i>Risk Handling, which is the process of determining efforts that can be made to handle potential risks.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
5	Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengerahkan kemunculan risiko. <i>Risk Monitoring, which is the process of monitoring various factors that are suspected of being able to mobilize the emergence of risks.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
6	Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku. <i>Reporting and Disclosure, which is the process of reporting the risk management system implemented by the Company along with its disclosure to related parties in accordance with applicable provisions.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
Terkait dengan Pengendalian Intern Related to Internal Control		
1	Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perseroan. <i>Establish policies on effective internal control systems to ensure the achievement of the Company's objectives.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian internal; 2. Penetapan rencana kerja dan target-target perseroan; 3. Identifikasi dan evaluasi risiko; 4. Penilaian risiko; 5. Mitigasi risiko; 6. Aktivitas pengendalian; 7. Informasi dan komunikasi; 8. <i>Monitoring.</i> The internal control system includes the following: 1. Internal control environment; 2. Determination of work plans and company targets; 3. Risk identification and evaluation; 4. Risk assessment; 5. Risk mitigation; 6. Control activities; 7. Information and communication; 8. <i>Monitoring.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
Keterbukaan Informasi Disclosure of Information		
1	Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif. <i>Disclose important information in the Company's Annual Report and Financial Report to related parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. <i>Take the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations but also matters that are important for decision-making by stakeholders.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
3	Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi Perseroan. <i>Board of Directors must actively disclose the implementation of GCG principles and material issues faced by the Company.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Relations		
1	Menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemangku kepentingan. <i>Respecting the rights of stakeholders arising from applicable laws and/or agreements made by the Company with stakeholders.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
2	Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosial. <i>Ensuring that the Company carries out social responsibility.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
3	Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. <i>Ensuring that the Company's assets, business locations and other facilities comply with applicable laws and regulations regarding environmental preservation, health and safety at work.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized



No	Uraian Tugas Job Description	Status Realisasi Realization Status
4	Dalam memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan. <i>In hiring, determining salaries, providing training, determining career levels, and determining other work requirements for employees, the Company does not discriminate because of a person's ethnic background, religion, gender, age, physical disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
5	Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan. <i>Board of Directors is required to provide a work environment that is free from all forms of pressure.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized
Tugas dan Kewajiban Lain Other Duties and Obligations		
1	Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Carrying out other obligations in accordance with the provisions set out in the Articles of Association and those determined by the GMS based on applicable laws and regulations.</i>	Sudah Terealisasi Already Realized

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Pada tahun 2024, Direksi IPCC membentuk Komite Investasi yang berfungsi sebagai unit pendukung Direksi dalam proses evaluasi dan pengelolaan investasi. Pembentukan Komite ini dituangkan secara resmi melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24, yang menandai komitmen Perusahaan dalam menciptakan proses investasi yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berbasis analisis yang komprehensif.

Komite Investasi memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan evaluasi kelengkapan dokumen usulan investasi, menilai kesesuaian program investasi dengan arah strategis perusahaan, serta memastikan bahwa setiap usulan investasi mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Manajemen (RKM), dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komite juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi strategis guna mempercepat proses implementasi program investasi.

Struktur keanggotaan Komite Investasi terdiri dari pejabat senior lintas fungsi yang relevan, dengan Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko bertindak sebagai Ketua Komite. Keanggotaan yang bersifat multidisiplin ini mencerminkan pendekatan kolektif dan kolaboratif yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, validasi, dan penyempurnaan setiap rencana investasi strategis IPCC.

Direksi menilai bahwa meskipun Komite Investasi merupakan unit yang baru dibentuk, peranannya telah mulai menunjukkan kontribusi positif dalam menjaga kualitas proses perencanaan dan pengendalian investasi. Direksi memberikan apresiasi atas responsivitas, kedalaman evaluasi, serta semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh seluruh anggota Komite dalam pelaksanaan tugasnya. Ke depan, Direksi akan berupaya mendorong optimalisasi peran Komite Investasi dalam memastikan setiap keputusan investasi didasarkan pada prinsip kehati-hatian, penciptaan nilai jangka panjang, serta sinergi dengan prioritas strategis perusahaan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS AND BASIS FOR EVALUATION

In 2024, IPCC Board of Directors formed an Investment Committee, functioning as a supporting unit for Board of Directors in the evaluation and management of investments. The formation of this Committee was officially documented in the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24, marking the Company's commitment to creating a more structured, accountable, and analysis-based investment process.

The Investment Committee's main responsibilities include evaluating the completeness of investment proposal documents, assessing the alignment of investment programs with the Company's strategic direction, and ensuring that every investment proposal refers to the Company's Long-Term Plan (RJPP), Management Work Plan (RKM), and applicable laws and regulations. The Committee also actively provides input and strategic recommendations to accelerate the implementation of investment programs.

The Investment Committee membership structure consists of senior officials from relevant functions, with the Director of Finance, HC, and Risk Management acting as the Committee Chairman. This multidisciplinary membership reflects a collective and collaborative approach underlying the preparation, validation, and refinement of each of IPCC's strategic investment plans.

Board of Directors assesses that although the Investment Committee is a newly formed unit, its role has already started to show positive contributions in maintaining the quality of investment planning and control processes. The Board appreciates the responsiveness, depth of evaluation, and collaborative spirit demonstrated by all Committee members in carrying out their duties. Moving forward, Board of Directors will strive to optimize the role of the Investment Committee to ensure that every investment decision is based on prudence, long-term value creation, and synergy with the Company's strategic priorities.



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan salah satu Organ Utama Tata Kelola Perusahaan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan GCG pada setiap jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

Dewan Komisaris wajib bertindak independen serta bertanggung jawab dalam hal pengawasan kebijakan operasional Perseroan dengan mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Arahan Pemegang Saham, sebagaimana telah disetujui oleh Pemegang Saham. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Perusahaan merujuk pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108.
2. Peraturan Menteri Sadan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Sadan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Anggaran Dasar IPCC.
5. Pedoman *Good Corporate Governance* IPCC.
6. Pedoman Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi IPCC.

PROSEDUR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan dimulai dengan tahapan penentuan sumber bakal calon, penjangkaran, penilaian serta usulan pengangkatan. Dalam pengangkatan Dewan Komisaris, Pemegang Saham telah mempertimbangkan kriteria dan persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat *track record* yang bersangkutan, hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Seluruh anggota Komisaris

Board of Commissioners is one of the Main Organs of Corporate Governance which carries out general and/or specific supervision based on the Company's Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors and ensuring that the Company has implemented GCG at every level of the organization. Board of Commissioners also ensures that the Company carries out business activities in accordance with the stated purposes and objectives.

Board of Commissioners is obliged to act independently and be responsible in terms of supervising the Company's operational policies by referring to the implementation of strategies and business plans contained in the Company's Work Plan and Budget and Shareholder Directions, as approved by the Shareholders. Board of Commissioners is also responsible for ensuring the Company's compliance with all applicable laws and regulations.

LEGAL BASIS

The legal basis for the formation and appointment of the Company's Board of Commissioners refers to several provisions, including:

1. Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 Article 108.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. IPCC Articles of Association.
5. IPCC Good Corporate Governance Guidelines.
6. Guidelines for Working Relations between IPCC Board of Commissioners and Board of Directors.

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT PROCEDURE

The procedure for appointing the Company's Board of Commissioners begins with the stages of determining the source of prospective candidates, recruitment, assessment and proposed appointment. In appointing the Board of Commissioners, Shareholders have considered the criteria and requirements for Candidates for Members of Board of Commissioners based on the results of an assessment by the Evaluation Team and a brief description of the relevant track record, this refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning the Minister of State-Owned Enterprises Regulation on Organs and Human Capital of State-

Perseroan telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur terkait Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang diatur dalam pedoman tersebut di antaranya: (1) Persyaratan, Komposisi dan Keanggotaan, dan Masa Jabatan; (2) Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas; serta (3) Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Komisaris. Dengan adanya pedoman kerja Dewan Komisaris tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris.

MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris terhitung efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mekanisme Pengunduran Diri

Dalam hal pengunduran diri secara sukarela maupun pemberhentian oleh pemegang saham, mekanisme pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Perseroan mengenai maksud pengunduran dirinya.

Owned Enterprises. All members of the Company's Board of Commissioners have met the general requirements, including having expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior and high dedication to advancing and developing the Company and applicable regulations.

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES

In carrying out its duties and functions, Board of Commissioners refers to the Articles of Association and Board Manual which regulate the Work Rules and Procedures of Board of Commissioners, which are compiled based on applicable laws and regulations. Matters regulated in these guidelines include: (1) Requirements, Composition and Membership, and Term of Office; (2) Capability Introduction and Improvement Program; and (3) Duties, Responsibilities and Obligations of the Board of Commissioners. With the existence of work guidelines for Board of Commissioners, it is expected that the implementation of Board of Commissioners' duties can be more focused and effective, and can be used as a tool for assessing the performance of Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

The term of office of Board of Commissioners is effective from the date determined by the GMS until the closing of the 5th Annual GMS after the date of their appointment and they can be reappointed for the next 1 (one) period, without prejudice to the GMS' right to dismiss members of Board of Commissioners concerned at any time.

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

As stipulated in the Company's Articles of Association, the term of office of a member of Board of Commissioners ends if the person concerned:

1. Passed away;
2. Term of office ends;
3. Dismissed based on GMS; and/or
4. No longer meets the requirements as a member of Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.

Mechanism for Resignation

In the case of voluntary resignation or dismissal by shareholders, the resignation mechanism of Board of Commissioners as outlined in the Company's Articles of Association, is as follows:

1. Members of Board of Commissioners have the right to resign before the end of their term of office by submitting a written request to the Company regarding the intention of their resignation.



2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri.
 3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima permohonan pengunduran diri serta setelah pelaksanaan RUPS yang memutuskan pengunduran diri tersebut.
 4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris tetap dapat dimintakan sejak tanggal pengangkatan hingga disetujuinya pengunduran diri dalam RUPS.
 6. Pembebasan tanggung jawab kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan menyetujui dan membebaskannya secara resmi.
2. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation request within a maximum period of 90 (ninety) calendar days from the receipt of the resignation letter.
 3. The Company is required to provide information disclosure to the public and submit a report to the Financial Services Authority (OJK) no later than 2 (two) working days after receiving the resignation request and after the GMS that decides on the resignation.
 4. Before the resignation becomes effective, the member of Board of Commissioners concerned remains obliged to carry out his/her duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the provisions of applicable laws and regulations.
 5. Accountability for the implementation of duties as a member of Board of Commissioners can still be requested from the date of appointment until the resignation is approved in the GMS.
 6. Release of responsibility to members of Board of Commissioners who resign is given after the Annual GMS approves and officially releases them.

Mekanisme Pemberhentian

Adapun mekanisme pemberhentian Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. RUPS berwenang memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.
2. Pemberhentian dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, melakukan tindakan yang merugikan Perseroan, atau karena alasan lain yang dinilai patut oleh RUPS.
3. Keputusan pemberhentian diambil setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri dalam RUPS.
4. Kesempatan membela diri tidak diberikan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
5. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

Dismissal Mechanism

The dismissal mechanism of Board of Commissioners is as follows:

1. The GMS has the authority to dismiss members of Board of Commissioners at any time by stating the reasons for the dismissal.
2. Dismissal can be carried out if a member of Board of Commissioners no longer meets the requirements as a member of Board of Commissioners, takes actions that are detrimental to the Company, or for other reasons deemed appropriate by the GMS.
3. The decision to dismiss is taken after the member of Board of Commissioners concerned is given the opportunity to present a defense in the GMS.
4. The opportunity to defend oneself is not given if the member of Board of Commissioners concerned states that he/she has no objection to the dismissal.
5. Dismissal of a member of Board of Commissioners is effective from the closing of the GMS that decided on the dismissal.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Individuals who can become members of Board of Commissioners are individuals who meet the following requirements at the time of appointment and during their tenure:

1. Have good character, morals and integrity;
2. Competent to carry out legal actions;
3. Within 5 (five) years before appointment and during office:

- a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - f. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- a. Never declared bankruptcy;
- b. Have never been a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners who was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt;
4. Have never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and
5. Has never served as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their tenure:
 - a. failed to hold an annual General GMS;
 - b. had their accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners not accepted by the GMS or failed to provide accountability as member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
 - c. caused a company holding a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to fail in fulfilling the obligation to submit an annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority.
 - d. Have a commitment to comply with statutory regulations; and
 - e. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company.
 - f. Fulfillment of the requirements as intended must be included in a statement letter and submitted to the Issuer or Public Company;
 - g. The statement letter as intended must be examined and documented by the Issuer or Public Company;
 - h. Does not own shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company;
 - i. Have no affiliation with the Issuer or Public Company, member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company; and
 - j. Have no direct or indirect business relationship related to the business activities of the Issuer or Public Company.

SUSUNAN, JUMLAH, DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS 2024

Susunan, jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024, telah memenuhi ketentuan yang berlaku seperti yang telah diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, yaitu:

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) anggota atau lebih;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham;

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2024

The composition and number of members of the Company's Board of Commissioners in 2024 has fulfilled the applicable provisions as stipulated in the Board of Commissioners Charter, namely:

1. Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more;
2. In the event that Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, one member of Board of Commissioners is appointed as President Commissioner;
3. The appointment of members of Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of Board of Directors;
4. Members of Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS and the GMS Resolutions must be approved by the Shareholders;



5. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat telah memiliki kompetensi, integritas, dan reputasi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada tahun 2024 tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris IPCC berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Independen. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

5. In the composition of Board of Commissioners, at least 20% are independent members of Board of Commissioners as determined in the appointment decision.

The appointment of Board of Commissioners is carried out after going through a fit and proper test process in accordance with applicable laws and regulations and GCG principles. Therefore, all serving members of the Company's Board of Commissioners have adequate competence, integrity and reputation in carrying out their duties and responsibilities.

In 2024, there were no changes to the composition of Board of Commissioners. As of the 2024 Annual Report, the composition of IPCC Board of Commissioners is 3 (three) persons, consisting of 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners. The composition and structure of Board of Commissioners can be seen in the following table:

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2024
 Structure and Composition of Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Drajat Sulistyio	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 27 Tanggal 13 April 2022 Deed of Extraordinary GMS Minutes No. 27 April 13, 2022	April 2022-RUPST 2025 April 2022-AGMS 2025	Ke-1 1st
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Served as IPCC Independent Commissioner based on Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 concerning Statement of Meeting Resolutions of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.	4 Agustus 2020- RUPST 2025 4 August 2020- AGMS 2025	Ke-1 1st
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021. Served as IPCC Independent Commissioner based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.	Juni 2021- RUPST 2025 June 2021- AGMS 2025	Ke-1 1st

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya.

BOARD OF COMMISSIONERS INDEPENDENCE

Throughout 2024, there were no situations that had the potential for conflicts of interest faced by members of Board of Commissioners in their decision making.

Status Independensi Dewan Komisaris Tahun 2024

Board of Commissioners Independence Status in 2024

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independence		
	Drajat Sulistyو	Abdur Rahim Hasan	LM. Arya Bima Yudiantara
Bukan Anggota Manajemen Perseroan Not a Member of the Company's Management	✓	✓	✓
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Free from business relationships and other relationships that may influence decision making	✓	✓	✓
Bukan pemegang saham mayoritas Perseroan atau pekerja yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perseroan Not a majority shareholder of the Company or an employee directly related to a majority shareholder of the Company	✓	✓	✓
Bukan Pekerja atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris Not an employee or having worked as an executive of the Company or a member of an affiliated Company for at least 3 (three) years prior to becoming a member of Board of Commissioners	✓	✓	✓
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pekerja yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris Not a professional advisor or consultant who is material to the Company or an affiliate, or an employee directly related to a service provider, for at least 3 (three) years prior to becoming a member of Board of Commissioners	✓	✓	✓
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pekerja dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama Not a major supplier or customer of the Company or an affiliate or an employee of or directly or indirectly related to a major supplier or customer	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi Not having a contractual relationship with the Company or other affiliates as a member of Board of Directors	✓	✓	✓



TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya Pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP Perusahaan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya (bila diperlukan);
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Wewenang Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES, OBLIGATIONS AND AUTHORITIES

Board of Commissioners Duties

Board of Commissioners is in charge of supervising the Company's management policies, the course of Management in general regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, and providing advice to Board of Directors including supervision of the implementation of RJPP, RKAP as well as the provisions of Articles of Association and GMS Resolutions, as well as applicable laws and regulations, for the Company's interests and in accordance with the Company's aims and objectives.

Board of Commissioners Obligations

In relation to the implementation of Board of Commissioners' duties, Board of Commissioners is obliged to:

1. Provide advice to Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Research and review and sign the RJPP and RKAP proposed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
3. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the Company's RJPP and RKAP.
4. Follow developments in Company activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;
5. Report immediately to the GMS if there are symptoms of declining Company performance;
6. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding Annual Report, if requested;
8. Prepare an annual work program and include it in the RKAP;
9. Establish an Audit Committee and other committees (if necessary);
10. Proposing a Public Accountant to the GMS;
11. Prepare minutes of the Board of Commissioners meetings and keep a copy;
12. Report to the Company regarding his and/or her family's share ownership in the Company and other companies;
13. Provide a report on the supervisory tasks that have been carried out during the previous Fiscal Year to the GMS;
14. Carry out other obligations within the framework of supervisory duties and providing advice, as long as it does not conflict with regulations Law Regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

Board of Commissioners Authority

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners has the authority to:



1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dan bebas Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan membicarakan pandangan-pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak Dewan Komisaris

Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas, termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham.

Keputusan Yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Perbuatan-perbuatan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris yaitu:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada

1. View books, letters and other documents, examine cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. Know all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the Board of Directors knowledge to attend the Board of Commissioners meetings;
6. Appoint and dismiss the Secretary of Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily suspend members of Board of Directors in accordance with the provisions of Articles of Association;
8. Form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary considering the Company's capabilities;
9. Using experts for certain matters and within a certain period of time and at the discretion of the Company, if deemed necessary;
10. Carry out actions to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and discuss views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, Articles of Association, and/or the General Meeting of Shareholders resolutions.

Board of Commissioners Rights

Receive honorarium and allowances/facilities, including Post-Employment compensation, the type and amount of which is determined by the GMS by considering the provisions of applicable laws and regulations. The GMS resolution must be approved by the Shareholders.

Decisions that Require Approval from Board of Commissioners

The actions of Board of Directors that require an approval by Board of Commissioners are:

1. Pledge fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (JO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Handover (Build Transfer Operate/BTO) and other collaborations with a certain value or time period determined by the GMS;
3. Receive or provide medium/long term loans, except loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans provided to Subsidiaries provided that loans to



Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dalam kondisi tertentu (hilang, musnah, rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total *lost*), biaya pemindahtanganan lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan, dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aktiva tetap yang lain, yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri melalui pengesahan RKAP, dan dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan RKAP;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan *Intern*;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

PEMBAGIAN BIDANG TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota dan untuk kelancaran tugasnya. Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.DK/19/12/02/IPCC-22 dan No.HK.56/3/7/IKT-22 tentang pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan.

Rincian Tugas Komisaris Utama

Komisaris Utama memiliki tugas dan tanggung jawab dengan rincian sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan keuangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.

Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;

4. Write off bad debts and dead inventory from the books;
5. Release and write off movable fixed assets under certain conditions (lost, destroyed, damaged which cannot be transferred (total *lost*), the cost of transfer is greater than the economic value obtained from the transfer, dismantled to be rebuilt or built into another fixed asset, whose budget has been determined by the GMS/Minister through ratification of the RKAP, and is dismantled not to be rebuilt in connection with other programs that have been planned by the RKAP;
6. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
7. Appoint and dismiss the Head of Internal Audit Unit;
8. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVISION OF DUTIES

Board of Commissioners regulates the division of work among its members to ensure the smooth running of its duties. The division of duties and authority of Board of Commissioners is regulated in the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No.DK/19/12/02/IPCC-22 and No.HK.56/3/7/IKT-22 concerning the Company's Good Corporate Governance (GCG) guidelines.

Details of President Commissioner Duties

President Commissioner has duties and responsibilities with the following details:

1. Board of Commissioners is tasked with supervising and is responsible for supervising management policies, the course of management in general, both regarding the Issuer or Public Company and the business of the Issuer or Public Company, and providing advice to the Board of Directors.
2. Under certain conditions, Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its wishes as regulated in laws and regulations and the articles of association.
3. Members of Board of Commissioners are required to carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, and with caution.
4. In order to support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities, the Commissioners are required to form an Audit Committee and may form other committees.
5. Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in the implementation of their duties and responsibilities as referred to at the end of each financial year.

6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
8. Wewenang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Sementara itu, rincian pembagian bidang tugas di antara anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

6. Board of Commissioners has the authority to temporarily dismiss members of Board of Directors by stating the reasons.
7. Board of Commissioners may take action to manage the Issuer or Public Company under certain circumstances for a certain period of time.
8. Authority is determined based on the articles of association or the resolutions of GMS.

Meanwhile, the details of division of duties among members of Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of Duties
Drajat Sulistyio	Komisaris Utama President Commissioner	Membidangi unit kerja Direktorat Utama, disamping selaku koordinator umum In charge of Main Directorate work unit, besides being the general coordinator;
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Membidangi SDM dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi; 2. Bidang Keuangan dan sebagai Ketua Komite Audit. 1. In charge of HC and as Chairman of Nomination and Remuneration Committee; 2. Finance Sector and as Chairman of Audit Committee.
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Operasi dan Teknik dan Bidang Komersial dan Pengembangan Bisnis, serta sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. Operations and Technical, Commercial and Business Development, and as Chairman of Risk Management Monitoring Committee.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Perseroan memberikan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar anggota Dewan Komisaris tersebut dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program pengenalan bagi Komisaris baru.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat antara lain:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah- masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk serta Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit Perseroan, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan. Program pengenalan Perseroan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF COMMISSIONERS

The Company holds an introduction program for newly appointed members of Board of Commissioners to ensure they can perform optimally in the best interests of the Company. The Corporate Secretary is responsible for organizing the introduction program for new Commissioners.

The introduction program given to newly appointed members of Board of Commissioners includes:

1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. An overview of the Company relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as things that are not permitted.

The Company's introduction program can take the form of presentations, meetings, visits to Company units, and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company. The Company's introduction program is implemented no later than 90 calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Commissioners.



Pada tahun 2024, Perseroan tidak mengadakan program orientasi atau pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, karena tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru.

In 2024, the Company did not carry out an orientation or introduction program for newly appointed members of Board of Commissioners, because there were no new members of Board of Commissioners.

PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Perseroan memiliki kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris yang diatur dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan anggota Dewan Komisaris memiliki kapabilitas yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif.

Program peningkatan kapabilitas merupakan salah satu inisiatif penting bagi Dewan Komisaris guna mengikuti perkembangan terkini terkait aktivitas Perseroan dan pengetahuan lain yang mendukung pelaksanaan tugas. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Policy

The Company has a policy of training and competency development for Board of Commissioners as regulated in the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017 concerning Guidelines for Human Capital Development in the Environment of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. This policy is designed to ensure that members of Board of Commissioners have adequate capabilities in carrying out their supervisory and advisory functions effectively.

The capability improvement program is an important initiative for Board of Commissioners to keep abreast of the latest developments related to the Company's activities and other knowledge that supports the implementation of its duties. This program is carried out continuously to improve the competence and capabilities of Board of Commissioners in order to carry out its functions, duties, and responsibilities in accordance with the principles of good corporate governance.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Dewan Komisaris 2024

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut.

Training and/or Competency Development Attended by Board of Commissioners in 2024

During 2024, Board of Commissioners has participated in the following training and competency development.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Drajat Sulistyo (Komisaris Utama) President Commissioner	Safety Awareness in Port Operations	- Pengenalan Dasar-dasar K3 - Pengenalan Bahaya dan Risiko di Tempat Kerja - Hirarki Pengendalian Bahaya dan Risiko - Tanggap Darurat - Proses Bisnis Kepelabuhanan - Penerapan Safety di Pelabuhan - Introduction to Basic of OHS - Introduction to Hazards and Risks in the Workplace - Hazard and Risk Control Hierarchy - Emergency Response - Port Business Process - Implementation of Safety in Ports	10 Januari 2024 January 10, 2024	KM-PMLI
	Indikator Keberhasilan Layanan Jasa Kepelabuhan Indicators of Success of Port Services	- Kinerja Pelayanan Kapal: TRT, WTP, WTB, AT, PT, BT - Kinerja Pelayanan Bongkar Muat: BCH, BSH, TGH, TSH - Utilisasi Fasilitas dan Peralatan - Fasilitas : BOR, BTP, SOR STP, YOR, YTP; Peralatan : Penggunaan (utilisasi), Kesiapan (Availability) - Ship Service Performance: TRT, WTP, WTB, AT, PT, BT - Loading and Unloading Service Performance: BCH, BSH, TGH, TSH - Utilization of Facilities and Equipment - Facilities: BOR, BTP, SOR STP, YOR, YTP; Equipment	19 Maret 2024 March 19, 2024	Corpu Pelindo

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
	Entrepreneurial Marketing Winning Pelindo Competitive Advantage	- Entrepreneurial Marketing - Bagaimana strategi Entrepreneurial Marketing bisa diterapkan dan membawa PT Pelindo unggul dalam persaingan global - Entrepreneurial Marketing - How Entrepreneurial Marketing strategies can be implemented and bring PT Pelindo to excel in global competition	13 Februari 2024 February 13, 2024	Corpu Pelindo
	Leader as Coach	- Menguasai percakapan coaching - Pengembangan tim dan kinerja - Mastering coaching conversations - Team and performance development	27 Mei 2024 May 27, 2024	Corpu Pelindo
	Legal Coaching Clinic Deteksi Dini dan Pencegahan Permasalahan Hukum di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Legal Coaching Clinic Early Detection and Prevention of Legal Problems in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	- Memberikan pembelajaran dengan perspektif hukum; - Memberikan edukasi terhadap materi atau tema hukum tertentu terhadap stakeholders yang ada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). - Providing learning with a legal perspective; - Providing education on certain legal materials or themes to stakeholders within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	19 Juli 2024 July 19, 2024	Corpu Pelindo
	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi E-Learning Improves Understanding of Gratification	- Nilai-nilai Antigratifikasi dalam Perspektif Budaya dan Agama - Dampak Gratifikasi: Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan - Pelaporan Gratifikasi - Peran Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dalam Pengendalian Gratifikasi - Anti-Gratification Values in Cultural and Religious Perspectives - Impact of Gratification: Gratification, Bribery, and Extortion - Gratification Reporting - Role of Civil Servants/State Officials in Gratification Control	22 Agustus 2024 August 22, 2024	Corpu Pelindo
	Pelatihan dan Sertifikasi BNSP SDM Level General Manager BNSP HC Training and Certification for General Manager Level	- Pengetahuan dan kemampuan General Manager SDM - Pemahaman fungsi lengkap MSDM - Kompetensi Profesi General Manager SDM - Knowledge and skills of HC General Managers - Understanding of complete HC functions - Professional Competence of HC General Managers	27 Agustus 2024 August 27, 2024	PMLI
Abdur Rahim Hasan (Komisaris Independen) Independent Commissioner	Workshop	Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 Internal Auditor Conference (KAI) 2024	10 - 11 Juli 2024 July 10 - 11, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Profesional Professional Qualified Risk Governance Training and Certification	23 - 25 September 2024 September 23 - 25, 2024	PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia
LM Arya Bima Yudiantara (Komisaris Independen) Independent Commissioner	Workshop	Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 Internal Auditor Conference (KAI) Year 2024	10 - 11 Juli 2024 July 10 - 11, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
	Pelatihan dan Sertifikasi	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Profesional Training and Certification of Qualified Risk Governance Professional	23 - 25 September 2024 September 23 - 25, 2024	PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia



FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), serta sejalan dengan visi, misi, dan tujuan strategis Perseroan.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2024 meliputi berbagai aspek penting, antara lain:

1. Pengawasan atas pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis Perseroan oleh Direksi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Pemantauan pencapaian target yang tertuang dalam RKAP, Capaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk pencapaian indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*), efisiensi operasional, dan realisasi anggaran, agar sejalan dengan visi dan misi Perseroan.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris memberikan perhatian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, termasuk meninjau tindak lanjut atas temuan audit, guna memastikan terciptanya proses bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
4. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendorong penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
5. Peningkatan kualitas tata kelola perusahaan melalui evaluasi terhadap efektivitas dan integritas fungsi komite-komite di bawah Dewan Komisaris mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan akuntabel oleh Dewan Komisaris.

Melalui fokus pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berupaya keras memastikan bahwa Perseroan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di industri jasa bongkar muat kendaraan di pelabuhan.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta Rencana Kerja yang ditetapkan di awal tahun, antara lain sebagai berikut:

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2024;

BOARD OF COMMISSIONERS SUPERVISION FOCUS IN 2024

Throughout 2024, Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) actively exercised its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, in order to ensure that the Company's management is carried out responsibly, transparently, and based on the principles of good corporate governance (GCG), and in line with the Company's vision, mission, and strategic objectives.

The focus of Board of Commissioners' supervision in 2024 includes various important aspects, including:

1. Supervision on the implementation of the Company's strategic strategies and policies by the Board of Directors as stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
2. Monitoring the achievement of targets stated in the RKAP, Achievement of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), including the achievement of key performance indicators (KPI), operational efficiency, and budget realization, so that they are in line with the Company's vision and mission.
3. Strengthening the Internal Control System and Risk Management. Board of Commissioners pays attention to the effectiveness of internal control system and risk management, including reviewing follow-up actions on audit findings, to ensure the creation of a healthy and sustainable business process.
4. Monitoring the Company's compliance with applicable laws and regulations and encouraging the delivery of accurate and timely information to stakeholders.
5. Improving the quality of corporate governance through evaluation of the effectiveness and integrity of the committee functions under Board of Commissioners to support objective and accountable decision-making by Board of Commissioners.

Through this supervisory focus, Board of Commissioners strives to ensure that the Company remains on a sustainable and highly competitive growth path in the vehicle loading and unloading services industry at the port.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2024

Throughout 2024, Board of Commissioners has carried out its duties, responsibilities and obligations related to the supervision of management policies and the course of the Company's management in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Work Plan determined at the beginning of the year, including the following:

During 2024, Board of Commissioners has carried out various activities as follows:

1. Prepare a work plan for the Board of Commissioners for 2024;



2. Melaksanakan rapat rutin dengan Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan pengelolaan Perseroan;
3. Melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan;
4. Memberikan pendapat dan saran terkait pengelolaan Perseroan;
5. Memberikan tanggapan keputusan dan persetujuan terkait pengelolaan Perseroan;
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2024.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga diwujudkan melalui kunjungan kerja, untuk memberikan saran serta masukan/konfirmasi terhadap area/wilayah kerja IPCC. Kunjungan kerja ini juga dilakukan untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dan untuk memberikan gambaran bagi Dewan Komisaris atas kemajuan/perkembangan usaha Perseroan. Adapun kunjungan kerja Dewan Komisaris pada tahun 2024, dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Peserta Kunjungan Visit Participants	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Wilayah Kerja IPCC IPCC Working Areas
1. Abdur Rahim Hasan 2. LM. Arya Bima Yudiantara 3. Para Komite The Committee	3 Desember 2024 December 3, 2024	Satelit Banjarmasin Banjarmasin Satellite

Rekomendasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Direksi sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kelancaran operasional dan meningkatkan standar keselamatan kerja di seluruh wilayah operasional Perseroan. Rekomendasi tersebut mencakup:

1. Agar arus kendaraan khusus terminal kendaraan dipisahkan dari arus kendaraan umum, guna menghindari potensi kecelakaan terhadap unit kendaraan dan menjaga kelancaran aktivitas di area terminal.
2. Agar dibuat dan dipasang marka jalan yang jelas di area operasional, sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten.
3. Khusus untuk wilayah kerja Banjarmasin, mengingat sedang berlangsungnya perbaikan besar pada akses Terminal Multipurpose Banjarmasin, Direksi diharapkan mengantisipasi dampak operasional akibat penggunaan sementara jalur lapangan penumpukan kendaraan oleh kendaraan umum, dengan tetap menjaga keselamatan dan ketertiban di area terminal.

Dewan Komisaris berharap rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara efektif, guna memastikan operasional IPCC berjalan dengan aman, tertib, dan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. Carrying out regular meetings with the Board of Commissioners in the context of administering and administering the Company;
3. Carrying out joint meetings with Board of Directors in order to implement the supervisory function of the Company's management policies;
4. Provide opinions and suggestions regarding the management of the Company;
5. Provide feedback on decisions and approvals related to the management of the Company;
6. Holding the 2024 General Meeting of Shareholders (GMS).

Board of Commissioners Working Visit

The implementation of supervisory duties and functions of Board of Commissioners is also realized through work visits, to provide advice and input/confirmation to IPCC work areas/regions. These work visits are also carried out to encourage and motivate all employees and to provide an overview for Board of Commissioners on the progress/development of the Company's business. The working visits of Board of Commissioners in 2024 can be explained in the following table:

Board of Commissioners Recommendations

In 2024, Board of Commissioners provided several recommendations to the Board of Directors as part of its commitment to strengthen operational smoothness and enhance occupational safety standards across the Company's operational areas. The recommendations include:

1. Traffic flow for vehicle terminals should be separated from public vehicle traffic to avoid potential accidents involving vehicle units and to ensure smooth activities within the terminal area.
2. Clear road markings should be created and installed in operational areas as an effort to consistently apply occupational safety and health (OSH) principles.
3. Specifically for Banjarmasin work area, given the ongoing major repairs to the access road at Banjarmasin Multipurpose Terminal, the Board of Directors is expected to anticipate operational impacts caused by the temporary use of vehicle stacking yard by public vehicles, while maintaining safety and order in the terminal area.

Board of Commissioners hopes that these recommendations will be followed up effectively to ensure IPCC operations run safely, orderly, and in line with good corporate governance principles.



Selain rekomendasi khusus tersebut, Dewan Komisaris juga memberikan arahan kepada Direksi IPCC secara umum untuk terus memperkuat:

1. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG);
2. Manajemen risiko operasional dan keuangan yang berkesinambungan;
3. Optimalisasi kinerja usaha melalui inovasi layanan dan penguatan pengendalian internal;
4. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan konsisten untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan IPCC, menjaga keselamatan operasional, serta meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja terhadap organ pendukungnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dengan dasar penilaian pada realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan setiap komite. Selain itu, penilaian juga berdasarkan pada saran, rekomendasi, dan masukan yang diberikan oleh setiap komite itu sendiri sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil penilaian menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan atau mengangkat kembali anggota Komite Audit dan GCG untuk periode jabatan berikutnya. Dewan menilai bahwa Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2024 "Sangat Baik", sesuai dengan pencapaian atau realisasi rencana kerja tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana diuraikan berikut ini:

In addition to these specific recommendations, Board of Commissioners has also provided general guidance to IPCC Board of Directors to continuously strengthen:

4. Implementation of good corporate governance (GCG) principles;
5. Sustainable management of operational and financial risks;
6. Optimization of business performance through service innovation and strengthening of internal controls;
7. Improvement of human capital capabilities to support the Company's long-term growth.

These recommendations are expected to be implemented consistently to support IPCC's sustainable growth, maintain operational safety, and strengthen the trust of all stakeholders.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Performance Assessment of Board of Commissioners Committees and Assessment Basis

Board of Commissioners conducts performance assessment of its supporting organs, namely Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Performance appraisal is carried out once a year based on the realization and completion of work programs set out in the annual work plan of each committee. In addition, the assessment is also based on suggestions, recommendations, and input provided by each committee itself in accordance with the scope of its duties and responsibilities.

The assessment results are taken into consideration by Board of Commissioners to dismiss or reappoint members of Audit and GCG Committee for the next term of office. The Board assessed the performance of Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee throughout 2024 as "Very Good", in accordance with the achievement or realization of the annual work plan of Risk Management Monitoring Committee as described below:



KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONER

Komposisi Komisaris Independen Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Per 31 Desember 2023, Komisaris Independen Perusahaan berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Abdur Rahim Hasan dan LM. Arya Bima Yudiantara, yang masing-masing diangkat pada berdasarkan keputusan RUPS dan diaktakan melalui akta Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021.

Komposisi Komisaris Independen Perusahaan adalah lebih dari 20% atas keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang, dengan demikian, komposisi Komisaris Independen Perusahaan telah sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN.

Selain itu, komposisi Komisaris Independen Perusahaan ini juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengharuskan keberadaan Komisaris Independen mencapai 30% dari total anggota Dewan Komisaris.

Dengan demikian, Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memastikan keberagaman dan independensi dalam pengambilan keputusan strategis.

KRITERIA PENENTUAN DAN PEMENUHAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen IPCC yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan kerja dan tidak pernah bekerja dengan IPCC;
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk kementerian, dan tidak menjadi anggota dewan direksi pada perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir; dan

The composition of the Company's Independent Commissioners refers to the State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises. As of December 31, 2023, the Company's Independent Commissioners are 2 (two) persons, namely Abdur Rahim Hasan and LM. Arya Bima Yudiantara, who were appointed based on the GMS resolution and notarized by Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 regarding the Statement of Meeting Resolutions of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.

The composition of the Company's Independent Commissioners is more than 20% of the total members of Board of Commissioners which is 3 (three) persons. Thus, the composition of the Company's Independent Commissioners has met the minimum limit stipulated in the Minister of SOEs Regulation.

In addition, the composition of the Company's Independent Commissioners is also in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies which requires the presence of Independent Commissioners to reach 30% of the total members of Board of Commissioners.

Thus, the Company upholds the principles of good corporate governance, ensuring diversity and independence in strategic decision making.

CRITERIA FOR DETERMINING AND FULFILLING THE INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent members of Board of Commissioners have no financial, management, share ownership and family relationships with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, which may affect their ability to act independently. The criteria for determining an Independent Commissioner of IPCC are:

1. Has no working relationship and has never worked with IPCC;
2. Has not worked for the Government including ministries, and has not been a member of board of directors at a Company that has a direct relationship with the Company in the last three years; and



3. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perseroan.

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Pernyataan independensi Komisaris Independen, sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, yakni terkait Independensi Dewan Komisaris. Adapun sepanjang tahun 2024, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya.

3. Is free from interests and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of Board of Commissioners to act or think freely within the Company.

STATEMENT ON THE INDEPENDENCE OF EACH INDEPENDENT COMMISSIONER

Statement of the independence of Independent Commissioners, as stated in the previous discussion, is related to the independence of Board of Commissioners. As throughout 2024, there are no situations that have the potential for conflicts of interest faced by members of Board of Commissioners in their decision making.



TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

TRANSPARENCY OF INFORMATION ABOUT BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

KEBIJAKAN HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi IPCC telah memiliki “*Board Manual*” yang berisi, antara lain, kebijakan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dijelaskan bahwa terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menjadi salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perseroan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien.

Untuk itu Perseroan, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan.
3. Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang didalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut.
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

WORKING RELATIONS POLICY BETWEEN BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

IPCC Board of Commissioners and Board of Directors have a “*Board Manual*” which contains, among other things, the working relationship policy between Board of Commissioners and Board of Directors. It is explained that the creation of a good working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is one of the most important things so that each Company organ can work according to its function effectively and efficiently.

For this reason, the Company applies the following principles in maintaining a good working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors:

1. Board of Commissioners respects the function and role of Board of Directors in managing the Company as regulated in statutory regulations and Articles of Association.
2. Board of Directors respects the function and role of Board of Commissioners in supervising and providing advice on the Company’s management policies.
3. Correspondence between Board of Commissioners and Board of Directors uses a letter format that contains an explanation of the purpose and objective of the letter.
4. Every working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is a formal relationship, meaning that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for.
5. Any informal working relationship can be carried out by each member of Board of Commissioners and members of Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence.



6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

6. Every working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is an institutional relationship in the sense that Board of Commissioners and Board of Directors are collective positions that represent all of its members so that every working relationship between a Member of Board of Commissioners and a Member of Board of Directors must be known to other Members of Board of Commissioners and Board of Directors.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan saat ini belum menetapkan kebijakan terkait keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi harus memenuhi persyaratan yang juga tertuang dalam *Board Manual* Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komposisi yang beragam baik dari segi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin dan keahlian. Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi diperlukan sebagai upaya untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif. Hal ini dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

POLICY ON COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Company has not yet established a policy regarding the diversity of composition of Board of Commissioners and Board of Directors. However, all members of Board of Commissioners and Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS and in accordance with the Company's Articles of Association. Board of Commissioners and Board of Directors must meet the requirements as stipulated in the Company's Board Manual. The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is diverse in terms of education (field of study), work experience, age, gender, and expertise. The diversity of Board of Commissioners and Board of Directors is necessary to encourage more objective and comprehensive decision making. This is because decisions are made by taking into account various points of view.



Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile	Pendidikan Terakhir Last Education
Direksi Board of Directors			
Sugeng Mulyadi	Indonesia Indonesian	Jakarta	S2 Master
Bagus Dwipoyono	Indonesia Indonesian	Jakarta	S2 Master
Wing Megantoro	Indonesia Indonesian	Jakarta	S2 Master



Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender Gender
• <i>Master of Shipping and Transport from</i> Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands, in 2013 • <i>Master of Finance from Universitas Gadjah Mada</i>, Yogyakarta, Indonesia, in 2008 • <i>Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya</i>, Malang, Indonesia, in 1996 • <i>Master of Shipping and Transport from</i> Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands, in 2013 • <i>Master of Finance from Universitas Gadjah Mada</i>, Yogyakarta, Indonesia, in 2008 • <i>Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya</i>, Malang, Indonesia, in 1996	• Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis (2023-2025) • Direktur PT Pelindo Investama (2020 – 2023) • Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018 – 2019) • VP Keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 – 2018) • President Director concurrently Acting Commercial and Business Development Director (2023-2025) • Director at PT Pelindo Investama (2020 – 2023) • Finance and Human Capital Director at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018 – 2019) • VP of Finance at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2017 – 2018)	Keuangan dan Pelayaran Finance and Shipping	52	L Male
• <i>Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada</i>, Yogyakarta, Indonesia, in 2020 • <i>Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University</i>, China, in 2011 • <i>Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI</i>, Jakarta, in 2002 • <i>Bachelor Industrial Engineering from Universitas Pasundan</i>, Bandung, in 1996 • <i>Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada</i>, Yogyakarta, Indonesia, in 2020 • <i>Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University</i>, China, in 2011 • <i>Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI</i>, Jakarta, in 2002 • <i>Bachelor Industrial Engineering from Universitas Pasundan</i>, Bandung, in 1996	• <i>President Director at PT Menara Maritime Indonesia</i> on 2018 – 2023 • <i>Director at PT Terminal Petikemas Indonesia</i> on 2016 – 2018 • <i>Manager Operation Support 1 at PT Pelabuhan Tanjung Priok</i> on 2015 – 2016 • <i>ASM Pengembangan dan Pengendalian I at PT PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Main Office</i> in 2012 – 2015 • <i>President Director at PT Menara Maritime Indonesia</i> on 2018 – 2023 • <i>Director at PT Terminal Petikemas Indonesia</i> on 2016 – 2018 • <i>Manager Operation Support 1 at PT Pelabuhan Tanjung Priok</i> on 2015 – 2016 • <i>ASM of Development and Control I at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Main Office</i> in 2012 – 2015	Managemen, transportasi internasional, dan logistik Management, international transportation and logistics	52	L Male
• <i>Master of Business Administration from Kuhne Logistic University</i>, in 2015 • <i>Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya</i>, in 1997 • <i>Master of Business Administration from Kuhne Logistic University</i>, in 2015 • <i>Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya</i>, in 1997	• <i>Regional Division Head Management of Finance & Tax Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i> on 2021 - 2023 • <i>SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero)</i> on 2019 – 2021 • <i>SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero)</i> on 2018 – 2019 • <i>VP of Finance Services at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero)</i> on 2016 – 2019 • <i>Regional Division Head Management of Finance & Tax Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i> on 2021 - 2023 • <i>SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero)</i> on 2019 – 2021 • <i>SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero)</i> on 2018 – 2019 • <i>VP of Finance Services at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero)</i> on 2016 – 2019	Akuntansi dan administrasi bisnis Accounting and business administration	52	L Male





Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile	Pendidikan Terakhir Last Education
Dewan Komisaris Board of Commissioners			

Drajat Sulisty	Indonesia Indonesian	DKI Jakarta	S2 Master

Abdur Rahim Hasan	Indonesia Indonesian	DKI Jakarta	S1 Bachelor

LM Arya Bima Yudiantara	Indonesia Indonesian	DKI Jakarta	S1 Bachelor



	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
	- Diploma Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (2002) - Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Jakarta (2012) - Master in Logistic dari Kuhne Logistic University (2014) - Diploma in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada (2002) - Bachelor of Civil Engineering from the Universitas Jakarta (2012) - Master in Logistics from Kuhne Logistic University (2014)	- Manager Teknik dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang (2015 – 2016). - General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu (2016 – 2018) - General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Lampung (2020 – 2021). - Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021) - Regional Head 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Februari 2023 – Sekarang - Engineering and Information Systems Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Palembang Branch (2015 – 2016). - General Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bengkulu Branch (2016 – 2018). - General Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Lampung Branch (2020 – 2021). - President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021) - Regional Head 2 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) February 2023 – Present).	Logistik dan teknik sipil Logistics and civil engineering	43	L Male
	Sarjana Hukum Universitas Azzahra Jakarta (2012) Bachelor of Laws from Universitas Azzahra Jakarta (2012)	- Dewan Komisaris PT Srandil Steel (2012-2014) - Dewan Komisaris PT PT Raja Tiga Sila (2014-2015) - Dewan Komisaris PT Madina Mitra Teknik (2014-2019) - Dewan Komisaris PT JPPI (2014-2018) - Komisaris Utama/ PT JPPI (2018-2019) - Dewan Komisaris/ PT JPPI (2019-2020) - Board of Commissioners of PT Srandil Steel (2012-2014). - Board of Commissioners of PT Raja Tiga Sila (2014-2015). - Board of Commissioners of PT Madina Mitra Teknik (2014-2019). - Board of Commissioners of PT JPPI (2014-2018). - President Commissioner of PT JPPI (2018-2019). - Board of Commissioners of PT JPPI (2019-2020).	Hukum Law	43	L Male
	Sarjana Hukum dari Universitas Atmajaya (1997) Bachelor of Laws from Universitas Atmajaya (1997)	- HRD PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007) - Direktur PT Prada Yasa (September 2007 – Agustus 2009) - Manager Operasional PT Lumbung Mas (September 2009 – Juli 2014) - VP Marketing Project PT Gistec Prima (September 2014 – 2021) - HRD of PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007). - Director of PT Prada Yasa (September 2007 – August 2009). - Operations Manager of PT Lumbung Mas (September 2009 – July 2014). - VP of Marketing Project of PT Gistec Prima (September 2014 – 2021).	Hukum Law	57	L Male



PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Direksi baik secara kolegal maupun individual dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan target pencapaian KPI yang sudah disepakati bersama di awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris menyampaikan hasil evaluasi atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan *acquitt de charge*. Selain melalui mekanisme RUPS, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan bersamaan dengan penilaian (*assessment*) GCG dan penilaian pencapaian KPI.

Indikator/Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Keuangan dan Pasar
 - a. *Average Collection Period* (ACP)
 - b. Pertumbuhan Pendapatan Usaha
 - c. EBITDA Margin
2. Fokus Pelanggan
 - a. Indeks Kepuasan Pelanggan
 - b. Persentase Tindak Lanjut Komplain Pelanggan
3. Efektivitas Produk dan Proses
 - a. Produktivitas Bongkar Muat (T/G/H)
 - b. Utilisasi Lapangan (YOR)
 - c. Kinerja Proses Pengadaan Barang dan Jasa
4. Fokus Tenaga Kerja
 - a. Peningkatan Kompetensi Pegawai
 - b. Produktivitas Pegawai (dalam juta Rupiah)
 - c. Indeks Kepuasan Pegawai
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat
 - a. Skor *Good Corporate Governance* (GCG)
 - b. Penyerapan Investasi (*Capex*)
 - c. Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi baik individual maupun kolegal dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris melaporkan hasilnya kepada pemegang saham di dalam RUPS

BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

Board of Directors Performance Assessment

Assessment Procedure

Board of Commissioners assesses the performance of Board of Directors both collectively and individually based on the KPI achievement targets that were mutually agreed upon at the beginning of the year according to the duties and responsibilities of each member of Board of Directors. Furthermore, Board of Commissioners submits the assessment results of Board of Directors' performance to Shareholders to obtain *acquitt de charge*. In addition to the GMS mechanism, Board of Directors' performance is also assessed in conjunction with GCG assessment and KPI achievement assessment.

Indicators/Assessment Criteria

The performance assessment of Board of Directors is carried out by considering the following criteria:

1. Finance and Market
 - a. *Average Collection Period* (ACP)
 - b. Business Income Growth
 - c. EBITDA Margin
2. Customer Focus
 - a. Customer Satisfaction Index
 - b. Percentage of Customer Complaint Follow-Ups
3. Product and Process Effectiveness
 - a. Loading and Unloading Productivity (T/G/H)
 - b. Field Utilization (YOR)
 - c. Performance of Goods and Services Procurement Process
4. Workforce Focus
 - a. Increasing Employee Competency
 - b. Employee Productivity (in million Rupiah)
 - c. Employee Satisfaction Index
5. Leadership, Governance and Community Responsibility
 - a. *Good Corporate Governance* (GCG) Score
 - b. Investment Absorption (*Capex*)
 - c. Precision in Submitting Periodic Reports

Assessor for Performance Assessment of Board of Directors

The performance of Board of Directors, both individually and collectively, is evaluated periodically by the Board of Commissioners. Furthermore, Board of Commissioners reports the results to shareholders at the GMS.



Hasil Penilaian Kinerja Berdasarkan KPI Direksi

Performance Assessment Results Based on Board of Directors KPIs

KPI Kolegal Direksi

Board of Directors Collegial KPIs

NO	ASPEK PENILAIAN ASSESSMENT ASPECTS	PERSENTASE CAPAIAN PERCENTAGE OF ACHIEVEMENT	DIRUT	DIRKEU	DIRKOM	DIROPTK
1	EBITDA	104%	V	V		
2	Pendapatan Revenue	104%	V	V	V	
3	Average Collection Period Average Collection Period	106%	V	V		
4	BOPO BOPO	101%	V	V		
5	Net Profit Margin Net Profit Margin	116%			V	
6	Penambahan Market Share Market Share Addition	500%			V	
7	Produktivitas Bongkar Muat (U/S/H) Loading and Unloading Productivity (U/S/H)	143%			V	V
8	Utilisasi Lapangan (YOR) Field Utilization (YOR)	130%				V
9	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	71%		V		V
10	Implementasi GCG GCG Implementation	140%	V			
11	Implementasi Program TJSL TJSL Program Implementation	104%	V			
12	Anorganik Growth pada Bisnis Pendukung Inorganic Growth in Supporting Business	200%			V	
13	Ekspansi Bisnis Terminal di luar Wilayah IKT Terminal Business Expansion outside IKT Region	200%			V	
14	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	101%	V		V	
15	Digitalisasi Aktivitas Operasional Digitalization of Operational Activities	100%				V
16	Digitalisasi Teknologi Administrasi Kantor Digitalization of Office Administration Technology	100%				V
17	Implementasi HSSE HSSE Implementation	100%				V
18	Penyerapan Investasi (Capex) : Penyerapan Program Investment Absorption (Capex): Program Absorption	125%	V			V
19	Penyerapan Investasi (Capex) : Penyerapan Fisik Investment Absorption (Capex): Physical Absorption	108%				V
20	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	125%		V		
21	High Potential dan Promotable Talent High Potential and Promotable Talent	200%		V		
22	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Innovation Idea Implementations	100%			V	
23	Peningkatan Kompetensi Pegawai Employee Competency Improvement	103%		V		
JUMLAH PERSENTASE TOTAL PERCENTAGE		110,62%	114,25%	183%	109,62%	-



KPI Individual Direksi

Board of Directors Individual KPIs

NO	NAMA DIREKSI NAME OF BOARD OF DIRECTORS	TARGET ACHIEVEMENT					KAPASITAS PEMENUHAN KOMPETENSI COMPETENCY FULFILLMENT CAPACITY					LEARNING AGILITY					BEHAVIOR/ PERILAKU					HASIL KATEGORISASI PENILAIAN ASSESSMENT CATEGORIZATION RESULTS
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	SUGENG MULYADI (01 Januari - 31 Desember 2024) (January 01 - December 31, 2024)				V						V					V					V	SANGAT BAIK VERY GOOD
2	BAGUS DWIPOYONO (01 Januari - 31 Desember 2024) (January 01 - December 31, 2024)				V						V				V						V	SANGAT BAIK VERY GOOD
3	WING MEGANTORO (01 Januari - 31 Desember 2024) (January 01 - December 31, 2024)				V					V					V						V	SANGAT BAIK VERY GOOD

Note:
(Kurang) | (Poor)
(Cukup) | (Fair)
(Baik) | (Good)
(Sangat Baik) | (Very Good)
(Istimewa) | (Excellent)

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham di dalam RUPS untuk mendapatkan *acquit de charge*. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan pelaksanaan tugas kewajiban yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Pedoman Kerja, dan amanat Pemegang Saham.

Indikator/Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan;
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG;
4. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris;
5. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan; dan
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara self-assessment. Hasil penilaian kinerja secara mandiri tersebut selanjutnya disampaikan dan dipertanggungjawabkan serta dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat pemegang saham.

Board of Commissioners Performance Assessment

Assessment Procedure

Board of Commissioners presents and accounts for its performance to Shareholders in the GMS to obtain *acquit de charge*. The performance assessment of Board of Commissioners is determined based on the implementation of duties and obligations as stated in the Articles of Association, Work Guidelines, and Shareholders' mandate.

Indicators/Assessment Criteria

The performance assessment of Board of Commissioners is carried out by considering the following indicators:

1. Contribution to the Company's performance achievements;
2. Punctuality in delivering opinions and suggestions which are the obligation of Board of Commissioners;
3. Contribution to the GCG implementation;
4. Attendance level of members of Board of Commissioners;
5. Supervision and direction of Board of Directors regarding the Company's plans and policies; and
6. Effectiveness of the Board of Commissioners' supporting activities.

Assessor for Performance Assessment of Board of Commissioners

The performance assessment of Board of Commissioners is carried out by self-assessment. The results of independent performance assessment are then submitted and accounted for and evaluated by shareholders at the GMS. The performance of Board of Commissioners is determined based on the implementation of duties and obligations as stated in the applicable laws and regulations and the Articles of Association as well as the mandate of shareholders.



Hasil penilaian dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara kolegal maupun individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari skema remunerasi dan kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris serta pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dasar kebijakan terkait prosedur nominasi dan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Surat Keputusan Direksi IPCC No. HK.56/2/12/IKT-19 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penghasilan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
5. Keputusan RUPS PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah terhadap pedoman dan tata cara pengangkatan Direksi dan Komisaris. Setelah itu, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan hasil kajiannya dan memberikan rekomendasi mengenai usulan calon *talent pool* kepada Dewan Komisaris. Usulan tersebut kemudian ditinjau kembali oleh Dewan Komisaris dan dijadikan bahan usulan penetapan calon Direksi dan Komisaris dalam RUPS LB.

Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemilihan Ulang Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan Direksi dilakukan setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

Anggota Direksi diangkat untuk satu periode masa jabatan dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. RUPS memiliki hak untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya

The results of assessment and evaluation of Board of Commissioners' performance, both collegially and individually, are an integral part of the remuneration and compensation scheme for members of Board of Commissioners as well as a consideration for shareholders to dismiss and/or reappoint the Board of Commissioners concerned.

NOMINATION AND REMUNERATION POLICY FOR BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The basis of policies regarding nomination and remuneration procedures for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning the Minister of State-Owned Enterprises Regulation on Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.
3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.
4. IPCC Board of Directors' Decree No. HK.56/2/12/IKT-19 dated June 21, 2019 concerning Income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
5. The GMS Resolution of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Board of Directors and Board of Commissioners Nomination

Board of Directors Nomination Procedure

Nomination and Remuneration Committee reviews the guidelines and procedures for appointing Board of Directors and Board of Commissioners. After that, Nomination and Remuneration Committee submits the review results and provides recommendations regarding the proposed talent pool to Board of Commissioners. The proposal is then reviewed by the Board of Commissioners and used as material for a proposal to determine candidates for Board of Directors and Board of Commissioners at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Procedures for Appointment, Dismissal and Re-Appointment of Board of Directors

Members of Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. The Board of Directors appointment is carried out after going through a fit and proper test process in accordance with applicable laws and regulations and GCG principles.

Members of Board of Directors are appointed for one term of office and can be reappointed in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The maximum term of office for a member of Board of Directors is 5 (five) years or until the closing of the annual GMS at the end of 1 (one) term of office in question. The GMS has the right to dismiss members of Board of Directors at any time before their term of office ends, considering

berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Prosedur Pengangkatan Dewan Komisaris

Pengangkatan dan proses pengangkatan seorang calon anggota Dewan Komisaris merupakan wewenang Pemegang Saham. Setiap calon anggota Dewan Komisaris akan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Pemberian Remunerasi

Atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dan Direksi berhak mendapatkan remunerasi yang layak sebagai imbal jasa atas pelaksanaan tugas dan kontribusinya terhadap kemajuan Perseroan. Remunerasi tersebut bisa berupa tetap maupun variabel.

Terkait hal ini, Perseroan telah menetapkan kebijakan, skema, prosedur, hingga besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang formulanya berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tengah pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, Perseroan melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi yang diterapkan di Perseroan supaya tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Perseroan serta ketentuan regulator yang berlaku.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Indikator penetapan remunerasi Direksi yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham, ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau kontrak Manajemen Direksi sebagai salah satu ukuran untuk menilai kinerja Direksi.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dimulai dari proses kajian dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai *best practice* kebijakan dan standar remunerasi untuk jabatan tertentu

the provisions of Articles of Association. The appointment and dismissal of Board of Directors is carried out based on the principles of professionalism and Good Corporate Governance.

Appointment Procedure for Board of Commissioners

The appointment and appointment process of a prospective member of Board of Commissioners is the Shareholders' authority. Each prospective member of Board of Commissioners will undergo a fit and proper test process organized by the Shareholders/GMS/Capital Owners with reference to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning the Minister of State-Owned Enterprises Regulation on Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

Remuneration Policy

For the implementation of its duties and functions, Board of Commissioners and Board of Directors have the right to receive appropriate remuneration as compensation for carrying out their duties and contributing to the progress of the Company. The remuneration can be fixed or variable.

In this regard, the Company has established policies, schemes, procedures, and amount of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors, the formulation of which is based on the precautionary principle and refers to applicable laws and regulations.

In the midst of an increasingly competitive labor market, the Company conducts periodic reviews of the remuneration policy implemented in the Company so that it remains in line with industry developments, the Company's strategy, and applicable regulatory provisions.

INDICATORS FOR DETERMINING BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

The indicators for determining the remuneration for Board of Directors that have been determined by the Shareholders are determined by considering the achievement of Key Performance Indicators (KPI) or Board of Directors Management contracts as one of the measures for assessing the performance of Board of Directors.

Remuneration Determination Procedure

The procedure for determining the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors starts from the review and information gathering process carried out by the Nomination and Remuneration Committee regarding best practice policies and



pada perusahaan sejenis di pasaran (minimal sesama perusahaan yang berada dalam Pelindo Group) dengan landasan remunerasi yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dan diberlakukan di Perseroan, tentunya dengan memperhitungkan kinerja Perseroan serta mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Tahap selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyampaikan hasil kajian tersebut dan memberikan rekomendasi atas besaran dan struktur remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk ditinjau kembali dan dijadikan sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham di dalam RUPS Tahunan.

remuneration standards for certain positions in similar companies in the market (at least fellow companies within Pelindo Group) with a remuneration basis that is determined by the Shareholders and implemented in the Company, of course considering the Company's performance and considering the Company's long-term targets and strategies.

In the next stage, Nomination and Remuneration Committee will submit the review results and provide recommendations on the amount and structure of remuneration for Board of Commissioners to review and be used as material for remuneration determination proposal to Shareholders in the Annual GMS.



Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa mempertimbangkan remunerasi yang berlaku di industri perusahaan pelabuhan dengan kegiatan dan skala usaha yang sejenis dengan Perseroan, minimal sesama perusahaan yang berada dalam Pelindo Group. Kriteria atau indikator yang dimaksud, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
2. Pencapaian target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
5. Prestasi kerja kolektif dan individual;
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

The structuring, policies, and amount of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors always consider the remuneration applicable in the port company industry with similar activities and scale of business to the Company, at least among companies in Pelindo Group. The criteria or indicators in question include:

1. The implementation of duties, responsibilities and authority of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners is linked to the achievement of the Company's objectives and performance;
2. The achievement of performance targets or performance of each member of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners;
3. Balance of allowances between fixed and variable;
4. Financial performance and fulfillment of the Company's obligations as regulated in applicable regulations;
5. Collective and individual work achievements;
6. Consideration of the Company's long-term targets and strategies.



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2024, Pemegang Saham melalui RUPS telah menetapkan bahwa Perseroan berkewajiban untuk memberikan paket remunerasi dan fasilitas kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	√	√
2	Tunjangan Allowance		
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance		√
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	√	√
	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	√	√
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	√	
	Tunjangan Pakaian Dinas Official Uniform Allowance	√	√
3	Fasilitas Facilities		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities		√
	Fasilitas Club Membership Club Membership Facilities		√
	Fasilitas Perjalanan Dinas/Pelatihan Official Travel/Training Facilities	√	√
	Fasilitas Kesehatan Health Care Facilities	√	√
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Support Facility	√	√
	Fasilitas Keanggotaan Profesi Professional Membership Facilities	√	√
	Fasilitas Kartu Kredit Credit Card Facilities		√
4	Fasilitas Lainnya Other Facilities		
	Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives	√	√

Remuneration Structure for Board of Commissioners and Board of Directors

In 2024, Shareholders through the GMS have determined that the Company is obliged to provide remuneration package and facilities to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

Jumlah Remunerasi dan Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan kewajiban untuk memberikan remunerasi kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan uraian sebagai berikut:

Total Remuneration and Tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

In 2024, the Company has undertaken the obligation to provide remuneration to each member of Board of Commissioners and Board of Directors, with the following description:



Tabel Remunerasi Bulanan Dewan Komisaris Tahun 2024

Monthly Remuneration for Board of Commissioners in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan 2024 Term of Office in 2024	Honorarium (Rp)	Tunjangan dan Fasilitas (Rp) Allowances and Facilities	Take-Home Pay per Bulan (Rp) Take-Home Pay per Month
Drajat Sulistyio	Komisaris Utama President Commissioner	Januari- Desember January – December	Rp36.000.000	tidak ada None	Rp36.000.000
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Januari- Desember January – December	Rp32.400.000	Rp6.480.000	Rp38.880.000
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Januari- Desember January – December	Rp32.400.000	Rp6.480.000	Rp38.880.000

Tabel Remunerasi Bulanan Direksi Tahun 2024

Monthly Remuneration for Board of Directors in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan 2024 Term of Office in 2024	Honorarium (Rp)	Tunjangan dan Fasilitas (Rp) Allowances and Facilities	Take-Home Pay per Bulan (Rp) Take-Home Pay per Month
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt. Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	Januari-Desember January – December	Rp80.000.000	Rp20.000.000	Rp100.000.000
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Januari- Desember January – December	Rp68.000.000	Rp20.000.000	Rp88.000.000
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Januari- Desember January – December	Rp68.000.000	Rp20.000.000	Rp88.000.000

Sedangkan untuk tantiem yang menjadi hak Direksi, Perseroan telah memberikannya di tahun 2024 dengan jumlah total Rp1.004.506.337,- untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Meanwhile, for tantiem which are the rights of Board of Directors, the Company has provided them in 2024 with a total amount of Rp1.004.506.337 for all members of the Company's Board of Directors.

Dari pengungkapan informasi tentang remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diungkap di atas, maka dapat diketahui total nilai remunerasi dalam basis perhitungan tahunan. Uraian lebih rinci terkait pengelompokan jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi per tahun untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

From the disclosure of information regarding the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors as stated above, the total value of remuneration on an annual basis can be determined. A more detailed breakdown of total remuneration paid to members of Board of Commissioners and Board of Directors per year over the past three (3) years can be seen in the following table:



Tabel Total Remunerasi Tahunan Dewan Komisaris dan Direksi
Total Annual Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

Total Remunerasi (per Orang per Tahun) Total Remuneration (per Person per Year)	Jumlah Dewan Komisaris Amount of Board of Commissioners		Jumlah Direksi Amount of Board of Directors	
	2024	2023	2024	2023
Di atas Rp2 miliar More than Rp2 billion	-	-	-	-
Di atas Rp1 miliar hingga Rp2 miliar More than Rp1 billion to Rp2 billion	-	-	3	3
Di atas Rp500 juta hingga Rp1 miliar More than Rp500 million to Rp1 billion	-	2	-	-
Di bawah Rp500 juta Below Rp500 million	3	1	-	-

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja, dan/atau Opsi Saham

Pembagian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi sudah diatur dalam SK No. HK.56/2/12/IKT-19 tentang Penghasilan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan mempertimbangkan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

Namun demikian, sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki kebijakan *shares option* atau penawaran opsi saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan.

Rasio Gaji Karyawan Tertinggi dan Terendah

Informasi di bawah ini menjelaskan rasio perbandingan gaji, yang meliputi kompensasi yang diterima per bulan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap di Perseroan.

Disclosure of Performance Bonus, Non-Performance Bonus, and/or Stock Option

The distribution of bonus to Board of Commissioners and Board of Directors is regulated in Decree No. HK.56/2/12/IKT19 concerning Income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk by taking into account the performance of Board of Commissioners and Board of Directors and paying attention to the Company's financial capabilities.

However, to date, the Company does not have a stock option policy for members of Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers of the Company.

Ratio of Highest and Lowest Employee Salaries

The information below explains the salary comparison ratio, which includes compensation received per month by members of Board of Commissioners, Board of Directors and permanent employees in the Company

Rasio Gaji Salary Ratio	Rasio Ratio	
	2024	2023
Rasio Gaji Karyawan Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Employee Salary	1:2,6	1:2,6
Rasio Gaji Anggota Direksi Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Salary for Members of Board of Directors	1: 1,6	1: 1,6
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Salary for Members of Board of Commissioners	1: 1,6	1: 1,6
Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi dan Karyawan Tertinggi Ratio of Highest Salary for Members of Board of Directors and Highest Salary for Employees	1:1,3	1:1,3



RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

- 1.a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (sah satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diatas dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 3 diatas ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1.b dan nomor 3 diatas ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor 5 diatas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Board of Commissioners Meeting Policy

- 1.a. The Board of Commissioners meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of Board of Commissioners or at the written request of Board of Directors or at the request of 1 (one) or more Shareholders jointly owning 1/10 (one tenth) or more of the total all shares that have been placed by the Company with valid voting rights.
- b. Board of Commissioners is required to hold meetings at least 1 (one) every 2 (two) months.
2. The Board of Commissioners meeting as referred to in number 1 above can be held, is valid and has the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of members of Board of Commissioners present or represented at the Meeting.
3. Board of Commissioners shall hold meetings with Board of Directors periodically at least once in 4 (four) months.
4. The attendance of members of Board of Commissioners at the meetings as referred to in numbers 1 and 3 above must be disclosed in the Company's annual report.
5. Board of Commissioners must schedule the meeting as referred to in number 1.b and number 3 above for the following year before the end of the Fiscal Year.
6. At the meeting that has been scheduled as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the meeting participants no later than before the meeting is held.
8. Summons for Board of Commissioners Meetings are carried out by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, 1 (one) member of Board of Commissioners appointed by the President Commissioner has the right and authority to summon a Board of Commissioners Meeting.
9. Summons for Board of Commissioners Meetings are sent by any means in written form, which summons must be sent to members of Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held or within a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) calendar day before the Meeting without considering the summons date and the Meeting date, the urgent situation is determined by the President Commissioner. If all members of Board of Commissioners are present at the Meeting, prior summons is not required.
10. Summon to the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.



11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- 14.a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihak harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada nomor 15 diatas ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1h (satu per dua) dari anggota.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 diatas ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
11. The Board of Commissioners meetings are held at the Company's domicile or place of business activities or at the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at any other place provided it is within the territory of the Republic of Indonesia.
12. The Board of Commissioners meeting is chaired by President Commissioner, if the President Commissioner is not present or is unable to attend the Meeting, which does not need to be proven to a third party, then the Meeting is chaired by one of the selected members of Board of Commissioners and from the members of Board of Commissioners who are present at the Meeting
13. A member of Board of Commissioners can only be represented at a Board of Commissioners Meeting by another member of Board of Commissioners based on a power of attorney.
- 14.a. Each member of Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) and an additional 1 (one) vote for each other member of Board of Commissioners he represents. Every member of Board of Commissioners who personally, in any way, either directly or indirectly, has an interest in a proposed transaction or contract in which the Company is a party must declare the nature of the interest at a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in voting on matters relating to transactions or contracts.
- b. Voting regarding individuals is carried out using a closed ballot without a signature, while voting regarding other matters is carried out orally unless the Chairman of Meeting determines otherwise without any objection from those present.
15. Decision making at Board of Commissioners Meetings must be taken based on deliberation to reach consensus.
16. In the event that a consensus deliberation decision is not reached as referred to in number 15 above, the decision is made based on a majority vote, namely approved by more than 1 hour (one half) of the members.
17. The meeting results as referred to in number 1 above must be stated in the meeting minutes, signed by all members of Board of Commissioners present, and submitted to all members of Board of Commissioners.
18. The meeting results as referred to in number 3 above must be stated in the meeting minutes, signed by members of Board of Commissioners and members of Board of Directors who are present, and submitted to all members of Board of Commissioners and members of Board of Directors.
19. In the event that there are members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who do not sign the meeting results as referred to in numbers 17 and 18 above, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the meeting minutes.
20. Minutes of meetings as referred to in numbers 17 and 18 above must be documented by the Company.



21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 diatas ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

21. Minutes of meetings as referred to in numbers 17 and 18 above are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Commissioners Meeting, both for members of Board of Commissioners and for third parties.

22. Board of Commissioners can also take legal and binding decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of Board of Commissioners have been notified in writing about the proposals in question and all members of Board of Commissioners have given their approval regarding the proposals submitted in writing, and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at a Board of Commissioners Meeting.

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Board of Commissioners Internal Meeting Agenda

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	DK/15/01/02/ IPCC-24	29 Januari 2024 January 29, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Desember 2023; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until December 2023 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
2	DK/15/02/02/ IPCC-24	22 Februari 2024 February 22, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan Januari 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until January 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
3	DK/22/03/02/ IPCC-24	26 Maret 2024 March 26, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Februari 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until February 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
4	DK/17/04/02/ IPCC-24	26 April 2024 April 26, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Maret 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until March 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
5	DK/21/06/01/ IPCC-24	Mei 2024 May 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d April 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until April 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners



No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
6	DK/28/05/01/ IPCC-24	Juni 2024 June 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Mei 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until May 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
7	DK/17/07/2/ IPCC-24	22 Juli 2024 July 22, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Juni 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until Juni 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
8	DK/22/08/02/ IPCC-2	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Juli 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until July 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
9	DK/23/09/02/ IPCC-24	25 September 2024 September 25, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Agustus 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until August 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
10	DK/29/10/02/ IPCC-24	31 Oktober 2024 October 31, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan s.d September 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BoC&BoD meeting decisions 2. Company performance reports until September 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
11	DK/21/11/01/ IPCC-24	22 November 2024 November 22, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Oktober 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until October 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners
12	DK/24/12/01/ IPCC-24	30 Desember 2024 December 30, 2024	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakom Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d November 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until December 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners



Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Rapat Gabungan

Selain wajib menyelenggarakan rapat internal secara berkala, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat yang mengundang kehadiran Direksi. Sesuai Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

Joint Meeting Policy

Apart from being obliged to hold regular internal meetings, Board of Commissioners also holds meetings which invite the attendance of Board of Directors. In accordance with the Working Procedures for Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors, Board of Commissioners is required to hold regular meetings with Board of Directors at least once every 4 (four) months.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
 Agenda for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

No	Nomor Undangan Invitation Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris) Meeting Participants (Attendance of Board of Commissioners)	Peserta Rapat (Kehadiran Direksi) Meeting Participants (Attendance of Board of Directors)
1	DK/15/01/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Laporan Kinerja Perseroan s.d Desember 2023; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until December 2023 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
2	DK/15/02/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Laporan Kinerja Perseroan Januari 2024 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until January 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
3	DK/22/03/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Februari 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until February 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
4	DK/17/04/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Maret 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until March 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
5	DK/21/06/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d April 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until April 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors



Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

No	Nomor Undangan Invitation Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris) Meeting Participants (Attendance of Board of Commissioners)	Peserta Rapat (Kehadiran Direksi) Meeting Participants (Attendance of Board of Directors)
6	DK/28/05/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Mei 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until May 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
7	DK/17/07/1/IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Juni 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until June 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
8	DK/22/08/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Juli 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until July 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
9	DK/23/09/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Agustus 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until August 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
10	DK/29/10/01/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d September 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until September 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
11	DK/21/11/02/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d Oktober 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until October 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors



Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

No	Nomor Undangan Invitation Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris) Meeting Participants (Attendance of Board of Commissioners)	Peserta Rapat (Kehadiran Direksi) Meeting Participants (Attendance of Board of Directors)
12	DK/24/12/02/ IPCC-24	Pembahasan: 1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan Rakomdir Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Perseroan s.d November 2024; 3. Hal-hal strategis lainnya. Discussion: 1. Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions 2. Company performance reports until November 2024 3. Other strategic matters	Dewan Komisaris Organ Pendukung Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs Secretary of Board of Commissioners	Direksi Board of Directors

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi, dan RUPS

Frequency and Attendance of Board of Commissioners at Board of Commissioners Internal Meetings, Meetings with Board of Directors and GMS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors			RUPS GMS		
		Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level
1	Drajat Sulistyio (Komisaris Utama) (President Commissioner)	100%	12	100%	12	12	100%	1	1	100%
2	Abdur Rahim Hasan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	12	12	100%	12	12	100%	1	1	100%
3	LM Arya Bima Yudiantara (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	12	12	100%	12	12	100%	1	1	100%



RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

- Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dapat dilangsungkan dan sah berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
- Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 3 di atas ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 di atas ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
- Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Board of Directors Meeting Policy

- A Board of Directors Meeting can be held at any time if:
 - Deemed necessary by one or more members of Board of Directors;
 - Upon written request from one or more members of Board of Commissioners; or
 - At the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
- Board of Directors is obliged to hold regular the Board of Directors meetings at least 1 (one) time every month and Board of Directors is obliged to hold regular joint meetings of Board of Directors with Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- The Board of Directors meeting as referred to in number 2 can be held and legally has the right to make binding decisions if attended by 1/2 (one half) of the total number of members of Board of Directors present or represented at the Meeting.
- The attendance of members of Board of Directors at the meeting as referred to in number 3 above must be disclosed in the Company's annual report.
- Board of Directors must schedule the meeting as referred to in number 2 above for the following year before the end of the Fiscal Year.
- At the scheduled meeting as referred to in number 2, the meeting materials are delivered to the participants no later than 5 (five) calendar days before the meeting is held.
- In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the meeting participants no later than before the meeting is held. Summons for Board of Directors Meetings are made by members of Board of Directors who have the right to represent the Board of Directors.
- Summons for the Board of Directors Meetings must be submitted by any means in written form to each member of Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, without considering the Summons and the Meeting date. If all members of Board of Directors are present or represented, Summons must be given first. This is not required and the Board of Directors Meeting has the right to make legal and binding decisions.
- The Summons must include the Meeting agenda, date, time and place of the Meeting.
- The Board of Directors meetings are held at the Company's domicile or place of business activities or at the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia.



11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan- keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
11. The Board of Directors Meeting is chaired by President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Board of Directors Meeting for any reason, which does not need to be proven to third parties, one of members of Board of Directors who is present and elected at the Board of Directors Meeting may chair the Board of Directors Meeting.
12. A member of Board of Directors may be represented at a Board of Directors Meeting only by another member of Board of Directors based on a power of attorney
13.
 - a. Each member of Board of Directors present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) votes for each other member of Board of Directors whom he represents.
 - b. Every member of Board of Directors personally in any way, either directly or indirectly have an interest in a transaction, contract or agreement proposed, in which the Company is one of the parties must state the nature interests in a Board of Directors Meeting and is not entitled to participate in voting regarding matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Directors Meeting determines otherwise.
14. Decision making at the Board of Directors Meeting as referred to in number 1 above is carried out based on deliberation and consensus.
15. In the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is made based on a majority vote, i.e. approved by more than 1/2 (one half) of members of Board of Directors present.
16. Differences of opinion (*dissenting opinions*) that occur in the decisions of the Board of Directors Meeting must be stated clearly in the minutes of Board of Directors meeting accompanied by the reasons for the dissenting opinions.
17. The meeting results as referred to in number 1 above must be stated in the minutes of meeting, signed by all members of Board of Directors present, and submitted to all members of Board of Directors.
18. The meeting results as referred to in number 3 above must be stated in the minutes of meeting, signed by members of Board of Directors and members of Board of Commissioners who are present, and submitted to all members the Board of Directors and Board of Commissioners.
19. In the event that there are members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners who do not sign the results of meeting as referred to in numbers 17 and 18 above, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.
20. Minutes of Board of Directors' meetings as referred to in numbers 17 and 18 above must be documented by the Company.
21. Minutes of Board of Directors' Meetings are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Directors' Meeting, both for members of Board of Directors and for third parties.



22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

22. Board of Directors can also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of Board of Directors have been notified in writing about the proposals in question and all members of Board of Directors have given their approval regarding the proposals submitted in writing and signed the approval. Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at the Meeting.
23. The Board of Directors meetings can also be conducted via teleconference, video conference, or other electronic media which allows all participants in the Board of Directors' Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors' Meeting, provided that the minutes of Meeting are made using telephone conference, or similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of Board of Directors Meeting who participate in the meeting, to be signed. Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at a Board of Directors Meeting.
24. Provisions regarding the Board of Directors Meetings that have not been regulated in these articles of association refer to OJK Regulations and other applicable laws and regulations.

Agenda Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2024, Rapat Direksi membahas agenda-agenda, antara lain sesuai di bawah ini.

Board of Directors Meeting Agenda

Throughout 2024, the Board of Directors Meeting discussed the following agendas.

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	SK.02/31/1/1/SKPR/DIRUT/IKT-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	1. Tindak lanjut Radir sebelumnya 2. Pending matters per Divisi 3. Performance Tahun 2023 4. Program Divisi Tahun 2024 5. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
2	SK.02/31/1/2/SKPR/DIRUT/IKT-24	19 Januari 2024 January 19, 2024	1. Tindak lanjut Radir sebelumnya 2. Update Pending matter 3. Sosialisasi Program Efisiensi 2024 4. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
3	SK.02/31/1/3/SKPR/DIRUT/IKT-24	25 Januari 2025 January 25, 2025	1. Tindak lanjut Radir sebelumnya 2. Dampak Overspray dan penanganannya 3. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
4	SK.02/13/2/1/SKPR/DIRUT/IKT-24	13 Februari 2024 February 13, 2024	1. Tindak lanjut Radir sebelumnya 2. Pending Matters per Divisi 3. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro



No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
5	SK.02/23/2/1/SKPR/SKPR/IKT-24	26 Februari 2024 February 26, 2024	1. Tindak lanjut Radir sebelumnya 2. Penataan Kebutuhan SDM dan Operasi 3. Hal hal strategis lainnya 1. Follow up on previous BoD meeting; 2. Organization of HC and Operations Needs 3. Other strategic matters	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
6	SK.02/19/3/1/SKPR/SKPR/IKT-24	19 Maret 2024 March 19, 2024	1. Tindak lanjut Radir sebelumnya 2. Penentuan tanggal dan mata acara RUPS Tahunan IPCC 2023 3. Laporan <i>progress</i> klaim asuransi <i>overspray</i> 4. Laporan tinjauan manajemen audit internal ISO37000:2016 5. Rencana usulan investasi 2025 6. Hal hal strategis lainnya 1. Follow up on previous BoD meeting; 2. Determination of IPCC 2023 Annual GMS date and agenda 3. Overspray insurance claim progress report 4. ISO37000:2016 internal audit management review report 5. 2025 investment proposal plan 6. Other strategic matters	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
7	SK.02/19/4/1/SKPR/SKPR/IKT-24	22 April 2024 April 22, 2024	1. <i>CEO Direction</i> 2. <i>Update performance</i> Perseroan capaian Maret 2024 3. <i>Pending matters</i> 4. Pembahasan materi Rakomdir 5. Hal hal strategis lainnya 1. CEO Direction 2. Update on Company Performance and Achievements on March 2024 3. Pending Matters 4. Discussion on BoC and BoD Meeting Materials 5. Other Strategic Matters	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
8	SK.02/21/6/1/SKPR/Dirut/IKT-24	13 Mei 2024 May 13, 2024	1. <i>CEO Direction</i> 2. Progress perizinan AMDAL pembangunan Car Storage Building 3. Progres program digitalisasi dan transformasi termasuk penataan SDM dan TAD 4. Laporan <i>progress</i> klaim asuransi <i>overspray</i> 5. Laporan kinerja s.d April 2024 6. Hal hal strategis lainnya 1. CEO Direction 2. Progress of AMDAL licensing for the Car Storage Building construction 3. Progress of digitization and transformation programs including HC and TAD structuring 4. Progress report on overspray insurance claims 5. Performance report until April 2024 6. Other strategic matters	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
9	SK.02/21/6/2/SKPR/Dirut/IKT-24	4 Juni 2024 June 4, 2024	1. <i>CEO Direction</i> 2. Tindak lanjut Radir sebelumnya 3. Hal hal strategis lainnya 1. CEO Direction 2. Follow up on previous BoD meeting; 3. Other strategic matters	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
10	SK.02/14/6/1/SKPR/Dirut/IKT-24	14 Juni 2024 June 14, 2024	1. <i>CEO Direction</i> 2. Pembahasan materi Rakomdir 3. Progress rencana likuidasi/divestasi MKO MTKI 4. Hal hal strategis lainnya 1. CEO Direction 2. Follow up on previous BoD meeting; 3. Progress of MKO MTKI liquidation/ divestment plan 4. Other strategic matters	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
11	SK.02/26/7/1/SKPR/Dirut/IKT-24	26 Juni 2024 June 26, 2024	1. Pembahasan selisih sisa dividen tunai tahun buku 2023 1. Discussion on the difference in remaining cash dividends for 2023 fiscal year	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro



No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
12	SK.02/12/2/1/SKPR/Dirut/IKT-24	9 Juli 2024 July 9, 2024	1. CEO <i>Direction</i> 2. Laporan kinerja operasional dan keuangan periode Juni 2024 3. Pembahasan rencana awal pengoperasian Terminal Roro dan penumpang (Lembar dan Banjarmasin) 4. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
13	SK.02/31/7/1/SKPR/SKPR/IKT-24	1 Agustus 2024 August 1, 2024	1. CEO <i>Direction</i> 2. Arahan Rakomdir sebelumnya 3. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
14	SK.02/13/8/1/SKPR/SKPR/IKT-24	14 Agustus 2024 August 14, 2024	1. CEO <i>Direction</i> 2. Timeline penyampaian data kinerja Perseroan 3. Kinerja Perseroan bulan Juli 2024 dan finalisasi materi Rakomdir 4. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
15	SK.02/6/9/1/KCSR/SKPR/IKT-24	9 September 2024 September 9, 2024	1. CEO <i>Direction</i> 2. Tindak lanjut Radir sebelumnya 3. Laporan kinerja operasional dan keuangan periode Agustus 2024 4. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
16	SK.02/19/9/1/SKPR/SKPR/IKT-24	20 September 2024 September 20, 2024	1. CEO <i>Direction</i> 2. Pembahasan arahan Dewan Komisaris pada Rakomdir sebelumnya 3. Tindak lanjut perbaikan gedung parkir Belawan 4. Ekspansi bisnis Terminal Satelit Banjarmasin 5. Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris atas <i>threshold</i> Perseroan 6. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
17	SK.02/7/10/1/SKPR/SKPR/IKT-24	8 Oktober 2024 October 8, 2024	1. Penyampaian kinerja Perseroan s.d September 2024 2. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
18	SK.02/20/11/1/SKPR/SKPR/IKT-24	21 November 2024 November 21, 2024	1. Rencana implementasi QCC di IPCC 2. Persiapan materi Rakomdir 3. Hal hal strategis lainnya	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro



No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
19	SK.02/17/12/1/SKPR/SKPR/IKT-24	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. Pelaporan hasil Audit Internal SMAP dan SMK3L IPCC Tahun 2024 2. Penyesuaian pedoman dan strategi risiko IPCC 2025 1. Reporting of SMAP and SMK3L IPCC Internal Audit results in 2024. 2. Adjustment of IPCC risk guidelines and strategy 2025	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro
20	PJ.03.06/24/12/1/DIROP/DIRUT/IKT-24	30 Desember 2024 December 30, 2024	1. Rencana relokasi Terminal Domestik PT ITK Tbk 1. Relocation plan for the Domestic Terminal of PT ITK Tbk	Sugeng Mulyadi Bagus Dwipoyono Wing Megantoro

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi pada Rapat Internal Direksi, Rapat dengan Dewan Komisaris dan RUPS

Frequency and Attendance of Board of Directors at Board of Directors Internal Meetings, Meetings with Board of Commissioners and GMS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors			RUPS GMS		
		Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level
1	Sugeng Mulyadi	21	21	100%	12	12	100%	1	1	100%
2	Bagus Dwipoyono	21	21	100%	12	12	100%	1	1	100%
3	Wing Megantoro	21	21	100%	12	12	100%	1	1	100%

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Independensi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan aspek penting dalam implementasi GCG di Perseroan. Salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain adalah hubungan afiliasi.

The independence of Board of Commissioners and Board of Directors is an important aspect in implementing GCG in the Company. One of the criteria used to measure the independence of Board of Commissioners and Board of Directors, among others, is the affiliation.

IPCC secara transparan mengungkapkan informasi tentang hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi Lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris Lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

IPCC transparently discloses information about the Affiliation of Board of Commissioners and Board of Directors which includes:

1. Affiliation between members of Board of Directors and other members of Board of Directors;
2. Affiliation between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners;
3. Affiliation between members of Board of Directors and Major and/or controlling Shareholders;
4. Affiliation between members of Board of Commissioners and other members of Board of Commissioners; and
5. Affiliation between members of Board of Commissioners and Major and/or controlling Shareholders.

Pada tabel pengungkapan hubungan afiliasi di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama/pengendali.

In the Affiliation disclosure table below, it can be seen that all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors have no family or financial relationships with members of Board of Commissioners, Board of Directors and major/controlling shareholders.

Tabel Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Family and Financial Relationship of Board of Commissioners with Members of Board of Directors and Major/Controlling Shareholders

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Drajat Sulisty	Komisaris Utama President Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director Concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

Pengungkapan Rangkap Jabatan Direksi

Disclosure of Board of Directors Concurrent Positions

Merujuk pada Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, maka anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang termasuk di antaranya:

Referring to Law No. 5 of 2009 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, article 26 concerning Concurrent Positions, members of the Company's Board of Directors do not hold concurrent positions in companies including:

1. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Perseroan;
2. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; dan
3. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

1. Be in the same relevant market as the Company;
2. Has a close relationship in the field and/or type of business; and
3. Together can control the market share of certain goods and/or services which can result in monopolistic practices and/or unfair business competition.

Informasi di bawah ini menjelaskan tentang rangkap jabatan Direksi Perseroan pada saat laporan Tahunan ini diungkapkan:

The information below explains the concurrent positions of the Company's Board of Directors at the time this Annual Report was disclosed:

Nama Name	Jabatan di IPCC Position at IPCC	Rangkap Jabatan di IPCC Concurrent Position at IPCC	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in other Companies/ Institution
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama President Director	Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Acting Director of Commercial and Business Development	Tidak ada None
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technical	Tidak ada None	Tidak ada None
Wing Megantoro	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Tidak ada None	Tidak ada None



Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan Pasal 26 yang membahas mengenai Jabatan Rangkap, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang termasuk di antaranya: (1) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Perusahaan; (2) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; dan (3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun jabatan lain yang dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Concurrent Position

Referring to Law Number 5 of 2009, concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, related to Article 26 which discusses Concurrent Positions, all members of the Company's Board of Commissioners do not hold concurrent positions in the Company including: (1) Being in the same relevant market as the Company; (2) Has a close connection in the field and/or type of business; and (3) Together can control the market share of certain goods and/or services which could result in monopolistic practices and/or unfair business competition.

The other positions held by the Company's Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan di IPCC Position at IPCC	Rangkap Jabatan di IPCC Concurrent Position at IPCC	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in other Companies/ Institution
Drajat Sulistyio	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada None	Executive Director Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Executive Director of Region 2 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Ketua Komite Audit 2. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Chairman of Audit 2. Chairman of Nomination and Remuneration	Tidak ada None
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko 2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Chairman of Risk Management Monitoring Committee 2. Member of Nomination and Remuneration Committee	Tidak ada none

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Perseroan dan atau pihak terkait dengan Perseroan, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan Perseroan dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Perseroan.

MANAGEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS CONFLICTS OF INTEREST

In the event of a conflict of interest, members of Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officials of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk are prohibited from taking actions that could harm the Company or reduce the Company's profits and are required to disclose the conflict of interest in each decision. The conflict of interest referred to includes, among other things, differences between the interests of the Company and personal interests of the owners, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors and Executive Officials of the Company and/or parties related to the Company, giving preferential treatment to certain parties outside the applicable procedures and provisions. If a decision still has to be taken, it must prioritize the interests of the Company and avoid losses or reduction in the Company's profits.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS



Dewan Komisaris IPCC didukung oleh 3 (tiga) komite, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Berikut uraian terperinci mengenai profil, tanggung jawab, serta pelaksanaan tugas komite pendukung Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024.

IPCC Board of Commissioners is supported by 3 (three) committees, namely Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The following is a detailed description of profiles, responsibilities, and the implementation of duties of Board of Commissioners' supporting committees throughout 2024.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh seorang staf pegawai Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris IPCC saat ini dijabat oleh Sdri. Dian Vegawati yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris IPCC No. KEP-DK/30/04/04/IPCC-24 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk or IPCC is appointed and reports directly to Board of Commissioners, assisted by a staff member of Board of Commissioners Secretariat. Secretary of Board of Commissioners of IPCC is currently held by Dian Vegawati who was appointed based on IPCC Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/30/04/04/IPCC-24 dated April 30, 2024 concerning Appointment of Secretary of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.



Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners Profile



Dian Vegawati

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners Profile

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun, berdomisili di Jakarta. Indonesian citizen, 47 years old, domiciled in Jakarta.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris IPCC No. KEP-DK/30/04/04/IPCC-24 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. IPCC Board of Commissioners' Decree No. KEP-DK/30/04/04/IPCC-24 dated April 30, 2024, concerning Appointment of Secretary of Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Riwayat Pendidikan Educational Background	- S1, Sarjana Ilmu Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia (2000-2005) - Master Shipping and Transport Netherlands Maritime University, Rotterdam, Netherlands (2010-2012) - Bachelor of Psychology, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia (2000-2005) - Master Shipping and Transport Netherlands Maritime University, Rotterdam, Netherlands (2010-2012)
Sertifikasi Certification	- Remuneration Management, PPM Manajemen, 2021 - HR Director Summit, Pertamina Training Center, Jakarta, 2020 - Certified of Corporate Performance Excellence (adopted by Malcolm Baldrige) Assessor, 2016-2019 - Remuneration Management, PPM Management, 2021 - HR Director Summit, Pertamina Training Center, Jakarta, 2020 - Certified of Corporate Performance Excellence (adopted by Malcolm Baldrige) Assessor, 2016-2019
Riwayat Karier Work Experience	- Kepala Divisi Human Resource Service & General Affair PT Pelabuhan Indonesia (Persero) – Regional 2 Head Office (2023 – Feb 2025) - Senior Manager Human Resource & General Affair PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Multipurpose – Head Office (2021 – 2023) - Deputy VP of Talent Management PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) – Head Office (2019 – 2020) - Head of Human Resource Service & General Affair Division PT Pelabuhan Indonesia (Persero) – Regional 2 Head Office (2023 – Feb 2025) - Senior Manager of Human Resource & General Affair PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Multipurpose – Head Office (2021 – 2023) - Deputy VP of Talent Management PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) – Head Office (2019 – 2020)

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk undangan rapat dan bahan rapat yang disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan pihak lain yang diundang.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
4. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya.
5. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun rancangan laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Duties and Responsibilities

Secretary of Board of Commissioners is tasked with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties, including:

1. Prepare meetings, including meeting invitations and meeting materials which are submitted to the entire Board of Commissioners and other invited parties.
2. Prepare minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. Provide data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners.
4. Administer Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
5. Prepare a draft work plan and budget for Board of Commissioners.
6. Prepare a draft report for Board of Commissioners.
7. Ensure the Board of Commissioners complies with statutory regulations and implements GCG principles.
8. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested.



9. Mengoordinasikan anggota Komite Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

9. Coordinate members of Board of Commissioners Committee, if necessary in order to expedite the Board of Commissioners duties.
10. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Pendidikan/Pelatihan dan Pengembangan Sekretaris Dewan Komisaris

Education/Training and Development of Secretary of Board of Commissioners

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Pelatihan dan Sertifikasi Corporate Culture Specialist PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Corporate Culture Specialist Training and Certification of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	- Pengawasan & Evaluasi Pembangunan Budaya - Tips Implementasi budaya Organisasi dengan efektif dan fun - Strategi Komunikasi - Monitoring & Evaluation of Cultural Development - Tips for Implementing Organizational Culture Effectively and Fun - Communication Strategy	14 Maret 2024 March 14, 2024	ESQ Group & PT PMLI
Leaders Role In Culture Transformation	- Corporate Culture for Leader - Meeting Effectiveness	24 April 2024 April 24, 2024	PT PMLI
Financial OK, Management OK	- Memahami pengelolaan keuangan - Memahami produk investasi yang tepat - Understand financial management - Understand the right investment products	03 Juli 2024 July 03, 2024	PT PMLI
Pelatihan Approver 1 & Approver 2 Modul Culture Management System (CMS) pada Aplikasi PORTAVERSE Approver 1 & Approver 2 Training Culture Management System (CMS) Module on PORTAVERSE Application	Culture Management System (CMS)	28 Agustus 2024 August 28, 2024	PT PMLI
Pelatihan Awareness ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 22301:2019, 27001:2022, ISO 45001:2018 Awareness Training ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 22301:2019, 27001:2022, ISO 45001:2018	- ISO 37001:2016 - ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 22301:2019 - ISO 27001:2022	03 September 2024 September 03, 2024	PT PMLI

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2024:

Sejak awal hingga akhir tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan perannya dalam membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
2. Koordinasi dengan Direksi dan Komite Pendukung
3. Pemantauan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan
4. Pelaporan dan Dokumentasi
5. Fasilitasi Program Pengembangan dan Pelatihan
6. Pengelolaan Administrasi
7. Menghadiri Acara dan Forum Resmi

Implementation of Secretary of Board of Commissioners Duties in 2024:

From the beginning to the end of 2024, Secretary of Board of Commissioners has carried out various activities in accordance with its role in assisting the smooth running of the Board of Commissioners' duties, including:

1. Organizing Board of Commissioners Meetings
2. Coordination with the Board of Directors and Supporting Committees
3. Monitoring Compliance and Corporate Governance
4. Reporting and Documentation
5. Facilitation of Development and Training Programs
6. Administration Management
7. Attending Official Events and Forums

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sistem pengendalian internal Perseroan, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is one of the supporting organs that assists the implementation of duties of Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over the Company's internal control system, compliance with regulations, the quality of financial reports and the effectiveness of internal audit function. The



Keberadaan Komite Audit bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme *checks and balances* Perseroan, yang pada akhirnya dapat melindungi hak Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tahun 2015 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/30/03/03/IKT-15 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 70; Tambahan Lembaran Negara No. 4197);
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106; Tambahan Lembaran Negara 4756);
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain (selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dimaksud) kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008618.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
10. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 09/KEPDK/14/05/01/IKT-18 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 14 Mei 2018;

existence of Audit Committee aims to optimize the Company's checks and balances mechanism, which ultimately can protect the rights of Shareholders and other Stakeholders.

The Company's Audit Committee was formed in 2015 through the Board of Commissioners Decree No. DK/30/03/03/IKT-15 concerning Formation and Appointment of Chairperson and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 No. 70; Supplement to State Gazette No. 4197);
2. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 No. 106; Supplement to State Gazette 4756);
3. Government Regulation No. 101 of 2021 dated 1 October 2021 concerning the Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III and the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners of State-Owned Enterprises as amended by the Minister of State-Owned Enterprises of Republic of Indonesia Regulation No. PER-06/MBU/04/2021 which states that Board of Commissioners may provide other assignments (other than those stipulated in the Ministerial Regulation) to Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter;
6. Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Implementation of Good Corporate Governance in SOE;
7. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
8. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of Audit Committee;
9. The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No. AHU-0008618.AH.01.02. 2018 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
10. The Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Decree No. 09/KEPDK/14/05/01/IKT-18 concerning Dismissal and Appointment of Chairperson and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal dated May 14, 2018;



11. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk No. 17/KEPDK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
12. Salinan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit Perseroan disusun dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 tanggal 19 Desember 2018 dan telah diperbaharui pada tanggal 24 November 2022 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/24/11/04/IPCC-22 tentang Pemutakhiran Piagam Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Piagam Komite Audit merupakan landasan dan pedoman kerja yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan.

Piagam Komite Audit Perseroan berisi pokok-pokok aturan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum
2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Rapat komite
6. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite
7. Akses Kerahasiaan Informasi
8. Rencana Kerja dan Anggaran
9. Penghasilan Anggota Komite
10. Pendidikan dan Tenaga Penunjang
11. Penilaian Kinerja

Piagam Komite Audit ditinjau ulang secara berkala dan dapat diperbarui jika dianggap perlu, agar senantiasa selaras dengan perkembangan regulasi, dinamika bisnis, serta tujuan usaha Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sebagaimana telah diatur dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal (SPI) dan audit eksternal;
2. Memantau dan mengkaji hasil pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
3. Meninjau laporan audit dan bersama Dewan Komisaris memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan

11. The Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Decree No. 17/KEPDK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning Determination of Chairperson and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
12. Copy of the Minister of State-Owned Enterprises of Republic of Indonesia Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 dated September 1, 2022 concerning Implementation of Risk Management in StateOwned Enterprises.

Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee Charter was prepared and established based on the Board of Commissioners Decree No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 dated December 19, 2018 and updated on November 24, 2022 as regulated in the Board of Commissioners Decree No. DK/24/11/04/IPCC-22 concerning Updating the Audit Committee Charter of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

The Audit Committee Charter is the foundation and work guidelines that are binding and must be adhered to by all members of Audit Committee in carrying out their duties and responsibilities, especially in carrying out compliance obligations with statutory regulations and the Company's internal controls.

The Company's Audit Committee Charter contains the main rules regarding the following matters:

1. Legal Framework
2. Procedures for Appointment and Dismissal of Committee Members
3. Duties, Responsibilities and Authority of the Committee
4. Membership Requirements
5. Committee meeting
6. Report on the Implementation of Committee Duties
7. Access to Confidentiality of Information
8. Work Plan and Budget
9. Income of Committee Members
10. Education and Supporting Personnel
11. Performance Appraisal

The Audit Committee Charter is reviewed periodically and can be updated if deemed necessary, so that it is always in line with regulatory developments, business dynamics and the Company's business objectives.

Audit Committee Duties and Responsibilities

As regulated in the Company's Audit Committee Charter, Audit Committee duties and responsibilities are as follows:

1. Monitor and review the effectiveness of implementation of internal audits (SPI) and external audits;
2. Monitor and review the results of financial reporting audited by external auditors;
3. Review audit reports and together with Board of Commissioners ensure the Board of Directors takes necessary corrective actions quickly to overcome control



pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta SPI;

4. Mengevaluasi kinerja Audit Internal;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Audit Internal (PKPT);
6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
9. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
13. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan kepada publik;
14. Membantu Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
15. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris.

Kriteria Komite Audit

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria atau persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Audit Perseroan saat ini juga memiliki latar belakang profesional dalam bidang akuntan publik, ahli keuangan, dan seorang ahli terkait bidang usaha Perseroan. Anggota Komite Audit Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Audit, sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

weaknesses, fraud, compliance issues with policies and laws and regulations as well as SPI;

4. Evaluate SPI performance;
5. Provide recommendations to Board of Commissioners regarding the preparation of audit plan, scope and SPI budget (PKPT);
6. Provide recommendations regarding improvements to the internal control system and its implementation;
7. Reviewing financial information that the Company will issue to the public and/or the authorities, including financial reports, projections and other reports related to the financial information of Issuers or Public Companies;
8. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
9. Provide independent opinions in the event of differences of opinion between management and accountants regarding the services provided;
10. Provide recommendations to Board of Commissioners regarding the appointment of accountants based on independence, scope of assignment, and service fees;
11. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
12. Review and provide advice to Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company;
13. Ensure that there are satisfactory review procedures for all information released by the Company to the public;
14. Assist the Board of Commissioners and other tasks assigned by Board of Commissioners;
15. Special Duties from Board of Commissioners.

Audit Committee Criteria

The Company ensures that all members of Audit Committee have fulfilled the criteria or requirements in accordance with applicable regulations. The Company's Audit Committee currently also has a professional background in the field of public accounting, financial experts and an expert related to the Company's business sector. Members of the Company's Audit Committee must fulfill several requirements as stipulated in the Audit Committee Charter, as follows:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well;
2. Must understand financial reports, Company business, especially those related to services or business activities of Issuers or Public Companies, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other related laws and regulations;
3. Must comply with the Audit Committee Code of Conduct established by the Company;
4. Willing to continuously improve competence through education and training;

5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung Perseroan;
 9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 12. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
5. Must have at least 1 (one) member with an educational background and expertise in accounting and finance;
 6. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Services Firm or other party providing insurance services, noninsurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company concerned within the last 6 (six) months;
 7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners;
 8. Does not own shares directly or indirectly in the Company;
 9. In the event that a member of Audit Committee acquires Company shares either directly or indirectly as a result of a legal incident, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after acquiring the shares;
 10. Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;
 11. Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;
 12. Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Masa Jabatan dan Komposisi

Perseroan mengangkat anggota Komite Audit dengan masa jabatan paling lama adalah 5 (lima) tahun. Ketua dan/atau anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatannya tidak dapat melebihi dari masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Komite Audit yang masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Komposisi Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Term of Office and Composition

The Company appoints members of Audit Committee with a maximum term of office of 5 (five) years. Chairman and/or members of Audit Committee who are members of the Company's Board of Commissioners, their term of office cannot exceed their term of office as members of the Company's Board of Commissioners. All members of Audit Committee whose term of office expires can be reappointed only for the next 1 (one) period.

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Abdur Rahim Hasan	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning Determination of Chairperson and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following his term of office as Independent Commissioner	Pertama First
Noval Ali Abbas	Anggota Independen Independent Member	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning Determination of Chairperson and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	1 Oktober 2020 – sampai dengan penutupan RUPS tahun ke-5 (lima) October 1, 2020 - until the closing of the 5th (fifth) GMS	Pertama First



Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Kurniawan Eko Saputro	Anggota Independen Independent Member	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-24 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-24 dated April 30, 2024, concerning Appointment of Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	30 April 2024 – Sekarang April 30, 2024 - Present	Pertama First

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Abdur Rahim Hasan

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
 The complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.



Noval Ali Abbas

Anggota Independen Komite Audit
Independent Member of Audit Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, usia 60 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 60 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning Determination of Chairman and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada None
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Manajemen Perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana (1990) Bachelor of Corporate Management, Krisnadwipayana University (1990)
Sertifikasi Certification	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Karier Work Experience	- Komite Audit di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2015-2017) - Sekretaris Perusahaan di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2017-2019) - Individual Expert I Grade VII Bidang Hukum dan Kepatuhan Perusahaan SBU Pengusahaan Alat pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2019-2020) - Audit Committee at PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2015-2017) - Corporate Secretary at PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2017-2019) - Individual Expert I Grade VII Sector of Law and Company Compliance SBU Equipment Business at PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2019-2020)



Kurniawan Eko Saputro

Anggota Independen Komite Audit
Independent Member of Audit Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 34 tahun, domisili di Tangerang Selatan Indonesian citizen, 34 years old, domiciled in South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-2024 tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-2024 dated April 30, 2024, concerning Appointment of Chairman and Members of Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Direktur PT. Nanotech Indonesia Global Tbk. Director of PT. Nanotech Indonesia Global Tbk.



Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya (2016) Bachelor of Agricultural Technology, Brawijaya University (2016)
Sertifikasi Certification	• Qualified Risk Governance Professional (QRGP) dengan No. 70209 1120 0022444 2024. • Certified Investment Banker (CIB) dengan No. 66123 2413 0014421 2024 • Manajer Proyek (M.Pr) dengan No. 0000545 2024 • Qualified Risk Governance Professional (QRGP) No. 70209 1120 0022444 2024 • Certified Investment Banker (CIB) No. 66123 2413 0014421 2024 • Project Manager (M.Pr) with No. 0000545 2024
Riwayat Karier Work Experience	• Sekretaris Perusahaan PT Nanotech Indonesia Global Tbk (2021 - 2022) • Kepala Manajemen Proyek di Nano Center Indonesia (2016 - 2020) • Corporate Secretary of PT Nanotech Indonesia Global Tbk (2021 - 2022) • Head of Project Management at Nano Center Indonesia (2016 - 2020)

Independensi Anggota Komite

Audit Komite Audit wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, serta penuh itikad baik. Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses Audit Internal dan Audit Eksternal serta praktik GCG berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Seluruh personel Komite Audit periode berjalan telah memenuhi syarat independensi sesuai dengan aturan POJK 55/2015. Informasi lebih rinci tentang independensi masing-masing personil Komite Audit diuraikan pada tabel berikut ini:

Aspek Independensi Independence Aspect	Abdur Rahim Hasan	Noval Ali Abbas	Kurniawan Eko Saputro
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationships in the Company, subsidiaries or affiliated Companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no share ownership relationship in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	✓	✓	✓

Rapat Komite Audit

Kebijakan

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam POJK 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan Rapat

Pada tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan 30 (tiga puluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Independence of Committee Members

Audit Committee is obliged to carry out its duties and responsibilities professionally and independently, and in good faith. Audit Committee supports the Board of Commissioners in evaluating and supervising the financial reporting process, the Internal Audit and External Audit processes as well as GCG practices that run well and according to procedures.

All Audit Committee personnel for the current period have fulfilled the independence requirements in accordance with POJK 55/2015 regulations. More detailed information about the independence of each Audit Committee personnel is described in the following table:

Audit Committee Meeting

Policy

In accordance with the provisions stipulated in POJK 55/2015, Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.

Meeting Implementation

In 2024, Audit Committee has held 30 (thirty) meetings with the attendance level of each member as described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran % Attendance Level
Abdur Rahim Hasan	Ketua Chairman	30	30	100%
Noval Ali Abbas	Anggota Independen Independent Member	30	30	100%



Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran % Attendance Level
Dyah Ayu Anggraheni	Anggota Independen Independent Member	30	30	100%

Pada rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024, Komite Audit melakukan pembahasan terkait agenda-agenda berikut ini:

At meetings held throughout 2024, Audit Committee discussed the following agendas:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
17 Januari 2024 January 17, 2024	Pembahasan Kinerja Tahun 2023 Perseroan Discussion on the Company's Performance in 2023	KA, KNR, KPMR, SPI, Manajemen Menengah KA, KNR, KPMR, SPI, Middle Management
25 Januari 2024 January 25, 2024	Pembahasan PKPT 2024 dan Piagam Charter SPI Discussion on the 2024 PKPT and SPI Charter	KA, KNR, KPMR, SPI
25 Januari 2024 January 25, 2024	Pembahasan Profil Risiko 2024 Discussion on the 2024 Risk Profile	KA, KNR, KPMR, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, Risk Management
15 Februari 2024 February 15, 2024	Update Profil Risiko 2024 Monitoring LHA Semester I 2023 Update on the 2024 Risk Profile Monitoring of the LHA for First Semester of 2023	KA, KNR, KPMR, SPI, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, Risk Management
22 Februari 2024 February 22, 2024	SDM Financial Performance January 2024 Progress Audit LK Tahun Buku 2023 Human Capital Financial Performance of January 2024 Progress Audit of Financial Statements for 2023 Fiscal Year	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, SDM) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, Human Capital)
7 Maret 2024 March 7, 2024	Kick off Meeting Assessment GCG Tahun Buku 2023 Kick off Meeting of GCG Assessment of 2023 Fiscal Year	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah BoC, BoD, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
20 Maret 2024 March 20, 2024	Closing Audit 2024 Audit 2024 Closing	KAP, Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah KAP, BoC, BoD, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
23 April 2024 April 23, 2024	Profil Risiko dan Risiko Investasi sd TW 1 2024 Risk Profile and Investment Risk until First Quarter of 2024	KA, KNR, KPMR, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, Risk Management
23 April 2024 April 23, 2024	Laporan Monitoring Temuan SPI Semester II tahun 2022 SPI Findings Monitoring Report for Second Semester of 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
23 April 2024 April 23, 2024	Kinerja Keuangan sd TW I 2023 dan Piutang Financial Performance until First Quarter of 2023 and Receivables	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
14 Mei 2024 May 14, 2024	Monitoring LHA Semester II tahun 2023 LHA Monitoring Second Semester of 2023	KA, KNR, KPMR, SPI
14 Mei 2024 May 14, 2024	Pembahasan kajian buyback saham Discussion on share buyback review	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan dan Sekretaris Perusahaan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance and Corporate Secretary)
17 Mei 2024 May 17, 2024	Kinerja Keuangan s.d. April 2024 dan Piutang Financial Performance until April 2024 and Receivables	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
24 Juni 2024 June 24, 2024	Penentuan Batas Nilai dan Jangka Waktu Perjanjian yang membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris Determination of Value Limits and Term of Agreements Requiring the Board of Commissioners' Approval	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan dan Sekretaris Perusahaan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance and Corporate Secretary)
24 Juni 2024 June 24, 2024	Kinerja Keuangan s.d. Mei 2024 dan Piutang Financial Performance until May 2024 and Receivables	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
2 Juli 2024 July 2, 2024	Penetapan Pedoman Barang dan Jasa Establishment of Goods and Services Guidelines	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, Pengadaan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, Procurement)
19 Juli 2024 July 19, 2024	Usulan Revisi Investasi 2024 2024 Investment Revision Proposal	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah KA, KNR, KPMR, Middle Management
6 Agustus 2024 August 6, 2024	Laporan Final Kajian Kelayakan MKO-MTKI Final Report on Feasibility Study of MKO-MTKI	KA & KPMR



Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
15 Agustus 2024 August 15, 2024	Kinerja Produksi s.d Juli 2024 Production Performance until July 2024	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Operasional - Produksi) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Operations - Production)
15 Agustus 2024 August 15, 2024	Kinerja Keuangan dan Piutang s.d Juli 2024 Financial Performance and Receivables until July 2024	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
18 September 2024 September 18, 2024	Laporan HSSE s.d Agustus 2024 HSSE Report until August 2024	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (HSSE) KA, KNR, KPMR, Middle Management (HSSE)
18 September 2024 September 18, 2024	Monitoring LHA Semester II tahun 2023 LHA Monitoring of Second Semester of 2023	KA, KNR, KPMR, SPI
18 September 2024 September 18, 2024	Kinerja Keuangan s.d Agustus 2024 dan Posisi Piutang Financial Performance until August 2024 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
18 Oktober 2024 October 18, 2024	- Kerjasama TMMIN - Kerjasama Pengoperasian Terminal Roro - Penyesuaian Perjanjian yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris - TMMIN Cooperation - Roro Terminal Operation Cooperation - Agreement Adjustments Requiring BoC Approval	KA, KNR, KPMR
18 Oktober 2024 October 18, 2024	Kinerja Keuangan s.d Sept 2024 dan Posisi Piutang Financial Performance until Sept 2024 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
14 November November 14, 2024	Kajian Pengembangan Lahan dan Pembangunan CSB Land Development and CSB Construction Review	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, Komersial) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, Commercial)
14 November 2024 November 14, 2024	Kinerja Keuangan sd Oktober 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until October 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
23 Desember 2024 December 23, 2024	Monitoring temuan SPI Semester I tahun 2024 Monitoring of SPI findings for First Semester 2024	KA, KNR, KPMR, SPI
23 Desember 2024 December 23, 2024	Kinerja Keuangan sd November 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until November 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
23 Desember 2024 December 23, 2024	Realisasi Investasi s.d. November 2024 Investment Realization until November 2024	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Teknik) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Technical)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah berperan aktif dalam mendukung tugas Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024, antara lain dengan melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perseroan seperti Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, termasuk proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Komite Audit juga memastikan bahwa kebijakan dan pengendalian internal telah berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan sehingga meminimalisasi pelanggaran yang merugikan serta memberikan bahan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap percepatan atas penanganan/penuntasan masalah yang timbul oleh pihak manajemen.

Report on the Implementation Audit Committee's Duties in 2024

Audit Committee has played an active role in supporting the Board of Commissioners duties throughout 2024, including by reviewing financial information issued by the Company such as Financial Reports, Management Reports, including projections and other financial information. Audit Committee also ensures that policies and internal controls are implemented in accordance with regulations and Law Regulations, thereby minimizing detrimental violations and providing input to Board of Commissioners regarding the acceleration of handling/resolving problems that arise by management.



Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit berdasarkan rencana kerja Komite Audit tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Komite Audit
2. Memberikan Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan
3. Melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal
4. Pengawasan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan
5. Koordinasi dengan auditor eksternal dan internal atas hasil audit
6. Peningkatan wawasan dan profesionalisme
7. Melaksanakan kunjungan kerja
8. Rekomendasi dan laporan berkala kepada Dewan Komisaris

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2024

Kebijakan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang meliputi pengawasan atas pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta efektivitas fungsi audit internal dan eksternal, Perseroan mendorong pengembangan kompetensi anggota Komite Audit, melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tertuang dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Program pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Fokus program diarahkan pada penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip audit, peraturan dan ketentuan regulator, serta isu-isu terkini di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen risiko. Dengan demikian, anggota Komite Audit senantiasa memiliki kapabilitas yang relevan untuk memberikan pengawasan yang objektif, independen, dan konstruktif terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan.

Pelaksanaan pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

The report on the implementation of Audit Committee's activities based on the 2024 Audit Committee work plan can be described as follows:

1. Implementation of Coordination Meetings
2. Provide evaluation/direction/response/approval
3. Supervising internal controls
4. Supervising regulations and corporate governance
5. Coordinating with external and internal auditors on audit results
6. Enhancing insight and professionalism
7. Carrying out work visits
8. Making recommendations and periodic reports to Board of Commissioners

Audit Committee Competency Development Program in 2024

Policy

In supporting the implementation of Audit Committee's duties and responsibilities, which include supervision of financial reporting, internal control, and the effectiveness of internal and external audit functions, the Company encourages the competency development of Audit Committee members, through the human capital development policy stated in the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017 concerning Guidelines for Human Capital Development in the Environment of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Competency training and/or development programs are part of the efforts to improve the quality of corporate governance. The focus of the program is directed at strengthening understanding of audit principles, regulatory regulations and provisions, and current issues in the fields of accounting, finance, and risk management. Thus, Audit Committee members always have the relevant capabilities to provide objective, independent, and constructive supervision of the Company's management activities.

Implementation of training and/or Competency Development in 2024

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2024

Audit Committee Training and Competency Development in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Abdur Rahim Hasan (Ketua) (Chairman)	Informasi pengembangan kompetensi Ketua Komite Audit Information on the competency development of Chairman of Audit Committee	Informasi pengembangan kompetensi Ketua Komite Audit Abdur Rahim Hasan telah disampaikan pada Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Information on the competency development of Chairman of Audit Committee, Abdur Rahim Hasan, has been contained in the Competency Development of Board of Commissioners		
Noval Ali Abbas (Anggota) (Member)	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)	Praktik-praktik <i>risk governance</i> di Indonesia serta permasalahan, kewajiban, pembentukan, pelaporan dan independensi komite audit dan pengawas risiko Risk governance practices in Indonesia as well as issues, obligations, formation, reporting and independence of audit committees and risk supervisors	23-24 September 2024 September 23-24, 2024	CRMS dan LSP MKS CRMS and MKS LSP



Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2024

Audit Committee Training and Competency Development in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Kurniawan Eko Saputro Z. (Anggota) (Member)	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)	Praktik-praktik <i>risk governance</i> di Indonesia serta permasalahan, kewajiban, pembentukan, pelaporan dan independensi komite audit dan pengawas risiko Risk governance practices in Indonesia as well as issues, obligations, formation, reporting and independence of audit committees and risk supervisors	23-24 September 2024 September 23-24, 2024	CRMS dan LSP MKS CRMS and MKS LSP

Penilaian dan Evaluasi Atas Kinerja Komite Audit Tahun 2024

Kinerja Komite Audit sepanjang tahun 2024 dinilai “Sangat Baik” oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan pencapaian atau realisasi rencana kerja tahunan Komite Audit sebagaimana diuraikan berikut ini:

Assessment and Evaluation of Audit Committee's Performance in 2024

The performance of Audit Committee throughout 2024 was rated “Very Good” by the Board of Commissioners, in accordance with the achievement or realization of the Audit Committee's annual work plan as outlined below:

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
1	Mengadakan rapat koordinasi (internal, Dewan Komisaris, SPI dan Unit Terkait/Direksi dan manajemen Perseroan) Hold Coordination Meetings (Internal, Board of Commissioners, SPI and Related Units/Board of Directors and management of PT IPCC Tbk)	✓
2	Melakukan rapat koordinasi, memberikan saran dan masukan serta telaah RJPP/RKAP 2025 Conduct coordination meetings, provide suggestions and input as well as review the 2025 RJPP/RKAP	✓
3	Membuat laporan evaluasi atas kinerja Perseroan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan Make evaluation reports on the Company's performance on a monthly, quarterly, semi-annual, and annual	✓
4	Menyusun Tanggapan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit sebagai dasar penyampaian kinerja Perseroan tahun buku 2023 ke pemegang saham (RUPS) Prepare a response to the audited Financial Responsibility Report for 2023 fiscal year as a basis for conveying the Company's performance for 2023 fiscal year to shareholders (GMS)	✓
5	Melakukan pengawasan audit, pemantauan temuan audit dan melakukan evaluasi atas kinerja auditor eksternal Perform audit supervision, monitor audit findings and evaluate the performance of external auditors	✓
6	Mengusulkan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris Proposing prospective external auditors to the Board of Commissioners	✓
7	Memberikan saran dan masukan atas PKPT SPI periode 2024 Provide suggestions and input on PKPT SPI for 2024 period	✓
8	Berkoordinasi dengan SPI terkait pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam rangka peningkatan efektivitas pengendalian internal Perseroan Coordinate with SPI regarding the implementation of internal control system in order to increase the effectiveness of the Company's internal control.	✓
9	Berkoordinasi dengan SPI untuk melakukan monitoring tindak lanjut hasil temuan audit Coordinate with SPI to carry out follow-up monitoring of audit findings	✓
10	Membuat laporan evaluasi efektivitas pengendalian internal PT IKT Tbk tahun 2024 Create an evaluation report on the effectiveness of PT IKT Tbk's internal control in 2024	✓
11	Membuat laporan evaluasi kinerja Audit Internal PT IKT Tbk tahun 2024 Create a SPI performance evaluation report for PT IKT Tbk in 2024	✓
12	Memberikan saran dan masukan terkait pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku Provide advice and input related to financial reporting in accordance with applicable Financial Accounting Standards	✓
13	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit 2025 Prepare the 2025 Audit Committee Work Plan and Budget	✓
14	Penyusunan Laporan realisasi rencana kerja Komite Audit 2024 Preparation of a report on the realization of 2024 Audit Committee work plan	✓
15	Mengikuti seminar/workshop/conference/pelatihan/sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi komite audit Participating in seminars/workshops/conferences/training/certification to improve audit committee competency	✓
16	Melakukan kunjungan kerja dalam rangka mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha Perseroan maupun dalam rangka studi banding/benchmark Conduct work visits in order to obtain information related to the Company's business development as well as in the context of comparative/benchmark studies	✓



No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
17	Melakukan pengawasan kepatuhan Direksi terhadap Perjanjian dengan Pihak Ketiga Supervise the Board of Directors' compliance to Agreements with Third Parties	✓
18	Menyusun Kajian atas usulan Direksi yang memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris atau kajian atas hal-hal tertentu sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Preparing reviews of proposals from the Board of Directors that require Board of Commissioners' response/approval or reviews of certain matters as directed by the Board of Commissioners	✓

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Nomor 16/KEPDK/VIII/IKT-2020 tanggal 20 Agustus 2020 telah mengesahkan pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk sebagai upaya Perseroan dalam menyempurnakan penerapan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG di Perseroan. Komite ini membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 tanggal 19 Desember 2018. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan landasan dan pedoman kerja yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan berisi pokok-pokok aturan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum
2. Pengangkatan dan Pemberhentian
3. Tugas Pokok
4. Kewenangan
5. Rapat Komite
6. Tanggung Jawab
7. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite
8. Akses Kerahasiaan Informasi
9. Rencana Kerja dan Anggaran
10. Penghasilan Anggota Komite
11. Pengembangan/Peningkatan kapasitas
12. Penggunaan Tenaga ahli
13. Penilaian Kinerja
14. Hubungan Kelembagaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Board of Commissioners through the Company's Board of Commissioners Decree Number 16/KEPDK/VIII/IKT-2020 dated August 20, 2020 has approved Formation of Risk Management Monitoring Committee.

Risk Management Monitoring Committee was formed as an effort by the Company to improve the implementation of risk management and GCG principles in the Company. This committee assists the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Risk Management Monitoring Committee Charter

The Risk Management Monitoring Committee Charter was prepared and established based on the Board of Commissioners Decree No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 dated December 19, 2018. The Risk Management Monitoring Committee Charter is a binding work basis and guideline and must be adhered to by all members of Risk Management Monitoring Committee in carrying out their duties and responsibilities.

The Company's Risk Management Monitoring Committee Charter contains the main rules regarding the following matters:

1. Legal Framework
2. Appointment and Dismissal
3. Main Duties
4. Authority
5. Committee Meeting
6. Responsibility
7. Report on the Implementation of Committee Duties
8. Access to Confidentiality of Information
9. Work Plan and Budget
10. Income of Committee Members
11. Capacity development/increasing
12. Use of experts
13. Performance Appraisal
14. Institutional Relations

Risk Management Monitoring Committee Duties and Responsibilities

Risk Management Monitoring Committee is responsible to Board of Commissioners and assists Board of Commissioners



dalam pelaksanaan tugasnya agar pengelolaan Perseroan efektif dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen. Sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko, dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Manajemen Risiko;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
6. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
7. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/ Pemilik Modal.

Kriteria Komite Pemantau Manajemen Risiko

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria atau persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik, pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup serta sertifikasi di bidang manajemen risiko.
2. Memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman di bidang manajemen risiko dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan perusahaan secara khusus.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.

in carrying out its duties to ensure effective management of the Company and the implementation of competent and independent supervision. As stated in the Committee Charter, Risk Management Monitoring Committee duties and responsibilities are described as follows:

1. Monitor and review Risk Management reports and other reports related to the implementation of Risk Management;
2. Monitor and evaluate the suitability of implementation of the Company's Risk Management policies;
3. Provide recommendations to Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of implementation of Risk Management and the conformity of the Company's Risk Management policies;
4. Assist the Board of Commissioners in evaluating and approving Risk Management policies;
5. Assist the Board of Commissioners in evaluating the responsibility of Board of Directors for implementing Risk Management policies;
6. Assist the Board of Commissioners in evaluating and deciding on requests from Board of Directors relating to transactions that require the Board of Commissioners approval;
7. Assist the Board of Commissioners in carrying out supervision over the implementation of other risk management functions in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association and/or resolutions of the GMS/Capital Owners.

Risk Management Monitoring Committee Criteria

The Company ensures that all members of Risk Management Monitoring Committee have fulfilled the criteria or requirements in accordance with applicable regulations. Members of the Company's Risk Management Monitoring Committee must fulfill several requirements as stipulated in the Committee Charter, as follows:

1. Have good integrity, sufficient knowledge and work experience as well as certification in the field of risk management.
2. Have a balance of expertise and experience in the field of risk management with a broad background understanding of business in general and the Company in particular.
3. Have sufficient knowledge to read and understand financial reports and risk management policy implementation reports.
4. Have no personal interests/relationships that could have a negative impact or conflict of interest on the Company.



5. Mampu berkomunikasi secara efektif.
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
7. Independen, objektif dan profesional.
8. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris dan Direksi.
9. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Masa Jabatan dan Komposisi

Perseroan mengangkat anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan masa jabatan paling lama adalah 5 (lima) tahun. Ketua dan/atau anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatannya tidak dapat melebihi dari masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
LM. Arya Bima Yudiantara	Ketua Komite Chairman of Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree of PT Indonesia Kendaraan Terminal Number 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 dated June 29, 2021 concerning Determination of Chairperson and Members of Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following his term of office as Independent Commissioner
Nurkholis Lukman	Anggota Member	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-24 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. KEP-DK/30/04/06/IPCC-24 dated April 30, 2024, concerning Appointment of Member of Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	30 April 2024 sampai sekarang April 30, 2024 until present

5. Able to communicate effectively.
6. Can provide sufficient time to complete the duties.
7. Independent, objective and professional.
8. Has no familial relationship through marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically with Board of Commissioners and Board of Directors.
9. Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Term of Office and Composition

The Company appoints members of Risk Management Monitoring Committee with a maximum term of office of 5 (five) years. The chairman and/or members of Risk Management Monitoring Committee who are members of the Company's Board of Commissioners, their terms of office cannot exceed their terms of office as members of the Company's Board of Commissioners. All members of Risk Management Monitoring Committee whose term of office ends, can only be reappointed for 1 (one) subsequent period.

The composition of the Company's Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Profile

LM. Arya Bima Yudiantara

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Chairman of Risk Management Monitoring Committee

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
The complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.



Nurkholis Lukman

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of Risk Management Monitoring Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 52 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor KEP-DK/30/04/01/IPCC-24 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Decree Number KEP-DK/30/04/01/IPCC-24 dated April 30, 2024 concerning Appointment of Members of Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern SPSP (Agustus 2023 – sekarang) Senior Vice President of SPSP Internal Audit Unit (August 2023 - present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Sistem Informasi dari Universitas Bina Darma (2005) Bachelor of Information Systems, Bina Darma University (2005)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): 1. Certified in Qualified Chief Risk Officer (QCRO) No.70209121300161772023 2. Certified in Qualified Risk Governance Profesional (QRGP) No.70209112000224372024. 3. Certified in Qualified Risk Management Analyst (QRMA) No.2017-10-02-0467 Certification from the Professional Certification Institute (LSP): 1. Certified in Qualified Chief Risk Officer (QCRO) No.70209121300161772023 2. Certified in Qualified Risk Governance Profesional (QRGP) No.70209112000224372024. 3. Certified in Qualified Risk Management Analyst (QRMA) No.2017-10-02-0467
Riwayat Karier Work Experience	• Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern SPSP (Agustus 2023 - sekarang) • Division Head Pelayanan SDM Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Oktober 2021 – Agustus 2023) • Vice President Layanan SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Desember 2019 – Oktober 2021) • General Manager Cabang Bengkulu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Januari 2019 – Desember 2019) • General Manager Cabang Tanjung Pandan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Maret 2018 – Januari 2019) • Senior Department Head GCG dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Maret 2017 – Maret 2018) • Senior Vice President of SPSP Internal Audit Unit (August 2023 - present) • Division Head of Regional HC Services 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (October 2021 - August 2023) • Vice President of HC Services PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (December 2019 - October 2021) • General Manager of the Bengkulu Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (January 2019 - December 2019) • General Manager of the Tanjung Pandan Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (March 2018 - January 2019) • Senior Department Head of GCG and Compliance at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (March 2017 - March 2018)

Independensi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Perseroan dapat memastikan bahwa Komite Pemantau Manajemen Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, serta penuh itikad baik.

Seluruh personel Komite Pemantau Manajemen Risiko periode berjalan telah memenuhi syarat independensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Informasi lebih rinci tentang independensi masing-masing personil Komite Pemantau Manajemen Risiko diuraikan pada tabel berikut ini:

Independence of Risk Management Monitoring Committee Members

The Company can ensure that Risk Management Monitoring Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, and in good faith.

All Risk Management Monitoring Committee personnel for the current period have fulfilled the independence requirements in accordance with applicable regulations. More detailed information regarding the independence of each Risk Management Monitoring Committee personnel is described in the following table:



Aspek Independensi Independence Aspect	LM. Arya Bima Yudiantara	Nurkholis Lukman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationships in the Company, subsidiaries or affiliated companies	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no share ownership relationship in the Company	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	✓	✓

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib menyelenggarakan rapat secara internal maupun rapat bersama unit-unit kerja pendukung lainnya, guna membahas hal-hal terkait sistem manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan.

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat baik rapat khusus internal komite dan rapat bersama unit-unit kerja terkait lainnya, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran % Attendance Level %
LM. Arya Bima Yudiantara	Ketua Chairman	4	4	100%
Nurkholis Lukman	Anggota Member	4	4	100%

Pada rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024, Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan pembahasan terkait agenda-agenda berikut ini:

Risk Management Monitoring Committee Meeting

Risk Management Monitoring Committee is required to hold internal meetings and meetings with other supporting work units, to discuss matters related to the risk management system implemented in the Company.

In 2024, Risk Management Monitoring Committee has held 4 (four) meetings, both special internal committee meetings and joint meetings with other related work units, with the attendance level of each Committee member as described in the following table:

At meetings held throughout 2024, Risk Management Monitoring Committee discussed the following agendas:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta
17 April 2024 April 17, 2024	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko TW 1 First Quarter Risk Management Monitoring Committee Meeting	1. LM Arya Bima 2. Sumarman 3. Wing M. 4. Puri Andani
17 Juli 2024 July 17, 2024	Pembahasan Laporan Profil Risiko dan Peringkat Komposit Risiko s/d TW 2 Discussion on the Risk Profile Report and Risk Composite Rating until Second Quarter	1. LM Arya Bima 2. Nurkholis Lukman 3. Agus W 4. Puri Andani
10 September 2024 September 10, 2024	Pembahasan Laporan Profil Risiko dan Peringkat Komposit Risiko s/d TW 3 Discussion on the Risk Profile Report and Risk Composite Rating until Third Quarter	1. LM Arya Bima 2. Noval Ali Abbas 3. Nurkholis Lukman 4. Kurniawan Eko 5. Dawud 6. Puri Andani
23 Desember 2024 December 23, 2024	Pembahasan Peraturan Direksi, Pedoman Manajemen Risiko Tahun 2024 dan Pembahasan Tata Kelola Perencanaan Risiko 2025 Discussion on the Board of Directors Regulations, 2024 Risk Management Guidelines and Discussion on 2025 Risk Planning Governance	1. LM Arya Bima 2. Nurkholis Lukman 3. Dawud 4. Puri Andani



Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2024

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah berperan aktif mendukung tugas Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024 terutama dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran/nasihat dalam bidang manajemen risiko.

Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sepanjang 2024, sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko;
3. Membantu Dewan Komisaris mengelola strategi pengendalian secara berkesinambungan terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan demi kelangsungan hidup Perseroan;
4. Melakukan pemantauan risiko secara terus menerus, khususnya yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi Perseroan;
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Pemantauan Manajemen Risiko atas permintaan Dewan Komisaris.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2024

Kebijakan

Perseroan mendorong peningkatan kompetensi seluruh organ pendukung Dewan Komisaris, termasuk Komite Pemantau Manajemen Risiko, melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tertuang dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan sangat penting bagi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi di bidang manajemen risiko.

Report on the Implementation of Risk Management Monitoring Committee Duties in 2024

Risk Management Monitoring Committee has played an active role in supporting the Board of Commissioners duties throughout 2024, especially in carrying out supervision and providing suggestions/advice in the field of risk management.

The duties and responsibilities throughout 2024 are as follows:

1. Assist the Board of Commissioners in detecting/identifying risks as early as possible in every activity related to duties, authorities and responsibilities;
2. Assist the Board of Commissioners in measuring risk by taking into account the magnitude of impacts and the possibility of risk opportunities;
3. Assist the Board of Commissioners in managing control strategies on an ongoing basis for risks that have high priority/significant risks for the Company's survival;
4. Carry out continuous risk monitoring, especially those that have a significant impact on the Company's condition;
5. Carry out other duties relevant to the Risk Management Monitoring Committee's functions at the Board of Commissioners' request.

Risk Management Monitoring Committee Competency Development Program in 2024

Policy

The Company encourages the competency improvement of all supporting organs of Board of Commissioners, including the Risk Management Monitoring Committee, through the human capital development policy as stated in the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017 concerning Guidelines for Human Capital Development in the Environment of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Continuous training and competency development are very important for members of Risk Management Monitoring Committee to support the effectiveness of supervisory function implementation and the provision of recommendations in risk management.



Pelaksanaan pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Implementation of training and/or Competency Development in 2024

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2024
 Risk Management Monitoring Committee Training and Development in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Implementation Time	Penyelenggara Organizer
LM Arya Bima	Sertifikasi QRGP QRGP Certification	Mengembangkan penerapan : 1. Prinsip Manajemen Risiko 2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko 3. Proses Manajemen Risiko 4. Tata Kelola risiko 5. Manajemen risiko hukum dan kepatuhan 6. Manajemen risiko strategis penerapan Serta memperkuat kepemimpinan manajemen risiko Developing the implementation of: 1. Risk Management Principles 2. Risk Management Framework 3. Risk Management Process 4. Risk Governance 5. Legal Risk Management and Compliance 6. Strategic Risk Management Implementation As well as strengthening risk management leadership	7 Oktober 2024 October 7, 2024	LSPMKS
Nurkholis Lukman	Sertifikasi QRGP QRGP Certification	Mengembangkan penerapan : 1. Prinsip Manajemen Risiko 2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko 3. Proses Manajemen Risiko 4. Tata Kelola risiko 5. Manajemen risiko hukum dan kepatuhan 6. Manajemen risiko strategis penerapan Serta memperkuat kepemimpinan manajemen risiko Developing the implementation of: 1. Risk Management Principles 2. Risk Management Framework 3. Risk Management Process 4. Risk Governance 5. Legal Risk Management and Compliance 6. Strategic Risk Management Implementation As well as strengthening risk management leadership	7 Oktober 2024 October 7, 2024	LSPMKS

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2024

Assessment and Evaluation of the Performance of Risk Management Monitoring Committee in 2024

Dewan menilai bahwa Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko sepanjang tahun 2024 “Sangat Baik”, sesuai dengan pencapaian atau realisasi rencana kerja tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana diuraikan berikut ini:

The performance of Risk Management Monitoring Committee throughout 2024 is assessed as positive by the Board of Commissioners, in accordance with the achievement or realization of Risk Management Monitoring Committee’s annual work plan as described below:

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
1	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi telah terlaksana Meeting of Board of Commissioners Risk Management Monitoring Committee by inviting the Board of Directors has been carried out	✓
2	Evaluasi dan menyampaikan arahan tentang Penguatan Manajemen Risiko Perseroan Evaluation and providing direction on Strengthening the Company's Risk Management	✓
3	Kunjungan kerja ke satelit dalam rangka melakukan <i>monitoring</i> dan pengawasan atas program sebagaimana telah dianggarkan dalam RKAP Working visit to the satellite in order to monitor and supervise the program as budgeted in the RKAP	✓
4	Peningkatan profesionalisme Dewan Komisaris melalui menghadiri Seminar, <i>Workshop</i> dan Sosialisasi di dalam negeri dan luar negeri Improving the Board of Commissioners' professionalism by attending seminars, workshops and socialization programs at home and abroad	✓



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berpedoman pada ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan prosedur dan proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta sistem dan besaran remunerasinya.

Dalam koridor implementasi GCG, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bentuk salah satu bentuk transparansi Perseroan khususnya dalam proses nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 70; Tambahan Lembaran Negara No. 4297).
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106; Tambahan Lembaran Negara No. 4756).
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, di antaranya menyangkut pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
7. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
8. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator (Parameter) Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Guided by the provisions of POJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the Company established a Nomination and Remuneration Committee to assist the Board of Commissioners in implementing the procedures and process for nominating members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the system and the amount of remuneration.

In the corridor of GCG implementation, the formation of a Nomination and Remuneration Committee is a form of transparency for the Company, especially in the nomination and remuneration process for Board of Commissioners and Board of Directors.

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 No. 70; Supplement to State Gazette No. 4297).
2. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 No. 106; Supplement to State Gazette No. 4756).
3. Government Regulation No. 101 of 2021 dated October 1, 2021 concerning the Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, and the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
4. Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, including the establishment of a Supporting Organ for Board of Commissioners/Supervisory Board for the formation of Nomination and Remuneration Committee.
5. Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-14/MBU/10/2021 concerning Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
6. Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation No. PER- 11/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises.
7. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which states that in carrying out supervisory duties, Board of Commissioners can form a Committee whose members are one or more members of Board of Commissioners and are responsible to the Board of Commissioners.
8. Secretary of the Ministry of SOE Decree No. SK16/S. MBU/2012 concerning Indicators (Parameters) for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.



9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
12. Akta Pendirian Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10 Tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H. Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. di Jakarta sebagaimana telah disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012.
13. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk No. 12 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Silfia, S.H. Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0206655 tanggal 21 Mei 2018.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008618.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
16. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 14 Mei 2018.
17. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. 18/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
9. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
10. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.
11. State-Owned Enterprises Ministerial Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
12. Deed of Establishment of PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10 dated November 5, 2012, made before Yulianti Irawati, S.H. Replacement notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. in Jakarta as approved in the Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-58515.AH.01.01 of 2012.
13. Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk No. 12 dated May 21, 2018, made before Silfia, S.H. Replacement notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., which has been ratified by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0206655 dated May 21, 2018.
14. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Establishment and Guidelines for Implementing the Work of Nomination and Remuneration Committee.
15. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No. AHU-0008618.AH.01.02. 2018 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
16. Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Decree No. 10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 concerning the Dismissal and Appointment of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal dated May 14, 2018.
17. Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Decree No. 18/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning Determination of Chairperson and Members of Nomination and Remuneration Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi disusun dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 tanggal 19 Desember 2018. Guna menyelaraskan dengan aturan dan ketentuan baru yang dapat berdampak pada pelaksanaan kerja Nominasi dan Remunerasi, Piagam Komite ini telah diperbarui pada tanggal 1 Oktober 2022.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan landasan dan pedoman kerja yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee Charter was prepared and stipulated based on the Board of Commissioners Decree No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 dated December 19, 2018. In order to align with new rules and regulations that may impact the implementation of Nomination and Remuneration work, this Committee Charter has been updated on October 1, 2022.

The Nomination and Remuneration Committee Charter is a binding work basis and guideline and must be adhered to by all members of Nomination and Remuneration Committee in carrying out their duties and responsibilities.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pokok-pokok aturan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum
2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Rapat komite
6. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite
7. Akses Kerahasiaan Informasi
8. Rencana Kerja dan Anggaran
9. Penghasilan Anggota Komite
10. Pendidikan dan Tenaga Penunjang
11. Penilaian Kinerja

Tugas dan tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan yang telah diatur dalam Piagam Komite, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perseroan dan Direksi anak perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta Perseroan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Kebijakan remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
5. Melakukan evaluasi kinerja secara individual dan kolegal bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan usulan program pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee Charter contains the following rules:

1. Legal Framework
2. Procedures for Appointment and Dismissal of Committee Members
3. Duties, Responsibilities and Authority of the Committee
4. Membership Requirements
5. Committee meeting
6. Report on the Implementation of Committee Duties
7. Access to Confidentiality of Information
8. Work Plan and Budget
9. Income of Committee Members
10. Education and Supporting Personnel
11. Performance Appraisal

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of Nomination and Remuneration Committee, as regulated in the Committee Charter, are as follows:

1. Provide recommendations regarding prospective members of the Company's Board of Directors and Subsidiary Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Conduct regular reviews of the Company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation. Prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for selecting and/or replacing members of Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).
3. Evaluate remuneration policies.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).
 - b. The remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.
5. Conduct individual and collegial performance evaluations for Board of Directors and/or Board of Commissioners.
6. Prepare proposals for competency development programs for members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.
7. Evaluate remuneration policies for employees which require approval/response from the Board of Commissioners.
8. Evaluate the Board of Directors' proposals regarding the Company's organizational structure.
9. Carry out other tasks as requested by the Board of Commissioners.



Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Piagam Komite, adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan Perseroan secara khusus.
6. Anggota Komite harus bersifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan maupun dalam kenyataan.
7. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Memiliki kemampuan dalam menulis laporan yang baik untuk menuangkan evaluasi dan analisa kriteria nominasi dan sistem remunerasi.
9. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Masa Jabatan dan Komposisi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Ketua dan/atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatannya tidak dapat melebihi dari masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota komite yang merupakan pihak independen berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Nomination and Remuneration Committee Criteria

The criteria for Nomination and Remuneration Committee, in accordance with the provisions stipulated in the Committee Charter, are as follows:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration.
2. Has no personal interests/relationships that could have a negative impact and conflict of interest on the Company.
3. Able to communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to complete the duties.
5. The members collectively have a balance of expertise and experience with a broad background understanding of business in general and the Company in particular.
6. Committee members must be independent, objective and professional both in appearance and in reality.
7. Has no familial relationship by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of Board of Commissioners and Board of Directors.
8. Have the ability to write good reports to provide evaluation and analysis of nomination criteria and remuneration systems.
9. Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Term of Office and Composition

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015, term of office of members of Nomination and Remuneration Committee who are not members of Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a 2 (two) year term of office, with does not reduce the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

The chairman and/or members of Nomination and Remuneration Committee who are members of the Company's Board of Commissioners, their terms of office cannot exceed their terms of office as members of the Company's Board of Commissioners. All members of Nomination and Remuneration Committee whose terms of office have ended can only be reappointed for 1 (one) subsequent period.

Membership of Remuneration and Nomination Committee consists of 1 (one) Chairman who is an Independent Commissioner and at least 1 (one) committee member who is an independent party from outside the Company or a party who holds a managerial position under the Directors in charge of Human Capital.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Abdur Rahim Hasan	Ketua Komite Chairman of Committee	Anggota Komite Member of Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.15/KEP-DK/VIII/IKT-20 tanggal 20 Agustus 2020 Board of Commissioners Decree No.15/KEP-DK/VIII/IKT-20 dated August 20, 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following his term of office as Independent Commissioner	Pertama First
LM. Arya Bima Yudiantara	Anggota Komite Member of Committee	Anggota Komite Member of Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 tanggal 29 Juni 2021 Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Decree Number 20/KEPDK/VI/IKT-2021 dated June 29, 2021	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following his term of office as Independent Commissioner	Pertama First
Ahmad Alyani Addarain	Anggota Komite Member of Committee	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/25/07/02/IPCC-23 tanggal 25 Juli 2023 Board of Commissioners Decree No. DK/25/07/02/IPCC-23 dated July 25, 2023	2023-2026	Kedua Second

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Profile

Abdur Rahim Hasan

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen
Chairman of Nomination and Remuneration Committee/Independent Commissioner

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
The complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.

LM. Arya Bima Yudiantara

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen
Member of Nomination and Remuneration Committee/Independent Commissioner

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
The complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.





Ahmad Alyani Addarain

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of Nomination and Remuneration Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 36 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 36 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/25/07/02/IPCC-23 tanggal 25 Juli 2023 Board of Commissioners Decree No. DK/25/07/02/IPCC-23 dated July 25, 2023
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada None
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Psikologi Universitas Negeri Semarang (2013) Bachelor of Psychology, Universitas Negeri Semarang (2013)
Sertifikasi Certification	1. Program GRC Summit 2023, Building Resilient Future Through GRC and ESG yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2023 2. QRG (Qualified Risk Governance Profesional)/CRGP (Certified Risk Governance Profesional) yang dilaksanakan pada 23 – 24 September 2024 1. GRC Summit 2023 Program, Building Resilient Future Through GRC and ESG which was held on August 23, 2023 2. QRG (Qualified Risk Governance Professional)/CRGP (Certified Risk Governance Professional) which was held on September 23-24, 2024
Riwayat Karier Work Experience	• Supervisor HRD di PT Suzuki Mobil Cirebon (2013-2014) • CMO di PT Astra Credit Companies (2014-2015) • Staff HRD di PT Riyana Cipta Pangan sebagai HRD (2015-2016) • Supervisor Area HRD di PT Wirasindo Santakarya (2016-2017) • Marketing Advisor di PT Summit Global Indonesia (2017-2019) • PT Indonesia Kendaraan Terminal sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi (2018-Sekarang) • HRD Supervisor at PT Suzuki Mobil Cirebon (2013-2014) • CMO at PT Astra Credit Companies (2014-2015) • HRD Staff at PT Riyana Cipta Pangan as HRD (2015-2016) • HRD Area Supervisor at PT Wirasindo Santakarya (2016-2017) • Marketing Advisor at PT Summit Global Indonesia (2017-2019) • PT Indonesia Kendaraan Terminal as Nomination and Remuneration Committee (2018-Present)

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan dapat memastikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, serta penuh itikad baik.

Seluruh personel Komite Nominasi dan Remunerasi periode berjalan telah memenuhi syarat independensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Informasi lebih rinci tentang independensi masing-masing personel Komite Nominasi dan Remunerasi diuraikan pada tabel berikut ini:

INDEPENDENCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERS

The Company can ensure that the Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, and in good faith.

All personnel of Nomination and Remuneration Committee for the current period have met the independence requirements in accordance with applicable regulations. More detailed information on the independence of each Nomination and Remuneration Committee personnel is described in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	Abdur Rahim Hasan	LM. Arya Bima Yudiantara	Ahmad Alyani Addarain
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have financial relationships with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not have management relationships in the company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have share ownership relationships in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have family relationships with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	✓	✓	✓

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Piagam (*Charter*) Komite, guna membahas hal-hal terkait prosedur nominasi dan sistem remunerasi yang diterapkan di Perseroan.

Pada tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 17 (tujuh belas kali) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Abdur Rahim Hasan	Ketua Komite Chairman of Committee	17	17	100%
LM. Arya Bima Yudiantara	Anggota Komite Member of Committee	17	17	100%
Ahmad Alyani Addarain	Anggota Komite Member of Committee	17	17	100%

Berikut rincian rapat dan agenda rapat yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2024:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Nomination and Remuneration Committee is obliged to hold meetings in accordance with the provisions stipulated in the Committee Charter, to discuss matters related to nomination procedures and the remuneration system implemented in the Company.

In 2024, Nomination and Remuneration Committee has held 17 (seventeen) times with the attendance level of each Committee member as described in the following table:

The following is a detailed list of meetings and meeting agenda attended by Nomination and Remuneration Committee throughout 2024:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	16 Januari 2024 January 16, 2024	Pembahasan program kerja bidang SDM tahun 2024 Discussion on the 2024 human capital work program	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
2	27 Januari 2024 January 27, 2024	Pembahasan perdir tata kelola organ pendukung Dewan Komisaris Discussion on the governance of supporting organs of board of commissioners	KA, KNR, KPMR
3	22 Februari 2024 February 22, 2024	Pembahasan RKAP 2024 tentang beban gaji pegawai, tantiem / bonus, dan pengelolaan SDM Discussion on the 2024 RKAP (Annual Work and Budget Plan) on employee salary burden, tantiem/bonuses, and human capital management	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
4	26 Maret 2024 March 26, 2024	Pembahasan pengembangan dan pelaksanaan karier dengan SDM Discussion on career development and implementation with HC	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
5	17 April 2024 April 17, 2024	Pemenuhan GCG dan RUPS Compliance with GCG and GMS	KA, KNR, KPMR
6	14 Mei 2024 May 14, 2024	Konsolidasi komite dan pembahasan terkait hak dan kewajiban serta fasilitas dewan komisaris dan organ komite Committee consolidation and discussions related to the rights and obligations as well as the board of commissioners and committee organs facilities	KA, KNR, KPMR
7	05 Juni 2024 June 5, 2024	Rapat <i>partnership</i> RUPS GMS partnership meeting	KA, KNR, KPMR dan Manajemen KA, KNR, KPMR, Management (HC & General))
8	24 Juni 2024 June 24, 2024	Struktur organisasi PT IKT tbk dan terkait <i>manpower</i> satelit serta <i>review</i> kontrak dengan <i>kopegmar</i> dan PDS Organizational structure of PT IKT Tbk and related satellite manpower as well as contract review with co-managers and PDS	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)



No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
9	16 Juli 2024 July 16, 2024	Pembahasan aksi mogok kerja dari pekerja vendor pihak ketiga Discussion on the strike action of third-party vendor workers	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
10	22 Juli 2024 July 22, 2024	Updating pengelolaan pegawai organik dan non-organik dan remunerasinya Updating the management of organic and non-organic employees and their remuneration	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
11	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Pembahasan revisi progja komite Discussion on the committee's work program revision	KA, KNR, KPMR
12	12 September 2024 September 12, 2024	Pembahasan RMI BPKP Discussion on the RMI BPKP	KA, KNR, KPMR dan Manajemen (Divisi Resiko) KA, KNR, KPMR and Management (Risk Division)
13	31 September 2024 September 31, 2024	Pembahasan <i>updating</i> sk remunerasi, fasilitas dan tunjangan dan biaya operasional Direksi Komisaris 2024, pembahasan terkait besaran tantiem Direksi dan Komisaris Discussion on updating the remuneration scale, facilities and benefits, and 2024 operational costs of board of directors and board of commissioners, discussion regarding the amount of board of directors and board of commissioners tantiem	KNR, Sesdekomp dan Manajemen (SDM & Umum) KNR, Secretary of BoC and Management (HR & General)
14	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Persetujuan kerjasama dan persetujuan atas nilai perjanjian Approval of cooperation and agreement value	KA, KNR, KPMR
15	14 November 2024 November 14, 2024	Konsinyering lahan eks puma Consignment of former puma land	KA, KNR, KPMR dan Manajemen KA, KNR, KPMR and Management
16	07 Desember 2024 December 7, 2024	Update <i>progress assessment</i> kinerja karyawan dan pembahasan terkait usulan Direksi baru Update progress assessment of employee performance and discussion related to the proposed new board of directors	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
17	24 Desember 2024 December 24, 2024	Pembahasan LHA semester 1 Discussion on LHA for First Semester	KA, KNR, KPMR dan SPI KA, KNR, KPMR and SPI

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Komite Nominasi dan Remunerasi telah berperan aktif mendukung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan prosedur nominasi dan penetapan sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sepanjang tahun 2024 Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan berbagai rekomendasi tentang hal-hal berikut ini:

1. Laporan Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024;
2. Tanggapan Penyampaian Usulan Revisi RKAP Tahun 2024 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
3. Tanggapan Permohonan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
4. Tanggapan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Nomenklatur PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
5. Tanggapan Usulan Besaran Gaji, tunjangan fasilitas Direksi dan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
6. Tanggapan Tantiem Direksi dan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
7. Tanggapan Usulan Besaran Biaya Operasional Direksi dan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
8. Arahan/Nasihat terkait Pengembangan karier dan suksesi manajemen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
9. Arahan/Nasihat terkait Pengelolaan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Report on the Implementation of Nomination and Remuneration Committee Duties for 2024

Nomination and Remuneration Committee has played an active role in supporting the Board of Commissioners in implementing nomination procedures and determining the remuneration system for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors. Throughout 2024, Nomination and Remuneration Committee has provided various recommendations regarding the following matters:

1. Annual Report of Nomination and Remuneration Committee for 2024;
2. Response to Submission of Revised 2024 Business Plan Proposal of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
3. Response to Request for 2021-2025 Long Term Company Plan (RJPP) of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
4. Response to the Organizational Structure and Nomenclature Proposal Changes of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
5. Response to Proposal for Salary Amount, Facilities and Allowances of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
6. Response to Tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
7. Response to Proposal for Operational Cost Amounts of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
8. Directions/Advice regarding Career Development and Management Succession of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
9. Directions/Advice regarding Human Capital Management of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam pelaksanaan kebijakan suksesi Direksi Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran dalam menyiapkan dan memberikan rekomendasi proposal kandidat calon Anggota Direksi berdasarkan pemenuhan persyaratan, hasil Uji Kompetensi dan Kelayakan serta hasil evaluasi lainnya.

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan

Perseroan mendorong peningkatan kompetensi seluruh organ pendukung Dewan Komisaris, termasuk Komite Nominasi dan Remunerasi, melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tertuang dalam Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor HK.56/4/5/IKT-17 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan sangat penting bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam memberikan rekomendasi yang objektif dan berkualitas.

Pelaksanaan pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Policy on Board of Directors' Succession

In implementing the Company's Board of Directors succession policy, Nomination and Remuneration Committee has a role in preparing and providing recommendations for proposals for prospective members of Board of Directors based on the fulfillment of requirements, Competency and Eligibility Test results and other evaluation results.

One of the tasks of Remuneration and Nomination Committee is to develop a nomination system for members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors which will become part of the Company's Corporate Governance Policy and serve as a guideline for Board of Commissioners and the GMS in determining the remuneration and nomination of members of Board of Commissioners and/or Board of Directors.

Nomination and Remuneration Committee Training and/or Competency Development

Policy

The Company encourages the competency improvement of all supporting organs of Board of Commissioners, including the Nomination and Remuneration Committee, through the human capital development policy as stated in the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number HK.56/4/5/IKT-17 dated June 15, 2017 concerning Guidelines for Human Capital Development in the Environment of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Continuous training and competency development are very important for members of Nomination and Remuneration Committee to support the effectiveness of the Committee's duties and responsibilities in providing objective and quality recommendations.

Implementation of Training and/or Competency Development in 2024

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Nomination and Remuneration Committee Training and Competency Development in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Abdur Rahim Hasan	Pelatihan Training	QRGP(Qualified Risk Governance Profesional)/CRGP (Certified Risk Governance Profesional)	23 - 24 September 2024 September 23 - 24, 2024	CRMS Indonesia & BNSP support by PMLI
LM. Arya Bima Yudiantara	Pelatihan Training	QRGP(Qualified Risk Governance Profesional)/CRGP (Certified Risk Governance Profesional)	23 - 24 September 2024 September 23 - 24, 2024	CRMS Indonesia & BNSP support by PMLI
Ahmad Al Yani Addarain	Pelatihan Training	QRGP(Qualified Risk Governance Profesional)/CRGP (Certified Risk Governance Profesional)	23 - 24 September 2024 September 23 - 24, 2024	CRMS Indonesia & BNSP support by PMLI



Penilaian dan Evaluasi Atas Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Dewan menilai bahwa Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2024 “Sangat Baik”, sesuai dengan pencapaian atau realisasi rencana kerja tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana diuraikan berikut ini

Assessment and Evaluation of the Performance of Nomination and Remuneration Committee in 2024

The Board assessed the Performance of Nomination and Remuneration Committee throughout 2024 as “Very Good”, in accordance with the achievement or realization of the annual work plan of Risk Management Monitoring Committee as described below

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
1	Evaluasi penerapan prinsip - prinsip GCG bidang SDM Evaluation of the implementation of GCG principles in the HC sector	✓
2	Pembahasan dan review usulan RKAP bidang SDM Discussion and review of RKAP proposal in the HC sector	✓
3	Rapat koordinasi triwulan bersama divisi SDM (Sinergi dengan Rapat Koordinasi Komite Audit /KPMR) Quarterly coordination meeting with HC division (Synergy with Audit Committee Coordination Meeting/KPMR)	✓
4	Kajian usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Review of remuneration proposal for Board of Commissioners and Board of Directors	✓
5	Kajian/rekomendasi atas desain dan pola struktur organisasi perusahaan berdasarkan usulan Direksi dan/atau penugasan Dewan Komisaris Review/recommendations on the design and pattern of the Company's organizational structure based on proposals from Board of Directors and/or assignments from Board of Commissioners	✓
6	Review atas penerapan sistem manajemen karier pekerja Review of the implementation of employee career management system	✓
7	Kunjungan kerja (<i>Benchmarking</i>) Work visit (<i>Benchmarking</i>)	✓
8	Menyusun rencana kerja dan anggaran KNR Prepare KNR work plans and budgets	✓
9	Penyusunan laporan triwulan KNR Preparation of KNR quarterly reports	✓
10	Seminar/pelatihan/ <i>workshop</i> /studi banding Seminar/training/ <i>workshop</i> /comparative study	✓
11	Rapat dengan Dewan Komisaris Meeting with Board of Commissioners	✓
12	Rapat internal KNR (minimal satu bulan sekali) KNR internal meeting (at least once a month)	✓



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING ORGANS

KOMITE INVESTASI

Dalam rangka mendukung efektivitas pengusulan investasi dan memperhatikan aspek GRC (*Governance, Risk and Compliance*) dalam proses pengambilan keputusan Perseroan terkait dengan pengelolaan investasi serta mendukung peningkatan pencapaian target penyerapan anggaran investasi IPCC, maka IPCC membentuk Komite Investasi. Pembentukan Komite Investasi melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 tentang Pembentukan Tim Komite Investasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

PEDOMAN KERJA KOMITE INVESTASI

Pedoman kerja Komite Investasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 tentang Pembentukan Tim Komite Investasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE INVESTASI

Tim Komite Investasi memiliki tugas untuk:

1. Melakukan analisis kelengkapan dokumen yang disampaikan pengusul investasi mengacu kepada persyaratan pengajuan investasi sesuai fungsi kerja masing-masing;
2. Mengevaluasi draf usulan investasi, dan kesesuaian dokumen investasi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan dan aturan-aturan keuangan yang berlaku;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengusul investasi atas item investasi yang belum sesuai dengan persyaratan dokumen kelengkapan sesuai fungsi kerja masing - masing;
4. Memberikan masukan dan upaya percepatan pelaksanaan program investasi;
5. Menyampaikan draft hasil evaluasi usulan investasi kepada Direksi guna mendapat penetapan dan persetujuan Direksi.

INVESTMENT COMMITTEE

In order to support the effectiveness of investment proposals, taking into account the GRC (*Governance, Risk and Compliance*) aspects in the Company's decision-making process related to investment management and to support the increase in the achievement of IPCC investment budget absorption target, IPCC has formed an Investment Committee. The establishment of Investment Committee is through the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 dated March 13, 2024 concerning the Establishment of Investment Committee Team at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

INVESTMENT COMMITTEE WORK GUIDELINES

The Investment Committee work guidelines refer to the Decree of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number SK.01.02/13/3/1/AMR/DIRUT/IKT-24 dated March 13, 2024 concerning the Establishment of Investment Committee Team at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

INVESTMENT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Investment Committee Team has the following duties:

1. Analyze the completeness of documents submitted by investment proposers referring to the investment submission requirements according to their respective work functions;
2. Evaluate the draft investment proposal, and the conformity of investment documents with the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Management Work Plan (RKM) and applicable financial regulations;
3. Communicate and coordinate with investment proposers on investment items that do not comply with the completeness document requirements according to their respective work functions;
4. Provide input and efforts to accelerate the implementation of investment programs;
5. Submit a draft of the results of the investment proposal evaluation to Board of Directors in order to obtain the Board of Directors' determination and approval.

Struktur Keanggotaan Komite Investasi

Investment Committee Membership Structure

No	Jabatan Job Title	Posisi Position
1	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Ketua Chairman
2	Senior Manager Strategi & Pengembangan Bisnis Senior Manager of Strategy & Business Development	Sekretaris 1 Secretary 1



Struktur Keanggotaan Komite Investasi

Investment Committee Membership Structure

No	Jabatan Job Title	Posisi Position
3	Senior Manager Teknik & Sistem Informasi	Sekretaris 2 Secretary 1
4	Senior Manager Sekretaris Perusahaan	Anggota Member
5	Senior Manager Manajemen Risiko & Sistem Manajemen	Anggota Member
6	Senior Manager Keuangan	Anggota Member
7	Senior Manager SDM & Umum	Anggota Member
8	Senior Manager Komersial	Anggota Member
9	Senior Manager Operasi & Terminal Satelit	Anggota Member
10	Senior Manager Audit Internal	Anggota Member
11	Branch Manager Jakarta	Anggota Member

PROFIL KOMITE INVESTASI

INVESTMENT COMMITTEE PROFILE

Wing Mengatoro

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Ketua Komite Investasi
 Director of Finance, HC and Risk Management
 Chairman of Investment Committee

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
 The profile can be seen in the discussion of Board of Directors' Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Berry Tagore

Senior Manager Strategi & Pengembangan Bisnis
Sekretaris I
 Senior Manager of Strategy & Business Development
 Secretary I

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
 The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Tatan Sontana

Senior Manager Teknik & Sistem Informasi
Sekretaris 2
 Senior Manager of Technical & Information Systems
 Secretary 2

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
 The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.



Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari

Senior Manager Sekretaris Perusahaan

Anggota

Senior Manager of Corporate Secretary

Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Dawud

Senior Manager Manajemen Risiko & Sistem Manajemen

Anggota

Senior Manager of Risk Management & Management Systems

Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Agus Wahyudi

Senior Manager Keuangan

Anggota

Senior Manager of Finance

Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Safrial

Senior Manager SDM & Umum

Anggota

Senior Manager of HC & General Affairs

Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Nugroho Atmosudiro

Senior Manager Komersial

Anggota

Senior Manager of Commercial

Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Kusno Utomo

Senior Manager Operasi & Terminal Satelit

Anggota

Kusno Utomo

Senior Manager of Operations & Satellite Terminal

Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.



Kamal Akhyar

Senior Manager Audit Internal

Anggota

Senior Manager of Internal Audit

Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

Dimas Rizky Kusmayadi

Branch Manager Jakarta

Anggota

Jakarta Branch Manager

Member

Profil dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the discussion of Executive Officer Profile, Company Profile Chapter, this Annual Report.

INDEPENDENSI KOMITE INVESTASI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Investasi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Seluruh anggota Komite tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, para anggota Komite juga bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang kepemilikannya dapat memengaruhi objektivitas dan independensi dalam memberikan pertimbangan, nasihat, atau rekomendasi kepada manajemen.

Komite Investasi juga tidak memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya. Dengan demikian, Komite dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi pihak manapun demi kepentingan terbaik Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi

Sejak dibentuk pada Maret 2024, Komite Investasi mulai aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi usulan investasi dari unit-unit kerja di lingkungan Perseroan. Komite Investasi melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan rencana strategis Perseroan, serta mengkaji potensi risiko dan aspek kepatuhan yang terkait dengan setiap usulan investasi.

Selama periode Maret hingga Desember 2024, Komite telah memberikan berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Komite juga secara aktif menjalin komunikasi dengan pengusul investasi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kualitas usulan yang diajukan sesuai dengan standar tata kelola yang berlaku.

INDEPENDENCE OF INVESTMENT COMMITTEE

In carrying out its duties and responsibilities, all members of Investment Committee consistently uphold the principle of independence as stipulated in the provisions of Good Corporate Governance. None of the Committee members have any affiliation with Board of Directors, Board of Commissioners, or Controlling Shareholders. Additionally, the Committee members are not shareholders of the Company whose ownership could influence objectivity and independence when providing considerations, advice, or recommendations to management.

Investment Committee also has no personal interests or other interests that could create a conflict of interest in the execution of its functions and authority. Thus, the Committee can perform its duties professionally, objectively, and free from the intervention of any party, for the best interests of the Company and all stakeholders.

Execution of Investment Committee's Duties

Since its establishment in March 2024, Investment Committee has actively carried out its duties and responsibilities in evaluating investment proposals from the Company's various work units. Investment Committee reviews the completeness of the documents, their alignment with the Company's strategic plans, and assesses potential risks and compliance aspects related to each investment proposal.

During the period from March to December 2024, the Committee has provided various inputs and recommendations to Board of Directors as a consideration in the investment decision-making process. The Committee has also actively communicated with the investment proponents to ensure the completeness of documents and the quality of proposals submitted in accordance with applicable governance standards.



Pelaksanaan Rapat dan Frekuensi Rapat Komite Investasi

Sejak dibentuk pada bulan Juni 2024, Komite Investasi telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat, baik secara tatap muka di Kantor Pusat Perseroan. Seluruh hasil rapat terdokumentasi secara sistematis dan dilaporkan kepada Direksi sebagai bagian dari tata kelola dan pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.

Partisipasi aktif dan disiplin kehadiran para anggota mencerminkan komitmen Komite dalam menjalankan peran strategisnya dalam mendukung efektivitas pengelolaan investasi Perseroan.

Meeting Implementation and Meeting Frequency of Investment Committee

Since its formation in June 2024, Investment Committee has held 3 (three) meetings, all conducted in person at the Company's Head Office. All meeting outcomes are systematically documented and reported to Board of Directors as part of transparent and accountable governance and decision-making processes.

The active participation and disciplined attendance of the members reflect the Committee's commitment to carrying out its strategic role in supporting the effectiveness of the Company's investment management.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY



Dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan, diperlukan adanya peran Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar-organ Perseroan dan sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan Perseroan dengan regulator, Pemegang Saham, media, dan pihak eksternal lainnya.

Fungsi Sekretaris Perusahaan di Perseroan telah selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi kesekretariatan perusahaan dan memastikan kepatuhan Perseroan kepada peraturan dan prinsip GCG. Sekretaris Perusahaan memiliki posisi strategis dalam membangun *corporate image* IPCC.

In order to improve transparency, service and communication to stakeholders as an implementation of the principles of good corporate governance in the Company, the role of Corporate Secretary is required.

Corporate Secretary is a supporting organ for Board of Directors which plays an important role in facilitating communication between the Company's organs and as a liaison that bridges the interests of the Company with regulators, Shareholders, media and other external parties.

The function of Corporate Secretary in the Company is in line with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Corporate Secretary carries out Company secretarial functions and ensures the Company's compliance with GCG regulations and principles. Corporate Secretary has a strategic position in building IPCC corporate image.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.04/2017;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Legal Basis:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies as amended by Financial Services Authority Regulation 10/POJK.04/2017;
4. Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
5. Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites;
6. Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
7. Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies;
8. Financial Services Authority Circular Number 30/SEOJK.04/2016 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan IPCC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada beberapa pedoman kerja, di antaranya:

1. Pedoman *Good Corporate Governance*
2. Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi
3. Pedoman *Sponsorship* atau Bentuk Bantuan Lainnya
4. Pedoman Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tahunan
5. Pedoman Penyaluran Dana CSR
6. Pedoman Pelaksanaan RUPS
7. Pedoman Pengelolaan Informasi dengan Media
8. Pedoman *Visit* dan *Field Trip*

Struktur dan Organisasi

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan beserta susunan pejabat dan pemimpin unit kerja di bawahnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. KP.428/1/1/IKT-18 tentang Alih Tugas/Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 23 Juli 2018, diuraikan pada bagan di bawah ini:

Corporate Secretary Work Guidelines

IPCC Corporate Secretary carries out duties and responsibilities referring to several work guidelines, including:

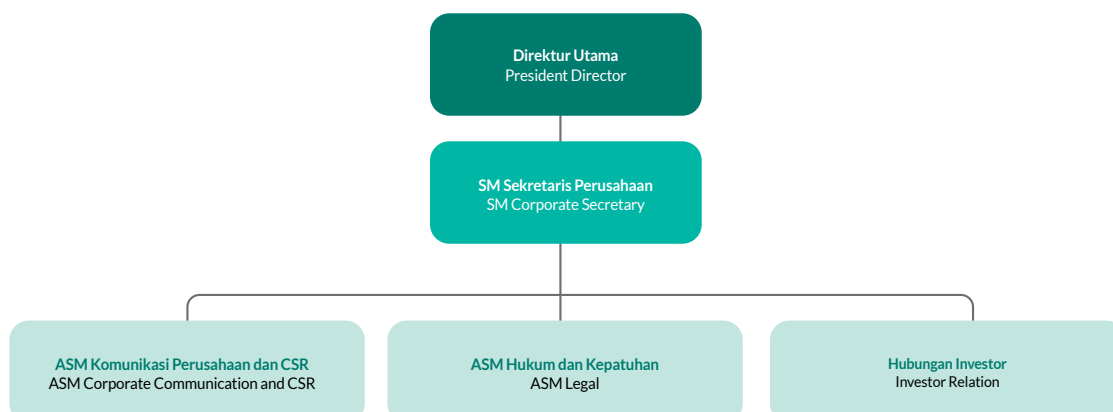
1. Code of Good Corporate Governance
2. Guidelines for Work Procedures for Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors
3. Guidelines for Sponsorship or Other Forms of Assistance
4. Guidelines for Preparing and Preparing Annual Reports
5. Guidelines for Distribution of CSR Funds
6. Guidelines for Implementing GMS
7. Guidelines for Information Management with Media
8. Visit and Field Trip Guidelines

Structure and Organization

The organizational structure of Corporate Secretary along with the composition of officials and head of work units under it are as stipulated in the Board of Directors Decree of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. KP.428/1/1/IKT-18 concerning Transfer of Duties/Positions for Employees within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated July 23, 2018, described in the chart below:



Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan IPCC Organizational Structure of IPCC Corporate Secretary



Dalam menjalankan fungsi dan peranannya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan membawahi 3 (tiga) divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, yaitu:

1. Komunikasi Perusahaan dan CSR
2. Hukum
3. Hubungan Investor

Masing-masing divisi tersebut dipimpin oleh seorang Asisten Senior Manajer (ASM).

In carrying out its functions and roles, Corporate Secretary is directly responsible to the President Director. Corporate Secretary oversees 3 (three) divisions which have different duties and responsibilities, namely:

1. Corporate Communication and CSR
2. Legal
3. Investor Relations

Each division is led by an Assistant Senior Manager (ASM).

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari

Senior Manager Sekretaris Perusahaan
Senior Manager of Corporate Secretary

Menjabat Sejak 1 Februari 2023
Serving Since February 1, 2023

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun, berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia Indonesian citizen, 44 years old, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Senior Manager Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 31 Januari 2024 Served as Senior Manager of Corporate Secretary based on the Decree of Board of Directors No. KP.10.02/31/1/1/RKTK/SDMA/PLND-24 dated January 31, 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background

- S1, Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2004
- S2, Erasmus University Rotterdam, 2014
- Bachelor's degree in Management, Universitas Gadjah Mada, 2004
- Master's degree in Erasmus University Rotterdam, 2014

Riwayat Karier Work Experience

- Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Jan 2024)
- Department Head Pemasaran Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2022)
- Deputy Vice President Hubungan Pelanggan Non Peti Kemas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021)
- Deputy Vice President Pelayanan Pelanggan PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018-2019)
- Asisten Manager Customer Service PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2018)
- Asisten Manager Komersial & Pengembangan Bisnis Tanjung Priok (2014-2015)
- Senior Manager of Strategy and Business Development at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2022- Jan 2024)
- Head of Regional Marketing Department 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2022)
- Deputy Vice President of Non-Container Customer Relations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021)
- Deputy Vice President of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018-2019)
- Assistant Manager of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2018)
- Assistant Manager of Commercial & Business Development of Tanjung Priok (2014-2015)



Riwayat Pelatihan Training Record

- Program *Training & Executive Development* 2024 – Pendampingan Persiapan Assessment di Lingkungan PT IKT Tbk, PT PMLI (5 – 6 Februari 2024)
- *Mastering The Art of Market – Friendly Investor Relations*, PT PMLI (4 -5 Juli 2024)
- Pelatihan *Awareness ISO 9001, 14001, 45001, dan 37001*, PT PMLI (12 -14 Agustus 2024)
- *Workshop BCM (Business Continuity Management)* Tahun 2024, PT PMLI (30 September dan 1 Oktober 2024)
- Pelatihan Auditor Internal ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 dan 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT PMLI (23 -24 Oktober 2024)
- *Training & Executive Development Program* 2024 – Assessment Preparation Assistance in PT IKT Tbk Environment, PT PMLI (February 5 – 6, 2024)
- *Mastering The Art of Market – Friendly Investor Relations*, PT PMLI (July 4-5, 2024)
- *ISO 9001, 14001, 45001, and 37001 Awareness Training*, PT PMLI (August 12-14, 2024)
- *BCM (Business Continuity Management) Workshop* 2024, PT PMLI (September 30 and October 1, 2024)
- *Internal Auditor Training ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 and 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT PMLI* (October 23-24, 2024)

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dan Pedoman *Good Corporate Governance*, antara lain adalah:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Menata usahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS;
4. Mengelola Rapat Direksi;
5. Mengelola Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perseroan secara umum;
7. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
8. Menangani dan mengoordinasi permasalahan legal Perseroan;
9. Menata usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perseroan;
10. Mengoordinasi program kerja dan aktivitas Sekretaris Direksi;
11. Mengikuti perkembangan/peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
13. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *stakeholders* atas informasi yang dibutuhkan modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
14. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan), termasuk penyusunan dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Corporate Secretary Duties and responsibilities

The duties and responsibilities of Corporate Secretary as regulated in the Guidelines for Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors and Guidelines for Good Corporate Governance, include:

1. Ensure that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;
2. Provide information required by Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Administer and store Company documents, including but not limited to, Shareholder Register, Special Register and minutes of Board of Directors' meetings, Board of Commissioners' meetings and the GMS;
4. Managing Board of Directors' Meetings;
5. Manage Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors;
6. Assist the Board of Directors in solving general Company issues;
7. Supervise the implementation of applicable regulations while remaining guided by GCG principles;
8. Handle and coordinate the Company's legal issues;
9. Administer and store Company documents;
10. Coordinate the work program and activities of Secretary of Board of Directors;
11. Follow applicable developments/regulations in the Capital Market sector;
12. Provide input to Board of Directors to comply with Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets;
13. Provide services to the public or stakeholders regarding information needed for capital related to the Company condition;
14. As a liaison officer between the Company and related institutions and the community (external and environmental), including the preparation and implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program.



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2024

Di sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan IPCC telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi Rapat Dewan, Rapat gabungan Komisaris dan Direksi, dan Rapat Direksi beserta dengan pengelolaan Notulensi Rapat.
3. Pelaksanaan keterbukaan informasi melalui penerbitan Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, serta mempublikasikan Laporan Keuangan Perseroan
4. Menyelenggarakan *public expose*.
5. Pengelolaan media komunikasi resmi IPCC seperti situs web dan akun media sosial sebagai bentuk keterbukaan informasi dan promosi.
6. Pelaksanaan program *media relations* melalui siaran pers dan *media gathering* serta pemberitaan positif.
7. Melakukan penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media Televisi.
8. Melakukan pendampingan dalam kedinasan Direksi.
9. Membuat agenda kerja bagi Direksi.
10. Monitoring terhadap implementasi *corporate identity*.
11. Menerbitkan materi promosi *corporate* dan promosi layanan.
12. Pelaksanaan komunikasi kepada internal dengan mengadakan 1 (satu) kali Rapat Kerja Nasional.
13. Pelaksanaan *event* seperti Safari Ramadan, Halalbihalal, peringatan HUT Kemerdekaan RI, dan peringatan HUT IPCC.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Kebijakan

Pelatihan dan pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan merupakan bagian penting dari komitmen Perseroan dalam memastikan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini sejalan dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, serta SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, yang mengatur bahwa Sekretaris Perusahaan wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai pasar modal, tata kelola perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan mendukung pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan melalui partisipasi dalam pelatihan, seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang relevan, baik yang diselenggarakan oleh otoritas, asosiasi pasar modal, maupun pihak eksternal Perseroan lainnya.

Competency Development Program in 2024

Throughout 2024, IPCC Corporate Secretary has carried out the following duties and responsibilities:

1. Organizing General Meetings of Shareholders
2. Organizing and facilitating Board Meetings, Joint Meetings of Commissioners and Directors, and Board of Directors Meetings along with managing the Meeting Minutes.
3. Carrying out information disclosure through the publication of Annual Reports, Sustainability Reports, and publishing the Company's Financial Reports
4. Organizing public exposes.
5. Managing IPCC's official communication media such as websites and social media accounts as a form of information disclosure and promotion.
6. Carrying out media relations programs through press releases and media gatherings as well as positive news.
7. Delivering information disclosure to the public through television media.
8. Providing assistance in the Board of Directors' official duties.
9. Creating a work agenda for Board of Directors.
10. Monitoring the implementation of corporate identity.
11. Publishing corporate promotional materials and service promotions.
12. Implementation of internal communication by holding 1 (one) National Working Meeting.
13. Implementation of events such as Safari Ramadan, Halalbihalal, commemoration of the Independence Day of the Republic of Indonesia, and commemoration of IPCC Anniversary.

Corporate Secretary Competency Development Program in 2024

Policy

Training and competency development of Corporate Secretary is an important part of the Company's commitment to ensuring that the Corporate Secretary function runs optimally and in accordance with applicable regulations. This policy is in line with POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, as well as SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, which stipulates that the Corporate Secretary must have adequate knowledge and understanding of the capital market, corporate governance, and applicable laws and regulations.

The Company supports the Corporate Secretary's competency development through participation in relevant training, seminars, workshops, and discussion forums, whether organized by authorities, capital market associations, or other external parties to the Company.



Pelaksanaan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dalam menjalankan peran strategis sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan masyarakat umum, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Implementation in 2024

Throughout 2024, Corporate Secretary participated in various training and development programs to improve knowledge and capacity in carrying out its strategic role as a liaison between the Company and stakeholders, including regulators, investors, and the general public, as described in the following table:

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Training and Competency Development for Corporate Secretary in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari Senior Manager of Corporate Secretary	Pelatihan Training	Program <i>Training & Executive Development 2024</i> – Pendampingan Persiapan Assessment di Lingkungan PT IKT Tbk Training & Executive Development Program 2024 – Assessment Preparation Assistance in PT IKT Tbk Environment	5 – 6 Februari 2024 February 5 - 6, 2024	PT PMLI
	Pelatihan Training	<i>Mastering The Art of Market – Friendly Investor Relations</i> Mastering The Art of Market – Friendly Investor Relations	4 -5 Juli 2024 July 4 -5, 2024	PT PMLI
	Pelatihan Training	Pelatihan Awareness ISO 9001, 14001, 45001, dan 37001 Awareness Training ISO 9001, 14001, 45001, and 37001	12 -14 Agustus 2024 August 12 -14, 2024	PT PMLI
	Pelatihan Training	<i>Workshop BCM (Business Continuity Management) Tahun 2024</i> Awareness Training ISO 9001, 14001, 45001, and 37001	30 September dan 1 Oktober 2024 September 30 and October 1, 2024	PT PMLI
	Pelatihan Training	Pelatihan Auditor Internal ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 dan 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Internal Auditor Training ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 dan 37001:2016 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	23 -24 Oktober 2024 October 23 -24, 2024	PT PMLI



AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT

Perseroan memberikan tanggung jawab kepada Divisi Audit Internal untuk memastikan pelaksanaan seluruh aktivitas operasional dan bisnis sehari-hari telah sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur Audit Internal yang berlaku. Audit Internal mengemban tugas untuk menjalankan fungsi audit internal, yaitu dengan memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perseroan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan.

Dalam konteks *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan model pendekatan 3LD (*three lines of defence*), auditor internal Perseroan memegang peranan penting sebagai pertahanan pelapis ketiga karena mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mengawasi fungsi-fungsi lainnya secara independen dan objektif.

Dasar Hukum:

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 67 (1) yang menyatakan bahwa "Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas internal Perseroan".
2. POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Struktur dan Kedudukan Audit Internal

Kedudukan fungsi Audit Internal dalam struktur organisasi melekat pada Divisi Audit Internal yang berkedudukan langsung di bawah level Direktur Utama. Dalam hal ini, Senior Manager Audit sebagai Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Audit Internal melaporkan hasil pengawasan internal Perusahaan langsung kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris Cq. Komite Audit. Struktur organisasi Audit Internal ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 tanggal 11 Juni 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

The Company gives responsibility to Internal Audit Division to ensure that the implementation of all daily operational and business activities is in accordance with applicable Internal Audit policies, systems and procedures. Internal Audit carries out the task of carrying out the internal audit function, namely by providing assurance and independent and objective consultation, with the aim of increasing added value and improving the Company's operations through a systematic approach by testing, evaluating and improving the effectiveness of the management system, risks, internal control and corporate governance processes.

In the context of Enterprise Risk Management (ERM) with the 3LD (three lines of defense) approach model, the Company's internal auditors play an important role as the third layer of defense because they carry out their duties and responsibilities and supervise other functions independently and objectively.

Legal basis:

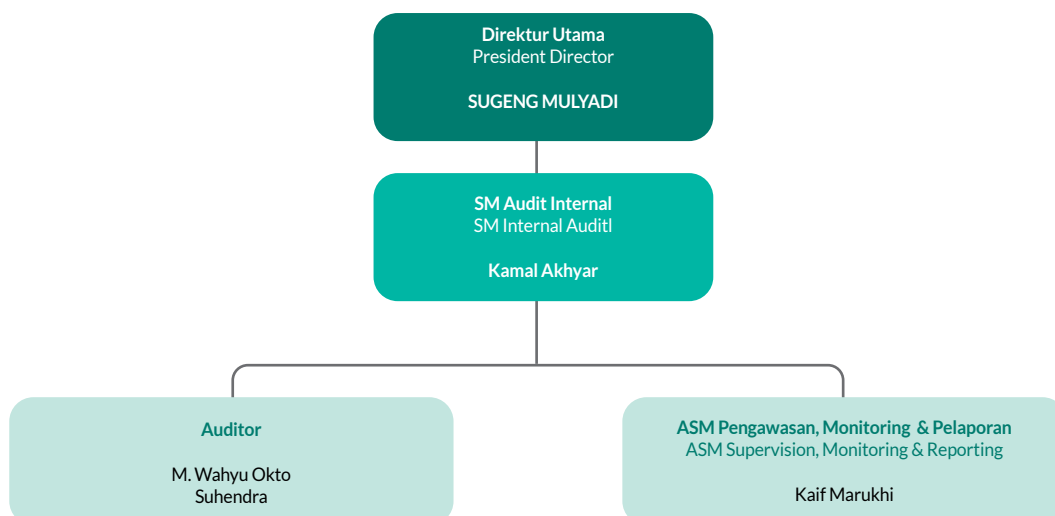
1. Law No. 19 of 2003 concerning SOE article 67 (1) which states that "In every SOE an internal supervision unit is formed which is the Company's internal supervisory apparatus".
2. POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") concerning Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter.

Internal Audit Structure and Position

The position of Internal Audit function in the organizational structure is attached to Internal Audit Division which is located directly below level of President Director. In this case, Senior Manager of Audit as Head of Internal Audit is directly responsible to President Director. Internal Audit reports the results of the Company's internal supervision directly to the President Director and/or Board of Commissioners Cq. Audit Committee. The organizational structure of Internal Audit is stipulated in the Board of Directors Decree No. HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 dated June 11, 2024 concerning Organization and Governance Structure of Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.



Struktur Organisasi Audit Internal IPCC IPCC Internal Audit Organizational Structure



Dalam rangka menjaga kesinambungan implementasi GCG di Perseroan, Audit Internal perlu melakukan koordinasi dengan Komite Audit, terutama terkait dengan pembahasan temuan-temuan audit yang diperoleh dan rencana tindak lanjut perbaikan yang diperlukan sehingga proses pencapaian tujuan organisasi Perseroan tidak terganggu.

Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Kepala Audit Internal yang dijabat oleh Senior Manager Audit Internal diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan komisaris.

Komposisi Audit Internal

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 tanggal 11 Juni 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dipimpin oleh Senior Manager Audit Internal yang dibantu oleh 1 (Satu) Orang Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring & Pelaporan, dan 2 (Dua) Orang Auditor Internal.

Komposisi Audit Internal per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Kamal Akhyar	Senior Manager Audit Internal Senior Manager of Internal Audit	KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 tanggal 13 Februari 2024 KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 dated February 13, 2024
Kaif Marukhi	Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring & Pelaporan Senior Assistant Manager of Supervision, Monitoring & Reporting	KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 tanggal 13 Februari 2024 KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 dated February 13, 2024
Muhammad Wahyu Okto Riendi	Senior Asisten Auditor Internal Senior Assistant of Internal Auditor	KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 tanggal 13 Februari 2024 KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 dated February 13, 2024

In order to maintain the continuity of GCG implementation in the Company, Internal Audit needs to coordinate with Audit Committee, especially regarding the discussion of audit findings obtained and follow-up plans for necessary improvements so that the process of achieving the Company's organizational goals is not disrupted.

Party Who Appoints and Dismisses the Head of Internal Audit

Head of Internal Audit, held by Senior Manager of Internal Audit and Risk Management, is appointed and dismissed directly by the President Director with the Board of Commissioners approval.

Internal Audit Composition

Based on the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Regulation Number: HK.01/11/6/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 dated June 11, 2024 concerning Organizational Structure and Governance of Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, in carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk is led by a Senior Manager of Internal Audit, assisted by one (1) Senior Assistant Manager for Supervision, Monitoring & Reporting and two (2) Internal Auditors.

Internal Audit composition as of December 31, 2024, is as follows:



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Suhendra	Auditor Internal Internal Auditor	KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 tanggal 13 Februari 2024 KP.10.02/13/2/1/PPSD/PPSD/PLMT-24 dated February 13, 2024

Profil Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko

Profile of Senior Manager of Internal Audit and Risk Management



Kamal Akhyar

Senior Manager Audit Internal Senior Manager of Internal Audit

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, 49 tahun, domisili di Medan, Indonesia Indonesian citizen, 49 years old, domiciled in Medan, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/ PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Decree No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/ PLND-23 dated January 1, 2023

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Sumatra Utara (1998)
- Magister Sains dari Universitas Sumatra Utara (2005)
- Magister Manajemen Transportasi dari Universitas Trisakti (2010)
- Bachelor of Economics majoring in Management, North Sumatra University (1998)
- Master of Science, North Sumatra University (2005)
- Master of Transportation Management, Trisakti University (2010)

Riwayat Karier Work Experience

- Di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 - Senior Manager Audit Internal dan Management Risiko (2023 – 2024)
 - Senior Manager Audit (2024 – sekarang)
- Di Luar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 - Staf Kepala Urusan Umum Cabang Pelabuhan Belawan (1999)
 - Staf Umum Junior pada Divisi Umum Cabang Belawan (1999-2002)
 - Staf Penataan Administrasi Personalia Direktorat Purn Kantor Pusat (2002-2003)
 - Staf Pelatihan dan Pengembangan SDM Junior Tingkat I pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Organisasi dan SDM Kantor Pusat (2003-2005)
 - Asisten Manajer Personalia Cabang Pelabuhan Dumai (2005-2010)
 - Manajer Umum Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (2010-2014)
 - Staf Bidang *Project Management Office* (PMO) Pengelolaan Alur PT Oiltanking di Cabang Pelabuhan TBK Senior pada Kantor Pusat (2014)
 - Sekretaris *Project Management Office* (PMO) Pengelolaan Alur Pelayaran (2014-2016)
 - Pengawas Bidang Khusus pada Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2016-2019)
 - Wakil Kepala Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2019-2020)
 - *Deputy Senior Vice President* SPI Pengawasan SDM dan Umum (2020-2021)
 - *Vice President* Pengendalian Internal Supporting SPI pada Subholding Pelindo Multi Terminal (2021-2022)
- At PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 - Senior Manager Internal Audit and Risk Management (2023 - 2024)
 - Senior Manager Audit (2024 - present)
- Outside PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 - Staff of Head of General Affairs of Belawan Port Branch (1999)
 - Junior General Staff at Belawan Branch General Division (1999-2002)
 - Personnel Administration Structuring Staff of Head Office Public Works Directorate (2002- 2003)
 - Junior HC Training and Development Staff Level I in the Head Office Organizational and HC Planning and Development Sector (2003-2005)
 - Assistant Personnel Manager Dumai Port Branch (2005-2010)
 - General Manager of Tanjung Balai Karimun Port Branch (2010-2014)
 - Project Management Office (PMO) Staff for Flow Management at PT Oiltanking at TBK Port Branch Senior at Head Office (2014)
 - Secretary of Project Management Office (PMO) Shipping Flow Management (2014-2016)
 - Special Field Supervisor at Head Office Internal Audit Unit (2016-2019)
 - Deputy Head of Internal Audit Unit at Head Office (2019-2020)
 - Deputy Senior Vice President SPI for HC and General Supervision (2020-2021)
 - Vice President Internal Control Supporting SPI at Pelindo Multi Terminal Subholding (2021-2022)



Riwayat Pelatihan Training Record

- Latihan Keterampilan Manajemen Tingkat Dasar (1996)
- Latihan Keterampilan Manajemen Tingkat Dasar (1996)
- Manajemen Sumber Daya Manusia (1999)
- Manajemen Perkantoran (2000)
- Seminar *Corporate Culture & Leadership* (2001)
- Meningkatkan Efektivitas Fungsi Supervisor (2001)
- Merancang Program Pelatihan (2002)
- Perencanaan Strategik (2002)
- Penataran Dosen Mata Kuliah Ekonomi Islam (2004)
- Internal QMS Auditor (2005)
- Seminar Sistem Transportasi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional (2008)
- *Workshop Organization Development and Principle of Human Resources Management* (2009)
- Pengawasan Alur Pengelolaan PT Oiltanking di Cabang Pelabuhan TBK (2014)
- Pelatihan *Legal Drafting* (2010)
- *Workshop Coaching and Counseling* (2010)
- *Workshop Recruitment System and Organizational Design* (2010)
- Forum Komunikasi Petugas Pelayanan Pimpinan di Kementerian Perhubungan (2010)
- *Certified Human Resources Professional* (2011)
- *Port Management Course for Managers* (2011)
- Sosialisasi AVSEC Awareness International Airport (2012)
- Sosialisasi Polis Asuransi PT Pelabuhan I (Persero) (2013)
- Sosialisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sektor Transportasi (2013)
- Diklat QIA Dasar 1 Angkatan A-262 (2017)
- Diklat QIA Dasar 2 Angkatan A-242 (2017)
- Diklat LPFA *Fraud Audit* 1 (2017)
- Diklat QIA Lanjutan 1 Angkatan A-222 (2018)
- Diklat QIA Lanjutan 2 Angkatan A-212 (2019)
- Basic Management Skills Training (1996)
- Human Capital Management (1999)
- Office Management (2000)
- Corporate Culture & Leadership Seminar (2001)
- Increasing the Effectiveness of Supervisory Functions (2001)
- Designing Training Programs (2002)
- Strategic Planning (2002)
- Lecturer Training in Islamic Economics Courses (2004)
- Internal QMS Auditor (2005)
- Seminar on Transportation Systems in Supporting National Economic Growth (2008)
- Workshop on Organization Development and Principles of Human Capital Management (2009)
- Supervision of PT Oiltanking Management Flow at TBK Port Branch (2014)
- Legal Drafting Training (2010)
- Coaching and Counseling Workshop (2010)
- Recruitment System and Organizational Design Workshop (2010)
- Communication Forum for Leadership Service Officers at the Ministry of Transportation (2010)
- Certified Human Capital Professional (2011)
- Port Management Course for Managers (2011)
- AVSEC Awareness International Airport Socialization (2012)
- Socialization of PT Pelabuhan I (Persero) Insurance Policy (2013)
- Socialization of the Community Satisfaction Index in Improving the Quality of Public Services in the Transportation Sector (2013)
- Basic QIA Training 1 Batch A-262 (2017)
- Basic QIA Training 2 Batch A-242 (2017)
- LPFA *Fraud Audit* Training 1 (2017)
- Advanced QIA Training 1 Batch A-222 (2018)
- Advanced QIA Training 2 Batch A-212 (2019)

Independensi Audit Internal

Perseroan dapat memastikan bahwa seluruh personel Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, serta penuh itikad baik. Seluruh personel Audit Internal telah memenuhi syarat independensi sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Senior Manager Internal Audit dan pegawai Divisi Internal Audit tidak diperkenankan:
 - a. Mempunyai wewenang atau tanggung Jawab operasional langsung atas kegiatan yang diaudit;

Internal Audit Independence

The Company can ensure that all Internal Audits carry out their duties and responsibilities professionally and independently and in good faith. All Internal Audit personnel have fulfilled the independence requirements in accordance with applicable regulations, as described below:

1. Senior Manager of Internal Audit and Internal Audit Division employees are not permitted to:
 - a. Have direct operational authority or responsibility for the activities being audited;



- b. Terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional;
 - c. Jika Senior Manager Audit Internal diharapkan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar audit internal, kerangka pengaman (*safeguards*) akan dibuat untuk membatasi terjadinya penurunan independensi dan objektivitas.
 2. Audit Internal harus memiliki ketentuan atau prosedur yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas auditor dan Senior Manager Audit Internal atas objek yang diaudit.
- b. Be involved in decision-making in operational activities;
 - c. If the Senior Manager of Internal Audit is expected to have a role and/or responsibility outside of internal audit, safeguards will be put in place to limit any impairment of independence and objectivity.
 2. Internal Audit must have provisions or procedures governing the implementation of audit assignments that are capable of maintaining the objectivity of auditors and Senior Internal Audit Managers on the objects being audited.

Kualifikasi dan Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Untuk mendukung profesionalitas dan kompetensi Audit Internal, Perseroan mendukung dan memberikan fasilitas bagi seluruh auditor internal untuk mengikuti sejumlah pelatihan dan program sertifikasi.

Hingga 31 Desember 2024, auditor internal Perseroan sudah memiliki sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang audit internal, antara lain:

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Kamal Akhyar	Senior Manager Audit Internal Senior Internal of Audit Manager	Sertifikasi QIA (Lanjutan) QIA Certification (Advanced)
Kaif Marukhi	Asisten Senior Manager Pengawasan, <i>Monitoring &</i> Pelaporan Senior Assistant Manager of Supervision, Monitoring & Reporting	Sertifikasi QIA (Dasar) QIA Certification (Basic)
Muhammad Wahyu Okto Riendi	Senior Asisten Auditor Internal Senior Assistant of Internal Auditor	<i>Qualified</i> Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)
Suhendra	Junior Auditor Internal Junior Internal Auditor	Sertifikasi QIA (Lanjutan) QIA Certification (Advanced)

Internal Audit Qualifications and Certification

To support the professionalism and competence of Internal Audit, the Company supports and provides facilities for all internal auditors to take part in a number of training and certification programs.

Until December 31, 2024, the Company's internal auditors already have professional certification relevant to the field of internal audit, including:

Visi, Misi, dan Tata Nilai Audit Internal

Internal Audit Vision, Mission and Values

Visi Vision	Misi Mission	Tata Nilai Values
Menjadi mitra strategis yang profesional, independen, dan objektif bagi manajemen dalam mewujudkan visi misi Perseroan. <i>Become a professional, independent and objective strategic partner for management in realizing the Company's vision and mission.</i>	- Melaksanakan kegiatan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> yang independen dan objektif, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas <i>risk management</i>, <i>control</i> dan <i>governance</i> process di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; - Memberikan Jasa konsultasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal; - Meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor yang profesional.	- Sebagai <i>strategic business partner</i>, Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk harus memberikan Nilai Tambah dan dapat dipercaya, melalui: - Perumusan strategi yang mendukung pencapaian tujuan Perseroan; - Struktur organisasi yang mendukung independensi; - Kompetensi auditor internal yang profesional; - Pelaksanaan internal audit yang berfokus pada area-area yang berisiko tinggi; - Penerapan teknologi yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan internal audit.
	- Carrying out independent and objective assurance and consulting activities, to provide added value in increasing the effectiveness of risk management, control and governance processes within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; - Providing consulting services in accordance with existing expertise to improve the quality of internal control; - Increase competence so that you become a professional auditor.	- As a strategic business partner, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Internal Audit must provide added value and be trustworthy, through: - Formulation of strategies that support the achievement of Company goals; - Organizational structure that supports independence; - Professional internal auditor competency; - Implementation of internal audits that focus on high risk areas; - Application of technology that supports the efficiency and effectiveness of implementing internal audit activities.

Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal IPCC telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal 22 April 2022, sesuai dengan ketentuan POJK 56/2015. Piagam ini menjadi pedoman dan kerangka kerja bagi seluruh auditor internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Peran dan fungsi Audit Internal

Peran dan fungsi Audit Internal antara lain:

1. Membantu Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan dan pelaksanaan audit, maupun pemantauan hasil audit;
2. Melakukan evaluasi atas semua Divisi dalam pengelolaan operasional Perseroan;
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil audit dan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan *auditee*;
4. Memberikan jasa konsultasi internal Perseroan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan, selama tidak memengaruhi independensi dan objektivitas SPI, serta didukung dengan sumber daya yang memadai;
5. Melaksanakan pemantauan hasil audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik;
6. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, sebagai tindak lanjut audit rutin yang berpotensi mengandung indikasi pelanggaran dan/atau kecurangan apabila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko yang mengemban tugas sebagai Kepala Divisi Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menggunakan metodologi berbasis risiko (*risk-based*) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut diserahkan untuk disetujui oleh Direktur Utama;
2. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama serta melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
3. Menjaga profesionalitas auditor dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan;
4. Melaporkan rangkuman hasil pemeriksaan secara periodik kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
5. Memberikan jasa konsultasi kepada manajemen di mana internal auditor tidak menjalankan tanggung jawab manajemen, misalnya menilai kecukupan pengendalian internal dari suatu sistem/proses yang akan diimplementasikan;

Internal Audit Charter

IPCC Internal Audit Charter has been prepared and established by Board of Directors and Board of Commissioners since April 22, 2022, in accordance with the provisions of POJK 56/2015. This charter serves as a guideline and framework for all internal auditors in carrying out their duties and responsibilities.

Internal Audit Role and Function

The role and function of Internal Audit include:

1. Assist the President Director and/or Board of Commissioners in carrying out supervision by explaining operationally both the planning and implementation of audits, as well as monitoring audit results;
2. Evaluate all divisions in the Company's operational management;
3. Provide suggestions for improvements and objective information regarding audit results in the form of audit results reports and submit them to President Director, Board of Commissioners and *auditees*;
4. Providing internal Company consulting services to provide added value and improve the quality of control, risk management and corporate governance, as long as it does not affect the independence and objectivity of SPI, and is supported by adequate resources;
5. Monitor audit results and report periodically to President Director and Board of Commissioners;
6. Conduct in-depth audits as requested by Board of Directors and/or Board of Commissioners, as a follow-up to routine audits that have the potential to contain indications of violations and/or fraud if necessary.

Internal Audit Duties and Responsibilities

Senior Manager of Internal Audit who carries out duties as Head of Internal Audit has responsibility for:

1. Prepare an Annual Supervision Work Program using a risk-based methodology and submit the Annual Supervision Work Program for approval to President Director;
2. Carry out the Annual Supervision Work Program which has been approved by the President Director and report the audit implementation to President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee;
3. Maintain the professionalism of auditors with the necessary knowledge, skills and ethics;
4. Report a summary of audit results periodically to President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee;
5. Providing consulting services to management where the internal auditor does not carry out management responsibilities, for example assessing the adequacy of internal control of a system/process to be implemented;



6. Melaksanakan program evaluasi kualitas Audit Internal. Hasil pelaksanaan program evaluasi dilaporkan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
7. Berkoordinasi dengan fungsi kontrol dan pengawasan lainnya (misalnya auditor eksternal);
8. Melakukan audit investigasi atas aktivitas yang berindikasi kecurangan dan melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Wewenang Audit Internal

Dalam mengemban tugasnya, Audit Internal berwenang untuk:

1. Memiliki akses tak terbatas ke seluruh Divisi, dokumen (baik fisik dan elektronik), properti, dan personil yang terkait dengan penugasan audit;
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi pemeriksaan, memilih objek pemeriksaan, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menetapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
3. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personel *auditee* saat melaksanakan pemeriksaan dan tenaga ahli lainnya, baik yang berasal dari internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk maupun dari pihak eksternal;
4. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
5. Mendapat perlindungan dari Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya apabila menerima ancaman dari pihak lain yang dapat memengaruhi independensi maupun segala macam tuntutan dari pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit.

Rapat Audit Internal dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Kebijakan

Dalam Piagam Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Divisi Audit Internal memiliki kewajiban untuk menjaga komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Salah satu bentuk pelaksanaan komunikasi tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam rapat-rapat yang bersifat strategis dan/atau terkait dengan pengendalian internal dan tindak lanjut atas temuan audit. Secara rutin, Divisi Audit Internal mengadakan rapat koordinasi dengan *auditee* dan/atau Komite Audit membahas laporan audit dan progres atas tindak lanjut audit.

Piagam Audit Internal juga mengatur bahwa Senior Manager Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama, dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sehingga pelaksanaan rapat menjadi instrumen penting dalam menjaga independensi serta efektivitas fungsi pengawasan internal.

6. Implement the Internal Audit quality evaluation program. The results of evaluation program are reported to President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee;
7. Coordinate with other control and supervision functions (eg external auditors);
8. Conduct investigative audits on activities that indicate fraud and report the results of these investigations to President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee.

Internal Audit Authority

In carrying out its duties, Internal Audit has the authority to:

1. Have unlimited access to all Divisions, documents (both physical and electronic), property and personnel related to audit assignments;
2. Allocate resources, determine the frequency of inspections, select inspection objects, determine the scope of inspections, and determine the inspection techniques required to achieve inspection objectives;
3. Obtain the necessary assistance from auditee personnel when carrying out inspections and other experts, both from internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and from external parties;
4. Have access to communicate directly with Board of Commissioners through Audit Committee;
5. Receive protection from the President Director and/or Board of Commissioners in carrying out their duties if they receive threats from other parties which could affect independence or all kinds of demands from other parties related to the implementation of audit duties.

Internal Audit Meeting with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

Policy

In the Internal Audit Charter of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Internal Audit Division is obligated to maintain effective and continuous communication with Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee. One form of this communication is active participation in strategic meetings and/or meetings related to internal control and follow-up on audit findings. Internal Audit Division routinely holds coordination meetings with auditees and/or Audit Committee to discuss audit reports and the progress of audit follow-ups.

The Internal Audit Charter also stipulates that Senior Manager of Internal Audit reports to President Director and functionally to Board of Commissioners through Audit Committee, making meetings an important instrument for maintaining independence and the effectiveness of the internal supervision function.

Pelaksanaan Rapat

Selama tahun 2024, Divisi Audit Internal secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, baik dalam rangka menyampaikan laporan hasil audit, membahas rencana dan pelaksanaan audit, maupun untuk mengevaluasi progres tindak lanjut atas temuan audit.

Kehadiran Audit Internal dalam forum-forum tersebut juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.

Frekuensi Rapat

Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran Divisi Audit Internal dalam rapat strategis sepanjang tahun 2024:

Frekuensi Kehadiran Rapat Audit Internal
Internal Audit Meeting Attendance Frequency

Uraian Description	Jumlah Rapat Total Meeting	Frekuensi Rapat Meeting Frequency
Rapat Direksi Board of Directors Meeting	4	100%
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	4	100%
Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	4	100%

Perencanaan dan Realisasi Aktivitas Audit Internal Tahun 2024

Perencanaan kegiatan audit internal senantiasa mempertimbangkan berbagai jenis informasi perubahan organisasi yang terjadi pada lingkup IPCC dengan menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan struktur organisasi;
2. Pendekatan program; dan
3. Pendekatan Proses Bisnis.

Proses perencanaan audit tahunan diatur dalam Prosedur Audit Internal IPCC, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Memahami proses bisnis;
2. Menetapkan audit internal;
3. Menetapkan rencana audit;
4. Memberikan peringkat audit universe berdasarkan risiko dan frekuensi audit; dan
5. Menentukan rencana audit.

Program kerja pengawasan tahunan untuk tahun 2024 ditetapkan oleh Senior Manager Audit Internal dan disetujui oleh Direktur Utama. Program kerja ini berisi rencana kegiatan pengawasan oleh audit Internal yang berfungsi sebagai alat pengendalian pengelolaan tugas-tugas pengawasan dengan menitikberatkan pada *Governance*, *Revenue Enhancement* dan *Cost Effectiveness* serta memberikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah (*added value*).

Berikut ini adalah uraian rencana dan realisasi Program Kerja Audit Internal tahun 2024:

Meeting Implementation

Throughout 2024, Internal Audit Division actively participated in various meeting forums with Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee, both to present audit findings, discuss audit plans and execution, and to evaluate the progress of follow-up actions on audit findings.

The Internal Audit Division's presence in these forums also reflects its commitment to the principles of good corporate governance (GCG), particularly the principles of transparency, accountability, and effective oversight.

Meeting Frequency

The following is a breakdown of Internal Audit Division's attendance at strategic meetings throughout 2024:

Planning and Realization of Internal Audit Activities in 2024

The planning of internal audit activities always considers various types of information on organizational changes that occur within IPCC scope by using the following approaches:

1. Organizational structure approach;
2. Program approach; and
3. Business Process Approach.

The annual audit planning process is regulated in IPCC Internal Audit Procedure, which covers the following:

1. Understanding the business process;
2. Establishing an internal audit;
3. Establishing an audit plan;
4. Ranking the audit universe based on risk and audit frequency; and
5. Determining the audit plan.

The annual supervisory work program for 2024 is determined by Senior Manager of Internal Audit and approved by President Director. This work program contains plans for supervisory activities by Internal Audit which function as a control tool for the management of supervisory tasks with an emphasis on *Governance*, *Revenue Enhancement* and *Cost Effectiveness* as well as providing recommendations that have added value.

The following is a description of the plans and realization of 2024 Internal Audit Work Program:



Rencana Plan	Realisasi Realization
Laporan Manajemen Management Reports	Laporan Triwulan Tahun 2024 2024 Quarterly Report
Pelaksanaan Audit Audit Implementation	- Pelaksanaan Audit Rutin Semester II Tahun 2023 - Pelaksanaan Audit Rutin Semester I Tahun 2024 - Implementation of Routine Audits for Second Semester of 2023 - Implementation of Routine Audits for First Semester of 2024
Monitoring Hasil Audit Monitoring Audit Results	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang Masih <i>Pending</i> Completion of follow-up audit recommendations that are still pending
Pendampingan Auditor Eksternal External Auditor Assistance	Pendampingan KAP KAP assistance
Self Assessment Internal Control Self-assessment of internal control	Penilaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Internal Perseroan Tahun 2024 Assessment of the Level of Effectiveness of Company Internal Control in 2024
Peningkatan Kompetensi SDM Increasing HC Competency	Keikutsertaan Pelatihan dan Seminar Participation in Training and Seminars

Laporan hasil audit dan *monitoring* audit disampaikan kepada Direktur Utama, Komisaris Utama, Komite Audit dan *Auditee* terkait.

Reports on audit results and audit monitoring are submitted to President Director, President Commissioner, Audit Committee and related Auditees.

Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Audit yang disusun dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Berikut ini adalah uraian kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Audit Internal, antara lain:

Report on the Implementation of Internal Audit Duties in 2024

Throughout 2024, Internal Audit has carried out duties and responsibilities as stated in the Audit Annual Supervision Work Program (PKPT) which was prepared using a riskbased audit approach. The following is a description of audit activities that have been carried out by Internal Audit, including:

No.	Kegiatan Activity	Waktu Time	Realisasi Pelaksanaan Implementation Realization
Kegiatan Audit Audit Activities			
1.	Audit Rutin Semester II Tahun 2023 Routine Audit for Second Semester of 2023	Direncanakan Dilaksanakan Pada Bulan Januari-Februari 2024 Planned for January-February 2024	Dilaksanakan pada 13 Februari 2024 s/d 15 Maret 2024 terdapat 7 objek audit dengan hasil audit 6 temuan audit dan 10 rekomendasi. Carried out from February 13, 2024 to March 15, 2024, there were 7 audit objects with audit results of 6 audit findings and 10 recommendations.
2.	Audit Rutin Semester I Tahun 2024 Routine Audit for First Semester of 2024	Direncanakan Dilaksanakan Pada Bulan Juli-Agustus 2024 Planned for July-August 2024	Dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 s/d 30 September 2024 terdapat 9 objek audit dengan hasil audit 3 temuan audit dan 10 rekomendasi. Carried out from August 27, 2024 to September 30, 2024, there were 9 audit objects with audit results of 3 audit findings and 10 recommendations.
3.	Audit Khusus Special Audit	<i>Tentative</i>	Selama tahun 2024 belum ada hal-hal khusus yang perlu dilakukan audit. During 2024, there were no specific matters that needed to be audited.
4.	Monitoring Tindak Lanjut Audit Audit Follow-Up Monitoring	Per Triwulan Quarterly	Dilaksanakan pelaporan <i>monitoring</i> tindak lanjut rekomendasi hasil audit Per Triwulan Tahun 2024. Monitoring report on the follow-up of audit recommendations was carried out every quarter in 2024.
Kegiatan Non-Audit Audit Non-Activities			
1.	Pelatihan dan Seminar Training and Seminars	<i>Tentative</i>	- Mengikuti <i>Training</i> Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) - Mengikuti Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 - Mengikuti Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) Tahun 2024 - Attend <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) Certification Training - Attend the Internal Auditor Conference (KAI) in 2024 - Attend the Internal Auditor National Seminar (SNIA) in 2024
2.	Survei Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan Surveys on Effectiveness of Companies Internal Control	Semester II Tahun 2024 Second Semester of 2024	Survey Efektivitas Pengendalian Internal dilaksanakan pada bulan Januari 2025 dengan hasil skor tercapai 79,93 yang berarti tingkat pengendalian internal dinyatakan Efektif. The Internal Control Effectiveness Survey was conducted in January 2025 with a score of 79.93, meaning that the level of internal control was declared Effective.



Hasil Temuan Audit Internal Tahun 2024

Hasil temuan Audit Internal selama Tahun 2024 beserta rekapitulasi tindak lanjut penyelesaiannya sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No.	Judul Laporan Hasil Audit (LHA) Title of Audit Result Report (LHA)	Hasil Temuan Findings	Temuan Yang Sudah Ditindaklanjuti Findings that Have Been Followed Up	Temuan Yang Belum Ditindaklanjuti Unfollowed-up Findings
1.	Laporan Hasil Audit Semester II Tahun 2023 Audit Results Report for First Semester of 2023	6	6	-
2.	Laporan Hasil Audit Semester I Tahun 2024 Audit Results Report for First Semester of 2024	3	3	-

Internal Audit Findings Results in 2024

The results of Internal Audit findings in 2024 along with a recapitulation of the follow-up to their completion up to December 31, 2024 are as follows:

Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Tahun 2023-2024

Recapitulation of Findings and Follow-up for 2023-2024

Tahun Year	Jumlah Temuan Audit Internal Number of Internal Audit Findings		Sisa Temuan Per 31 Desember 2023 Remaining Findings as of December 31, 2023	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations		Sisa Rekomendasi yang belum Ditindaklanjuti Per 31 Desember 2024 Remaining Unfollowed-up Recommendations as of December 31, 2024
	Sudah Ditindaklanjuti Has been followed up	Dalam Proses Tindak Lanjut In the Follow-up Process		Sudah Ditindaklanjuti Has been followed up	Dalam Proses Tindak Lanjut In the Follow-up Process	
Tahun 2023-Semester I 2023 - First Semester	3	-	-	15	-	-
Tahun 2023-Semester II 2023 - Second Semester	6	-	-	10	-	-
Tahun 2024-Semester I 2024 - First Semester	3	-	-	10	-	-
Tahun 2024-Semester 2 2024 - Second Semester	3	-	-	10	-	-

Penyimpangan Internal

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perseroan sehingga memengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

Untuk mencegah terjadinya *internal fraud*, Perseroan telah menerapkan fungsi audit internal yang efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan. Apabila terdapat hal-hal yang berindikasi penyimpangan/kecurangan (*fraud*) maka Audit Internal akan segera melakukan audit khusus (investigasi).

Internal Fraud

Internal fraud is deviation/fraudulent committed by management, permanent and non-permanent employees (honorary and outsourced) related to the Company's work processes and operational activities, thereby affecting the Company's financial condition.

To prevent internal fraud, the Company has implemented an effective internal audit function in all aspects and elements of activities. If there are things that indicate irregularities/ fraud, Internal Audit will immediately carry out a special audit (investigation).



Pada tabel di bawah ini dapat dilihat data penyimpangan internal yang terjadi di Perseroan sepanjang tahun 2023-2024:

The table below shows data on internal fraud that occurred in the Company throughout 2023-2024:

No.	Penyimpangan Internal Internal Fraud	Pengurus Management		Karyawan Employees	
		2024	2023	2024	2023
1.	Telah diselesaikan Has been completed	0	0	0	0
2.	Dalam proses penyelesaian di internal di IPCC In the internal completion process at IPCC	0	0	0	0
3.	Belum diupayakan penyelesaiannya No solution has been attempted yet	0	0	0	0
4.	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through legal proceedings	0	0	0	0

Program Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2024

Internal Audit Competency Development Program in 2024

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2024

Internal Audit Competency Training and Development for 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Kamal Akhyar (Senior Manager Audit Internal) (Senior Manager of Internal Audit)	Konferensi Conference	Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 Internal Auditor Conference (KAI) 2024	10-11 Juli 2024 July 10-11, 2024	YPIA
	Seminar Nasional National Seminar	Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) Tahun 2024 Internal Auditor National Seminar (SNIA) 2024	4-5 Desember 2024 December 4-5, 2024	YPIA
Kaif Marukhi (Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring & Pelaporan) (Assistant Senior Manager of Supervision, Monitoring & Reporting)	Training	Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) Tingkat Dasar Certification on Basic Level Qualified Internal Auditor (QIA)	22 April 2024 - 6 Mei 2024 April 22, 2024 - May 6, 2024	YPIA
Muhammad Wahyu Okto Riendi	Konferensi Conference	Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2024 Internal Auditor Conference (KAI) 2024	10-11 Juli 2024 July 10-11, 2024	YPIA
Suhendra	Seminar Nasional National Seminar	Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) Tahun 2024 Internal Auditor National Seminar (SNIA) 2024	4-5 Desember 2024 December 4-5, 2024	YPIA



AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Tidak hanya melaksanakan fungsi audit secara internal, Perseroan juga menerapkan fungsi audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dari sejumlah instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam konteks audit atas laporan keuangan tahunan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan Akuntan Publik ("AP"/Auditor) yang sudah terdaftar di OJK sebagai pihak eksternal yang bekerja secara independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan dan memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, mekanisme penunjukan KAP dan/atau AP dilakukan oleh Pemegang Saham, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 10 Juni 2024, ditetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (*a Member Firm of Ernst & Young Global Network*) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI, dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2024.

TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit memiliki peran strategis dalam menjaga independensi dan objektivitas proses audit di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC). Salah satu bentuk tanggung jawab utama Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan dan/atau pemberhentian auditor eksternal yang akan melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan.

Not only does the Company carry out audit functions internally, the Company also applies audit functions carried out by external parties from a number of authorized agencies, including the Financial Audit Agency (BPK), Financial Services Authority (OJK) and Public Accounting Firm (KAP).

In the context of the audit of annual financial reports to produce quality financial information, the Company uses the services of a Public Accounting Firm ("KAP") and a Public Accountant ("AP"/Auditor) who are registered with the OJK as external parties who work independently to carry out audits on the Annual Financial Report and provide an opinion on the conformity of presentation of financial report with Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

MECHANISM FOR APPOINTING A PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP)

In accordance with the principles of good governance, the mechanism for appointing KAP and/or AP is carried out by Shareholders, through the General Meeting of Shareholders (GMS) by considering proposals from Board of Commissioners. This is in line with the provisions regulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

At the Annual GMS held on June 10, 2024, Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (*a Member Firm of Ernst & Young Global Network*) was appointed to provide audit services for the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending on December 31, 2024 for the purposes and interests of the Company, if deemed necessary including Performance Audit, KPI Audit and Compliance Audit for 2024 Fiscal Year.

AUDIT COMMITTEE'S RESPONSIBILITY IN PROVIDING RECOMMENDATIONS ON THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF EXTERNAL AUDITORS

Audit Committee has a strategic role in maintaining the independence and objectivity of the audit process within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC). One of the main responsibilities of Audit Committee is to provide recommendations to Board of Commissioners regarding the appointment and/or dismissal of external auditors who will audit the Company's annual financial statements.



Dalam menjalankan tanggung jawab ini, Komite Audit melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja auditor eksternal, termasuk menilai independensi, kapabilitas, pengalaman, metodologi audit, serta kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku. Evaluasi ini juga mempertimbangkan kualitas komunikasi antara auditor eksternal dengan manajemen dan Komite Audit, serta efektivitas proses audit yang telah dilakukan.

Rekomendasi yang diberikan Komite Audit bertujuan untuk memastikan bahwa auditor eksternal yang ditunjuk memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, serta mampu memberikan opini audit yang independen dan objektif. Selain itu, pemberian rekomendasi juga memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan.

Dengan demikian, keterlibatan Komite Audit dalam proses penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas laporan keuangan Perseroan.

KOORDINASI AKUNTAN PUBLIK DAN KOMITE AUDIT

Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Audit Internal mengawasi jalannya proses audit eksternal dan memastikan kelancaran serta kesesuaian pelaksanaan proses audit eksternal dengan standar audit yang berlaku. Selain itu, Komite Audit juga memastikan ketepatan waktu pelaporan audit sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

Pemantauan terhadap kinerja Akuntan Publik dan KAP serta progres lainnya terkait audit eksternal juga dibahas dalam rapat Komite Audit yang diikuti juga oleh Audit Internal dan Direksi. Dalam rapat gabungan tersebut umumnya Komite Audit membahas temuan audit yang diperoleh oleh auditor eksternal dan mendiskusikan tindak lanjut yang diperlukan atas temuan tersebut.

LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN AUDITOR EKSTERNAL

Dalam proses audit eksternal, manajemen bertanggung jawab atas penyajian dan kebenaran isi laporan keuangan serta menjamin bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Sementara itu, auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode.

In carrying out this responsibility, Audit Committee conducts a comprehensive evaluation of the performance of external auditors, including assessing independence, capability, experience, audit methodology, and compliance with applicable audit standards. This evaluation also considers the quality of communication between external auditors and management and Audit Committee, as well as the effectiveness of audit process that has been carried out.

The recommendations provided by Audit Committee aim to ensure that the appointed external auditors have high competence and integrity, and are able to provide independent and objective audit opinions. In addition, the provision of recommendations also takes into account the principles of good corporate governance, including aspects of transparency and accountability in the financial reporting process.

Thus, the involvement of Audit Committee in the process of appointing and dismissing external auditors is an important part of strengthening the internal control system and increasing stakeholder trust in the credibility of the Company's financial statements.

COORDINATION OF PUBLIC ACCOUNTANTS AND AUDIT COMMITTEES

Board of Directors and Board of Commissioners, assisted by Internal Audit and Audit Committees, supervise the external audit process and ensure the smoothness and conformity of the implementation of external audit process with applicable audit standards. In addition, Audit Committee also ensures the timeliness of audit reporting according to the mutually agreed time.

Monitoring of the performance of Public Accountants and KAPs as well as other progress related to external audits is also discussed in the Audit Committee meetings which are also attended by Internal Audit and Board of Directors. In these joint meetings, Audit Committee generally discusses the audit findings obtained by external auditor and discusses the necessary follow-up actions regarding these findings.

SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND EXTERNAL AUDITORS

In the external audit process, management is responsible for the presentation and correctness of the financial reports contents and guarantees that the financial reports have been prepared in accordance with the audit standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) and the Professional Standards for Public Accountants (SPAP). Meanwhile, external auditor responsible for providing an opinion on the fairness of organization's financial reporting, especially in the presentation of financial position and operating results in a period.

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja dalam setiap penugasan *assurance* menerapkan prosedur dan Standar sebagai berikut:

1. Kompeten, Independen dan Profesional;
2. Memiliki Integritas dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Mempersiapkan strategi audit dan melakukan penilaian risiko;
4. Melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti audit yang memadai;
5. Memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
6. Memberikan pernyataan pendapat (opini) mengenai laporan keuangan secara keseluruhan.

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK PERIODE 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Sebagai bentuk transparansi informasi, berikut ini disampaikan daftar KAP, Akuntan Publik, dan lingkup jasa yang diberikan, beserta biaya yang telah dibayarkan Perseroan atas jasa audit laporan keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Auditor Auditor Name	Biaya (Rp) Fee	Jasa Audit Audit Services	Opini Audit Audit Opinion
2024	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	1.035.000.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	1.265.400.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	1.176.600.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	984.500.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	828.884.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (KAP) in every assurance assignment applies the following procedures and standards:

1. Competent, Independent and Professional;
2. Have integrity in carrying out their duties;
3. Prepare audit strategies and carry out risk assessments;
4. Carrying out tests to obtain adequate audit evidence;
5. Ensure that financial reports comply with generally accepted accounting principles;
6. Provide a statement of opinion regarding the overall financial report.

LIST OF PUBLIC ACCOUNTANTS FOR THE LAST 5 (FIVE) YEARS

As a form of information transparency, following is a list of KAPs, Public Accountants, and the scope of services provided, along with the fees paid by the Company for Financial Statement Audit services for the last 5 (five) years, namely:



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah sistem atau prosedur yang diterapkan secara terintegrasi dan melekat pada semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan. Perseroan menyadari pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan menyeluruh agar kegiatan operasional bisnis sehari-hari senantiasa berjalan lancar sehingga proses pencapaian target dan tujuan Perseroan tidak terganggu. Implementasi pengendalian internal yang efektif juga merupakan salah satu bentuk perwujudan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Aktivitas pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan bertujuan untuk melindungi aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, mengurangi risiko terjadinya kerugian, mencegah terjadinya *fraud* atau penyimpangan, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan pencapaian tujuan.

Perseroan melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal berkaitan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. Agar kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat terus meningkat dari waktu ke waktu, Perseroan secara rutin mengevaluasi efektivitas penerapan pengendalian internal pada semua aspek operasional bisnis dan tingkatan organisasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan langkah perbaikan dan penyempurnaan SPI ke depan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO – INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan mengacu pada standar internasional, yaitu COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - Internal Control Integrated Framework, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:

Internal Control System is a system or procedure that is implemented in an integrated manner and is attached to all actions and activities carried out by the leadership and all employees. The Company realizes the importance of implementing an integrated and comprehensive internal control system so that daily business operations always run smoothly so that the process of achieving the Company's targets and goals is not disrupted. Implementing effective internal control is also a form of embodiment of the principles of Good Corporate Governance.

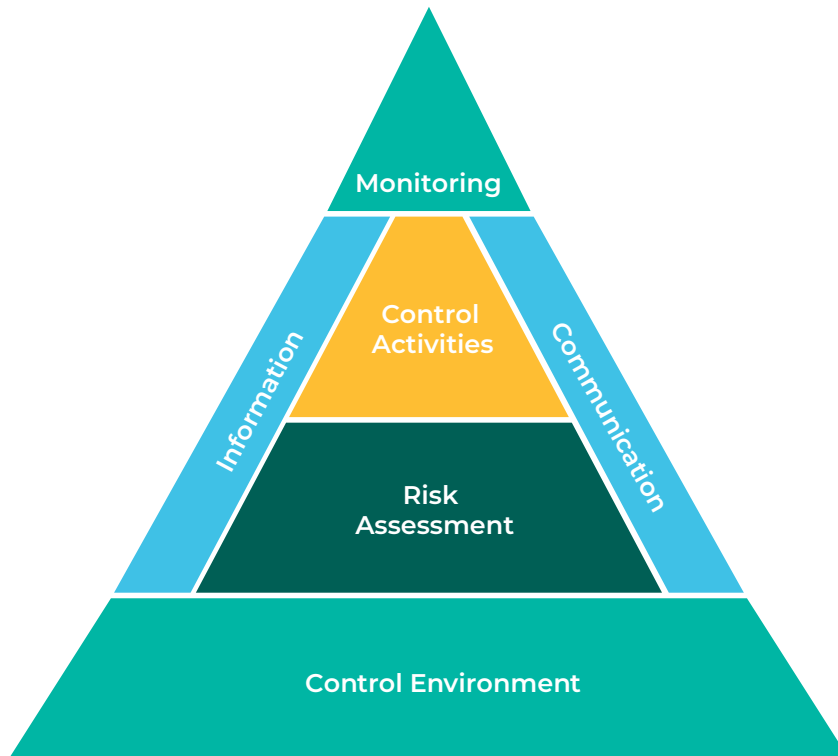
Internal control activities implemented in the Company aim to protect the Company's assets, ensure the availability of reliable and trustworthy financial reporting, increase the Company's compliance with statutory provisions and regulations, reduce the risk of loss, prevent fraud or irregularities, and increase organizational effectiveness and achievement of objectives.

The Company continuously monitors the effectiveness of internal control in relation to changes in internal and external conditions. So that the quality of Internal Control System (SPI) implementation can continue to improve over time, the Company regularly evaluates the effectiveness of internal control implementation at all aspects of business operations and organizational levels. The results of this evaluation are used as a basis for consideration for management to determine steps to improve and refine SPI in the future.

COMPLIANCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

The internal control system implemented in the Company refers to international standards, namely COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) - Internal Control Integrated Framework, as illustrated in the following chart:





1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari seluruh komponen sistem pengendalian internal yang mampu membuat suatu organisasi perusahaan menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal di dalam organisasi.

Implementasi di Perseroan:

- Menunjukkan komitmen terhadap Nilai-Nilai Budaya dan Etika.
- Pembentukan Struktur Organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perusahaan.
- Komitmen terhadap kompetensi.
- Menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan akuntabilitas.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko pada setiap fungsi yang ada di Perseroan. Sebuah penilaian risiko yang komprehensif memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap potensi risiko, sehingga akan memudahkan manajemen dalam merumuskan upaya mitigasi yang diperlukan sehingga akibat yang ditimbulkan dari risiko tersebut dapat diminimalisir.

Implementasi di Perseroan:

Mengidentifikasi dan menganalisis risiko berdasarkan dampak dan kecenderungan yang dijabarkan dalam suatu matriks risiko yang menggambarkan tingkat risiko pada masing-masing fungsi.

1. Control Environment

The control environment is the basis of all components of internal control system which is able to make a Company organization more disciplined and structured. The control environment includes organizational atmosphere and attitudes of management and employees towards the importance of internal control in the organization.

Implementation in the Company:

- Demonstrate commitment to Cultural and Ethical Values.
- Establishment of an Organizational Structure that describes the separation of functions and duties of each Company organ.
- Commitment to competence.
- Upholding an attitude of professionalism and accountability.

2. Risk Assessment

Risk assessment is carried out by identifying, analyzing and evaluating risks in each function in the Company. A comprehensive risk assessment allows a better understanding of potential risks, making it easier for management to formulate the necessary mitigation efforts so that the consequences of these risks can be minimized.

Implementation in the Company:

Identify and analyze risks based on impacts and trends described in a risk matrix that describes the level of risk for each function.



3. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan ataupun prosedur yang diciptakan untuk bisa memastikan tercapainya tujuan Perseroan dan juga mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin bisa terjadi.

Implementasi di Perseroan:

- Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian.
- Menyusun kebijakan dan prosedur maupun petunjuk teknis yang bertujuan untuk mendukung aktivitas pengendalian internal.

4. Informasi dan Komunikasi

Perseroan menyadari bahwa informasi yang valid dan akurat sangat diperlukan oleh pihak eksternal. Komunikasi yang dimaksud dalam komponen ini juga melibatkan penyediaan atas suatu pemahaman yang lebih jelas terkait peran dan tanggung jawab seseorang yang berkaitan dengan pengendalian internal pada laporan keuangan.

Implementasi di Perseroan:

- Mengembangkan dan mengontrol Sistem Akuntansi, informasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk menghasilkan informasi yang relevan.
- Menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang relevan, terpercaya, tepat waktu dan konsisten agar dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders*.

5. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen untuk menilai apakah sistem pengendalian internal sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui area-area pengendalian internal yang perlu ditingkatkan penerapannya ke depan.

Implementasi di Perseroan:

- Melakukan evaluasi dan kontrol secara terus-menerus.
- Mengkomunikasikan setiap aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
- Pengelolaan risiko melalui Sistem Pengendalian Internal harus dibuat secara terstruktur dan pendekatan yang digunakan oleh Perseroan mengacu pada pendekatan model *Three Lines of Defense* (LOD). Dengan pendekatan ini diharapkan setiap risiko dan kontrol dapat dikelola secara efektif oleh fungsi-fungsi terkait yang ada di Perseroan.

Konsep Tiga Lini Pertahanan

Konsep tiga lini pertahanan (*The Three Lines of Defense*) membahas bagaimana tugas-tugas khusus yang terkait dengan risiko dan pengendalian dapat ditugaskan dan dikoordinasikan dalam suatu perusahaan, terlepas ukuran atau kompleksitasnya. Direksi dan Manajemen harus memahami perbedaan penting dalam peran dan tanggung jawab dari tugas-tugas ini dan bagaimana mereka harus secara optimal ditugaskan untuk perusahaan untuk memiliki kemungkinan peningkatan mencapai tujuannya. Adapun model ketiga lini pertahanan digambarkan sebagai berikut:

3. Control Procedures

Control procedures are policies or procedures created to ensure the achievement of Company goals and also prevent fraud that might occur.

Implementation in the Company:

- Select and develop control activities.
- Develop policies and procedures as well as technical instructions aimed at supporting internal control activities.

4. Information and Communication

The Company realizes that valid and accurate information is needed by external parties. The communication referred to in this component also involves providing a clearer understanding regarding a person's role and responsibilities relating to internal control in financial reports.

Implementation in the Company:

- Develop and control the accounting, information and communication systems both internally and externally to produce relevant information.
- Implement relevant, reliable, timely and consistent information and communication systems to provide information to all stakeholders.

5. Supervision

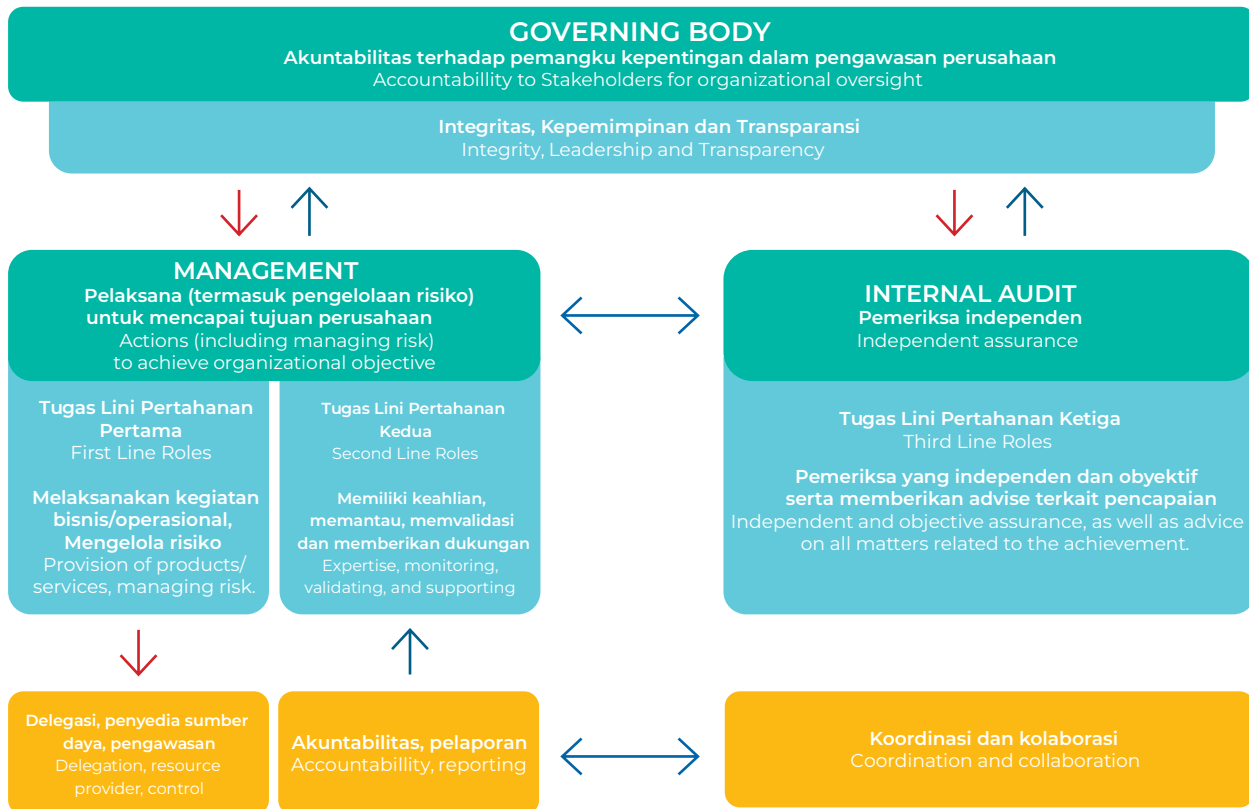
Supervision is an effort made by management to assess whether the internal control system is running according to plan or not. Supervision is carried out to identify areas of internal control that need to be improved in the future.

Implementation in the Company:

- Conduct continuous evaluation and control.
- Communicate any aspects that need to be improved or enhanced.
- Risk management through the Internal Control System must be structured and the approach used by the Company refers to the Three Lines of Defense (LOD) model approach. With this approach, it is hoped that every risk and control can be managed effectively by related functions in the Company.

Three Lines of Defense Concept

The Three Lines of Defense concept discusses how specific tasks related to risk and control can be assigned and coordinated in a Company, regardless of size or complexity. Boards of Directors and Management must understand the important differences in the roles and responsibilities of these tasks and how they should be optimally assigned for the Company to have the best chance of achieving its goals. The Three Lines of Defense model is described as follows:



Dalam tata kelola perusahaan membutuhkan ketepatan struktur dan proses yang memungkinkan:

1. Akuntabilitas kepada *Stakeholder* untuk pengawasan Perseroan melalui integritas, kepemimpinan, dan transparansi;
2. Tindakan (termasuk mengelola risiko) oleh manajemen untuk mencapai tujuan Perseroan melalui pengambilan keputusan berbasis risiko dan penerapan sumber daya;
3. *Assurance* dan saran dari audit internal yang independen untuk memberikan kejelasan dan kepercayaan diri untuk melakukan perbaikan secara terus menerus, melalui pemeriksaan yang teliti dan komunikasi berwawasan.

Manajemen, dan Internal audit memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi semua aktivitas harus diselaraskan dengan tujuan Perseroan. Dasar dari koherensi yang sukses adalah koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang teratur dan efektif.

1. *Governing Body* adalah Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan/atau mengawasi Perseroan yang memastikan adanya struktur dan proses yang tepat untuk tata kelola yang efektif, serta visi dan misi Perseroan yang selaras dengan prioritas kepentingan para *stakeholders*. Peran dari *Governing Body*:
 - a. Menentukan visi dan misi Perseroan.
 - b. Bertanggung jawab untuk pengawasan Perseroan;
 - c. Terlibat dengan *stakeholders* untuk memantau kepentingan mereka dan berkomunikasi secara transparan tentang target Perseroan;
 - d. Memupuk budaya yang mempromosikan perilaku etis dan akuntabilitas;

In corporate governance, it requires the precision of structures and processes that enable:

1. Accountability to stakeholders for corporate supervision through integrity, leadership, and transparency;
2. Actions (including risk management) by management to achieve corporate objectives through risk-based decision making and resource allocation;
3. Assurance and advice from an independent internal audit to provide clarity and confidence to make continuous improvements, through careful inspection and insightful communication.

Management and internal audit have different responsibilities, but all activities must be aligned with Company goals. The basis of successful coherence is regular and effective coordination, collaboration and communication.

1. *Governing Body* is the Board of Directors and/or Board of Commissioners who are given responsibility for managing and/or supervising the Company, ensuring that there are appropriate structures and processes for effective governance, as well as the Company's vision and mission which is in line with the priority interests of stakeholders. Role of the *Governing Body*:
 - a. Determine the Company's vision and mission.
 - b. Responsible for Company supervision;
 - c. Engage with stakeholders to monitor their interests and communicate transparently about Company targets;
 - d. Foster a culture that promotes ethical behavior and accountability;



- e. Menetapkan struktur dan proses tata kelola, termasuk komite pembantu sesuai kebutuhan;
 - f. Mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan sumber daya kepada manajemen untuk mencapai tujuan Perseroan;
 - g. Menentukan selera Perseroan untuk risiko dan melaksanakan pengawasan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal);
 - h. Menjaga pengawasan terhadap kepatuhan hukum, peraturan, dan etika;
 - i. Membentuk dan mengawasi fungsi audit internal yang independen objektif, dan kompeten.
2. Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defense*):
Manajemen operasional, sebagai lini pertama, adalah pemilik dan pengelola risiko dan pengendaliannya. Manajemen operasional mencakup manajemen pada fungsi-fungsi inti, misalnya fungsi logistik, operasi, komersial, penjualan, dan pelayanan, maupun fungsi-fungsi pendukung, misalnya fungsi *human capital*, *accounting*, dan umum (*general affairs*). Manajemen operasional bertanggung jawab untuk mempertahankan efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan dari aktivitas operasional sehari-hari secara konsisten pada setiap proses yang ada termasuk di dalamnya risiko dan kontrol, sehingga selaras dengan tujuan Perseroan. Manajemen Perseroan memastikan bahwa pada lini pertama memiliki otonomi dalam mengelola risiko dan melakukan penilaian secara mandiri terhadap risiko yang dihadapi serta menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Adapun peran lini pertahanan pertama diuraikan sebagai berikut:
- a. Manajemen operasional pemilik dan mengarahkan tindakan (termasuk mengelola risiko) serta penerapan sumber daya dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi;
 - b. Menjaga dialog berkelanjutan dengan Direksi, dan melaporkan hasil yang direncanakan, aktual, dan yang diharapkan terkait dengan tujuan organisasi;
 - c. Menetapkan dan memelihara struktur dan proses yang sesuai untuk SOP dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal);
 - d. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan etika.
3. Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defense*):
Lini pertahanan kedua merupakan bagian dari manajemen, tetapi memiliki independensi terhadap manajemen operasional (*limited independent control*) atau bertanggung jawab dalam Perseroan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur, misalnya Bagian SDM, Kontrol Keuangan, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Legal. Oleh karenanya, lini kedua juga memberikan tantangan terhadap pengelolaan risiko dan pengendalian oleh lini pertama. Lini kedua pada umumnya juga memberikan pedoman, sistem, pelatihan, dan
- e. Establish governance structures and processes, including subsidiary committees as needed;
 - f. Delegating responsibilities and providing resources to management to achieve Company goals;
 - g. Determine the Company's appetite for risk and implement risk management supervision (including internal controls);
 - h. Maintain supervision of legal, regulatory and ethical compliance;
 - i. Establish and supervise an independent, objective and competent internal audit function.
2. First Line of Defense:
Operational management, as the first line, is the owner and manager of risks and controls. Operational management includes management of core functions, for example logistics, operations, commercial, sales and service functions, as well as supporting functions, for example human capital, accounting and general affairs functions. Operational management is responsible for maintaining the effectiveness of the Internal Control System and consistent implementation of daily operational activities in every existing process, including risks and controls, so that it is in line with the Company's objectives. The Company's management ensures that in the first line it has autonomy in managing risks and carries out independent assessments of the risks faced and maintains compliance with established policies and procedures.
- The role of first line of defense is described as follows:
- a. Owner's operational management and directing actions (including managing risks) and application of resources in its activities to achieve organizational goals;
 - b. Maintain ongoing dialogue with Board of Directors, and report on planned, actual, and expected results related to organizational goals;
 - c. Establish and maintain appropriate structures and processes for SOPs and risk management (including internal controls);
 - d. Ensure compliance with laws, regulations and ethics.
3. Second Line of Defense:
The second line of defense is part of management, but has independence from operational management (limited independent control) or is responsible within the Company for designing and implementing policies and procedures, for example HC, Financial Control, Risk Management, Compliance and Legal. Therefore, the second line also poses challenges to risk management and control by the first line. The second line generally also provides guidelines, systems, training and internalization of operational management. The risk management function within the Company together

internalisasi pada manajemen operasional. Fungsi manajemen risiko di dalam Perseroan bersama komite terkait untuk memantau praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen operasional, membantu pemilik risiko dalam mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan risiko dan kontrol yang dilakukan. Termasuk *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi *compliance* melakukan kontrol atas aktivitas yang dilakukan di Lini Pertahanan Pertama terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum. Beberapa fungsi yang khusus di Perseroan adalah: *health and safety*, kepatuhan lingkungan, dan *Whistleblowing System*. Sedangkan fungsi keuangan melakukan *controllership* dengan memonitor isu-isu terkait keuangan, risks dan kepatuhan Perseroan.

- Beberapa tugas lainnya dari Lini Pertahanan Kedua adalah:
- Menyiapkan *risk management framework*;
- Membantu manajemen dalam mengembangkan proses dan kontrol untuk mengelola risiko dan isu di Perseroan;
- Memberikan *training* dan panduan atas proses manajemen risiko;
- Mengingatkan lini pertama atas adanya isu yang penting, perubahan peraturan yang memengaruhi risiko;
- Memonitor apakah Sistem Pengendalian Internal sudah memadai, apakah sudah *compliance* terhadap peraturan dan apakah perbaikan atas kelemahan kontrol dilakukan tepat waktu.

- Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defense*):
Lini pertahanan ketiga adalah fungsi yang memiliki *the highest level of independence control* yang dimiliki oleh Unit Audit Internal. Internal Auditor adalah pihak yang bersifat independen, memberikan pemastian yang objektif, dan mendampingi perancangan aktivitas untuk memberikan nilai tambah dan pengembangan terhadap operasional Perseroan. Unit Audit Internal membantu Perseroan untuk mencapai sasaran secara sistematis dan melalui pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, proses tata kelola dan melaporkan setiap temuannya kepada Direktur Utama Perseroan dan/atau Dewan Komisaris serta bekerja sama atau berkoordinasi dengan Komite Audit.

Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal antara lain:

- Meyakinkan bahwa proses di operasi sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Adanya Sistem Pengendalian Internal yang memadai atas pengamanan aset (*safeguarding assets*);
- Keakuratan dari proses pelaporan keuangan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan SOP;
- Elemen-elemen manajemen risiko;
- Meyakinkan bahwa Lini Pertama dan Lini Kedua telah melakukan tugasnya dengan baik;

with related committees is to monitor risk management practices carried out by operational management, assist risk owners in identifying, assessing and reporting risks and controls implemented. Including compliance with statutory regulations.

The compliance function controls activities carried out in the First Line of Defense related to compliance with laws and regulations in general. Some of the specific functions in the Company are: health and safety, environmental compliance, and whistle blowing system. Meanwhile, the finance function carries out controllership by monitoring issues related to finance, risks and Company compliance.

- Some of the other tasks of Second Line of Defense are:
- Preparing a risk management framework;
- Assist management in developing processes and controls to manage risks and issues in the Company;
- Providing training and guidance on the risk management process;
- Alert the first line to important issues, regulatory changes that affect risk;
- Monitor whether the Internal Control System is adequate, whether it is in compliance with regulations and whether improvements to control weaknesses are carried out in a timely manner.

- Third Line of Defense:
The third line of defense is the function that has the highest level of independence control owned by the Internal Audit Unit. Internal Auditors are parties who are independent, provide objective assurance, and assist in the design of activities to provide added value and development to Company operations. Internal Audit Unit helps the Company to achieve targets systematically and through a disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, governance processes and report any findings to the Company's President Director and/or Board of Commissioners as well as collaborating or coordinating with the Audit Committee.

The scope of Internal Audit work includes:

- Ensure that the operational processes are running in accordance with established standards;
- The existence of an adequate Internal Control System for safeguarding assets;
- Accuracy of the financial reporting process;
- Compliance with laws and regulations, policies and SOPs;
- Risk management elements;
- Ensure that the First Line and Second Line have done their job well;



- g. Komponen dan prinsip utama dalam Sistem Pengendalian Internal telah dijalankan dalam setiap proses di Perseroan (termasuk di setiap entitas, departemen, unit dan fungsi operasional);
- h. *Counterpart* Pihak Luar Auditor Eksternal (BPK, KAP, SPI Perusahaan holding).
5. Eksternal:
Auditor Eksternal (BPK dan KAP), Regulator (OJK, Kantor pajak) dan eksternal lainnya yang berada di luar Perseroan, dapat menjadi bagian penting yang secara tidak langsung memiliki peran penting dalam keseluruhan tata kelola dan struktur kontrol, berperan dalam mengevaluasi peran *lines of defense* (LoD) dalam Perseroan secara independen dan objektif. Pihak Luar ini secara tidak langsung berperan sebagai tambahan LoD bagi Perseroan.
- g. The main components and principles in the Internal Control System have been implemented in every process in the Company (including in every entity, department, unit and operational function);
- h. External Counterparty External Auditor (BPK, KAP, SPI holding Company).
5. External:
External Auditors (BPK and KAP), Regulators (OJK, Tax Office) and other external auditors who are outside the Company, can be an important part that indirectly has an important role in the Company's overall governance and control structure, playing a role in evaluating the role of lines of defense (LoD) within the Company independently and objectively. This external party indirectly acts as an additional LoD for the Company

Implementasi Dalam Manajemen Perseroan

Sistem tiga lini dalam penerapan di Perseroan diatur dalam tugas kewenangan sesuai struktur organisasi yang ditetapkan Direksi. Gambaran model tiga lini pertahanan di PT Indonesia Kendaraan Terminal dapat diuraikan sebagai berikut:

Governance Body	Lini Pertama First Line	Lini Kedua Second Line	Lini Ketiga Third Line	Eksternal External
Oversight	Owner Risk	Control Support	Objective Assurance and Advise	Independent
✓ Komisaris ✓ Direksi ✓ Board of Commissioners ✓ Board of Directors	✓ Terminal ✓ Teknik ✓ SDM & Pengadaan ✓ Komersial ✓ Sekretaris Perusahaan ✓ Terminal ✓ Technical ✓ Human Capital & Procurement ✓ Commercial ✓ Corporate Secretary	✓ Manajemen Risiko ✓ Manajemen Mutu ✓ Hukum ✓ Sistem Informasi ✓ Risk Management ✓ Quality Management ✓ Legal ✓ Information Systems	✓ Audit Internal ✓ Internal Audit	✓ BPK ✓ Kantor Akuntan Publik ✓ Regulator ✓ BPK ✓ Public Accounting Firm ✓ Regulators

Implementation in the Company Management

The three-line system implemented in the Company is regulated in the duties of authority according to the organizational structure determined by Board of Directors. An overview of the three lines of defense model at PT Indonesia Kendaraan Terminal can be described as follows:

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

Financial and Operational Control System

The internal control system implemented in the Company can be grouped into two parts, namely:

Pengendalian Keuangan Financial Control	Pengendalian Administrasi Administrative Control
Pengendalian internal keuangan/akuntansi, meliputi: 1. Menerapkan <i>flow</i> persetujuan dan pemisahan antara fungsi operasi yang jelas terkait alur otorisasi transaksi keuangan. 2. Melakukan pencatatan dan pengawasan fisik atas aset. 3. Menyusun prosedur dan sistem pencatatan keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengamanan aset Perseroan. Financial/accounting internal control, including: 1. Implement approval flows and clear separation between operational functions regarding the flow of financial transaction authorization. 2. Carry out recording and physical supervision of assets. 3. Develop procedures and financial recording systems related to the management and security of the Company's assets.	Pengendalian internal pada aspek operasional, meliputi upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, melakukan <i>update</i> berkala atas seluruh kebijakan, prosedur dan sistem operasional yang berlaku di Perseroan agar dapat menggambarkan kegiatan operasional yang aktual. Penerapan pengendalian operasional bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara implementasi kegiatan dengan prosedur atau kebijakan internal yang berlaku. Internal control in operational aspects, includes efforts aimed at increasing business efficiency, carrying out regular updates on all policies, procedures and operational systems that apply in the Company in order to reflect actual operational activities. The implementation of operational control aims to ensure conformity between the implementation of activities and applicable internal procedures or policies.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Melalui organ-organ utama maupun organ pendukung yang ada, Perseroan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan telah mematuhi dan mengindahkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap hasil survei, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan sistem pengendalian internal di Perseroan secara umum mencapai nilai rata-rata sebesar 85,80 dengan tingkat margin error 7,80% atau pengendalian internal berada pada tingkat efektivitas "Sangat Efektif". Namun dengan memperhatikan perkembangan perseroan saat maka masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan sistem pengendalian internal menjadi lebih baik lagi terutama terkait dengan pengintegrasian IT dalam implementasi pengendalian internal pengelolaan Perseroan.

Compliance with Law Regulations

Through existing main and supporting organs, the Company ensures that every business activity carried out by the Company complies with and heeds the applicable provisions and laws.

Evaluation of Internal Control Effectiveness in 2024

Based on the results of testing and evaluation that have been carried out on the survey results, it can be concluded that the condition of implementing the internal control system in the Company generally reaches an average value of 85.80 with a margin of error level of 7.80% or internal control is at the "Very Effective" level of effectiveness. However, by paying attention to the Company's current developments, there is still room to improve the internal control system to make it even better, especially in relation to the integration of IT in the implementation of the Company's internal control management.

No	Aspek Pengendalian Control Aspects	Bobot Nilai Value Weight	Nilai Value	Skor Score	Keterangan Information
1.	Lingkungan Pengendalian Control Environment	40	35,01	87,52	Sangat Efektif Very Effective
LP1	Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etik Commitment to integrity and ethical values	8	7.14	89,26	Sangat Efektif Very Effective
LP2	Independensi direksi terhadap manajemen dalam menjalankan tugas Independence of directors from management in carrying out their duties	10	8,33	83,33	Efektif Effective
LP3	Membuat Struktur, Garis Pelaporan, Otorisasi dan Pertanggungjawaban Independence of directors from management in carrying out their duties	9	8,25	91,67	Sangat Efektif Very Effective
LP4	Komitmen pada kompetensi Commitment to competence	8	6,85	85,65	Sangat Efektif Very Effective
LP5	Mengembangkan akuntabilitas Develop accountability	5	4,44	88,89	Sangat Efektif Very Effective
2.	Aktivitas Pengendalian Control Activities	30	25,64	85,47	Sangat Efektif Very Effective
AP1	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian Establish and develop control activities	10	6,98	69,75	Cukup Efektif Quite Effective
AP2	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi Establish and develop general control activities over technology	10	9,68	96,76	Sangat Efektif Very Effective
AP3	Menetapkan pengendalian melalui kebijakan dan prosedur Establish controls through policies and procedures	10	8,98	89,81	Sangat Efektif Very Effective
3.	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	15	12,15	81,00	Efektif Effective
KI1	Memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas dan relevan Obtain, produce and use quality and relevant information	8	6,81	85,19	Sangat Efektif Very Effective
KI2	Mengkomunikasikan secara internal dan eksternal Communicate internally and external	7	5,34	76,30	Efektif Effective
4.	Pemantauan Monitoring	15	13,00	86,64	Sangat Efektif Very Effective
P1	Melaksanakan evaluasi berkala dan berkesinambungan Carry out periodic and continuous evaluations	15	13,00	86,64	Sangat Efektif Very Effective
Jumlah Total		100	85,80	85,80	Sangat Efektif Very Effective



Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Perseroan telah berfungsi, terintegrasi, dan memungkinkan dilakukan perubahan dengan cepat sesuai tuntutan perubahan organisasi dan operasional serta telah berbasis IT. Seluruh jenis pengendalian ada dan berfungsi, baik preventif, detektif, maupun korektif.

Temuan Internal, Rekomendasi, dan Tindak Lanjutnya

Berdasarkan hasil evaluasi dan tes pengujian terhadap beberapa objek audit dengan periode audit Semester I tahun 2024 dengan audit rating opinion *Above Average Risk*, terdapat beberapa objek audit yang pengendalian internalnya lemah dan berpotensi risiko tinggi sebagai berikut:

No	Temuan audit Audit findings	Pengendalian Internal Internal Control	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Tingkat Prioritas Priority Level
1	Belum Optimalnya Pengendalian Internal di Terminal Satelit Belawan Atas Pelaksanaan Ketentuan Yang Tercantum Dalam Kesepakatan Bersama Internal Control at Belawan Satellite Terminal is not yet optimal regarding the implementation of provisions stated in the Collective Agreement	Perlu Beberapa Perbaikan Terhadap Control/Pengendalian Need some improvements on Internal Control	4	Rendah Low
2	Terdapat Pendapatan Atas Pelayanan Di Terminal Satelit Makassar Kepada PT Dharma Lautan Nusantara Yang Belum Terealisasi There is service income at the Makassar Satellite Terminal to PT Dharma Lautan Nusantara that has not been realized	Perlu Beberapa Perbaikan Terhadap Control/Pengendalian Need some improvements on Internal Control	1	Menengah Intermediate
3	Belum Optimalnya Fungsi Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan BBM & Pencatatan Kesiapan Alat Serta Utilisasi Alat The internal control function in fuel management and equipment readiness recording and utilization is not yet optimal	Perlu Beberapa Perbaikan Terhadap Control/Pengendalian Need some improvements on Internal Control	5	Rendah Low

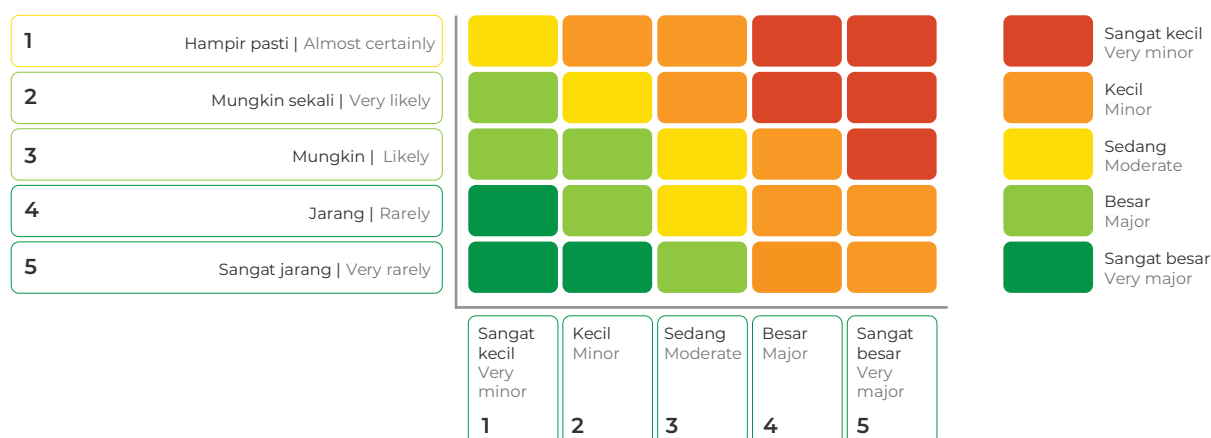
This shows that the implementation of internal control system within the Company is functional, integrated, and allows changes to be made quickly according to the demands of organizational and operational changes and is IT-based. All types of control exist and function, whether preventive, detective, or corrective.

Internal Findings, Recommendations and Follow-up

Based on the results of evaluations and tests on several audit objects for First Semester of 2024 audit period with an *Above Average Risk* audit opinion rating, there are several audit objects that have weak internal control and have the potential for high risk as follows:

Di bawah ini adalah detail ilustrasi hasil audit dengan “Risk Bubbles” yang menggambarkan “likelihood dan impact”:

Below is a detailed illustration of the audit results with “Risk Bubbles” which describe “likelihood and impact”:



Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2024

Secara umum pelaksanaan sistem pengendalian internal perseroan telah dilakukan secara efektif. Hal ini didasarkan pada Laporan hasil penilaian tingkat efektivitas pengendalian internal. Dari Analisa data yang tervalidasi meliputi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (Penilaian Risiko), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), dan Pemantauan (*Monitoring*), tingkat efektivitas pengendalian internal mencapai skor 85,80 atau tingkat pengendalian internal dinyatakan "Sangat Efektif".

Pada tahun 2024, Perseroan juga telah mampu menyelesaikan secara tuntas hasil temuan audit periode-periode sebelumnya. Namun dengan memperhatikan perkembangan Perseroan saat ini, maka masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan sistem pengendalian internal menjadi lebih baik lagi terutama terkait dengan pengintegrasian IT dalam implementasi pengendalian internal pengelolaan Perseroan.

Statement of Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the Adequacy of Internal Control System in 2024

In general, the implementation of the Company's internal control system has been carried out effectively. This is based on the report on the results of assessing the level of effectiveness of internal control. From the analysis of validated data including Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring, level of internal control effectiveness reached a score of 85.80 or level of internal control is declared "Very Effective".

In 2024, the Company was also able to completely resolve the audit findings of previous periods. However, by paying attention to the Company's current developments, there is still room to improve the internal control system to make it even better, especially in relation to the integration of IT in the implementation of the Company's internal control management.



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang kepelabuhanan yang memiliki risiko *inherent* yang cukup besar, Perseroan berkomitmen untuk mengelola semua risiko secara efektif dan efisien serta memastikan kesinambungan dan risiko pertumbuhan dari bisnis inti yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko secara efektif dan proaktif, dengan berfokus pada risiko yang terpenting. Pengelolaan risiko Perseroan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko bisnis yang material, IPCC telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Surat Keputusan Nomor: PW.05/01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tanggal 24 Desember 2024. Pedoman manajemen risiko digunakan untuk memastikan bahwa semua level manajemen Perseroan selalu mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko dalam menjalankan proses pengambilan keputusan. Kebijakan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dengan menetapkan tahapan-tahapan proses standar pengelolaan risiko yang berlaku di Perusahaan.

Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan saat ini sudah mengadopsi standar ISO 31000:2018 yang terdiri dari Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan Proses Manajemen Risiko. Secara simbolis, Komisaris dan Direksi menandatangani pernyataan Komitmen Bersama Penerapan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018, yang secara berkala setiap tahun senantiasa diperbarui.

As a port Company with significant inherent risks, the Company is committed to managing all risks effectively and efficiently and ensuring the continuity and growth risks of a sustainable core business through effective and proactive risk management, focusing on the most important risks. The Company's risk management is carried out in a coordinated and integrated manner. In supervising and managing material business risks, IPCC has Risk Management Guidelines which were established through a Board of Directors Decree Number: PW.05/01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 dated December 24, 2024. The risk management guidelines are used to ensure that all levels of the Company's management always consider risk management aspects in the decision-making process. The risk management policy aims to improve a risk-aware culture by establishing standard risk management process stages that apply in the Company.

The Company's Risk Management Guidelines have now adopted the ISO 31000:2018 standard which consists of Risk Management Principles, Risk Management Framework, and Risk Management Processes. Symbolically, Board of Commissioners and Board of Directors signed a statement of Joint Commitment to the Implementation of ISO 31000:2018-Based Risk Management, which is updated annually.



Manajemen Perseroan, yang terdiri dari Direksi dan Pejabat Senior Manager juga secara berkala menandatangani Komitmen Budaya Sadar Risiko yang secara berkala setiap tahun diperbarui.

The Company's Management, consisting of the Board of Directors and Senior Manager Officials, also periodically signs a Risk Aware Culture Commitment which is updated annually.

Komitmen Bersama Penerapan Manajemen Risiko Joint Commitment to Implementing Risk Management

Pernyataan Komitmen Bersama Penerapan Budaya Sadar Risiko Statement of Joint Commitment to Implementing a Risk-Aware Culture



Untuk menjaga komitmen dan memastikan bahwa kebijakan budaya risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan *risk owner* maka Perseroan mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai manajemen risiko kepada unit-unit kerja.

To maintain commitment and ensure that the risk culture policy is understood and implemented by all management and risk owners, the Company carries out continuous education and outreach activities regarding risk management to work units.

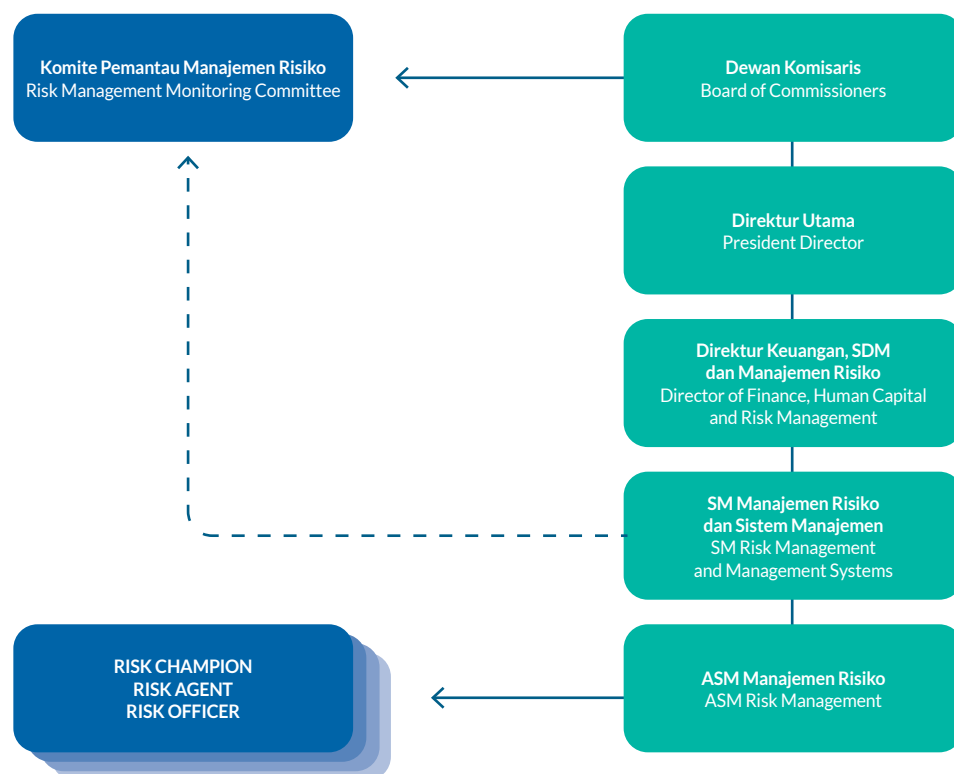
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO IPCC

Pengelolaan manajemen risiko di IPCC melibatkan Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen yang berada di bawah Direktur Keuangan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PW.05/01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

IPCC RISK MANAGEMENT STRUCTURE

Risk management at IPCC involves the Risk Management and Management Systems Division, which reports to Director of Finance based on the Board of Directors Regulation Number: PW.05/01/24/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 dated December 24, 2024, regarding Implementation of Risk Management at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.





- Struktur organisasi Manajemen Risiko didasarkan pada filosofi bahwa proses Manajemen Risiko yang efektif tercapai apabila Perseroan berhasil membangun komitmen yang kuat dari Direksi dan Dewan Komisaris, serta berhasil mengintegrasikan proses Manajemen Risiko ke dalam seluruh proses bisnis Perseroan.
- Perseroan memiliki organ komite di bawah Komisaris yang fungsinya memantau aktivitas pengelolaan manajemen risiko Perseroan.
- Perseroan menetapkan struktur kuasi di mana setiap unit memiliki Agen Risiko masing-masing (*Risk Agent*) yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi No. HK.01/24/4/1/AMR/DIRUT/IKT-24 tanggal 24 April 2024. Struktur ini bersifat kuasi yang mewakili setiap divisi untuk menjadi Agen Manajemen Risiko.
- Untuk memastikan implementasi dan menjaga proses Manajemen Risiko dapat berjalan secara baik dan dengan pengendalian yang efektif dan efisien, Direksi menetapkan kepala unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko Perseroan. Mereka bertugas menjabarkan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan (*Enterprise Risk Management*/"ERM") menjadi pedoman, prosedur, dan instruksi kerja serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penerapannya.
- Struktur organisasi Perseroan yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko harus dirancang sedemikian rupa sehingga pemangku risiko, unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko Perseroan, dan auditor internal masing-masing harus independen antara satu dengan lainnya.

- The Risk Management organizational structure is based on the philosophy that an effective Risk Management process is achieved if the Company succeeds in building strong commitment from the Board of Directors and Board of Commissioners, and successfully integrates the Risk Management process into all Company business processes.
- The Company has a committee organ under Board of Commissioner whose function is to monitor the Company's Risk Management activities.
- The Company establishes a quasi-structure in which each unit has its own Risk Agent as stipulated in the Board of Directors Decree No. HK.01/24/4/1/AMR/DIRUT/IKT-24 dated April 24, 2024. This quasi-structure represents each division to become a Risk Management Agent.
- To ensure that the implementation and maintenance of Risk Management process can run well and with effective and efficient control, Board of Directors appoints a unit head who is responsible for managing Company risks. They are tasked with describing Enterprise Risk Management (ERM) policies into guidelines, procedures and work instructions as well as providing guidance and coordination in their implementation.
- The Company's organizational structure related to the implementation of Risk Management Function must be designed in such a way that risk stakeholders, units responsible for managing Company risk, and internal auditors must each be independent of one another.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

1. Mengkaji dan merekomendasikan kerangka, falsafah, dan strategi serta program Manajemen Risiko.
2. Mengkaji dan mengembangkan metode identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko.
3. Mengukur dan memonitor eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional serta dampaknya terhadap profitabilitas Perseroan.
4. Memonitor dan mengkaji ulang pencapaian target usaha dari segi risiko serta mendukung unit usaha dalam bentuk memberi masukan untuk memitigasi risiko yang dihadapi.
5. Menjadi fasilitator untuk proses implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah diatur di kebijakan.

Peran dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen:

1. Melakukan evaluasi ketaatan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko.
2. Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan dan proses Manajemen Risiko secara menyeluruh.
3. Melakukan kaji ulang secara berkala mengenai kecukupan kebijakan dan prosedur.
4. Memastikan bahwa proses Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik di seluruh aktivitas Perseroan.
5. Melakukan validasi dan kaji ulang berkala terhadap metodologi pengukuran risiko.

Manajemen dan Dukungan Kontrol Internal:

Agar tercipta suatu pengendalian internal yang baik, Manajemen Puncak harus:

1. Memastikan tersedianya infrastruktur.
2. Memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan tepat guna.
4. Memastikan adanya pengelolaan risiko yang efektif di Perseroan.
5. Memastikan terbentuknya budaya risiko pada Perseroan secara menyeluruh.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama Sistem Pengendalian Internal adalah:

1. Menjaga dan mengamankan aset Perseroan.
2. Mendapatkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya.
3. Mengurangi potensi dan dampak kerugian.
4. Meningkatkan peran serta Pemangku Kepentingan.

Duties and Responsibilities of Risk Management Function

1. Review and recommend Risk Management frameworks, philosophies and strategies and programs.
2. Review and develop risk identification, measurement and control methods.
3. Measure and monitor overall risk exposure, per type of risk and per functional activity and its impact on Company profitability.
4. Monitor and review the achievement of business targets in terms of risk and support business units by providing input to mitigate the risks faced.
5. Become a facilitator for the Risk Management implementation process in accordance with the duties and authorities as regulated in the policy.

Roles and Responsibilities of Risk Management and Management Systems:

1. Evaluate the compliance and effectiveness of the implementation of Risk Management.
2. Oversee and evaluate Risk Management policies and processes as a whole.
3. Conduct regular reviews regarding the adequacy of policies and procedures.
4. Ensure that the Risk Management process is running well in all Company activities.
5. Validate and periodically review the risk measurement methodology.

Internal Control Management and Support:

In order to create good internal control, Top Management must:

1. Ensure the availability of infrastructure.
2. Ensure compliance with applicable laws and regulations.
3. Ensure the availability of complete, accurate, timely and effective financial and management information.
4. Ensure that there is effective risk management in the Company.
5. Ensure the formation of a risk culture in the Company as a whole.
6. Increase compliance with applicable regulations.

The main objectives of Internal Control System are:

1. Maintain and secure Company assets.
2. Get accurate and reliable financial reports.
3. Reduce the potential and impact of losses.
4. Increase stakeholder participation.



Pengendalian Internal Manajemen Risiko:

Cakupan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko adalah:

1. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur.
3. Pemisahan fungsi antara pemangku risiko, divisi Manajemen Risiko, dan audit internal.
4. Struktur organisasi perseroan.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang andal, akurat, dan tepat waktu.
6. Prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap penilaian kegiatan operasional Perseroan.
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai dari seluruh transaksi, temuan audit serta tanggapan dan tindak lanjut dari *auditee*.
10. Pengawasan dan kaji ulang secara berkala terhadap kejadian risiko dan perlakuannya.

Komposisi Keanggotaan dan Sertifikasi

Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan yang bertugas di Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen berjumlah 14 (empat belas) orang, termasuk 1 (satu) orang di antaranya adalah Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen. Dari jumlah tersebut, yang relevan dengan manajemen risiko adalah sejumlah 1 (satu) karyawan organik dan 1 (satu) karyawan alih daya sebagai administrator.

Anggota Divisi Manajemen Risiko aktif mengikuti sejumlah program sertifikasi yang relevan dengan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualifikasi mereka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga diharapkan pengelolaan risiko Perseroan juga dapat berjalan efektif karena dikelola oleh orang-orang yang berkompetensi tinggi.

Berikut ini adalah beberapa jenis sertifikasi yang sudah dimiliki oleh sejumlah anggota Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen hingga akhir 2024, antara lain:

Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Jumlah Karyawan Number of Employees
<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	3
<i>Risk Assessment Technique</i>	21
<i>Risk Fundamental</i>	21
<i>Risk Based Performance</i>	20

Internal Control Risk Management:

The scope of internal control system in implementing Risk Management is:

1. Suitability of internal control system to the type and level of inherent risk.
2. Determination of authority and responsibility for monitoring compliance with policies and procedures.
3. Separation of functions between risk stakeholders, Risk Management division and internal audit.
4. The Company organizational structure.
5. Reliable, accurate and timely reporting of financial and operational activities.
6. Adequate procedures to ensure compliance with Law Regulations.
7. Effective, independent and objective review of the assessment of the Company's operational activities.
8. Adequate testing and review of the management information system.
9. Complete and adequate documentation of all transactions, audit findings as well as responses and follow-up from auditees.
10. Regular monitoring and review of risk events and their treatment.

Membership Composition and Certification

As of December 31, 2024, the number of employees working in the Risk Management and Management Systems Division is 14 (fourteen), including 1 (one) person who is the Head of Risk Management and Management Systems Division. Of these, 1 (one) organic employee and 1 (one) outsourced employee as administrator are relevant to risk management.

Members of Risk Management Division actively participate in a number of certification programs relevant to risk management. This aims to increase their knowledge and qualifications to support the smooth implementation of their duties and responsibilities so that it is hoped that the Company's risk management can also run effectively because it is managed by highly competent people.

The following are several types of certification that a number of members of Internal Audit and Risk Management Division already have by the end of 2024, including:

Budaya dan Sosialisasi Manajemen Risiko

Agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan efektif pada setiap jenjang organisasi, maka proses sosialisasi dan edukasi budaya sadar risiko menjadi salah satu tahapan penting yang tidak boleh terlewatkan. Oleh karena itu, Direksi menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya pengembangan budaya sadar risiko secara berkala dan berkelanjutan kepada seluruh karyawan, di antaranya dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan program pelatihan dan *workshop* berkala yang difokuskan pada pemahaman konsep-konsep dasar manajemen risiko, identifikasi risiko, evaluasi risiko, serta strategi mitigasi risiko yang relevan dengan berbagai unit kerja dalam organisasi.
2. Penandatanganan Komitmen dan Penerapan Budaya Risiko oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Senior Manager sebagai bentuk komitmen tertulis dalam menerapkan dan memperkuat budaya sadar risiko dalam seluruh aktivitas perseroan.
3. Pelaporan profil risiko secara rutin yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan, yang dilakukan secara berkala dan transparan kepada Direksi dan Senior Manager untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
4. Koordinasi, sosialisasi, dan *monitoring* implementasi manajemen risiko di setiap Divisi secara rutin setiap Triwulan, yang melibatkan dialog antara Divisi Manajemen Risiko dengan unit kerja terkait guna memastikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penilaian kinerja dalam implementasinya.
5. Telah dilakukan survei efektivitas implementasi manajemen risiko 2024 sebagai bentuk upaya Perseroan dalam melakukan penilaian seberapa efektif penerapan manajemen risiko di tahun 2024.
6. Pemberian penghargaan dan pengakuan kepada *risk agent* dan Divisi terbaik dalam hal pelaporan dan implementasi manajemen risiko pada unit kerja masing-masing sebagai bentuk dorongan dan apresiasi atas kontribusi dalam memperkuat budaya sadar risiko dalam Perseroan.

Risk Management Culture and Socialization

For risk management implementation to be effective at every level of the organization, the process of socialization and education of a risk-aware culture is one of the important stages that should not be overlooked. Therefore, Board of Directors pays great attention to the efforts to develop a risk-aware culture periodically and continuously to all employees, including through:

1. The implementation of periodic training programs and workshops focused on understanding the basic concepts of risk management, risk identification, risk evaluation, and risk mitigation strategies relevant to various work units in the organization.
2. The signing of Risk Culture Commitment and Implementation by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Senior Managers as a form of written commitment to implement and strengthen a risk-aware culture in all Company activities.
3. Regular reporting of risk profiles, including identification, evaluation, and mitigation of the main risks faced by the Company, carried out periodically and transparently to the Board of Directors and Senior Managers to support proper decision making.
4. Coordination, socialization, and monitoring of risk management implementation in each Division on a routine quarterly basis, involving dialogue between Risk Management Division and related work units to ensure proper understanding of risk management policies and procedures as well as performance assessment in their implementation.
5. A survey of the effectiveness of risk management implementation in 2024 has been conducted as part of the Company's efforts to assess how effective the risk management implementation in 2024.
6. Giving awards and recognition to the best risk agents and divisions in terms of risk management reporting and implementation in their respective work units as encouragement and appreciation for their contribution in strengthening a risk-aware culture within the Company.



Implementasi Rencana Kerja Manajemen Risiko 2024

Implementation of Risk Management Work Plan in 2024

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Implementasi GRC secara Menyeluruh Comprehensive GRC Implementation	- Evaluasi dan penyusunan daftar pemenuhan GRC telah diselesaikan. - Diskusi strategis dengan Wakil CoE GRC juga telah dilakukan untuk membahas restrukturisasi, yang mencakup rencana penambahan komite investasi guna memperkuat pengawasan dan pengambilan keputusan. - Rapat pertama dengan CoE GRC telah dilaksanakan pada Agustus 2024 sebagai tindak lanjut implementasi ini. - Evaluation and compilation of the GRC fulfillment list has been completed. - Strategic discussions with the GRC CoE Deputy have also been held to discuss restructuring, which includes plans to add an investment committee to strengthen supervision and decision-making. - First meeting with the GRC CoE was held in August 2024 as a follow-up to this implementation.
Penguatan Program Budaya Risiko Strengthening the Risk Culture Program	- Penyusunan <i>timeline</i> Program Budaya telah selesai, dan pedoman terkait program ini juga telah diselesaikan. - Proses <i>monitoring</i> mitigasi risiko terus berjalan sesuai rencana hingga Desember 2024. - Penyusunan kerangka <i>Business Continuity Management</i> (BCM), seluruh <i>deliverables</i>, termasuk dokumen <i>workshop</i>, analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>), dokumen <i>Business Impact Analysis</i> (BIA), <i>Business Continuity Plan</i> (BCP), uji coba <i>drill</i>, dan pamflet BCM IKT telah berhasil diselesaikan. - The Cultural Program timeline has been finalized, and the program guidelines have also been finalized. - The risk mitigation monitoring process continues to run according to plan until December 2024. - The preparation of Business Continuity Management (BCM) framework, all deliverables, including workshop documents, gap analysis, Business Impact Analysis (BIA) documents, Business Continuity Plan (BCP), trial drills, and BCM IKT pamphlets have been successfully completed.
Pengembangan Prediktif Analisis Risiko melalui Optimalisasi <i>Key Risk Indicator</i> Predictive Development of Risk Analysis through Optimization of Key Risk Indicators	- Laporan <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) hingga Desember telah terkumpul. - Kajian risiko telah dilakukan mencakup aspek investasi, vendor pengadaan, risiko bisnis, serta Peraturan Direksi. - Penyusunan Profil Risiko, Rencana Kerja Manajemen (RKM), dan RKAP 2025 telah rampung, dengan finalisasi yang disepakati dalam Rapat Direksi dan Rakomdir. <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) reports up to December have been collected. - A risk assessment has been carried out covering investment aspects, procurement vendors, business risks, and Board of Directors Regulations. - The preparation of Risk Profiles, Management Work Plans (RKM), and the 2025 Company Budget Plan (RKAP) has been completed, with finalization agreed upon at the Board of Directors and Board of Commissioners Meetings.
Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) 2024 Risk Maturity Index (RMI) Assessment 2024	- Pelaksanaan penilaian RMI 2024 dilakukan oleh BPKP. <i>Exit meeting</i> berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2024, yang menghasilkan skor 2,12, sebagai indikator dari kematangan pengelolaan risiko di Perseroan. - Survei Efektivitas Implementasi Risiko sudah selesai per 31 Desember 2024 - The RMI 2024 assessment was carried out by the Indonesian Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The exit meeting took place on October 29, 2024, which resulted in a score of 2.12, as an indicator of risk management maturity in the Company. - The Risk Implementation Effectiveness Survey was completed as of December 31, 2024.

Program Pelatihan Manajemen Risiko

- Telah tersertifikasinya Organ Dekom, Direksi, Unit Manajemen Risiko.
- Pelatihan *Risk Fundamental* bagi Unit Manajemen Risiko dan *Risk Agent*.
- Pelatihan *Risk Assesment Technique*.
- Pelatihan *Risk Based Performance*.
- Workshop Bussiness Continuity Manangement*.

Risk Management Training Program

- Certification of Board of Commissioners, Board of Directors and Risk Management Unit.
- Risk Fundamental Training for Risk Management Unit and Risk Agents.
- Risk Assessment Technique Training.
- Risk-Based Performance Training.
- Business Continuity Management Workshop.

Program Budaya Manajemen Risiko

- Program penguatan kapabilitas dan budaya risiko
 - RO (Satu Jam Bersama *Risk Owner*): Sesi diskusi dengan pemilik risiko untuk membahas isu dan tantangan risiko secara intensif.
 - RAISING (*Risk Intensive Meeting*): Pertemuan intensif yang fokus pada pembahasan risiko dan strategi mitigasinya.
 - Community of Practice* (CoP) *Three Lines Model In Harmony: Building Organization*: Diskusi bersama untuk memperkuat kolaborasi antar tiga lini pertahanan dalam manajemen risiko.
 - Community of Practice* (CoP) Strategi Membangun Budaya dan Kapabilitas Risiko: Diskusi bersama untuk

Risk Management Culture Program

- Capability strengthening and risk culture program
 - RO (One Hour with Risk Owner): Discussion session with risk owners to intensively discuss risk issues and challenges.
 - RAISING (Risk Intensive Meeting): Intensive meeting focused on discussing risks and mitigation strategies.
 - Community of Practice (CoP) Three Lines Model In Harmony: Building Organization: Joint discussion to strengthen collaboration between the three lines of defense in risk management.
 - Community of Practice (CoP) Strategy for Building Risk Culture and Capability: Joint discussion to share

saling berbagi pengetahuan tentang strategi membangun budaya risiko dan meningkatkan kapabilitas manajemen risiko di organisasi.

2. Program *Monitoring* dan Evaluasi Risiko
 - a. Survey Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko 2024: Survei yang dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko pada tahun 2024.
 - b. *Focus Group Discussion (FGD) Risk Maturity Index (RMI)* : Diskusi kelompok terfokus untuk mengkaji dan menilai kematangan manajemen risiko.
 - c. *Exit Meeting* Penilaian *Risk Maturity Index (RMI)* 2024: Pertemuan akhir yang menandai selesainya penilaian kematangan risiko tahun 2024.
3. Program Pengembangan BCMS dan Mitigasi Risiko
 - a. *Kick Off Meeting* Pengembangan Tata Kelola BCM: Pertemuan awal untuk memulai pengembangan tata kelola *Business Continuity Management (BCM)*.
 - b. Sosialisasi Integrasi Aplikasi PRiMa dan P-RKM: Program sosialisasi mengenai integrasi aplikasi PRiMa dengan P-RKM untuk mempermudah pengelolaan risiko dan kinerja.
 - c. Penyusunan Risiko, RKM, dan Anggaran 2025: Proses penyusunan risiko, rencana kerja manajemen (RKM), dan anggaran untuk tahun 2025.
4. Program Edukasi dan Sosialisasi Risiko
 - a. Pendampingan Penyusunan Risiko Pada Aplikasi PRiMa: Bimbingan dalam menyusun dan memantau risiko menggunakan aplikasi PRiMa.
 - b. Kuis RAISING Series 2: Kegiatan edukasi berbentuk kuis yang merupakan bagian dari seri RAISING untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko.

knowledge about strategies for building a risk culture and improving risk management capabilities in organizations.

2. Risk Monitoring and Evaluation Program
 - a. The 2024 Risk Management Implementation Effectiveness Survey: A survey conducted to assess the effectiveness of risk management implementation in 2024.
 - b. Risk Maturity Index (RMI) Focus Group Discussion (FGD): A focus group discussion to review and assess the risk management maturity.
 - c. Exit Meeting Risk Maturity Index (RMI) 2024 Assessment: Final meeting marking the completion of 2024 risk maturity assessment.
3. BCMS Development and Risk Mitigation Program
 - a. Kick Off Meeting BCM Governance Development: Initial meeting to start the development of Business Continuity Management (BCM) governance.
 - b. Socialization of PRiMa and P-RKM Application Integration: A socialization program regarding the integration of the PRiMa application with P-RKM to facilitate risk and performance management.
 - c. Risk, RKM, and Budget Preparation of 2025: The process of preparing risk, management work plans (RKM), and budgets for 2025.
4. Risk Education and Socialization Program
 - a. Risk Preparation Assistance on the PRiMa Application: Guidance in preparing and monitoring risks using the PRiMa application.
 - b. RAISING Series 2 Quiz: Quiz-based educational activities that are part of the RAISING series to improve risk management understanding.



SISTEM MANAJEMEN RISIKO

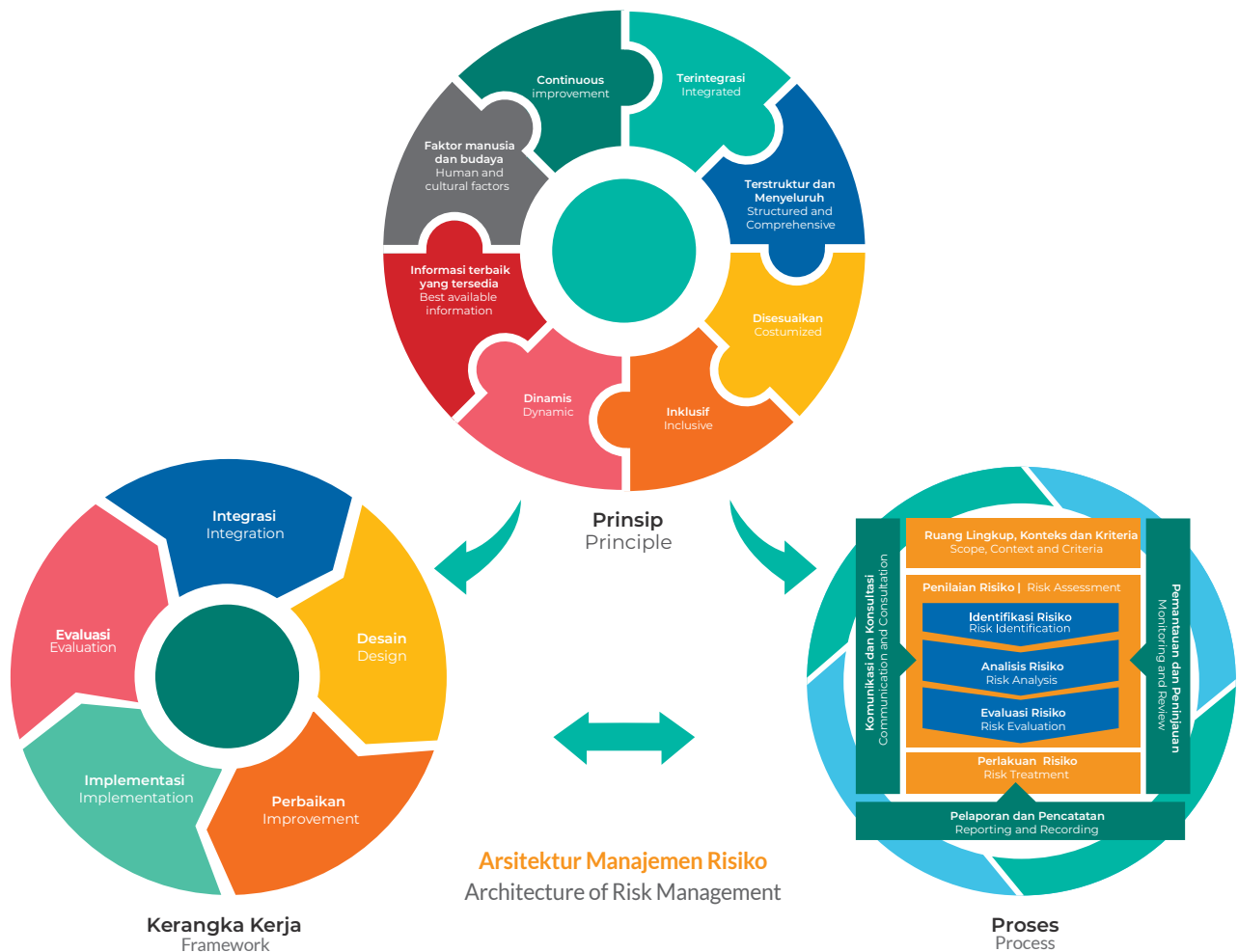
RISK MANAGEMENT SYSTEM

GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO IPCC

Penerapan sistem manajemen risiko di IPCC mengacu pada ISO 31000, yang mencakup 11 prinsip manajemen risiko, 5 (lima) elemen kerangka kerja, serta 7 (tujuh) tahap proses pengelolaan risiko sebagaimana tergambar pada skema di bawah ini:

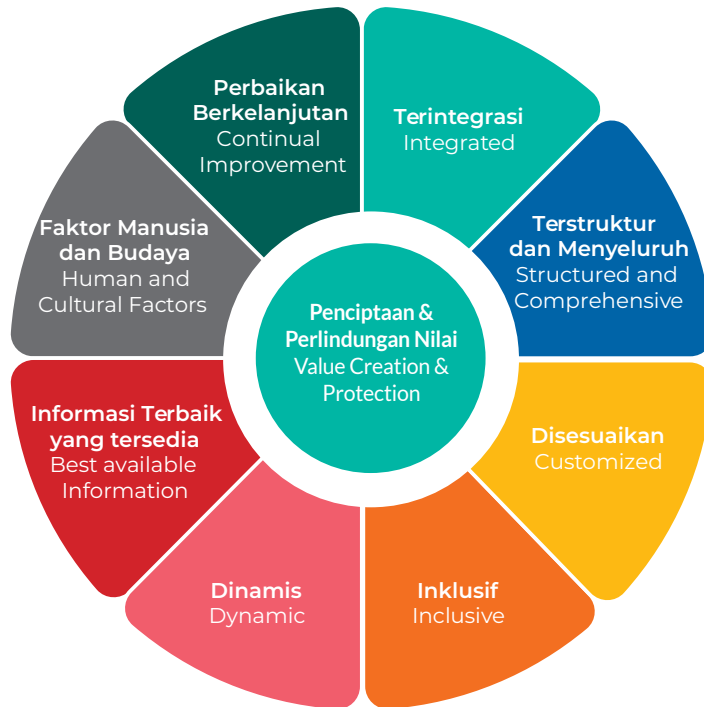
IPCC RISK MANAGEMENT SYSTEM OVERVIEW

The implementation of risk management system at IPCC refers to ISO 31000, which includes 11 (eleven) risk management principles, 5 (five) framework elements, and 7 (seven) stages of the risk management process as depicted in the scheme below:



Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 Risk Management Principles



Prinsip manajemen risiko dalam ISO 31000 adalah dasar praktik penerapan manajemen risiko yang menjadi landasan paradigma bagi seluruh *risk owner* mengenai penerapan manajemen risiko yang benar dan efektif. Tujuan dari manajemen risiko itu sendiri adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai.

Perseroan menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi dengan keseluruhan aktivitas Perseroan dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif sehingga dapat memberikan hasil yang konsisten serta dapat menyesuaikan dengan konteks eksternal dan internal Perseroan. Penerapan manajemen risiko juga dilaksanakan secara inklusif dan dinamis, serta memperhatikan faktor manusia dan budaya. Penerapan manajemen risiko secara berkesinambungan terus ditingkatkan melalui proses pembelajaran.

Pemahaman yang benar mengenai tujuan dari penerapan manajemen risiko di atas memandu kesadaran seluruh unsur Perseroan mengenai pentingnya penerapan 8 (delapan) prinsip manajemen risiko yang dinilai dapat membentuk karakteristik:

1. Terintegrasi;
2. Terstruktur dan komprehensif;
3. Adaptif/dapat menyesuaikan;
4. Inklusif;
5. Dinamis;
6. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
7. Faktor manusia dan budaya; dan
8. Perbaikan berkesinambungan.

The risk management principles in ISO 31000 are the basis for practice of implementing risk management which is the basis for paradigm for all risk owners regarding the correct and effective implementation of risk management. The purpose of risk management itself is to create and protect value.

The Company implements risk management that is integrated with all Company activities using a structured and comprehensive approach so that it can provide consistent results and can adapt to the Company's external and internal context. The implementation of risk management is also carried out in an inclusive and dynamic manner, and consider human and cultural factors. The implementation of risk management is continuously improved through a learning process.

A correct understanding of the purpose of implementing risk management above guides the awareness of all elements of the Company regarding the importance of implementing 8 (eight) risk management principles that are considered to form the following characteristics:

1. Integrated;
2. Structured and comprehensive;
3. Adaptive/can adjust;
4. Inclusive;
5. Dynamic;
6. Based on the best information available;
7. Human and cultural factors; and
8. Continuous improvement.



Kerangka Manajemen Risiko ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 Risk Management Framework



Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

The framework is a structured and systematic risk management system arrangement throughout the organization which is outlined in policies, procedures, transaction limits, authority and other provisions as well as various risk management tools that apply throughout the scope of business activities.

Kerangka manajemen risiko sesuai standar ISO 31000:2018 dimulai dengan pemberian mandat dan komitmen oleh jajaran manajemen puncak. Hal ini menandakan bahwa untuk bisa menerapkan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingan internal organisasi, khususnya keterlibatan dan dukungan pimpinan puncak.

The risk management framework according to the ISO 31000:2018 standard begins with the provision of mandates and commitments by top management. This indicates that to be able to implement effective risk management, support from the organization's internal stakeholders is very necessary, especially the involvement and support of top management.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pemimpin Perseroan memberikan teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi.

This condition illustrates that the Company's leaders provide an example and commitment in managing risk through policies, authority, duties, responsibilities and accountability at the organizational level that are tailored to the organization's goals.

Berikut ini adalah 6 (enam) komponen yang menjadi kerangka kerja manajemen risiko Perseroan, yaitu:

The following are the 6 (six) components that form the Company's risk management framework, namely:

1. **Kepemimpinan dan Komitmen**
Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengawal jalannya implementasi manajemen risiko dan bertugas memastikan bahwa manajemen risiko telah terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan organisasi. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus menunjukkan sikap kepemimpinan dan komitmennya terhadap pengelolaan risiko

1. **Leadership and Commitment**
Board of Directors and Board of Commissioners play an active role in supervising the implementation of risk management and are responsible for ensuring that risk management is integrated into all organizational activities. Each member of Board of Directors and Board of Commissioners must demonstrate leadership and commitment to effective

yang efektif, tertuang dalam Komitmen antara Komisaris dan Direksi dan Penuasaan Implementasi Manajemen Risiko antara Direksi dan para Senior Manager.

2. Integrasi

Integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran dan operasi organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan menilai proses integrasi manajemen risiko sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi yang tentunya dikelola pada setiap bagian dari struktur organisasi tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapinya. Hal ini tertuang dalam perencanaan risiko tahun yang terintegrasi dengan Sasaran, RKM dan RKAP Perseroan.

3. Desain

Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu (1) pemahaman organisasi dan konteksnya, (2) penegasan komitmen manajemen risiko, (3) penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, (4) alokasi sumber daya, dan (5) penyiapan komunikasi dan konsultasi. Hal ini tertuang dalam sebuah komitmen, pedoman dan SOP Manajemen Risiko perseroan tahun 2022.

4. Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi risiko yang dilakukan setiap Triwulan dan dilaporkan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

5. Evaluasi

Evaluasi dalam kerangka manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau Perseroan. Hal ini dilaksanakan baik oleh Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko yang dilaksanakan setiap Triwulan.

6. Perbaikan

Perbaikan dalam kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Proses adaptasi suatu organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal, dengan begitu

risk management, as stated in the Commitment between Board of Commissioners and Board of Directors and the Implementation of Risk Management between Board of Directors and Senior Managers.

2. Integration

Integration into the framework means that risk management is part and cannot be separated or integrated into the goals, governance, leadership and commitment, strategy, targets and operations of the organization. To achieve this, the Company assesses that the risk management integration process is very dependent on understanding the organizational structure and organizational context, which of course is managed by each part of the organizational structure having the responsibility to manage the risks it faces. This is stated in the year's risk planning which is integrated with the Company's Targets, RKM and RKAP.

3. Design

Design is a planning or conception that is carried out before the creation of an object, system, component or structure. Design in the risk management framework covers several things, namely (1) understanding the organization and its context, (2) affirming risk management commitment, (3) determining roles, authorities, responsibilities, and accountabilities, (4) allocating resources, and (5) preparing communication and consultation. This is stated in a commitment, guidelines, and SOP for Risk Management in 2022.

4. Implementation

Implementation or execution in the risk management framework is carried out after the risk management design is created and determined. If the risk management design is implemented well, the risk management framework can ensure that the risk management process becomes part of all activities within the risk organization carried out every quarter and reported to Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors.

5. Evaluation

Evaluation within the risk management framework is carried out to periodically measure the risk management framework against the objectives, implementation plans, indicators and expected behavior in accordance with the goals of the organization or Company. This is carried out by both Shareholders and Board of Commissioners through the Risk Management Monitoring Committee which is every quarter.

6. Improvements

Improvement in the risk management framework consist of continuous adaptation and improvement. Adaptation is the ability to adjust to the environment. The adaptation process of an organization is carried out by considering changes that occur in both the internal and external environment, so that management can take corrective steps in accordance with

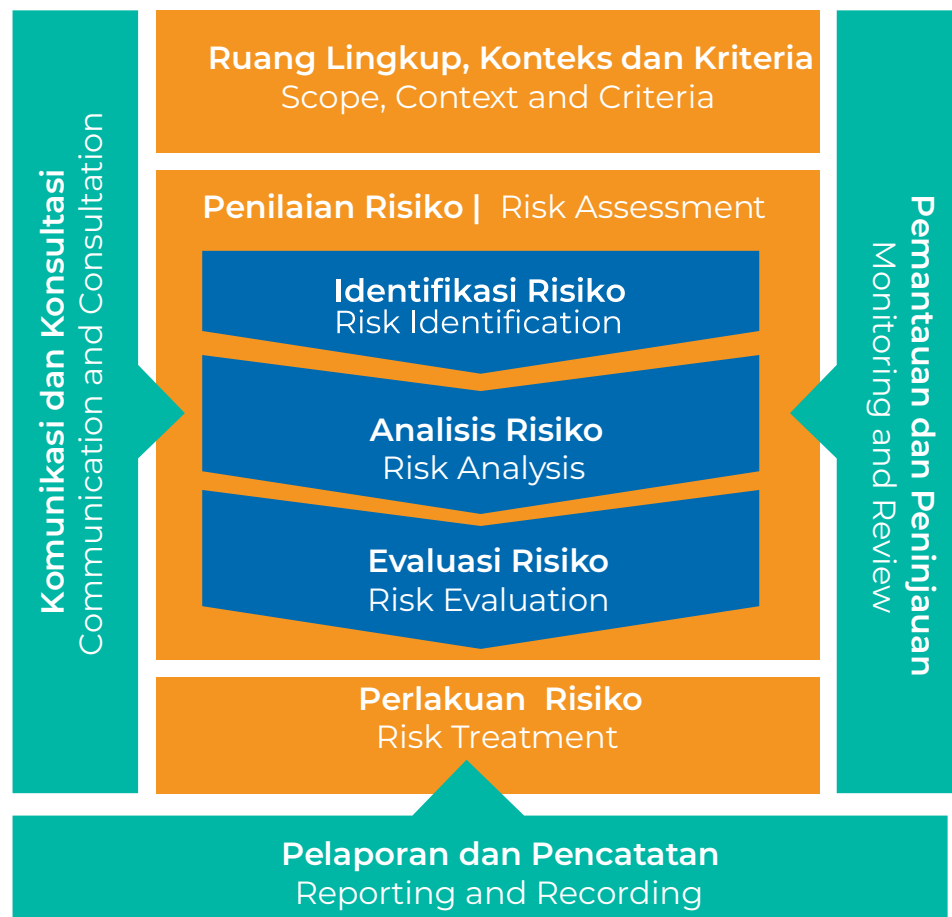


manajemen dapat mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tertuang pada Tinjauan Perubahan yang dilakukan pada setiap dokumen serta pembaruan komitmen yang dilakukan minimal 1 tahun sekali pada peraturan perseroan.

environmental changes that occur to achieve organizational goals. This is stated in the Review of Changes made to each document as well as renewal of commitments made at least once a year in Company regulations.

Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 Risk Management Process



Proses Manajemen Risiko digunakan sebagai pedoman atau acuan agar organisasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan tahapan proses pengelolaan risiko mereka yang dimulai dari penetapan konteks sampai dengan pemantauan, tinjauan, dan pelaporan masing-masing risiko yang dikelola. Berikut ini adalah uraian proses kerja yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko:

1. Komunikasi dan Konsultasi

Proses komunikasi dan konsultasi ialah proses dalam memahami dan mengkomunikasikan risiko dan strategi pengelolaannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Tahapan ini menjadi penting karena penerapan manajemen risiko seharusnya dikembangkan oleh pihak-pihak yang telah paham mengenai risiko yang akan dihadapi perseroan, sebab manajemen risiko bukanlah tanggung jawab satu atau dua pihak tertentu, tetapi tanggung jawab semua pihak di dalam perseroan. Proses komunikasi dan konsultasi ini dilakukan

The Risk Management Process is used as a guideline or reference so that the organization can maintain consistency in the implementation of risk management process stages, starting from determining the context to monitoring, reviewing, and reporting on each risk being managed. The following is a description of work processes carried out in the risk management implementation:

1. Communication and Consultation

The communication and consultation process is the process of understanding and communicating risks and management strategies to all stakeholders. This stage is important because the implementation of risk management should be developed by parties who understand the risks that the Company will face, because risk management is not the responsibility of one or two particular parties, but is the responsibility of all parties in the Company. This communication and consultation process is carried out both when preparing risks for the

baik saat penyusunan risiko tahun berikutnya maupun *monitoring* pelaksanaan mitigasi risiko.

2. Menentukan Konteks, Jangkauan, dan Kriteria
Perseroan telah menentukan konteks, jangkauan, dan kriteria dari manajemen risiko. Penentuan kriteria risiko ini dilakukan berdasarkan *risk appetite* dan *tolerance* yang telah ditetapkan perseroan serta arahan Kantor Pusat yang mana merupakan turunan dari Kementerian BUMN.
3. Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko
Perseroan melakukan identifikasi risiko (*risk identification*) untuk mengidentifikasi sumber risiko (*risk causes*), peristiwa risiko (*risk events*), dan dampak risiko (*risk impacts*) yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam konteks perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan analisis risiko (*risk analysis*) untuk memahami sifat dari risiko dan karakteristiknya termasuk kesesuaian level risiko. Risiko kemudian dievaluasi agar dapat menentukan langkah penanganan risiko (*risk treatment*) yang diperlukan. Akan hal ini, Perseroan telah memiliki *Key Risk Indicators* (KRI) yang bertujuan untuk mengukur *risk drivers* atau *risk cause* yang dapat digunakan untuk menghubungkan dampak dari risiko dengan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. KRI digunakan untuk memantau *level of risk exposure* perseroan terhadap suatu risiko sebelum kerugian akibat risiko tersebut terjadi. Hal ini tertuang dalam dokumen Kertas Kerja Risiko (KKR) yang diperbarui setiap triwulan.

Selain itu, sejak tahun 2023 Perseroan melakukan penyusunan *Early Warning System* (EWS) sebagai sebuah sistem yang mempunyai kemampuan untuk memberikan notifikasi peluang atau kesempatan terjadinya potensi risiko bisnis atau deteksi dini terhadap risiko bisnis yang berbasis KRI.

4. Pemantauan dan Pengkajian
Proses *monitoring* dan *review* adalah tahapan untuk memastikan bahwa *risk assessment* dan *risk treatment* sudah berjalan memadai dan efektif, memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
5. Penyimpanan dan Pelaporan
Perseroan menyusun laporan secara tepat waktu, akurat, dan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Pelaporan disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen kepada Direktur Utama. Perseroan juga memiliki *Loss Event Management*, sebuah mekanisme untuk mencatat setiap kejadian yang merugikan perseroan dalam sebuah *database*. Basis data ini dapat digunakan untuk *tools* analisis masa depan terutama dalam menentukan ukuran kemungkinan, dampak, dan jangkauan kapasitas, toleransi, dan selera yang diharapkan. *Database* ini juga dapat digunakan untuk menganalisa dan digunakan untuk mengembangkan rencana mitigasi yang tepat guna di kemudian hari untuk peristiwa serupa. Hal ini tertuang secara konsisten yang dilaporkan Triwulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

following year and monitoring the implementation of risk mitigation.

2. Determine Context, Scope, and Criteria
The Company has determined the context, scope and criteria for risk management. Determination of risk criteria is carried out based on the risk appetite and tolerance that has been determined by the Company as well as the Head Office direction which is derived from the Ministry of SOE.
3. Risk Identification and Risk Analysis
The Company carries out risk identification to identify risk sources, risk events and risk impacts that are associated with achieving targets that have been determined in the Company context. Apart from that, the Company also carries out risk analysis to understand the nature of risks and their characteristics, including the suitability of risk levels. The risks are then evaluated in order to determine the necessary risk treatment steps (risk treatment). In this regard, the Company has Key Risk Indicators (KRI) which aims to measure risk drivers or risk causes which can be used to relate the impact of a risk to the possibility of that risk occurring. KRI is used to monitor the level of risk of a Company's exposure to a risk before losses due to that risk occur. This is stated in the Risk Working Paper (KKR) document which is updated every quarter.

In addition, since 2023 the Company has been developing an Early Warning System (EWS) as a system that has the ability to provide notification of opportunities or opportunities for potential business risks or early detection of KRI-based business risks.

4. Monitoring and Assessment
The monitoring and review process is a stage to ensure that risk assessment and risk treatment have been carried out adequately and effectively, providing feedback and recommendations for necessary improvements.
5. Storage and Reporting
The Company prepares reports timely, accurately and in a form that is easy to understand. Reports are submitted by Internal Audit and Risk Management Division to President Director. The Company also has Loss Event Management, a mechanism to record every event that is detrimental to the Company in a database. This database can be used for future analysis tools, especially in determining the size of possibility, impact, and range of expected capacities, tolerances, and tastes. This database can also be used to analyze and be used to develop appropriate mitigation plans in the future for similar events. This is stated consistently in quarterly reports to the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders.



Dalam pelaksanaannya proses Manajemen Risiko dibagi menjadi 2 (dua) proses yaitu Proses Strategis dan Taktikal, secara strategis pendekatannya, yaitu dengan *top-down* dan *bottom-up* serta menyeluruh (*enterprise wide*) mencakup kriteria risiko yang sudah ditetapkan.

1. *Top-Down Process*

Pada setiap periode pembuatan rencana strategis perseroan dalam bentuk RJPP dan RKAP, direksi akan memberikan arahan kepada seluruh unit untuk target dan capaian sasaran yang diharapkan yang disertai dengan gambaran paparan potensi risiko beserta rencana strategis penanganannya yang mungkin terjadi. Setelah RJP dan RKAP tahun berikutnya untuk dilaporkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang di dalamnya terdapat analisis dan mitigasi risiko-risiko korporat (*strategic*, operasional, finansial, dan kepatuhan). Profil risiko tahunan disusun oleh unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perseroan berdasarkan hasil analisis, kajian, dan *risk assessment* di tingkat korporat dan unit kerja.

2. *Bottom-Up Process*

Setiap tahun dan tiga bulan sekali seluruh unit kerja dengan difasilitasi oleh unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perseroan menyusun dan melaporkan eksposur risiko serta memonitor implementasi mitigasi risiko operasional dengan merujuk analisis risiko dan progres penanganan risiko sebelumnya.

3. *Tactical Process*

Proses Manajemen Risiko didasarkan pada proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018, mencakup dua kegiatan:

In its implementation, Risk Management process is divided into 2 (two) processes, namely Strategic and Tactical Process, with a strategic approach, namely top-down and bottom-up and comprehensive (*enterprise wide*) covering predetermined risk criteria.

1. Top-Down Process

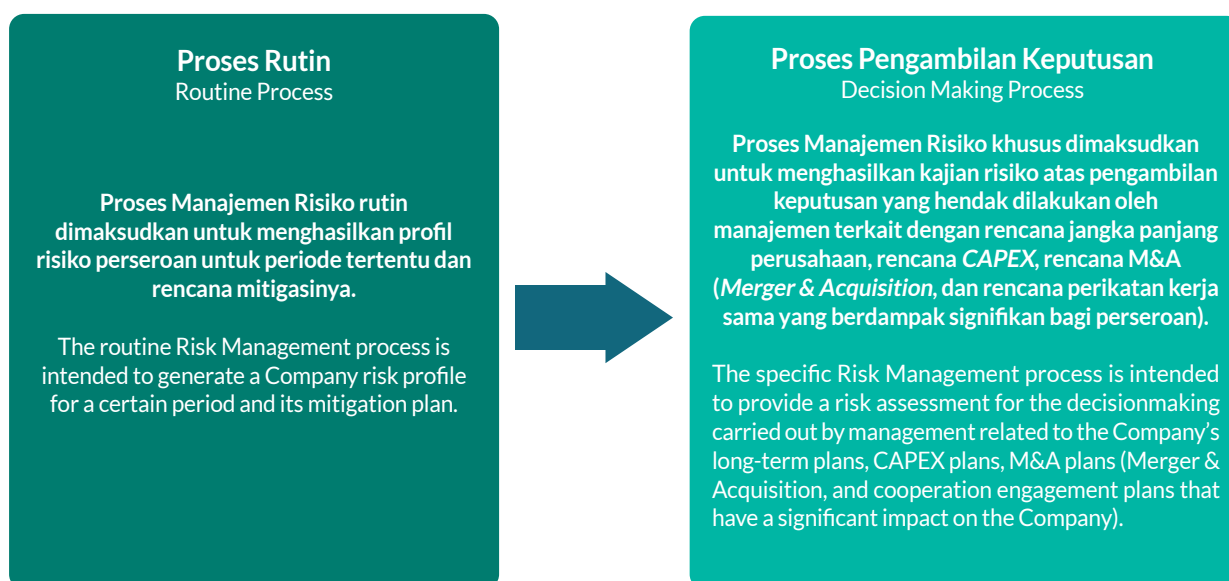
In each period of making the Company's strategic plan in the form of RJPP and RKAP, Board of Directors will provide direction to all units regarding the expected targets and target achievements accompanied by a description of potential risk exposures along with strategic plans for handling them that may occur. After the following year's RJP and RKAP, it is to be reported to shareholders and other stakeholders, which includes analysis and mitigation of corporate risks (*strategic*, operational, financial and compliance). The annual risk profile is prepared by the unit responsible for managing Company risk based on the results of analysis, studies and risk assessments at the corporate and work unit levels.

2. Bottom-Up Process

Every year and every three months, all work units, facilitated by the unit responsible for managing company risk, compile and report risk exposure and monitor the implementation of operational risk mitigation by referring to previous risk analysis and risk management progress.

3. Tactical Process

The Risk Management process is based on the ISO 31000:2018 Risk Management process, including two activities:



Matriks Risiko Signifikan IPCC 2024

Berlandaskan pada kerangka manajemen risiko berstandar ISO 31000:2018 yang diadopsi Perseroan, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan analisis dan menyusun profil risiko hingga posisi 31 Desember 2024.

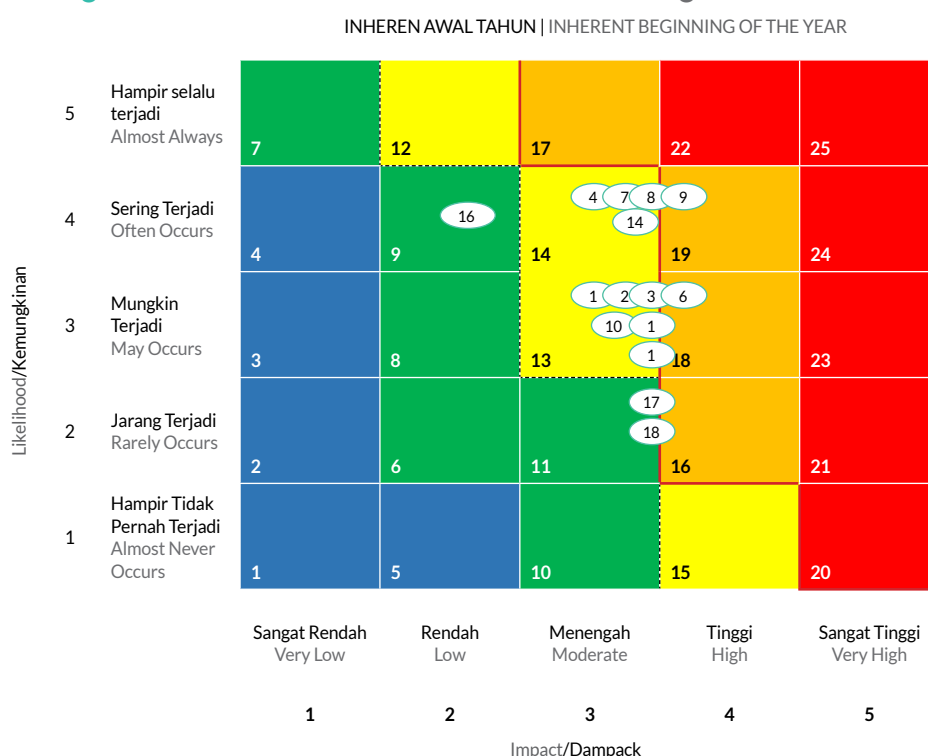
Berikut ini adalah perkembangan profil risiko-risiko utama Perseroan dalam kurun 1 (satu) tahun terakhir yang sudah melalui proses pemetaan risiko-risiko utama yang diperoleh/*top-down*, yaitu risiko yang diidentifikasi melalui penilaian tujuan organisasi secara korporat yang belum teridentifikasi melalui pendekatan *bottom-up*, adalah sebagai berikut:

Matriks Risiko Signifikan IPCC 2024

IPCC 2024 Significant Risks Matrix

Based on the ISO 31000:2018 standard risk management framework adopted by the Company, the Risk Management and Compliance Division carried out analysis and prepared a risk profile up to December 31, 2024.

The following is the development of the Company's main risk profile in the last 1 (one) year which has gone through a top-down mapping process of the main risks, namely risks identified through assessing corporate organizational objectives that have not been identified through the bottom-up approach, is as follows:



Tabel Matriks Risiko Signifikan IPCC 2024

IPCC 2024 Significant Risk Matrix Table

No	Peristiwa Risiko Risk Events	Risiko Inherent Inherent Risk	Risiko Residual Residual Risk	Target Akhir Tahun End of Year Target
1	Rendahnya budaya risiko di Perseroan Tidak adanya aturan yang mengatur secara detail penerapan budaya risiko perseroan Low risk culture in the Company Lack of regulations that govern in detail the Company's risk culture implementation	Moderat to High 18	Low 6	Low 5
2	Tidak tercapainya pemenuhan penguatan fundamental SDM dan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya Failure to fulfill the strengthening of fundamental human capital and the need for employees to match their competencies	Moderat to High 18	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
3	Target Pendapatan Tidak Tercapai Biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan terminal Income Target Not Achieved Operating costs greater than terminal income	Moderate to High 16	Low To Moderate 11	Low To Moderate 11



Tabel Matriks Risiko Signifikan IPCC 2024

IPCC 2024 Significant Risk Matrix Table

No	Peristiwa Risiko Risk Events	Risiko Inherent Inherent Risk	Risiko Residual Residual Risk	Target Akhir Tahun End of Year Target
4	Umur piutang melebihi <i>Average Collection Period</i> ACP Peningkatan umur piutang Accounts receivable aging exceeds the Average Collection Period (ACP) Improvement in accounts receivable aging	Moderate to High 19	Moderate 13	Moderate 13
5	Rendahnya validitas dan kredibilitas laporan keuangan Data tidak valid antara sistem internal dan <i>Sub Holding</i> Low validity and credibility of financial reports Invalid data between internal systems and sub-holding companies	Moderate 13	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
6	Kegagalan meraih market baru Failure to reach new markets	Moderate to High 18	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
7	Cyber Attack Sistem Informasi Information System Cyber Attack	Moderate to High 19	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
8	Keterbatasan lahan penumpukkan Limited storage space	Moderate to High 19	Low 11	Low 2
9	Defect barang/cargo milik pelanggan Defects in customer goods/cargo	Moderate to High 19	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
10	Kecelakaan Kerja Occupational Accidents	Moderate to High 18	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
11	Pencemaran lingkungan Tanah dan Air Soil and Water Pollution	Moderate 13	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
12	Pemakaian energi yang berlebih Excessive energy use	Moderate to High 18	Low 6	Low 2
13	Kealpaan dalam mematuhi peraturan perundangan - undangan yang berlaku (termasuk ijin usaha) Perubahan Peraturan yang belum ditaati oleh perseroan Failure to comply with applicable laws and regulations (including business permits) Regulatory changes that have not been complied with by the Company	Moderate to High 18	Low Moderate 6	Low Moderate 6
14	Penurunan harga saham perseroan Decrease in the Company's share price	Moderate to High 18	Low Moderate 6	Low to Moderate 6
15	Pencemaran lingkungan Udara Air pollution	Moderate to High 19	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
16	Penggunaan TOS yang tidak efektif dan tidak efisien Ineffective and inefficient use of TOS	Moderate 14	Low to Moderate 8	Low to Moderate 8
17	Data tidak valid antara kegiatan operasi dengan nota Invalid data between operating activities and billing	Moderate to High 16	Low to Moderate 6	Low to Moderate 6
18	Kegagalan mempertahankan pangsa pasar eksisting Failure to maintain existing market share	Moderate to High 16	Low to Moderate 6	Low to Moderate 6

Adapun profil risiko serta upaya penanganannya yang telah dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2024, sebagai berikut:

The risk profile and efforts to handle it that the Company has carried out throughout 2024 are as follows:

Profil Risiko 2024 dan Upaya Mitigasi

Risk Profile and Mitigation Efforts in 2024

1. Risiko Kepatuhan

1. Compliance Risk

Peristiwa Risiko Risk Events	Rendahnya budaya risiko di Perseroan Low risk culture in the Company
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pembuatan program budaya risiko: • Penyusunan/updating kerangka dan budaya risiko serta BCM Operasional • <i>Updating Key Risk Indicator</i> sesuai profil risiko terbaru • Implementasi kerangka dan budaya risiko, <i>drill/exercise</i> BCM Operasional dan KRI • Evaluasi kerangka dan budaya risiko serta pelaksanaan BCM melalui <i>survey</i> efektivitas budaya dan penilaian <i>Risk Maturity Index</i> Creation of a risk culture program: • Preparation/updating of the risk framework and culture as well as BCM Operational • Updating of Key Risk Indicators according to the latest risk profile • Implementation of the risk framework and culture, Operational BCM drills/exercises and KRIs • Evaluation of the risk framework and culture as well as BCM implementation through a culture effectiveness survey and Risk Maturity Index assessment



Progres Penanganan
Handling Progress

100%

2. Risiko Ketersediaan Tenaga Terampil

2. Risk of Availability of Skilled Personnel

Peristiwa Risiko
Risk Events

Tidak tercapainya pemenuhan penguatan fundamental SDM dan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya
Failure to fulfill the strengthening of fundamental human capital and the need for employees to match their competencies

Upaya Mitigasi
Mitigation Efforts

- Peningkatan Kompetensi teknis spesifik melalui Pelatihan dan Spesifikasi dari lembaga yang kredibel:
- Pembuatan perencanaan Sertifikasi tahun 2024 berdasarkan kebutuhan kompetensi
- Survey kebutuhan *training* eksisting
- Proses penyusunan program *refreshment operation* terkait skill teknis spesifik
- Proses pencarian vendor *training* sesuai kebutuhan
- Pelaksanaan pencarian vendor *training* sesuai kebutuhan
- Improvement of specific technical competencies through training and specifications from credible institutions:
- Planning for certification in 2024 based on competency needs
- Survey of existing training needs
- Process of preparing a refreshment operation program related to specific technical skills
- Process of searching for training vendors as needed
- Implementation of searching for training vendors as needed

Progres Penanganan
Handling Progress

35%

3. Risiko Cashflow

3. Cashflow Risk

Peristiwa Risiko
Risk Events

Target Pendapatan Tidak Tercapai
Income Target Not Achieved

Upaya Mitigasi
Mitigation Efforts

Akan dilakukan perhitungan biaya eksisting dan verifikasi biaya dengan pengelola eksisting perencanaan transformasi dan anggarannya terutama dalam hal Penataan fasilitas di Terminal Semayang Balikpapan tahap I
An existing cost calculation and cost verification will be carried out with existing manager of transformation planning and its budget, especially in terms of Facility Arrangement at Semayang Terminal Balikpapan phase I

Progres Penanganan
Handling Progress

100%

4. Risiko Cashflow

4. Cashflow Risk

Peristiwa Risiko
Risk Events

Umur piutang melebihi *Average Collection Period* ACP
Accounts receivable aging exceeds the *Average Collection Period* (ACP)

Upaya Mitigasi
Mitigation Efforts

- Optimalisasi penagihan piutang:
- Optimalisasi penagihan piutang
- Melakukan Kunjungan ke *Customer*
- Koordinasi dengan Operasional dan Komersial
- Negosiasi terkait usulan jadwal pembayaran dari *Customer*
- Optimization of receivables billing:
- Optimization of receivables billing
- Visiting Customers
- Coordination with Operations and Commercial
- Negotiations regarding the proposed payment schedule from Customers

Progres Penanganan
Handling Progress

90%

5. Risiko Integritas Proses Pelaporan Keuangan

5. Financial Reporting Process Integrity Risk

Peristiwa Risiko
Risk Events

Rendahnya validitas dan kredibilitas laporan keuangan
Low validity and credibility of financial reports

Upaya Mitigasi
Mitigation Efforts

- Implementasi Integrasi sistem ERP:
1. *Update Mapping* COA sesuai dengan update Audit 2022
 2. Identifikasi GAP proses bisnis dengan sistem yang akan digunakan
 3. Membuat Dokumen BRD sesuai dengan proses bisnis dan SOP yang berlaku
 4. Implementasi
- ERP *system integration implementation*:
1. Update on COA Mapping according to the 2022 Audit update
 2. Identify the GAP of business processes with the system to be used
 3. Create BRD Documents in accordance with applicable business processes and SOPs
 4. Implementation

Progres Penanganan
Handling Progress

75%



6. Risiko Pengembangan Bisnis Baru

6. New Business Development Risk

Peristiwa Risiko Risk Events	Kegagalan meraih market baru Failure to reach new markets
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	• Pengoperasian Terminal Kendaraan di Pelabuhan Lain yang Potensial di area Pelindo (<i>continue</i>. 2023): • Persiapan dan penyusunan proposal • Penjajakan dan persiapan kerja sama pengoperasian • Penyusunan <i>business plan/detailed proposal</i> dan <i>drafting</i> dokumen kerja sama • Penandatanganan Kerja Sama Pengoperasian • Pelaksanaan masa transisi di terminal kendaraan • Full operasi oleh IPCC • <i>Closing report</i> • Operation of Vehicle Terminals in Other Potential Ports in the Pelindo area (<i>cont.</i> 2023): • Preparation and drafting of proposals • Exploration and preparation of operational cooperation • Preparation of business plan/detailed proposal and drafting of cooperation documents • Signing of Operational Cooperation • Implementation of transition period at vehicle terminal • Full operation by IPCC • Closing report
Progres Penanganan Handling Progress	100%

7. Risiko Keamanan Jaringan

7. Network Security Risks

Peristiwa Risiko Risk Events	Cyber Attack Sistem Informasi Information System Cyber Attack
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pekerjaan Instalasi Perangkat <i>Security Network</i> di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk: 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. <i>Development</i> 4. <i>Closing</i> Installation of Security Network Devices at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk: 1. Planning 2. Procurement 3. Development 4. Closing
Progres Penanganan Handling Progress	100%

8. Risiko Infrastruktur dan Suprastruktur

8. Infrastructure and Superstructure Risk

Peristiwa Risiko Risk Events	Keterbatasan lahan penumpukan Limited storage space
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Percepatan Peningkatan kapasitas terminal kendaraan: 1. Desain 2. Pengadaan - Perkerasan Lahan Eks-PP tahap 3 (0,3 Ha) 3. Pengadaan - Pembangunan Gedung Parkir Car Terminal seluas 3,2 Ha 4. Konstruksi - Perkerasan Lahan Eks-PP tahap 3 (0,3 Ha) 5. Konstruksi - Pembangunan Gedung Parkir Car Terminal seluas 3,2 Ha Acceleration of vehicle terminal capacity improvement: 1. Design 2. Procurement - Paving of Former PP Land Phase 3 (0.3 Ha) 3. Procurement - Construction of a 3.2 Ha Car Terminal Parking Building 4. Construction - Paving of Former PP Land Phase 3 (0.3 Ha) 5. Construction - Construction of a 3.2 Ha Car Terminal Parking Building



Progres Penanganan
Handling Progress

80%

9. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3)

9. Occupational Health and Safety (OHS) Risk

Peristiwa Risiko Risk Events	1. Kecelakaan Kerja 2. Defect barang/cargo milik pelanggan
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	1. Occupational Accidents 2. Defects in customer goods/cargo
Progres Penanganan Handling Progress	1. Safety Operation Training 2. Lanjutan Tahun 2023 Pekerjaan Penahan Jaring Overspray PT Indonesia Kendaraan Terminal: 3. Perencanaan 4. Pengadaan 5. Kontruksi 6. Closing
Progres Penanganan Handling Progress	1. Safety Operation Training 2. Advanced form 2023 : PT Indonesia Vehicle Terminal Overspray Net Retention Work: 3. Planning 4. Procurement 5. Construction 6. Closing

10. Risiko Pencemaran Lingkungan

10. Environmental Pollution Risk

Peristiwa Risiko Risk Events	Pencemaran Lingkungan Tanah dan Air Soil and Water Pollution
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	1. IPCC Green Car Terminal : Recycle Botol Plastik 2. Perencanaan 3. Seleksi Vendor 4. Pengadaan 5. Pelaksanaan
Progres Penanganan Handling Progress	1. IPCC Green Car Terminal: Recycle Plastic Bottles 2. Planning 3. Vendor Selection 4. Procurement 5. Implementation

11. Risiko Budaya dan Kesejahteraan

11. Cultural and Welfare Risk

Peristiwa Risiko Risk Events	Pemakaian energi yang berlebih Excessive energy use
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	IPCC Green Car Terminal : Smart Green Building 1. Perencanaan 2. Seleksi Vendor 3. Pengadaan 4. Pelaksanaan 5. Monitoring/Evaluasi 6. Closing IPCC Green Car Terminal: Smart Green Building 1. Planning 2. Vendor Selection 3. Procurement 4. Implementation 5. Monitoring/Evaluation 6. Closing
Progres Penanganan Handling Progress	100%

12. Risiko Perubahan Hukum dan Regulasi

12. Risk of Changes in Laws and Regulations

Peristiwa Risiko Risk Events	Kealpaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk izin usaha) Negligence in complying with applicable laws and regulations (including business licenses)



Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pemutakhiran Perizinan dan Peraturan Perseroan: 1. Pembuatan peraturan Perseroan terbaru 2. Pengajuan Perubahan/Pembaruan Perizinan IMB, PMKU, OSS, TPS, Izin Lingkungan dll. 3. <i>Monitoring</i> terhadap Perubahan Peraturan perundangan secara berkala (3 bulan) 4. Penerapan ISO 370001:2016 5. Sosialisasi Peraturan Kepada Internal IPCC
	Updating Company Licenses and Regulations: 1. Creation of the latest Company regulations 2. Submission of Changes/Renewal of Building Permits, PMKU, OSS, TPS, Environmental Permits, etc. 3. Monitoring of changes in regulations periodically (every 3 months) 4. Implementation of ISO 370001:2016 5. Socialization of Regulations to Internal IPCC
Progres Penanganan Handling Progress	100%

13. Risiko Pergerakan Saham Umum

13. Risk of General Stock Movement

Peristiwa Risiko Risk Events	Penurunan harga saham Perseroan A decrease in the Company's share price
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Peningkatan <i>value</i> Perseroan melalui sosialisasi, <i>roadshow</i> dan edukasi saham IPCC ke <i>market</i> : • Pengenalan Bisnis Perseroan melalui <i>website</i> dan Media Sosial • Pelaksanaan <i>Emiten Visit</i>, <i>Pubex</i>, <i>Analyst Meeting</i>, <i>Investor Forum</i> • <i>Review kegiatan / Feedback</i> • Pembuatan rilis pencapaian kinerja Increasing Company value through socialization, roadshows and education on IPCC shares to the market: • Company Business Introduction through website and social media • Implementation of Issuer Visits, Pubex, Analyst Meetings, Investor Forums • Activity review/feedback • Preparation of performance achievement releases
Progres Penanganan Handling Progress	100%

14. Risiko Pencemaran Lingkungan

14. Risk of Environmental Pollution

Peristiwa Risiko Risk Events	Pencemaran lingkungan Udara Air pollution
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pelaporan dan reminder terkait kegiatan pengecatan di PT DKB Koordinasi dan <i>monitoring</i> bersama atas kegiatan <i>overspray</i> Reporting and reminders related to painting activities at PT DKB Joint coordination and monitoring of overspray activities
Progres Penanganan Handling Progress	100%

15. Risiko Infra, Sistem dan Data

15. Risk of Infrastructure, Systems and Data

Peristiwa Risiko Risk Events	Penggunaan TOS yang tidak efektif dan tidak efisien Ineffective and inefficient use of TOS
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Enhancement Sistem Operasional Terminal Internasional Tahap kedua <i>development</i> : • <i>Business Requirements Document</i> (BRD) • Desain arsitektur TOS Terminal Internasional • <i>Development, Testing, Training & Sosialisasi, Trial, Implementasi</i> Enhancement of International Terminal Operational System on second phase of development: • Business Requirements Document (BRD) • International Terminal TOS architectural design • Development, Testing, Training & Socialization, Trial, Implementation
Progres Penanganan Handling Progress	100%

16. Risiko Integritas Proses Pelaporan Keuangan

16. Financial Reporting Process Integrity Risk

Peristiwa Risiko Risk Events	Data tidak valid antara kegiatan operasi dengan nota Invalid data between operating activities and billing

Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	- Pengembangan <i>Billing Platform</i> di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk <i>Monitoring</i> pengembangan dan implementasi sistem billing - Perbaikan terhadap sistem yang belum sesuai dengan kebutuhan <i>user</i>
Progres Penanganan Handling Progress	100%

17. Risiko Sales dan Marketing

17. Sales and Marketing Risks

Peristiwa Risiko Risk Events	Kegagalan mempertahankan pangsa pasar eksisting Failure to maintain existing market share
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Peningkatan Pangsa Pasar: - Melakukan investigasi target <i>customer</i> - Melakukan komunikasi aktif dengan customer untuk mendapatkan informasi dan melakukan peninjauan (<i>marketing</i>) - Penyampaian proposal kepada calon <i>customer</i> - Negosiasi - Perjanjian Kerja Sama Increasing Market Share: - Conducting target customer investigations - Actively communicating with customers to obtain information and conduct market research (<i>marketing</i>) - Submitting proposals to potential customers - Negotiations - Cooperation Agreements
Progres Penanganan Handling Progress	100%

Tinjauan atas Efektivitas Manajemen Risiko Tahun 2024

Berdasarkan hasil survei terhadap efektivitas manajemen risiko, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan manajemen risiko di lingkungan IPCC telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Setiap divisi telah mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dengan baik, ditandai dengan pemahaman yang kuat terhadap tata kelola, perencanaan, serta proses manajemen risiko yang mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Penjelasan detail mengenai hasil tersebut disajikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan manajemen risiko di lingkungan IPCC sudah terimplementasikan dengan baik pada setiap divisi, sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

1. Tata Kelola dan Budaya Manajemen Risiko memperoleh nilai 87% dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memahami tata kelola risiko dengan cukup baik serta budaya risiko yang sudah mulai terbentuk di lingkungan IPCC.
2. Perencanaan Risiko mendapatkan nilai 81% dari target, yang mengindikasikan bahwa proses perencanaan dalam manajemen risiko pada setiap divisi telah dilakukan dengan baik.
3. Proses Manajemen Risiko yang Mempengaruhi Pencapaian Tujuan memperoleh nilai 76%, yang menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya dalam mengintegrasikan manajemen risiko secara lebih efektif.

Review of Risk Management Effectiveness in 2024

Based on the survey results on the effectiveness of risk management, it can be concluded that in general the implementation of risk management in IPCC environment has shown significant progress. Each division has implemented risk management principles well, characterized by a strong understanding of governance, planning, and risk management processes that support the achievement of Company goals. A detailed explanation of these results is presented as follows.

Based on the survey results, it can be concluded that in general the implementation of risk management in IPCC environment has been well implemented in each division, as explained below.

1. Governance and Risk Management Culture obtained a score of 87% of the set target, indicating that most respondents already understand risk governance quite well and that a risk culture has begun to form within IPCC environment.
2. Risk Planning scored 81% of the target, which indicates that the planning process in risk management in each division has been carried out well.
3. Risk Management Processes that Influence Achievement of Objectives scored 76%, which indicates that efforts have been made to integrate risk management more effectively.



Secara keseluruhan, hasil survei efektivitas manajemen risiko menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan cukup baik dengan penilaian rating mendapatkan rata-rata 4.5 dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja tim manajemen risiko dan aspek yang ditanyakan. Beberapa responden menunjukkan kepuasan yang tinggi, sementara beberapa lainnya menunjukkan saran untuk perbaikan. Secara keseluruhan, hasil survei ini memberikan gambaran yang jelas untuk membantu meningkatkan kinerja tim manajemen risiko.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Manajemen telah menunjukkan komitmennya dalam implementasi sistem manajemen risiko dalam bentuk Penetapan: Pernyataan Komitmen bersama antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi tentang Implementasi Manajemen Risiko yang ditandatangani Desember 2023 untuk periode selama 1 (satu) tahun;

1. Pernyataan Komitmen bersama antara Direksi dengan Senior Manager tentang Penerapan budaya sadar risiko Direksi yang ditandatangani Januari 2024 untuk periode selama 1 (satu) tahun;
2. Pedoman manajemen risiko sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 yang berisi antara lain Model Tata Kelola Risiko, Klasifikasi Perseroan berdasarkan Intensitas Risiko, Ketentuan Organ Pengelola Risiko, Taksonomi Risiko, Prinsip, Kerangka, dan Proses Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 serta *Roadmap* Implementasi Manajemen Risiko yang ditandatangani bulan November 2023;
3. Prosedur dan instruksi kerja Manajemen Risiko dengan pembaruan proses yang ditandatangani bulan November 2023;
4. Pelaporan Implementasi Manajemen Risiko dalam bentuk pelaporan Profil Risiko baik Operasional maupun Investasi dan disertai data – data kuantitatif secara konsisten setiap Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
5. Terdapat program – program manajemen risiko dalam bentuk Rencana Kerja Manajemen (RKM) dan Budaya Risiko;
6. Penetapan struktural organisasi yang menangani manajemen risiko yaitu Subdivisi Manajemen Risiko yang tercantum pada SK Direksi nomor HK.01/2/1/1/SDMU/DIRUT/IKT-24 tanggal 2 Januari 2024 perihal Struktur Organisasi;
7. Pembentukan *Risk Agent* yang secara konsisten diperbarui dengan anggota dari perwakilan setiap Divisi untuk mendukung implementasi manajemen risiko, sebagaimana tertuang dalam SK Direksi nomor : HK.01/24/4/1/AMR/DIRUT/IKT-24 tanggal 24 April 2024 perihal Pembentukan Agen Manajemen Risiko untuk Implementasi Manajemen Risiko;

Overall, the risk management effectiveness survey results show that the implementation of risk management has gone quite well with a rating of 4.5 out of 5 on average, so it can be concluded that respondents gave a positive assessment of the risk management team's performance and the aspects asked about. Some respondents showed high satisfaction, while others offered suggestions for improvement. Overall, the results of this survey provide a clear picture to help improve the performance of risk management teams.

Statement of Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee regarding the Adequacy of Risk Management System

Management has demonstrated its commitment to implementing the risk management system in the form of Determining: Statement of Joint Commitment between Board of Commissioners and Board of Directors regarding Risk Management Implementation signed in December 2023 for a period of 1 (one) year;

1. Joint Statement of Commitment between Board of Directors and Senior Managers regarding Implementation of the Board of Directors' risk awareness culture, signed in January 2024 for a period of 1 (one) year;
2. Risk management guidelines have been adapted to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 which contains, among other things, Risk Governance Model, Company Classification based on Risk Intensity, Provisions for Risk Management Organs, Risk Taxonomy, Principles, Framework and Management Process Risk in accordance with ISO 31000:2018 and the Risk Management Implementation Roadmap signed in November 2023;
3. Risk Management procedures and work instructions with process updates signed in November 2023;
4. Risk Management Implementation Reporting in the form of Risk Profile reporting both Operational and Investment and accompanied by quantitative data consistently every quarter to Board of Commissioners and Shareholders;
5. There are risk management programs in the form of Management Work Plans (RKM) and Risk Culture;
6. The organizational structure that handles risk management is the Risk Management Subdivision as stated in the Board of Directors Decree number HK.01/2/1/1/SDMU/DIRUT/IKT-24 dated January 2, 2024, regarding Organizational Structure;
7. The establishment of a Risk Agent that is consistently updated with members from representatives of each Division to support the implementation of risk management, as stated in the Board of Directors Decree number: HK.01/24/4/1/AMR/DIRUT/IKT-24 dated April 24, 2024 regarding the Establishment of a Risk Management Agent for Risk Management Implementation;



8. Pelatihan dan sertifikasi di bidang manajemen risiko untuk personel yang menjabat sebagai dari mulai Direktur Pengelola Risiko, Senior Manager, Asisten Senior Manager dan *Risk Agent*;
9. Digitalisasi dalam implementasi manajemen risiko melalui aplikasi Pelindo *Risk Management* (PRiMa).

Bahwa bukti dokumentasi di atas telah mencukupi, dan selanjutnya akan disosialisasikan, diimplementasikan, dipantau, dan ditinjau secara berkesinambungan.

RENCANA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Perseroan telah merancang program strategis untuk tahun 2025 sebagai langkah proaktif dalam peningkatan pengelolaan manajemen risiko. Rencana program ini mencakup beberapa inisiatif program yang ditujukan untuk memperkuat sistem manajemen risiko di Perseroan. Berikut adalah rincian rencana program pengelolaan sistem manajemen risiko yang akan diimplementasikan pada tahun 2025:

1. Tahap Perencanaan Program Manajemen Risiko Tahun 2025
 - a. Penyusunan Strategi dan Profil Risiko
 - b. Perumusan Rencana Mitigasi Risiko
 - c. Penyusunan Program Pelatihan dan Budaya Risiko
 - d. Pembentukan Tim *Business Continuity Management System* (BCMS)
2. Tahap Implementasi Program Risiko Tahun 2025
 - a. Optimalisasi Upaya Mitigasi Risiko
 - b. Penyusunan Kajian Risiko Non-Operasional Perseroan
 - c. Optimalisasi dan Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi Perseroan terkait Risiko
 - d. Internalisasi budaya risiko (*Raising*, 1-RO dan *Risk Award*)
 - e. Implementasi *Business Continuity Management System* (BCMS)
3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Program Risiko Tahun 2025
 - a. Pemantauan efektivitas pengelolaan risiko atas strategi dan profil risiko bersama *Subholding* dan Dewan Komisaris
 - b. Penilaian efektivitas implementasi program risiko melalui *Survey* Manajemen Risiko

PENILAIAN RISIKO TERKAIT TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan berupaya keras menerapkan tata kelola teknologi informasi yang kuat untuk memastikan kelangsungan bisnis, perlindungan data, serta mitigasi risiko terhadap gangguan operasional. Dalam menghadapi tantangan di era digital, Perseroan mengadopsi pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko utama terkait IT, termasuk *disruption* (gangguan operasional), *cyber security* (keamanan dunia maya), dan *disaster recovery* (pemulihan bencana).

8. Training and certification in the field of risk management for personnel serving as Risk Management Director, Senior Manager, Assistant Senior Manager, and Risk Agent;
9. Digitalization in risk management implementation through the Pelindo Risk Management (PRiMa) application.

The above documentation evidence is sufficient, and continues to be disseminated, implemented, monitored and reviewed on an ongoing basis.

RISK MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT PROGRAM PLAN FOR 2025

The Company has designed a strategic program for 2025 as a proactive step in improving risk management. The program plan includes several initiatives aimed at strengthening the Company's risk management system. The following is a breakdown of risk management system management program plans to be implemented by 2025:

1. Risk Management Program Planning for 2025
 - a. Preparation of Risk Strategy and Profile
 - b. Formulation of Risk Mitigation Plan
 - c. Preparation of Risk Training and Culture Program
 - d. Establishment of Business Continuity Management System (BCMS) Team
2. Risk Program Implementation for 2025
 - a. Optimization of Risk Mitigation Efforts
 - b. Preparation of the Company's Non-Operational Risk Assessment
 - c. Optimization and Improvement of the Company's Understanding and Competence related to Risk
 - d. Internalization of risk culture (*Raising*, 1-RO and *Risk Award*)
 - e. Implementation of Business Continuity Management System (BCMS)
3. Monitoring and Evaluation Phase of Effectiveness for 2025 Risk Program
 - a. Monitoring the effectiveness of risk management on strategies and risk profiles with the Subholding and Board of Commissioners
 - b. Assessment of the effectiveness of risk program implementation through the Risk Management Survey

INFORMATION TECHNOLOGY RISK ASSESSMENT

The Company strives to implement strong information technology governance to ensure business continuity, data protection and risk mitigation against operational disruptions. In facing the challenges of a digital era, the Company adopts a comprehensive approach in managing key IT-related risks, including disruption, cyber security, and disaster recovery.



Pengelolaan Risiko *Disruption*

Perseroan memiliki sistem manajemen risiko IT yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi gangguan terhadap operasional teknologi informasi. Beberapa langkah utama dalam mitigasi risiko *disruption* meliputi:

1. *Monitoring Proaktif*: Penggunaan sistem pemantauan 24/7 untuk mendeteksi anomali atau potensi gangguan sebelum berdampak luas.
2. *Redundansi Infrastruktur*: Implementasi infrastruktur IT yang berlapis dengan mekanisme failover untuk memastikan keberlanjutan layanan.
3. *Pengujian dan Simulasi Rutin*: Pelaksanaan uji coba pemulihan sistem secara berkala untuk menilai kesiapan menghadapi potensi gangguan.

Strategi *Cyber Security*

Keamanan dunia maya menjadi prioritas utama dalam memastikan perlindungan data dan sistem informasi Perseroan. Perseroan menerapkan langkah-langkah berikut:

1. *Kebijakan dan Standar Keamanan*: Penerapan kebijakan keamanan siber yang mengacu pada standar internasional seperti ISO 27001 dan NIST *Cybersecurity Framework*.
2. *Proteksi Multi-layered*: Penggunaan *firewall*, enkripsi data, serta sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDS/IPS) untuk menghalau ancaman siber.
3. *Kesadaran dan Pelatihan Pegawai*: Program edukasi berkala untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap serangan siber, seperti *phishing* dan *malware*.
4. *Audit dan Penilaian Keamanan*: Evaluasi rutin terhadap sistem IT melalui *penetration testing* dan *security assessment* untuk mengidentifikasi serta memperbaiki celah keamanan.

Disaster Recovery dan Business Continuity Plan (BCP)

Untuk memastikan kelangsungan bisnis dalam kondisi darurat, Perseroan memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) yang meliputi:

- *Pusat Data Cadangan (Backup Data Center)*: Penyimpanan data pada lokasi alternatif yang dapat diakses dalam situasi darurat.
- *Rencana Pemulihan Darurat*: Protokol pemulihan yang jelas dengan skenario untuk berbagai jenis gangguan, termasuk bencana alam, kegagalan sistem, dan serangan siber.
- *Tim Tanggap Darurat IT*: Pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab dalam menangani insiden IT secara cepat dan efektif.
- *Uji Coba dan Simulasi Berkala*: Pelaksanaan simulasi pemulihan untuk memastikan kesiapan sistem dan tim dalam menghadapi skenario bencana.

Pelaporan dan Pengawasan kepada Direksi

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko IT, Perseroan menerapkan mekanisme pelaporan berkala kepada Direksi, yang mencakup:

- *Laporan Risiko IT*: Pembaruan rutin terkait ancaman terbaru, insiden keamanan, dan langkah mitigasi yang telah dilakukan.

Disruption Risk Management

The Company has a structured IT risk management system to identify, assess, and manage potential disruptions to information technology operations. Some of the main steps in disruption risk mitigation include:

1. *Proactive Monitoring*: Use of a 24/7 monitoring system to detect anomalies or potential disruptions before they have a widespread impact.
2. *Infrastructure Redundancy*: Implementation of a layered IT infrastructure with failover mechanisms to ensure service continuity.
3. *Routine Testing and Simulation*: Periodic system recovery trials to assess readiness for potential disruptions.

Cyber Security Strategy

Cyber security is a top priority in ensuring the protection of Company data and information systems. The Company implements the following measures:

1. *Security Policies and Standards*: Implementation of cyber security policies that refer to international standards such as ISO 27001 and NIST *Cybersecurity Framework*.
2. *Multi-layered Protection*: Use of firewalls, data encryption, and intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS) to ward off cyber threats.
3. *Employee Awareness and Training*: Regular educational programs to increase employee awareness of cyber attacks, such as phishing and malware.
4. *Security Audit and Assessment*: Routine evaluation of IT systems through penetration testing and security assessment to identify and fix security gaps.

Disaster Recovery and Business Continuity Plan (BCP)

To ensure business continuity in an emergency, the Company has a Disaster Recovery Plan (DRP) and Business Continuity Plan (BCP) which includes:

- *Backup Data Center*: Data storage at an alternative location that can be accessed in an emergency.
- *Emergency Recovery Plan*: A clear recovery protocol with scenarios for various types of disruptions, including natural disasters, system failures, and cyberattacks.
- *IT Emergency Response Team*: Establishment of a special team responsible for handling IT incidents quickly and effectively.
- *Periodic Trials and Simulations*: Implementation of recovery simulations to ensure the readiness of systems and teams in the event of a disaster scenario.

Reporting and Supervision to Board of Directors

To ensure transparency and accountability in IT risk management, the Company implements a periodic reporting mechanism to Board of Directors, which includes:

- *IT Risk Report*: Regular updates on the latest threats, security incidents, and mitigation measures taken.

- Evaluasi Kinerja Sistem: Peninjauan berkala terhadap efektivitas sistem IT, termasuk *uptime*, tingkat keberhasilan pemulihan, serta efektivitas kontrol keamanan.
- Rekomendasi Strategis: Penyampaian usulan perbaikan atau peningkatan sistem berdasarkan evaluasi risiko dan tren teknologi terbaru.

Dengan penerapan tata kelola IT yang kuat dan terstruktur, Perseroan berupaya memastikan bahwa seluruh risiko utama dalam bidang IT dapat diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan secara efektif. Hal ini mendukung kelangsungan bisnis Perseroan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam era digital yang terus berkembang.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Dalam rangka mempertahankan fungsi bisnis dari ancaman *force majeure*/gangguan eksternal yang dapat mengganggu jalannya operasional Perseroan, serta upaya merespons dan menangani gangguan/bencana yang terjadi, maka Perseroan menetapkan Pedoman *Business Continuity Management System* (BCMS). Pedoman ini memuat tentang konteks organisasi, Peran, Tanggung Jawab serta Wewenang Tim BCMS, Metodologi BCMS, Pemenuhan pada aspek SOM, Informasi terdokumentasi, Skema Operasional BCMS, Uji Coba Dokumen BCMS, serta Evaluasi Kerja dan Audit.

Pedoman ini diberlakukan melalui Peraturan Direksi Nomor: PW.05.02/10/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tanggal 10 Desember 2024, dengan tujuan:

1. Menjamin kelangsungan fungsi bisnis saat kondisi gangguan atau bencana, terutama fungsi bisnis atau operasional yang kritis agar layanan Perseroan tetap berjalan;
2. Memastikan ketersediaan prosedur kerja bagi Unit Kerja sebelum, saat, dan setelah gangguan atau bencana, sehingga dapat meminimalisasi dampak dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi Perseroan dan *stakeholder*;
3. Membangun budaya, pemahaman, dan kesadaran BCMS (*BCMS awareness*) melalui sosialisasi secara berkesinambungan dan simulasi penanganan gangguan atau bencana.

Ruang Lingkup

Implementasi BCMS Perseroan meliputi seluruh layanan/produk maupun fungsi bisnis Perseroan yang termasuk kritis, aset kritis, seluruh penghuni (termasuk karyawan) yang berada di lokasi kerja Perseroan, aktivitas dan layanan Teknologi Informasi yang kritis diprioritaskan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perseroan.. Beberapa aktivitas dan layanan teknologi informasi non-kritis dapat dimasukkan sebagai pelengkap/tambahan.

- System Performance Evaluation: Periodic review of IT system effectiveness, including uptime, recovery success rate, and security control effectiveness.
- Strategic Recommendations: Submission of proposals for system improvements or enhancements based on risk evaluation and the latest technological trends.

With the implementation of strong and structured IT governance, the Company seeks to ensure that all major risks in the IT field can be effectively identified, managed, and reported. This supports the Company's business continuity and increases stakeholder confidence in the ever-evolving digital era.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

In order to maintain business functions from the threat of force majeure/external disruption that could disrupt the Company's operations, as well as efforts to respond to and handle disruptions/disasters that occur, the Company has established Business Continuity Management System (BCMS) Guidelines. This guideline contains organizational context, roles, responsibilities and authorities of BCMS team, BCMS methodology, compliance with SOM aspects, documented information, BCMS operational scheme, BCMS document testing, as well as work evaluation and audit.

This guideline is enforced through the Board of Directors Regulation Number: PW.05.02/10/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 dated December 10, 2024, with the following objectives:

1. Ensure the continuity of business functions during disruption or disaster conditions, especially critical business or operational functions so that the Company's services continue to run;
2. Ensure the availability of work procedures for Work Units before, during and after disruptions or disasters, so as to minimize the impact and avoid greater losses for the Company and stakeholders;
3. Building culture, understanding and awareness of BCMS (*BCMS awareness*) through continuous socialization and simulations of handling disturbances or disasters.

Scope

Implementation of the Company's BCMS covers all Company services/products and business functions including critical, critical assets, all occupants (including employees) located at the Company's work location, prioritized critical Information Technology activities and services owned and/or managed by the Company. Some non-critical information technology activities and services may be included as complementary/additional.



Ruang lingkup Kebijakan ini adalah:

1. Kebijakan *Business Continuity Management System* (BCMS) berlaku untuk seluruh Unit Kerja Perseroan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kebijakan BCMS mengatur perlindungan dan keselamatan aset Perseroan (Karyawan, dokumen, dan lainnya) pada saat terjadi gangguan atau bencana sebagaimana dijelaskan secara lebih detail pada Prosedur Keadaan Darurat (ER Plan).
3. Kebijakan BCMS merupakan referensi Perseroan dalam membangun ketahanan (*resiliency*) terhadap ancaman yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

Batasan

1. Implementasi BCMS merespons beberapa skenario gangguan/bencana yang paling berpotensi terjadi pada perseroan.
2. *Back-up* layanan Teknologi Informasi fokus pada layanan teknologi informasi yang termasuk kritikal berdasarkan proses *Business Impact Analysis* (BIA).

Penerapan BCMS di Perseroan menggunakan siklus *Plan-Do-Check-Act* (POCA) untuk merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, menjalankan, memantau, meninjau dan memelihara serta melakukan pengembangan berkelanjutan atas keefektifan implementasi BCMS. Penjelasan Siklus POCA adalah sebagai berikut:

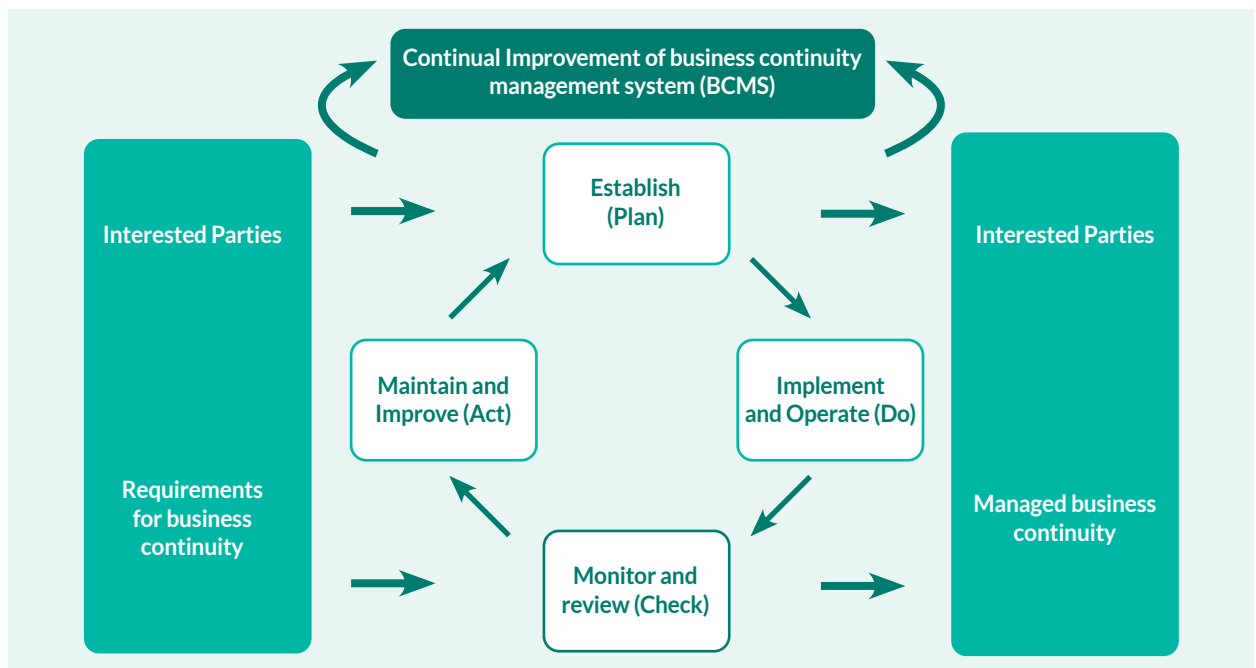
The scope of this Policy is:

1. The Business Continuity Management System (BCMS) policy applies to all Company Work Units throughout Indonesia.
2. The BCMS policy regulates the protection and safety of Company assets (Employees, documents, etc.) in the event of a disruption or disaster as explained in more detail in the Emergency Procedure (ER Plan).
3. The BCMS policy is a reference for the Company in building resilience against threats that could disrupt the Company's operations.

Limitation

1. BCMS implementation responds to several disruption/disaster scenarios that have the most potential to occur in the Company.
2. Back-up Information Technology services focus on information technology services which are considered critical based on the Business Impact Analysis (BIA) process.

The implementation of BCMS in the Company uses the Plan-Do-Check-Act (POCA) cycle to plan, determine, implement, run, monitor, review and maintain as well as carry out continuous development of the effectiveness of BCMS implementation. The explanation of POCA Cycle is as follows:



Plan (Menetapkan):

Menetapkan kebijakan BCMS, tujuan, kontrol, proses dan prosedur yang relevan untuk mengembangkan BCMS dalam rangka memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan tujuan Perseroan secara keseluruhan.

Do (Mengimplementasikan dan mengoperasikan):

Mengimplementasikan dan mengoperasikan kebijakan BCMS, kontrol, proses dan prosedurnya.

Plan (Determine):

Establish BCMS policies, objectives, controls, processes and procedures that are relevant to developing BCMS in order to provide results in accordance with overall Company policies and objectives.

Do (Implement and operate):

Implement and operate BCMS policies, controls, processes and procedures.

Check (Memantau dan meninjau):

Memantau dan meninjau kinerja kebijakan dan tujuan BCMS, melaporkan hasilnya kepada *Top Management* untuk ditinjau, dan menentukan serta mengotorisasi tindakan perbaikan dan pengembangan.

Act (Memelihara dan mengembangkan):

Memelihara dan mengembangkan BCMS dengan mengambil tindakan korektif, berdasarkan hasil tinjauan manajemen dan menilai ulang ruang lingkup BCMS serta kebijakan dan tujuannya.

Dalam pelaksanaannya, implementasi BCMS merupakan tanggung jawab dari seluruh Insan Perseroan, khususnya yang menangani keberlangsungan fungsi operasional dan bisnis Perseroan, tidak terbatas pada bidang Teknologi Informasi, Manajemen Aset & Logistik, Sekretaris Perseroan, SOM, dan Operasional. Setiap insan wajib mematuhi ketentuan internal terkait dengan BCMS sebelum, saat, dan setelah gangguan maupun bencana selesai.

Sebagai *second line of defense*, Sub Divisi Manajemen Risiko menyusun dan mengembangkan Kebijakan/Pedoman BCMS Perseroan, namun setiap Unit Kerja (*risk owner*) wajib mengimplementasikan BCMS dan menyusun informasi dan dokumentasi BCMS yang menjadi bidang tanggung jawabnya.

Saat terjadi bencana atau gangguan, tugas dan tanggung jawab Sub Divisi Manajemen Risiko adalah melakukan pengawasan dan pelaporan atas bencana maupun gangguan yang terjadi.

Tim Business Continuity Management System (BCMS)

Untuk mendukung penerapan BCMS secara komprehensif dan efektif, Direksi membentuk Tim BCMS melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: PW.05.02/10/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pembentukan *Tim Business Continuity Management System (BCMS)*.

Check (Monitoring and reviewing):

Monitor and review the performance of BCMS policies and objectives, report results to Top Management for review, and determine and authorize corrective and developmental actions.

Act (Maintain and develop):

Maintain and develop the BCMS by taking corrective action, based on the results of management reviews and reassessing the scope of the BCMS as well as its policies and objectives.

In its implementation, implementation of BCMS is the responsibility of all Company Personnel, especially those who handle the continuity of the Company's operational and business functions, not limited to the fields of Information Technology, Asset Management & Logistics, Corporate Secretary, SOM, and Operations. Every person is obliged to comply with internal provisions related to BCMS before, during and after the disruption or disaster is over.

As a second line of defense, Risk Management Sub Division prepares and develops the Company's BCMS Policy/Guidelines, however each Work Unit (*risk owner*) is required to implement BCMS and compile BCMS information and documentation which is their area of responsibility.

When a disaster or disturbance occurs, duties and responsibilities of Risk Management Sub Division are to supervise and report on the disaster or disturbance that occurs.

Business Continuity Management System (BCMS) Team

To support the implementation of BCSM comprehensively and effectively, Board of Directors formed a BCSM Team through the Board of Directors Decree of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: PW.05.02/10/12/1/MNRS/DIRUT/IKT-24 dated December 10, 2024, concerning Formation of Business Continuity Management System (BCMS) Team.

Struktur Keanggotaan BCMS BCMS Members Structure

No	Jabatan dalam TIM BCMS Position in the BCMS TEAM	Divisi/Unit Kerja Division/Work Unit
1	Pengarah Pusat Penanganan Gangguan Director of Disaster Management Center	Direktur Utama President Director
2	Ketua Pusat Penanganan Gangguan (<i>Executive BCM</i>) Head of Disaster Management Center (<i>Executive BCM</i>)	Direktur Keuangan, SDM dan MR Director of HC & General Affairs
3	<i>Caretaker</i>	Direktur Operasi & Teknik Director of Operations & Technical
4	Ketua Tim Pendukung Pusat Penanganan Gangguan Head of Disaster Management Center Support Team	SM Manajemen Risiko & Sistem Manajemen SM of Internal Audit & Risk Management
5	Ketua Tim Tanggap Darurat Head of Emergency Response Team	SM Manajemen Risiko & Sistem Manajemen SM of Internal Audit & Risk Management
6	Ketua Tim Kelangsungan Usaha (Koordinator BCM Divisi) Head of Business Continuity Team (BCM Division Coordinator)	Seluruh Kepala Divisi Unit kerja masing – masing All Division Heads of their respective work units



Struktur Keanggotaan BCMS

BCMS Members Structure

No	Jabatan dalam TIM BCMS Position in the BCMS TEAM	Divisi/Unit Kerja Division/Work Unit
7	Ketua Alternatif (Koordinator Sub Divisi) Alternative Head (Subdivision Coordinator)	ASM Manajemen Risiko ASM Hubungan Investor ASM Sistem Manajemen & QHSE ASM Pemasaran & Pengelolaan Pelanggan ASM Perencanaan Strategis ASM Layanan SDM & Umum ASM Anggaran ASM Operasi & Administrasi Terminal Satelit ASM Sistem Informasi ASM Pengawasan Monitoring & Pelaporan DBM Operasi Domestik & CDM DBM Administrasi & Penunjang ASM Risk Management ASM Investor Relations ASM Management Systems & QHSE ASM Marketing & Customer Management ASM Strategic Planning ASM HC & General Services ASM Budget ASM Operations & Administration Satellite Terminal ASM Information Systems ASM Supervision Monitoring & Reporting DBM Domestic Operations & CDM DBM Administration & Support
8	Ketua Tim Pemulihan Teknologi Head of Technology Recovery Team	SM Teknik & Sistem Informasi SM Technical & Information Systems
9	Ketua Tim Pemulihan Fasilitas Head of Facilities Recovery Team	SM SDM & Umum SM HC & General Affair
10	Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Head of Cyber Attack Response Team	SM Manajemen Risiko & Sistem Manajemen SM Risk Management & Management Systems

Metodologi Pengembangan Kerangka Kerja BCMS

BCMS Framework Development Methodology



Metodologi pengembangan kerangka kerja *Business Continuity Management System* (BCMS) terdiri dari:

1. Proses *Business Impact Analysis* (BIA);
2. Proses *Risk assessment* (RA);
3. Proses *Threat Assessment*;
4. Penentuan *Business Continuity Strategy* (BC Strategy);
5. Penyusunan dokumen BCMS;
6. Uji coba (*testing*) dan pelatihan (*exercising*) untuk seluruh Karyawan; dan
7. *Maintenance* dan pengembangan BCMS secara berkelanjutan (*continous improvement*).

Business Continuity Plan (BC Plan)

1. Setiap Unit Kerja wajib menyusun dokumen BC Plan.
2. Dokumen BC Plan harus mencantumkan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan fungsi bisnis kritikal selama dan setelah terjadi gangguan atau bencana.

The Business Continuity Management System (BCMS) framework development methodology consists of:

1. Business Impact Analysis (BIA) process;
2. Risk assessment (RA) process;
3. Threat Assessment Process,
4. Determining Business Continuity Strategy (BC Strategy);
5. Preparation of BCMS documents;
6. Testing and training for all employees; and;
7. Continuous maintenance and development of BCMS (*continuous improvement*).

Business Continuity Plan (BC Plan)

1. Each Work Unit is required to prepare a BC Plan document.
2. The BC Plan document must include actions that must be taken to maintain the continuity of critical business functions during and after a disruption or disaster.

3. Dokumen BC *Plan* digunakan atau diaktivasi setelah diputuskan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat kekritisitas yang terjadi (dijelaskan lebih lanjut pada Tingkat Kekritisitas dalam kebijakan BCMS, Bab 7 bagian A).
4. Tujuan dan sasaran dari penyusunan dokumen BC *Plan* antara lain:
 - a. Menjaga operasional dan bisnis Perseroan, khususnya yang termasuk dalam aktivitas kritisitas dapat tetap berjalan, atau diprioritaskan untuk dipulihkan sesaat setelah gangguan/bencana terjadi;
 - b. Mengamankan aset dan informasi penting Perseroan,
 - c. Meminimalisasi risiko akibat gangguan atau bencana dengan membatasi kerugian finansial, risiko hukum dan reputasi;
 - d. Meyakini ketersediaan layanan dan produk yang berkesinambungan; dan
 - e. Mempersiapkan alternatif lain agar fungsi bisnis kritisitas tetap dapat berjalan untuk menjaga kelangsungan operasi Perseroan. Dokumen BC *Plan* dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari tahapan sebelumnya *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk assessment* (RA), dan *Business Continuity Strategy* (BC *Strategy*).
5. Pengembangan dan penyusunan dokumen BC *Plan* harus mempertimbangkan aspek pengamanan terhadap aset Perseroan (sumber daya Teknologi Informasi, sumber daya manusia, gedung, dan lain-lain).
6. Pengembangan dan penyusunan dokumen BC *Plan* disesuaikan dengan ketentuan internal dan eksternal Perseroan.
7. Dokumen BC *Plan* juga mencakup: struktur hierarki pelaporan terkait gangguan atau bencana dan prosedur eskalasi.

Disaster Recovery Plan (DR *Plan*)

1. Dokumen DR *Plan* dikembangkan dan disusun oleh Divisi Teknik & Sistem Informasi pada dokumen terpisah dari kebijakan ini.
2. Dokumen DR *Plan* harus tersedia untuk setiap layanan Teknologi Informasi yang dinilai kritisitas dalam mendukung bisnis dan operasional kritisitas di setiap Unit Kerja berdasarkan hasil *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk assessment*, dan BC *Strategy*.

Pengembangan BCMS Berkelanjutan

1. Perseroan berkomitmen mengembangkan kesesuaian, efektivitas, dan kecukupan BCMS di setiap Unit Kerja secara berkelanjutan.
2. Setiap tindakan pencegahan atau perbaikan yang diambil harus sesuai dengan tujuan Kebijakan BCMS.
3. Perubahan dan perbaikan yang dilakukan harus tercermin dalam dokumentasi BCMS.
4. Tindakan pencegahan atau perbaikan berfokus pada pencegahan dan perbaikan atas perencanaan penanganan gangguan yang terjadi.

3. The BC *Plan* document is used or activated after being decided by an authorized official according to the level of criticality that occurs (explained further in the Criticality Level in the BCMS policy, Chapter 7 part A).
4. The aims and objectives of preparing the BC *Plan* document include:
 - a. Maintaining Company operations and business, especially critical activities, can continue to run, or be prioritized for recovery immediately after a disturbance/disaster occurs;
 - b. Securing important Company assets and information;
 - c. Minimize risks resulting from disruptions or disasters by limiting financial losses, legal and reputation risks;
 - d. Ensuring the continuous availability of services and products; and
 - e. Prepare other alternatives so that critical business functions can continue to run to maintain the continuity of the Company's operations. The BC *Plan* document is created based on data obtained from the previous stages of Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment (RA), and Business Continuity Strategy (BC *Strategy*).
5. The development and preparation of the BC *Plan* document must consider aspects of securing Company assets (Information Technology resources, human resources, buildings, etc.).
6. Development and preparation of BC *Plan* documents in accordance with the Company's internal and external regulations.
7. The BC *Plan* document also includes: hierarchical structure of reporting related to disturbances or disasters and escalation procedures.

Disaster Recovery Plan (DR *Plan*)

1. The DR *Plan* document is developed and prepared by the Technical & Information Systems Division in a separate document from this policy.
2. The DR *Plan* documents must be available for every Information Technology service that is considered critical in supporting critical business and operations in each Work Unit based on the results of Business Impact Analysis (BIA), Risk assessment and BC *Strategy*.

Sustainable BCMS Development

1. The Company is committed to developing the suitability, effectiveness and adequacy of BCMS in each Work Unit on an ongoing basis.
2. Any preventive or corrective action taken must be in accordance with the objectives of the BCMS Policy.
3. Changes and improvements made must be reflected in the BCMS documentation.
4. Preventive or corrective actions focus on preventing and correcting planning for handling disturbances that occur.



5. Tujuan tindakan pencegahan atau perbaikan adalah meminimalkan kerugian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas BCMS.
6. Tindakan pencegahan diperlukan untuk mengantisipasi penyebab dari suatu gangguan. Tindakan pencegahan yang diambil harus sesuai dengan potensi dampak dari gangguan.
7. Tindakan korektif mengelola ketidaksesuaian atas implementasi BCMS. Manajemen harus mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terkait dengan implementasi BCMS untuk mencegah pengulangan kejadian serupa di masa mendatang.
8. Perseroan harus terus-menerus meningkatkan efektivitas BCMS dengan cara melakukan kaji ulang dan menindaklanjuti:
 - a. Hasil audit, analisis dari pemantauan kejadian;
 - b. Tindakan pencegahan dan perbaikan; dan
 - c. Kaji ulang oleh Manajemen.

5. The aim of preventive or corrective action is to minimize losses and increase the efficiency and effectiveness of BCMS activities.
6. Preventive measures are needed to anticipate the cause of a disturbance. The precautions taken must be appropriate to the potential impact of the disturbance.
7. Corrective actions to manage non-conformities regarding BCMS implementation. Management must take action to eliminate the causes of nonconformities related to BCMS implementation to prevent recurrence of similar events in the future.
8. Companies must continuously improve the effectiveness of the BCMS by reviewing and following up:
 - a. Audit results, analysis of event monitoring;
 - b. Preventive and corrective actions; and
 - c. Review by Management.



PERKARA HUKUM YANG BERDAMPAK MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

LEGAL CASES WITH MATERIAL IMPACT FACED BY THE COMPANY, SUBSIDIARIES, MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam rangka menjaga integritas dan kepatuhan, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk meminimalkan pelanggaran, khususnya yang terkait dengan aspek hukum. Sepanjang tahun 2024, perkara hukum yang dihadapi Perseroan disajikan dalam tabel di bawah ini.

In order to maintain integrity and compliance, the Company has a strong commitment to minimize violations, especially those related to legal aspects. Throughout 2024, the legal cases faced by the Company are presented in the table below.

No.	Perkara Hukum Legal Cases	Jumlah Perkara Number of Cases	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
1	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/ inkracht) The case is finished (has permanent legal force/inkracht)	-	-
2	Perkara dalam proses penyelesaian The case is in the process of being resolved	-	-
Total		-	-

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama periode tahun 2024, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan yang sedang menjabat, memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

DISCLOSURE OF LEGAL CASES CURRENTLY FACED BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN OFFICE

During 2024, no member of the Company's Board of Commissioners or Board of Directors in office currently facing any legal cases, whether civil or criminal.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki anak Perusahaan, dengan demikian tidak terdapat informasi terkait permasalahan hukum terhadap entitas anak.

DISCLOSURE OF LEGAL CASES CURRENTLY FACING SUBSIDIARIES

Until the end of 2024, the Company did not have any subsidiaries, thus there was no information regarding legal cases against subsidiaries.

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki kasus terkait buruh dan/atau karyawan.

CASES RELATED TO LABOR AND EMPLOYEES

Until the end of 2024, the Company has no cases related to labor and/or employees.



INFORMASI TENTANG SANKSI PERKARA PAJAK

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Perseroan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan pajak tertinggi terkait masalah pajak maupun sengketa pajak.

SANKSI ADMINISTRATIF/SANKSI YANG DIKENAKAN KEPADA PERSEROAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN OTORITAS LAINNYA PADA TAHUN 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya sehingga tidak ada informasi terkait yang dapat disajikan pada laporan ini.

INFORMATION ON TAX SANCTIONS

In the last four years, the Company has never been found guilty in the highest tax court decision related to tax issues or tax disputes.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS/ SANCTIONS IMPOSED ON THE COMPANY, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND OTHER AUTHORITIES IN 2024

As of December 31, 2024, no administrative sanctions imposed on the Company, Members of Board of Commissioners and Members of Board of Directors by the Financial Services Authority and Other Authorities, hence no related information can be presented in this report.



TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

TRANSPARENCY OF FINANCIAL CONDITIONS

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan secara berkala menyampaikan laporan publikasi dan keterbukaan informasi kepada regulator sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 43/POJK.04/2020 ("POJK 43/2020") tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

Transparansi Kondisi Keuangan Perseroan

Pada tahun 2024, Perseroan sudah menyampaikan laporan publikasi dan keterbukaan informasi keuangan kepada regulator yang dapat diakses pada situs web Perseroan maupun situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain:

1. Laporan Keuangan Triwulanan
2. Laporan Keuangan Tahunan
3. Laporan Tahunan IPCC disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah daftar publikasi dan transparansi laporan keuangan yang sudah dilakukan Perseroan di tahun 2024:

No	Nama Laporan Report Name	Penyampaian Kepada Regulator Submission to Regulator	Media Publikasi Publication Media	Tanggal Publikasi Iklan Publication Date of Advertisement
1	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal I Submission of Unaudited Interim Financial Report for Quarter I	OJK dan BEI OJK and BEI	Website IPCC IPCC Website	Tidak di publikasin di iklan Not published in advertisement
2	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal II Submission of Unaudited Interim Financial Report for Quarter II	OJK dan BEI OJK and BEI	Website IPCC IPCC Website	Tidak di publikasin di iklan Not published in advertisement
3	Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Submission of Financial Report for Fiscal Year 2024	OJK dan BEI OJK and BEI	Website IPCC IPCC Website	Tidak di publikasin di iklan Not published in advertisement

Transparansi Kondisi Non-Keuangan Perseroan

Sepanjang tahun 2024, Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi mengenai transparansi non-keuangan, antara lain:

1. Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan, seperti perubahan pengurus, perubahan anggota komite, amandemen Anggaran Dasar, dan lain-lain. Informasi-informasi ini wajib disampaikan kepada regulator dan dapat diakses pada situs web BEI: www.idx.co.id dengan mengakses kode saham: IPCC.

As a public Company, the Company periodically submits publication and information disclosure reports to regulators as regulated in the provisions of POJK No. 43/POJK.04/2020 ("POJK 43/2020") concerning Obligations for Information Disclosure and Corporate Governance for Issuers or Public Companies that Meet the Criteria for Issuers with Small-Scale Assets and Issuers with MediumScale Assets.

Transparency of the Company's Financial Condition

In 2024, the Company has submitted a report on publication and disclosure of financial information to regulators which can be accessed on the Company's website and the Indonesian Stock Exchange (BEI) website, including:

1. Quarterly Financial Statements
2. Annual Financial Statements
3. IPCC Annual Report is prepared in accordance with the provisions of POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies and OJK SE No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

The following is a list of publications and transparency of financial reports that have been carried out by the Company in 2024:

Transparency of Company Non-Financial Conditions

Throughout 2024, the Company has submitted information disclosure regarding non-financial transparency, including:

1. Information related to Corporate Governance, such as changes in management, changes in committee members, amendments to the Articles of Association, and others. This information must be submitted to the regulator and can be accessed on IDX website: www.idx.co.id by accessing the stock code: IPCC.



- Informasi Produk dan Layanan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan ditampilkan pada situs web Perseroan: www.indonesiacarterterminal.co.id sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas.
- Informasi mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan kepada BEI dan OJK serta disediakan pada situs web Perseroan.
- Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan atau perubahan Pemegang Saham pada Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.
- Informasi atau fakta material penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, senantiasa diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan BEI.
- Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi.

Sistem Pelaporan Elektronik

Sejalan dengan penerapan POJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, sepanjang tahun 2024, Perseroan telah menyiapkan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik yang Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia. Pelaporan melalui SPE OJK-IDX yang disampaikan Perseroan di tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Date	Uraian Description
1.	7 Februari 2024 February 7, 2024	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] yang berakhir pada 31 Januari 2024 Monthly Report of Securities Holders Registration [IPCC] ended on January 31, 2024
2.	2 April 2024 April 2, 2024	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] yang berakhir pada 31 Maret 2024 Monthly Report of Securities Holders Registration [IPCC] ended on March 31, 2024
3.	5 Juni 2024 June 5, 2024	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] yang berakhir pada 31 Mei 2024 Monthly Report of Securities Holders Registration [IPCC] ended on May 31, 2024
4.	4 Juli 2024 July 4, 2024	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] yang berakhir pada 30 Juni 2024 Monthly Report of Securities Holders Registration [IPCC] ended on June 30, 2024
5.	4 September 2024 September 4, 2024	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] yang berakhir pada 31 Juli 2024 Monthly Report of Securities Holders Registration [IPCC] ended on July 31, 2024
6.	3 Oktober 2024 October 3, 2024	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] yang berakhir pada 30 September 2024 Monthly Report of Securities Holders Registration [IPCC] ended on September 30, 2024
7.	5 November 2024 November 5, 2024	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] yang berakhir pada 31 Oktober 2024 Monthly Report of Securities Holders Registration [IPCC] ended on October 31, 2024
8.	7 Januari 2025 January 7, 2025	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] yang berakhir pada 31 Desember 2024 Monthly Report of Securities Holders Registration [IPCC] ended on December 31, 2024

Transparansi Informasi Produk dan Layanan

Perseroan mengungkapkan informasi mengenai produk dan layanan setransparan mungkin kepada mitra, publik dan Pemangku Kepentingan lainnya, dengan menggunakan berbagai media komunikasi, seperti:

- Situs Web: www.indonesiacarterterminal.co.id
- Media sosial Perseroan pada berbagai *platform*, seperti *Facebook, X, Instagram, YouTube dan LinkedIn*.
- Brosur/iklan di media massa dan berbagai media promosi dan komunikasi lainnya.

Electronic Reporting System

In line with the implementation of POJK No. 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports Through the Electronic Reporting System for Issuers or Public Companies, throughout 2024, the Company has prepared reporting through the Integrated Electronic Reporting System of the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia Keuangan and PT Bursa Efek Indonesia. The reporting via SPE OJK-IDX submitted by the Company in 2024 is as follows:

Transparency of Product and Service Information

The Company discloses information regarding products and services as transparently as possible to partners, the public and other Stakeholders, using various communication media, such as:

- Website: www.indonesiacarterterminal.co.id
- The Company's social media on various platforms, such as X, Instagram, YouTube, and LinkedIn.
- Brochures/advertisements in mass media and various other promotional and communication media.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Perseroan menaruh perhatian besar terhadap penegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, salah satunya terkait transparansi informasi produk dan/atau layanan, serta informasi material lainnya yang relevan untuk disampaikan kepada para Pemangku Kepentingan. Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan memastikan selalu mematuhi ketentuan publikasi laporan dan keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh regulator sebagaimana telah diulas pada bagian terpisah dalam laporan tahunan ini.

Perseroan meyakini penyebaran informasi yang transparan dan merata kepada seluruh Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal dapat membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta menciptakan persepsi positif mengenai Perseroan di mata para Pemangku Kepentingan. Selain itu, transparansi informasi juga diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemegang Saham ataupun Pemangku Kepentingan lainnya. Menyadari pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan valid, maka pengelolaan informasi korporasi Perseroan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 8/POJK.04/2015 ("POJK 8/2015") tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Namun demikian, transparansi informasi Perseroan tetap harus memperhatikan batasan kerahasiaan informasi yang hanya boleh diketahui oleh kalangan terbatas. Dengan begitu, tidak semua hal dapat diinformasikan terbuka secara keseluruhan. Perseroan hanya berhak untuk terbuka dan memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan sebatas pada hal-hal yang diatur dalam regulasi dan/atau pada hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian, kesepakatan serta komitmen bersama.

Situs Web

Perseroan membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik melalui situs web resmi: www.indonesiacarterminal.co.id yang dikelola oleh Sekretaris Perseroan. Informasi yang ditampilkan dalam situs web Perseroan tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan secara berkala memperbarui tampilan dan konten yang disediakan dalam situs web tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada para Pemangku Kepentingan.

Beberapa pilihan informasi yang tersedia dalam situs web Perseroan, mencakup Latar Belakang Perseroan, Layanan Perseroan, informasi mengenai kinerja dan perkembangan terkini dari IPCC serta info terkait pengadaan dan lainnya. Informasi yang tersedia di situs web IPCC di-update secara berkala sesuai dengan perkembangan terkini dari IPCC.

The Company pays great attention to upholding the principles of good governance, one of which is related to transparency of product and/or service information, as well as other relevant material information to be conveyed to Stakeholders. As a public Company, the Company ensures that it always complies with the provisions for publication of reports and information disclosure required by regulators as reviewed in a separate section in this annual report.

The Company believes that the transparent and equitable dissemination of information to all internal and external stakeholders can help maintain and improve knowledge and understanding, as well as create a positive perception of the Company in the eyes of stakeholders. In addition, transparency of information is also necessary to support the decision-making process of shareholders and other stakeholders. Recognizing the importance of delivering accurate and valid information, management of the Company's corporate information is carried out professionally by observing the provisions of POJK No. 8/POJK.04/2015 ("POJK 8/2015") concerning the Website of Issuers or Public Companies.

However, transparency of Company information must still take into account the confidentiality of information that should only be known to a limited group. That way, not everything can be fully disclosed. The Company only has the right to be open and provide information to Stakeholders to the extent of matters regulated in the agreement and/or matters stipulated in agreements and mutual commitments.

Website

The Company opens the widest possible access to information to the public through the official website: www.indonesiacarterminal.co.id which is managed by the Corporate Secretary. The information displayed on the Company's website is available in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The Company regularly updates the appearance and content provided on the website as a form of responsibility to Stakeholders.

Several choices of information available on the Company's website include Company Background, Company Services, information regarding the performance and latest developments from IPCC as well as information related to procurement and others. The information available on IPCC website is updated regularly in accordance with the latest developments from IPCC.



Sementara itu untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai kinerja ataupun data lainnya mengenai Perseroan dapat langsung menghubungi:

Meanwhile, to obtain more detailed information regarding performance or other data regarding the Company, can directly contact:

IPCC Kantor Pusat | IPCC Head Office

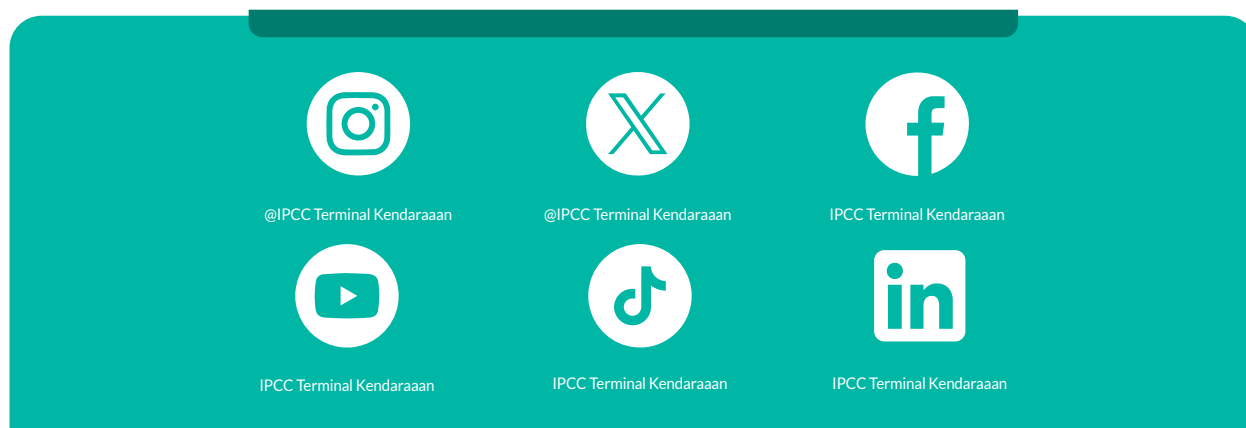
Jl. Sindang Laut No. 100, Kali Baru, Kec. Cilincing
 Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14110
 Telp.: 021 4393 2251 |
 Email: corsec@indonesiacarterminal.co.id
 komersial@indonesiacarterminal.co.id

Media Sosial

Selain menampilkan informasi secara lengkap pada situs web, Perseroan juga mengelola 5 (lima) akun media sosial, yaitu:

Social Media

Apart from displaying complete information on the website, the Company also manages 4 (four) social media accounts, namely:



Di era digitalisasi sekarang ini, Perseroan melihat proses penyebaran informasi melalui media sosial terasa lebih efektif karena dapat menjangkau masyarakat luas dengan mudah dalam waktu yang cepat mengingat hampir seluruh masyarakat sudah akrab dengan kemajuan teknologi dan dunia digital. Dengan adanya media sosial, proses komunikasi antara Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan pun dapat berjalan lebih mudah atau tidak harus melalui tahapan birokrasi yang rumit. Oleh sebab itu, platform media sosial Perseroan berfungsi secara aktif sebagai media penyampaian informasi mengenai aktivitas Perseroan dengan menggunakan tampilan atau visual yang menarik.

In the current era of digitalization, the Company sees that the process of disseminating information through social media feels more effective because it can reach the wider community easily in a short time considering that almost all people are familiar with technological advances and the digital world. With the existence of social media, the communication process between the Company and interested parties can run more easily or not have to go through complicated bureaucratic stages. Therefore, the Company's social media platform functions actively as a medium for conveying information regarding the Company's activities by using attractive displays or visuals.

Komunikasi Eksternal

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perseroan secara berkala menyebarluaskan informasi material mengenai aktivitas dan kinerja Perseroan. Keterbukaan informasi tersebut juga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, di antaranya melalui kegiatan siaran pers, publikasi kinerja dan hasil usaha secara berkala di media massa nasional dan menggelar konferensi pers. Selain itu, Perseroan juga menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Pemenuhan keterbukaan informasi untuk eksternal Perseroan dikelola oleh Hubungan Investor Perseroan.

External Communications

As a form of transparency to the public, the Company periodically disseminates material information regarding the Company's activities and performance. This information disclosure is also carried out in order to fulfill regulatory requirements, including through press releases, regular publication of performance and business results in national mass media and holding press conferences. Apart from that, the Company also publishes an Annual Report book which is distributed to Shareholders and other Stakeholders. Fulfillment of information disclosure for external companies is managed by Company Investor Relations.



Hubungan Investor

Tugas pokok hubungan investor, yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak komunitas investor dan masyarakat pasar modal, antara lain meliputi:

1. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis dan masyarakat pasar modal pada umumnya;
2. Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, dan *conference call*;
3. Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja Perseroan serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, investor dan calon investor;
4. Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara Perseroan dengan para investor dan juga media baik di tingkat lokal maupun internasional;
5. Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara Perseroan dengan media, pers;
6. Mengelola hubungan dengan para analis, *fund manager*, pakar dan pengamat ekonomi (khususnya saham);
7. Memantau dan melaporkan kepada Direksi atas hasil evaluasi para analis terhadap kinerja dan harga saham Perseroan secara berkala;
8. Mengoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Laporan Tahunan kepada investor/analis;
9. Menyediakan data dan informasi keuangan Perseroan untuk investor dan masyarakat pasar modal.

Aktivitas Hubungan Investor

Divisi Hubungan Investor menjalankan fungsi komunikasi dengan komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi lain-lain yang diperlukan bagi investor untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor senantiasa memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara bagi semua investor.

Perseroan secara aktif dan rutin menyelenggarakan pertemuan dengan para *stakeholders* untuk memaparkan hasil kinerja triwulanan. Perseroan juga aktif menghadiri *conference* dan *non-deal road show*, serta kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas, tujuannya agar Perseroan dengan calon-calon investor potensial baik investor lokal maupun global. Selain itu, Perseroan juga menerima kunjungan dari para investor maupun mengadakan *conference call* sesuai dengan permintaan dari para investor.

Berikut ini adalah daftar aktivitas dan program kerja yang sudah dilakukan Divisi Hubungan Investor sepanjang tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

Investor Relations

The main duties of investor relations is representing the Board of Directors in their relations with the investor community and the capital market community, include:

1. Develop a communication strategy, especially to investors, potential investors, analysts and the capital market community in general;
2. Prepare materials and carry out road shows and conference calls;
3. Communicate various aspects related to the Company's shares and performance as well as financial reports to interested parties, such as analysts, investors and potential investors;
4. Maintain and improve communication between the Company and investors and the media both at local and international levels;
5. Maintain and improve communication between the Company, media and press;
6. Manage relationships with analysts, fund managers, experts and economic observers (especially stocks);
7. Monitor and report to Board of Directors the results of analysts' evaluations of the Company's performance and share price on a regular basis;
8. Coordinate the preparation, publication and distribution of Annual Report to investors/analysts;
9. Provide the Company's financial data and information to investors and the capital market community.

Investor Relations Activities

The Investor Relations Division carries out communication functions with the financial community and capital markets so that they obtain precise and accurate information regarding performance, business prospects and other information needed by investors to support the decision-making process. All activities carried out by the Investor Relations Division always pay attention to the principles of confidentiality and equal treatment for all investors.

The Company actively and regularly holds meetings with stakeholders to present quarterly performance results. The Company also actively attends conferences and nondeal road shows, as well as other activities organized by securities companies, with the aim of connecting the Company with potential potential investors, both local and global investors. Apart from that, the Company also receives visits from investors and holds conference calls according to requests from investors.

The following is a list of activities and work programs that have been carried out by the Investor Relations Division throughout 2024, including the following:



Tabel Frekuensi Keterbukaan Informasi dalam Komunikasi Eksternal

Frequency Table of Information Disclosure in External Communication

Media Keterbukaan Informasi Information Disclosure Media	2024	Keterangan Description
Laporan Tahunan Annual Report	1	Informasi penyampaian Laporan Tahunan 2024 dapat diakses pada situs web BEI dan situs web Perseroan: https://indonesiacarterminal.co.id/laporan-tahunan Information on the submission of 2024 Annual Report can be accessed on IDX website and the Company's website: https://indonesiacarterminal.co.id/laporan-tahunan
Public Expose	1	Public Expose tahun 2024 dapat dilihat di situs web Perseroan: https://indonesiacarterminal.co.id/presentasi-perusahaan The 2024 Public Expose can be viewed on the Company's website: https://indonesiacarterminal.co.id/presentasi-perusahaan
Publikasi Laporan Keuangan Publication of Financial Reports	3	Informasi Laporan Keuangan Tahun 2024 dapat diakses pada situs web Perseroan: https://indonesiacarterminal.co.id/laporan-keuangan Financial Report Information for 2024 can be accessed on the Company's website: https://indonesiacarterminal.co.id/laporan-keuangan
Publikasi Pengumuman Keterbukaan Informasi Publication of Announcements of Information Disclosure	9	Dapat diakses di situs web Perseroan: https://indonesiacarterminal.co.id/presentasi-perusahaan The 2024 Press Release can be accessed on the Company's website: https://indonesiacarterminal.co.id/berita-siaranpers
Siaran Pers Press Releases	37	Siaran Pers Tahun 2024 dapat diakses pada situs web Perseroan: https://indonesiacarterminal.co.id/berita-siaranpers Siaran Pers Tahun 2024 dapat diakses pada situs web Perusahaan: https://indonesiacarterminal.co.id/berita-siaranpers
Sosial Media	6 Platform Sosial Media dengan rincian sebagai berikut: 1 akun Facebook; 1 akun X; 1 akun Instagram; 1 akun Youtube. 1 akun Tiktok 1 akun LinkedIn 6 Social Media Platforms with the following details: 1 Facebook account; 1 X account; 1 Instagram account; 1 Youtube account. 1 Tiktok account 1 LinkedIn account	

Komunikasi Internal

Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk membina hubungan yang baik dengan karyawan salah satu caranya dengan membangun hubungan komunikasi internal yang baik dan efektif. Proses komunikasi internal dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi internal yang dimiliki, seperti Grup WhatsApp, Email Perusahaan, Pelindo E-Office, dan Portaverse.

Internal Communication

The Company is highly committed to fostering good relationships with employees, one way of doing this is by building good and effective internal communication relationships. The internal communication process is carried out by optimizing various internal communication channels, such as WhatsApp Group, Company Email, Pelindo E-Office, and Portaverse.



KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

IPCC senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menjalankan Pedoman Kode Etik dan Bisnis yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/4/IKT-2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pedoman Kode Etik dan Bisnis.

Pedoman Kode Etik dan Bisnis IPCC menjadi dasar sikap dan tindakan karyawan agar dapat bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada Visi, Misi, dan Budaya Perseroan serta peraturan internal dan eksternal yang berlaku. Kode Etik dan Bisnis IPCC berlaku bagi seluruh level organisasi meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.

TUJUAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK

Tujuan pemberlakuan Pedoman Kode Etik dan Bisnis antara lain untuk memberikan informasi, kesadaran, pelatihan, serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja. Selain itu, Kode Etik Bisnis dapat membantu Insan IPCC dalam mengatasi isu-isu seputar etika atau dilema yang mungkin dihadapi dalam keseharian. Pelanggaran dari kode etik bisnis ini merupakan tindakan indiscipliner dan akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Kode Etik dan Bisnis IPCC menjelaskan perilaku-perilaku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan serta standar berperilaku yang diharapkan dari karyawan saat berinteraksi dengan rekan kerja, mitra bisnis, pelanggan, dan konsumen. Dengan adanya Kode Etik Bisnis, Perseroan berharap dapat menghadirkan lingkungan kerja yang disiplin, kondusif, dan teratur bagi seluruh karyawan. Hal ini sekaligus menekankan komitmen Perseroan terhadap sikap integritas, pelaksanaan etika bisnis dan standardisasi yang menuntun seluruh insan Perseroan untuk selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam upaya menghadirkan praktik operasi yang adil, penerapan Kode Etik Bisnis juga bertujuan untuk menutup celah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain menjaga pertumbuhan bisnis yang positif dan berkelanjutan, Perseroan juga harus menjaga citra dan kredibilitas Perseroan di mata para Pemangku Kepentingan karena kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan merupakan hal berharga yang dapat mendukung keberlangsungan usaha pada jangka panjang. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan perilaku seluruh insan Perseroan dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan. Pengelolaan Perseroan yang baik selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

IPCC always upholds integrity by having and implementing the Code of Conduct Guidelines stipulated based on the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Joint Decree No. HK.56/3/4/IKT-2022 dated December 12, 2022 concerning Code of Conduct Guidelines.

IPCC Code of Conduct guidelines are the basis for employee attitudes and actions so that they can work professionally and ethically by using basic principles that refer to the Company's Vision, Mission and Culture as well as applicable internal and external regulations. IPCC Code of Conduct applies to all levels of the organization including Board of Commissioners, Board of Directors and all employees.

PURPOSE OF ENFORCEMENT A CODE OF CONDUCT

The aim of enforcing the Code of Conduct Guidelines is, among other things, to provide information, awareness, training, and a way to report any violations or ambiguities related to professional ethics and work ethics. In addition, Code of Conduct can assist IPCC Personnel in dealing with ethical issues or dilemmas that may be faced in everyday life. Code of Conduct Violation is an disciplinary action and will be subject to applicable sanctions.

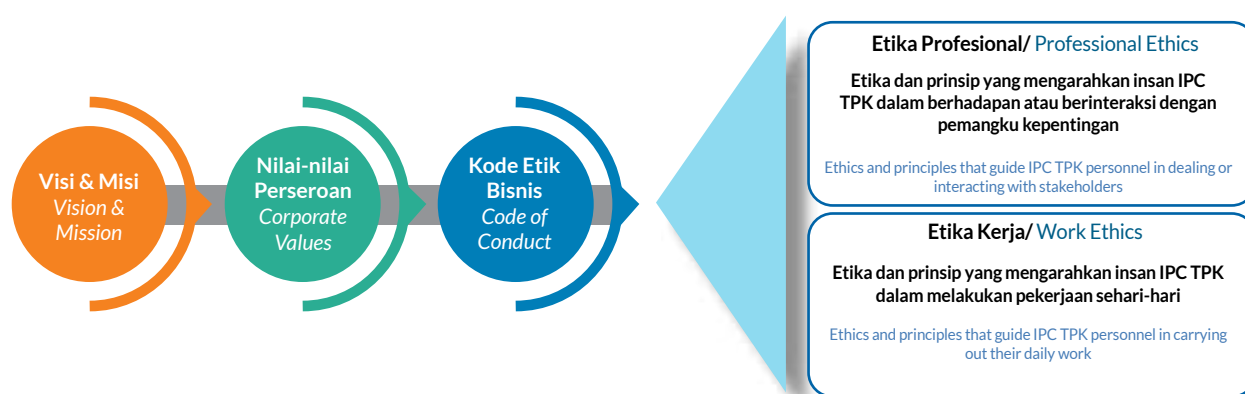
IPCC Code of Conduct explains the behaviors that should or should not be performed as well as the standards of behavior that are expected from employees when interacting with colleagues, business partners, customers and consumers. With the Code of Conduct, the Company hopes to provide a disciplined, conducive and orderly work environment for all employees. This also emphasizes the Company's commitment to integrity, implementation of business ethics and standardization which guides all Company personnel to always carry out their duties with full responsibility. Then, in an effort to provide fair operating practices, the implementation of Code of Conduct also aims to close the gap in Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices.

Apart from maintaining positive and sustainable business growth, the Company must also maintain the Company's image and credibility in the eyes of its Stakeholders because the trust given to the Company is a valuable thing that can support long-term business sustainability. This is of course very closely related to the behavior of all Company personnel in interacting with Stakeholders. Good Company management, apart from having to follow applicable rules and regulations, must also uphold ethical norms and values.



Kode Etik Bisnis Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Pedoman Kode Etik dan Bisnis IPCC berlaku tanpa terkecuali bagi setiap karyawan hingga ke tingkat Direksi. Sebagai bukti atas komitmen dan kesungguhan seluruh insan Perseroan dalam menerapkan menjalankan aktivitas bisnis yang sehat sesuai dengan standar dan moral etika tertinggi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, maka Perseroan mewajibkan masing-masing karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani Pakta Integritas.



POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman Kode Etik dan Bisnis Perseroan mengatur 2 (dua) topik utama, yakni etika profesional dan etika kerja, yang bersifat mengikat bagi semua karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi.

A. Etika Profesional

Etika Profesional adalah pedoman etika yang mengatur perilaku yang diharapkan dari seorang insan Perseroan, baik sebagai individu yang profesional ataupun dalam berhubungan dengan segenap Pemangku Kepentingan.

1. Insan IPCC
Mengatur perilaku seluruh insan Perseroan sebagai individu ataupun sebagai profesional sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
2. Pelanggan
Selaras dengan salah satu *corporate values* Perseroan yaitu *customer centric*, di mana insan IPCC harus berkomitmen untuk memberikan perhatian, harga, kualitas, waktu dan keamanan yang setara melalui pemberian layanan dengan standar kualitas yang baik kepada pelanggan, yaitu di antaranya:
 - a. Insan Perseroan diharapkan dapat secara konsisten memenuhi harapan pelanggan dan memberikan pelayanan yang luar biasa dan berkualitas.
 - b. Insan Perseroan diharuskan untuk menjaga perilaku baik dan tekun dalam memberikan kepuasan pelanggan dan bekerja dengan pemikiran yang inovatif dan kreatif.

Code of Conduct Applies to All Levels of the Organization

IPCC Code of Conduct applies without exception to every employee up to the level of Board of Directors. As proof of the commitment and seriousness of all the Company's personnel in implementing sound business activities in accordance with the highest standards and moral ethics in every activity carried out, the Company requires each employee, including Board of Commissioners and Board of Directors, to sign a Integrity Pact.

CODE OF CONDUCT PRINCIPLES

The main points of Code of Conduct are divided into 2 (two), namely Professional Ethics and Work Ethics, with the following description:

A. Professional Ethics

Professional Ethics are ethical guidelines that regulate the behavior expected of a Company member, both as a professional individual and in dealing with all Stakeholders.

1. IPCC Personnel
Regulate the behavior of all Company personnel as individuals or as professionals in accordance with applicable regulations and norms.
2. Customers
In line with one of the Company's corporate values, namely customer centric, where IPCC personnel must be committed to providing equal attention, price, quality, time and safety by providing services with good quality standards to customers, including:
 - a. Company personnel are expected to consistently meet customer expectations and provide extraordinary and quality service.
 - b. Company personnel are required to maintain good behavior and be diligent in providing customer satisfaction and work with innovative and creative thinking.

- c. Insan Perseroan diharuskan bekerja sama untuk menghilangkan perilaku arogan dan birokratis karena hal tersebut berpengaruh buruk bagi perkembangan dan keberhasilan Perseroan.
 - d. Insan Perseroan harus yakin dengan prinsip penyempurnaan secara terus-menerus dengan mengikutsertakan pendapat serta saran dari para pelanggan dan menggunakannya sebagai cara untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan kami.
 - e. Insan Perseroan harus memperhatikan keluhan-keluhan pelanggan dan mencoba menyelesaikannya memberikan solusi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
 - f. Insan Perseroan diharapkan untuk membangun pola komunikasi yang jujur dengan para pelanggan untuk mendorong terciptanya hubungan yang saling percaya dan transparan.
 - g. Insan Perseroan memperlakukan para pelanggan sebagai tumpuan bisnis Perseroan dan menjadikan kepuasan mereka sebagai pertimbangan yang utama, sehingga Insan Perseroan akan selalu berusaha untuk memberikan nilai berharga bagi para pelanggan.
 3. Vendor
Perseroan terus berusaha membangun hubungan berbasis kepercayaan dan kemakmuran para vendor, berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu di antaranya:
 - a. Berkolaborasi dengan para vendor dengan cara menguraikan segala kesepakatan dalam dokumen tertulis yang didasari maksud baik dan menguntungkan kedua belah pihak.
 - b. Melakukan pendekatan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku.
 - c. Percaya dalam memberikan kesempatan yang setara kepada para vendor dalam menjalankan bisnis.
 - d. Menghentikan hubungan bisnis dengan vendor mana pun apabila mereka tidak mematuhi Kode Etik Bisnis Perseroan dan menjalankan bisnis dengan cara yang dapat merusak reputasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk mengancam lingkungan dan komunitas tempat kami beroperasi atau melanggar hak asasi manusia.
 - e. Menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan dengan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dapat membantu para vendor membangun pemahaman yang lebih baik mengenai bisnis kami.
 - f. Secara tegas mematuhi Kode Etik Bisnis Perseroan dan mendorong para vendor untuk mengikuti hal yang sama di mana Perseroan memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka apabila terjadi pelanggaran.
 4. Kompetitor
Perseroan berkomitmen untuk mematuhi hukum persaingan bisnis baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, yaitu di antaranya:
- c. Company personnel are required to work together to eliminate arrogant and bureaucratic behavior because this has a negative impact on the development and success of the Company.
 - d. Company personnel must believe in the principle of continuous improvement by incorporating opinions and suggestions from customers and using them as a way to continuously improve our processes and service quality.
 - e. Company personnel must pay attention to customer complaints and try to resolve them by providing solutions that can be implemented on an ongoing basis.
 - f. Company personnel are expected to build honest communication patterns with customers to encourage the creation of relationships of mutual trust and transparency.
 - g. Company Personnel treat customers as the foundation of the Company's business and make their satisfaction the main consideration, so that Company Personnel will always strive to provide valuable value to customers.
 3. Vendors
The Company continues to strive to build relationships based on trust and prosperity with vendors, based on applicable laws, including:
 - a. Collaborate with vendors by outlining all agreements in written documents that are based on good intentions and benefit both parties.
 - b. Take an open, transparent and accountable approach in complying with applicable rules and laws.
 - c. Believes in providing equal opportunities to vendors in running business.
 - d. Terminate business relationships with any vendor if they do not comply with the Company's Code of Conduct in a manner that in a way that could damage the reputation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk threaten the environment and the communities in which we operate or violate human rights.
 - e. Create transparency and build trust by providing information according to business needs that can help vendors build a better understanding of our business.
 - f. Strictly comply with the Company's Code of Conduct and encourage vendors to follow the same where the Company has the full right to take legal action against them if violations occur.
 4. Competitors
The Company is committed to complying with business competition laws both written and unwritten, including:



- a. Tidak terlibat dalam praktik perdagangan terlarang, penyalahgunaan dominasi pasar atau aktivitas perdagangan tidak adil lainnya, berdasarkan peraturan dan arahan pemerintah.
 - b. Tidak akan menyampaikan informasi yang tidak benar tentang layanan kompetitor.
 - c. Mengutamakan keadilan, kebenaran, dan transparansi terhadap kompetisi bisnis dengan mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku.
 - d. Tidak diperkenankan menyampaikan komentar atau pendapat tentang layanan atau produk yang dihasilkan kompetitor.
5. Komunitas dan Lingkungan
- Perseroan berkomitmen untuk mendukung kelangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial, yaitu di antaranya:
- a. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekaligus mendorong kerapian dan membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar tempat bekerja.
 - b. Dalam bekerja selalu menunjukkan perilaku yang baik dengan rekan kerja dan anggota komunitas lainnya.
 - c. Menjaga lingkungan dengan meminimalisasi dan mengurangi dampak lingkungan di area sekitar.
 - d. Secara konsisten memberikan komitmen untuk membangun bangsa dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan keadaan lingkungan dan komunitas.
 - e. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah dan mengaplikasikan peraturan yang relevan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.
6. Institusi Pemerintah
- Perseroan berkolaborasi penuh dengan regulator dan institusi lain dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis serta memastikan kelancaran fungsi bisnis, yaitu di antaranya:
- a. Dalam berinteraksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.
 - b. Membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan mengutamakan kejujuran dan saling menghormati.
 - c. Harus mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan sebelum berinteraksi dengan regulator dan institusi terkait saat menjalankan bisnis.
 - d. Memastikan setiap informasi dan laporan yang diberikan kepada regulator dan pemerintah akurat dan lengkap.
 - e. Dilarang memberikan suap/gratifikasi yang mempengaruhi keputusan atau sebagai imbalan atas perlakuan yang diinginkan.
7. Aktivitas Politik
- Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan sikap netral terhadap partai politik, tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi, atau calon pejabat mana pun di negara mana pun. Beberapa etika yaitu di antaranya:
- a. Menghindari menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.
 - b. Menghindari mengatasnamakan IPCC Terminal dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik.
- a. Not engage in illicit trading practices, abuse of market dominance or other unfair trading activities, based on government regulations and directives.
 - b. Will not convey incorrect information about competitor services.
 - c. Prioritize fairness, truth and transparency in business competition by following applicable rules and laws.
 - d. It is not permitted to express comments or opinions about services or products produced by competitors.
5. Community and Environment
- The Company is committed to supporting economic, environmental and social sustainability, including:
- a. Maintain a clean and healthy environment while encouraging tidiness and building harmonious relationships with the community around the workplace.
 - b. When working, always show good behavior with colleagues and other community members.
 - c. Protect the environment by minimizing and reducing environmental impacts in the surrounding area.
 - d. Consistently provide a commitment to develop the nation in a responsible manner and pay attention to the condition of the environment and community.
 - e. Comply with all government laws and regulations and apply relevant regulations in carrying out daily work.
6. Government Institutions
- The Company collaborates fully with regulators and other institutions with the aim of building harmonious relationships and ensuring smooth business functions, including:
- a. When interacting, you must comply with the provisions of applicable laws and Company regulations.
 - b. Building harmonious and positive relationships by prioritizing honesty and mutual respect.
 - c. Must obtain necessary approvals before interacting with regulators and relevant institutions while conducting business.
 - d. Ensure that all information and reports provided to regulators and the government are accurate and complete.
 - e. It is prohibited to give bribes/gratuities to influence decisions or in return for desired treatment.
7. Political Activities
- The Company is committed to maintaining a neutral attitude towards political parties, not providing financial assistance to any political party, politician or candidate for office in any country. Some ethics include:
- a. Avoid becoming a member or administrator of a political party.
 - b. Avoid using the name of IPCC Terminal in activities and contributions to political activities.



- c. Menghindari menggunakan dana, harta benda, pelayanan atau sumber daya IPCC untuk aktivitas dan kontribusi politik.
- d. Menghindari penggunaan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja.

B. Etika Kerja

Etika Kerja adalah pedoman etika yang mengatur perilaku yang diharapkan dari seorang insan Perseroan, terkait dengan pelaksanaan aktivitas pekerjaan sehari-hari:

1. **Pendokumentasian dan Pencatatan Perseroan**
Mengikuti semua prinsip dan standar pendokumentasian dan pencatatan, melaporkan semua informasi dalam Perseroan secara akurat dan tepat waktu.
2. **Kontrol Internal**
Memiliki kontrol internal yang kuat untuk mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku.
3. **Perjalanan Dinas**
Pedoman etika yang mengatur mengenai perjalanan dinas insan Perseroan.
4. **Kerahasiaan Data dan/atau Informasi**
Setiap insan Perseroan berkomitmen untuk melindungi informasi bisnis dan pribadi serta menjamin kerahasiaannya.
5. **Setiap insan Perseroan berkomitmen untuk berperilaku etis sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan menghindari hubungan, aktivitas, atau perkumpulan yang akan mengurangi kemampuan pengambilan keputusan secara adil dan objektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.**
6. **Hubungan Pribadi**
Menghindari hubungan pribadi atau keterlibatan emosional dengan kompetitor, vendor atau bawahan yang akan mempengaruhi kemampuan membuat keputusan.
7. **Memperlakukan Keluarga dan Teman**
Pedoman etika yang mengatur hubungan keluarga atau pertemanan dengan kompetitor, vendor, atau bawahan.
8. **Donasi**
Setiap insan Perseroan tidak diperkenankan untuk mendukung atau memberikan donasi untuk kepentingan politik. Donasi hanya akan diberikan dengan dasar etika kerja dan profesional.
9. **Anti-Penyuapan**
Perseroan secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk penyuapan.
10. **Media, Komunikasi dan Penyebaran Informasi**
Pedoman yang mengatur mengenai cara penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.

Penegakan Kode Etik: Sosialisasi dan Internalisasi

1. **Sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku**
Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan kepada seluruh pegawai, mulai dari level operasional sampai kepada *top management*. Sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh Insan IPCC senantiasa patuh terhadap Kode Etik Perseroan. Perseroan melakukan penegakan terhadap

- c. Avoid using IPCC funds, property, services or resources for political activities and contributions.
- d. Avoid using party attributes, conducting campaigns and political activities in the work environment.

B. Work Ethics

Work Ethics are ethical guidelines that regulate the expected behavior of Company personnel, related to the implementation of daily work activities:

1. **Company Documentation and Recording**
Follow all documentation and recording principles and standards, report all information within the Company accurately and on time.
2. **Internal Controls**
Have strong internal controls to comply with applicable laws and procedures.
3. **Business trips**
Ethical guidelines governing official travel of Company personnel.
4. **Confidentiality of Data and/or Information**
Every member of the Company is committed to protecting business and personal information and ensuring its confidentiality.
5. **Every member of the Company is committed to behaving ethically in accordance with the Company's interests by avoiding relationships, activities or associations that will reduce the ability to make decisions fairly and objectively in carrying out their duties and responsibilities.**
6. **Personal Relationships**
Avoid personal relationships or emotional involvement with competitors, vendors or subordinates that would influence decision-making ability
7. **Treat Family and Friends**
Ethical guidelines governing family or friendship relationships with competitors, vendors or subordinates.
8. **Donation**
Every member of the Company is not permitted to support or make donations for political interests. Donations will only be given on the basis of work ethics and professionalism.
9. **Anti-Bribery**
The Company firmly condemns and prohibits all forms of bribery.
10. **Media, Communication and Information Dissemination**
Guidelines that regulate how to convey information to stakeholders.

Enforcement of Code of Conduct: Socialization and Internalization

1. **Socialization of Code of Conduct**
The Company always socializes the implementation of Code of Conduct to all employees, starting from the operational level to top management. This socialization is intended so that all IPCC personnel always comply with the Company Code of Conduct. The Company enforces the Company Code of Conduct by periodically monitoring the Company Code of



Kode Etik Perseroan yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan Pedoman Etika Perseroan dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan.

2. **Penandatanganan Pakta Integritas**
Perseroan mewajibkan setiap karyawan dan manajemen untuk menandatangani pakta integritas mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Perseroan untuk memastikan bahwa semua organ Perseroan memiliki komitmen untuk membangun etika dan kultur bisnis yang sehat serta membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen dari semua jajaran Perseroan.
3. **Management Review**
Perseroan secara konsisten menyelenggarakan *Management Review* bulanan dalam rangka mengevaluasi kinerja Perseroan dan melakukan internalisasi pelaksanaan Kode Etik sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam Perseroan serta memahami atas pelaksanaan pedoman dalam kegiatan sehari-hari.

Conduct and providing facilities for complaints against the Company Code of Conduct violations.

2. **Integrity Pact Signing**
The Company requires every employee and management to sign an integrity pact regarding compliance with the Company Code of Conduct to ensure that all Company organs are committed to building a healthy business culture and ethics, as well as building understanding, care, and commitment from all levels of the Company.
3. **Management Review**
The Company consistently organizes a monthly Management Review to evaluate the Company's performance and internalize the implementation of Code of Conduct so that a sense of ownership is formed among all parties in the Company and the implementation of guidelines in daily activities is understood.

Pernyataan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis

Statement of Integrity Pact and Compliance with the Code of Conduct



SURAT PERNYATAAN DAN KOMITMEN SEBAGAI DIREKSI
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk (IPCC)
UNTUK MELAKSANAKAN PAKTA INTEGRITAS DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PELABUHAN BERSIH
(TANPA TINDAKAN CURANG / FRAUD, KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME), SERTA MENERAPKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Menunjuk Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dan Peraturan Direksi Tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Sugeng Mulyadi
 Jabatan : Direktur Utama Merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Dengan kesadaran penuh sebagai Insan IPCC yang bertanggung jawab atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia menerapkan nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten), etika kerja, profesionalisme, bekerja dengan disiplin, penuh semangat dan memberikan hasil terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
2. Bersedia menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh manajemen Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bersedia menjaga reputasi Perusahaan dengan terlibat aktif dalam usaha untuk mencegah, melaporkan, mengungkapkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan Curang (*Fraud*), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan Perusahaan;
4. Selama menjabat bersedia mematuhi Kebijakan, tujuan, dan persyaratan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip **5 NO's**, yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);

Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, seluruh insan Perseroan telah menyatakan:

1. Bersedia menerapkan nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten), etika kerja, profesionalisme, bekerja dengan disiplin, penuh semangat dan memberikan hasil terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;

Through the signing of integrity pact, all Company personnel have stated:

1. Willing to apply AKHLAK values (Trustworthy, Collaborative, Harmonious, Loyal, Adaptive and Competent), work ethics, professionalism, work with discipline, full of enthusiasm and provide the best results by adhering to the principles of Good Corporate Governance in the daily work;



2. Bersedia menjunjung tinggi kepentingan Perseroan dari pada kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh manajemen Perseroan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perseroan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Bersedia menjaga reputasi Perseroan dengan terlibat aktif dalam usaha untuk mencegah, melaporkan, mengungkapkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan Curang (*Fraud*), korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan Perseroan;
 4. Selama menjabat bersedia mematuhi Kebijakan, tujuan, dan persyaratan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip 4 NO's, yaitu:
 - a. *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
 - b. *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - c. *No Gift* (bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
 - d. *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
 5. Melakukan internalisasi dan mengajak insan Pelindo termasuk keluarga untuk menerapkan prinsip 4 NO's;
 6. Bersedia memegang teguh komitmen untuk menerapkan *Standard Operating Procedures* (SOP), SLA/SLG dan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
 7. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundangan wajib saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya;
 8. Bersedia melaporkan melalui *Whistle Blowing System* Pelindo Bersih jika di dalam menjalankan tugas Saya melihat dan/atau mengetahui adanya tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan Perseroan, pemerasan, penggelapan yang dilakukan oleh pegawai atau mitra kerja PELINDO;
 9. Apabila dikemudian hari ternyata yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya terindikasi dengan bukti awal terdapat tindakan Curang (*Fraud*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Perseroan dan jika terbukti bersalah menerima hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perseroan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Willing to uphold the Company interests rather than personal or group interests, and seriously carry out the duties assigned by the Company's management in accordance with the legal provisions in force both in the Company and Unitary State of the Republic of Indonesia;
 3. Willing to maintain the Company's reputation by being actively involved in efforts to prevent, report, disclose and not commit acts of fraud, corruption, collusion and nepotism which could harm the position, honor, good name and interests of the Company;
 4. During the tenure, willing to comply with the Anti-Bribery Management System policies, objectives and requirements, have integrity and adhere to the 4 NO's principles, namely:
 - a. *No Bribery* (no bribery and extortion);
 - b. *No Kickback* (no commissions, tokens of gratitude either in the form of money or in other forms);
 - c. *No Gift* (contrary to applicable rules and regulations);
 - d. *No Luxurious Hospitality* (no excessive reception or entertainment).
 5. Internalize and invite Pelindo personnel, including families, to apply the 4 NO's principles;
 6. Willing to uphold the commitment to implement *Standard Operating Procedures* (SOP), SLA/SLG and transparency in all activities carried out under my authority;
 7. Willing to provide information, both verbal and written, requested by the competent authorities which according to statutory provisions I am obliged to provide in connection with complaints involving myself or the work unit under my responsibility;
 8. Willing to report via Pelindo Bersih Whistle Blowing System if in carrying out my duties I see and/or become aware of any acts of fraud, corruption, theft, violations of Company policies and regulations, extortion, embezzlement committed by PELINDO employees or work partners;
 9. If in the future it turns out that it concerns me or the work unit under my responsibility, it is indicated by initial evidence that there have been acts of Fraud, Corruption, Collusion and Nepotism, then I am willing to be investigated by the Company and if proven guilty, receive punishment in accordance with legal provisions. which applies both to the Company and Unitary State of the Republic of Indonesia.



Tim KP2DK

Agar pelaksanaan penerapan Kode Etik dapat berjalan efektif, Perseroan telah membentuk tim Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK) dengan tujuan:

1. Sebagai sumber informasi bagi para Insan Perseroan dan unit kerja tentang kebijakan dan standar perilaku yang diatur dalam pedoman ini.
2. Mengkaji secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memperjelas perilaku.
3. Melaporkan penerapan dan kepatuhan terhadap pedoman ini serta masalah-masalah yang dihadapi secara periodik agar dapat dikaji lebih lanjut.
4. Membahas adanya pelanggaran dan mempertimbangkan sanksi yang dijatuhkan sesuai peraturan yang berlaku untuk dilaporkan dan direkomendasikan kepada:
 - a. Direktur Keuangan dan SDM untuk kasus pelanggaran disiplin sedang atau berat dengan ancaman hukuman selain Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. Tim Pertimbangan Disiplin Karyawan (TPDK) untuk kasus pelanggaran disiplin berat dengan ancaman hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

Sanksi atas Pelanggaran

Jenis sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada karyawan yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin kerja adalah:

1. Hukuman Disiplin Ringan;
2. Hukuman Disiplin Sedang;
3. Hukuman Disiplin Berat.

Jenis Hukuman Disiplin Ringan dapat berupa:

1. Teguran secara tertulis dari atasan langsung;
2. Pernyataan tidak puas secara tertulis dari Perseroan.

Jenis Hukuman Disiplin Sedang berupa:

1. Denda sebesar 10% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku;
2. Denda sebesar 20% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku.

Jenis Hukuman Disiplin Berat dapat berupa:

1. Penurunan jabatan dan/atau kelas jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatan dan/atau kelas jabatan semula;
2. Penurunan jabatan dan/atau kelas jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari jabatan dan/atau kelas jabatan semula;
3. Pengembalian Pekerja yang ditugaskan di Perseroan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Terhadap karyawan yang melanggar disiplin, selain hukuman di atas dilakukan pemotongan bonus untuk tahun saat jatuhnya hukuman sebagai berikut:

1. Untuk Hukuman Disiplin Ringan Bonus tahunan diberikan 70%;

KP2DK Team

In order to implement the Code of Conduct effectively, the Company has formed an Employee Disciplinary Violation Inspection Group (KP2DK) team with the aim of:

1. As a source of information for Company Personnel and work units regarding the policies and standards of behavior regulated in this guideline.
2. Review periodically and make necessary adjustments to clarify behavior.
3. Report on the implementation and compliance with these guidelines as well as problems encountered periodically so that they can be studied further.
4. Discuss any violations and consider sanctions imposed in accordance with applicable regulations to be reported and recommended to:
 - a. Director of Finance and HC for cases of moderate or serious disciplinary violations with the threat of punishment other than Termination of Employment;
 - b. Employee Discipline Consideration Team (TPDK) for cases of serious disciplinary violations with the threat of punishment in the form of Termination of Employment.

Sanctions for Violations

The types of sanctions or penalties that can be given to employees who are proven to have committed work discipline violations are:

1. Light Disciplinary Punishment;
2. Moderate Disciplinary Punishment;
3. Severe Disciplinary Punishments.

Types of Light Disciplinary Punishment can be:

1. Written warning from direct superior;
2. Written statement of dissatisfaction from the Company.

Types of Moderate Disciplinary Punishment in the form of:

1. Fine of 10% of monthly income for 3 (three) months, according to applicable regulations;
2. A fine of 20% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations.

Types of Severe Disciplinary Punishment can be:

1. Demotion of position and/or class of position to 1 (one) level lower than the original position and/or class of position;
2. Demotion of position and/or position class to 2 (two) levels lower than the original position and/or position class;
3. Return of employees assigned to the Company to PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

For employees who violate discipline, in addition to the above penalties, bonuses will be deducted for the year in which the penalty is imposed as follows:

1. For light disciplinary punishment, the annual bonus is given 70%;



2. Untuk Hukuman Disiplin Sedang Bonus tahunan diberikan 40%;
3. Untuk Hukuman Disiplin Berat tidak diberikan Bonus tahunan.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh jajaran Manajemen Puncak maupun karyawan Perseroan.

Tren Kualitas Penerapan Kode Etik Perseroan Tahun 2023-2024

Jenis Pelanggaran Type of Violation	2024	2023
Pelanggaran Ringan Light Violation	-	-
Pelanggaran Sedang Moderate Violation	-	-
Pelanggaran Berat Severe Violation	-	-

Jenis Sanksi Types of Sanctions	2024	2023
Teguran secara tertulis dari atasan langsung; Written warning from direct superior;	-	-
Pernyataan tidak puas secara tertulis dari Perseroan Written statement of dissatisfaction from the Company	-	-
Denda sebesar 10% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku. A fine of 10% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations.	-	-
Denda sebesar 20% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku. A fine of 20% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations.	-	-
Penurunan jabatan. Demotion.	-	-
Pengembalian Pekerja yang ditugaskan di IPCC kepada Pelindo. Return of employees assigned to Pelindo by IPCC.	-	-

2. For Moderate Disciplinary Punishments, the annual bonus is given 40%;
3. For Severe Disciplinary Punishments no annual Bonus is given.

Number of Code of Conduct Violations in 2024

Throughout 2024, there not violations of Code of Conduct committed by the Company's Top Management or employees.

Trends in the Implementation Quality of the Company's Code of Conduct in 2023-2024

Evaluasi atas Implementasi Kode Etik Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan berupaya keras untuk konsisten dalam menegakkan pokok-pokok Kode Etik dan penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP), yang sekaligus juga berfungsi sebagai landasan kebijakan Sistem Anti Korupsi dan menjadi gerbang utama dalam sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

Evaluation of Code of Conduct Implementation in 2024

Throughout 2024, the Company strives to be consistent in upholding the principles of Code of Conduct and implementing ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (ABMS), which also serves as the basis for Anti-Corruption System policy and is the main gateway in the Company's Whistleblowing system.



KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA KEPADA MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

POLICY ON LONG-TERM PERFORMANCE-BASED COMPENSATION TO MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEES

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

As of December 31, 2024, the Company does not have a share ownership program for employees and/or management.

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Kebijakan

Kebijakan penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Laporan kepada OJK disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan. Penyampaian informasi dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

Pelaksanaan atas Kebijakan Dimaksud

Hingga akhir tahun 2024, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak melaporkan adanya transaksi pembelian dan/atau penjualan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan senantiasa berupaya mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam aturan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi dan Komisaris.

Policy

The policy for submitting reports of ownership and any changes in share ownership of Board of Directors and Board of Commissioners refers to OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies.

Members of Board of Directors or Board of Commissioners shall report to OJK on their ownership and any changes in their ownership of the Company's shares, either directly or indirectly. Reports to OJK shall be submitted no later than 10 (ten) days from the occurrence of ownership or change in ownership of the Company's shares.

Members of Board of Directors and Board of Commissioners shall provide information to the Company regarding their ownership and any changes in their ownership of the Company's shares. The information is submitted no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of the Company's shares.

Implementation of Intended Policy

Until the end of 2024, all members of Board of Directors and Board of Commissioners did not own Company shares, so the Company did not report any transactions of purchase and/or sale of shares by Board of Directors and Board of Commissioners. The Company always strives to comply with all applicable laws and regulations, including the rules on share ownership of the Company by members of Board of Directors and Board of Commissioners.



KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN ATAS SUKSESI ANGGOTA DIREKSI DAN MANAJEMEN KUNCI

POLICY ON SUCCESSION PLANNING FOR BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGEMENT

Sebagai entitas anak usaha yang berada di bawah pengendalian PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), anggota Pelindo Group, IPCC mengikuti kebijakan perencanaan suksesi anggota Direksi dan manajemen kunci yang ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.

Proses penunjukan dan penggantian anggota Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mempertimbangkan integritas, kompetensi profesional, pengalaman, serta ketersediaan talenta yang sesuai dengan kebutuhan strategis Perseroan.

Di sisi lain, IPCC juga menjalankan program pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk membangun *talent pool* internal, sehingga di masa mendatang mampu berkontribusi dalam proses regenerasi kepemimpinan dan pengisian posisi manajemen kunci.

As a subsidiary entity under the control of PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), a member of the Pelindo Group, IPCC follows the succession planning policy for members of the Board of Directors and key management set by the majority shareholder.

The process of appointing and replacing members of the Board of Directors is carried out with due regard to the principles of good corporate governance, considering integrity, professional competence, experience, and the availability of talent in accordance with the Company's strategic needs.

On the other hand, IPCC also runs a sustainable human resource development program to build an internal talent pool, so that in the future it will be able to contribute to the process of leadership regeneration and filling key management positions.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLE BLOWING SYSTEM

GAMBARAN UMUM

Perseroan mengembangkan berbagai perangkat dan kebijakan internal untuk mendukung hadirnya lingkungan kerja yang sehat, adil, dan profesional, salah satunya dengan membangun dan memperkenalkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*/"WBS") sebagai media pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk melaporkan indikasi pelanggaran atau dugaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Penerapan WBS diharapkan dapat meminimalisir risiko praktik *bad governance* dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak agar mereka lebih tergerak tanpa ada keraguan untuk menyampaikan informasi-informasi pelanggaran yang kemungkinan besar terjadi pada lingkup bisnis Perseroan, sepanjang laporan tersebut dilandasi dengan itikad baik dan bukan merupakan upaya untuk merugikan Perseroan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Penerapan WBS di Perseroan telah dilengkapi dengan Pedoman yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan WBS yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/2/2/IKT-21 Tanggal 1 September 2021 tentang Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar (Pungli) dan penerapan *Whistle Blowing System* (WBS) di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Pedoman tersebut terdiri dari 4 sub-bab, yaitu:

1. Latar belakang dan tujuan
2. Alur Komunikasi Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) serta Pungli
3. Program IPCC Bersih
4. Alur Proses WBS berikut dengan langkah-langkah tindak lanjut pelaporan dan saluran serta media penyampaian

GENERAL DESCRIPTION

The Company develops various internal tools and policies to support a healthy, fair, and professional work environment, one of which is by building and introducing a Whistle Blowing System (WBS) as a reporting media that can be utilized by interested parties to report indications or allegations of violations committed by employees. The implementation of WBS is expected to minimize the risk of bad governance practices by giving an opportunity to all parties so that they are more motivated without any doubt to convey information about violations that are likely to occur in the Company's business scope, as long as the report is based on good faith and is not an attempt to harm the Company in creating a business ecosystem that is clean from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices.

WHISTLE BLOWING SYSTEM MANUAL

The implementation of WBS in the Company has been equipped with the guidelines contained in the Guidelines for Gratification Management, Reporting of Illegal Levies and Implementation of WBS which have been stipulated through the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors Number HK.56/2/2/IKT-21 dated September 1, 2021 concerning Management Gratification, Reporting of Illegal Levies (Extortion) and implementation of the Whistle Blowing System (WBS) within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. The guidelines consist of 4 subchapters, namely:

1. Background and objectives
2. Gratification Control Team/Unit (UPG) Communication Flow and Extortion
3. IPCC Bersih Program
4. WBS Process Flow along with follow-up reporting steps and delivery channels and media



Semua pedoman tersebut ditinjau secara berkala oleh manajemen untuk memastikan kesesuaiannya terhadap dinamika dan disrupsi bisnis yang terjadi.

All these guidelines are reviewed regularly by management to ensure their suitability for the dynamics and business disruption that is occurring.

RUANG LINGKUP WBS

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman WBS, berikut ini adalah lingkup pelaporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain meliputi:

WBS SCOPE

As stated in the WBS Guidelines, the following is the scope of reporting/complaints regarding alleged violations that can be reported through the WBS, including:

Kategori Pelaporan Reporting Category	Penjelasan Explanation
Tindakan curang (tidak adil) Fraudulent (unfair) actions	Tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum. An act that aims to benefit oneself or others, by using a false name or false dignity, by trickery, or a series of lies, or by persuading others to give him/her an advantage in ways that are improper and against the law.
Korupsi Corruption	Tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal dengan tujuan untuk memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki hubungan istimewa dengannya dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Unlawful and unethical actions with the aim of enriching oneself or those with whom one has a special relationship by abusing the position and power entrusted to one.
Pencurian Theft	Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. The act of taking an item, wholly or partially belonging to someone else, with the intention of unlawfully possessing it.
Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan Violation of Company Policies and Regulations	Tindakan yang dilakukan baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perseroan. Actions taken, whether intentional or planned, that are contrary to the Company's internal policies and regulations.
Benturan kepentingan Conflict of Interest	Sebuah situasi dan kondisi karena kedudukan dan jabatan memiliki kewenangan yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak disengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis IPCC. A situation and condition where a person's position and title give them the potential to abuse their authority, whether intentionally or unintentionally, for their personal gain, creating a conflict between personal and/or group and/or family interests and IPCC's economic interests.
Penyuapan (Gratifikasi) Bribery (Gratification)	Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar, seperti menerima sesuatu atau janji, sedangkan seseorang tersebut mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya seseorang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya. An action/activity carried out deliberately and consciously, such as receiving something or a promise, while a person knows or reasonably suspects that giving something or a promise is intended to make the person do something or not do something in their duties, which is contrary to their authority or obligations.
Penggelapan Embezzlement	Tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Actions or activities carried out intentionally and consciously against the law to own something which wholly or partly belongs to another person, which is currently in his or her control, not because of a crime.
Penipuan Fraud	Tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Actions or activities carried out intentionally and consciously with the intention of benefiting oneself or others unlawfully, by using a false name or false dignity with deception, or a series of lies, encouraging other people to hand over something to them, or to give them a debt, or write off receivables.
Pemerasan Blackmail	Kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Activities or actions carried out with the intention of unlawfully benefiting oneself or another person, forcing someone with violence or the threat of violence to give something, which in whole or in part belongs to that person or another person, or in order to create a debt or write off a receivable.
Pungutan Liar (Pungli) Illegal Levies (Extortion)	Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Illegal levies are acts carried out by someone by requesting payment of an amount of money that is not appropriate or not based on the regulations relating to the payment. This is often equated with acts of extortion, fraud or corruption. Illegal levies are also included in the category of office crimes, where the concept of office crimes explains that officials, in order to benefit themselves or others, abuse their power to force someone to give something, to pay or receive payment at a discount, or to do something for themselves.



SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perseroan melakukan sosialisasi WBS secara berkala kepada seluruh insan IPCC agar pemahaman setiap karyawan mengenai fungsi, keberadaan, dan mekanisme kerja WBS semakin mendalam. Kegiatan sosialisasi WBS tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan platform internal yang ada sehingga diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan karyawan. Selain membangun kesadaran internal, IPCC juga melakukan sosialisasi WBS kepada pihak eksternal, salah satunya dengan cara mempublikasikan kebijakan WBS pada situs web Perseroan, dan *whistleblowing system*.

PIHAK PENGELOLA ADUAN

Pengelolaan WBS pada lingkup IPCC menjadi tanggung jawab yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pencegahan dan saluran *whistleblowing* di lingkungan Perseroan. Seluruh laporan yang masuk melalui WBS harus dianalisis oleh Tim UPG dan setiap laporan yang masuk serta telah dianalisis tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan.

SOCIALIZATION AND EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF WHISTLE BLOWING SYSTEM

The Company regularly socializes the WBS to all IPCC personnel so that each employee's understanding of the function, existence and working mechanisms of the WBS becomes deeper. The WBS socialization activity is carried out by optimizing the existing internal platform so that it is hoped that it can reach all levels of employees. Apart from building internal awareness, IPCC also socializes WBS to external parties, one of which is by publishing the WBS policy on the Company's website and the whistle blowing system.

COMPLAINT MANAGEMENT

WBS management within the scope of IPCC is the responsibility of those in charge for implementing the prevention system and whistle blowing channels within the Company. All reports entered through the WBS must be analyzed by the UPG Unit and every report that is entered and has been analyzed is submitted to the Company's Board of Directors.

Tim Unit Pengendali Gratifikasi Gratification Control Unit Team

Ketua Tim Unit Head	Senior Manager Sekretaris Perseroan Senior Manager of Corporate Secretary
Wakil Ketua Tim Vice Unit Head	Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko Senior Manager of Internal Audit and Risk Management
Sekretaris Secretary	Assistant Senior Manager Hukum Assistant Senior Manager of Legal
Anggota Member	Para Senior Manager Perseroan Company Senior Managers

SUB-TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Jika diperlukan, Ketua Tim UPG dapat mengusulkan pembentukan sub-tim dalam menjalankan tugas kelancaran pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS).

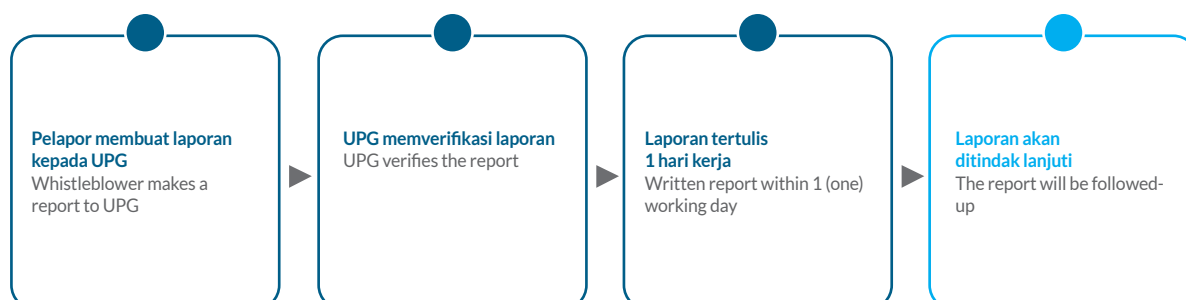
GRATIFICATION CONTROL UNIT SUB-TEAM

If necessary, the UPG Unit Head can propose the formation of a sub-team to carry out the task of smoothly managing the Whistle Blowing System (WBS).

MEKANISME ATAU PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLE BLOWING MECHANISM OR PROCEDURE

Sesuai Laporan yang Diterima As per Report Received



Alur Tindak Lanjut Laporan Report Follow-Up Flow



Terefleksi pada *flow chart* di atas, berikut ini adalah mekanisme atau prosedur pelaporan pengaduan yang harus dipahami dan dilakukan oleh para Pelapor apabila ingin menyampaikan laporan pengaduan mereka melalui saluran WBS Perseroan, yaitu:

- Pelapor menyampaikan laporan pengaduannya kepada Tim UPG dengan isi laporan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Manajemen dapat memberikan jaminan perlindungan terhadapnya. Pengungkapan identitas secara jelas juga bertujuan untuk mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan;
 - Uraian pelanggaran yang dilaporkan;
 - Data pelapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
 - Data terkait tempat kejadian dan waktu kejadian;
 - Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya (bila ada).
- Laporan yang masuk akan diterima oleh Tim UPG dan direkam dalam register pelaporan WBS Perseroan.
- Tim UPG akan menindaklanjuti laporan dalam waktu maksimal 1 hari kerja.
- Laporan dapat ditindaklanjuti apabila:
 - Merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan insan Perseroan;
 - Berdampak terhadap kinerja dan reputasi Perseroan;
 - Tim UPG akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang akan disampaikan oleh pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.
- Laporan yang disampaikan kepada Tim UPG untuk selanjutnya dianalisis oleh Tim Pengendali Internal.
- Laporan Hasil Analisa Tim Pengendali Internal disampaikan kepada Direktur Utama. Setelah itu, Direksi Utama menugaskan Satuan Pengendali Internal (SPI) untuk melakukan proses investigasi.
- Hasil dari proses investigasi yang dilakukan SPI kemudian dilaporkan kembali kepada Direktur Utama.
- Selanjutnya, Divisi Sumber Daya Manusia menentukan *reward* untuk Pelapor dan *punishment* bagi pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah.

Reflected in the flow chart above, the following is a complaint reporting mechanism or procedure that must be understood and carried out by Whistleblowers if they wish to submit their complaint report via the Company's WBS channel, namely:

- Whistleblowers submits his complaint report to UPG Unit with the report contents containing at least the following:
 - Whistleblowers must state his identity so that Management can guarantee protection for him. Disclosure of identity clearly also aims to make it easier to follow up on reports in the event that additional data is needed;
 - Description of the reported violation;
 - Whistleblower's data and other parties involved and their units (if any);
 - Data related to the incident location and time;
 - Supporting documents and/or other evidence (if any).
- Incoming reports will be received by UPG Unit and recorded in the Company's WBS reporting register.
- UPG Unit will follow up on the report within a maximum of 1 working day
- Reports can be followed up if:
 - Is an act of violation involving Company personnel;
 - Impact on the Company's performance and reputation;
 - UPG Unit will prioritize follow-up reports that will be submitted by the reporter who states their identity and is equipped with 2 (two) pieces of supporting evidence.
- Reports submitted to UPG Unit for further analysis by Internal Control Team.
- The Internal Control Team Analysis Result Report is submitted to President Director. After that, President Director assigned the Internal Control Unit (SPI) to carry out the investigation process.
- The results of investigation process carried out by SPI are then reported back to President Director.
- Next, Human Capital Division determines rewards for whistleblowers and punishment for perpetrators of violations who are proven guilty.



MEDIA PELAPORAN WBS

Para Pelapor baik dari pihak eksternal (masyarakat) dan internal (insan IPCC) dapat menyampaikan laporan pengaduan mereka melalui sarana berikut ini:

	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Pelindo Group
Telephone Phone	021-43932251 ext. 211 0811933930	021-27822345
Faksimile Faximile	021-43932251	021-27823456
Surat Elektronik E-Mail	info@indonesiacarterminal.co.id good.governance@indonesiacarterminal.co.id	pelindobersih@whistleblowing.link
Situs Web Website	www.indonesiacarterminal.co.id/pengelolaan-gratifikasi-dan-whistle-blowing-system	www.pelindobersih.whistleblowing.link
Surat Pos Letter	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tim UPG IPCC Jl. Sindang Laut No.101, Cilincing, Jakarta 14110 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk IPCC UPG Team Jl. Sindang Laut No.101, Cilincing, Jakarta 14110	Pelindo Bersih, PO Box 1074, JKS 12010

WBS REPORTING MEDIA

Whistleblowers from both external (community) and internal (IPCC personnel) parties can submit their complaint reports through the following means:

JUMLAH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2024

Tim UPG Perseroan tidak menerima adanya laporan pengaduan terkait dengan tindakan pelanggaran aturan dan/atau kode etik, tindakan gratifikasi atau pun korupsi sejak awal hingga akhir tahun 2024.

NUMBER OF WHISTLE BLOWING REPORTS IN 2024

The Company's UPG Unit did not receive any complaints reports related to violations of rules and/or codes of ethics, acts of gratification or corruption from the beginning to the end of 2024.

No.	Kejadian Mencurigakan Suspicious Incident	Jumlah Laporan Number of Reports
1	Tindakan Curang (Tidak Adil) Fraudulent (Unfair) Actions	-
2	Korupsi Corruption	-
3	Pencurian Thievery	-
4	Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan Violation of Company Policies and Regulations	-
5	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	-
6	Penyuapan/Gratifikasi Bribery/Gratification	-
7	Penggelapan Embezzlement	-
8	Penipuan Fraud	-
9	Pemerasan Extortion	-

EVALUASI PENERAPAN WBS TAHUN 2024

Perseroan menilai bahwa penerapan *Whistle Blowing System* di tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim UPG IPCC telah bertanggung jawab dalam upaya sosialisasi WBS baik secara internal kepada seluruh insan IPCC maupun secara eksternal kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada *customer* dan *vendor*.

EVALUATION OF WBS IMPLEMENTATION IN 2024

The Company assesses that the implementation of *Whistle Blowing System* in 2024 has been running well in accordance with applicable regulations. IPCC UPG Unit has been responsible for the WBS socialization efforts both internally to all IPCC personnel and externally to all stakeholders, especially customers and vendors.



Sepanjang tahun 2024, Tim UPG IPCC juga telah melaksanakan kewajibannya dalam mengelola saluran atau media laporan pengaduan, serta melakukan tindak lanjut apabila terdapat laporan yang diterima.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas operasionalisasi WBS yang dilakukan oleh Tim UPG IPCC selama 2024, dapat dinyatakan bahwa:

1. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui *Customer Care* 0811933930.
2. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui surat elektronik corsec@indonesiacarterminal.co.id dan good.governance@indonesiacarterminal.co.id.
3. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui *Hotline* 021-43932251 ext. 211.
4. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui *WhatsApp Group Customer* Perseroan: IPCC Care.
5. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui situs web www.indonesiacarterminal.co.id.

Dengan tidak adanya laporan pengaduan yang masuk melalui kanal pelaporan pelanggaran yang telah disediakan pada 2024, maka Perseroan menyimpulkan bahwa seluruh insan IPCC telah bertindak serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikad baik dan telah memahami pokok-pokok Kode Etik IPCC dengan baik.

Throughout 2024, IPCC UPG Unit has also carried out its obligations in managing complaint reporting channels or media, as well as carrying out follow-up actions if reports are received.

Based on the evaluation results of WBS operationalization effectiveness carried out by IPCC UPG Unit during 2024, it can be stated that:

1. There are no reports of violations submitted via Customer Care 0811933930.
2. There are no reports of complaints of violations submitted via electronic mail corsec@indonesiacarterminal.co.id and good.governance@indonesiacarterminal.co.id.
3. There are no reports of violations submitted via Hotline 021-43932251 ext. 211.
4. There are no reports of violations submitted via the Company's WhatsApp Group Customer: IPCC Care.
5. There are no reports of violations submitted via the website www.indonesiacarterminal.co.id.

With no complaint reports coming in through the Whistle Blowing channels that have been provided in 2024, the Company concludes that all IPCC personnel have acted and carried out their duties and responsibilities in full good faith and have understood the main points of IPCC Code of Conduct well.



PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional bisnis sehari-hari, Perseroan sangat menyadari bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi suatu aktivitas yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, sebagai perwujudan atas praktik tata kelola yang baik, terutama untuk menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, Perseroan telah memiliki Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang telah diperbarui dan disahkan melalui Peraturan Direksi Nomor: HK.01/28/6/1/PGDN/DIRUT/IKT-24 tanggal 28 Juni 2024.

Pedoman ini mengatur tentang mekanisme, penanggung jawab, dan prinsip-prinsip etika yang wajib dipatuhi dan menjadi landasan penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada lingkup IPCC.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Perseroan umumnya mencakup pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain-lain yang pembiayaannya bersumber dari pendanaan internal atau yang dianggap sebagai dana Perseroan. Pada praktiknya, Perseroan berkomitmen untuk selalu melaksanakan aktivitas pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, adil, dan wajar.

To support the smooth running of daily business operations, the Company is very aware that the procurement of goods and services is an unavoidable activity. Therefore, as an embodiment of good governance practices, especially to avoid potential conflicts of interest, the Company has a Guide to Procurement of Goods and/or Services which has been updated and approved through the Board of Directors Decree Number: HK.01/28/6/1/PGDN/DIRUT/IKT-24 dated June 28, 2024.

These guidelines regulate the mechanisms, responsible parties, and ethical principles that must be obeyed and serve as the basis for organizing goods and services procurement activities within IPCC scope.

The procurement of goods and services carried out in the Company generally includes Procurement of Goods, Construction Work, Consulting Services, and Miscellaneous Services, financing of which comes from internal funding or is considered Company funds. In practice, the Company is committed to always carrying out the procurement of goods and services in an accountable, fair, and reasonable manner.

PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengelola atau penanggung jawab kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan adalah Unit Penyelenggara Pengadaan Perusahaan. Sementara proses pemilihan penyedia/pemasok/vendor dapat dilakukan oleh:

1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2. PT Pelindo Multi Terminal (sebagai *Sub-Holding*)
3. Penyelenggara Pengadaan Perusahaan
4. *Shared Service Centre (SSC)* Bidang Pengadaan
5. Lembaga Profesional.

Adapun tugas dari penyelenggara pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan memberitahukan Daftar Hitam (*Black List*) kepada Induk Perseroan dan *Subholding* serta Pelaku Usaha Terseleksi yang masuk Daftar Hitam (*Black List*);
2. Melaksanakan proses Pemilihan Penyedia yang menjadi kewenangannya;
3. Membuat laporan atas setiap proses Pemilihan Penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Direktur Penyelenggara;
4. Menyimpan dan mengadministrasikan file/dokumen proses Pemilihan Penyedia;
5. Melakukan penanganan keluhan dari Peserta/Calon Penyedia selama Proses Pemilihan Penyedia;

UNIT IN CHARGE FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The manager or unit in charge of procurement of goods and/or services in the Company is the Company's Procurement Management Unit. Meanwhile, process of selecting providers/suppliers/vendors can be carried out by:

1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2. PT Pelindo Multi Terminal (as a *Sub-Holding*)
3. The Company's Procurement Management Unit
4. Procurement Shared Service Centre (SSC)
5. Professional Institutions.

The duties of procurement management unit are as follows:

1. Prepare and notify the Black List to the Parent Company and Subholding as well as Selected Business Actors who are on the Black List;
2. Carry out the Provider Selection process within its authority;
3. Prepare reports on each Provider Selection process and on all processes that are currently being and have been carried out periodically to Managing Director;
4. Storing and administering files/documents for Provider Selection process;
5. Handling complaints from Participants/Prospective Providers during Provider Selection Process;



6. Membuat daftar pencapaian baik (*track record*) Penyedia selama Proses Pemilihan Penyedia.

PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan harus menerapkan prinsip berikut:

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. dengan pengecualian untuk pengadaan barang dan jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan penghitungan semua biaya (*Total Cost of Ownership*);
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia yang berminat;
5. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat;
6. Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat; dan
7. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika dasar sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

6. Creating a list of Provider achievements (*track record*) during Provider Selection Process.

BASIC PRINCIPLES OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

In the Procurement of Goods and Services, the Company must apply the following principles:

1. Efficient means that the Procurement of Goods and Services must be managed to obtain the best and optimal results in a timely manner by using funds and capabilities as optimally as reasonably possible and not only based on the lowest price. An exception is made for the procurement of strategic goods and services that have significant value. An approach to calculating all costs (*Total Cost of Ownership*) can be made.
2. Effective, means that the Procurement of Goods and Services must be in accordance with predetermined needs and can provide maximum benefits in accordance with predetermined targets;
3. Competitive, means that the Procurement of Goods and Services must be open to Providers who meet the requirements and is carried out through fair competition among Providers who are equal and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;
4. Transparent, means all provisions and information regarding the Procurement of Goods and Services, including technical procurement administration requirements, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective Providers, are open to interested Provider participants;
5. Fair and reasonable, means giving equal treatment to all eligible prospective Providers;
6. Openness, means that the Procurement of Goods and Services can be participated in by all qualified Providers; and
7. Accountable, means that it must achieve targets and be accountable so as to avoid potential abuse and irregularities.

ETHICS IN PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES

The parties involved in the process of implementing the Procurement of Goods/Services must adhere to the following basic ethics:

1. Carry out tasks in an orderly manner, full of a sense of responsibility responsibility to achieve the goals, smoothness and accuracy of procurement. purpose of Goods/Services Procurement.
2. Work professionally, independently, and maintain confidentiality of information that by its nature must be confidential to prevent irregularities in the Procurement of Goods and Services.
3. Not influencing each other either directly or indirectly not influence each other either directly or indirectly which results in unfair business competition;



4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/Perseroan;
 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
 8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa, serta secara konsisten menjalankan ISO 37001 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
4. Accept and be responsible for all decisions made in accordance with the written agreement of the parties related parties.
 5. Avoiding and preventing conflicts of interests of related parties, either directly or indirectly, which results in unfair business competition in the procurement of goods and services.
 6. Avoiding and preventing waste and leakage of state/company finances.
 7. Avoiding and preventing abuse of authority and/or collusion; and/or
 8. Not accepting, not offering, or not promising to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates, and anything from or to anyone who is known or suspected to be related to the Procurement of Goods and Services, and/or suspected to be related to the Procurement of Goods and Services, and consistently implement ISO 37001 Regarding Anti-bribery Management System.

KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK

Kebijakan seleksi pemasok tertuang dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perseroan yang telah diperbarui di tahun 2024. Sesuai dengan Pedoman tersebut, kegiatan seleksi pemasok dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya, Tender/seleksi umum dan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas.

Tender/seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia atau pemasok yang dilaksanakan dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya pada 1 (satu) surat kabar skala nasional dan *website* resmi Perseroan guna memberikan informasi kepada Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sementara tender terbatas atau seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia atau pemasok yang dilaksanakan dengan mengundang Pelaku Usaha Terseleksi yang sesuai bidang/sub-bidang di dalam Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT).

Selain dua metode tersebut, berlaku pula metode penunjukan langsung, yaitu metode pemilihan penyedia atau pemasok dengan ketentuan menunjuk 1 (satu) Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria persyaratan Penunjukan Langsung, berdasarkan justifikasi dari Pengguna yang telah disetujui oleh Direktur Pengguna atau Senior Manager Divisi Pengguna atau melalui *beauty contest*.

SUPPLIER SELECTION POLICY

The supplier selection policy is contained in the Guidelines for Procurement of Goods and Services within the Company, which was updated in 2024. In accordance with these Guidelines, supplier selection activities are carried out using several methods, including public tenders/selection and limited tenders/limited selection.

A public tender/selection is a method of selecting providers or suppliers that is carried out by widely announcing at least one national newspaper and the Company's official website in order to provide information to Business Actors who meet predetermined requirements. Meanwhile, limited tender or limited selection is a method of selecting providers or suppliers that is carried out by inviting Selected Business Actors in accordance with the field/sub-field in the List of Selected Business Actors (DPUT).

In addition to these two methods, a direct appointment method also applies, which is the method of selecting a provider or supplier with the provision of appointing 1 (one) Business Actor who meets the criteria for Direct Appointment, based on justification from the User which has been approved by User Director or head of User Division or through a *beauty contest*.

Hingga akhir tahun 2024, Unit Penyelenggara Pengadaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk telah menyelesaikan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan. Jenis-jenis pengadaan yang dilaksanakan secara umum mencakup kebutuhan utama dan rutin untuk menunjang operasional dan kinerja Perseroan. Beberapa di antaranya meliputi pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, *manage service*, jasa konsultasi, jasa sertifikasi alat, pembangunan aplikasi, penyediaan tenaga kebersihan (*cleaning service*), dan layanan pendukung lainnya.

Total nilai pekerjaan dari seluruh paket yang telah diselesaikan hingga akhir 2024 mencapai Rp26.809.827.601,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah), dari total Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE) sebesar Rp28.892.534.048,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).

Selisih antara total nilai pekerjaan dengan total HPS/OE tersebut menunjukkan adanya efisiensi biaya sebesar Rp2.082.706.407,00 (dua miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tujuh rupiah), atau setara dengan 7,21% dari total HPS/OE. Capaian ini mencerminkan efektivitas Unit Penyelenggara Pengadaan dalam mengelola proses pengadaan secara optimal dan efisien.

Dari sisi metode pemilihan penyedia, pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Tender Terbatas: 2 paket pekerjaan;
2. Penunjukan Langsung: 17 paket pekerjaan;
3. Pengadaan Langsung: 20 paket pekerjaan.

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengadaan, Perseroan telah mengimplementasikan aplikasi Pelindo Elektronik *Procurement* (P-Eproc) milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sejak 18 Agustus 2023. Dengan penggunaan sistem P-Eproc ini, seluruh pelaku usaha yang ingin mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan diwajibkan untuk terdaftar dan memiliki *status activated* dalam sistem tersebut.

SURVEI KEPUASAN VENDOR

Perseroan menyelenggarakan survei kepuasan vendor/pemasok dengan tujuan untuk memperoleh masukan konstruktif dari para mitra kerja (*supplier/vendor*) guna mendukung perbaikan dan penyempurnaan proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Perseroan. Adapun tujuan survei tersebut, antara lain:

1. Mengukur nilai indeks kepuasan vendor terhadap layanan dan proses pengadaan Perseroan;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek dalam proses pengadaan barang/jasa yang perlu ditingkatkan;
3. Mengukur nilai indeks *engagement* vendor terhadap hubungan kemitraan dengan Perseroan.

By the end of 2024, the Procurement Unit of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk has completed 39 (thirty-nine) procurement work packages for goods and services within the Company. The types of procurement are generally primary and routine needs to support the Company's operations and performance. Some of them include repair and maintenance work for facilities and infrastructure, managed services, consulting services, equipment certification services, application development, provision of cleaning services, and other supporting services.

The total work value from all packages completed by the end of 2024 reached Rp26,809,827,601.00 (twenty-six billion eight hundred nine million eight hundred twenty-seven thousand six hundred and one rupiah), from the total Owner Estimate Price (HPS/OE) of Rp28,892,534,048.00 (twenty-eight billion eight hundred ninety-two million five hundred thirty-four thousand forty-eight rupiah).

The difference between the total work value and the total HPS/OE shows a cost efficiency of Rp2,082,706,407.00 (two billion eighty-two million seven hundred six thousand four hundred and seven rupiah), or equivalent to 7.21% of the total HPS/OE. This achievement reflects the effectiveness of the Procurement Unit in managing the procurement process optimally and efficiently.

In terms of the provider selection method, the procurement of goods and services in 2024 was carried out through several mechanisms as follows:

1. Limited Tender: 2 work packages;
2. Direct Appointment: 17 work packages;
3. Direct Procurement: 20 work packages.

As part of the digital transformation in procurement, the Company has implemented Pelindo Electronic Procurement (P-Eproc) application owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) since August 18, 2023. With the use of this P-Eproc system, all business actors who wish to participate in the procurement process of goods and services within the Company are required to be registered and have activated status in the system.

VENDOR SATISFACTION SURVEY

The Company conducts a vendor/supplier satisfaction survey with the aim of obtaining constructive input from partners (suppliers/vendors) to support the improvement and refinement of procurement process of goods and/or services within the Company. The objectives of the survey include:

1. Measuring the value of the vendor satisfaction index towards the Company's services and procurement process;
2. Identifying aspects in the procurement process of goods/services that need to be improved;
3. Measuring the value of the vendor engagement index towards the partnership relationship with the Company.



Survei terakhir dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 terhadap 21 Perseroan/koperasi yang merupakan mitra/vendor Perseroan. Proses survei dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu PT Multi Utama Risetindo.

The last survey was conducted on December 20, 2023 to January 5, 2024, against 21 companies/cooperatives that are partners/vendors of the Company. The survey process was carried out by an independent party, namely PT Multi Utama Risetindo.

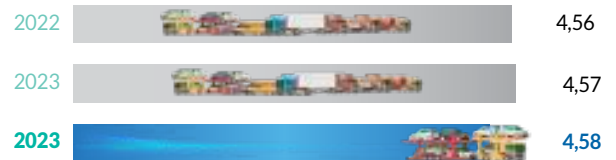
Indeks Kepuasan Penyedia/Vendor

Vendor Satisfaction Index



Indeks Engagement Penyedia/Vendor

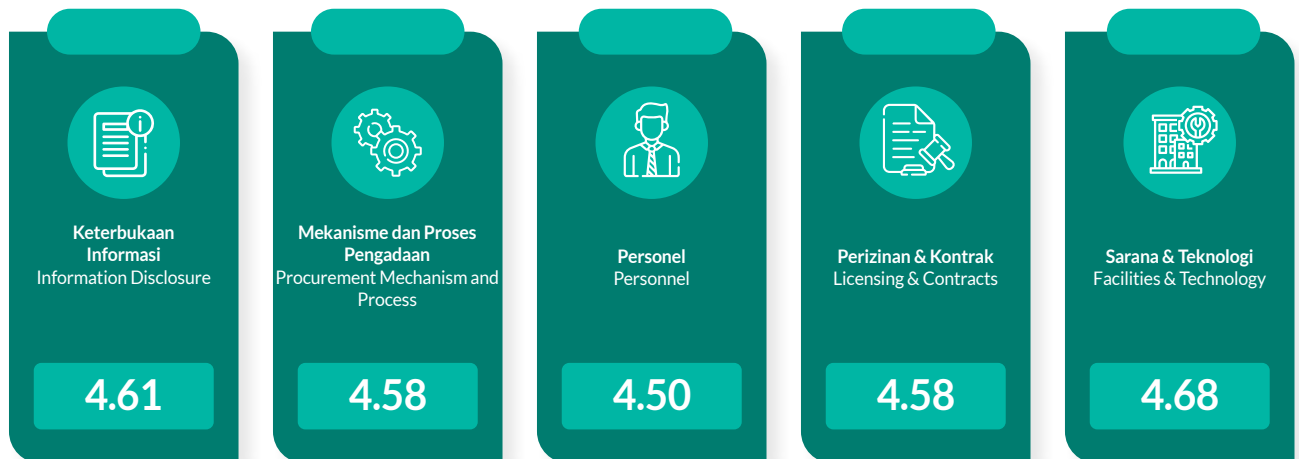
Vendor Engagement Index



Tahun 2023*

*) Perseroan melakukan survei kepuasan penyedia/vendor setiap dua tahun sekali yang dilakukan oleh pihak ketiga independen. Hasil survei tahun 2023 mencapai 4,46 dari skala optimal 5. Di mana skor ini masih relevan untuk digunakan di tahun 2024.

*) The Company conducts a provider/vendor satisfaction survey every two years conducted by an independent third party. The survey result in 2023 reached 4.46 out of an optimal scale of 5. Where this score is still relevant for use in 2024.



KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI DAN ANTI-GRATIFIKASI

ANTI-CORRUPTION AND ANTI-GRATIFICATION POLICY

Kebijakan

Sebagai perusahaan terbuka yang menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip GCG pada pengelolaan bisnisnya, maka Perseroan menyatakan komitmen dan kesungguhan untuk menciptakan organisasi yang bersih yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan Pihak Ketiga, sering kali Perseroan bersinggungan dengan praktik sebuah pedoman khusus yang mengatur tentang pengendalian atas praktik tersebut. Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi disosialisasikan secara berkala kepada seluruh insan Perseroan agar semua karyawan memiliki pemahaman yang sama dan kuat tentang bagaimana seharusnya mereka menyikapi tindakan. Dengan mematuhi pedoman ini, setiap karyawan dapat terhindar dari tindakan pidana suap.

Perseroan memastikan seluruh aktivitas operasional bisnisnya dijalankan secara profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan dalam menyempurnakan kualitas praktik GCG agar celah-celah yang memungkinkan terjadinya praktik KKN oleh insan Perseroan dapat terdeteksi sesegera mungkin.

Secara paralel, Perseroan juga terus mempersiapkan perangkat kebijakan dan kapasitas internal agar praktik anti-korupsi dan anti-gratifikasi di lingkungan IPCC dapat berjalan efektif.

Kebijakan Anti Korupsi yang diterapkan di Perseroan juga telah termaktub dalam Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Perseroan memiliki tekad, komitmen dan kesungguhan untuk menjadi sebuah entitas usaha yang unggul, bersih, berintegritas dan profesional.

Sebagai bentuk kesungguhan Direksi dan Dewan Komisaris dalam menegakkan program anti-korupsi yang kuat di lingkungan IPCC, maka Perseroan menghimbau agar semua pihak yang melihat atau mengetahui adanya tindakan-tindakan yang mengarah pada praktik KKN di Perseroan dapat segera melaporkan hal tersebut melalui media WBS yang dikelola oleh Tim UPG IPCC. Laporan pelanggaran wajib disampaikan kepada Tim UPG IPCC selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima.

Di samping itu, laporan pelanggaran terkait korupsi dan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada Komipi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinuatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di www.gol.kpk.go.id

Policy

As a public Company that upholds the application of GCG principles in its business management, the Company declares its commitment and sincerity to create a clean organization that is free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices as mandated in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes.

In establishing a harmonious working relationship with third parties, the Company often comes into contact with the practices of a special guideline that regulates the control of these practices. The Gratification Management Policy is socialized regularly to all Company personnel so that all employees have the same and strong understanding of how they should respond to their actions. By complying with these guidelines, every employee can avoid criminal acts of bribery.

The Company ensures that all its business operational activities are carried out professionally, independently, with integrity and sustainably. This is done as one of the Company's efforts to improve the quality of GCG practices so that gaps that allow KKN practices by Company personnel can be detected as soon as possible.

In parallel, the Company also continues to prepare policy tools and internal capacity so that anti-corruption and anti-gratification practices within IPCC can run effectively.

The Anti-Corruption Policy implemented in the Company is also contained in the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines. The Company has determination, commitment and sincerity to become a business entity that is superior, clean, has integrity and professionalism.

As a form of earnestness of Board of Directors and Board of Commissioners in upholding a strong anticorruption program within IPCC, the Company urges all parties who see or are aware of any actions that lead to KKN practices in the Company to immediately report this matter through the managed WBS media by IPCC UPG Team. Violation reports must be submitted to IPCC UPG Unit no later than 7 (seven) working days from the date the Gratification is received by handing over the object of the gratification received.

In addition, reports of violations related to corruption and gratification can also be submitted to the Corruption Eradication Commission (KPK) via the Online Gratification (GOL) application. The Gratification Report will be processed by the Corruption Eradication Commission n dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di www.gol.kpk.go.id



PRINSIP DASAR PENGENDALIAN PRAKTIK KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI LINGKUP PERUSAHAAN

Prinsip dasar pengendalian praktik korupsi dan gratifikasi adalah landasan atau panduan utama yang menjadi arah kebijakan dan tindakan Perseroan dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik-praktik tidak etis, seperti:

1. Korupsi, berupa penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang bisa memengaruhi objektivitas dan integritas seseorang dalam menjalankan tugasnya.
3. Suap, *kickbacks*, dan *fraud*, yaitu semua bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan etika dan hukum.

Pengendalian praktik-praktik yang tidak etis tersebut dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, program, dan prosedur yang terstruktur dan berkelanjutan, antara lain:

1. Penerapan Kebijakan Antikorupsi dan Antigratifikasi, yang menjadi pedoman bagi seluruh insan IPCC dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab;
2. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat guna memitigasi potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan, pelayanan, maupun kegiatan operasional lainnya;
3. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada karyawan mengenai etika bisnis, kebijakan antikorupsi, serta kewajiban pelaporan gratifikasi dan dugaan pelanggaran lainnya;
4. Pemberlakuan sistem pelaporan dugaan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) yang memberikan ruang aman bagi pelapor untuk menyampaikan indikasi praktik korupsi, penyuapan, gratifikasi, atau pelanggaran kode etik lainnya tanpa rasa takut terhadap pembalasan;
5. Penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk melalui penggunaan sistem elektronik (*e-procurement*) guna meminimalkan interaksi langsung yang berisiko membuka celah penyimpangan;
6. Pengawasan dan evaluasi berkala oleh unit pengawasan internal guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan serta menindaklanjuti setiap laporan dan temuan terkait potensi penyimpangan.

Melalui penerapan prinsip dan mekanisme pengendalian tersebut, IPCC berupaya menciptakan budaya kerja yang bersih, profesional, serta bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi. Komitmen ini juga merupakan bagian dari upaya IPCC dalam menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat dan beretika di lingkungan industri kepelabuhanan.

BASIC PRINCIPLES OF CONTROLLING CORRUPTION AND GRATUITY PRACTICES WITHIN THE COMPANY

The basic principles for controlling corruption and gratification practices serve as the main foundation or guidance directing the Company's policies and actions in preventing, detecting, and addressing unethical practices, such as:

1. Corruption, which involves the abuse of power or position for personal gain.
2. Gratification, referring to the giving of money, goods, or facilities that could influence a person's objectivity and integrity in performing their duties.
3. Bribery, kickbacks, and fraud, encompassing all forms of misconduct that violate ethics and the law.

The control of these unethical practices is carried out through structured and continuous policies, programs, and procedures, including:

1. Implementation of Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies, serving as guidelines for all IPCC personnel to perform their duties and responsibilities with honesty, transparency, and accountability;
2. Enforcement of a strong internal control system to mitigate potential deviations in procurement processes, services, and other operational activities;
3. Conducting regular awareness and education programs for employees on business ethics, anti-corruption policies, and the obligation to report gratifications and other suspected violations;
4. Implementation of a Whistleblowing System (WBS) that provides a safe channel for whistleblowers to report indications of corruption, bribery, gratification, or violations of the code of ethics without fear of retaliation;
5. Applying principles of transparency and accountability in the procurement of goods and services, including the use of electronic systems (*e-procurement*) to minimize direct interactions that could create opportunities for misconduct;
6. Periodic monitoring and evaluation by the internal oversight unit to ensure the effectiveness of policy implementation and to follow up on any reports and findings related to potential misconduct.

Through the implementation of these principles and control mechanisms, IPCC strives to foster a clean, professional work culture that is free from corruption and gratification practices. This commitment is also part of IPCC's efforts to ensure business sustainability, strengthen stakeholder trust, and support the creation of a healthy and ethical business climate within the port industry environment.

KLASIFIKASI GRATIFIKASI DAN MEKANISME PELAPORANNYA

1. Menerima barang/jasa yang terindikasi objek Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi dapat diidentifikasi secara mandiri oleh karyawan sesuai dokumen gratifikasi Perseroan. Identifikasi penerimaan barang dapat dikonsultasikan langsung kepada Tim memastikan pemberian merupakan objek gratifikasi karyawan yang telah menerima gratifikasi dapat langsung melaporkan penerimaan gratifikasi.

Laporan Gratifikasi disampaikan secara *online* melalui aplikasi Gratifikasi Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dilihat di <https://gol.kpk.go.id/>

2. Mengisi Form Gratifikasi dan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima

Karyawan dapat juga melaporkan hasil penerimaan gratifikasi kepada Tim UPG dengan mengisi *Form* Gratifikasi selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Pelaporan gratifikasi beserta penyerahan objek gratifikasi yang telah diterima.

Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kedaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud.

3. Membuat laporan non-gratifikasi

Jika ternyata laporan karyawan atas pemberian yang diterimanya tidak masuk dalam objek gratifikasi maka Tim UPG membuat laporan atas hasil klarifikasi.

4. Mengembalikan barang ke karyawan terkait

Tim UPT mengembalikan barang yang telah dilaporkan karyawan berdasarkan Form Gratifikasi yang diisi dan diserahkan ke Tim UPG.

5. Membuat laporan gratifikasi

Tim UPG menerima seluruh laporan gratifikasi dari Pegawai dan menyusun laporan gratifikasi serta hasil klarifikasi terhadap penerimaan barang. Untuk barang dalam kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ke KPK, maka Tim UPG dapat langsung memutuskan untuk menyalurkan barang gratifikasi ke pihak yang membutuhkan sesuai ketentuan KPK.

GRATIFICATION CLASSIFICATION AND REPORTING MECHANISM

1. Receive goods/services that are indicated as Gratification objects

Receiving gratuities can be identified independently by employees according to the Company's gratification documents. Identification of receipt of goods can be consulted directly with the Team to ensure that the gift is an object of gratification. Employees who have received gratification can immediately report receipt of gratification.

Gratification reports are submitted online via the Gratification application. Gratification reports will be processed by the KPK within 30 (thirty) days when the report is declared complete and received by the KPK. For more information, see <https://gol.kpk.go.id/>

2. Filling out the Gratification Form and submit the object of gratification received

Employees can also report the results of receiving gratuities to the UPG Team by filling in the Gratification Form no later than 7 working days after receiving the gratification. Gratification reporting along with delivery of gratification objects that have been received.

For receipt of Gratification which are goods that expire quickly (for example: food and drink), it can be handed over to the Social Institution by submitting proof of handover to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the date of receipt of the Gratification as intended.

3. Making a non-gratification report

If it turns out that the employee's report regarding the gift they received is not included in the gratification object, the UPG Team will make a report on the clarification results.

4. Return the goods to the relevant employee

The UPT Team returns items that have been reported by employees based on the Gratification Form which is filled in and submitted to the UPG Team.

5. Making a gratification report

The UPG Team receives all gratification reports from employees and prepares gratification reports as well as clarification results regarding the receipt of goods. For items in the gratification category that do not have to be reported to KPK, the UPG Team can immediately decide to distribute gratuity items to parties who need them according to KPK regulations.



Penyaluran barang oleh Tim UPG disertai dengan bukti penyaluran barang.

6. Melaporkan hasil penyaluran barang gratifikasi ke KPK
Setelah barang disalurkan, Tim UPG melaporkannya bersama dengan bukti penyaluran barang. Laporan gratifikasi harus disampaikan secara *online* dan akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi KPK di <https://gol.kpk.go.id/>.
7. Menunggu hasil ketetapan KPK oleh Tim UPG
Setelah laporan selesai dilakukan dan lengkap sesuai dengan ketentuan KPK, Tim UPG akan menunggu hasil ketetapan dari KPK.
8. Melaksanakan hasil ketetapan KPK oleh Tim UPG
Berdasarkan hasil ketetapan KPK, Tim UPG akan menindaklanjuti seluruh putusan dan mempersiapkan bukti hasil tindakan yang berlaku.
9. *Monitoring* dan Evaluasi efektivitas penanganan Gratifikasi EVP Sekretariat Perseroan secara rutin melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan gratifikasi bersama dengan Tim UPG.
10. Menyalurkan barang gratifikasi oleh karyawan
Karyawan dapat langsung menyalurkan barang yang diterima yang wajib dilaporkan ke KPK. Barang dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan sesuai ketentuan KPK, maka dapat diserahkan kepada lembaga sosial dengan disertai bukti tanda serah terima.

SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI TAHUN 2024

Perseroan memiliki pedoman gratifikasi, pungutan liar (pungli) dan *Whistle Blowing System* (WBS) yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Perseroan, maka Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

1. Pemahaman terhadap Pedoman Pengendalian Internal harus dijadikan acuan oleh seluruh insan IPCC maupun oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bebas dari praktik KKN dan IPCC bersih.

The distribution of goods by the UPG Team is accompanied by proof of distribution.

6. Report the distribution of gratuities to KPK
After the goods are distributed, the UPG Team reports it along with proof of distribution of the goods. Gratification reports must be submitted online and will be processed by the KPK within 30 working days after the report is declared complete and received by the KPK. For further information, visit the official KPK website at <https://gol.kpk.go.id/>.
7. Waiting for the results of KPK decision by UPG Team
After the report is completed and complete in accordance with KPK regulations, the UPG Team will wait for the results of KPK decision.
8. Implementing the results of KPK decisions by the UPG Team
Based on the results of the KPK's decision, the UPG Team will follow up on all decisions and prepare evidence of the applicable actions results.
9. Monitoring and evaluating the effectiveness of handling gratification
EVP Corporate Secretariat routinely monitors and evaluates the effectiveness of handling gratuities together with the UPG Team.
10. Distributing gratuity by employees
Employees can directly distribute goods received which must be reported to the Corruption Eradication Commission. Goods in categories that do not have to be reported according to KPK regulations can be handed over to social institutions accompanied by proof of handover.

SOCIALIZATION OF ANTICORRUPTION POLICY IN 2024

The Company has guidelines for gratuities, illegal levies (extortion) and a Whistle Blowing System (WBS) that all employees must comply with. In order to narrow the range of differences in each individual's understanding of the implementation of Gratification Control Guidelines in the Company, the Company continuously carries out outreach activities to internal and external parties, with the provisions:

1. An understanding of Internal Control Guidelines must be used as a reference by all IPCC personnel and by all stakeholders in realizing the management of the Company that is free from corrupt, collusive, and nepotistic practices and IPCC Bersih.



2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan agar seluruh karyawan mengambil sikap tegas terhadap praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi di Perseroan.
3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan oleh Perseroan sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta bebas dari aktivitas yang dapat merugikan Perseroan.
4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh insan IPCC maupun pihak lain mengetahui adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, IPCC telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi di Lingkungan Perseroan. Salah satu kegiatannya adalah Sosialisasi IPCC Bersih dan Peluncuran Saluran WBS Pelindo dengan Tema "Berani Lawan dan Laporkan Korupsi, Untuk Indonesia maju" dengan Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Perwakilan *Group Head* Manajemen Resiko dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Acara sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 dan dihadiri lebih dari 80 (delapan puluh) peserta baik dari Pihak Eksternal dan Internal Perseroan.

2. For internal parties, socialization is directed so that all employees take a firm stance towards the practice of accepting and giving gratuities in the Company.
3. For external parties, socialization is directed at providing an understanding of the Gratification Control Guidelines established by the Company so that a healthy business process is created and free from activities that could harm the Company.
4. Continuous outreach is carried out to facilitate and ensure that all IPCC personnel and other parties are aware of Gratification Control Guidelines.

In order to implement Good Corporate Governance, IPCC has organized several socialization activities in the Company's Environment. One of the activities is the Socialization of IPCC Bersih and the Launch of Pelindo WBS Channel with the Theme "Dare to Fight and Report Corruption, for a Progressive Indonesia" with Speakers from the Corruption Eradication Commission (KPK) and Representatives of the Group Head of Risk Management and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This socialization event was held on December 4, 2024 and attended by more than 80 (eighty) participants from both External and Internal Parties of the Company.



KEBIJAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA *INSIDER TRADING*

POLICY TO PREVENT *INSIDER TRADING*

Perseroan telah menetapkan Kebijakan *Insider Trading* yang diberlakukan melalui Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-2024 tentang Kebijakan Pencegahan Transaksi oleh Orang Dalam (*Insider Trading*) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Insider trading adalah Kegiatan perdagangan atau jual-beli efek Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada saham, *right/HMETD*, obligasi, surat utang jangka menengah oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam (Pihak Internal Perseroan), yang mana pemanfaatan Informasi Orang Dalam tersebut untuk mencari keuntungan di pasar modal dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.

Oleh karena itu, Perseroan melarang pemanfaatan Informasi pihak Internal/orang dalam untuk mencari keuntungan di pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan;
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan; atau
3. Memberi Informasi Pihak Internal/Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan Informasi Pihak Internal/Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan.

Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya yang memiliki akses terhadap informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia, bertanggung jawab untuk:

1. Melindungi Informasi Rahasia Perseroan, baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Menggunakan informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun khusus, hanya untuk kepentingan Perseroan; dan
3. Tidak melakukan penyebaran informasi yang bersifat rahasia, baik secara lisan maupun tulisan, kepada pihak lain berupa perseorangan, Perseroan, asosiasi, atau badan hukum lainnya.

The Company has established an Insider Trading Policy, enacted through the Regulation of Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-2024 concerning the Prevention Policy of Insider Trading at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Insider trading refers to the trading or buying and selling of the Company's securities, including but not limited to shares, *rights/HMETD*, bonds, or medium-term notes, by parties possessing Insider Information (Internal Parties of the Company), where the use of such Insider Information for personal gain in the capital market is categorized as an illegal activity.

Therefore, the Company prohibits the use of Insider/Internal Party information for personal gain in the capital market, including but not limited to the following actions:

1. Purchasing or selling the Company's securities;
2. Influencing others to purchase or sell the Company's securities; or
3. Providing Insider/Internal Party information to other parties who might reasonably be expected to use the information for purchasing or selling the Company's securities.

Internal Parties/Insiders of the Company, in accordance with their authority and scope of work and who have access to the Company's information, whether public or confidential, are responsible for:

1. Protecting the Company's Confidential Information, both while still employed and after the employment or contractual relationship with the Company has ended, in accordance with applicable laws and regulations;
2. Using the Company's information, whether public or confidential, solely for the interests of the Company; and
3. Refraining from disseminating confidential information, either verbally or in writing, to individuals, companies, associations, or other legal entities.



Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi selain daripada kepentingan Perseroan, atas setiap pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan Perseroan. Setiap Orang Dalam Perseroan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perdagangan (membeli ataupun menjual) Efek Perusahaan selama Periode *Black Out* atau periode lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dari waktu ke waktu, sehubungan dengan penyampaian keterbukaan mengenai tindakan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pihak yang dengan sengaja melawan hukum berupaya untuk memperoleh, atau pada akhirnya memperoleh Informasi Pihak Internal/Orang Dalam, dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi Pihak Internal Perseroan/Orang Dalam sebagaimana dimaksud di atas.

Contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara mencuri;
2. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan
3. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan praktik terbaik (*best practice*) GCG, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi material oleh pihak internal Perseroan. Kebijakan *Insider Trading* IPCC berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan internal, khususnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat struktural, serta karyawan lainnya yang memiliki akses terhadap informasi material Perseroan. Perseroan juga berupaya kuat meminimumkan peluang *Insider trading* antara lain dengan cara :

1. Memisahkan secara tegas data atau informasi yang dikategorikan Informasi Pihak Internal/Orang Dalam dengan data atau informasi yang bersifat publik;
2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud; dan
3. Menandatangani *non-disclosure agreement* pada saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Internal Parties/Insiders of the Company are prohibited from engaging in actions that create conflicts of interest and from taking personal advantage other than for the benefit of the Company, in any decision-making and/or implementation carried out for the Company. Any Insider is not permitted to engage in trading activities (buying or selling) of the Company's securities during a Blackout Period or any other period as determined by the Company's Board of Directors from time to time, in connection with the disclosure of corporate actions conducted by the Company.

Any party that unlawfully attempts to obtain, or ultimately obtains, Insider Information is subject to the same prohibitions that apply to the Company's Internal Parties/Insiders as mentioned above.

Examples of unlawful acts include:

1. Attempting to obtain Insider Information by stealing;
2. Attempting to obtain Insider Information by persuading an insider; and
3. Attempting to obtain Insider Information through violence or threats.

This policy is part of the implementation of best practices in Good Corporate Governance (GCG), aimed at preventing the misuse of material information by the Company's internal parties. IPCC's Insider Trading Policy applies to all internal stakeholders, especially members of Board of Directors, Board of Commissioners, structural officers, and other employees who have access to the Company's material information. The Company also strives to minimize insider trading opportunities, including by:

1. Clearly separating data or information categorized as Insider/ Internal Party Information from public information;
2. Dividing tasks and responsibilities for the management of such information; and
3. Signing a non-disclosure agreement when engaging in cooperation with third parties.



PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

IMPLEMENTATION OF STATE OFFICIAL WEALTH REPORTING (LHKPN)

Sebagai anak usaha BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, maka anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat struktural Perseroan dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara sehingga berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE) owned by the State through the Indonesian Government, members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and structural officials are categorized as State Officials and are therefore obliged to report and declare their assets before and after taking office. This provision is regulated in Law Number 28 of 1999 concerning Implementation of a Clean State Free from Corruption, Collusion and Nepotism.

PELAPORAN LHKPN PERUSAHAAN

Kebijakan pelaporan LHKPN IPCC telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/5/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam peraturan tersebut, pihak yang wajib melaporkan LHKPN adalah Direksi dan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

COMPANY LHKPN REPORT

IPCC LHKPN reporting policy has been ratified through the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decree No. HK.56/3/5/IKT-22 dated December 19, 2022 concerning Wealth Reporting Guidelines for Board of Commissioners and Board of Directors. In this regulation, the parties required to report the LHKPN are the Board of Directors and Officials 1 (one) level below the Board of Directors.

PENGELOLA LHKPN

Pengelolaan LHKPN di IPCC dilakukan oleh Senior Manager Sekretaris Perusahaan

LHKPN MANAGEMENT

The LHKPN management in IPCC is carried by the Senior Manager of Corporate Secretary.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT TAHUN 2024

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perseroan yang berstatus wajib lapor di tahun 2024, yaitu level Dewan Komisaris dan Direksi dengan jumlah wajib lapor sebanyak 6 (enam) orang dan seluruh wajib lapor (100%) telah menyerahkan LHKPN kepada regulator.

OFFICIALS' LHKPN TRANSPARENCY IN 2024

Below is the transparency of LHKPN submission of Company officials with mandatory reporting status in 2024, i.e. the level of Board of Commissioners and Board of Directors with a total of 6 (six) mandatory reporters and all mandatory reporters (100%) have submitted LHKPN to the regulator.



Lewat Pejabat Office Position	Jumlah Wajib Laporkan Number of Mandatory Reports	Jumlah yang Sudah Melaporkan Number of Persons Who Have Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	3	100
Direksi Board of Directors	3	3	100

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

DONATION TO POLITICAL ACTIVITY

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak pernah mengikuti aktivitas perpolitikan dan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

Throughout 2024, the Company has never participated in any political activities and has never provided funds for any political parties.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

POLICY FOR DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS IF ENGAGED IN FINANCIAL CRIMES

Kebijakan pengunduran diri maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diatur secara jelas di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun 2024 yang telah disetujui dan ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The policy of resignation and dismissal of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company has been clearly regulated in the Company's Articles of Association and the 2024 Board Manual of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk which has been approved and signed jointly by Board of Commissioners and Board of Directors.



TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

TRANSPARENCY ON BAD GOVERNANCE PRACTICES

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak mendapat laporan terkait aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sepanjang tahun 2024, IPCC tidak memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan. IPCC berupaya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Pengelolaan pajak di Perseroan diemban oleh Senior Manager Keuangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Bertanggung jawab terhadap analisa pengaruh dari regulasi pajak terhadap Perseroan dan pembayaran serta pelaporan pajak;
2. Melakukan evaluasi pajak Perseroan seperti pelaksanaan audit pajak, penerapan ketentuan pajak dan sengketa pajak Perseroan;
3. Bertanggung jawab audit laporan keuangan Perseroan untuk mendukung pencapaian target sesuai dengan tugasnya.

Hingga akhir 2024, kontribusi Perseroan kepada negara sebesar Rp100.695 juta melalui pembayaran pajak, mengalami penurunan 10% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp124.149 juta. Adapun rinciannya sebagai berikut:

	2024 (Rp-juta) Rp-million)	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
		(Rp-juta) Rp-million)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Pajak Penghasilan Income Tax					
PPh 21	16.377	11.814	4.563	16%	↑
PPh 23	3.966	3.210	756	11%	↑
PPh 25	36.213	38.827	(2.614)	(3%)	↓
PPh 4 (2)	1.235	48.853	(47.618)	(95%)	↓
PPh 26	771	0	771	100%	↑
Jumlah Setoran Pajak Penghasilan Amount of Income Tax Deposits	58.561	102.704	(44.143)	(27%)	↓
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value Added Tax (VAT)	34.463	14.262	20.201	41%	↑

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES POLLUTING THE ENVIRONMENT

Throughout 2024, the Company received no reports regarding the Company's activities that pollute the environment.

DISCLOSURE OF TAX OBLIGATIONS FULFILLMENT

Throughout 2024, IPCC has no cases related to taxation. IPCC strives to fulfill its obligations as a taxpayer. Tax management in the Company is carried out by the Senior Manager of Finance, who has duties and responsibilities, including

1. Responsible for analyzing the impact of tax regulations on the Company and tax payments and reporting;
2. Conducting evaluations of the Company's taxes such as implementing tax audits, implementing tax provisions and the Company's tax disputes;
3. Responsible for auditing the Company's financial statements to support the achievement of targets in accordance with its duties.

Until the end of 2024, the Company's contribution to the state amounted to Rp100.695 million through tax payments, an decrease of 10% from the previous year, amounting to Rp124.149 million. The details are as follows:

	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	(Rp-juta) Rp-million	(Rp-juta) Rp-million	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Pesentase (%) Percentage (%)	
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land and Building Tax (PBB)	7.671	7.183	488	3%	↑
Jumlah Setoran Pajak Amount of Tax Deposits	100.695	124.149	(23.454)	(10%)	↓

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Informasi, analisis, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan periode 2024 dan 2023 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja. Laporan Keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan yang tertera dalam PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan Manajemen serta berdasarkan segmen geografis, Perseroan mengelompokkan segmen operasi berdasarkan jenis usaha dan geografis, seperti yang telah ditampilkan dalam Laporan Keuangan Audit tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang;
2. Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas;
3. Segmen geografis.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan IPCC baik yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

INCOMPATIBILITY IN THE PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The information, analysis and discussion of performance in this annual report refers to the Company's Financial Report for the 2024 and 2023 periods, each of which has been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm. The Company's Financial Reports are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Accountants Association and Capital Market Regulations that applies, among other things, Regulation of the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning Guidelines for Presenting Financial Reports, Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies.

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL STATEMENT

In accordance with what is stated in PSAK No. 5 (2015 Adjustments) concerning Operational Segments and for the purposes of Management and based on geographic segments, the Company groups operating segments based on type of business and geography, as shown in the 2024 Audited Financial Report which consists of:

1. Terminal Services and Goods Services;
2. Miscellaneous Services, Facilities and Utility Operations;
3. Geographic segments.

CONFORMITY OF ANNUAL REPORT BOOKS AND DIGITAL ANNUAL REPORTS

IPCC Annual Report, whether submitted to shareholders, investors, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.





PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan terus berupaya dalam memenuhi rekomendasi Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pada Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Berikut uraian penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di lingkup IPCC:

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE ASPECTS AND PRINCIPLES IN ACCORDANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY PROVISIONS

The Company continues to strive to fulfill the recommendations of OJK Regulation no. 21/POJK.04/2014 concerning Guidelines for Implementing Public Company Governance and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines.

In Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines includes 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 (twenty five) recommendations for implementing aspects and principles of good corporate governance. Recommendations for implementing aspects and principles of good corporate governance in the Governance Guidelines are standards for implementing aspects and principles of good corporate governance that must be implemented by the Company to implement governance principles. The following is a description of the implementation of the Public Company Governance Guidelines within the scope of the IPCC:

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
1	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; Aspect 1: Public Company Relationship with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights;	

Prinsip 1
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS
Principle 1
Increasing the Value of Holding GMS

Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.
Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes, both openly and privately, that prioritize independence and the interests of shareholders.

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.

All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.



	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>. Each share with voting rights issued has one voting right (<i>one share one vote</i>). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially when making decisions by collecting votes. However, the decision-making mechanism by means of voting, both openly and privately, has not been regulated in detail. Public Companies are recommended to have voting procedures in making decisions on a GMS agenda. The voting procedure must maintain the independence or freedom of shareholders. For example, voting is done openly by raising hands in accordance with the choice instructions offered by the chairman of the GMS. Meanwhile, closed voting is carried out on decisions that require confidentiality or at the request of shareholders, by using voting cards or by using electronic voting.	Telah terpenuhi. RUPS Tahunan Perseroan dilakukan secara sirkuler sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Comply. The Company's Annual GMS is conducted circularly in accordance with the procedures regulated in the Company's Articles of Association.
	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. The presence of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of Public Companies aims to ensure that each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners can pay attention to, explain and answer directly problems that occur or questions raised by shareholders regarding the agenda at the GMS.	Telah terpenuhi. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menghadiri RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 10 Juni 2024 Comply. All members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners attended the Annual GMS which was held on June 10, 2024



Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation

Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.

Prinsip 2
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

Principle 2
Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.

Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
Public Companies have a communication policy with shareholders or investors.

Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.
The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.

II	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners	

Prinsip 3
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
Principle 3
Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
Determining the number of members of the Board of Commissioners considering the conditions of the Public Company.



	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. Public Companies are required to prepare a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and a foreign language (at least in English), and announce it 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is via the Public Company Website. The availability of a summary of the GMS minutes on the Public Company Website provides an opportunity for shareholders who are not present to obtain important information in holding the GMS easily and quickly. Therefore, the provisions regarding the minimum period for the availability of a summary of the GMS minutes on the Website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain this information.	Telah terpenuhi. Ringkasan risalah RUPS selama 3 tahun terakhir tersedia di situs resmi Perseroan: www.indonesiacarterminal.co.id/risalahrups-ringkasan-risalah-rups Comply A summary of the minutes of the GMS for the last 3 years is available on the Company's official website: www.indonesiacarterminal.co.id/risalahrups-ringkasan-risalah-rups
	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. There are the communication between Public Companies and shareholders or investors is intended to ensure that shareholders or investors gain a clearer understanding of information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as Implementation of Public Company Governance. Apart from that, shareholders or investors can also submit input and opinions to the management of the Public Company. Communication policy with shareholders or investors shows the Public Company's commitment to implementing communication with shareholders or investors. This policy may include strategies, programs and timing for implementing communications, as well as guidelines that support shareholders or investors in participating in such communications.	Telah terpenuhi. Perseroan secara rutin menyelenggarakan rapat dengan para pemegang saham untuk memberikan informasi terkini tentang kondisi dan kinerja Perseroan. Comply The Company regularly holds meetings with shareholders to provide the latest information about the Company's condition and performance.
	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. Disclosure of communication policies is a form of transparency regarding the Public Company's commitment to providing equality to all shareholders or investors regarding the implementation of communications. Disclosure of this information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in implementing Public Company communication programs.	Telah terpenuhi. Saat ini, Perseroan belum memiliki kebijakan yang dimaksud. Comply Currently, the Company does not yet have the policy in question.
	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. The number of members of the Board of Commissioners can influence the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners. Determining the number of members of the Board of Commissioners of a Public Company must refer to the provisions of applicable laws and regulations, consisting of at least 2 (two) people based on the provisions of OJK regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Apart from that, it is also necessary to consider the conditions of Public Companies, which include, among other things, characteristics, capacity and size, as well as achieving goals and meeting different business needs between Public Companies. However, the number of members of the Board of Commissioners that is too large has the potential to disrupt the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' functions.	Telah terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPCC telah mempertimbangkan kondisi dan dinamika bisnis Perseroan. Comply The number of members of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2023 is 3 (three) people. The number and composition of the IPCC Board of Commissioners has taken into account the conditions and dynamics of the Company's business.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of members of the Board of Commissioners considering the diversity of skills, knowledge and experience required.
4	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.
		Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.



Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Public Company. These characteristics can be reflected in determining the skills, knowledge and experience required in carrying out supervisory duties and providing advice by the Board of Commissioners of a Public Company. A composition that consider the needs of Public Companies is a positive thing, especially regarding decision making in the context of implementing the supervisory function which is carried out by considering various broader aspects.	Telah terpenuhi. Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini. Comply. The composition of the members of the Company's Board of Commissioners has taken into account diversity of expertise, knowledge and experience. This disclosure can be seen in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.
Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. The Board of Commissioners' Self Assessment Policy is a guideline used as a form of accountability for the collegial assessment of the Board of Commissioners' performance. Self Assessment or self-assessment is carried out by each member to assess the implementation of the performance of the Board of Commissioners in a collegial manner, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this Self Assessment, it is hoped that each member of the Board of Commissioners can contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis. This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, the timing of their implementation on a regular basis, and the benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function of the Public Company, where the existence of this function is required in the Regulations. OJK regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Telah terpenuhi. Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini. Comply The composition of the members of the Company's Board of Commissioners has considered diversity of expertise, knowledge and experience. This disclosure can be seen in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.
Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris. Disclosure of the Self Assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of their duties, but also, to provide confidence, especially to shareholders or investors regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism for the performance of the Board of Commissioners.	Telah terpenuhi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh NRC. Comply The performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out by the NRC.
Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. The policy of resigning members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Companies, so that the company's integrity will be maintained. This policy is needed to help the legal process run smoothly and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. Apart from that, from a morality perspective, this policy builds an ethical culture within the Public Company environment. These policies can be included in the Guidelines or Code of Conduct that apply to the Board of Commissioners. Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the existence of a convicted member of the Board of Commissioners from the competent authority. Financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities as well as criminal acts of money laundering as intended in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.	Telah terpenuhi. Kebijakan penilaian (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh NRC. Comply The self-assessment policy of the Board of Commissioners and Directors is determined by the NRC.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.

III	Aspek 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI Aspect 3: FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS	

Prinsip 5

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

Principle 5

Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.

Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Determining the number of members of the Board of Directors consider the condition of the Public Company and effectiveness in decision making.

Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Determining the composition of members of the Board of Directors consider the diversity of skills, knowledge and experience required.



	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Based on the provisions of the OJK Regulations concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the task of formulating the policies and criteria required in the nomination process for prospective members of the Board of Directors. One policy that can support the nomination process as intended is the succession policy for members of the Board of Directors. The policy regarding succession aims to maintain the continuity of the leadership regeneration or cadre process in the company in order to maintain business continuity and the company's long-term goals.	Telah terpenuhi. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur di dalam Board Manual Perseroan. Comply The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Board Manual
	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. As a company organ with authority to manage the company, determining the number of Directors greatly influences the performance of a Public Company. Thus, determining the number of members of the Board of Directors must be carried out through careful consideration and must refer to the provisions of applicable laws and regulations, which based on OJK Regulations regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies consists of at least 2 (two) people. Apart from that, determining the number of Directors must be based on the need to achieve the aims and objectives of the Public Company and adjusted to the conditions of the Public Company, including the characteristics, capacity and size of the Public Company as well as how effective the Board of Directors' decision making is achieved.	Telah terpenuhi. Jumlah anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPCC telah mempertimbangkan kondisi dan dinamika bisnis Perseroan. Comply The number of members of the Company's Board of Directors as of December 31, 2023 is 3 (three) people. The number and composition of the IPCC Board of Commissioners has taken into account the conditions and dynamics of the Company's business.
	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif. As with the Board of Commissioners, diversity in the composition of members of the Board of Directors is a combination of desirable characteristics both in terms of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors, in accordance with the needs of the Public Company. This combination is determined by considering the appropriate skills, knowledge and experience in the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the goals of the Public Company. Thus, consideration of the combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of the process of nominating and appointing individual members of the Board of Directors or collegial Directors.	Telah terpenuhi. Komposisi anggota Direksi Perusahaan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Comply. The composition of the members of the Company's Board of Directors has taken into account the diversity of skills, knowledge and experience required. This disclosure can be seen in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.
6	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.
		Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report.



Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait. Financial Statement is a management accountability report for the management of resources owned by a Public Company, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia and also related OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector that regulate regarding the presentation and disclosure of Public Company Financial Reports. Based on statutory regulations in the Capital Markets sector which regulate the responsibility of the Board of Directors for Financial Reports, the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Financial Reports, which are signed by the President Director and members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in financial reports will greatly depend on the expertise and/or knowledge of the Board of Directors, especially members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. The existence of qualifications of expertise and/or knowledge in the field of accounting that at least members of the Board of Directors have can provide confidence in the preparation of Financial Reports, so that the Financial Reports can be relied upon by stakeholders as a basis for making economic decisions regarding the Public Company in question. These skills and/or knowledge can be proven by educational background, training certification and/or related work experience.	Telah terpenuhi. Perusahaan memiliki anggota Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Penegasan ini dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini. Comply. The Company has members of the Board of Directors who have competence in accounting or finance. This confirmation can be seen in the Company Profile Chapter, Directors Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.
Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolektif. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. As with the Board of Commissioners, the Directors' Self Assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the collegial assessment of the Directors' performance. Self-assessment or self-assessment is carried out by each member of the Board of Directors to assess the implementation of the performance of the Board of Directors in a collegial manner, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Directors. With this Self Assessment, it is hoped that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis. This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, the timing of their implementation on a regular basis, and the benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function of the Public Company, where the establishment of this function has been required in the Regulations. OJK regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Telah terpenuhi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh NRC. Comply. The performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is carried out by the NRC.
Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi. Disclosure of the Self Assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of their duties, but also to provide important information regarding improvement efforts in the management of Public Companies. This information is very useful for providing confidence to shareholders or investors that there is certainty that company management will continue to be carried out in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism for the performance of the Board of Directors.	Telah terpenuhi. Kebijakan penilaian (self-assessment) Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Comply. The self-assessment policy of the Board of Commissioners and Directors is determined by the Nomination and Remuneration Committee.



Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	

Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.

IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation		

Prinsip 7
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
Principle 7
Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.
Public Companies have policies to prevent insider trading.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.
Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*.
Public Companies have policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.



	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. The policy of resigning members of the Board of Directors who are involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Companies, so that the company's integrity will be maintained. This policy is needed to help the legal process run smoothly and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. Apart from that, from a morality perspective, this policy will build an ethical culture within the Public Company environment. These policies can be included in the Guidelines or Code of Conduct that apply to the Board of Directors. Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is that a member of the Board of Directors has a convicted status from the authorized party. Financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities as well as criminal acts of money laundering as intended in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.	Telah terpenuhi. Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus yang berkaitan dengan aktivitas <i>insider trading</i>. Namun demikian dalam menjalankan usahanya Perusahaan senantiasa mencegah adanya <i>insider trading</i>. Comply. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors as disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.
	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. A person who has inside information is prohibited from carrying out securities transactions using inside information as intended in the Law on Capital Markets. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating confidential data and/or information from public ones, as well as dividing duties and responsibilities for managing the information in question proportionally and efficiently.	Telah terpenuhi. Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus yang berkaitan dengan aktivitas <i>insider trading</i>. Namun demikian dalam menjalankan usahanya Perusahaan senantiasa mencegah adanya <i>insider trading</i>. Comply. The Company does not have a specific policy relating to insider trading activities. However, in carrying out its business, the Company always prevents insider trading.
	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain Anti-corruption policies are useful for ensuring that Public Company business activities are carried out legally, prudently and in accordance with the principles of good governance. This policy can be part of a Code of Conduct, or in its own form. This policy may include, among other things, programs and procedures carried out to overcome corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Public Companies. The scope of the policy must describe the Public Company's prevention of all corrupt practices whether giving or receiving from other parties.	Telah terpenuhi. Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang anti-korupsi dan <i>anti-fraud</i> sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, di Laporan Tahunan ini. Comply. The Company has anti-corruption and anti-fraud policies as disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.
	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Pelaksanaan kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i>. Policies regarding supplier or vendor selection are useful for ensuring that Public Companies obtain the required goods or services at competitive prices and good quality. Meanwhile, the policy of increasing supplier or vendor capabilities is useful for ensuring that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services required by the company will affect the quality of the company's output. Implementation of these policies can guarantee continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by Public Companies. The scope of this policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the capabilities of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors.	Telah terpenuhi. Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok. Comply. The Company has a policy regarding supplier selection

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies regarding the fulfillment of creditor rights.	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>Whistle Blowing</i> . Public Companies have a Whistle Blowing System. policy.	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Companies have a policy of providing long-term incentives to Board of Directors and employees.	
V	Aspek 5 : KETERBUKAAN INFORMASI Aspect 5: INFORMATION DISCLOSURE		

Prinsip 8
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.
Principle 8
Improving the Implementation of Information Disclosure.

Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
Public Companies make wider use of information technology apart from Websites as a medium for information disclosure.



	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Policies regarding the fulfillment of creditors' rights are used as guidelines in making loans to creditors. The objectives of the policy in question is to ensure the fulfillment of rights and maintain creditors' trust in Public Companies. This policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up actions in fulfilling the Public Company's obligations to creditors.	Telah terpenuhi. Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Comply. The Company has a policy regarding fulfilling creditor rights.
	Kebijakan sistem <i>whistle blowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistle blowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistle blowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. A well-drafted whistle blowing system policy will provide certainty of protection for witnesses or whistleblowers regarding indications of violations committed by employees or management of a Public Company. The implementation of this system policy will have an impact on the formation of a good corporate governance culture. The whistle blowing system policy covers, among other things, the types of violations that can be reported through the whistle blowing system, how to make complaints, protection and guarantee of confidentiality of the reporter, handling of complaints, parties who manage complaints, and the results of handling and follow-up on complaints.	Telah terpenuhi. Perusahaan memiliki kebijakan sistem <i>whistle blowing</i> sebagaimana telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Comply. The Company has a whistle blowing system policy as described in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report
	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. Long-term incentives are incentives that are based on long-term performance achievements. Long-term incentive plans are based on the premise that the company's long-term performance is reflected by the growth in the value of shares or other long-term company targets. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to Directors and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on improving company performance in the long term. The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Company to encourage the implementation of providing long-term incentives to Directors and Employees with terms, procedures and forms that are adapted to the long-term goals of the Public Company. The policy in question may include, among other things: the aims and objectives of providing long-term incentives, conditions and procedures for providing incentives, as well as conditions and risks that Public Companies must pay attention to when providing incentives. The policy may also be included in the Public Company's existing remuneration policy.	Telah terpenuhi. Perusahaan memiliki kebijakan pemberian bonus dan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Uraian lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan, sub-bab Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini. Comply. The Company has a policy of providing bonuses and bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners. A complete description of this can be seen in the Corporate Governance Chapter, sub-chapter Remuneration for Directors and Board of Commissioners, in this Annual Report.
	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The information disclosure carried out is not only information disclosure that has been regulated in statutory regulations, but also other information related to Public Companies which is felt to be useful for shareholders or investors to know. By utilizing information technology more widely apart from websites, it is hoped that companies can increase the effectiveness of disseminating company information. However, the use of information technology still consider the company's benefits and costs.	Telah terpenuhi. Selain mengandalkan situs web Perusahaan, IPCC juga menyampaikan laporan keterbukaan informasi secara patuh melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) IDX (dapat diakses dengan memasukkan kode saham: "IPCC") dan e.KSEI. Comply. Apart from relying on the Company's website, IPCC also submits information disclosure reports compliantly through the IDX Electronic Reporting System (SPE) (can be accessed by entering the stock code: "IPCC") and e.KSEI.



Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	

Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

The Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the major and controlling shareholders.



	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. Laws and Regulations in the Capital Market sector which regulates the submission of annual reports of Public Companies has regulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more shares of a Public Company as well as the obligation to disclose information regarding the major and controlling shareholders of Public Companies either directly or indirectly up to the last beneficial owner in ownership of the shares. In these Governance Guidelines it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of share ownership by the major and controlling shareholders.	



















Laporan Keuangan

Financial Statement

07





Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2024 and
for the year then ended with independent auditor's report

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement of Directors</i>
Laporan Auditor Independen.....	i-x	<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1-2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	5	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-81	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024, SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

**DIRECTOR'S STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024, AND FOR
THE YEAR THEN ENDED
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/Domicile address

Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/Domicile address

Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

- Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2024.
- Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Atas nama dan mewakili direksi

We, the undersigned:

1. Sugeng Mulyadi
Jl. Sindang Laut No.100 RT.001/RW.011 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
Jl. Hekuan No. 302
RT.005/ RW.001 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta
Utara
021-43832251
Direktur Utama/President Director

2. Wing Megantoro
Jl. Sindang Laut No.100 RT.001/RW.011 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
Jl. Guntur Raya B-2/12 RT.007/RW.019 Kayuringin
Jaya, Bekasi Selatan
021-43832251
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan
Manajemen Risiko/Finance, Human Resources &
Risk Management Director

declare that:

- Directors are responsible for the preparation and presentation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company") financial statements December 31, 2024.
- The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements.
 - The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
- Directors are responsible for the Company's internal control systems.

This statement has been made truthfully.
For and on behalf of directors

Jakarta, 25 Maret/ March 25, 2025


Sugeng Mulyadi
Direktur Utama/President Director


Wing Megantoro
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan
Manajemen Risiko/Finance, Human Resources and Risk
Management Director





Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Street 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12193, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Dewan Direksi
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal-hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matter were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kecukupan Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas Piutang Usaha

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang usaha Perusahaan adalah sebesar Rp80,2 miliar yang merepresentasikan 4,3% dari total aset. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mengakui penyisihan untuk KKE atas piutang usaha sebesar Rp35,3 miliar.

Secara umum, dalam menilai dasar penurunan nilai piutang usaha secara individual, manajemen menggunakan pertimbangan yang signifikan untuk mengevaluasi kolektibilitas dari masing-masing pelanggan setelah mempertimbangkan pengalaman gagal bayar atau tunggakan, dan analisis umur. Manajemen Perusahaan juga menghitung penyisihan KKE menggunakan pendekatan yang disederhanakan berdasarkan matriks provisi. Penerapan model KKE oleh Perusahaan juga melibatkan pelaksanaan pertimbangan dan estimasi manajemen yang signifikan dalam menentukan asumsi yang akan digunakan dalam model KKE.

Pengungkapan terkait detail piutang usaha dan penyisihan penurunan nilai menggunakan model KKE disajikan dalam Catatan 2, 3 dan 5 atas laporan keuangan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Key audit matter (continued)

Adequacy of Allowance for Expected Credit Loss ("ECL") on Trade Receivables

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2024, the Company's trade receivables outstanding balance amounted to Rp80.2 billion which represents 4.3% of total assets. As of December 31, 2024, the Company recognized allowance for ECL on trade receivables amounting to Rp35.3 billion.

In general, in assessing the individual basis of impairment of trade receivables, management exercised significant judgments to evaluate the collectability from individual customers after taking into account experience of default or delinquency, and aging analysis. The Company's management also calculated the allowance for ECL using simplified approach based on provision matrix. The Company's application of the ECL model also involved the exercise of significant management's judgments and estimates in determining the assumptions to be used in the ECL model.

The related disclosures of details of trade receivables and allowance for impairment using ECL are presented in Notes 2, 3 and 5 to the financial statements.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kecukupan Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas Piutang Usaha (lanjutan)

Respons audit:

Kami memperoleh pemahaman mengenai proses manajemen dalam melakukan penilaian atas kecukupan penyisihan KKE dari piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami memeriksa penilaian penurunan nilai individual dari manajemen, dan asumsi yang digunakan untuk mengevaluasi kolektibilitas dari pelanggan-pelanggan yang dapat dinilai terpisah secara individu, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti pengalaman gagal bayar, penerimaan dari pelanggan secara historis, komitmen atau kesepakatan pembayaran tertentu, serta analisa terhadap umur piutang usaha.

Kami juga memperoleh dan memeriksa akurasi matematikal dari perhitungan KKE manajemen. Kami menguji probabilitas default (PD) sebagai asumsi utama manajemen atas model KKE dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber masukan. Kami melibatkan pakar internal dari auditor kami dalam mereview model KKE dan menjalankan kembali pendekatan statistik dari manajemen. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan ulang atas penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal pelaporan dengan menggunakan model KKE yang diadopsi oleh Perusahaan.

Kami memeriksa kelengkapan pengungkapan yang dibuat dalam laporan keuangan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Key audit matter (continued)

Adequacy of Allowance for Expected Credit Loss ("ECL") on Trade Receivables (continued)

Audit response:

We obtained an understanding of the management's process of its assessment of the adequacy of allowance for ECL on its trade receivables as of December 31, 2024.

We assessed the individual impairment assessment of management, and the assumptions used to evaluate the collectability from individual customers that can be assessed separately, by considering matters such as experience of default, historical collection from customers, certain commitments or payment arrangements, and trade receivables aging analysis.

We also obtained and checked the mathematical accuracy of the ECL calculation of management. We tested the probability of default (PD) as key assumptions used in the ECL model by comparing them with the information obtained from source inputs. We involved our auditor's internal expert in reviewing the ECL model and reperforming the management's statistical approach. Further, we performed recalculation of the allowance for credit losses at reporting date using the ECL model adopted by the Company.

We checked the completeness of the disclosures made in the financial statements.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in 2024 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of such financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, serta mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

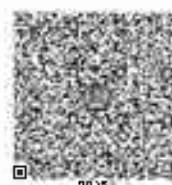
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanono, Sungkoro & Surja

Moch. Dadang Syachruna

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/Public Accountant Registration No. AP.0697

25 Maret 2025/March 25, 2025



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	810.397.210	4,24a,25,26	670.181.616	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto		5,25,26		Trade receivables - net
Pihak ketiga	79.921.135		61.574.688	Third parties
Pihak berelasi	287.900	24b	49.759	Related parties
Beban dibayar di muka	248.602		1.350.494	Prepaid expenses
Uang muka	1.426.726	6	-	Advances
Aset kontrak		7,25,26		Contract assets
Pihak ketiga	4.563.725		7.502.672	Third parties
Pihak berelasi	4.590.265	24c	2.069.246	Related parties
Pajak dibayar dimuka	-	14a	16.393.419	Prepaid taxes
TOTAL ASET LANCAR	901.435.563		759.121.894	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	348.650.706	8	359.356.153	Fixed assets - net
Aset takberwujud - neto	3.224.301	9	4.631.410	Intangible assets - net
Aset hak-guna - neto	536.361.278	10	606.287.386	Right-of-use assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	57.911.494	14e	55.762.548	Deferred tax assets - net
Aset tidak lancar lainnya	3.154.996	24d,25,26	3.154.996	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	949.302.775		1.029.192.493	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	1.850.738.338		1.788.314.387	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

31 Desember/December 31,				
	2024	Catatan/ Notes	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha		11,25,26		Trade payables
Pihak ketiga	6.688.005		5.725.244	Third parties
Pihak berelasi	40.615.547	24e	40.147.885	Related parties
Utang lain-lain		12,25,26		Other payables
Pihak ketiga	1.450.149		11.888.179	Third parties
Pihak berelasi	4.037.966	24f	1.803.832	Related parties
Beban akrual	65.690.863	15,25,26	42.362.703	Accrued expenses
Utang pajak	20.337.635	14b	14.747.727	Taxes payable
Liabilitas jangka pendek lainnya		13,25,26		Other current liabilities
Pihak ketiga	4.728.244		15.386.720	Third parties
Pihak berelasi	1.305.051	24g	31.778.442	Related parties
Bagian lancar atas liabilitas sewa	40.418.552	10,25,26	42.127.118	Current portion of lease liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	185.272.012		205.967.850	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	388.237.935	10,25,26	359.479.683	Lease liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	388.237.935		359.479.683	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	573.509.947		565.447.533	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Share capital - par value
Rp100 (nilai penuh) per saham				Rp100 (full amount) per share
Modal dasar -				Authorized capital -
5.000.000.000 Saham				5,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				Issued and fully paid capital -
1.818.384.820 saham	181.838.482	16	181.838.482	1,818,384,820 shares
Tambahan modal disetor	749.460.284	17	749.460.284	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan umum	10.000.000	18	8.000.000	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya	335.929.625		283.568.088	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	1.277.228.391		1.222.866.854	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.850.738.338		1.788.314.387	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
 Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
 For the Year Ended December 31, 2024
 (Expressed in Thousands of Rupiah,
 Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023	
Pendapatan operasi	824.595.836	19,24h	735.204.940	Operating revenues
Beban pokok pendapatan	(477.078.570)	20,24i	(408.727.911)	Cost of revenues
LABA BRUTO	347.517.266		326.477.029	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(89.423.994)	21	(76.343.229)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lainnya	12.745.546	22	3.780.536	Other operating income
Beban operasi lainnya	(14.249.520)	22	(8.706.351)	Other operating expenses
LABA USAHA	256.589.298		245.207.985	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	45.050.723	23	38.036.797	Finance income
Beban keuangan	(31.793.535)	23	(46.424.352)	Finance expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	269.846.486		236.820.430	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX EXPENSES
Kini	(59.779.205)	14d	(50.707.949)	Current
Tangguhan	2.148.946	14d,14e	4.742.363	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	212.216.227		190.854.844	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	212.216.227		190.854.844	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	116,71		104,96	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital Issued and Fully Paid		Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/Retained Earnings		Total Ekuitas/ Total Equity	
					Cadangan umum/ General reserve	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		181.838.482		749.460.284	6.000.000	224.671.421	1.161.970.187	Balance as of December 31, 2022
Pembagian dividen kas	18	-		-	-	(129.958.177)	(129.958.177)	Distribution of cash dividend
Pembentukan cadangan umum	18	-		-	2.000.000	(2.000.000)	-	General reserve appropriation
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-		-	-	190.854.844	190.854.844	Total comprehensive income for the year
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		181.838.482		749.460.284	8.000.000	283.568.088	1.222.866.854	Balance as of December 31, 2023
Pembagian dividen kas	18	-		-	-	(157.854.690)	(157.854.690)	Distribution of cash dividend
Pembentukan cadangan umum	18	-		-	2.000.000	(2.000.000)	-	General reserve appropriation
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-		-	-	212.216.227	212.216.227	Total comprehensive income for the year
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		181.838.482		749.460.284	10.000.000	335.929.625	1.277.228.391	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	806.170.205		735.347.994	Cash receipts from customers
Pembayaran kerjasama mitra usaha	(195.079.258)		(164.112.103)	Payments to partnerships
Pembayaran pemasok, utilitas dan lainnya	(142.073.483)		(213.780.395)	Payments to suppliers, utilities and others
Pembayaran kepada karyawan	(71.869.005)		(66.798.650)	Payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(53.024.094)		(73.735.135)	Payments for income taxes
Penerimaan pendapatan keuangan	36.065.425		32.191.471	Proceeds from finance income
KAS NETO DIPEROLEH DARI				NET CASH PROVIDED FROM
AKTIVITAS OPERASI	380.189.790		249.113.182	OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran atas perolehan aset tetap dan aset tak berwujud	(24.865.772)		(27.239.475)	Payments for acquisition of fixed assets and intangible assets
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK				NET CASH USED IN
AKTIVITAS INVESTASI	(24.865.772)		(27.239.475)	INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	(197.313.434)	18	(113.207.337)	Payments for dividends
Pembayaran liabilitas sewa	(17.794.990)	10, 29	(458.245.562)	Payments for lease liabilities
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK				NET CASH USED IN
AKTIVITAS PENDANAAN	(215.108.424)		(571.452.899)	FINANCING ACTIVITIES
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO				NET INCREASE (DECREASE) IN
KAS DAN SETARA KAS	140.215.594		(349.579.192)	CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN	670.181.616	4	1.019.760.808	AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN	810.397.210	4	670.181.616	AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-58515.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 18 Juli 2023, dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0149824.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Perusahaan menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan usaha bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi stevedoring, cargodoring, serta receiving/delivery atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, termasuk namun tidak terbatas mendirikan/menjalankan anak perusahaan dan usaha lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha utama, penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, khususnya terkait bidang usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yaitu sebagai berikut:

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company") was established based on the Company Establishment Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-58515.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 19, 2012 and published in the Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013. The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest through Notarial Deeds No. 45 dated July 18, 2023 of Notary Ashoya Ratam, SH., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0149824.AH.01.11.Tahun 2023 dated July 24, 2023.

Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company's purposes and objectives are conducting seaport service business activities, which are related to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of terminal facilities such as ports and docks, navigation, inspection of cargo and/or containers using ionizing radiation sources (radioactive substances and ionizing radiation generators), waterway locking operations and others, navigation, shipping and berthing activities, mooring services, and pilotage services.

The Company carries out business activities in the supply and/or service of loading and unloading of ships in ports which include stevedoring, cargodoring, and receiving/delivery of vehicles, heavy equipment and spare parts, including but not limited to establishing/running subsidiaries and other businesses has a direct or indirect relationship with the main business activities, providing and developing port facilities and optimizing the utilization of Company-owned resources, especially in relation to sea port service business, namely as follows:

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bantu bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
- Penyediaan dan/atau jasa bongkar muat barang;
- Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelindo Multi Terminal (Catatan 16).

Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersial pada tanggal 1 Desember 2012.

Kantor Perusahaan berlokasi di Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara 14110, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

- To provide and/or serve dock services for mooring;
- To provide and/or serve refueling and clean water service;
- To provide and/or serve passenger and/or vehicles handling facilities;
- To provide and/or serve dock services for loading and unloading activities of goods and container;
- To provide and/or serve warehousing services and products hoarding location, loading and unloading tools and port equipment;
- To provide and/or serve terminal services for container, liquid bulk, dry bulk and ro-ro;
- To provide and/or serve loading and unloading services of goods;
- To provide and/or serve products distribution and consolidation center.

In order to achieve the purpose and objectives mentioned above the Company can carry out supporting business activities by providing and/or tug service of vessel.

As of December 31, 2024 and 2023, The Company's parent is PT Pelindo Multi Terminal (Note 16).

The Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company started its commercial operations on December 1, 2012.

The Company's office is located at Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara 14110, Indonesia.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek Perusahaan

Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan telah menawarkan 509.147.700 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan harga penawaran perdana sebesar Rp1.640 (nilai penuh) per saham.

c. Manajemen kunci dan karyawan

Susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

31 Desember 2024

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen

Drajat Sulistyo
 Abdur Rahim Hasan
 LM. Arya Bima Yudiantara

Direksi

Direktur Utama
 Plt. Direktur Komersial
 dan Pengembangan Bisnis
 Direktur Operasi dan Teknik
 Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia,
 dan Manajemen Risiko

Sugeng Mulyadi
 Sugeng Mulyadi
 Bagus Dwipoyono
 Wing Megantoro

31 Desember 2023

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen

Drajat Sulistyo
 Abdur Rahim Hasan
 LM. Arya Bima Yudiantara

Direksi

Direktur Utama
 Plt. Direktur Komersial
 dan Pengembangan Bisnis
 Direktur Operasi dan Teknik
 Direktur Keuangan
 dan Sumber Daya Manusia

Sugeng Mulyadi
 Sugeng Mulyadi
 Bagus Dwipoyono
 Wing Megantoro

Susunan Komite Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komite Audit/Audit Committee

Ketua/Head
 Anggota/Member
 Anggota/Member

**31 Desember 2024/
December 31, 2024**

Abdur Rahim Hasan
 Kurniawan Eko Saputro
 Noval Ali Abbas

**Komite Manajemen Risiko/
Risk Management Committee**

Ketua/Head
 Anggota/Member
 Anggota/Member

LM. Arya Bima Yudiantara
 Nurkholis Lukman

**Komite Nominasi dan Remunerasi/
Nomination and Remuneration Committee**

Ketua/Head
 Anggota/Member
 Anggota/Member

Abdur Rahim Hasan
 LM. Arya Bima Yudiantara
 Ahmad Alyani Addarain

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the Company's shares of capital

As of July 9, 2018, the Company offered 509,147,700 shares with par value of Rp100 (full amount) per share to the public and subsequently registered in Indonesia Stock Exchange (IDX) at a subscription price of Rp1,640 (full amount) per share.

c. Key management and employees

The composition of the Company's key management which consists of The Board of Commissioners and The Board of Directors are as follow:

December 31, 2024

Board of Commissioners

President Commissioner
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
 Act. Director of Commercial
 and Business Development
 Director of Operation and Engineering
 Director of Finance, Human Resources,
 and Risk Management

December 31, 2023

Board of Commissioners

President Commissioner
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
 Act. Director of Commercial
 and Business Development
 Director of Operation and Engineering
 Director of Finance
 and Human Resources

The composition of the Company's Committees are as follow:

**31 Desember 2023/
December 31, 2023**

Abdur Rahim Hasan
 Dyah Ayu Anggraheni
 Noval Ali Abbas

LM. Arya Bima Yudiantara
 -

Abdur Rahim Hasan
 LM. Arya Bima Yudiantara
 Ahmad Alyani Addarain

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen kunci dan karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan masing-masing memiliki 78 dan 85 orang karyawan (tidak diaudit) yang merupakan karyawan Pelindo yang ditugaskan di Perusahaan (Catatan 27d).

d. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-9644/KPU.01/2017 tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1796/KPU.01/2016 tentang Penetapan Lapangan Penimbunan di Pelabuhan Laut Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama Perusahaan. Penetapan ini berlaku sampai dengan 14 November 2019.

Penetapan tersebut diperpanjang melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-161/KPU.01/2020 tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1796/KPU.01/2016 tentang Penetapan Lapangan Penimbunan di Pelabuhan Laut Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama Perusahaan. Penetapan ini berlaku sampai dengan 14 November 2024.

Pada April 2022, terdapat perubahan perizinan KEP-161/KPU.01/2020 Penetapan Lapangan Penimbunan di Pelabuhan Laut Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama Perusahaan menjadi KEP-1599/KPU.01/2022 dikarenakan adanya perubahan ukuran tempat penimbunan. Perizinan ini berlaku hingga 14 November 2024.

Pada 12 November 2024, terdapat perpanjangan perizinan Nomor 1262/KM.4/KPU.1/2024 tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1796/KPU.01/2016 tentang Penetapan Lapangan Penimbunan di Pelabuhan Laut sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama Perusahaan. Penetapan ini berlaku sampai dengan 14 November 2027.

1. GENERAL (continued)

c. Key management and employees (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, The Company has 78 and 85 employees (unaudited), respectively, which are the employees of Pelindo to the Company (Note 27d).

d. Permits

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- 1) The Minister of Finance Decree No. KEP-9644/KPU.01/2017 regarding Extension of the Minister of Finance Decree No. KEP-1796/KPU.01/2016 regarding Determination of Stacking Yard in Sea Port as Temporary Stacking Area for the Company. This stipulation is valid until November 14, 2019.

Those stipulation extended through the Minister of Finance Decree No. KEP-161/KPU.01/2020 regarding the Extension of Minister of Finance Decree No. KEP-1796/KPU.01/2016 regarding the Determination of Stacking Yard in Sea Port as Temporary Stacking Area for the Company. This stipulation is valid until November 14, 2024.

In April 2022, there was a change in permits from KEP-161/KPU.01/2020 regarding the Determination of Stacking Yard in Sea Port as Temporary Stacking Area for the Company to KEP-1599/KPU.01/2022 due to a change in the size of stacking yard. This license is valid until November 14, 2024.

On November 12, 2024, an extension of Permit No. 1262/KM.4/KPU.1/2024 was issued regarding the extension of the Minister of Finance Decree No. KEP-1796/KPU.01/2016 on the Designation of Staging Areas at Seaports as Temporary Storage Locations in the Name of the Company. This designation is valid until November 14, 2027.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan (lanjutan)

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

- 2) Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat No. 6/N.13/31.72/-1.819.6/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Surat ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya. Surat ini dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.
- 3) Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan No. 002-0185-DN yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Kode Internasional Tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) berdasarkan Wewenang Pemerintah Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pemenuhan fasilitas pelabuhan Perusahaan dengan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (ISPS Code) telah diverifikasi dan fasilitas pelabuhan telah beroperasi sesuai rancangan keamanan fasilitas pelabuhan yang disetujui, yaitu:

- Kapal barang lainnya;
- Informasi lainnya yang relevan: domestik dan internasional;

Pernyataan tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 25 Mei 2023. Perizinan tersebut diperbaharui pada tanggal 26 April 2023 dengan Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan No. AL.803/2/6/SoCPF/DL/2023 yang berlaku sampai dengan 24 Mei 2028.

1. GENERAL (continued)

d. Permits (continued)

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations: (continued)

- 2) Operational License for Stevedoring Company No. 6/N.13/31.72/-1.819.6/2018 dated May 31, 2018 from the Investment and Integrated Services Office of the one door Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta. The license is valid from the date of issuance and for as long as the Company operates. The license can be evaluated and revoked if the license holder commits criminal offences related to its operation.

- 3) Statement of Compliance with Port Facility Security Requirements No. 002-0185-DN issued under the provisions of the International Code for The Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code) under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia by Directorate General of Sea Transportation.

The statement certifies that the Company's port facilities have fulfilled the provisions of SOLAS 74 chapter XI-2 and part A of the International Code for the Security of Ship and Port Facilities (ISPS Code) has been verified and that the port facility operates in accordance with the approved port facility security plan, which are:

- Other cargo services;
- Other relevant information: domestic and international;

The Statement of Compliance was issued on May 24, 2018 and valid until May 25, 2023. The permit was renewed on April 26, 2023 with the Port Facility Security Compliance Statement No. AL.803/2/6/SoCPF/DL/2023, which will be valid until May 24, 2028.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan (lanjutan)

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

- 4) Nomor Induk Berusaha 8120212041457 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, jucto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam lampirannya, izin usaha yang terverifikasi dan telah terbit adalah Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut sebagai Kegiatan Usaha Utama dengan Kode KBLI 52221, Pergudangan dan Penyimpanan dengan Kode KBLI 52101 sebagai Kegiatan Usaha Pendukung dan Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) dengan Kode KBLI 52240 sebagai Kegiatan Usaha Pendukung.

Nomor Induk Berusaha berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, telah memenuhi komitmen, dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Izin Usaha tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018, dengan perubahan kedua pada tanggal 14 Juli 2022.

- 5) Pada tanggal 20 Februari 2020, Perusahaan memperoleh Surat Izin Usaha Bongkar Muat dari Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2/N.13.7/31.72.04.1004.01.001.I.1.e/2/-1.819.6/2020. Surat ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya. Surat ini dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya. Surat tersebut diterbitkan sebagai pembaharuan informasi Perusahaan dari Surat Izin Usaha sebelumnya.

1. GENERAL (continued)

d. Permits (continued)

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations: (continued)

- 4) Business Identity Number 8120212041457 issued by the OSS Institute on behalf of the Indonesian Government based on the provisions of Government Regulation Number 24 of 2018 Article 19 paragraph (2) and Article 32 regarding Integrated Business Licensing Services Electronically, in conjunction with Regulation Number 6 Year 2023 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 concerning Job Creation into Law. In its appendix, the business licenses that have been verified and issued are Sea Port Service Activities as the Main Business Activity with KBLI code 52221, Warehousing and Storage with KBLI code 52101 as Supporting Business Activity and Cargo Handling (Loading Unloading of Goods) with KBLI code 52240 as Supporting Business Activity.

The Business Identity Number is valid throughout the territory of the Republic of Indonesia, has fulfilled commitments, and is effective as long as the Business Operator carries out its business and/or activities in accordance with the provisions of the Legislation Regulations. The Business License was issued on October 15, 2018, with the second amendment on July 14, 2022.

- 5) On February 20, 2020, the Company obtained the Stevedoring Operating License from the Investment Management Unit and One-Stop Integrated Service of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta No.2/N.13.7/31.72.04.1004.01.001.I.1.e/2/-1.819.6/2020. This letter is valid from the date of issuance and is valid for as long as the Company is still operating. This letter can be reviewed and revoked if the license holder commits a criminal offense related to its operation. The letter was issued as a renewal of Company information from the previous Business License.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan (lanjutan)

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

- 6) Pada tanggal 14 Februari 2021, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Priok No. PMKU.IDJKT.0221.000010. Registrasi pemberitahuan melakukan kegiatan usaha ini berlaku sampai dengan 14 Februari 2022. Surat ini telah diperbaharui beberapa kali, terakhir melalui Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Priok No. PMKU.IDJKT.0125.000089 tanggal 25 Januari 2025. Registrasi pemberitahuan melakukan kegiatan usaha ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2026.

e. Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki operasi bersama dengan persentase kepemilikan seperti berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
					December 31, 2024	December 31, 2023
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI")	Gresik, Jawa Timur/East Java	Terminal kendaraan/Car terminal	2015	45,00%	3.234.432	3.212.745

Ringkasan informasi keuangan MKO MTKI tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Total aset	3.234.432	3.212.745	Total assets
Total liabilitas	135.534	108.786	Total liabilities
Total ekuitas	3.098.898	3.103.959	Total equity
Pendapatan	1.221.738	1.928.698	Revenue
Laba (rugi) usaha	(59.048)	458.683	Profit (loss) from operations
Total laba (rugi) komprehensif	(5.061)	511.565	Total comprehensive income (loss)

1. GENERAL (continued)

d. Permits (continued)

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations: (continued)

- 6) On February 14, 2021, the Company obtained a Notification Letter of Conducting Business Activities from the Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation Tanjung Priok Main Class Port Authority Office No. PMKU.IDJKT.0221.000010. This registration of notification for conducting business activities is valid until February 14, 2022. This letter has been several times amended, the latest through Notification Letter of Conducting Business Activities from the Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation Tanjung Priok Main Class Port Authority Office No. PMKU.IDJKT.0125.000089 dated January 25, 2025. This registration of notification for conducting business activities is valid until January 25, 2026.

e. Joint operation

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has joint operation with effective percentage of ownership as follows:

The summary of MKO MTKI's financial information as of December 31, 2024 and 2023 and for the years then ended are as follows:

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajemen Perusahaan pada tanggal 25 Maret 2025. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

1. GENERAL (continued)

f. Completion of Financial Statements

The management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Company's Management on March 25, 2025. The Company's Board of Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional dan pelaporan Perusahaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI")) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK"). These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared based on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The statements of cash flows was prepared using direct method and present receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

The Company used Rupiah as functional and reporting currency.

All figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan tidak memiliki saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur revisian diatur ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode keuangan yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2024.

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

b. Foreign currency transactions and balances

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

c. Changes in accounting principles

Financial Accounting Standards Nomenclature

The revised nomenclature is reordered and amended based on those as published by DSAK IAI for financial periods beginning on and after January 1, 2024.

Amendment of PSAK 201: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

c. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Changes in accounting principles
(continued)

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (lanjutan)

Amendment of PSAK 201: Non-current Liabilities with Covenants (continued)

Amandemen ini tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The amendments had no impact on the Company's financial statements.

Amandemen PSAK 116: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amendment of PSAK 116: Lease liability in a Sale and Leaseback

Amandemen PSAK 116 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

The amendment to PSAK 116 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

Amandemen ini tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The amendments had no impact on the Company's financial statements.

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amendment of PSAK 207 and PSAK 107: Supplier Finance Arrangements

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

Amandemen ini tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The amendments had no impact on the Company's financial statements.

d. Transaksi dengan pihak berelasi

d. Transactions with related parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224.

The Company have transactions with related parties as defined in PSAK 224.

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the parties which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 24 to the financial statements.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

d. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

d. Transactions with related parties
(continued)

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak-pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak ketiga.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the financial statements are third parties.

e. Kas dan setara kas

e. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas dan setara kas tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents in the statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value. Cash and cash equivalents were not used as collateral and unrestricted.

f. Instrumen keuangan

f. Financial instruments

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i) Aset keuangan

i) Financial assets

Pengakuan dan pengukuran awal

Initial recognition and measurement

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

f. Financial instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

Pengukuran selanjutnya

Subsequent measurement

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLRL).

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, dan uang jaminan.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalent, trade receivables, contract assets, and guarantee deposits.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur melalui NWPKL dan NWLRL.

The Company has no financial assets measured in FVOCI and FVTPL.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

f. Financial instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

Penghentian pengakuan

Derecognition

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. In such cases, the Company also recognizes an associated liability. The transferred assets and related liabilities are measured on a basis that reflects the rights and obligations that are still retained by the Company.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

f. Financial instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

Penurunan nilai

Impairment

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

The Company recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

ECLs are recognized in two stages. When there have not been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). However, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Karena aset kontrak dan piutang usaha tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Because its contract asset and trade receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

f. Financial instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

Penurunan nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Perusahaan menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

For debt instruments at FVOCI, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the internal credit rating of the debt instrument.

Selain itu, Perusahaan mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 365 hari dari tanggal jatuh tempo.

In addition, the Company considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 365 days past due.

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 365 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 365 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

ii) Liabilitas keuangan

ii) Financial liabilities

Pengakuan dan pengukuran awal

Initial recognition and measurement

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

f. Financial instruments (continued)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

ii) Financial liabilities (continued)

Pengakuan dan pengukuran awal
(lanjutan)

Initial recognition and measurement
(continued)

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa dan liabilitas jangka pendek lainnya - utang dividen dan uang titipan.

The Company designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities, and other current liabilities - dividend payables and deposits received.

Pengukuran selanjutnya

Subsequent measurement

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

f. Financial instruments (continued)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

ii) Financial liabilities (continued)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman) (lanjutan)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings) (continued)

ii) Utang dan Akrua

ii) Payables and Accruals

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

The Company has not designated any financial liability measured as FVTPL.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Saling hapus instrumen keuangan

Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

g. Pengukuran nilai wajar

g. Fair value measurement

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

The Company initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- i. in the principal market for the asset or liability, or the loss of an active market for the financial asset due to financial difficulties.
- ii. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

g. Fair value measurement (continued)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

- i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

- ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

- iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

Tim pelaporan keuangan Perusahaan bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar, seperti nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai) dan aset keuangan pada NWPKL.

The Company's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Perusahaan dan penilai eksternal.

External valuers are involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Company and external valuers.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

h. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Penyusutan dimulai pada saat aset telah siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

g. Fair value measurement (continued)

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

h. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management.

Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if the recognition criteria are met. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations for more than 1 (one) year.

Depreciation starts when the asset is already available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the asset as follows:

Tahun/Years

Bangunan fasilitas pelabuhan	10-30	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	4-10	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5-10	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	10-25	Road and building
Peralatan	4-5	Equipment
Emplasemen	3-25	Emplacement
Kendaraan	5	Vehicles

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

h. Aset tetap (lanjutan)

h. Fixed assets (continued)

Aset dalam pembangunan dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam pembangunan tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat konstruksi telah selesai dan tersedia untuk digunakan. Aset dalam pembangunan tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Construction in progress is stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the construction in progress. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and available for use. Construction in progress is not depreciated as it is not yet available for use.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year in which the asset is derecognized.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Perusahaan melakukan uji penurunan nilai aset tetap bila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

At each end of reporting period, the residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate. The Company conducts impairment test for the fixed assets when there is any indication that the carrying values may not be fully recoverable.

Aset tetap operasi bersama dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Joint operation fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

i. Aset takberwujud

i. Intangible assets

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran terkait tercermin dalam laba rugi pada periode pengeluaran tersebut terjadi.

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalized development costs, are not capitalized and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

i. Aset takberwujud (lanjutan)

Masa manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur yang terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomi dan dinilai penurunan nilainya setiap kali terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas ditelaah setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, jika sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori beban yang sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya setiap tahun, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian kehidupan tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah kehidupan tidak terbatas terus dapat didukung. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

i. Intangible assets (continued)

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

j. Pengaturan bersama

Perusahaan merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Perusahaan dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Perusahaan mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Perusahaan memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Perusahaan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Perusahaan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Struktur pengaturan bersama
- Bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Persyaratan pengaturan kontraktual dalam perjanjian
- Fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Perusahaan mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau apabila pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu disyaratkan, maka Perusahaan membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

j. Joint arrangements

The Company is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Company and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Company classifies its interests in joint arrangements as either:

- Joint ventures: where the Company has rights to only the net assets of the joint arrangement
- Joint operations: where the Company has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Company considers:

- The structure of the joint arrangement
- The legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle
- The contractual terms of the agreement
- Any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).

The Company accounts for its interests joint operations by recognizing its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

k. Impairment of non-financial assets

At each end of reporting date, the Company assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for certain asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)

k. Impairment of non-financial assets
(continued)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Perusahaan mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Perusahaan atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas perkebunan terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)

k. Impairment of non-financial assets
(continued)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset tetap dan aset non-keuangan tidak lancar lainnya yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Management believes that there is no indication of impairment in values for fixed assets and other non-current non-financial assets presented in the statement of financial position as of December 31, 2024.

l. Provisi

l. Provisions

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities and a reliable estimate can be made of the amount of the liabilities.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities, the provision is reversed.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

m. Perpajakan

m. Taxation

Pajak Final

Final Tax

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: *Pajak Penghasilan*.

Final tax is scoped out from PSAK 212: Income Tax.

Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan keuangan dan pendapatan sewa atas penyewaan ruang kantor sebagai bagian dari beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Company present the final tax expense arising from finance income and rent income from rent of the office room as part of other operating expenses in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pajak Kini

Current Tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

m. Perpajakan (lanjutan)

m. Taxation (continued)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Deferred Tax (continued)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

- i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*
- ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

- i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*
- ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.*

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

m. Perpajakan (lanjutan)

m. Taxation (continued)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Deferred Tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Pajak Pertambahan Nilai

Value Added Tax

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

- Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

n. Pendapatan dan beban

n. Revenue and expense

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

In determining revenue recognition, the Company perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

Revenue from rendering of services is recognized when all of the following conditions are met:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial; dan
 - Besar kemungkinan Perusahaan akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract;
 - The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;
 - The contract has commercial substance; and
 - It is probable that the Company will receive benefits for the goods or services transferred.
2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima dimuka".

Payment of the transaction price differs for each contracts. Contract assets is recognised when performance obligation satisfied is more than the payments by customer. Contract liability is recognized when the payments by customer is more than the performance obligation satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred Income".

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Pendapatan dan beban (lanjutan)

n. Revenue and expense (continued)

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah.

The specific criteria also must be met for each of the Company's activities as described below.

Pendapatan dari penjualan jasa diakui dalam laba rugi pada saat jasa diberikan. Untuk penjualan jasa yang mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal pelaporan, tingkat penyelesaian transaksi ditentukan dengan memperhatikan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Revenue from sales of services is recognized in profit or loss when the services are rendered. For sales of services in which the service are rendered by reference to the stage of completion of the transaction at the reporting date, the stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed.

Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

Revenue from rendering of services is recognized when all of the following conditions are met:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Perusahaan;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company;*
- *the stage of completion of the transaction at the reporting date can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

Bila hasil transaksi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. Taksiran rugi pada jasa segera diakui dalam laba rugi.

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognized only to the extent of the expenses recognized that are recoverable. An expected loss on a service is recognized immediately in profit or loss.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

o. Informasi segmen

o. Segment information

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

p. Sewa

p. Lease

Perusahaan menilai pada saat inisiasi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Perusahaan sebagai Penyewa

The Company as Lessee

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Aset hak-guna

Rights-of-use assets

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Liabilitas sewa

Lease liabilities

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

p. Sewa (lanjutan)

p. Lease (continued)

Perusahaan sebagai Penyewa (lanjutan)

The Company as Lessee (continued)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Lease liabilities (continued)

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Short-term leases and leases of low-value assets

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Perusahaan juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Company also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

p. Sewa (lanjutan)

p. Lease (continued)

Perusahaan sebagai Pesewa

The Company as Lessor

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya.

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in operating income in the profit or loss due to its operating nature.

Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

q. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

q. Revenue from Contracts with Customers

Saldo kontrak

Contract balances

Aset kontrak

Contract assets

Aset kontrak merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan). Pada saat penyelesaian jasa pelayanan kapal serta jasa pengangkutan dan lainnya dan penerimaan oleh pelanggan, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

Contract assets represents receivables from customers for services that have been completed by the Company but have not yet been billed (unbilled receivables). Upon completion of the ship services and freight and other services and acceptance by the customer, the amount recognized as contract assets is reclassified to trade receivables.

Aset kontrak tunduk pada penilaian penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi tentang penurunan nilai aset keuangan di Catatan 2f Instrumen keuangan – pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Contract assets are subject to impairment assessment. Refer to accounting policies on impairment of financial assets in Note 2f Financial instruments – initial recognition and subsequent measurement.

r. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

r. Accounting standards issued but not yet effective

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif.

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

**r. Accounting standards issued but not yet
effective (continued)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2025**

**Effective beginning on or after January 1,
2025**

*Amendemen PSAK 221: Kekurangan
Ketertukaran*

Amendment PSAK 221: Lack of Exchangeability

Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan dengan mata uang lain yang memengaruhi, atau diperkirakan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut.

The amendments require disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows. The amendments apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Earlier application is permitted which an entity is required to disclose that fact.

Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117: Insurance Contracts

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117: Kontrak asuransi berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 117 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali karena menerbitkan kontrak asuransi seperti didefinisikan dalam PSAK 117.

PSAK 117 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 109 and PSAK 115 on or before the date of initial application of PSAK 117. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first-time adoption because the Company does not issue insurance contracts as defined in PSAK 117.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

r. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2026

PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

s. Laba per saham

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi labar tahun berjalan dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar, yaitu sebesar Rp116,71 (nilai penuh) dan Rp104,96 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

t. Biaya emisi saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

u. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

r. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026

PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107 Financial Instruments: Disclosure on Classification and Measurement of Financial Instruments

This amendment adds and clarifies provisions in PSAK 109 regarding the derecognition of financial liabilities, as well as clarifying the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches. This amendment also modifies the provisions in PSAK 107 regarding the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual requirements that alter the timing or amount of contractual cash flows.

s. Earnings per share

Earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted-average number of shares outstanding, amounting Rp116.71 (full amount) and Rp104.96 (full amount) shares as of December 31, 2024 and 2023 respectively.

t. Share issuance costs

Costs incurred in connection with the Company's issuance of share capital to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the statement of financial position.

u. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- 1) *expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- 2) *held primarily for the purpose of trading,*
- 3) *expected to be realized within 12 months after the reporting period, or*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila: (lanjutan)

- 4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- 1) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Current and non-current classification (continued)

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is: (continued)

- 4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- 1) expected to be settled in the normal operating cycle,
- 2) held primarily for the purpose of trading,
- 3) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- 4) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.063.283 (2023: Rp 3.314.833). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 14.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2024 was Rp12,063,283 (2023: Rp3,314,833). Further details regarding taxation are disclosed in Note 14.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next reporting period are disclosed below. The Company based its assumption and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, laba rugi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2h. Tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat aset tetap selama periode pelaporan.

Beban pajak kini

Perusahaan mengakui beban pajak kini berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimate useful lives of fixed assets (continued)

The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2h. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the reporting period.

Current tax expense

The Company recognizes current tax expense based on the estimated taxable income for the period computed using the prevailing tax rates.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha
(lanjutan)

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp115.528.909 (2023: Rp96.672.346). Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 5.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak, jika besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu realisasi dan jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2m dan 14.

Perhitungan pajak penghasilan tangguhan diungkapkan dalam Catatan 14e.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables
(continued)

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

The carrying amount of the Company's trade receivables before allowance for impairment as of December 31, 2024 was Rp115,528,909 (2023: Rp96,672,346). Further details on trade receivables are disclosed in Note 5.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2m and 14.

The calculation of deferred income tax is disclosed in Note 14e.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Kas		
Rupiah	11.797	98.702
Bank		
Pihak berelasi (Catatan 24a)		
Rupiah	35.385.413	35.082.914
Deposito berjangka		
Pihak berelasi (Catatan 24a)		
Rupiah	775.000.000	635.000.000
Total	810.397.210	670.181.616

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Rupiah
Cash in banks
Related parties (Note 24a)
Rupiah
Time deposits
Related parties (Note 24a)
Rupiah
Total

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Accounts in bank earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank.

Tingkat bunga per tahun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the time deposits are as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Rupiah	6,00% - 7,00%	3,00% - 7,00%	Rupiah

Kas dan setara kas tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Cash and cash equivalents were not used as collateral at the reporting date.

Saldo kas dan setara kas, pada tanggal pelaporan, tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents were not restricted to use at the reporting date.

5. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan umur piutang

Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

5. TRADE RECEIVABLES

a. Based on age

The aging analysis of trade from the date of invoice issuance are as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Belum jatuh tempo	6.089.409	1.567.137	Not yet due
Telah jatuh tempo:			Overdue:
1 - 30 hari	54.415.521	38.627.831	1 - 30 days
31 - 60 hari	11.001.472	10.928.038	31 - 60 days
61 - 90 hari	5.764.327	4.679.312	61 - 90 days
91 - 180 hari	4.499.212	6.686.766	91 - 180 days
Lebih dari 180 hari	33.758.968	34.183.262	More than 180 days
Total	115.528.909	96.672.346	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(35.319.874)	(35.047.899)	Allowance for impairment
Neto	80.209.035	61.624.447	Net

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan pelanggan

b. Based on customer

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pihak ketiga	115.241.009	96.622.587	Third parties
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(35.319.874)	(35.047.899)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	79.921.135	61.574.688	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 24b)	287.900	49.759	Related parties (Note 24b)
Total piutang usaha - neto	80.209.035	61.624.447	Total trade receivable - net

c. Berdasarkan mata uang

c. Based on currency

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Rupiah	115.528.909	96.672.346	Rupiah
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(35.319.874)	(35.047.899)	Allowance for impairment
Neto	80.209.035	61.624.447	Net

d. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

d. The movement in the allowance for impairment of receivables is as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Saldo awal	35.047.899	34.918.843	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan (Catatan 21)	271.975	129.056	Allowance for the year (Note 21)
Total	35.319.874	35.047.899	Total

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on management's evaluation regarding the collectability of each receivable account on December 31, 2024 and 2023, management believes that the allowances for impairment of trade receivables are adequate to cover possible expected credit losses that may arise from uncollectability of trade receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan.

As of December 31, 2024, there is no trade receivables used as collateral.

6. UANG MUKA

6. ADVANCES

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo ini merupakan uang muka yang dikeluarkan untuk kegiatan bongkar muat di terminal serta kegiatan operasional Perusahaan lainnya.

As of December 31, 2024, the balance represents advance payments for loading and unloading activities in terminal and other operational activities of the Company.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

7. ASET KONTRAK

Aset kontrak merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan).

Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pihak ketiga	4.563.725	7.502.672
Pihak berelasi (Catatan 24c)	4.590.265	2.069.246
Total	9.153.990	9.571.918

Rincian umur aset kontrak dihitung sejak tanggal diakuinya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
1 - 30 hari	9.153.990	9.571.918

Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat aset kontrak yang digunakan sebagai jaminan.

7. CONTRACT ASSETS

Contract assets represents receivables from customers for services that have been completed by the Company but have not yet been billed (unbilled receivables).

Details of the account as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Third parties
Related parties (Note 24c)
Total

The aging analysis of contract assets from the recognition dates are as follow:

1 - 30 days

As of December 31, 2024, there is no contract assets used as collateral.

8. ASET TETAP

Mutasi 31 Desember 2024:

8. FIXED ASSETS

Movements in December 31, 2024:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2024						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	Cost
Biaya perolehan						Direct ownership
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	234.793.134	-	-	17.919.082	252.712.216	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	41.324.491	-	-	2.982.464	44.306.955	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	22.746.411	-	-	-	22.746.411	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	150.856.163	-	-	7.831.789	158.687.952	Road and building
Peralatan	14.868.416	-	-	748.330	15.616.746	Equipment
Emplasemen	16.575.694	-	-	5.772.832	22.348.526	Emplacement
Kendaraan	2.153.802	-	-	-	2.153.802	Vehicles
Aset dalam pembangunan	24.968.761	16.661.876	(1.064.619)	(35.254.497)	5.311.521	Construction in progress
Subtotal	508.286.872	16.661.876	(1.064.619)	-	523.884.129	Sub-total
<u>Operasi bersama</u>						<u>Joint operation</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.680.537	-	-	-	4.680.537	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	151.857	-	-	-	151.857	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	438.750	-	-	-	438.750	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	643.361	-	-	-	643.361	Road and building
Peralatan	1.535.822	-	-	-	1.535.822	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Subtotal	11.980.847	-	-	-	11.980.847	Sub-total
Total biaya perolehan	520.267.719	16.661.876	(1.064.619)	-	535.864.976	Total cost
Dikurangi:						Less:
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	50.817.896	10.480.147	-	-	61.298.043	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	30.444.466	3.653.444	-	-	34.097.910	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	18.210.582	941.602	-	-	19.152.184	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	33.700.750	7.135.557	-	-	40.836.307	Road and building
Peralatan	12.324.967	1.165.920	-	-	13.490.887	Equipment
Emplasemen	8.442.476	2.535.559	-	-	10.978.035	Emplacement
Kendaraan	1.723.041	-	-	-	1.723.041	Vehicles
Subtotal	155.664.178	25.912.229	-	-	181.576.407	Sub-total

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

Mutasi 31 Desember 2024: (lanjutan)

Movements in December 31, 2024: (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2024						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Dikurangi: (lanjutan)						Less: (continued)
Akumulasi penyusutan (lanjutan)						Accumulated depreciation (continued)
<u>Operasi bersama</u>						<u>Joint operation</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.247.877	155.985	-	-	1.403.862	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	148.820	-	-	-	148.820	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	429.975	-	-	-	429.975	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	494.840	56.894	-	-	551.734	Road and building
Peralatan	1.505.105	-	-	-	1.505.105	Equipment
Emplasemen	1.420.771	177.596	-	-	1.598.367	Emplacement
Subtotal	5.247.388	390.475	-	-	5.637.863	Sub-total
Total akumulasi penyusutan	160.911.566	26.302.704	-	-	187.214.270	Total accumulated depreciation
Nilai buku	359.356.153				348.650.706	Net book value

Mutasi 31 Desember 2023:

Movements in December 31, 2023:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	230.126.038	4.667.096	-	-	234.793.134	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	41.324.491	-	-	-	41.324.491	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	22.746.411	-	-	-	22.746.411	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	150.856.163	-	-	-	150.856.163	Road and building
Peralatan	15.269.988	-	(401.572)	-	14.868.416	Equipment
Emplasemen	16.575.694	-	-	-	16.575.694	Emplacement
Kendaraan	2.153.802	-	-	-	2.153.802	Vehicles
Aset dalam pembangunan	5.263.426	22.677.222	(170.783)	(2.801.104)	24.968.761	Construction in progress
Subtotal	484.316.013	27.344.318	(572.355)	(2.801.104)	508.286.872	Sub-total
<u>Operasi bersama</u>						<u>Joint operation</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.680.537	-	-	-	4.680.537	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	151.857	-	-	-	151.857	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	438.750	-	-	-	438.750	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	643.361	-	-	-	643.361	Road and building
Peralatan	1.535.822	-	-	-	1.535.822	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Subtotal	11.980.847	-	-	-	11.980.847	Sub-total
Total biaya perolehan	496.296.860	27.344.318	(572.355)	(2.801.104)	520.267.719	Total cost
Dikurangi:						Less:
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	41.306.818	9.511.078	-	-	50.817.896	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	25.294.959	5.149.507	-	-	30.444.466	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	16.314.613	1.895.969	-	-	18.210.582	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	26.870.492	6.830.258	-	-	33.700.750	Road and building
Peralatan	11.107.130	1.255.879	(38.042)	-	12.324.967	Equipment
Emplasemen	6.157.612	2.284.864	-	-	8.442.476	Emplacement
Kendaraan	1.723.041	-	-	-	1.723.041	Vehicles
Subtotal	128.774.665	26.927.555	(38.042)	-	155.664.178	Sub-total
<u>Operasi bersama</u>						<u>Joint operation</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.091.893	155.984	-	-	1.247.877	Port facilities buildings
Instalasi fasilitas pelabuhan	148.820	-	-	-	148.820	Port facilities installation
Alat-alat fasilitas pelabuhan	429.975	-	-	-	429.975	Port facilities equipments
Jalan dan bangunan	437.946	56.894	-	-	494.840	Road and building
Peralatan	1.505.105	-	-	-	1.505.105	Equipment
Emplasemen	1.243.174	177.597	-	-	1.420.771	Emplacement
Subtotal	4.856.913	390.475	-	-	5.247.388	Sub-total
Total akumulasi penyusutan	133.631.578	27.318.030	(38.042)	-	160.911.566	Total accumulated depreciation
Nilai buku	362.665.282				359.356.153	Net book value

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Aset operasi bersama merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh MKO MTKI berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") (Catatan 27c).

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2024 merupakan reklasifikasi aset dalam pembangunan menjadi aset tetap sebesar Rp35.254.497 dan pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan reklasifikasi aset dalam pembangunan menjadi aset takberwujud sebesar Rp2.801.104.

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2024			
	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion
Bangunan fasilitas pelabuhan	23.70%	5.311.521	Desember/December 2026
		5.311.521	
31 Desember/December 31, 2023			
	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion
Bangunan fasilitas pelabuhan	30-89%	12.151.651	Desember/December 2024
Jalan dan bangunan	84%	11.881.401	Februari/February 2024
Peralatan	68%	935.709	Junii/June 2024
		24.968.761	

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset dalam pembangunan yang dimiliki Perusahaan merupakan konstruksi aset tetap yang bersifat *multi-years*.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mengasuransikan aset tetap perusahaan terhadap berbagai risiko pada PT Asuransi Ramayana Tbk melalui asuransi bersama PT Pelindo Multi Terminal Group yang melingkupi aset di wilayah kerja kantor pusat, cabang dan anak perusahaan PT Pelindo Multi Terminal. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul terkait dengan aset yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual atau yang dihentikan dari penggunaan aktif.

8. FIXED ASSETS (continued)

Joint operation assets represent assets that are transferred to be managed by MKO MTKI based on a contractual agreement with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") (Note 27c).

Reclassifications as of December 31, 2024 were the reclassifications of construction in progress into fixed assets amounted Rp35,254,497 and as of December 31, 2023 were the reclassifications of construction in progress into intangible assets amounted Rp2,801,104.

The details of construction in progress are as follows:

As of December 31, 2024 and 2023, assets under construction owned by the Company are multi-years construction of fixed assets.

On December 31, 2024 and 2023, the Company insured its fixed asset against various risks with PT Asuransi Ramayana Tbk through joint insurance with PT Pelindo Multi Terminal Group which covered assets in the working area of the head office, branches and subsidiaries of PT Pelindo Multi Terminal. Management believes that the coverage amount is sufficient to cover possible losses arising from the assets insured.

As of December 31, 2024 and 2023, there were no fixed assets classified as held for sale or terminated from active use.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat perubahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk seluruh aset tetap.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Rincian alokasi beban penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	24.223.824	25.744.776	Cost of revenues (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	2.078.880	1.573.254	General and administrative expenses (Note 21)
Total	26.302.704	27.318.030	Total

Aset tetap kepemilikan langsung dan aset operasi bersama tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

8. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the management believes that there was no change on useful lives, residual values and method of depreciation on all fixed assets.

Management believes that there was no impairment in the value of directly owned fixed assets as of December 31, 2024 and 2023.

Details of allocation of depreciation expenses for fixed assets are as follows:

Directly owned fixed assets and joint operation assets were not used as collateral at reporting date.

9. ASET TAKBERWUJUD

Mutasi 31 Desember 2024

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520
Piranti lunak	10.702.735	-	-	-	10.702.735
Total biaya perolehan	20.418.255	-	-	-	20.418.255
Dikurangi:					
Akumulasi amortisasi					
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520
Piranti lunak	6.071.325	1.407.109	-	-	7.478.434
Total akumulasi amortisasi	15.786.845	1.407.109	-	-	17.193.954
Nilai buku	4.631.410				3.224.301

Mutasi 31 Desember 2023

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520
Piranti lunak	7.901.631	-	-	2.801.104	10.702.735
Total biaya perolehan	17.617.151	-	-	2.801.104	20.418.255
Dikurangi:					
Akumulasi amortisasi					
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520
Piranti lunak	4.307.485	1.763.840	-	-	6.071.325
Total akumulasi amortisasi	14.023.005	1.763.840	-	-	15.786.845
Nilai buku	3.594.146				4.631.410

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Aset takberwujud berupa studi tata kelola perusahaan merupakan jasa konsultasi penyusunan *business model* dan target *operating model* yang dilakukan oleh PT Boston Consulting Indonesia dan diamortisasi selama 5 (lima) tahun.

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi integrasi *autogate* untuk sistem operasi terminal, aplikasi *dashboard system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, dan aplikasi *invoice* untuk sistem operasi keuangan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban amortisasi seluruhnya dialokasikan pada beban umum dan administrasi (Catatan 21).

9. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Intangible assets in form of corporate governance study represents consulting services of business model and target operating model provided by PT Boston Consulting Indonesia and amortized for 5 (five) years.

Software represents cost incurred for the development of autogate integration for terminal operating system, dashboard system application to present information regarding operational performance, and invoice application for finance system operation.

Management believes that there was no impairment in the value of directly owned intangible assets as of December 31, 2024 and 2023.

Amortization expenses are wholly allocated to general and administrative expenses (Note 21).

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

The movements in right-of-use assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga perolehan					Acquisition Costs
Tanah dan bangunan					Land and port facilities buildings
fasilitas pelabuhan	904.461.561	11.844.953	-	-	916.306.514
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962
Kendaraan	5.386.245	1.345.470	(312.093)	-	6.419.622
Subtotal	909.946.768	13.190.423	(312.093)	-	922.825.098
Dikurangi:					Less:
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Tanah dan bangunan					Land and port facilities buildings
fasilitas pelabuhan	299.405.624	81.495.892	-	-	380.901.516
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962
Kendaraan	4.154.796	1.486.885	(178.339)	-	5.463.342
Subtotal	303.659.382	82.982.777	(178.339)	-	386.463.820
Nilai buku bersih	606.287.386				Net book value
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga perolehan					Acquisition Costs
Tanah dan bangunan					Land and port facilities buildings
fasilitas pelabuhan	894.236.920	10.224.641	-	-	904.461.561
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962
Kendaraan	5.017.052	369.193	-	-	5.386.245
Subtotal	899.352.934	10.593.834	-	-	909.946.768
Dikurangi:					Less:
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Tanah dan bangunan					Land and port facilities buildings
fasilitas pelabuhan	221.359.623	78.046.001	-	-	299.405.624
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962
Kendaraan	2.477.656	1.677.140	-	-	4.154.796
Subtotal	223.936.241	79.723.141	-	-	303.659.382
Nilai buku bersih	675.416.693				Net book value

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)

10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Liabilitas sewa			Lease liabilities
Bagian lancar	40.418.552	42.127.118	Current portion
Bagian jangka panjang	388.237.935	359.479.683	Non-current portion
Total	428.656.487	401.606.801	Total

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 23)	31.793.535	46.424.352	Interest on lease liabilities (Note 23)
Beban penyusutan aset hak-guna	82.982.777	79.723.141	Depreciation of right-of-use assets
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	1.101.893	915.365	Expense related to short-term liabilities low-value assets

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beban penyusutan aset hak guna dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan (Catatan 20).

As of December 31, 2024 and 2023, the depreciation expense of right-of-use assets was recorded as part of cost of revenues (Note 20).

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

Some leases contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Liabilitas sewa			Lease liabilities
Saldo awal	401.606.801	802.834.177	Beginning balance
Penambahan utang sewa	13.190.423	10.593.834	Additional lease liabilities
Pengurangan	(139.282)	-	Deductions
Penambahan bunga	31.793.535	46.424.352	Addition of interest
Pembayaran	(17.794.990)	(458.245.562)	Payment
Total	428.656.487	401.606.801	Total

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

11. UTANG USAHA

- a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pihak ketiga	6.688.005	5.725.244	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 24e)	40.615.547	40.147.885	Related parties (Note 24e)
Total	47.303.552	45.873.129	Total

- b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Rupiah	47.303.552	45.873.129	Rupiah

11. TRADE PAYABLES

- a. By supplier

- b. By currency

12. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi merupakan utang atas pembelian dan pembangunan aset tetap dan aset takberwujud.

12. OTHER PAYABLES

Other payables to third parties and related party are payables for purchase and construction of fixed assets and intangible assets.

13. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Uang titipan:			Deposits received:
Pihak ketiga			Third parties
Pelanggan	2.354.843	4.505.218	Customers
Vendor	1.342.400	1.073.879	Vendors
Karyawan	1.031.001	944.137	Employees
Pihak berelasi (Catatan 24g)	1.305.051	1.183.184	Related parties (Note 24g)
Subtotal	6.033.295	7.706.418	Sub-total
Utang dividen:			Dividend payable:
Pihak ketiga	-	8.863.486	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 24g)	-	30.595.258	Related parties (Note 24g)
Subtotal	-	39.458.744	Sub-total
Total	6.033.295	47.165.162	Total

14. PERPAJAKAN

- a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pajak Pertambahan Nilai	-	16.393.419	Value Added Tax
Total	-	16.393.419	Total

14. TAXATION

- a. Prepaid Tax

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pajak penghasilan badan			Corporate income tax
Tahun berjalan	12.063.283	3.314.833	Current year
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	123.327	110.506	Article 4(2)
Pasal 15	-	9.706	Article 15
Pasal 21	915.468	3.912.011	Article 21
Pasal 23	751.462	1.167.256	Article 23
Pasal 25	4.240.076	6.233.415	Article 25
Pasal 26	234.507	-	
Pajak Pertambahan Nilai	2.009.512	-	Value Added Tax
Total	20.337.635	14.747.727	Total

c. Beban pajak final

c. Final tax expense

Beban pajak final timbul dari pajak final atas pendapatan sewa ruang kantor.

The final tax expense arises from the final tax on rental income for rent of the office spaces.

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

Beban (manfaat) pajak penghasilan terdiri dari:

Income tax expense (benefit) consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan	59.779.205	50.707.949	Current tax expenses - current year
Manfaat pajak tangguhan	(2.148.946)	(4.742.363)	Deferred tax benefit
Total	57.630.259	45.965.586	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	269.846.486	236.820.430	Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Pendapatan kena pajak final	(549.782)	(14.297.569)	Income subject to final tax
Laba sebelum pajak penghasilan badan	269.296.704	222.522.861	Income before corporate income tax
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	271.977	129.056	Allowance for impairment of trade receivable
Imbalan kerja pegawai	9.256.132	(2.935.878)	Employee benefit
Penyusutan dan amortisasi	(4.678.932)	(3.261.103)	Depreciation and amortization
Liabilitas sewa	(76.439.518)	(51.475.363)	Lease liabilities
Penyusutan aset hak-guna	82.982.777	79.723.141	Right-of-use assets depreciation

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Reconciliation between income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income are as follows: (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2024	2023	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	36.085.243	23.824.762	Non-deductible expenses
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(45.050.723)	(38.036.797)	Finance income subject to final tax
Taksiran penghasilan kena pajak	271.723.660	230.490.679	Estimated taxable income
Beban pajak penghasilan - kini	59.779.205	50.707.949	Income tax expense - current
Dikurangi: pajak penghasilan dibayar di muka	(47.715.922)	(47.393.116)	Less: prepaid income taxes
Taksiran utang pajak penghasilan	12.063.283	3.314.833	Estimated income tax payable

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before corporate income tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expense are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	269.846.486	236.820.430	Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi: Pendapatan kena pajak final	(549.782)	(14.297.569)	Less: Income subject to final tax
Laba sebelum pajak penghasilan badan	269.296.704	222.522.861	Income before corporate income tax
Beban pajak penghasilan pada tarif pajak yang berlaku	59.245.275	48.955.029	Income tax expense at the applicable tax rate
Pengaruh perbedaan tetap pada tarif pajak yang berlaku:			Effect of permanent differences at the applicable tax rate:
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	7.938.753	5.241.448	Non-deductible expenses
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(9.911.159)	(8.368.095)	Finance income subject to final tax
Penyesuaian lain	357.390	137.204	Other adjustments
Beban pajak penghasilan	57.630.259	45.965.586	Income tax expenses

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- Sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).
- Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan tidak memenuhi persyaratan penurunan tarif pajak tersebut di atas.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

e. Pajak penghasilan tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	7.770.372	7.710.537
Imbalan kerja pegawai	6.255.049	4.309.530
Penyusutan dan amortisasi	735.791	1.682.653
Liabilitas sewa	161.149.763	175.443.053
Penyusutan aset hak-guna	(117.999.481)	(133.383.225)
Neto	57.911.494	55.762.548

14. TAXATION (continued)

d. Income tax expense (continued)

The above calculation of estimated taxable income are used as a basis in filing the Annual Corporate Income Tax Return.

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:

- 22% effective starting fiscal year 2022 (previously 20% as stipulated in Perppu No.1 Year 2020 dated March 31, 2020).
- Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than the rate as stated in point a above.

For the year ended December 31, 2024 and 2023, the Company did not comply to the requirements for lower tax rate as stated above.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time tax becomes due.

e. Deferred income tax

The details of the Company's deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Allowance for impairment of trade receivables
Employee benefit
Depreciation and amortization
Lease liabilities
Right-of-use assets depreciation
Net

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

e. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan)

e. Deferred income tax (continued)

Mutasi aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The movement of the Company's deferred tax assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/Year ended December 31, 2024					
	Dibebankan ke/Charged to				
	Saldo awal/ Beginning balance	Laba (rugi)/ Profit (loss)	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustments	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	7.710.537	59.835	-	-	7.770.372
Imbalan kerja pegawai	4.309.530	2.036.349	-	(90.830)	6.255.049
Penyusutan dan amortisasi	1.682.653	(1.029.365)	-	82.503	735.791
Liabilitas sewa	175.443.053	(16.816.694)	-	2.523.404	161.149.763
Total	189.145.773	(15.749.875)	-	2.515.077	175.910.975
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Penyusutan aset hak-guna	(133.383.225)	18.256.211	-	(2.872.467)	(117.999.481)
Total	(133.383.225)	18.256.211	-	(2.872.467)	(117.999.481)
Aset pajak tangguhan - neto	55.762.548	2.506.336	-	(357.390)	57.911.494
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/Year ended December 31, 2023					
	Dibebankan ke/Charged to				
	Saldo awal/ Beginning balance	Laba (rugi)/ Profit (loss)	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustments	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	7.682.145	28.392	-	-	7.710.537
Imbalan kerja pegawai	4.955.423	(645.893)	-	-	4.309.530
Penyusutan dan amortisasi	2.364.292	(717.443)	-	35.804	1.682.653
Liabilitas sewa	184.609.997	(11.324.580)	-	2.157.636	175.443.053
Total	199.611.857	(12.659.524)	-	2.193.440	189.145.773
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Penyusutan Aset hak-guna	(148.591.672)	17.539.091	-	(2.330.644)	(133.383.225)
Total	(148.591.672)	17.539.091	-	(2.330.644)	(133.383.225)
Aset pajak tangguhan - neto	51.020.185	4.879.567	-	(137.204)	55.762.548

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

The management believes that the deferred tax assets can be fully recovered through future taxable income.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak

Pada berbagai tanggal di tahun 2024, Perusahaan menerima surat tagihan pajak atas berbagai macam pajak penghasilan untuk berbagai masa pajak di tahun 2022 dan PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2022. Perusahaan mengakui beban sebesar Rp6.798 sehubungan dengan tagihan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2024.

Pada berbagai tanggal di tahun 2023, Perusahaan menerima surat tagihan pajak atas berbagai macam pajak penghasilan untuk berbagai masa pajak di tahun 2019, 2020 dan 2023 dan PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2020. Perusahaan mengakui beban sebesar Rp21.831 sehubungan dengan tagihan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2023.

14. TAXATION (continued)

f. Tax assesment letter

On various dates in 2024, the Company received tax underpayment for various withholding taxes for various tax periods in 2022 and VAT for various tax periods in 2022. The Company recognized an expense of Rp6,798 in relation to these claims in the statement of profit or loss and other comprehensive income year 2024.

On various dates in 2023, the Company received tax underpayment for various withholding taxes for various tax periods in 2019, 2020 and 2023 and VAT for various tax periods in 2020. The Company recognized an expense of Rp21,831 in relation to these claims in the statement of profit or loss and other comprehensive income year 2023.

15. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Kerjasama mitra usaha	28.785.179
Imbalan kerja	14.595.003
Pegawai	13.934.198
Umum	3.927.836
Bahan	1.577.989
Asuransi	1.455.165
Pemeliharaan	740.933
Administrasi kantor	674.560
Total	65.690.863

Beban akrual - kerjasama mitra usaha merupakan beban akrual atas pembagian pendapatan yang diperoleh dari pencapaian besaran realisasi kegiatan pelayanan jasa bongkar muat.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Beban akrual - imbalan kerja terutama merupakan akrual dari beban yang dialokasikan oleh Pelindo kepada Perusahaan atas imbalan pasca kerja pegawai perbantuan Pelindo yang ditempatkan di Perusahaan.

Beban akrual - umum terutama merupakan beban akrual atas beban perjalanan dinas, renovasi ruangan, dan umum lainnya.

15. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	18.679.614	Partnerships
	6.437.306	Employee benefits
	13.277.902	Employees
	1.466.020	General
	951.428	Material
	79.931	Insurance
	4.624	Maintenance
	1.465.878	Office administration
Total	42.362.703	Total

Accrued expenses - partnership mainly represents accrued expenses from sharing revenue derived from the achievement of loading and unloading activities.

Accrued expenses - employee mainly represents accrued expenses for employee's bonus and director's tantiem.

Accrued expenses - employee benefits mainly represents accrual from expenses allocated from Pelindo to the Company for post employment benefits expense of Pelindo's employee which placed in the Company.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for business trip, renovation, and others.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

16. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total nilai nominal/ Total nominal amount	Shareholders
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	1.296.144.749	71,28%	129.614.475	PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	13.092.371	0,72%	1.309.237	PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")
Publik:				Public:
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	100.682.600	5,54%	10.068.260	PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	408.465.100	22,46%	40.846.510	Others (each less than 5% of shares)
Total	1.818.384.820	100,00%	181.838.482	Total

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., modal dasar Perusahaan berjumlah Rp40.000.000 yang terbagi atas 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham.

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 terdiri dari 990.000 saham dengan nilai nominal Rp9.900.000 milik Pelindo dan 10.000 saham dengan nilai nominal Rp100.000 milik MTI.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 48 tanggal 14 April 2018 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp120.000.000 melalui kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp96.000.000 dan kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp24.000.000.

Perubahan tersebut telah diberitahukan oleh Perusahaan melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0151353 tanggal 17 April 2018 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU0008618.AH.01.02 tanggal 17 April 2018.

16. SHARE CAPITAL

The composition of shares ownership in the Company as of December 31, 2024 and 2023, respectively, are as follows:

Based on the Company Establishment Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., authorized shares of the Company amounting to Rp40,000,000 divided into 4,000,000 shares with a nominal amount of Rp10,000 (full amount) per share.

Of the authorized shares, 1,000,000 shares with nominal amount of Rp10,000,000 has been issued and fully paid which consists of 990,000 shares with a nominal amount of Rp9,900,000 owned by Pelindo and 10,000 shares with a nominal amount of Rp100,000 owned by MTI.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company No. 48 dated April 14, 2018 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed among others:

- Increase of authorized share capital of the Company to be amounting to Rp500,000,000 consisting of 5,000,000,000 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share.
- Increase of issued and paid-up capital amounting to Rp120,000,000 through capitalization of general reserves amounting to Rp96,000,000 and capitalization of unappropriated retained earnings amounting to Rp24,000,000.

The change has been notified by the Company through Letter No. AHU-AH.01.03-0151353 dated April 17, 2018 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU0008618.AH.01.02 dated April 17, 2018.

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Perusahaan No. 26 tanggal 11 Mei 2018 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui diantaranya:

- Melepaskan saham portepel dalam rangka penawaran umum perdana saham para pemegang saham serta menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang berasal dari saham portepel dalam rangka penawaran umum perdana saham yang sebelumnya sebesar Rp130.000.000 yang terbagi atas 1.300.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham, dengan tambahan Rp120.923.172 sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp130.923.712 yang terbagi atas 1.309.237.120 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Peningkatan modal disetor sebesar Rp923.712 dilakukan melalui kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp30.991 dan kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp892.721.

Perusahaan telah melakukan peningkatan modal saham ditempatkan dan disetor penuh melalui penawaran umum efek sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1b.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Pelindo pada Perusahaan kepada PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") nomor SK.03/3/1/1/PBAN/UTMN/PLND-22 tanggal 3 Januari 2022, saham Perusahaan milik Pelindo sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dialihkan kepada SPMT.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 04 tanggal 1 Juli 2022 dari Ashoya Ratam, SH, MKn. notaris di Jakarta, saham Perusahaan milik Pelindo sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dialihkan kepada SPMT. Perubahan tersebut telah diberitahukan dan Perusahaan telah menerima surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.09.0013090 tanggal 8 Juli 2022.

16. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed of Shareholders Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders (Circular of Shareholders GMS) of the Company No. 26 dated May 11, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed among others:

- *Issuing the portfolio shares in accordance with the initial public offering of shares of the shareholders and agreeing the increase of issued and paid-up capital of the Company from the portfolio shares in accordance with the initial public offering of shares from previously amounted Rp130,000,000 consisted of 1,300,000,000 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per shares, with addition amounting to Rp120,923,172 so that share issued and paid-up capital of the Company to be amounting to Rp130,923,712 consisted of 1,309,237,120 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per shares.*
- *The increase of paid-up capital amounting to Rp923,712 are made through capitalization of unappropriated retained earnings amounting to Rp30,991 and capitalization of general reserve amounting to Rp892,721.*

The Company has increased its issued and fully paid capital stock through public offerings of shares of stock as disclosed in Note 1b.

Based on The Agreement of Transfer of Right of Shares of Pelindo in the Company to PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") number SK.03/3/1/1/PBAN/UTMN/PLND-22 dated January 3, 2022, the Company shares owned by Pelindo amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% were transferred to SPMT.

Based on the Deed of Statement of Resolutions of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 04 July 1, 2022 from Ashoya Ratam, SH, MKn. notary in Jakarta, the Company shares owned by Pelindo amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% were transferred to SPMT. The changes have been reported and the Company has received from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.09.0013090 dated July 8, 2022.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Agio Saham (Catatan 1b)	784.087.458
Biaya emisi saham	(34.627.174)
Total	749.460.284

Tambahan modal disetor merupakan agio saham yang berasal dari selisih lebih hasil penawaran umum perdana atas nilai nominal saham setelah dikurangi biaya penerbitan.

17. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	784.087.458	Share premium (Note 1b)
	(34.627.174)	Share issuance cost
Total	749.460.284	Total

Additional paid-in capital represents premium on stock from excess of proceeds from the initial public offering of shares over par value after deducting the issuance costs.

18. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No.26 tanggal 10 Juni 2024 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2023 sebagai berikut:

- pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp152.906.114, dimana sebesar Rp39.458.744 telah dibagikan sebagai dividen interim tahun 2023 sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp113.447.369;
- cadangan umum sebesar Rp2.000.000;
- sisanya sebesar Rp35.948.730 akan digunakan sebagai laba ditahan.

Pembagian dividen tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 8, 10, dan 11 Juli 2024.

Pada tanggal 25 November 2024, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2024 sebesar Rp44.407.321 dan telah dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp12.434.049 kepada publik dan pada tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp31.653.540 kepada SPMT dan sebesar Rp319.732 kepada MTI.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No.25 tanggal 27 Juni 2023 dari Titik Krisna Mukti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2022 sebagai berikut:

- pembagian dividen sebesar 70% dari laba bersih atau sebesar Rp113.207.337, dimana sebanyak Rp22.707.904 telah dibagikan sebagai dividen interim tahun 2022 sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan berjumlah Rp90.499.433;
- cadangan umum sebesar Rp2.000.000;
- sisa 29% sebesar Rp46.517.430 sebagai laba ditahan.

18. CASH DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

Based on the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No.26 dated June 10, 2024 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company's shareholders determine the use of the Company's net profit for the year 2023 as follows:

- distribution of dividends to shareholders amounting to Rp152,906,114, in which Rp39,458,744 has been distributed as interim dividend for 2023, therefore, the remaining amount will be distributed as final dividend amounting to Rp113,447,369;
- general reserves amounting to Rp2,000,000;
- the remaining amounting to Rp35,948,730 as retained earnings.

The dividend distribution above has been fully paid on July 8, 10, and 11, 2024.

On November 25, 2024, the Company declared interim dividend for 2024 amounted Rp44,407,321, and was paid on December 19, 2024 to Public amounted to Rp12,434,049 and was paid on December 30, 2024 amounted to Rp31,653,540 to SPMT and amounted to Rp319,732 to MTI.

Based on the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No.25 dated June 27, 2023 of Titik Krisna Mukti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company's shareholders determine the use of the Company's net profit for the year 2022 as follows:

- dividend distribution of 70% of net profit or amounting to Rp113,207,337, in which Rp22,707,904 has been distributed as interim dividend for 2022, therefore, the remaining amount will be distributed as final dividend amounting to Rp90,499,433;
- general reserves amounting to Rp2,000,000;
- the remaining 29% amounting to Rp46,517,430 as retained earnings.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Pembagian dividen tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 26 dan 27 Juli 2023.

Pada tanggal 14 Desember 2023, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2023 sebesar Rp39.458.744 dan telah dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp11.048.298 kepada publik, tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp28.126.341 kepada SPMT, dan tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp284.105 kepada MTI.

18. CASH DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

The dividend distribution above has been fully paid on July 26 and 27, 2023.

On December 14, 2023, the Company declared interim dividend for 2023 amounted Rp39,458,744, and was paid on January 10, 2024 to Public amounted to Rp11,048,298 and was paid on March 1, 2024 amounted to Rp28,126,341 to SPMT, and was paid on June 11, 2024 amounted to Rp284,105 to MTI.

19. PENDAPATAN OPERASI

19. OPERATING REVENUES

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2024	2023	
Pelayanan jasa terminal	743.014.654	670.809.173	Terminal services
Pelayanan jasa barang	53.735.491	40.953.474	Cargo services
Pelayanan rupa-rupa usaha	27.295.909	9.144.724	Miscellaneous services
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	549.782	14.297.569	Land, building, water and electricity
Total	824.595.836	735.204.940	Total

Pendapatan operasi - pelayanan jasa terminal terdiri dari kegiatan bongkar muat kargo dan penumpukan.

Operating revenues - terminal services consists of cargo loading-unloading activities and stacking yard.

Pendapatan operasi - pelayanan jasa barang terutama merupakan pendapatan jasa dermaga atas penggunaan fasilitas pelabuhan Perusahaan.

Operating revenues - cargo services mainly represents revenue from usage of Company's port facilities.

Pendapatan operasi - pelayanan rupa-rupa usaha terutama merupakan atas layanan operasi di luar area pelabuhan dan jasa kebersihan.

Operating revenues - miscellaneous services mainly represents revenue from operational services outside the port area and port cleaning services.

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers which represents more than 10% of the total revenues are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		Persentase terhadap jumlah Pendapatan/Percentage to total Revenue		
	2024	2023	2024	2023	
PT Bandar Krida Jasindo	208.077.100	165.286.791	25,23	22,48	PT Bandar Krida Jasindo
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	117.007.818	72.316.987	14,19	9,84	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Total	325.084.918	237.603.778	39,42	32,32	Total

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

20. COST OF REVENUES

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2024	2023	
Kerjasama mitra usaha	202.194.866	150.752.551	Partnership
Penyusutan (Catatan 8 dan 10)	107.206.601	105.467.917	Depreciation (Note 8 and 10)
Tenaga kerja non-organik	58.968.168	47.623.881	Non-organic labor

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

20. COST OF REVENUES (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2024	2023	
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	53.582.006	54.143.451	Salaries, wages, and employee benefits
Konsesi	16.831.581	19.324.504	Concession
Pemeliharaan	14.838.033	11.097.084	Maintenance
Bahan dan utilitas	14.037.834	13.307.604	Supplies and utilities
Alokasi imbalan pasca kerja	4.459.541	3.532.668	Allocation for post employment benefit
Asuransi	1.835.178	1.402.564	Insurance
Beban eksploitasi lainnya	3.124.762	2.075.687	Other exploitation expenses
Total	477.078.570	408.727.911	Total

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada transaksi dari satu pemasok atau mitra dengan total pembelian kumulatif melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan.

During the year ended December 31, 2024 and 2023, there were no purchases made from any single supplier or partner with a cumulative amount exceeding 10% of total sales of the Company.

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2024	2023	
Pemeliharaan	17.686.687	7.646.950	Maintenance
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	14.929.972	17.219.936	Salaries, wages, and employee benefits
Tenaga kerja non-organik	11.709.991	11.314.894	Non-organic labor
Beban umum lainnya	10.313.969	6.752.643	Other general expenses
Pajak bumi dan bangunan	8.940.330	7.033.229	Land and building taxes
Perjalanan dinas	4.638.306	2.147.047	Business travelling
Konsultan	4.218.766	4.398.070	Consultant
Bahan dan utilitas	3.911.470	4.232.388	Supplies and utilities
Alokasi imbalan pasca kerja	3.698.156	2.904.638	Allocation for post employment benefit
Promosi dan pemasaran	2.372.166	2.501.839	Promotion and marketing
Penyusutan (Catatan 8)	2.078.880	1.573.254	Depreciation (Note 8)
Administrasi kantor	1.607.070	4.889.742	Office administration
Amortisasi (Catatan 9)	1.407.109	1.763.840	Amortization (Notes 9)
Pendidikan dan pelatihan	1.156.584	986.876	Training and workshop
Asuransi	482.563	848.827	Insurance
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	271.975	129.056	Allowance for impairment of trade receivables (Note 5)
Total	89.423.994	76.343.229	Total

22. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA

22. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2024	2023	
Pendapatan operasi lainnya:			Other operating income:
Pendapatan denda	3.945.751	70.329	Income from penalty
Penyesuaian konsesi	3.877.647	-	Concession adjustment
Penyesuaian tantiem	1.591.947	-	Tantien adjustment
Lain-lain	3.330.201	3.710.207	Others
Total	12.745.546	3.780.536	Total

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

22. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA
(lanjutan)

22. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES
(continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Beban operasi lainnya:			Other operating expenses:
Pajak final pendapatan keuangan	8.972.294	6.475.710	Final tax from finance income
Denda/klaim	2.403.713	94.749	Penalty/claim
Rugi penghapusan aset tetap	1.064.619	534.313	Loss on disposal fixed assets
Lain-lain	1.808.894	1.601.579	Others
Total	14.249.520	8.706.351	Total

23. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

23. FINANCE INCOME AND EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Pendapatan keuangan:			Finance income:
Bunga deposito berjangka	43.873.242	36.300.305	Interests on time deposits
Bunga jasa giro	1.177.481	1.736.492	Interests on current accounts
Total	45.050.723	38.036.797	Total
Beban keuangan:			Finance expense:
Bunga aset sewaan (Catatan 10)	31.793.535	46.424.352	Interest on lease liabilities (Note 10)
Total	31.793.535	46.424.352	Total

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related parties	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas induk PT Pelindo Multi Terminal/ Parent entity of PT Pelindo Multi Terminal	PT Pelabuhan Indonesia ("Pelindo")	Imbalan kerja, konsesi, sewa, dan kerjasama mitra usaha/ Employee benefit, concession, rent and business partnership
Entitas induk/ Parent Entity	PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	Dividen, kerjasama mitra usaha/ Dividend, business partnership
Entitas sepengendalian Pelindo/ Entities under common control Pelindo	PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Layanan sewa ruang kantor/ Office leases
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Layanan teknologi informasi/ Information technology services
	PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Penyedia listrik/ Electricity provider
	PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	Layanan sistem informasi/ Information system services

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related parties	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas sepengendalian Pelindo/ (lanjutan) Entities under common control Pelindo (continued)	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Pendidikan dan pelatihan/ Training and education
	PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Dividen, kepemilikan saham/ Dividend, ownership of shares
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Pemeliharaan alat/ Equipment maintenance
	PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Kerjasama mitra usaha/ Business partnership
	PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	Penyedia Tenaga Alih Daya/ Outsourcing
	PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")	Penyedia listrik / Electricity provider
	PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Kerjasama mitra usaha / Business partnership
	PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Dividen, kerjasama mitra usaha, kepemilikan saham / Dividend, business partnership, ownership of shares
	PT Berkah Industri Mesin Angkat ("BIMA")	Kerjasama mitra usaha / Business partnership
Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia/ Entities under common control of the Government of the Republic of Indonesia	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/ Financial transaction
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/ Financial transaction
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/ Financial transaction
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/ Financial transaction
	PT BNI Life Insurance	Asuransi tenaga kerja/ Employee insurance
	PT Mandiri Sekuritas	Perantara perdagangan efek/ Securities Broker
	PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Layanan kesehatan/ Health services
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Lain-lain/Others
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) ("KBN")	Sewa/Lease
	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ("ASDP")	Kerjasama mitra usaha / Business partnership

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	Jumlah/Total		Persentase terhadap total Aset/Percentage to total Assets		
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Bank					Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.141.275	32.715.745	1,41	1,83	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.826.303	2.235.597	0,48	0,13	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	417.835	131.572	0,02	0,01	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	400.000.000	385.000.000	21,61	21,53	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	375.000.000	250.000.000	20,26	13,98	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total	810.385.413	670.082.914	43,78	37,48	Total

b. Piutang usaha (Catatan 5)

b. Trade receivable (Note 5)

	Jumlah/Total		Persentase terhadap total Aset/Percentage to total Assets		
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pelindo	240.882	14.419	0,01	0,00	Pelindo
ASDP	33.266	-	0,00	0,00	ASDP
SPMT	8.348	-	0,00	0,00	SPMT
PTP	5.404	-	0,00	0,00	PTP
MTI	-	35.340	0,00	0,00	MTI
Total	287.900	49.759	0,01	0,00	Total

c. Aset kontrak (Catatan 7)

c. Contract assets (Note 7)

	Jumlah/Total		Persentase terhadap total Aset/Percentage to total Assets		
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
SPMT	4.232.539	1.760.910	0,23	0,10	SPMT
Pelindo	357.726	308.336	0,02	0,02	Pelindo
Total	4.590.265	2.069.246	0,25	0,12	Total

d. Aset tidak lancar lainnya

d. Other non-current assets

	Jumlah/Total		Persentase terhadap total Aset/Percentage to total Assets		
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Uang jaminan					Guarantee deposits
KBN	2.359.191	2.359.191	0,13	0,13	KBN
EPI	305.805	305.805	0,02	0,02	EPI
RSP	300.000	300.000	0,02	0,02	RSP
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	190.000	190.000	0,01	0,01	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Total	3.154.996	3.154.996	0,18	0,18	Total

Aset tidak lancar lainnya merupakan uang jaminan pelayanan listrik, lapangan penumpukan dan pelayanan kesehatan.

Guarantee deposits represents deposits for electricity services, storage yard and health services.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)

e. Utang usaha (Catatan 11)

e. Trade payables (Note 11)

	Jumlah/Total		Persentase terhadap total Liabilitas/Percentage to total Liabilities		
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pelindo	28.586.311	27.061.064	4,99	4,79	Pelindo
PDS	5.791.956	2.531.585	1,01	0,45	PDS
ILCS	2.026.795	5.454.304	0,35	0,96	ILCS
KBN	1.148.795	-	0,20	0,00	KBN
EPI	1.088.969	1.176.881	0,19	0,21	EPI
IPC TPK	601.269	886.070	0,10	0,16	IPC TPK
PMLI	531.169	563.282	0,09	0,10	PMLI
RSP	477.194	296.352	0,08	0,05	RSP
JPPI	225.307	1.047.672	0,04	0,19	JPPI
LEGI	127.431	-	0,02	0,00	LEGI
MMI	10.351	1.753	0,00	0,00	MMI
PTP	-	760.663	0,00	0,13	PTP
ISMA	-	352.465	0,00	0,06	ISMA
PII	-	15.794	0,00	0,00	PII
Total	40.615.547	40.147.885	7,07	7,10	Total

f. Utang lain-lain (Catatan 12)

f. Other payables (Note 12)

	Jumlah/Total		Persentase terhadap total Liabilitas/Percentage to total Liabilities		
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ILCS	2.982.464	748.330	0,52	0,13	ILCS
EPI	1.055.502	1.055.502	0,18	0,19	EPI
Total	4.037.966	1.803.832	0,70	0,32	Total

g. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 13)

g. Other current liabilities (Note 13)

	Jumlah/Total		Persentase terhadap total Liabilitas/Percentage to total Liabilities		
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Utang titipan					Deposits received
PT BNI Life Insurance	1.123.303	1.074.776	0,20	0,19	PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas	181.748	-	0,03	0,00	PT Mandiri Sekuritas
MTI	-	88.291	0,00	0,02	MTI
IPC TPK	-	20.117	0,00	0,00	IPC TPK
Utang dividen					Dividend payables
SPMT	-	28.126.341	0,00	4,97	SPMT
PII	-	2.184.812	0,00	0,39	PII
MTI	-	284.105	0,00	0,05	MTI
Total	1.305.051	31.778.442	0,23	5,62	Total

h. Pendapatan operasi (Catatan 19)

h. Operating revenues (Note 19)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2024	2023	2024	2023	
SPMT	12.665.173	1.760.910	1,54	0,24	SPMT
Pelindo	394.020	308.336	0,05	0,04	Pelindo
MTI	-	184.000	0,00	0,03	MTI
Total	13.059.193	2.253.246	1,59	0,31	Total

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

24. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)

i. Beban pokok pendapatan (Catatan 20)

i. Cost of revenues (Note 20)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		Persentase terhadap total Beban Pokok Pendapatan/Percentage to total Cost of Revenues		
	2024	2023	2024	2023	
PDS	56.635.278	57.503.823	11,87	14,07	PDS
Pelindo	41.564.989	45.534.637	8,71	11,14	Pelindo
ILCS	14.350.503	8.235.300	3,01	2,01	ILCS
EPI	4.548.872	3.633.554	0,95	0,89	EPI
IPC TPK	3.160.198	3.371.537	0,66	0,82	IPC TPK
MMI	621.152	652.430	0,13	0,16	MMI
PMLI	600.586	1.313.932	0,13	0,32	PMLI
JPPi	402.473	1.725.959	0,08	0,42	JPPi
LEGI	196.257	207.158	0,04	0,05	LEGI
MTI	45.493	129.969	0,01	0,03	MTI
EDII	43.000	52.000	0,01	0,01	EDII
BIMA	31.735	-	0,01	0,00	BIMA
ISMA	-	13.421.410	0,00	3,28	ISMA
Total	122.200.536	135.781.709	25,61	33,20	Total

j. Kompensasi personil manajemen kunci

j. Key management personnel compensation

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Imbalan kerja jangka pendek	9.695.656	10.081.645	Short-term employee benefits

25. PENGUKURAN NILAI WAJAR

25. FAIR VALUE MEASUREMENT

Instrumen Keuangan

Financial Instruments

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

The carrying values of financial instruments presented in the statement of financial position approximate their fair values.

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, uang jaminan, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang titipan, utang dividen, dan liabilitas sewa kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, contract assets, guarantee deposits, trade payables, other payables, accrued expenses, deposits received, dividend payables, and lease liabilities are reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

Fair value estimation is judgemental and involved various boundaries, including:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
- Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

25. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Informasi Nilai Wajar

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, hierarki nilai wajar Perusahaan untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2024/December 31, 2024				
Total/ Total	Level 1/ Level 1	Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Aset tetap *)	8.253.000	-	8.253.000	Fixed assets *)

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp6.342.984/For fixed assets with net book value of Rp6,342,984

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp6.342.984/For fixed assets with net book value of Rp6,342,984

31 Desember 2023/December 31, 2023					
Total/ Total	Level 1/ Level 1	Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3		
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar					Non-current Assets
Aset tetap *)					Fixed assets *)
8.298.900	-	8.298.900	-		

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp6.733.459/For fixed assets with net book value of Rp6,733,459

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp6.733.459/For fixed assets with net book value of Rp6,733,459

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Level 1 dan Level 2, dan tidak terdapat pengalihan dari Level 3 pengukuran nilai wajar.

As of December 31, 2024 and 2023, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan selain yang telah dijelaskan diatas.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed other than above explained.

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko suku bunga. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are liquidity risk, credit risk and interest rate risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut menunjukkan jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

The table below summarizes the maturity profile of financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year	1-3 tahun/ 1-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Utang usaha	47.303.552	-	-	-	47.303.552	Trade payables
Utang lain-lain	5.488.115	-	-	-	5.488.115	Other payables
Beban akrual	65.690.863	-	-	-	65.690.863	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	6.033.295	-	-	-	6.033.295	Other current liabilities
Liabilitas sewa	40.418.552	-	552.448.212	-	592.866.764	Lease liabilities
Total	164.934.377	-	552.448.212	-	717.382.589	Total

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year	1-3 tahun/ 1-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Utang usaha	45.873.129	-	-	-	45.873.129	Trade payables
Utang lain-lain	13.692.011	-	-	-	13.692.011	Other payables
Beban akrual	42.362.703	-	-	-	42.362.703	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	47.165.162	-	-	-	47.165.162	Other current liabilities
Liabilitas sewa	42.127.118	-	552.448.212	-	594.575.330	Lease liabilities
Total	191.220.123	-	552.448.212	-	743.668.335	Total

Risiko kredit

Credit risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya.

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations.

Tabel berikut menyajikan eksposur posisi keuangan terkait risiko kredit.

The table below shows the Company's exposures related to credit risk.

31 Desember/December 31, 2024

31 Desember/December 31, 2023

	Total Bruto/ Gross Amount	Total Neto/ Net Amount	Total Bruto/ Gross Amount	Total Neto/ Net Amount	
Aset keuangan					Financial Assets
Lancar					Current
Bank dan deposito berjangka	810.385.413	810.385.413	670.082.914	670.082.914	Cash in bank and time deposits
Piutang usaha	115.528.909	80.209.035	96.672.346	61.624.447	Trade receivables
Aset kontrak	9.153.990	9.153.990	9.571.918	9.571.918	Contract assets
Tidak lancar					Non-current
Uang jaminan	3.154.996	3.154.996	3.154.996	3.154.996	Guarantee deposits
Total	938.223.308	902.903.434	779.482.174	744.434.275	Total

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Jumlah/Total
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	> 1 Tahun/ > 1 Year	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	> 1 Tahun/ > 1 Year	
31 Desember 2024					
Bank dan deposito berjangka	810.385.413	-	-	-	810.385.413
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Jumlah/Total
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	> 1 Tahun/ > 1 Year	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	> 1 Tahun/ > 1 Year	
31 Desember 2023					
Bank dan deposito berjangka	670.082.914	-	-	-	670.082.914

December 31, 2024
Cash in bank and time deposit

December 31, 2023
Cash in bank and time deposit

Dampak perubahan tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The effect of changes in the annual interest rates of time deposits to profit before income tax is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2024	2023	
Kenaikan 50 basis poin	3.445.833	3.454.167	Increase by 50 basis points
Penurunan 50 basis poin	(3.445.833)	(3.454.167)	Decrease by 50 basis points

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manages its capital to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Sewa

a. Lease

- 1) Pada 17 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang sewa atas aset-aset berupa lahan dan dermaga Pelindo pada area Pelabuhan Tanjung Priok. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 15 (lima belas) tahun dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2032.

Total pembayaran sewa sebesar Rp1.312.560.791 akan dibayarkan setiap 5 (lima) tahun dengan nilai pembayaran sebesar Rp320.590.261, Rp439.522.318 dan Rp552.448.212 masing-masing di tahun 2018, 2023 dan 2028. Perusahaan telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 28 Desember 2018 dan pembayaran kedua pada tanggal 3 Mei 2023.

- 2) Pada 9 Maret 2022, Perusahaan dan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menandatangani Perjanjian tentang Pendayagunaan Aset Tetap Lahan Eks Dharma Karya Perdana (DKP). Jangka waktu dalam Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.
- 3) Pada tanggal 6 November 2023, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Optimalisasi Aset Pelindo Regional 2 Tanjung Priok di Dermaga dan Lapangan Eks Presiden. Nilai kerja sama adalah *revenue sharing* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan pengoperasian lapangan. Jangka waktu dalam Perjanjian ini adalah selama 6 (enam) bulan dimulai dari tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 dan telah diperpanjang dari tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2024.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dengan Pelindo masih dalam tahap perpanjangan.

- 1) On December 17, 2018, the Company and Pelindo signed an Agreement regarding rent for Pelindo's assets in the form of land and piers in the Tanjung Priok Port area. This Agreement is valid for 15 (fifteen) years starting January 1, 2018 until December 31, 2032.

Total rent payment for the agreement amounting to Rp1,312,560,791 will be paid every 5 (five) years amounting to Rp320,590,261, Rp439,522,318 and Rp552,448,212 each in 2018, 2023 and 2028, respectively. The Company has made the first payment on December 28, 2018 and the second payment on May 3, 2023.

- 2) On March 9, 2022, the Company and Pelindo Regional 2 signed an Agreement on the utilization of assets of Eks Dharma Karya Perdana (DKP) field. This Agreement is valid for 2 (two) years starting from November 1, 2022 until October 31, 2023 and has been extended starting from November 1, 2023 and until October 31, 2025.
- 3) On November 6, 2023, the Company and Pelindo signed an Agreement on Cooperation in Optimizing Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Assets in the Dock and Ex Presiden Field. The value of the cooperation is a revenue sharing of 30% (thirty percent) of the field operating income. The term of this Agreement is 6 (six) months starting from 15 May 2023 until 14 November 2023 and has been extended starting from November 15, 2023, to November 14, 2024.

As of the completion date of the financial statements, the agreement between the Company with Pelindo is still in the process for extension.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN
(lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Sewa (lanjutan)

a. Lease (continued)

- 4) Pada 4 Desember 2019, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Perjanjian tentang pendayagunaan aset di Jalan Sindang Laut (Eks-PP) seluas 10.000 m2. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 4 (empat) tahun dimulai dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Perjanjian ini telah diperpanjang dan berlaku mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

- 4) On December 4, 2019, the Company and Pelindo signed an Agreement on the utilization of assets on Jalan Sindang Laut (Ex-PP) covering an area of 10,000 m2. This Agreement is valid for 4 (four) years starting November 1, 2018 until October 31, 2022. This agreement has been extended and valid from November 1, 2022 until October 31, 2024.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dengan Pelindo masih dalam tahap perpanjangan.

As of the completion date of the financial statements, the agreement between the Company with Pelindo is still in the process for extension.

- 5) Pada 30 September 2022, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Perjanjian tentang pendayagunaan aset di Jalan Sindang Laut (Eks-PP) seluas 13.274 m2. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025.

- 5) On September 30, 2022, the Company and Pelindo signed an Agreement on the utilization of assets on Jalan Sindang Laut (Ex-PP) covering an area of 13,274 m2. The term of the agreement is valid for 3 (three) years starting October 1, 2022 until October 1, 2025.

- 6) Pada 19 Agustus 2022, Perusahaan dan KBN menandatangani Perjanjian tentang sewa menyewa gudang terbuka/depo. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.

- 6) On August 19, 2022, the Company and KBN signed an Agreement regarding the lease of an open warehouse/depot. This Agreement is valid for 2 (two) years starting August 1, 2022 until July 31, 2024.

Perjanjian pekerjaan ini diubah dengan adanya addendum tanggal 30 Juli 2024. Perusahaan dan KBN menandatangani Perjanjian tentang sewa menyewa gudang terbuka/depo. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) bulan sehingga akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 31 Agustus 2024. Perjanjian ini kemudian telah diperpanjang dan berlaku mulai 1 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2026.

This work agreement was amended with an addendum dated July 30, 2024. The Company and KBN signed an Agreement regarding the lease of an open warehouse/depot. The duration of this agreement is 1 (one) month, which will automatically terminate by law on August 31, 2024. This agreement has then extended and valid from September 1, 2024, to August 31, 2026.

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya

b. Loading unloading services and other port services agreements

- 1) Pada tanggal 8 April 2021, Perusahaan dan PT Anugrah Permata Samudra menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), alat berat, bus & truck, spare parts di Terminal Internasional Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 29 April 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2026.
- 2) Pada tanggal 8 April 2021, Perusahaan dan PT Bandar Krida Jasindo menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), alat berat, bus & truck, spare parts di Terminal Internasional Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 25 April 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2026.
- 3) Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan dan PT Adimas Bahtera Harapan menandatangani berita acara kesepakatan tentang kerja sama pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), truck & bus, alat berat dan general cargo di Terminal Domestik Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 11 September 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan 9 Februari 2026.
- 4) Pada tanggal 10 Maret 2016, Perusahaan dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama Jasa Pelayanan Kepelabuhanan, Pelayanan Bongkar Muat dan Penyediaan Lahan di area Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 14 Oktober 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027.

- 1) On April 8, 2021, the Company and PT Anugrah Permata Samudra entered into agreement regarding service and handling of cargo *passenger car* (CBU), heavy equipment, bus & truck, spare parts in International Terminal of the Company. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on April 29, 2024. This agreement is valid from May 1, 2024 until April 30, 2026.
- 2) On April 8, 2021, the Company and PT Bandar Krida Jasindo entered into agreement regarding service and handling of cargo *passenger car* (CBU), heavy equipment, bus & truck, spare parts in International Terminal of the Company. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on April 25, 2024. This agreement is valid from May 1, 2024 until April 30, 2026.
- 3) On February 10, 2021, the Company and PT Adimas Bahtera Harapan entered into an agreement regarding the cooperation in the service and handling of cargo *passenger car* (CBU), trucks/busses, heavy equipments and general cargo in Company's Domestic Terminal. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on September 11, 2024. This agreement is valid from February 10, 2024 until February 9, 2026.
- 4) On March 10, 2016, the Company and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia entered into a Partnership Agreement regarding port handling services, stevedoring and yard providing within the Company's area. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on October 14, 2024. This agreement is valid from March 1, 2024 until February 28, 2027.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN
(lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

- 5) Pada tanggal 2 Mei 2016, Perusahaan dan PT Astra Daihatsu Motor menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dan Pelayanan Bongkar Muat di area Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali dilakukan addendum, terakhir pada tanggal 21 Juni 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.
- 6) Pada tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan dan PT Toyota-Astra Motor menandatangani Perjanjian tentang jasa pelayanan pelabuhan di area Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan 15 November 2026.
- 7) Pada tanggal 9 Juni 2022, Perusahaan dan PT Roro Samudra Putra Harmonimas menandatangani Perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), alat berat, *bus & truck* dan *general cargo* di Terminal Domestik Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 28 Juni 2024. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2026.
- 8) Pada tanggal 26 April 2022, Perusahaan dan IPC TPK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pengoperasian dermaga dan lapangan 107 dan 108 Pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 21 Maret 2024. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2025.
- 9) Pada tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan dan Pelindo Cabang Pontianak sepakat menandatangani Perjanjian tentang kerja sama pelayanan kapal ro-ro di Pelabuhan Pontianak. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 24 Juni 2024. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2025.

- 5) On May 2, 2016, the Company and PT Astra Daihatsu Motor entered into a partnership agreement regarding port handling services and stevedoring services within the Company's area. The Agreement has been amended several times, with last amendment on June 21, 2022 and valid until March 31, 2025.
- 6) On December 21, 2021, the Company and PT Toyota-Astra Motor entered into Agreement regarding port handling service within the Company's area. The agreement is valid for 5 (five) years starting from November 16, 2021 until November 15, 2026.
- 7) On June 9, 2022, the Company and PT Roro Samudra Putra Harmonimas, third party, entered into Agreement concerning service and handling of passenger car cargo (CBU), heavy equipment, bus & truck and general cargo at the Company's Domestic Terminal. The Agreement has been amended and extended several times, with last amendment on June 28, 2024 and valid until September 30, 2026.
- 8) On April 26, 2022, the Company and IPC TPK agreed to signed Agreement regarding Collaboration on Dock and Field Operations 107 and 108 Tanjung Priok Port. The Agreement has been amended and extended several times, with last amendment on March 21, 2024 and valid until March 31, 2025.
- 9) On May 31, 2021, the Company and the Pontianak Branch of Pelindo agreed to sign an Agreement on ro-ro vessel service cooperation at the Pontianak Port. The Agreement has been amended and extended several times, with last amendment on June 24, 2024 and valid until June 30, 2025.

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa
pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)**

**b. Loading unloading services and other port
services agreements (continued)**

- 10) Pada tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan dan PT Glovis Indonesia Logistic menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penanganan dan penumpukan kargo di Terminal Internasional. Kesepakatan ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.
- 11) Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo Regional I, menandatangani Perjanjian penyediaan jasa kepelabuhanan atas pengoperasian terminal ro-ro dan kendaraan di Pelabuhan Belawan. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 15 Mei 2024. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
- 12) Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan dan Pelindo Regional IV, menandatangani Perjanjian Kerja Sama penyediaan jasa kepelabuhanan atas pengelolaan dan pengoperasian terminal ro-ro dan kendaraan di Pelabuhan Makassar. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2024 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2026.
- 13) Pada tanggal 29 September 2023, Perusahaan dan PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT"), menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengoperasian dan pemeliharaan terminal ro-ro Semayang di Pelabuhan Balikpapan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025.

- 10) On December 27, 2021, the Company and PT Glovis Indonesia Logistic signed a cooperation agreement regarding the handling and stacking of cargo at the International Terminal. This agreement is valid from January 1, 2022 to December 31, 2023 and has been extended from January 1, 2024 to December 31, 2025.
- 11) On December 10, 2021, the Company and Region I of Pelindo, signed an Agreement for the provide of port services for the operation of the ro-ro terminal and vehicles at the Belawan Port. The Agreement has been amended and extended several times, with las tamendment on May 15, 2024 and valid until December 31, 2025.
- 12) On March 31, 2022, the Company and Pelindo Regional IV, signed a cooperation agreement to provide port services for the management and operation of ro-ro terminals and vehicles at Makassar Port. This agreement is valid for 2 (two) years from March 31, 2022 to March 31, 2024 and has been extended from April 1, 2024 to December 31, 2026.
- 13) On September 29, 2023, the Company and PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT"), signed an Agreement for the operation and maintenance of the ro-ro Semayang terminal in Balikpapan Port. This agreement is valid for 2 (two) years starting from October 1, 2023 until September 30, 2025.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN
(lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa
pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

b. Loading unloading services and other port
services agreements (continued)

- 14) Pada tanggal 8 Agustus 2023, Perusahaan dan PT Glovis Indonesia International menandatangani Perjanjian layanan operasi unit CBU Hyundai. Layanan tersebut diberikan di area eksternal dan area internal Perusahaan untuk unit CBU yang diterima dari pabrik sebelum didistribusikan ke tujuan akhir atau *dealer*. Nilai perjanjian adalah tarif layanan yang telah diatur dalam Kontrak Perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2025.
- 15) Pada tanggal 6 Agustus 2021, Perusahaan dan PT Suzuki Indomobil Sales menandatangani Perjanjian Kerja Sama jasa pelayanan kepelabuhanan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
- 16) Pada tanggal 28 Desember 2021, Perusahaan dan PT Isuzu Astra Motor menandatangani Perjanjian Kerja Sama jasa pelayanan kepelabuhanan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan telah diperpanjang sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- 17) Pada tanggal 5 April 2024, Perusahaan dan PT Honda Prospect Motor menandatangani Perjanjian Kerja Sama jasa pelayanan kepelabuhanan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 dan telah diperpanjang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025.

- 14) On August 8, 2023, the Company and PT Glovis Indonesia International signed an Agreement for the operation service of Hyundai CBU units. The services provided in the external area and internal area of the Company for CBU units received from the factory before being distributed to the final destination or dealer. The value of the agreement is the service rate that has been determined in the Agreement Contract. This agreement is valid for 1 (one) year starting from August 1, 2023, until July 31, 2024 and has been extended from September 1, 2024, to August 31, 2025.
- 15) On August 6, 2021, the Company and PT Suzuki Indomobil Sales signed a Cooperation Agreement for port service activities. This agreement is valid for 2 (two) years, starting from September 1, 2021, to August 31, 2023 and has been extended starting from September 1, 2023, to August 31, 2025.
- 16) On December 28, 2021, the Company and PT Isuzu Astra Motor signed a Cooperation Agreement for port service activities. This agreement is valid for 2 (two) years, starting from January 1, 2021, to December 31, 2023 and has been extended starting from January 1, 2024, to December 31, 2025.
- 17) On April 5, 2024, the Company and PT Honda Prospect Motor signed a Cooperation Agreement for port service activities. This Agreement is valid for 2 (two) months, starting from April 19, 2024, to June 18, 2024 and has been extended starting from June 19, 2024, to June 18, 2025.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN
(lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

18) Pada tanggal 3 Juni 2024, Perusahaan dan PT Tjahja Sakti Motor menandatangani Perjanjian Kerja Sama jasa pelayanan kepelabuhanan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026.

18) On June 3, 2024, the Company and PT Tjahja Sakti Motor signed a Cooperation Agreement for port service activities. This Agreement is valid for 2 (two) years, starting from June 3, 2024, to June 2, 2026.

c. Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik, Jawa Timur

c. Construction and Operation of Car Terminal in Gresik, East Java

Pada tanggal 9 April 2015, Perusahaan dan MIE mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik, Jawa Timur dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu Perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan Perusahaan dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

On April 9, 2015, The Company and MIE entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik, East Java by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 years with the funding portion for the Company and MIE amounting to 45% and 55%, respectively.

Pada bulan Maret 2016, MKO MTKI telah beroperasi secara komersial.

On March 2016, MKO MTKI has operated commercially.

d. Perjanjian pelaksanaan penugasan dan pembinaan pekerja Pelindo yang ditugaskan pada Anak Perusahaan di lingkungan Pelindo

d. Agreement on the assignment and development of Pelindo employees assigned to Subsidiaries of Pelindo

Pada tanggal 15 November 2019, Pelindo dan Perusahaan menandatangani Perjanjian tentang penugasan dan pembinaan pekerja Pelindo yang ditugaskan pada Perusahaan. Perjanjian ini terakhir kali diubah pada tanggal 5 Januari 2024 dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

On November 15, 2019, Pelindo and the Company signed an Agreement on the assignment and development of Pelindo workers assigned to the Company. This agreement was last amended on January 5, 2024, and is valid for 5 (five) years.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

28. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam segmen-segmen yang menyediakan jasa pelayanan terminal, jasa pelayanan barang, jasa rupa-rupa dan pengusaha fasilitas dan utilitas (Catatan 19).

Informasi yang menyangkut segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

28. SEGMENT INFORMATION

The Company operates and manages business in segments which provides terminal services, cargo services and miscellaneous, facilities and utilities services (Note 19).

Information concerning the Company's business segments are as follows:

31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/
December 31, 2024 and for the year then ended

	Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang/ Terminal and Cargo Services	Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusaha Fasilitas dan Utilitas/ Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	Non-segmen/ Non-segment	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen	796.750.145	27.845.691	-	824.595.836	Segment operating revenues
Beban pokok pendapatan	(474.310.844)	(2.767.726)	-	(477.078.570)	Cost of revenues
Laba bruto	322.439.301	25.077.965	-	347.517.266	Gross profit
Beban umum dan administrasi	-	-	(89.423.994)	(89.423.994)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lainnya	-	-	12.745.546	12.745.546	Other operating income
Beban operasi lainnya	-	-	(14.249.520)	(14.249.520)	Other operating expenses
Laba usaha	322.439.301	25.077.965	(90.927.968)	256.589.298	Income for operations
Pendapatan keuangan	-	-	45.050.723	45.050.723	Finance income
Beban keuangan	-	-	(31.793.535)	(31.793.535)	Finance expenses
Laba sebelum pajak penghasilan badan	322.439.301	25.077.965	(77.670.780)	269.846.486	Income before corporate income tax
Beban pajak penghasilan badan					Corporate income tax expenses
Kini				(59.779.205)	Current
Tangguhan				2.148.946	Deferred
Laba tahun berjalan				212.216.227	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain				-	Other comprehensive income
Total laba komprehensif tahun berjalan				212.216.227	Total comprehensive income for the year
<u>Aset dan Liabilitas</u>					
Aset segmen	964.471.601	13.486.167	872.780.570	1.850.738.338	Segment assets
Liabilitas segmen	513.372.308	-	60.137.639	573.509.947	Segment liabilities
<u>Informasi lainnya</u>					
Pengeluaran modal	16.661.876	-	-	16.661.876	Capital expenditure
Penyusutan dan amortisasi segmen	106.911.620	294.980	3.485.990	110.692.590	Segment depreciation and amortization

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

28. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

28. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi yang menyangkut segmen usaha
Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Information concerning the Company's business
segments are as follows: (continued)

31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/
December 31, 2023 and for the year then ended

	Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang/ Terminal and Cargo Services	Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas/ Miscellaneous, Facilities and Utilities Services	Non-segmen/ Non-segment	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen	711.762.647	23.442.293	-	735.204.940	Segment operating revenues
Beban pokok pendapatan	(406.004.450)	(2.723.461)	-	(408.727.911)	Cost of revenues
Laba bruto	305.758.197	20.718.832	-	326.477.029	Gross profit
Beban umum dan administrasi	-	-	(76.343.229)	(76.343.229)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lainnya	-	-	3.780.536	3.780.536	Other operating income
Beban operasi lainnya	-	-	(8.706.351)	(8.706.351)	Other operating expenses
Laba usaha	305.758.197	20.718.832	(81.269.044)	245.207.985	Income for operations
Pendapatan keuangan	-	-	38.036.797	38.036.797	Finance income
Beban keuangan	-	-	(46.424.352)	(46.424.352)	Finance expenses
Laba sebelum pajak penghasilan badan	305.758.197	20.718.832	(89.656.599)	236.820.430	Income before corporate income tax
Beban pajak penghasilan badan					Corporate income tax expenses
Kini				(50.707.949)	Current
Tangguhan				4.742.363	Deferred
Laba tahun berjalan				190.854.844	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain				-	Other comprehensive income
Total laba komprehensif tahun berjalan				190.854.844	Total comprehensive income for the year
<u>Aset dan Liabilitas</u>					<u>Assets and Liabilities</u>
Aset segmen	1.031.623.300	8.322.166	748.368.921	1.788.314.387	Segment assets
Liabilitas segmen	485.392.757	-	80.054.776	565.447.533	Segment liabilities
<u>Informasi lainnya</u>					<u>Other information</u>
Pengeluaran modal	27.344.318	-	-	27.344.318	Capital expenditure
Penyusutan dan amortisasi segmen	105.172.937	294.980	3.337.094	108.805.011	Segment depreciation and amortization

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

28. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut pendapatan berdasarkan segment geografis Perusahaan adalah sebagai berikut:

28. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's revenue based on geographical segments are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2024	2023
Pendapatan		
Tanjung Priok, Jakarta	757.775.914	687.408.848
Belawan, Sumatra Utara	19.636.171	23.183.271
Makassar, Sulawesi Selatan	18.406.579	15.667.631
Pontianak, Kalimantan Barat	15.617.991	6.316.366
Balikpapan, Kalimantan Timur	11.823.453	1.760.910
Banjarmasin, Kalimantan Selatan	864.097	-
Gresik, Jawa Timur	471.631	867.914
Total	824.595.836	735.204.940
	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Aset tidak lancar		
Jakarta	942.959.791	1.022.459.034
Gresik, Jawa Timur	6.342.984	6.733.459
Total	949.302.775	1.029.192.493

Revenue
Tanjung Priok, Jakarta
Belawan, North Sumatra
Makassar, South Sulawesi
Pontianak, West Kalimantan
Balikpapan, East Kalimantan
Banjarmasin, South Kalimantan
Gresik, East Java
Total
Non-current assets
Jakarta
Gresik, East Java
Total

29. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

29. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Significant activities which did not affect the Company's cash flows are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2024	2023
Penambahan aset melalui utang lain-lain yang terdiri atas:		
Aset tetap	3.612.645	12.134.421
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	13.190.423	10.593.834
Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:		

Addition of assets through other payable consisting of:
Fixed assets
Addition of right-of-use assets through lease liabilities

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

	Non- arus kas/Non-cash flow				
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Arus kas/ Cash flow	Pengakuan bunga/ Interest recognition	Lainnya/ Others	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Liabilitas sewa	401.606.801	(17.794.990)	31.793.535	13.051.141	428.656.487
					Lease liabilities
	Non- arus kas/Non-cash flow				
	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Arus kas/ Cash flow	Pengakuan bunga/ Interest recognition	Lainnya/ Others	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Liabilitas sewa	802.834.177	(458.245.562)	46.424.352	10.593.834	401.606.801
					Lease liabilities

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

REFERENSI SILANG SEOJK NO. 16 /SEOJK.04/2021: BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

CROSS-REFERENCE NO. 16/SEOJK.04/2021: FORMAT AND COMPLETING THE ANNUAL REPORT OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
I. Ketentuan Umum General Terms		
2. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:		
a.	Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	✓
b.	Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	✓
c.	Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	✓
d.	Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	✓
e.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	✓
f.	Direksi: Board of Directors:	
i)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
ii)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
g.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
i)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
ii)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
h.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
i)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	✓



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity.	✓
3. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	✓
4. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	✓
5. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	✓
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	✓
II. Bentuk Laporan Report Format	
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	✓
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	✓
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	✓
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	✓
III. Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	
a. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	
b. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	50-68
c. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	38-49
d. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	72-150
e. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	
f. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	274-516
g. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	
h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	
i. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	70-71

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
2.	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	
i)	pendapatan/penjualan; income/sales;	18
ii)	laba bruto; gross profit;	18
iii)	laba (rugi); profit (loss);	18
iv)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	N/a
v)	total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	18
vi)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	N/a
vii)	laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	18
viii)	jumlah aset; total assets;	20
ix)	jumlah liabilitas; total liabilities;	20
x)	jumlah ekuitas; total equity;	20
xi)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	21
xii)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	21
xiii)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	21
xiv)	rasio lancar; current ratio;	22
xv)	rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	21
xvi)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	22
xvii)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	26
b.	Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	26
i)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	26
	- jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding; - kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed; - harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and - volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	28



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
ii) dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding: • tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action; • rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; • jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action; • jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and • harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action; iii) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and iv) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	28 28 28
c. Laporan Direksi Board of Directors' Report	50-68
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
1. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing: a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies; c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies; 2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and 3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	52-53 57 58 59-60 60-61 61-63 63-64
d. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	38-49
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors; 2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and 3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	40-42 44 45-46

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	72-150
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	74, 80
2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	76
a. alamat; address;	✓
b. nomor telepon; telephone number;	✓
c. alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	✓
d. alamat situs web; website address;	✓
3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	77-80
4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	85-91
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	92-101
6. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	102-103
7. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	104-105
8. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	106
9. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	116-121
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	116-121
b. foto terbaru; recent photograph;	116-121
c. usia; age;	116-121
d. kewarganegaraan; nationality;	116-121
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	116-121
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	116-121
i) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	116-121
ii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	116-121



KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
iii)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	116-121
iv)	hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	116-121
v)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	122
10.	profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	108-113
a.	nama dan jabatan; name and position;	108-113
b.	foto terbaru; recent photograph;	108-113
c.	usia; age;	108-113
d.	kewarganegaraan; nationality;	108-113
e.	riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	108-113
f.	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	108-113
i)	dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	108-113
ii)	dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	108-113
iii)	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	108-113
iv)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	108-113
g.	hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	108-113
h.	pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	349
i.	perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	114
11.	dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	114
12.	jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	134-137



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
13. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	138
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	138
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	108-113, 116-121, 140
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	138
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	140
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	140
15. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	140-141
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	140-141
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	140-141
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	140-141
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	140-141
16. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	142
17. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	143
18. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	145
19. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbil hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	146
20. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	146, 434
a. nama dan alamat; name and address;	√
b. periode penugasan; assignment period;	√



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	✓
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	✓
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	✓
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.	
21. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	
a. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	196-273
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	198
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	
c. profitabilitas; profitability;	
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	221
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	222
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	225
c. ekuitas; equity;	230
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	231
e. arus kas; cash flows;	238
3. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	244
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	244
5. struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	248
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	249
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	249
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	250
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	269
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	251
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	
b. laba (rugi); profit (loss);	
c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	270
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	
b. laba (rugi); profit (loss);	
c. struktur modal (capital structure); capital structure;	
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	215
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	256
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	
e. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	
14. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	260
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing : a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction; b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction; c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any); d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction; e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information: i) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and ii) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income, and run regularly, repeatedly, and/or continuously; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added. h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added; i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	260
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	267
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any). a. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	267
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of: 1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	300-318
i) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	300-318
ii) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	300-318
• dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	302-303, 308, 312, 314, 317
2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;	324-326
b. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form	324-326
c. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	320
d. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	372-377
e. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	377
f. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	327-329
i) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	✓
ii) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	✓
g. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	332
h. prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	✓
i. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	✓
j. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	339
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	334
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	365-371



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	371
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	343-344
i) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	√
ii) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	√
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	356-359
i) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	√
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	√
iii) pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	√
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	347
i) prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	√
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	√
iii) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
• prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	359-360
• prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	360-364
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	√
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	√
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	√
• Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	N/A
» nama; name;	
» dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
» periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
» tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
» frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
- Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains: - nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership; 111, 386-388 - usia; age; 111, 387-388 - kewarganegaraan; nationality; 111, 387-388 - riwayat pendidikan; educational history; 111, 387-388 - riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on: 111, 386-388 - dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member; 386-387 - rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and 387 - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; 387-388 - periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members; 386-387 - pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee; 388 - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); 391-392 - kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and 388-390 - pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee; 390-391	
- komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing: 400 - nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership; 404-405 - usia; age; 111,113,405 - kewarganegaraan; nationality; 111,113,405 - riwayat pendidikan; educational history; 111,113,405 - riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on: 111,113,405 - dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member; 404 - rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and 111,113,405 - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; 111,113,405 - periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members; 404 - pernyataan independensi komite; statement of committee independence; 405 - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); 408	



KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;		402
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;		401-402
» kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;		406-407
» uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and		407
» dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:		N/A
1. alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and		N/A
2. pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;		N/A
• komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:		410-414
» nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;		121, 124-133, 411-413
» usia; age;		121, 124-133, 411-413
» kewarganegaraan; nationality;		121, 124-133, 411-413
» riwayat pendidikan; educational history;		121, 124-133, 411-413
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:		121, 124-133, 411-413
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;		121, 124-133, 411-413
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and		121, 124-133, 411-413
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;		121, 124-133, 411-413
» periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;		121, 124-133, 411-413
» pernyataan independensi komite; statement of committee independence;		413
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and		413
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;		410
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;		410
» kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and		414
» uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;		413
• Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:		415-420
» nama; name;		417
» domisili; domicile;		417



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	417
» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	417
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	417
» riwayat pendidikan; educational history;	417
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	419-420
» uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	419
• Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	421-431
» nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	423
» riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	423
» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	423
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	423
» kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	425
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	431
» struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	421-422
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	426-427
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	426
» uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	427-429
• uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	435-444
» pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	441
» tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	442
» pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	444
• sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	445-475
» gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	453-459
» jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	461-466
» tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	466
» pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	467



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
- perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain: » pokok perkara/gugatan; subject matter/claim; 476 » status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and 476 » pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company; 476 - informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any); 477 - informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes: 484-492 » pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics; 485-488 » bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and 488-489 » pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies; 485 - uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP); 493 Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain: » jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options; 493 » jangka waktu pelaksanaan; implementation period; 493 » persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and 493 » harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price; 493 - uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding: 493 » kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and 493 » pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy; 493 - uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing: 495-500 » cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report; 497-499 » perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers; 497-498 » penanganan pengaduan; complaint handling; 497-499 » pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and 497	



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	499-500
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	499-500
» tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	499-500
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	
• uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	506-510
• program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	507-509
» pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	509-510
» Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	
• penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	517
» pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	✓
» penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	✓
» Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	✓
viii) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at least includes:	
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance; g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any; h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and i. tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback; 2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter; 3. informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can: a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company; 4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report; 5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must: a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter; 6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and 7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report. 8. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	✓ ✓

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	√
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	70-71



Digitalization Through Optimizing Vehicle Ecosystem



PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Jl. Sindang Laut No. 100,
Cilincing - Jakarta Utara 14110
Phone: +62 21 4393 2251
Customer Service: +62 811 933 9930
Whistle Blowing: +62 21 4393 2251 ext 211
E-mail: corsec@indonesiacarterminal.co.id

